PEMERINTAH
KABUPATEN PASANGKAYU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2025

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

# RPJMD

# TAHUN 2025-2029




H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH
BUPATI

DR. HJ HERNY, S.SOS,.M.SI
WAKIL BUPATI



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Preraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pasangkayu;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkay RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasangkayu untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yakni Tahun 2025 sampai dengan 2045;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni Tahun 2025 dampai dengan Tahun 2029;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni Tahun 2025 dampai dengan Tahun 2029;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
    a. visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan:
a. RKPD;
b. Renstra PD; dan
c. Renja PD.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Daerah;
c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program PD dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. penutup.

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunna daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undagan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan mendasar, antar lain:
1. bencana alam;
2. dinamika politik;
3. krisis ekonomi;
4. konflik sosial budaya;
5. gangguan keamanan;
6. pemekaran Daerah; dan
7. perubahan kebijakan Nasional.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat persial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/b
Nip: 197911152008041001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekatan perencanaan substantif yakni: pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pengarustamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam ketepaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun yang dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam target dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025-2029

# DAFTAR SINGKATAN

AHH : Angka Harapan Hidup
AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKB : Angka Kematian Bayi
AKBa : Angka Kematian Balita
AKE : Angka Kecukupan Energi
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
APK : Angka Partisipasi Kasar
ASN : Aparatur Sipil Negara
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPS : Badan Pusat Statistik
BRIN : Badan Riset dan Inovasi Nasional
BTA : Basil Tahan Asam
COVID-19 : *Corona Virus Disease 2019*
D3TLH : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DBD : Demam Berdarah Dengue
DOTS : Directly Observed Treatment Shortcourse
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GRK : Gas Rumah Kacas
HAM : Hak Asasi Manusia
HGB : Hak Guna Bangunan
HIV : Human Immunodeficiency Virus
HLS : Harapan Lama Sekolah
HPL : Hak Pengelolaan Lahan
IDG : Indeks Pemberdayaan Gender
IDM : Indeks Desa Membangun
IDSD : Indeks Daya Saing Daerah
IID : Indeks Inovasi Daerah

IKA : Indeks Kualitas Air
IKAD : Indeks Akses Keuangan Daerah
IKL : Kualitas Tutupan Lahan
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKN : Ibukota Negara
IKU : Indeks Kualitas Udara
IPG : Indeks Pembangunan Gender
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
IPP : Indeks Pelayanan Publik
IRB : Indeks Reformasi Birokrasi
IRB : Indeks Risiko Bencana
K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KB : Keluarga Berencana
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIR : Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor
KK : Kepala Keluarga
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP : Kartu Tanda Penduduk
KUA-PPAS : Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
LINMAS : Perlindungan Masyarakat
MDPL : Meter Diatas Permukaan Laut
MI : Madrasah Ibtidayah
MTs : Madrasah Tsanawiah.
MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NBM : Neraca Bahan Makanan
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PDB : Produk Domestik Bruto
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PDRB-ADHB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB-ADHK : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PERBUP : Peraturan Bupati
PERDA : Peraturan Daerah
PERKADA : Peraturan Kepala Daerah

PILKADA : Pemilihan Kepala Daerah
PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
POSYANDU : Pos Pelayanan Terpadu
PPH : Pola Pangan Harapan
PSU : Prasarana Sarana Utilitas
PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat
PUSTU : Puskesmas Pembantu
RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja-PD : Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra-PD : Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
SD : Sekolah Dasar
SDGS : *Sustainable Development Goals*
SDM : Sumber Daya Manusia
SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
SKP : Satuan Kawasan Permukiman
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SSGI : Survei Status Gizi Indonesia
TBC : Tuberculosis
TKD : Transfer ke Daerah
TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

| | |
|---|---|
| TPB | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TPT | : Tingkat Pengangguran Terbuka |
| UCI | : Universal Child Immunization |
| UU | : Undang-Undang |
| WMK | : Wilayah Manajemen Kebakaran |
| WTP | : Wajar Tanpa Pengecualian |

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL (i)**

**DAFTAR SINGKATAN (iii)**

**DAFTAR ISI (vIi)**

**DAFTAR TABEL (viIi)**

**DAFTAR GAMBAR (xI)**

**BAB I PENDAHULUAN (1)**

1.1. Latar Belakang (1)

1.2. Dasar Hukum (3)

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (7)

1.4. Maksud dan Tujuan (9)

1.5. Sistematika Penulisan (10)

**BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH (11)**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah (11)

2.2. Gambaran Keuangan Daerah (222)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis (268)

**BAB III VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (289)**

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (289)

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah (299)

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (345)**

4.1. Program Perangkat Daerah (345)

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (384)

**BAB V PENUTUP (445)**

5.1. Kesimpulan Substansial (445)

5.2. Pedoman Transisi (445)

5.3. Kaidah Pelaksanaan (446)

5.4. Pengendalian dan Evaluasi (447)

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ..... 17

Tabel 2.2 Sebaran Spasial Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan . 17

Tabel 2.3 Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023 ..... 20

Tabel 2.4 Sebaran Spasial Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan ..... 21

Tabel 2.5. Daerah Rawan Bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023 ..... 25

Tabel 2.6. Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2023 ..... 38

Tabel 2.7 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2030 ..... 44

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... 63

Tabel 2.9 Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ..... 91

Tabel 2.10 Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ..... 91

Tabel 2.11. Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... 92

Tabel 2.12 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 228

Tabel 2.13 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 232

Tabel 2.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 (Miliar Rp) ..... 239

Tabel 2.15. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu ..... 240

Tabel 2.16. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu ..... 241

Tabel 2.17 Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 242

Tabel 2.18 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (Miliar Rp) ..... 245

Tabel 2.19 Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 246

Tabel 2.20 Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 (Miliar Rp) ..... 246

Tabel 2.21 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 (%) ..... 247

Tabel 2.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 248
Tabel 2.23 Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (Miliar Rp)..... 252
Tabel 2.24 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024..... 256
Tabel 2.25 Proyeksi Asumsi Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029..... 258
Tabel 2.26 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 (Miliar Rp) ..... 260
Tabel 2.27 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 (Miliar Rp)... 262
Tabel 2.28 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 (Miliar Rp) ..... 264
Tabel 2.29 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 (Miliar Rp) **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.30 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 (Miliar Rp)..... 267
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 291
Tabel 3.2 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029..... 292
Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 -2029..... 292
Tabel 3.4 Keselarasan Visi RPJM**D** Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Barat Tahun 2025-2029 ..... 293
Tabel 3.5 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029..... 293
Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 ..... 295
Tabel 3.7 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu..... 299
Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan dan Lokus Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Periode 2026-2030 ..... 305
Tabel 3.9 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu ..... 313
Tabel 3.10 Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu..... 315
Tabel 3.11 Penyelarasan Arah Pengembangan Wilayah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu..... 319
Tabel 3.12 Teknik Merumuskan Program Priortas RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029..... 322
Tabel 3.13 Penyesuaian Nomenklatur Program Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024..... 334

Tabel 3.14 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Indikator dan Target Kinerja 2029 ..... 337
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2029 346
Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pasangkayu 2025-2030 ..... 384
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pasangkayu 2025-2030 .... 385
Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Pasangkayu 2025-2030 ..... 388
Tabel 4.5 Penetapan Indikator SPM Kabupaten Pasangkayu 2025-2029 ..... 439
Tabel 4.6 Penetapan Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu 2025-2029 ..... 443

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ..... 9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu 12
Gambar 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan, 2024 ($Km^2$) ..... 12
Gambar 2.3. Jumlah Hari Hujan Kabupaten Pasangkayu, 2024 ..... 14
Gambar 2.4. Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Curah Hujan, 2024 ..... 14
Gambar 2. 5 Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu, 2022 dan 2045 ..... 18
Gambar 2. 6 Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu ..... 19
Gambar 2. 7 Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu ..... 22
Gambar 2. 8 Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu, 2022 dan 2045 ..... 23
Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu ..... 26
Gambar 2. 10 Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu ..... 27
Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu ..... 28
Gambar 2. 12 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu ..... 29
Gambar 2. 13 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu ..... 30
Gambar 2. 14 Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu ..... 31
Gambar 2. 15 Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu ..... 32
Gambar 2. 16 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 33
Gambar 2. 17 Komponen Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2023 ..... 33
Gambar 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 34
Gambar 2. 19 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Pasangkayu 2021-2024 ..... 35
Gambar 2. 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Menurut Komponen, 2019-2024 ..... 36
Gambar 2. 21 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 37
Gambar 2. 22 Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 37
Gambar 2. 23 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk, 2019 – 2024 ..... 39
Gambar 2. 24 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019 dan 2024 ..... 40
Gambar 2. 25 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu, 2019 dan 2024 ..... 41
Gambar 2. 26 Rasio penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 42

Gambar 2. 27 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasangkayu 2020-2024 ..... 42
Gambar 2. 28 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan, 2024 ..... 43
Gambar 2. 29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangakyu Tahun 2025-2030 ..... 44
Gambar 2. 30 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024 ..... 46
Gambar 2. 31 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019 – 2024 ..... 47
Gambar 2. 32 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Menurut Pengeluaran, 2019 – 2024 ..... 47
Gambar 2. 33 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 48
Gambar 2. 34 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia ..... 49
Gambar 2. 35 PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat ..... 50
Gambar 2. 36 Perkembangan TPT Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024 ..... 51
Gambar 2. 37 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024 ..... 52
Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 53
Gambar 2. 39 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... 53
Gambar 2. 40 Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 54
Gambar 2. 41 Usia Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... 55
Gambar 2. 42 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2024 ..... 56
Gambar 2. 43 Perbandingan Prevalensi Stunting di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... 57
Gambar 2. 44 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 58
Gambar 2. 45 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (*treatment coverage*) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*treatment success rate*) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 59
Gambar 2. 46 Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 60
Gambar 2. 47 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu 2020-2024 ..... 60
Gambar 2. 48 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu 2020-2024 ..... 61
Gambar 2. 49 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 ..... 62
Gambar 2. 50 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat ..... 63
Gambar 2. 51 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 64

Gambar 2. 52 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis di Kabupaten Pasangkayu 2024 ..... 65
Gambar 2. 53 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2023 ..... 66
Gambar 2. 54 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 ..... 67
Gambar 2. 55 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2020 – 2024 ..... 69
Gambar 2. 56 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, ..... 69
Gambar 2. 57 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, ..... 70
Gambar 2. 58 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 71
Gambar 2. 59 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 72
Gambar 2. 60 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 73
Gambar 2. 61 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2024 ..... 74
Gambar 2. 62 Perbandingan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Lainnya Tahun 2019-2024 ..... 74
Gambar 2. 63 TPAK Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2019 – 2024 ..... 75
Gambar 2. 64 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 76
Gambar 2. 65 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 77
Gambar 2. 66 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 78
Gambar 2. 67 Indeks Daya Saing Infrastruktur Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2024 ..... 79
Gambar 2. 68 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 80
Gambar 2. 69 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Komponen, 2021-2024 ..... 80
Gambar 2. 70 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 81
Gambar 2. 71 Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 82
Gambar 2. 72 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 – 2024 ..... 83
Gambar 2. 73 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 ..... 84
Gambar 2. 74 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 ..... 85
Gambar 2. 75 Indeks SPBE Kabupaten Pasangakayu, 2019-2024 ..... 86
Gambar 2. 76 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Pasangakayu dengan Kabupaten Lainnya ..... 86
Gambar 2. 77 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 87

Gambar 2. 78 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024.... 88
Gambar 2. 79 Persentase Capaian Aksi HAM di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024.... 88
Gambar 2. 80 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya Menurut Kabuapten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024 ..... 90
Gambar 2. 81 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 93
Gambar 2. 82 APK Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2024 ..... 94
Gambar 2. 83 APM Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2019-2024..... 96
Gambar 2. 84 APS Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2019-2024..... 97
Gambar 2. 85 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 98
Gambar 2. 86 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 99
Gambar 2. 87 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 99
Gambar 2. 88 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 100
Gambar 2. 89 Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024..... 101
Gambar 2. 90 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 102
Gambar 2. 91 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 103
Gambar 2. 92. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 104
Gambar 2. 93 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024..... 105
Gambar 2. 94 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024..... 106
Gambar 2. 95. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 107
Gambar 2. 96 Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 .... 108
Gambar 2. 97 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 109
Gambar 2. 98 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024.... 109
Gambar 2. 99. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 111
Gambar 2. 100 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024..... 112

Gambar 2. 101 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 113
Gambar 2. 102 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 115
Gambar 2. 103 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 116
Gambar 2. 104 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu ..... 116
Gambar 2. 105 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 117
Gambar 2. 106. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 118
Gambar 2. 107 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 119
Gambar 2. 108 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu ..... 120
Gambar 2. 109 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu ..... 121
Gambar 2. 110 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 122
Gambar 2. 111. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 123
Gambar 2. 112 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat ..... 124
Gambar 2. 113 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 125
Gambar 2. 114 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 126
Gambar 2. 115. Cakupan Puskesmas Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 127
Gambar 2. 116 Cakupan Pembantu Puskesmas Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 128
Gambar 2. 117 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 129
Gambar 2. 118. Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 130
Gambar 2. 119 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 131
Gambar 2. 120 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 132
Gambar 2. 121 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 133
Gambar 2. 122 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 134
Gambar 2. 123. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 134
Gambar 2. 124. Presentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022 ..... 135

Gambar 2. 125. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat ..... 136
Gambar 2. 126. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023 ..... 136
Gambar 2. 127 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 137
Gambar 2. 128. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 138
Gambar 2. 129 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 139
Gambar 2. 130 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 139
Gambar 2. 131. Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 141
Gambar 2. 132. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2021 ..... 142
Gambar 2. 133. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak yang Terjangkau Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 143
Gambar 2. 134 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2021 ..... 144
Gambar 2. 135 Cakupan Petugas Perlindungan Masayarakat (Linmas) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024. ..... 145
Gambar 2. 136. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 146
Gambar 2. 137 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 147
Gambar 2. 138 Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Pasangkayu, 2023-2024 (%) ... 148
Gambar 2. 139 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, 2017-2019 ..... 149
Gambar 2. 140 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 ..... 150
Gambar 2. 141 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dengan Status Pendidikan Tinggi ..... 151
Gambar 2. 142. Persentase Pekerja yang Pernah Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 ..... 152
Gambar 2. 143 Jumlah KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 ..... 152
Gambar 2. 144 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 ..... 154
Gambar 2. 145 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit ..... 155
Gambar 2. 146 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 155

Gambar 2. 147 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 156
Gambar 2. 148 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 157
Gambar 2. 149 TPAK Perempuan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Nasional, 2020-2024 ..... 157
Gambar 2. 150 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2023 ..... 158
Gambar 2. 151 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2023 ..... 160
Gambar 2. 152 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pasangkayu dan Daerah Lainnya, 2021-2024 ..... 161
Gambar 2. 153 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 .. 161
Gambar 2. 154 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024 ..... 162
Gambar 2. 155 Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024 ..... 163
Gambar 2. 156 Persentase Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024 ..... 164
Gambar 2. 157 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 165
Gambar 2. 158 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 165
Gambar 2. 159 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 166
Gambar 2. 160 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 166
Gambar 2. 161 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022 ..... 167
Gambar 2. 162 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 ..... 168
Gambar 2. 163 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 169
Gambar 2. 164 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019. 169
Gambar 2. 165 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu, 2018-2020 ..... 170
Gambar 2. 166 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023 ..... 170
Gambar 2. 167 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 171
Gambar 2. 168 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2021 ..... 172
Gambar 2. 169 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 173
Gambar 2. 170 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 173

Gambar 2. 171 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang menggunakan HP/telepon ..... 174
Gambar 2. 172 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir ..... 175
Gambar 2. 173 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Nasional, 2022-2024 ..... 178
Gambar 2. 174 Persentase Koperasi yang Aktif di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 179
Gambar 2. 175 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022 ..... 180
Gambar 2. 176 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 181
Gambar 2. 177 Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 181
Gambar 2. 178 Porsi Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 182
Gambar 2. 179 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 183
Gambar 2. 180 Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 183
Gambar 2. 181 Buku Kabupaten dalam Angka di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 184
Gambar 2. 182 Buku PDRBdi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 184
Gambar 2. 183 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi ..... 185
Gambar 2. 184 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 187
Gambar 2. 185 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 188
Gambar 2. 186 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 188
Gambar 2. 187 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 189
Gambar 2. 188 Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 189
Gambar 2. 189 Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 190
Gambar 2. 190 Kunjungan Wisata di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 191
Gambar 2. 191 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 192
Gambar 2. 192 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 193
Gambar 2. 193 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 194

Gambar 2. 194 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022 ..... 195
Gambar 2. 195 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022 ..... 195
Gambar 2. 196 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022 ..... 196
Gambar 2. 197 Jumlah Kelompok Tani yang Di Bina di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019 .. 196
Gambar 2. 198 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ... 197
Gambar 2. 199 Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 198
Gambar 2. 200 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 199
Gambar 2. 201 Net Ekspor di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 200
Gambar 2. 202 Produksi Perikanan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 200
Gambar 2. 203 Jumlah Kelompok Nelayan yang Di Bina di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019 ..... 201
Gambar 2. 204 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 202
Gambar 2. 205 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 202
Gambar 2. 206 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 203
Gambar 2. 207 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 204
Gambar 2. 208 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, 2019-2024 (%) ..... 205
Gambar 2. 209 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, 2019-2024 (%) ..... 206
Gambar 2. 210 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 207
Gambar 2. 211 Penetapan APBD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 207
Gambar 2. 212 Persentase Penurunan SILPA SSdi Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 208
Gambar 2. 213 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 209
Gambar 2. 214 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 209
Gambar 2. 215 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 210
Gambar 2. 216 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural ..... 211
Gambar 2. 217 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 212

Gambar 2. 218. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 213
Gambar 2. 219 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023 ..... 213
Gambar 2. 220 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasangkayu, 2020-2023 ..... 214
Gambar 2. 221 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024 ..... 216
Gambar 2. 222 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 216
Gambar 2. 223 Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024 ..... 218
Gambar 2. 224 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 218
Gambar 2. 225 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 219
Gambar 2. 226 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024 ..... 219
Gambar 2. 227 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 229
Gambar 2. 228 Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (Miliar Rp) 230
Gambar 2. 229 Realisasi Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 234
Gambar 2. 230 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (%) ..... 235
Gambar 2. 231 Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (%) ..... 236
Gambar 2. 232 Realisasi Belanja Modal dan Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 ..... 237

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan selesainya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dan ditetapkannya Pemenang PILKADA oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasangkayu serta dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, SH dan Dr. Hj. Herny, S.Sos, M.Si., maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu diharuskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029. Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten/Kota diperintahkan untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini tidak mencabut/membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD adalah rencana pembangunan lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Di dalam Inmedagri 2/2025, disebutkan bahwa semua daerah diharuskan menyelesaikan seluruh proses tahapan penyusunan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode masa jabatan 2025-2030 dilantik.

Dokumen RPJMD punya nilai strategis dalam pembangunan daerah, terutama karena di dalamnya menjabarkan "janji politik" yang disampaikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih saat masa kampanye. Janji politik tersebut dijabarkan ke dalam dokumen RPJMD dengan menggunakan tujuh pendekatan yaitu pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Ke tujuh pendekatan ini diuraikan, baik di dalam Inmendagri 2/25 maupun di dalam Permendagri 86/2017. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bisa dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Pengejawantahan dari semua pendekatan tersebut dapat dilihat dalam tahapan penyusunan dokumen RPJMD. Proses perumusan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 melibatkan serangkaian tahapan berurutan. Pertama, disusun Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai kerangka konseptual sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya, setelah pelantikan pemimpin daerah, dilakukan penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagai dasar kerja. Tahap berikutnya meliputi Konsultasi Publik untuk menampung masukan masyarakat terhadap Rancangan Awal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan menjadi Rancangan RPJMD. Proses dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) sebagai forum koordinasi multipihak, sebelum akhirnya dirumuskan Rancangan Akhir RPJMD. Tahap terakhir mencakup pengubahan dokumen menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan penetapannya sebagai produk hukum yang mengikat. Seluruh rangkaian proses ini wajib tuntas dalam kurun maksimal 6 (enam) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 memuat semua rencana pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang masalah dan kebutuhan daerah, maka penting memperhatikan beberapa dokumen penunjang. Saat menganalisis tentang isu lingkungan hidup, tim penyusun RPJMD akan memperhatikan dokumen KLHS RPJMD dan RAD TPB untuk memastikan rencana pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten Pasangkayu yang inklusif dan berkelanjutan. Semua program dalam RPJMD nantinya akan diimplementasikan dalam sebuah struktur ruang, sehingga tim penyusun juga harus memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu agar implementasi

rencana pembangunan lima tahun tidak bertentangan dengan rencana pemanfaatan ruang. Selain itu, beberapa dokumen sektoral lainnya seperti rencana investasi, rencana penanggulangan kemiskinan, rencana pengembangan industri, rencana pengembangan pariwisata, dll., juga diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 tak hanya sekadar dokumen formal yang disusun atas dasar perintah peraturan perundangan. Dokumen ini sangat penting dalam mensinergikan semua pemangku kepentingan di daerah dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, dokumen RPJMD juga menjadi instrumen penting bagi masyarakat yang telah memberikan mandat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu periode 2025-2030 untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam satu periode masa kepemimpinan.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2045;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 didasarkan pada dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 dan dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 yang mencakup visi pembangunan daerah jangka panjang, menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan tujuan pembangunan jangka panjang, sementara RPJMN dijadikan panduan agar kebijakan daerah selaras dengan prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan agar RPJMD yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga terintegrasi dengan kerangka pembangunan nasional, memastikan koordinasi dan konsistensi antara perencanaan daerah dan pusat.

Selain mempedomani, RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029, dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029, dan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW Kabupaten Pasangkayu, KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dll. Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat diperhatikan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pasangkayu untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pembangunan daerah antara provinsi dan kabupaten. Hal ini penting, mengingat pendekatan imperatif yang ditekankan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi agar semua target pembangunan nasional bisa dicapai. Provinsi Sulawesi Barat hanya bisa mencapai target yang telah diberikan pemerintah pusat jika Kabupaten Pasangkayu ikut berkontribusi.

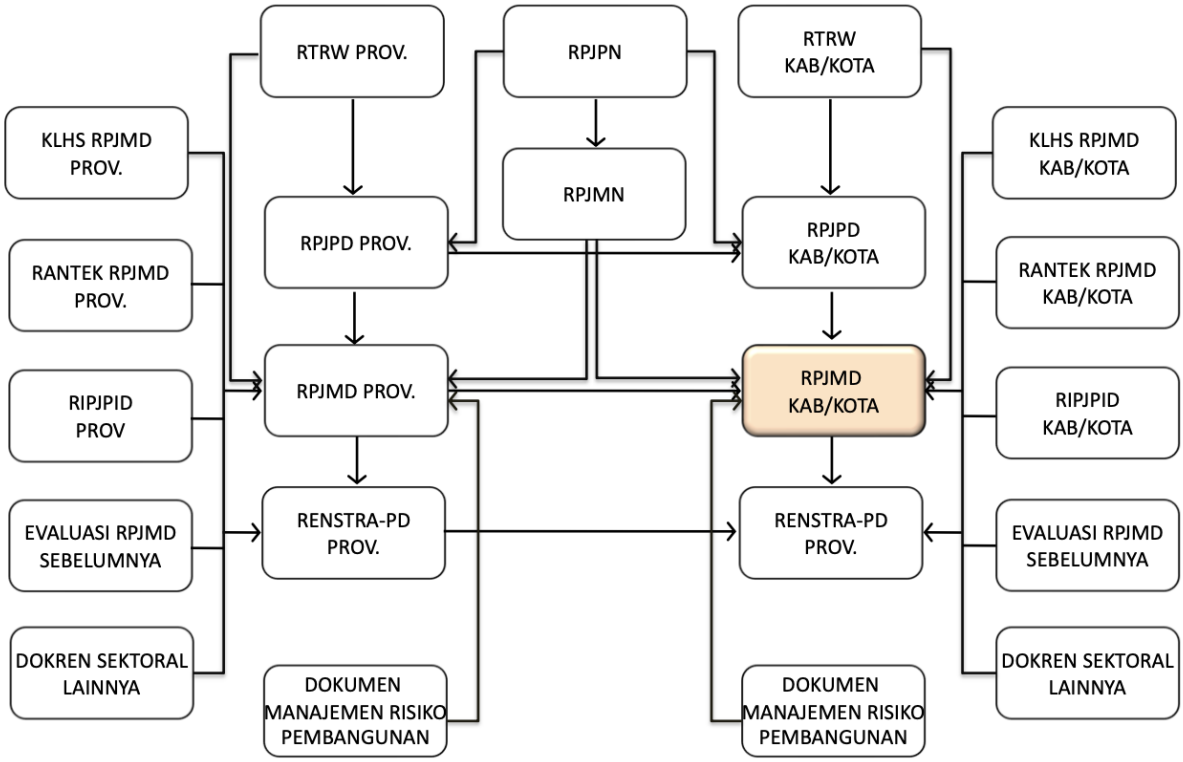
Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu juga menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan dokumen RTRW menjadi dasar spasial yang mengintegrasikan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW memberikan kerangka hukum dan teknis tentang alokasi penggunaan lahan, perlindungan kawasan lindung, serta pengembangan infrastruktur dan permukiman, sehingga RPJMD harus selaras dengannya untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, berkelanjutan, dan tidak melanggar regulasi tata ruang. Tanpa memperhatikan RTRW, RPJMD berisiko menciptakan ketimpangan spasial, eksploitasi sumber daya tanpa kontrol, atau konflik pemanfaatan lahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Integrasi kedua dokumen ini juga memastikan koordinasi antar sektor, optimalisasi potensi wilayah, mitigasi bencana, serta perlindungan kepentingan publik jangka panjang, sehingga pembangunan daerah tetap seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Beberapa dokumen sektoral lainnya seperti KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029. Dokumen KLHS RPJMD berkaitan dengan isu tentang lingkungan yang harus menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan daerah. Begitupun dengan beberapa isu pentingnya lainnya seperti pembangunan pariwisata, penanaman modal, pembangunan industri, penanggulangan kemiskinan daerah, dan RAD TPB. Semua dokumen sektoral ini punya arah kebijakan dan

program yang menjadi perhatian dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pasangkayu yang juga harus disusun secara simultan dengan RPJMD. Dokumen Renstra PD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selain itu, RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama periode 2025-2029 dimana RKPD selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya




## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029
2. Menjabarkan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 ke dalam rencana pembangunan daerah lima tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2025-2029.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menjadi instrumen bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu.

## 1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Umum Daerah,** yang memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu strategis daerah.

**Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah,** yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

**Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, yang memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Bab V Penutup**, yang memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

#### 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Secara historis, Kabupaten Pasangkayu sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara dimana merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2003 yang pada saat itu status Kabupaten tersebut masih termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan yang diresmikan melalui UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Selajutnya, perubahan nama dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017. Kabupaten Pasangkayu juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan cakupan wilayah yang relatif luas yaitu mencapai sekitar 3.043,75 $km^2$ atau sekitar 18 persen dari total luas Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Mamuju.

**a. Batas Wilayah**

Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur. Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, luas area Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 $km^2$, yang terdiri dari 12 kecamatan, 59 desa, dan 4 kelurahan. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

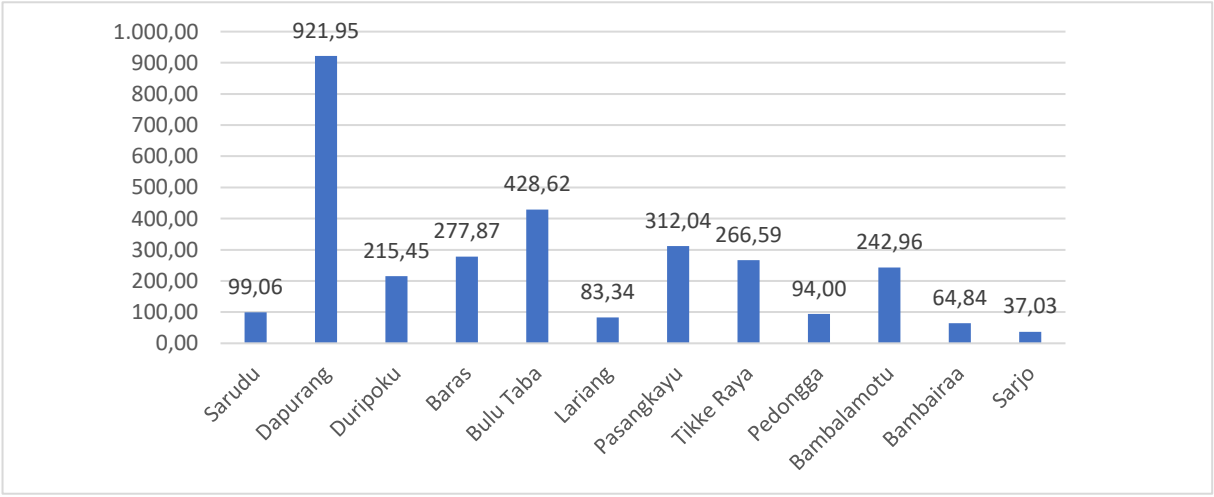
- Utara : Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
- Selatan : Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah
- Barat : Selat Makassar
- Timur : Kabupaten Donggala

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu




Sumber: BPS

Gambar 2.2.
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan, 2024 (Km²)




Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu: Sarudu, Dapurang, Duripoku, Baras, Bulu Taba, Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Tikke Raya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Dari 12 kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Dapurang (921,95 $km^2$) atau sekitar 30,29 persen dari total wilayah Kabupaten Pasangkayu dan kecamatan terkecil adalah Sarjo (37,03 $km^2$). Sementara itu, dilihat dari jarak kantor kecamatan ke ibukota kabupaten, kecamatan yang terjauh adalah Duripoku, yaitu sejauh 102 km, sedangkan kecamatan terdekat adalah Kabupaten Pasangkayu, yang juga merupakan ibukota kabupaten. Jika dibandingkan dengan luas kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu menempati urutan terluas kedua setelah Kabupaten Mamuju.

**b. Topografi**

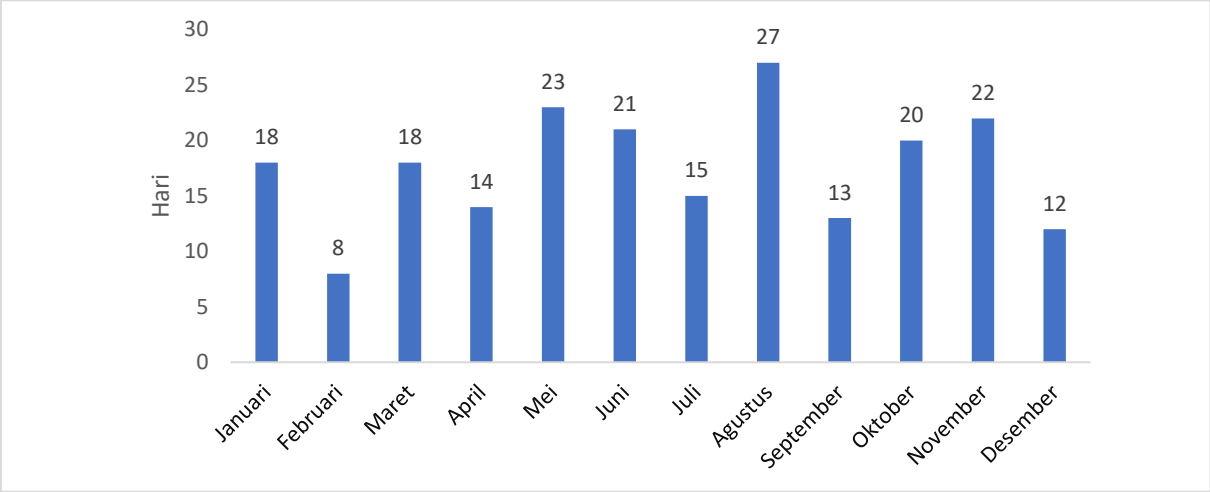
Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam dimana didominasi oleh lahan datar dan sedikit berbukit. Ketinggian wilayah ini berada pada 0-2.175 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kelerengan lahan yang didominasi oleh datar (0-2%) sebesar 36,59 persen, diikuti oleh curam (>40%) sebesar 25,04 persen. Faktor kelerengan lahan ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan.

Dari sisi ketinggian dari permukaan laut, wilayah di Kabupaten Pasangkayu memiliki ketinggian yang bervariasi dari yang terendah, yaitu Kecamatan Pasangkayu (4 mdpl), sedangkan yang tertinggi adalah Kecamatan Bulu Taba (38 mdpl). Dalam kaitannya dengan topografi yang relatif datar, maka pada musim hujan sering menimbulkan masalah dalam bentuk daerah genangan. Hidrologi fisik dari wilayah dapat tergambar dari ketinggian air muka tanah dan keberadaan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Wilayah Kecamatan Pasangkayu cukup dikenal dengan adanya sungai-sungai besar membentang dalam wilayah ini, yakni sebanyak 3 sungai besar, terdiri dari: Sungai Babia, Sungai Sulu, dan Sungai Kabupaten Pasangkayu. Sementara ketinggian air muka tanah secara umum di wilayah ini berada pada kisaran 1,0 - 2,0 meter.

**c. Iklim**

Berdasarkan Tipe klasifikasi Schmidth-Fergusson, iklim di Kabupaten Pasangkayu termasuk dalam golongan tipe iklim A1, sedangkan tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman digolongkan tipe iklim A. Dengan klasifikasi tersebut, maka Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi pengembangan untuk sektor pertanian dengan berbagai komoditasnya. Kabupaten Pasangkayu beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga September, sedangkan musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret. Pada tahun 2024, jumlah hari hujan terbanyak di Kabupaten Pasangkayu terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebanyak 27 hari hujan. Sementara itu, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 8 hari hujan.

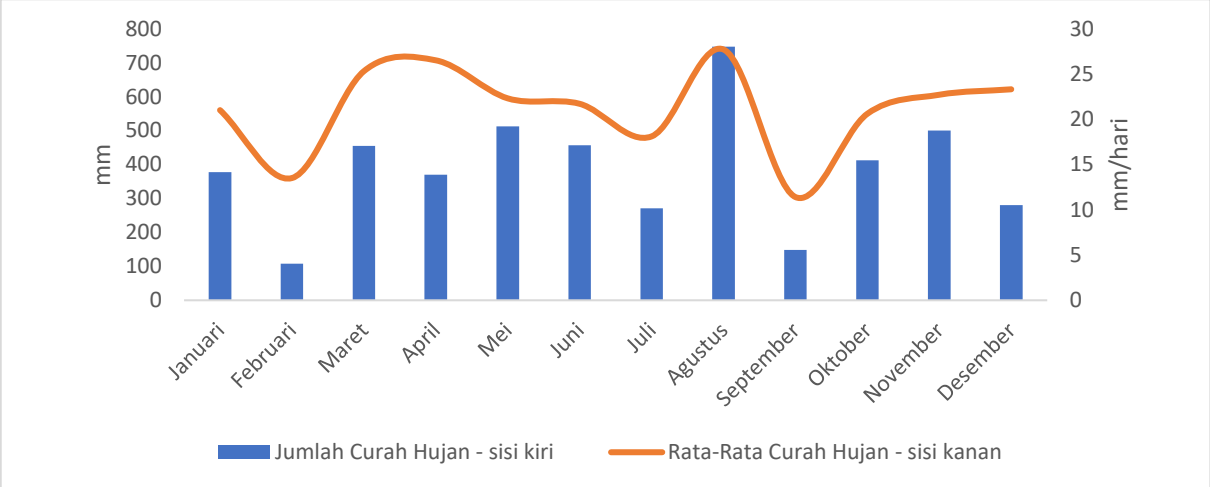
Gambar 2.3.
Jumlah Hari Hujan Kabupaten Pasangkayu, 2024




Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

Jumlah curah hujan tertinggi tahun 2024 juga terjadi di bulan Agustus, yaitu sebesar 746,6 mm, dengan rata-rata hujan mencapai 27,7 mm/hari. Kondisi ini relatif lebih tinggi dibanding tahun 2019, dimana curah hujan berkisar antara 527 mm dengan rata-rata curah hujan sebesar 27,7 mm/hari. Sementara itu, jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 107,8 mm, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan tercatat 11,4 mm/hari.

Gambar 2.4.
Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Curah Hujan, 2024




Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

**d. Kondisi Batuan**

Dalam proses pembentukan batuan di Pulau Sulawesi cukup kompleks. Pulau ini terbentuk akibat pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Di pulau ini terdapat tiga mandala geologi, yaitu Mandala Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, dan Banggai Sula. Kabupaten Pasangkayu termasuk dalam Mandala Sulawesi Barat. Dengan

karakteristik tersebut, Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam jenis batuan, dimana terdapat sejumlah formasi, yaitu:

a. Formasi Kabupaten Pasangkayu, terdiri dari perselingan batupasir dengan batulempung, setempat bersisipan dengan konglomerat dan batugamping. Formasi ini tersebar di area ibukota Kabupaten Pasangkayu, yaitu bagian barat wilayah Kecamatan Pasangkayu dan di bagian selatan memanjang dari sekitar Sungai Lariang, yaitu di bagian tengah wilayah Kecamatan Baras memanjang dan melebar hingga ke bagian tengah wilayah Kecamatan Sarudu di Selatan.
b. Formasi Lariang, terdiri dari perselingan konglomerat dengan batu pasir. Formasi ini sebanding dengan Molasa Celebes yang bercirikan batuan klastika dengan butir yang lebih halus.
c. Endapan aluvial, terdiri dari endapan aluvial sungai, endapan rawa, endapan aluvial pantai, yang penyebarannya meliputi dataran rendah di pantai Barat Kabupaten Pasangkayu. Areanya memanjang dari selatan di sekitar muara Sungai Karossa hingga dataran rendah di utara di sekitar muara Sungai Lariang.

#### 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di pertanian. Khusus di sub-sektor pertanian, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi unggulan meliputi tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Adapun pada tanaman perkebunan, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi unggulan yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi peternakan, seperti sapi, kerbau, kamping dan ayam, serta pengembangan tanaman hortikultura, seperti jeruk dan sayuran. Luas area tanaman perkebunan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 terdiri dari kelapa sawit seluas 57.843 hektar. Di samping Kelapa Sawit, luas area perkebunan yang mempunyai kontribusi yang paling besar adalah Kakao seluas 12.807 hektar, serta Kelapa dengan seluas 4.7534 hektar. Peternakan di Pasangkayu terdiri dari ternak dan unggas. Ternak besar yang paling banyak pada tahun 2024 adalah sapi potong dengan jumlah 14.750 ekor. Jenis unggas didominasi oleh ayam potong sebanyak 547.694 ekor. Total produksi perikanan tangkap menurut jenis bintang laut pada 2024 adalah 8.500,52 ton.

Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi untuk pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jenis industri yang berpotensi dikembangkan di antaranya adalah industri pangan dan industri agro. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak tujuh perusahaan skala besar/sedang yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu yang mempekerjakan sebanyak 815 tenaga kerja dan menghasilkan output produksi senilai Rp7.360,03 milyar. Saat ini juga sudah terdapat upaya untuk mendorong industrialisasi melaui

pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tikke Raya yang berpotensi didorong untuk menjadi Kawasan Industri (KI). Keberadaan kawasan industri ini akan semakin penting seiring dengan peran dari Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

#### 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Deskripsi dari Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup D3TL merupakan perbandingan antara ketersediaan pelayanan ekosistem dengan kebutuhan masyarakat. Daya dukung lingkungan (D3TL) dimulai dari klasifikasi karateristik ekoregion yang terdiri dari bentang lahan, tipe vegetasi alami dan karateristik penutupan lahan. Data tersebut menjadi bahan pembuatan dan perhitungan peta layanan atau kinerja jasa ekosistem. Selanjutnya layanan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air menjadi dasar penentuan status D3TL indikatif. D3TL merupakan suatu gambaran kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan intensitas pembangunan apakah masih dapat dikembangkan dan ditambahkan. Selain itu dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan.

**Daya Dukung Daya Tampung Pangan**

Daya dukung daya tampungan pangan menunjukkan selisih penyedian pangan suatu wilayah dengan kebutuhan penduduk akan pangan pada wilayah tersebut. Daya dukung penyediaan pangan sendiri merupakan deskripsi suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Pengukuran daya dukung penyediaan pangan dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan mencakup pertimbangan terhadap jenis pangan produktivitas dan kualitas Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pangan di Kabupaten Pasangkayu dari data Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam satuan energi (kkal) berdasarkan jenis pangan yang tersedia didalam wilayah.

Selanjutnya kebutuhan penduduk didasarkan pada perhitungan kebutuhan pangan individu, dengan mempertimbangkan standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.110 kalori per hari per kapita yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Pasangkayu digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pasokan pangan dalam wilayah tersebut.

Tabel 2.1
Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

| No. | Kecamatan | Jumlah Populasi (jiwa) | Ketersediaan Pangan (kkal) | Kebutuhan Pangan (kkal) | Ambang Batas Penduduk (jiwa) | Status Ambang Batas Penduduk (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambaira | 10.941 | 6.757.651.883 | 8.386.276.500 | 8.642 | -2.299 |
| 2 | Bambalamotu | 21.571 | 20.877.647.305 | 16.534.171.500 | 26.750 | 5.179 |
| 3 | Baras | 23.689 | 28.202.238.611 | 18.157.618.500 | 36.033 | 12.344 |
| 4 | Bulu Taba | 12.668 | 42.653.063.725 | 9.710.022.000 | 54.681 | 42.013 |
| 5 | Dapurang | 18.602 | 83.961.739.447 | 14.258.433.000 | 108.032 | 89.430 |
| 6 | Duripoku | 6.854 | 21.031.619.845 | 5.253.591.000 | 27.028 | 20.174 |
| 7 | Lariang | 8.221 | 9.662.111.070 | 6.301.396.500 | 12.311 | 4.090 |
| 8 | Pasangkayu | 36.888 | 27.682.294.377 | 28.274.652.000 | 35.359 | -1.529 |
| 9 | Pedongga | 14.221 | 10.549.319.594 | 10.900.396.500 | 13.461 | -760 |
| 10 | Sarjo | 8.970 | 4.567.220.490 | 6.875.505.000 | 5.831 | -3.139 |
| 11 | Sarudu | 16.722 | 10.685.707.495 | 12.817.413.000 | 13.645 | -3.077 |
| 12 | Tikke Raya | 19.080 | 25.891.555.887 | 14.624.820.000 | 32.943 | 13.863 |
| **Total** | | **198.427** | **292.522.169.730** | **152.094.295.500** | **374.716** | **176.289** |

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Tabel 2.2
Sebaran Spasial Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

| No. | Kecamatan | Status Daya Dukung Pangan (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | Belum Melampaui | Sudah Melampaui |
| 1 | Bambaira | 3.768,55 | 2.282,42 |
| 2 | Bambalamotu | 15.956,22 | 4.335,41 |
| 3 | Baras | 22.902,07 | 5.344,77 |
| 4 | Bulu Taba | 42.426,27 | 2.012,32 |
| 5 | Dapurang | 85.555,73 | 5.639,54 |
| 6 | Duripoku | 18.717,97 | 1.372,50 |
| 7 | Lariang | 5.163,44 | 2.738,23 |
| 8 | Pasangkayu | 19.963,14 | 7.426,84 |
| 9 | Pedongga | 6.138,02 | 2.571,65 |
| 10 | Sarjo | 1.948,05 | 1.832,79 |
| 11 | Sarudu | 6.444,50 | 3.403,87 |
| 12 | Tikke Raya | 19.364,02 | 4.964,33 |
| **Total** | | **248.347,98** | **43.924,68** |

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

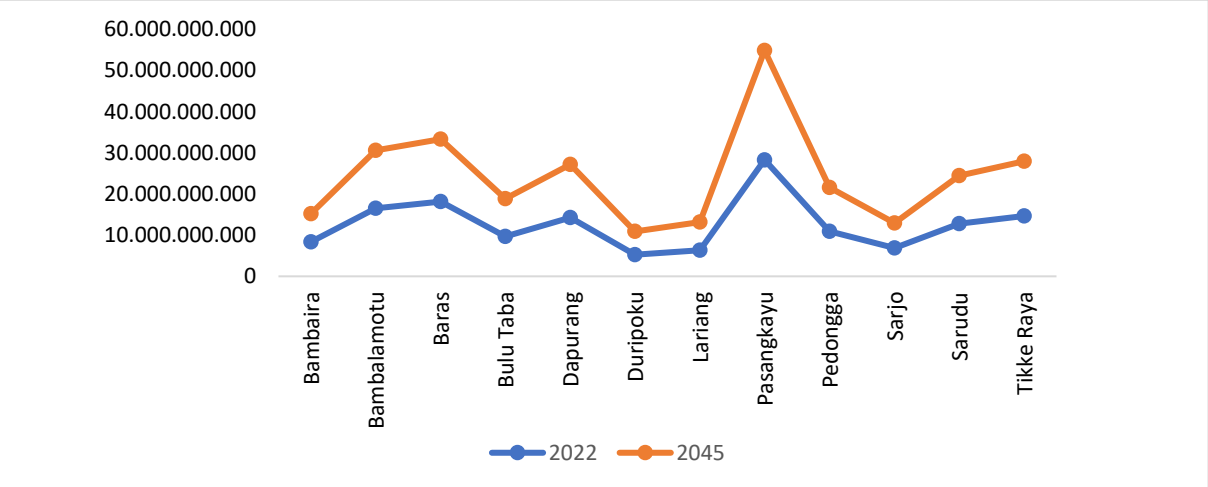
Secara umum, status Daya Dukung Daya Tampung pangan di Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi belum terlampaui. Hal tersebut terlihat dari penyediaan pangan saat ini berada pada angka sekitar 292,5 miliar kkal, sedangkan kebutuhan hanya sebesar 152 miliar kkal

berdasarkan jumlah penduduk sebesar 198.427 jiwa. Sehingga kondisi pangan Kabupaten Pasangkayu masih surplus sekitar 140 miliar kkal yang setara dengan 183 ribu jiwa penduduk. Namun hal perlu menjadi perhatian, bahwa terdapat beberapa beberapa kecamatan yang memiliki kebutuhan pangan yang lebih besar dibandingan penyediaan seperti Kecamatan Bambaira, Pedongga, Sarjo, Sarudu, dan Pasangkayu sebagai ibukota kabupaten.

Secara spasial, status daya dukung pangan cukup baik di Kabupaten Pasangkayu dengan persentase sekitar 15 persen yang terlampaui. Beberapa Kecamatan pun perlu menjadi perhatian status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui cukup luas yaitu sekitar 48 persen dari luas wilayah. Kecamatan Lariang, dan Sarudu memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sekitar 34 persen dari luasan kecamatan tersebut. Adapun Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sebesar 27 persen dari luasan wilayahnya.

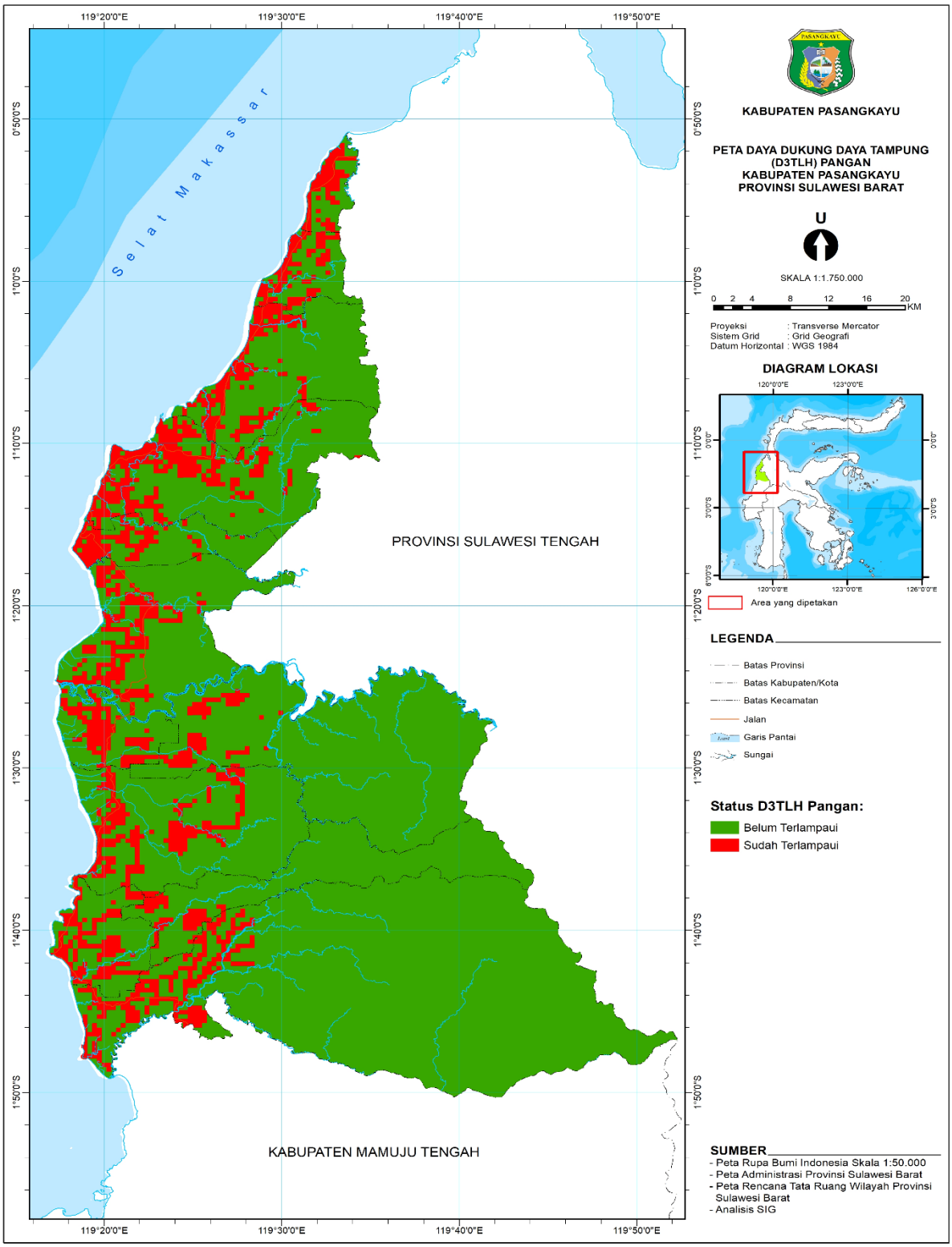
Perlu menjadi perhatian bahwa pertambahan jumlah penduduk yang pesat di masa yang akan datang mengakibatkan permintaan pangan yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan datang. Tren pun telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk semakin bertambah pada setiap wilayah di Kabupaten Pasangkayu. Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatan kebutuhan pangan akan terjadi wilayah padat penduduk seperti ibukota kabupaten.

Gambar 2. 5
Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu, 2022 dan 2045




Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Gambar 2. 6
Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu




**Daya Dukung Daya Tampung Air**

Daya dukung penyediaan air menggambarkan kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk menyediakan pasokan air yang cukup dan bermutu bagi penduduk yang membutuhkannya.

Kehadiran kapasitas ini sangat krusial dalam menjamin ketersediaan air yang memadai untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk rumah tangga, sektor komersial, industri, pertanian, dan bidang lainnya di suatu daerah. Evaluasi status daya dukung penyediaan air melibatkan perbandingan antara perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Penyediaan air diperoleh berdasarkan perhitungan identifikasi potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai yang diperoleh dari data debit air setiap DAS, data air prmukaan, dan potensi air tanah. Nilai potensi penyediaan air tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi geografis dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk mengalokasikan potensi air. Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketersediaan air di Kabupaten Pasangkayu, sehingga hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi yang lebih akurat dan relevan.

Tabel 2.3
Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Populasi (jiwa) | Ketersediaan Air ($m^3$) | Kebutuhan Air Penduduk ($m^3$) | Kebutuhan air Lahan ($m^3$) | Kebutuhan air Keseluruhan ($m^3$) | Ambang Batas Penduduk (jiwa) | Status Ambang Batas Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambaira | 10.941 | 16.887.312 | 8.752.800 | 24.735.250 | 33.488.050 | -9.793 | -20.734 |
| 2 | Bambalamotu | 21.571 | 52.657.492 | 17.256.800 | 66.071.229 | 83.328.029 | -16.673 | -38.244 |
| 3 | Baras | 23.689 | 70.655.501 | 18.951.200 | 135.477.306 | 154.428.506 | -80.959 | -104.648 |
| 4 | Bulu Taba | 12.668 | 108.452.105 | 10.134.400 | 74.555.940 | 84.690.340 | 42.573 | 29.905 |
| 5 | Dapurang | 18.602 | 209.661.144 | 14.881.600 | 98.355.403 | 113.237.003 | 138.759 | 120.157 |
| 6 | Duripoku | 6.854 | 52.134.020 | 5.483.200 | 38.020.761 | 43.503.961 | 17.655 | 10.801 |
| 7 | Lariang | 8.221 | 23.361.242 | 6.576.800 | 57.492.966 | 64.069.766 | -42.662 | -50.883 |
| 8 | Pasangkayu | 36.888 | 70.141.158 | 29.510.400 | 134.852.069 | 164.362.469 | -80.829 | -117.717 |
| 9 | Pedongga | 14.221 | 25.529.755 | 11.376.800 | 64.277.396 | 75.654.196 | -48.422 | -62.643 |
| 10 | Sarjo | 8.970 | 11.624.312 | 7.176.000 | 18.606.083 | 25.782.083 | -8.717 | -17.687 |
| 11 | Sarudu | 16.722 | 26.208.298 | 13.377.600 | 66.083.230 | 79.460.830 | -49.843 | -66.565 |
| 12 | Tikke Raya | 19.080 | 64.848.452 | 15.264.000 | 175.328.361 | 190.592.361 | -138.084 | -157.164 |
| **Total** | | **198.427** | **732.160.790** | **158.741.600** | **953.855.993** | **1.112.597.593** | **-276.995** | **-475.422** |

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk dan kebutuhan air domestik dihitung dengan mengacu pada Permen LHK No.17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam pembangunan suatu daerah. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air tutupan lahan juga perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air suatu daerah. Bila angka kebutuhan melampaui persediaan berarti daya dukung daya tampung terlampaui, sebaliknya bila kebutuhan lebih kecil

dari persediaan maka diperoleh informasi status daya dukung daya tampung belum terlampaui. Nilai potensi air yang digunakan dalam satuan energi ($m^3$) yang tersedia di dalam wilayah.

Status daya dukung daya tampung air di Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi telahi terlampaui. Hal tersebut terlihat dari penyediaan air saat ini berada pada angka sekitar 732 juta $m^3$, sedangkan kebutuhan sekitar 1,1 miliar $m^3$. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan air penduduk sebesar 153 juta $m^3$, dan kebutuhan air dari lahan sebesar 953 juta $m^3$. Status Daya dukung daya tampung air yang telah terlampaui hamipr terjadi diseluruh kecamatan di Kabupate Pasangkayu, kecuali Kecamatan Bulu Taba, dapurang, dan Durpoku.

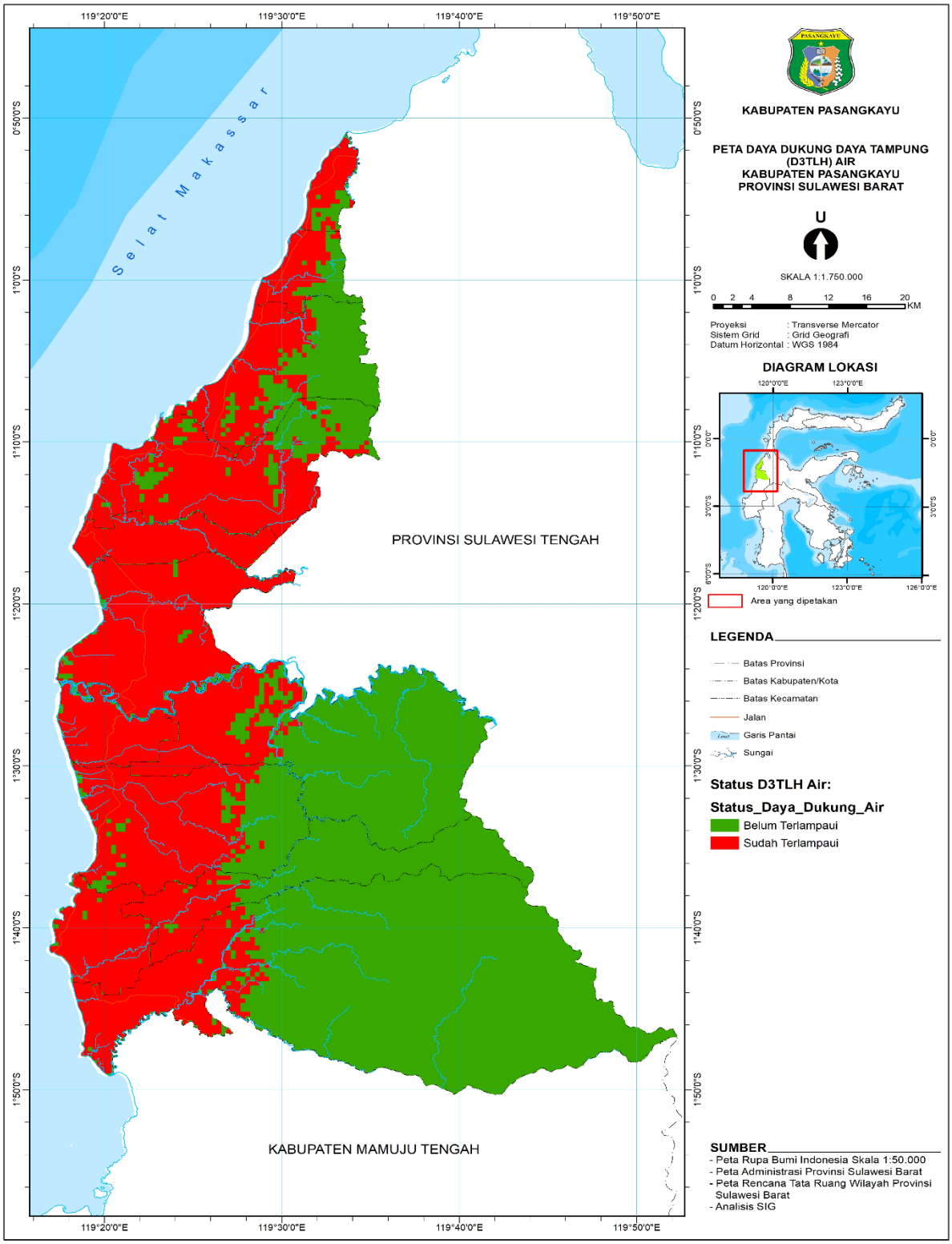
Secara kewilayahan, status daya dukung air yang terlampaui Kabupaten Pasangkayu telah mencapai hampir 47 persen dari luas wilayah daratan Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Lariang, Pedongga, Sarudu, dan Tikke Raya memiliki wilayah lebih dari 90 persen yang berstatus daya dukung airnya terlampaui. Hal tersebut dipengaruhi karena Sebagian besar wilayahnya berada pada daerah pesisir, dan jumlah penduduk. Kecamatan Bambaira, Baras, Sarjo, dan Pasangkayu sebagai ibukota Kabupaten memiliki status daya dukung airnya terlampaui berada pada kisaran 65-75 persen dri luas wilayahnya. Adapun Kecamatan Bulu Taba, Dapurang, dan Duripoku memiliki status daya dukung air yang terlampaui kurang dari 30 persen dari luas wilayahnya.

Tabel 2.4
Sebaran Spasial Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Status Daya Dukung Air (Ha) | |
|---|---|---|---|
| | | Belum Melampaui | Sudah Melampaui |
| 1 | Bambaira | 2.077,51 | 3.973,47 |
| 2 | Bambalamotu | 10.171,28 | 10.120,35 |
| 3 | Baras | 8.517,82 | 19.729,02 |
| 4 | Bulu Taba | 33.358,78 | 11.079,81 |
| 5 | Dapurang | 76.915,62 | 14.279,66 |
| 6 | Duripoku | 14.276,31 | 5.814,15 |
| 7 | Lariang | 317,31 | 7.584,36 |
| 8 | Pasangkayu | 7.060,45 | 20.329,54 |
| 9 | Pedongga | 217,65 | 8.492,02 |
| 10 | Sarjo | 990,06 | 2.790,78 |
| 11 | Sarudu | 338,88 | 9.509,49 |
| 12 | Tikke Raya | 1.317,13 | 23.011,22 |
| **Total** | | **155.558,80** | **136.713,86** |

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

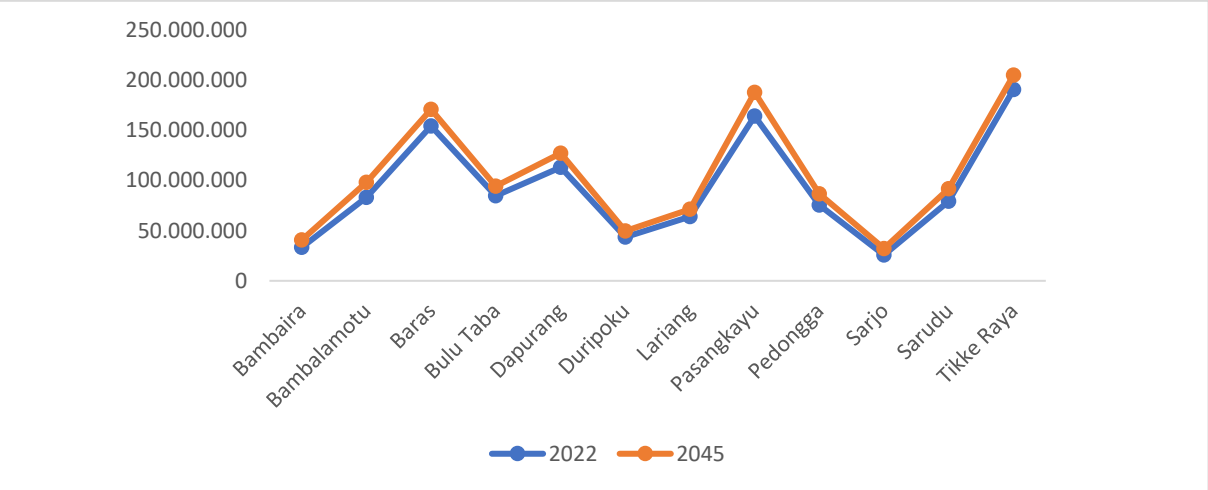
Gambar 2. 7
Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu




Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di masa yang akan datang mengakibatkan permintaan air yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan datang. Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatan lahan yang membutuhkan air untuk lahan pertanian secara umum.

Gambar 2. 8
Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu, 2022 dan 2045




Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

**Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bencana merupakan kejadian yang menimbulkan kerusakan yanag akan menyebabkan kerugian pada kehidupan, baik itu secara individu ataupun publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mendefenisikan bencana merupakan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana pun banyak disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor alam, non alam, dan manusai atau secara sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meluncurkan hasil kajian risiko bencana yang dikeluarkan dihalaman web http://inarisk.bnpb.go.id. Kajian resiko bencana tersebut dianalisis memului beberapa pendekatan dan sejarah atau catatan kebencanaan yang pernah terjadi. Melalui data tersebut dapat didentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi dengan probabilitas tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang tinggi, tsunami, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Potensi terjadinya bencana tanah longsor sekitar 98.489,44 hektar yang sebagian besar di tiga kecamatan yaitu Dapurang, Bulu Taba, dan Duripoku. Tiga kecamatan tersebut sangat berpotensi terjadi bencana tanah longsor karena berada pada daerah dataran tinggi dengan kondisi kemiringan lereng curam, dan sangat curam.

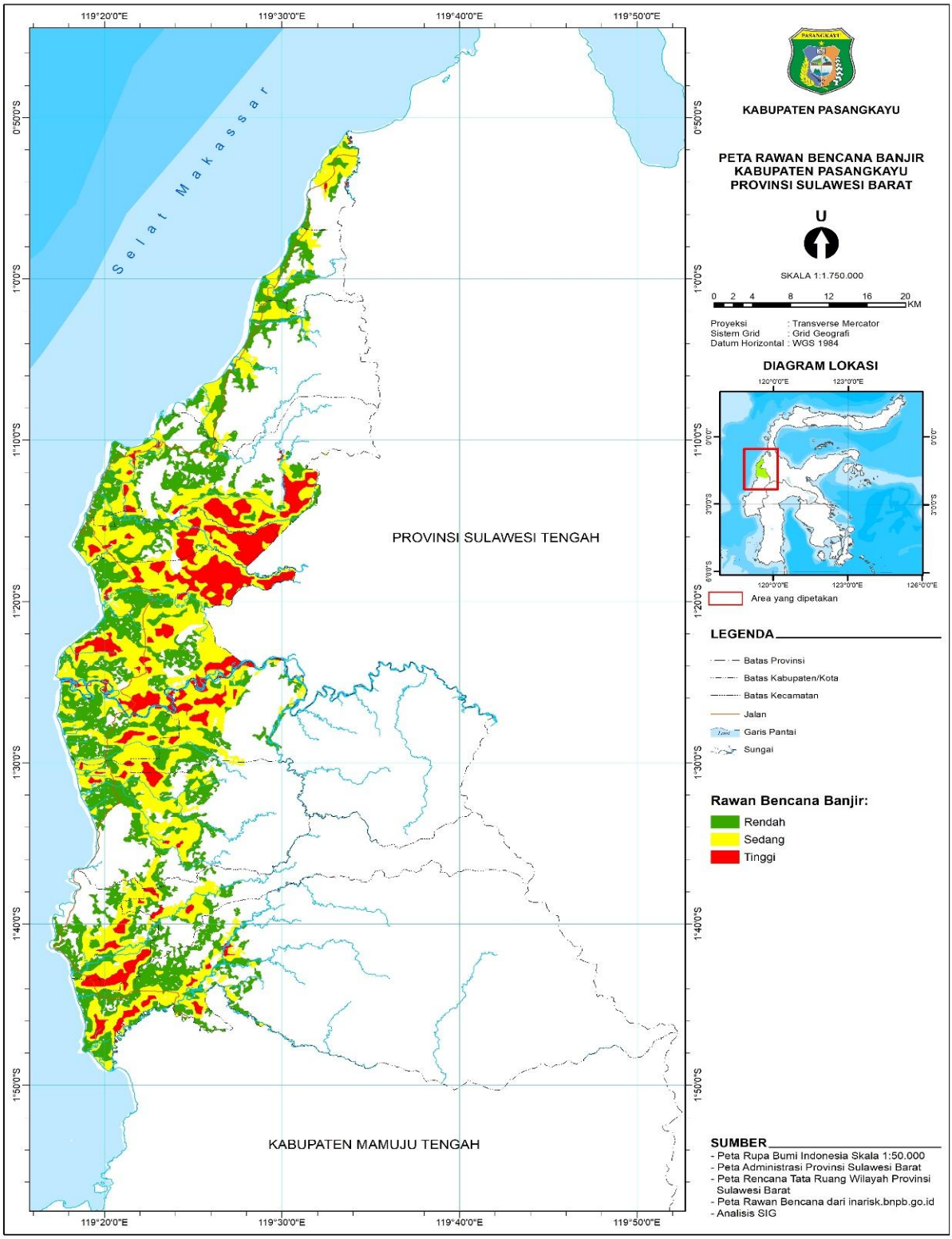
Selain bencana tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memiliki potensi besar terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Potensi terjadinya bencana karhutla sekitar 44.227,28 hektar yang tersebar keseluruh atau dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Baras, dan Pasangkayu merupakan kecamatan yang memiliki potensi bencana karhutla paling luas. Potensi bencana karhutla tersebar dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam membuka lahan perkebunan oleh masyarakat. Potensi terjadinya bencana banjir, dan banjir bandang hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bambaira, dan Bambalamotu. Bencana gempa bumi berpotensi terjadi di delapan kecamatan yaitu Bambaira, Bambalamotu, Bulu Taba, Dapurang, Pasangkayu, Pedonggo, Sarjo, dan Tikke Rata. Bencana tsunami yang memiliki dampak paling besar ketika terjadi berpotensi terjadi pada seluruh kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Pasangkayu atau yang berbatasan langsung dengan selat makassar. Tiga kecamatan yang memiki potensi semua jenis atau tujuh jenis bencana yang ada di Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, dan Pedonggo.

Tabel 2.5.
Daerah Rawan Bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023

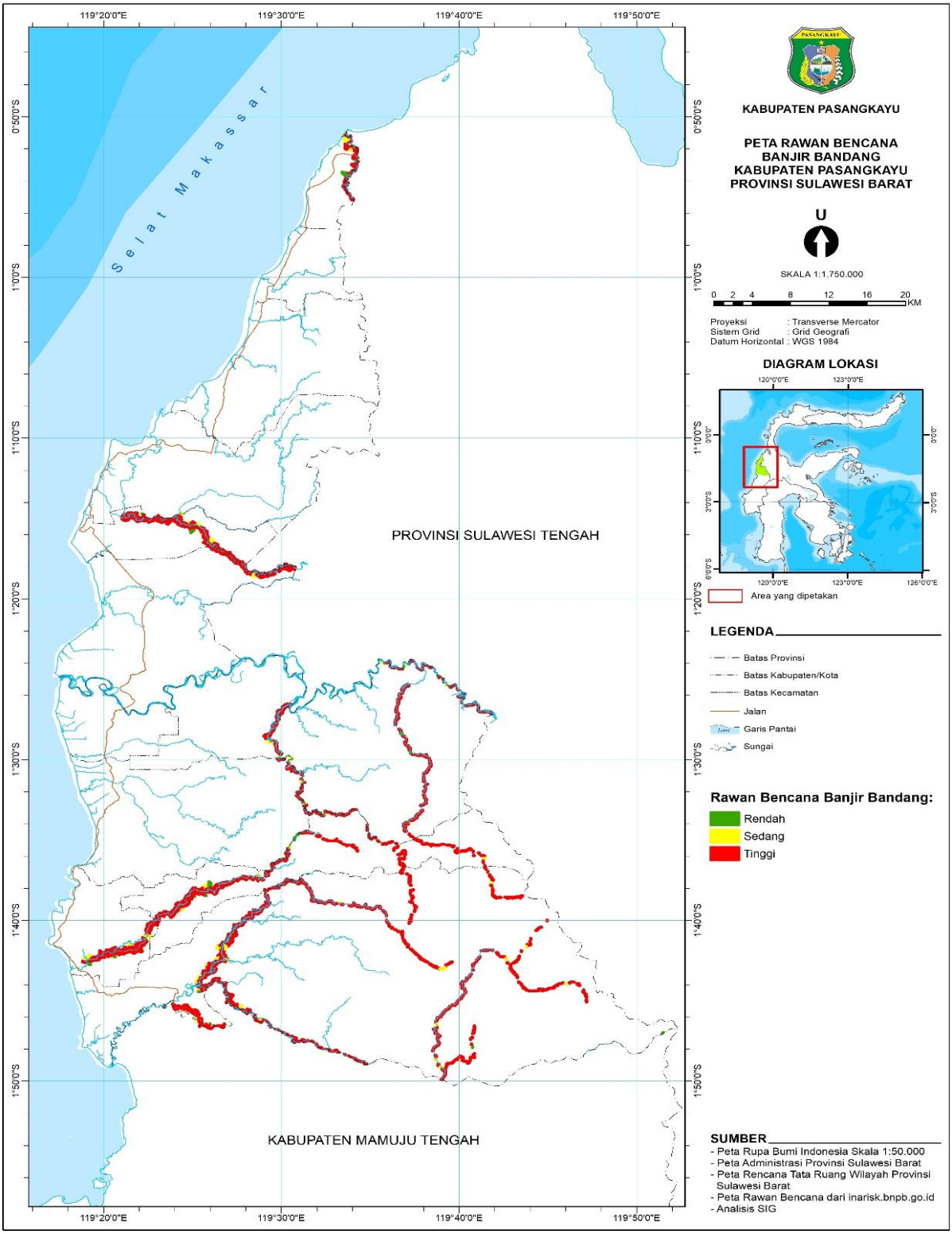
| No. | Kecamatan | Banjir | Banjir Bandang | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Tsunami | Gelombang Tinggi | Karhutla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambaira | - | - | 219,87 | - | 241,38 | 217,40 | 600,61 |
| 2 | Bambalamotu | - | - | 107,34 | 144,96 | 243,59 | 198,42 | 369,84 |
| 3 | Baras | 471,27 | 88,12 | - | 212,94 | 369,83 | 64,53 | 8.842,42 |
| 4 | Bulu Taba | 1.291,36 | 654,22 | 281,04 | 17.914,37 | - | - | 4.580,73 |
| 5 | Dapurang | 1.010,49 | 1.937,28 | 54,76 | 68.033,24 | 366,67 | 18,69 | 1.207,63 |
| 6 | Duripoku | 199,27 | 953,57 | - | 11.388,97 | - | - | 2.436,36 |
| 7 | Lariang | 406,32 | - | - | - | 157,43 | - | 1.884,11 |
| 8 | Pasangkayu | 2.448,15 | 27,47 | 2.889,59 | 794,95 | 299,72 | 147,77 | 8.003,66 |
| 9 | Pedongga | 2.367,49 | 610,52 | 2.626,18 | 0,00 | 180,82 | 137,06 | 423,67 |
| 10 | Sarjo | 72,37 | 190,48 | 1.587,41 | - | 411,04 | 135,66 | 455,63 |
| 11 | Sarudu | 1.011,53 | 487,23 | - | - | 147,63 | - | 5.849,16 |
| 12 | Tikke Raya | 5.345,62 | 316,36 | 3.913,85 | - | 560,95 | 42,32 | 9.573,46 |
| **Total** | | **14.623,86** | **5.265,25** | **11.680,03** | **98.489,44** | **2.979,06** | **961,85** | **44.227,28** |

Sumber: InaRISK, 2020

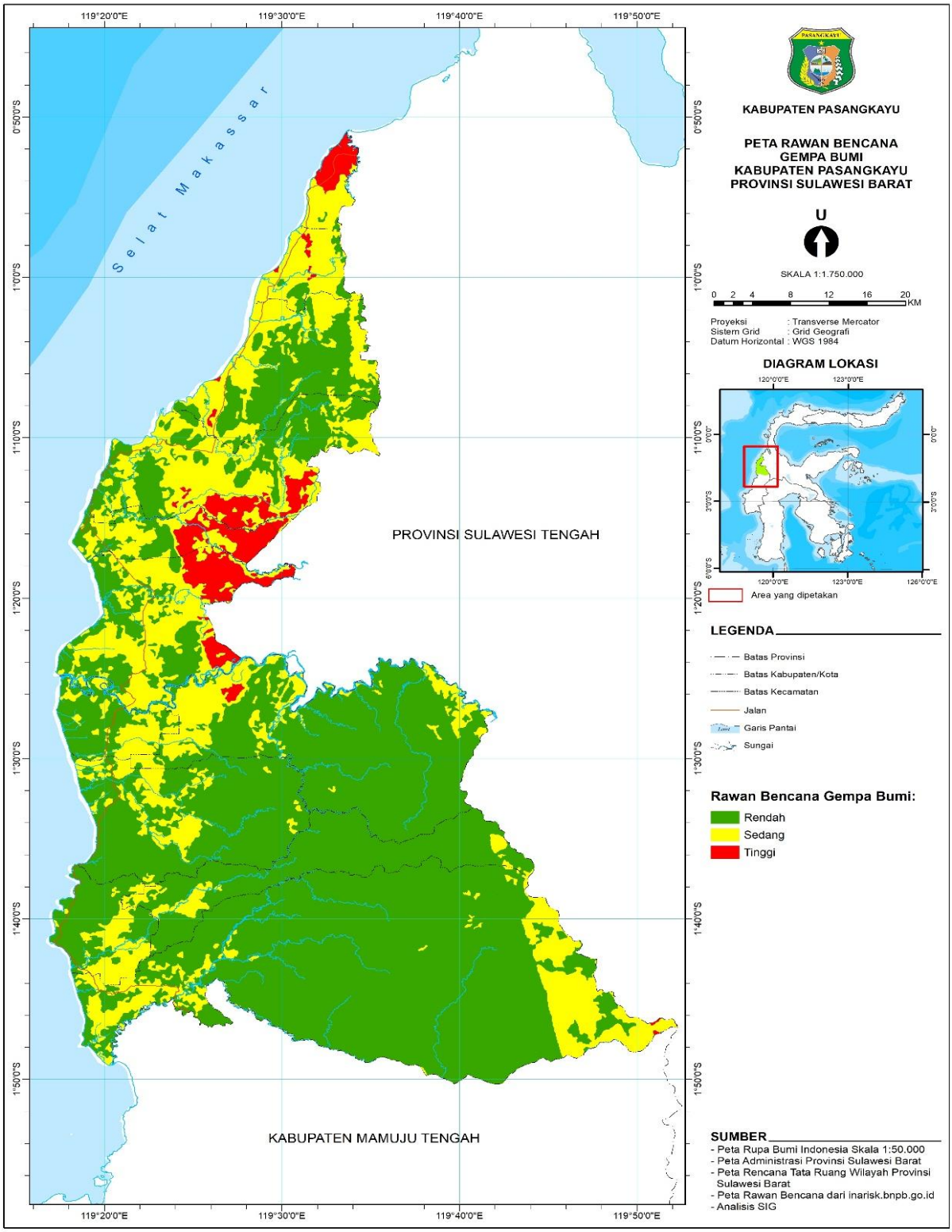
Gambar 2. 9
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu



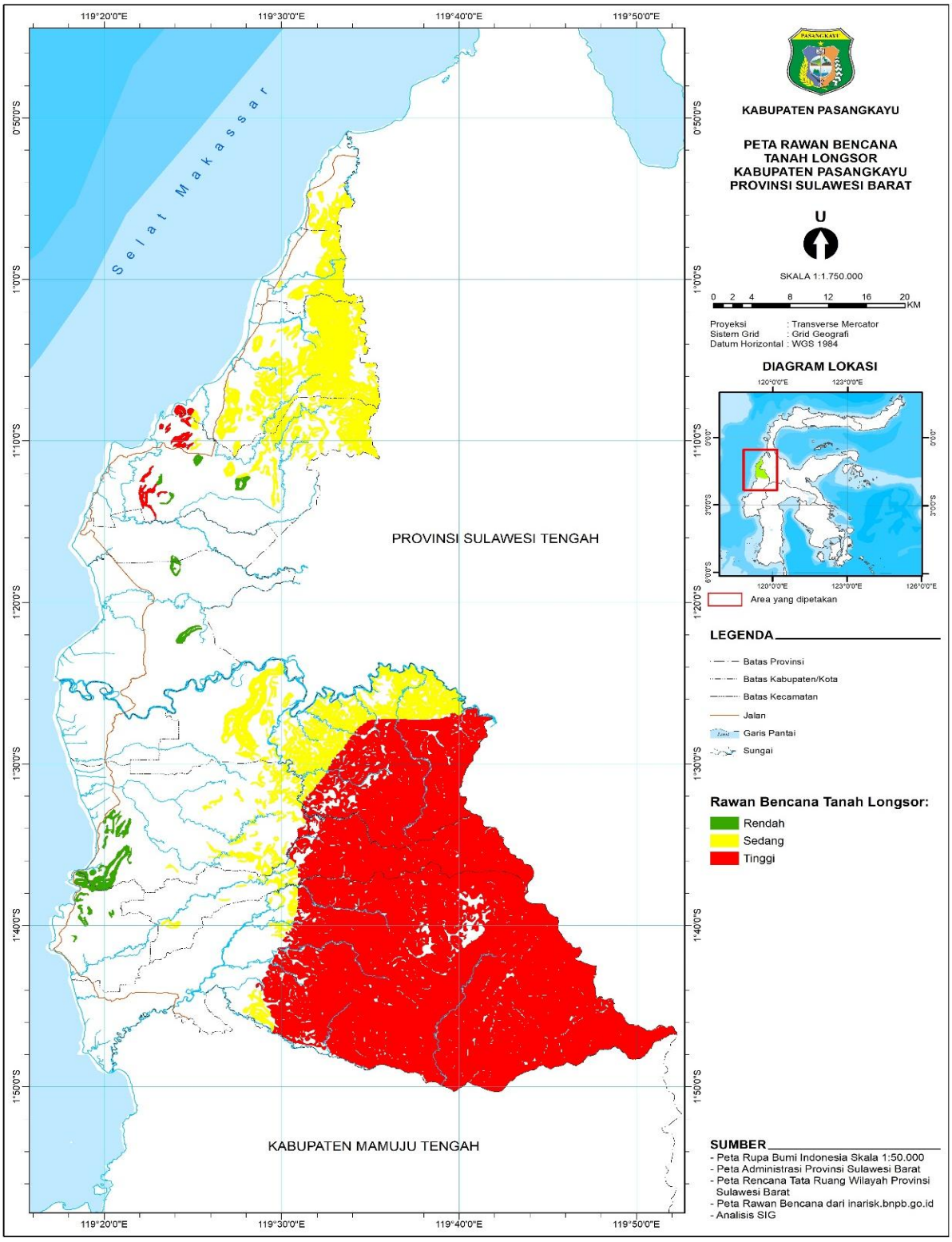
Gambar 2. 10
Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu



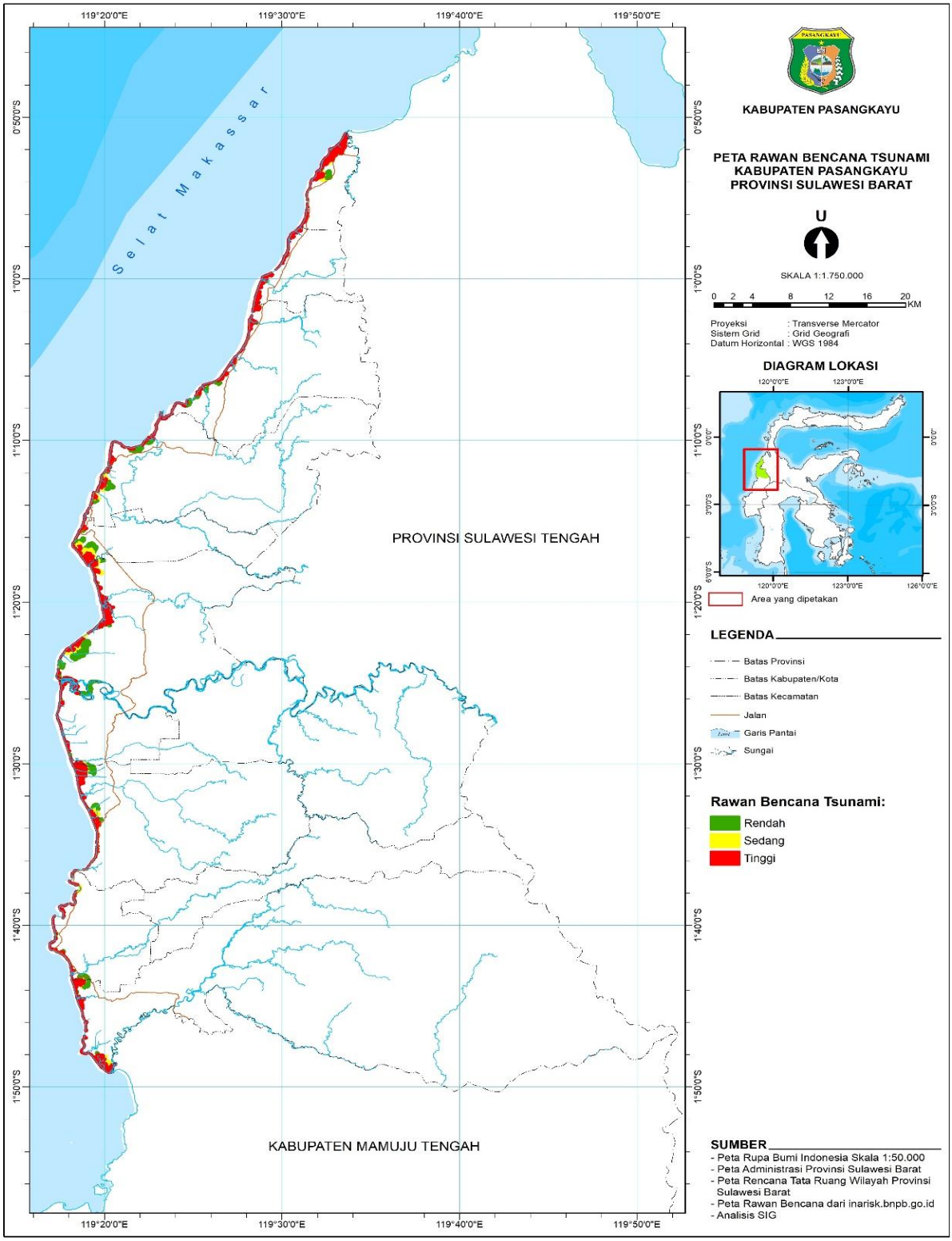
Gambar 2. 11
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu



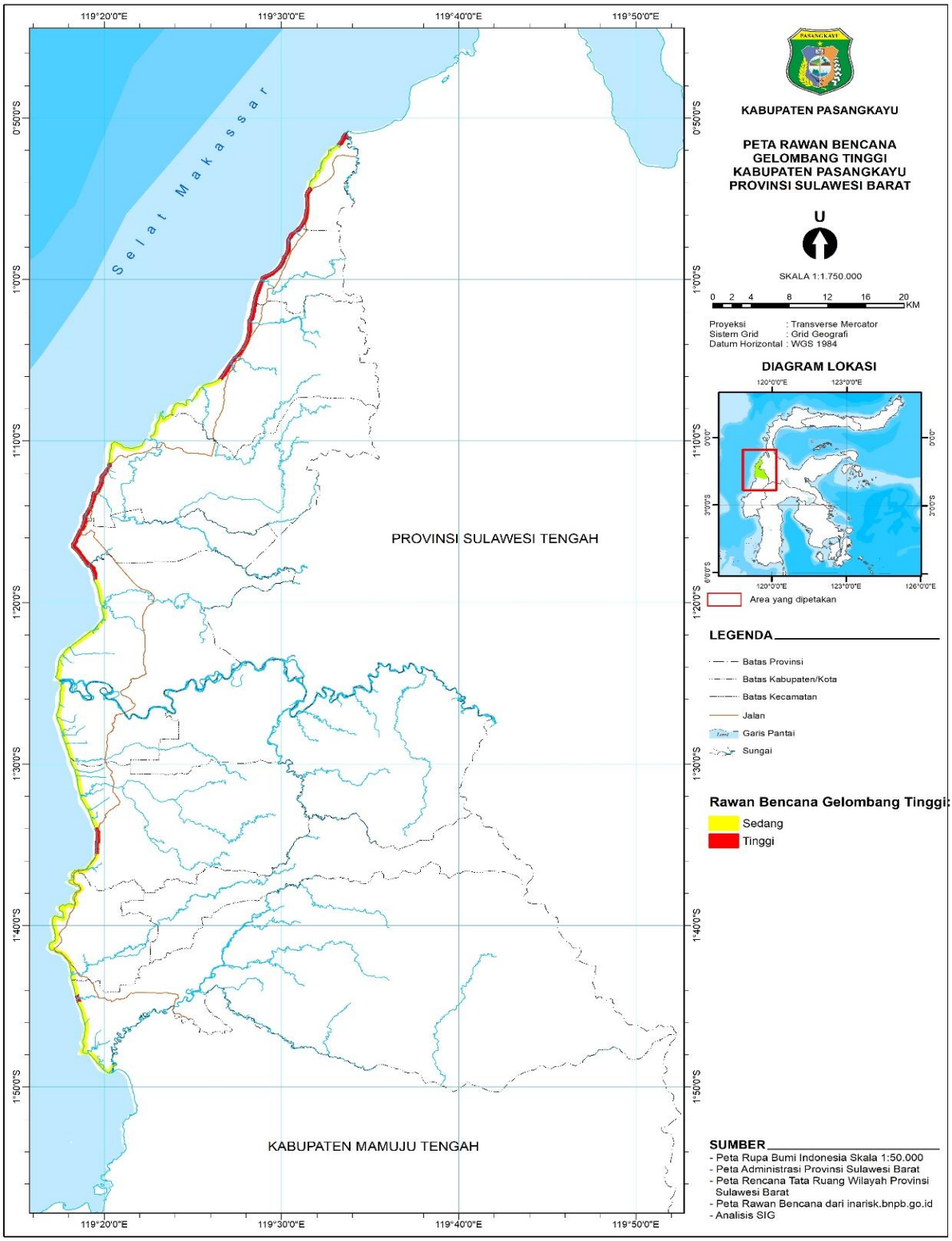
Gambar 2. 12
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu



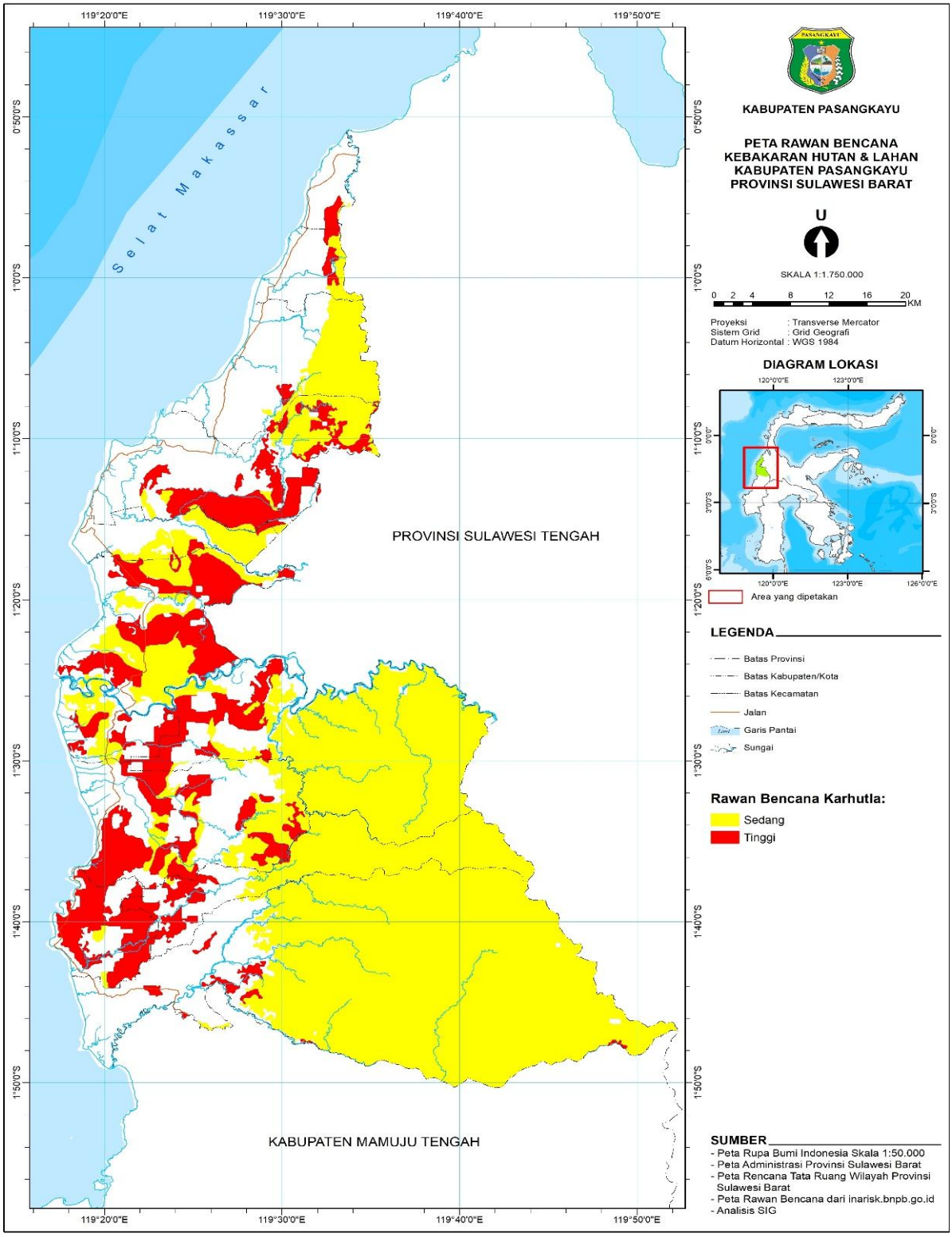
Gambar 2. 13
Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2. 14
Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2. 15
Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu

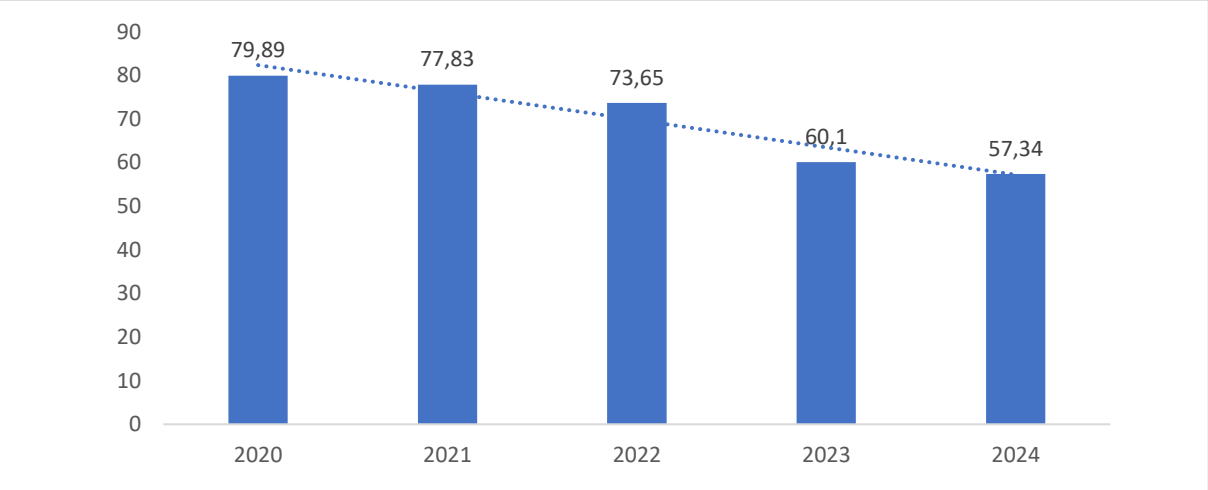


### 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

**Indeks Ketahanan Pangan**

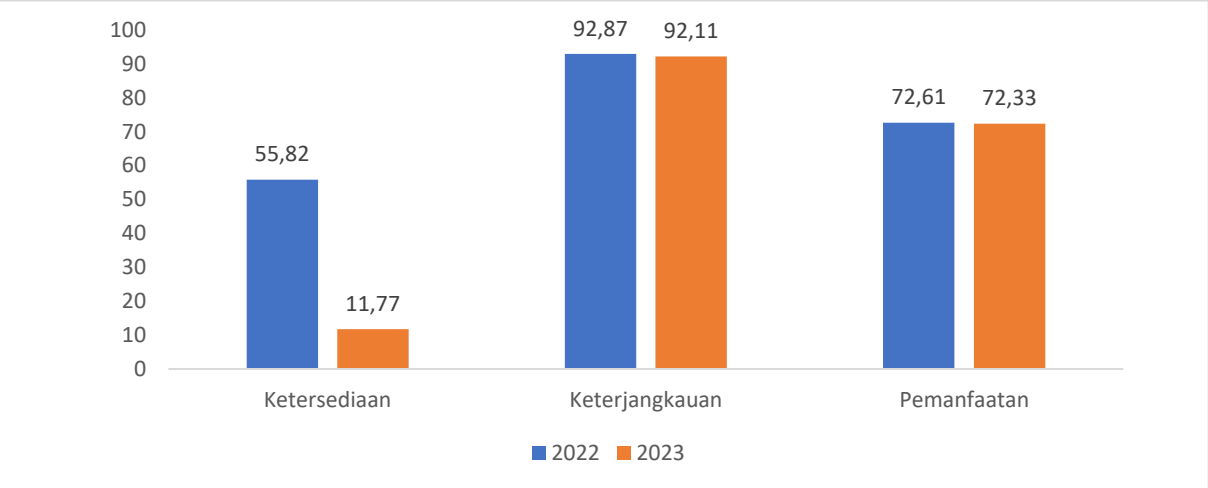
Indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka indeks tercatat sebesar 79,89 yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan yang relatif tinggi. Namun, nilai tersebut terus menurun setiap tahunnya, menjadi 77,83 tahun 2021, 73,65 tahun 2022, dan mengalami penurunan tajam ke angka 60,10 pada tahun 2023. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana indeks mencatat angka terendah yaitu 57,34. Penurunan akumulatif sebesar 22,55 poin selama lima tahun. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh atas faktor-faktor struktural yang memengaruhi sistem pangan lokal, termasuk kemungkinan dampak perubahan iklim, tekanan ekonomi, serta efektivitas intervensi kebijakan yang telah dijalankan.

Gambar 2. 16
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah

Gambar 2. 17
Komponen Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2023



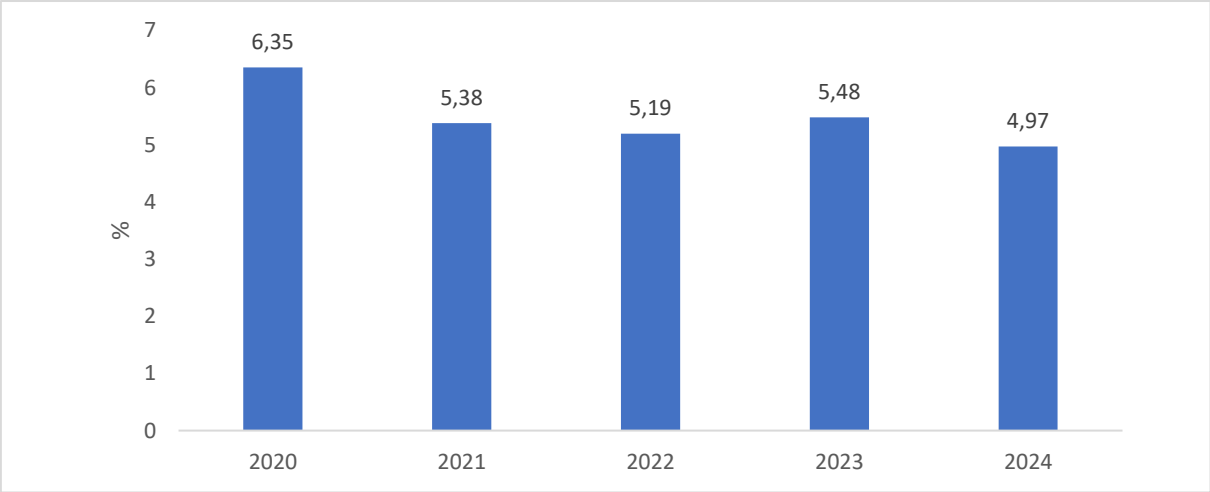

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah

Penurunan IKP Kabupaten Pasangkayu secara signifikan dipengaruhi oleh merosotnya aspek ketersediaan pangan. Berdasarkan data tahun 2022 dan 2023, terlihat bahwa indikator ketersediaan mengalami penurunan drastis dari 55,82 menjadi hanya 11,77, yang mencerminkan penurunan kapasitas produksi, distribusi, atau stok pangan di wilayah tersebut. Sementara itu, dua dimensi lainnya, yaitu keterjangkauan dan pemanfaatan, relatif stabil dengan perubahan yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat masih memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan pangan secara optimal, ketersediaan sumber pangan yang terbatas menjadi titik lemah utama dalam sistem ketahanan pangan daerah.

**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka prevalensi berada pada titik tertinggi yaitu 6,35 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 5,38 persen pada tahun 2021 dan 5,19 persen pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 5,48 persen, tren penurunan kembali berlanjut di tahun 2024, dengan angka prevalensi tercatat sebesar 4,97 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan relatif dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, meskipun fluktuasi kecil masih terjadi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan dan program ketahanan pangan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif, namun tetap perlu penguatan dan keberlanjutan, khususnya untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses pangan yang cukup dan bergizi secara konsisten.

Gambar 2. 18
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

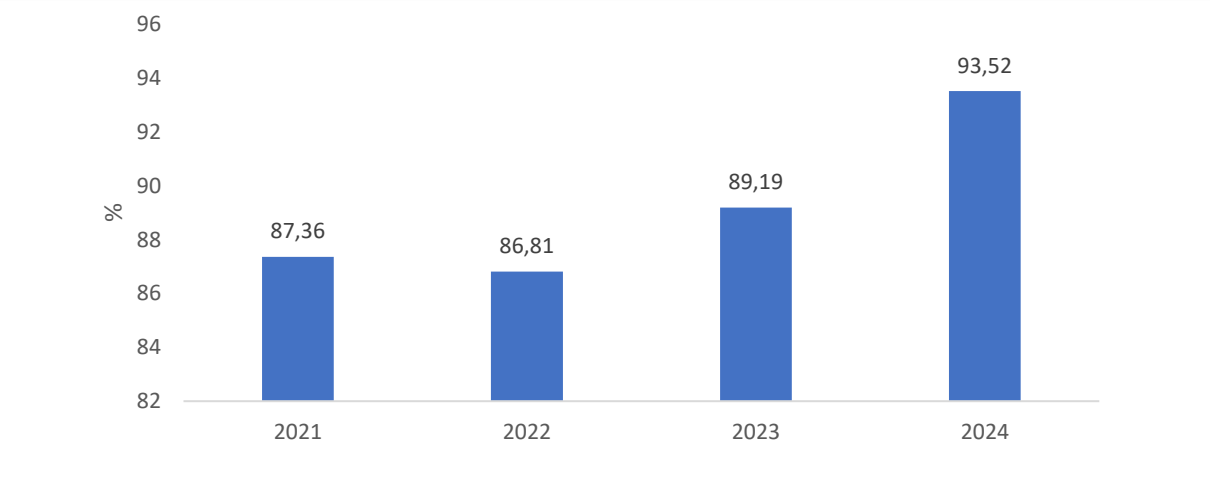



Sumber: BPS, diolah

**Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum**

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 87,36 persen pada tahun 2021 menjadi 86,81 persen pada tahun 2022, persentase akses meningkat secara signifikan menjadi 89,19 persen pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya di 93,52 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi dalam penyediaan sarana air bersih dan sistem distribusi yang lebih merata bagi masyarakat. Perbaikan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan dasar, yang sangat penting dalam mendukung aspek pemanfaatan dalam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara umum di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 19
Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Pasangkayu 2021-2024




Sumber: BPS, diolah

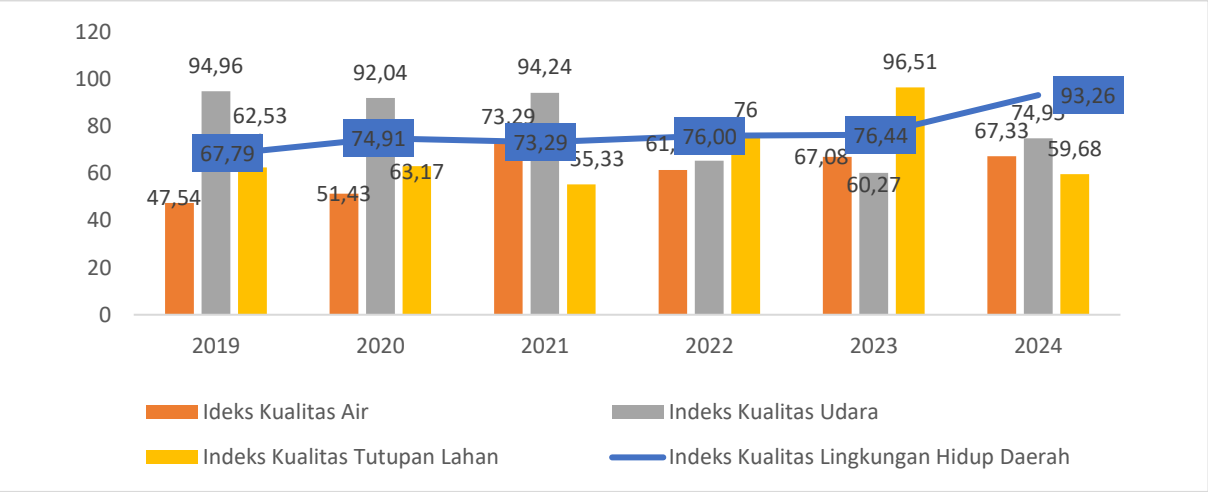
**2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2019–2024, mencerminkan dinamika dalam pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Fluktuasi ini terutama dipengaruhi oleh tiga komponen utama yakni, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Pada awal periode, IKLH mengalami peningkatan dari 67,79 pada tahun 2019 menjadi 74,91 pada tahun 2020, yang sejalan dengan perbaikan dalam kualitas udara dan air. Namun, tahun 2021 mencatatkan penurunan ke angka 73,29, didorong oleh pelemahan dalam kualitas udara dan tutupan lahan, yang dapat mengindikasikan peningkatan tekanan ekologis akibat aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan. Tren ini berbalik pada tahun 2022 hingga 2024, dengan lonjakan IKLH ke 93,26, yang mengindikasikan pemulihan dalam komponen utama, khususnya pada IKA dan IKU. Fluktuasi ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih

konsisten dalam pengelolaan lingkungan, termasuk peningkatan kapasitas pemantauan, penerapan kebijakan berbasis bukti, serta sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Gambar 2. 20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Menurut Komponen, 2019-2024

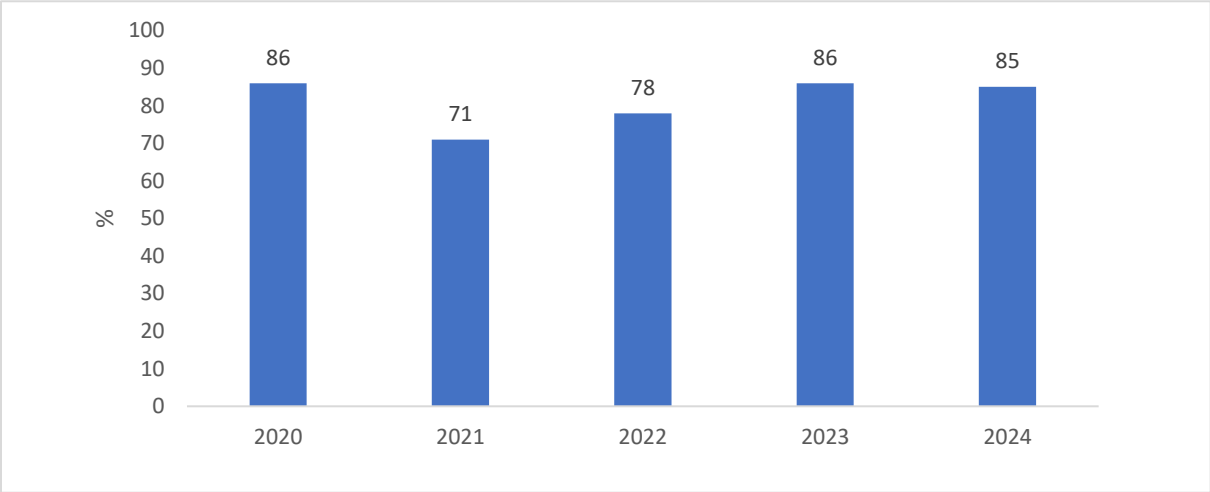



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan pola fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercatat sebesar 86 persen, namun kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 71 persen pada tahun 2021. Meski demikian, tren membaik mulai terlihat kembali pada tahun 2022 dengan kenaikan menjadi 78 persen, dan mencapai 86 persen pada tahun 2023, yang setara dengan tingkat akses awal tahun 2020. Pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 85 persen, namun tetap berada dalam kisaran tinggi. Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya pemulihan dan peningkatan infrastruktur sanitasi setelah periode penurunan, yang penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, serta memperkuat dimensi pemanfaatan dalam kerangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 21
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

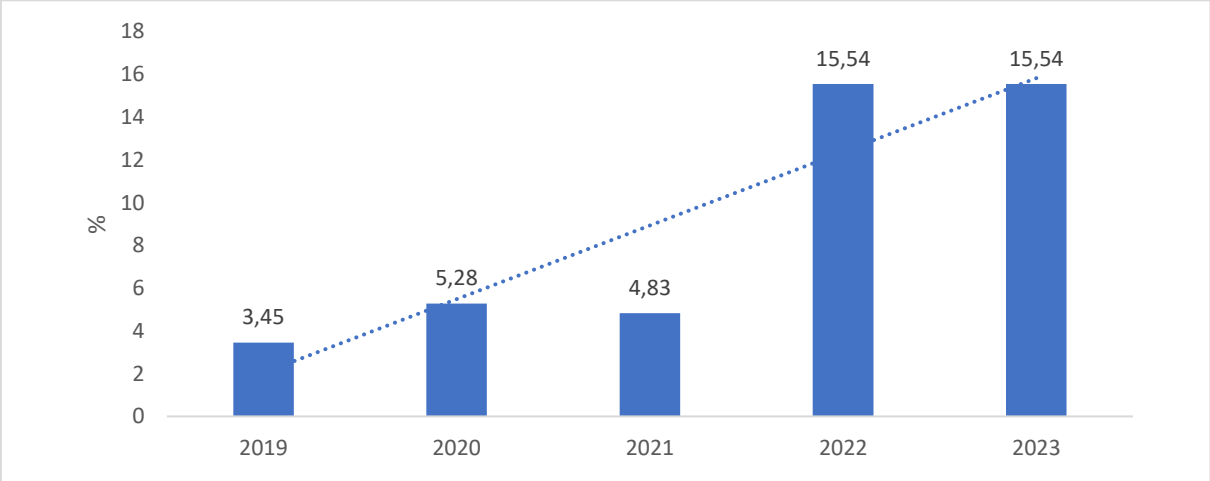



Sumber: BPS, diolah

**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Salah satu tantangan lingkungan yang masih dihadapi di Kabupaten Pasangkayu yakni penanganan sampah. Memang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 penanganan sampah menunjukkan perbaikan, dari 3,45 persen meningkat 12,09 persen poin menjadi 15,54 persen. Namun capaian ini masih tergolong rendah dan artinya 84,46 persen sampah yang belum ditangani dengan baik. Penyebabnya karena ekosistem pengumpulan dari bank sampah atau tempat pembuangan sampah dengan pelaku masyarakat masih belum terintegrasi dengan para pendaur ulang. Selain itu, rendahnya penanganan sampah ini dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga kebersihan, termasuk ketersediaan serta kelayakan armada dan kontainer sampah yang masih rendah. Pada akhirnya, sampah-sampah yang tidak tertangani dengan baik ini bisa menimbulkan persoalan seperti banjir, polusi, hingga bahkan berakhir di lautan dan mengancam eksosistem laut.

Gambar 2. 22
Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

### 2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

**Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca**

Pada tahun 2024, Kabupaten Pasangkayu mencatat perubahan emisi gas rumah kaca sebesar 28 ton $CO_2$ ekuivalen. Angka ini merefleksikan kontribusi emisi dari berbagai aktivitas ekonomi, terutama dari sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, energi, dan aktivitas transportasi yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pasangkayu masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon. Peningkatan emisi ini sekaligus menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi mitigasi, termasuk melalui optimalisasi praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga. Dengan mengendalikan emisi pada tahap ini, Kabupaten Pasangkayu berpeluang untuk mengarahkan pertumbuhan ekonominya ke jalur yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca.

**Indeks Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana (IRB) Pasangkayu tetap dalam kategori "Tinggi" dari 2019 hingga 2024 dengan nilai indeks yang stabil di 176,80, menunjukkan bahwa faktor risiko di daerah ini tidak mengalami perubahan signifikan. Ketidakberubahan ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, kapasitas mitigasi yang masih stagnan, serta faktor sosial-ekonomi yang belum optimal, termasuk infrastruktur dan kesiapsiagaan masyarakat. Dibandingkan dengan Mamasa dan Polewali Mandar yang mengalami penurunan risiko menjadi kategori "Sedang", Kabupaten Pasangkayu belum menunjukkan perbaikan berarti, yang mengindikasikan perlunya intervensi lebih lanjut. Untuk menurunkan indeks risiko ini, diperlukan upaya peningkatan dalam mitigasi bencana, infrastruktur, dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Tabel 2.6.
Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2023

| No | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kelas Risiko 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majene | 216,08 | 216,08 | 217,62 | 208,3 | 173,60 | 173,60 | Tinggi |
| 2 | Pasangkayu | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | Tinggi |
| 3 | Mamuju | 145,13 | 145,13 | 145,13 | 161,71 | 164,40 | 164,40 | Tinggi |
| 4 | Mamuju Tengah | | | 161,71 | 161,71 | 159,33 | | Tinggi |
| 5 | Mamasa | 154 | 154 | 154 | 147,02 | 148,86 | 139,13 | Sedang |
| 6 | Polewali Mandar | 154 | 154 | 151 | 135,81 | 174,40 | 174,40 | Tinggi |

Sumber: BNPB, diolah

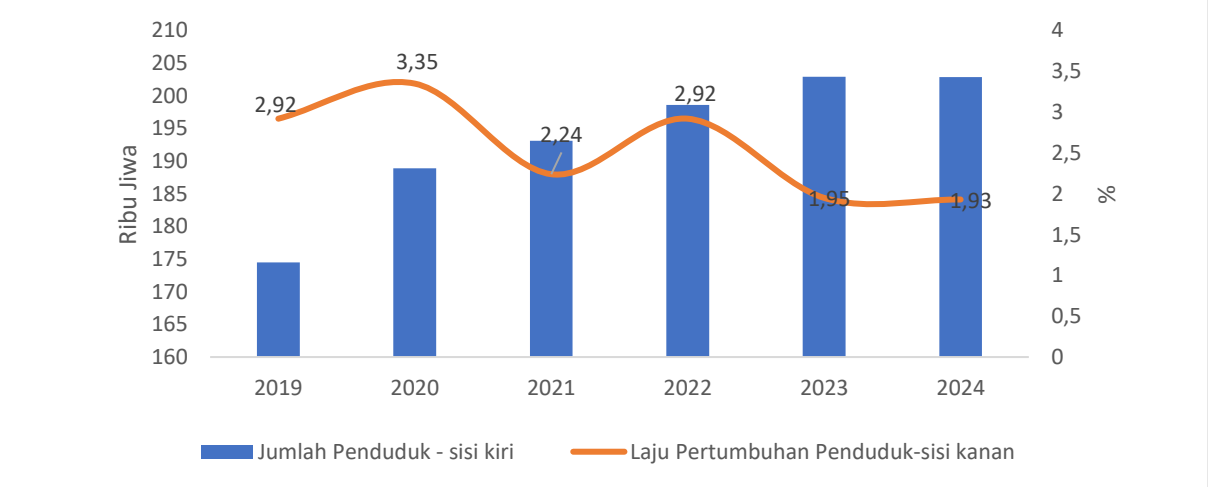
*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah mulai dihitung pada tahun 2021, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih mengikuti nilai Indeks Risiko Bencana kabupaten induknya.

### 2.1.1.7. Demografis

#### Laju Pertumbuhan Penduduk

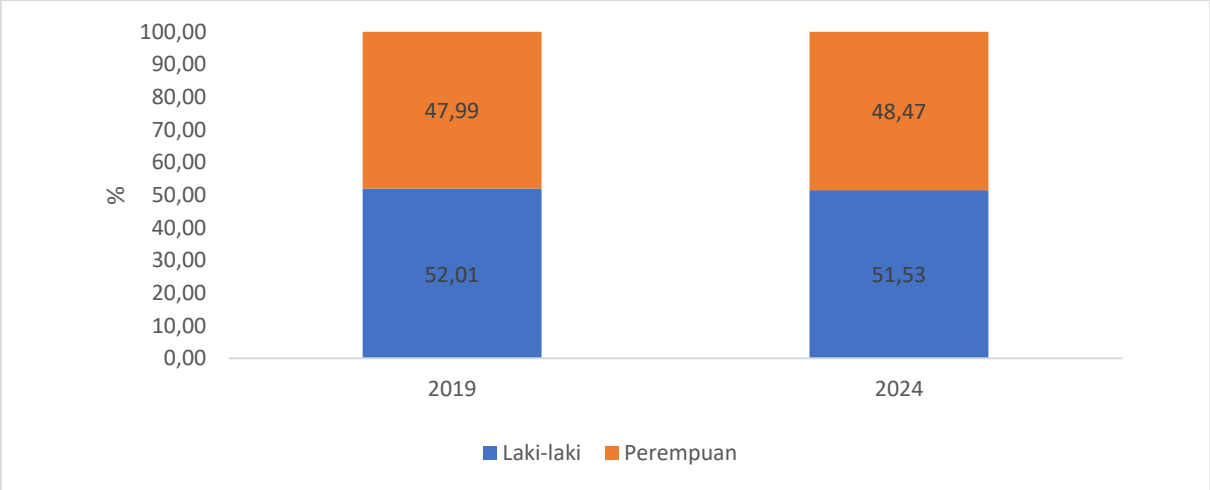
Jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan, tetapi terjadi perlambatan dari sisi pertumbuhannya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu sebesar 174,5 ribu orang, lalu meningkat menjadi 202,8 ribu orang pada tahun 2024. Jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu berada di urutan ketiga terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar (33,5%) dan Kabupaten Mamuju (19,77%), dengan kontribusi sebesar 13,49 persen. Capaian ini lebih sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang hanya sekitar 12,64 persen. Peningkatan ini terjadi karena Kabupaten Pasangkayu menjadi tujuan migrasi penduduk, terutama yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasangkayu cenderung melambat, terutama pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 3,35 persen, lalu menurun menuju angka 1,93 persen pada tahun 2024.

Gambar 2. 23
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk, 2019 – 2024




Sumber: BPS, diolah

Gambar 2. 24
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019 dan 2024

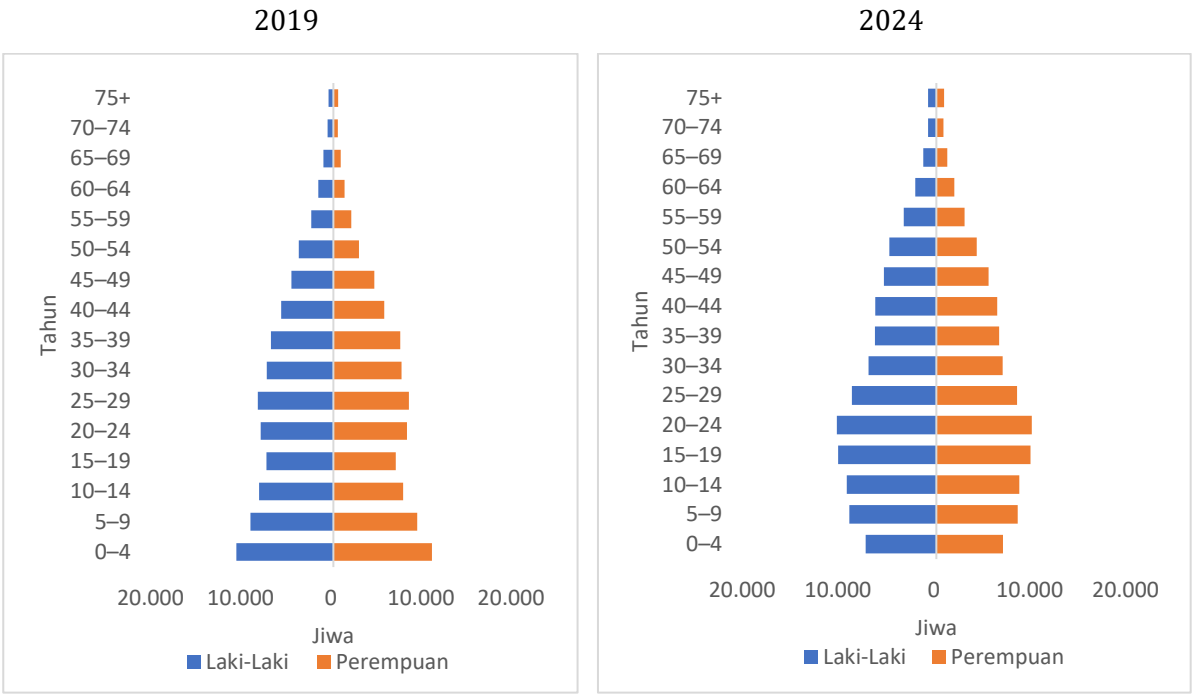



Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

Berdasarkan jenis kelamin, tidak terjadi perubahan signifikan pada komposisi penduduk di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 107,22. Proporsi laki-laki mencapai 51,7 persen, sedangkan perempuan sebesar 48,3 persen. Pada tahun 2024, penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan, tetapi rasio jenis kelamin menurun menjadi 106,3. Pertambahan jumlah penduduk laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah migrasi keluar yang umumnya dilakukan oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Migrasi keluar ini didorong oleh motif untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang lebih layak di daerah lainnya.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, dapat dilihat adanya perubahan komposisi penduduk, dimana kelompok usia tua (usia 65+) mengalami kenaikan dari 2,4 persen di tahun 2019 menjadi 3,1 persen di tahun 2024, sedangkan kelompok usia anak (usia <15 tahun) mengalami penurunan dari 32,6 persen menjadi 27,2 persen. Adapun kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami kenaikan 65,1 persen menjadi 69,7 persen pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh penduduk usia produktif dengan persentase yang lebih tinggi pada tahun 2024 dibanding tahun 2019. Ketersediaan penduduk usia produktif ini bisa berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun potensi ini harus didukung dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai agar sumber daya manusia dapat terserap pada aktivitas ekonomi produktif. Selain itu, pengembangan kapasitas manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, juga mutlak dilakukan agar produktivitas tenaga kerja semakin meningkat.

Gambar 2. 25
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu, 2019 dan 2024



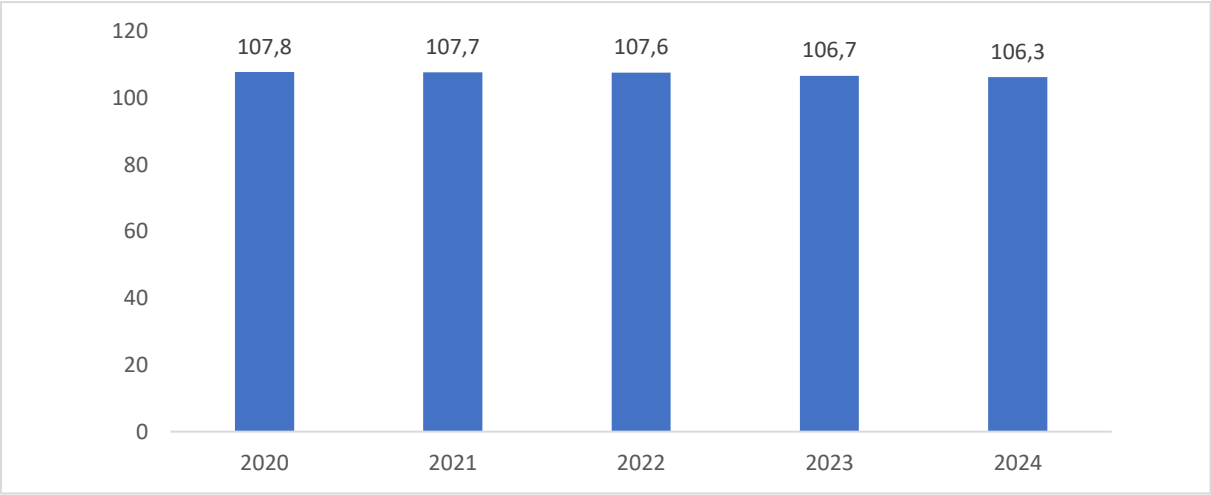

Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

Kondisi piramida penduduk di Kabupaten Pasangkayu antara tahun 2019 dengan tahun 2024 menunjukkan sejumlah perubahan. Komposisi penduduk antar kelompok usia lebih merata pada tahun 2024 dibanding tahun 2019. Di sisi lain, jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan. Meskipun demikian, komposisi penduduk di usia produktif tetap paling dominan, sehingga menempatkan Kabupaten Pasangkayu di fase bonus demografi. Jika dilihat penduduk usia produktif per jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki sama dengan perempuan, yaitu masing-masing 69 persen di tahun 2024. Tren kedepan yang perlu diantisipasi adalah semakin meningkatnya komposisi penduduk usia tua, yang bukan hanya tidak produktif lagi, tapi juga membutuhkan sejumlah pelayanan publik dasar. Peningkatan proporsi penduduk usia tua ini terjadi seiring dengan semakin panjangnya usia penduduk yang tercermin pada Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi.

**Rasio Penduduk**

Rasio penduduk Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 sedikit mengalami penurunan namun konsisten. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 107,8, yang kemudian sedikit menurun menjadi 107,7 pada tahun 2021, 107,6 pada tahun 2022, dan berlanjut menurun menjadi 106,7 pada tahun 2023, hingga mencapai 106,3 pada tahun 2024. Meskipun penurunannya bersifat gradual, tren ini dapat mengindikasikan pergeseran struktur demografi, atau perubahan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 26
Rasio penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

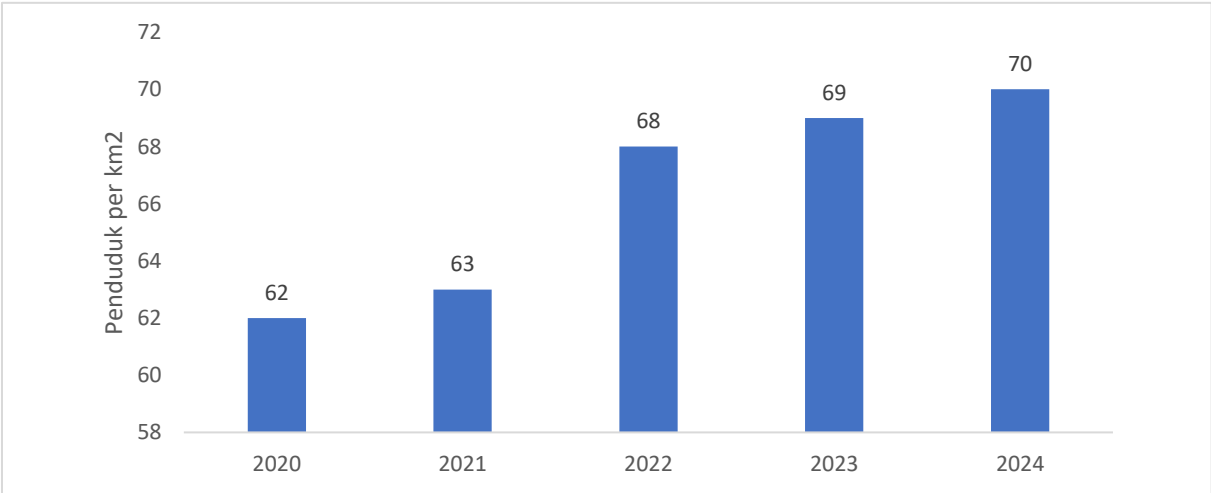



Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

**Kepadatan Penduduk**

Selanjutnya, kepadatan penduduk Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 62 jiwa per km$^2$, kemudian naik sedikit menjadi 63 jiwa per km$^2$ pada 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan kepadatan mencapai 68 jiwa per km$^2$ di 2022, 69 jiwa per km$^2$ di 2023, dan mencapai 70 jiwa per km$^2$ pada 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung dan berimplikasi pada kebutuhan layanan dasar, seperti perumahan, infrastruktur, air bersih, dan sanitasi.

Gambar 2. 27
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasangkayu 2020-2024

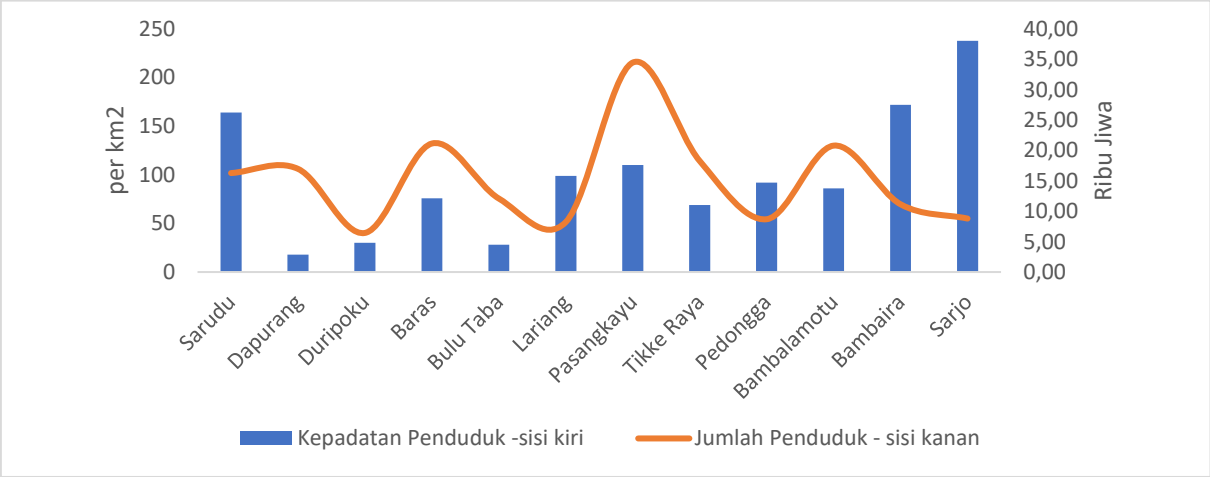



Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

Sementara itu, jika melihat persebaran penduduk per kecamatan, maka terlihat bahwa sejumlah kecamatan dengan kategori jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024 adalah Kecamatan Pasangkayu dengan 34,48 ribu jiwa dan Kecamatan Baras dengan 21,15 ribu jiwa. Kedua wilayah ini menyumbang 30,33 persen dari total penduduk Kabupaten Pasangkayu.

Sementara itu, kecamatan dengan kategori jumlah penduduk paling sedikit adalah Lariang, Duripoku, dan Sarjo. Terlihat bahwa tidak terjadi perubahan signifikan pada sebaran penduduk per kecamatan. Sementara itu, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Sarjo, yaitu 238 jiwa/km$^2$, sedangkan kecamatan yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Dapurang, yaitu hanya 18 orang/km$^2$. Salah satu faktor yang menentukan kepadatan penduduk adalah luas wilayah dari masing-masing kecamatan, dimana Sarjo memiliki wilayah paling kecil. Pertumbuhan penduduk per kecamatan ini juga dapat mencerminkan kemajuan ekonomi di setiap kecamatan bervariasi antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 2. 28
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan, 2024

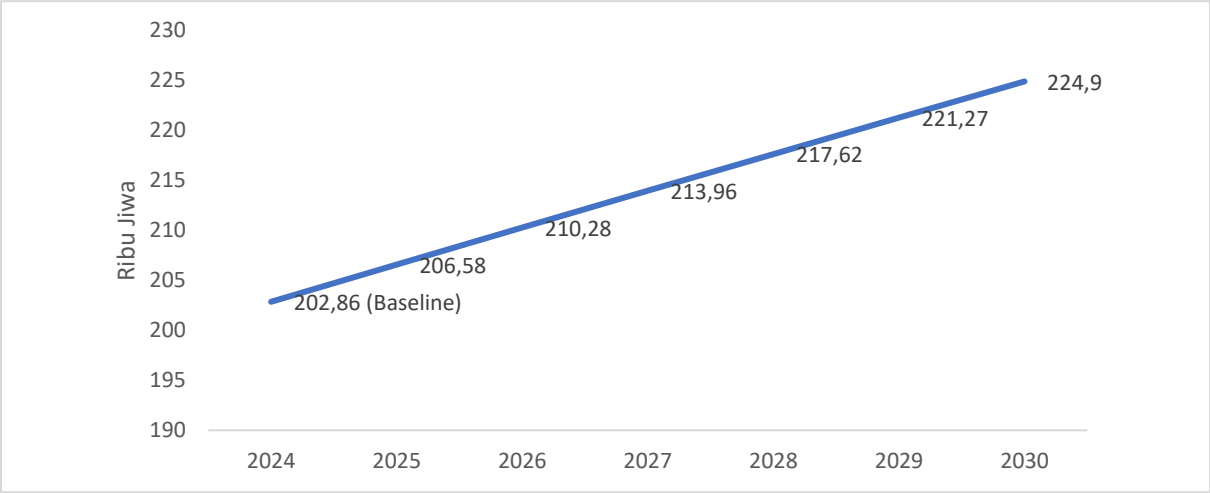



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Proyeksi Penduduk**

Berdasarkan proyeksi kependudukan Kabupaten Pasangkayu, jumlah penduduk diperkirakan meningkat dari 206,58 ribu jiwa pada 2025 menjadi 224,90 ribu jiwa pada 2030, mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil dalam lima tahun mendatang. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk laki-laki dari 106,28 ribu menjadi 114,83 ribu, dan perempuan dari 100,30 ribu menjadi 110,07 ribu. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sedikit menurun dari 105,96 menjadi 104,32, tetap menunjukkan dominasi jumlah laki-laki, namun dengan tren menuju keseimbangan demografis yang lebih baik.

Gambar 2. 29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangakyu Tahun 2025-2030




Sumber: BPS Sulawesi Barat dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu 2025-2045.

Dari sisi struktur umur, Pasangkayu akan terus didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun), yang meningkat dari 68,15 persen pada tahun 2025 menjadi 68,31 persen pada 2030. Sementara itu, proporsi anak-anak (0–14 tahun) menurun dari 27,32 persen menjadi 26,62 persen, dan populasi lanjut usia (65 tahun ke atas) naik dari 3,79 persen menjadi 5,08 persen. Kenaikan *dependency ratio* dari 45,16 ke 46,40 menunjukkan bahwa tekanan terhadap kelompok usia produktif secara perlahan meningkat, seiring bertambahnya populasi lansia—sebuah tren yang menandakan awal dari transisi demografi.

Tabel 2.7
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2030

| Parameter | 2025 | 2030 |
|---|---|---|
| Laki-Laki (000) | 106,28 | 114,83 |
| Perempuan (000) | 100,3 | 110,07 |
| Total (000) | 206,58 | 224,9 |
| Sex Ratio (%) | 105,96 | 104,32 |
| Komposisi Umur 0–14 (%) | 27,32 | 26,62 |
| Komposisi Umur 15–64 (%) | 68,15 | 68,31 |
| Komposisi Umur 65+ (%) | 3,79 | 5,08 |
| Dependency Ratio (%) | 45,16 | 46,4 |
| Total Fertility Rate (TFR) | 2,45 | 2,38 |
| Infant Mortality Rate (IMR) | 26,25 | 22,52 |

Sumber: BPS Sulawesi Barat dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu 2025-2045.

Secara bersamaan, proyeksi *Total Fertility Rate* (TFR) yang menurun dari 2,45 menjadi 2,38, serta *Infant Mortality Rate* (IMR) yang turun dari 26,25 menjadi 22,52 per 1.000 kelahiran hidup, mencerminkan perbaikan dalam akses layanan kesehatan reproduksi dan anak. Penurunan indikator fertilitas dan mortalitas ini memperkuat sinyal bahwa Kabupaten Pasangkayu tengah

memasuki fase konsolidasi kualitas penduduk, bukan semata kuantitas, sebuah fase penting menuju ekonomi berdaya saing tinggi.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

**Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan yang cepat pada nilai PDRB riil, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif menunjukkan perlambatan atau penurunan pada nilai PDRB riil. Adapun tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu dalam 5 tahun terakhir cenderung sangat fluktuatif. Kinerja pertumbuhan ekonomi terkontraksi khususnya pada periode pandemi COVID-19, hingga mencatatkan pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu minus 2,73 persen di tahun 2020. Meskipun sempat meningkat dan kembali positif di tahun 2021 menjadi 3,84 persen, tetapi pertumbuhan kembali menurun menjadi minus 0,02 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 6,78 persen, yang terutama ditopang oleh kinerja positif dari sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang mulai mengalami pemulihan secara bertahap. Namun pada tahun 2024, kinerja ekonomi mengalami penurunan berarti sebesar 6,1 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,68 persen.

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan pola fluktuatif dalam periode 2019 hingga 2024. Indonesia memiliki pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan Sulawesi Barat dan Pasangkayu, dengan penurunan berarti pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, diikuti oleh pemulihan bertahap. Sulawesi Barat juga mengalami kontraksi tajam pada 2020, namun pemulihannya lebih lambat dibandingkan Indonesia. Sementara itu, Pasangkayu mengalami fluktuasi yang lebih ekstrem, dengan penurunan signifikan hingga -2,73 persen pada 2020, pemulihan cepat hingga mencapai puncak pertumbuhan 6,78 persen pada 2023, sebelum kembali melambat ke 0,68 persen pada 2024. Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang lebih rentan terhadap perubahan eksternal dibandingkan ekonomi nasional yang lebih terdiversifikasi.

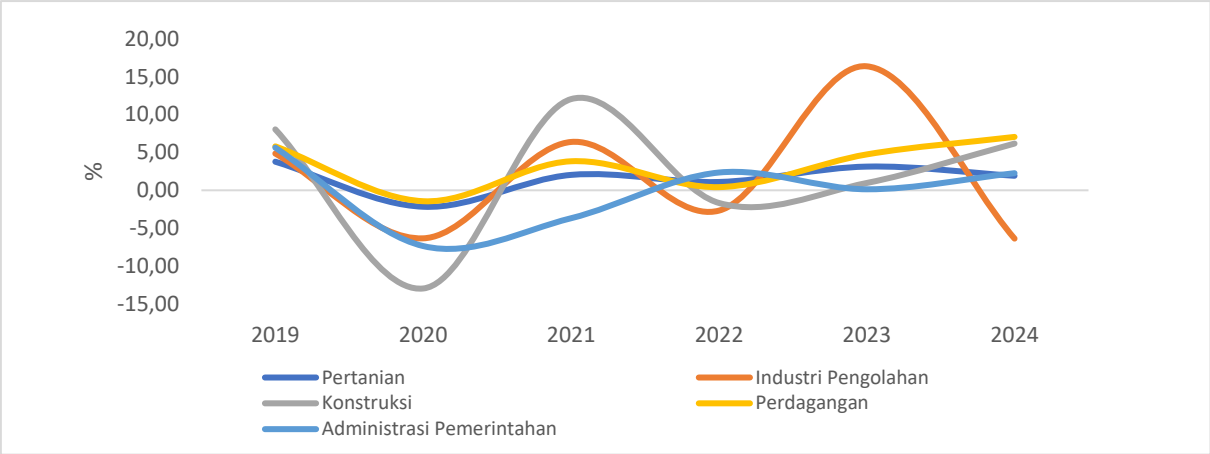
Gambar 2. 30
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024




Sumber: BPS Pasangkayu, diolah
Catatan: Angka 2024 sangat sementara

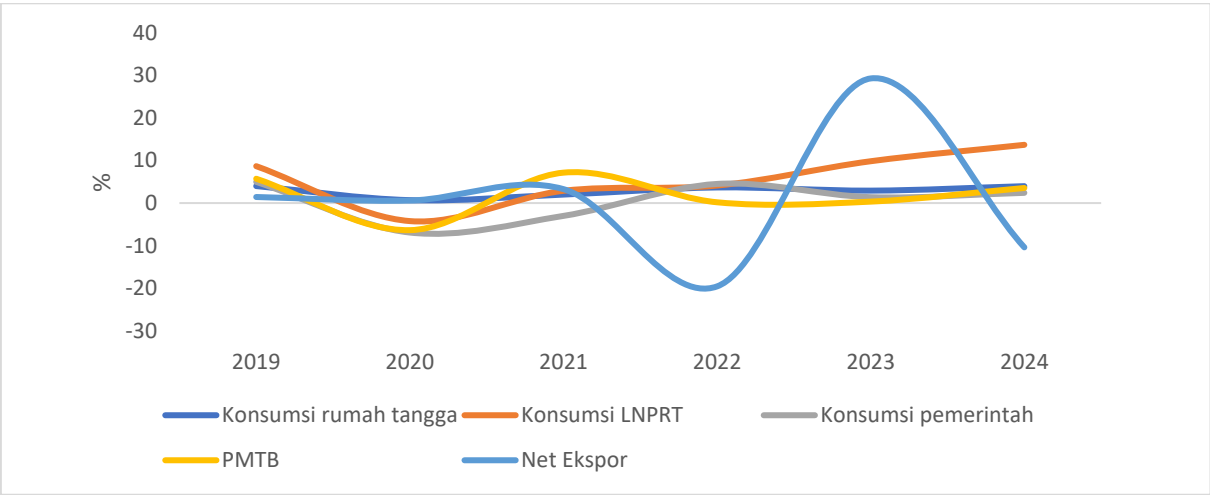
Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pada 2024 berkaitan erat dengan perlambatan sektor pertanian dan industri pengolahan, yang merupakan sektor strategis dalam struktur ekonomi daerah. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi signifikan dari pertumbuhan 16,40% pada 2023 menjadi -6,4% pada 2024, mencerminkan adanya disrupsi dalam kapasitas produksi atau melemahnya permintaan pasar. Sementara itu, sektor pertanian, yang menjadi penopang utama perekonomian, menunjukkan perlambatan pertumbuhan, mengindikasikan potensi gangguan pada produksi, distribusi, atau faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas dan kebijakan sektor agribisnis. Meskipun sektor perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan menunjukkan tren lebih stabil, kontribusinya terhadap perekonomian tidak cukup untuk mengompensasi kontraksi di dua sektor utama. Dengan demikian, perlambatan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pada 2024 mencerminkan *shock* struktural dalam sektor produksi utama, yang berdampak pada keseluruhan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2. 31
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019 – 2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Gambar 2. 32
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Menurut Pengeluaran, 2019 – 2024




Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

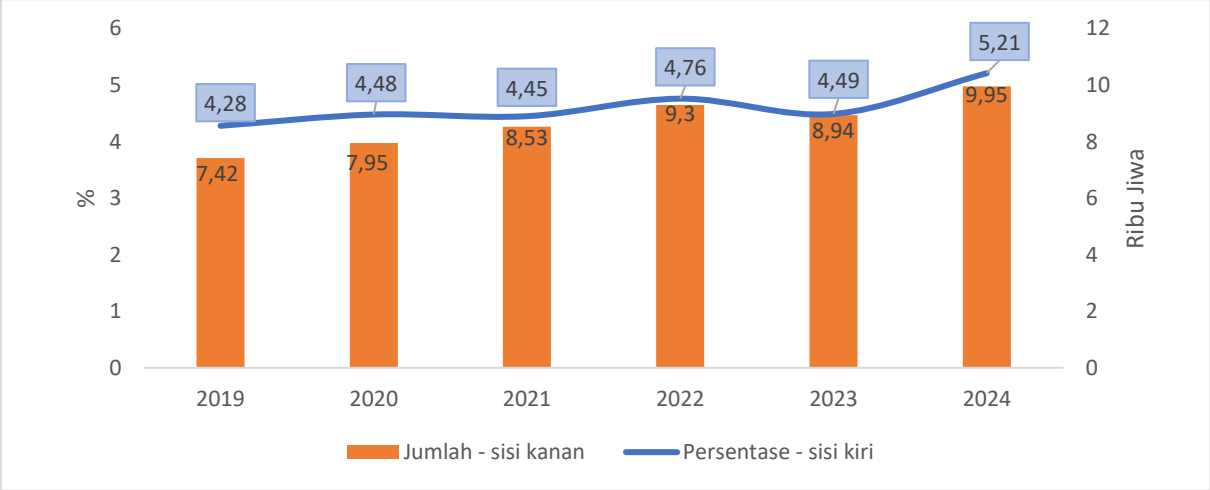
Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh kinerja negatif net ekspor, yang mengalami kontraksi signifikan dari 29,25 persen pada 2023 menjadi -10,40 persen pada 2024. Kontraksi ini mengindikasikan penurunan daya saing ekspor atau permintaan CPO dunia, sehingga memberikan tekanan negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat masing-masing sebesar 3,96% dan 13,67%, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mulai pulih dengan pertumbuhan 3,54%, kontribusi positif ini tidak cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari anjloknya net ekspor. Sementara itu, konsumsi pemerintah yang tumbuh hanya 2,39% mencerminkan peran fiskal yang masih terbatas dalam menopang pemulihan ekonomi. Dengan demikian, penurunan berarti kinerja ekonomi Kabupaten Pasangkayu dari sisi pengeluaran terutama disebabkan oleh defisit

neraca perdagangan yang membebani pertumbuhan, sementara sektor konsumsi dan investasi belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi ekonomi secara signifikan.

**Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah Pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Selain karena amanat UUD 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, kemiskinan juga masih menjadi masalah Pembangunan daerah di Kabupaten Pasangkayu. Secara nasional, kemiskinan masih dianggap sebagai salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045. Itu sebabnya, tahun 2022, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai dasar hukum bagi semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Gambar 2. 33
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 8,94 ribu jiwa menjadi 9,95 ribu jiwa pada 2024 atau bertambah sekitar 1,01 ribu jiwa. Secara persentase, kemiskinan juga naik dari 4,49 persen pada 2023 menjadi 5,21 persen pada 2024. Kenaikan ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun yang sama, yang terutama disebabkan oleh kontraksi di sektor industri pengolahan (-6,4%) serta defisit net ekspor yang semakin memburuk (-10,40%). Penurunan kinerja ekonomi ini kemungkinan berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Dengan

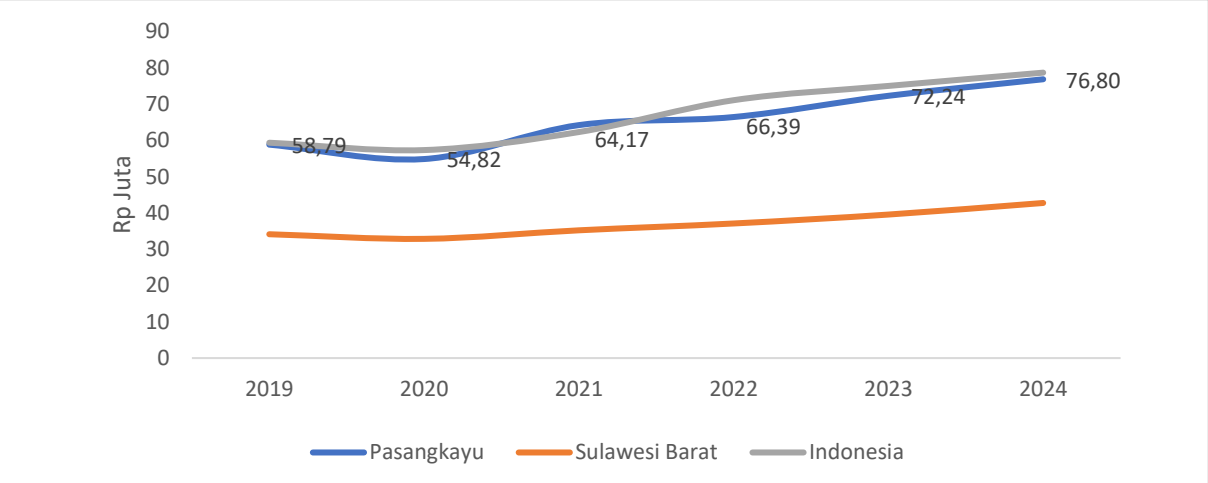
kata lain, melemahnya aktivitas ekonomi di sektor-sektor utama berkontribusi langsung terhadap memburuknya kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024.

Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 21.947 jiwa, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10.680 jiwa. Sebaran penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat bervariasi di setiap kabupaten, dengan Kabupaten Mamuju menjadi wilayah angka tertinggi, yakni 6.121 jiwa. Disusul Kabupaten Pasangkayu sebanyak 5.720 jiwa, Polewali Mandar (Polman) 4.712 jiwa, Mamuju Tengah 2.539 jiwa, Majene 1.434 jiwa, dan Mamasa sebanyak 1.141 jiwa.

**Pendapatan/PDRB Per Kapita**

Dari tahun 2019-2024, PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020. PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu tahun 2019 sebesar Rp58,79 juta, mengalami penurunan menjadi Rp54,82 juta pada 2020, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Namun, setelah itu, terjadi pemulihan yang cukup signifikan, dengan peningkatan bertahap menjadi Rp64,17 juta 2021, Rp66,39 juta 2022, Rp72,24 juta pada 2023, dan mencapai Rp 76,80 juta 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata Sulawesi Barat, PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu secara konsisten lebih tinggi, di mana Sulawesi Barat hanya mencapai Rp42,72 juta pada 2024, menunjukkan bahwa Pasangkayu merupakan salah satu daerah dengan tingkat produktivitas ekonomi tertinggi di provinsi ini. Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu masih sedikit di bawah rata-rata nasional, di mana pada 2024, Indonesia mencapai Rp78,62 juta.

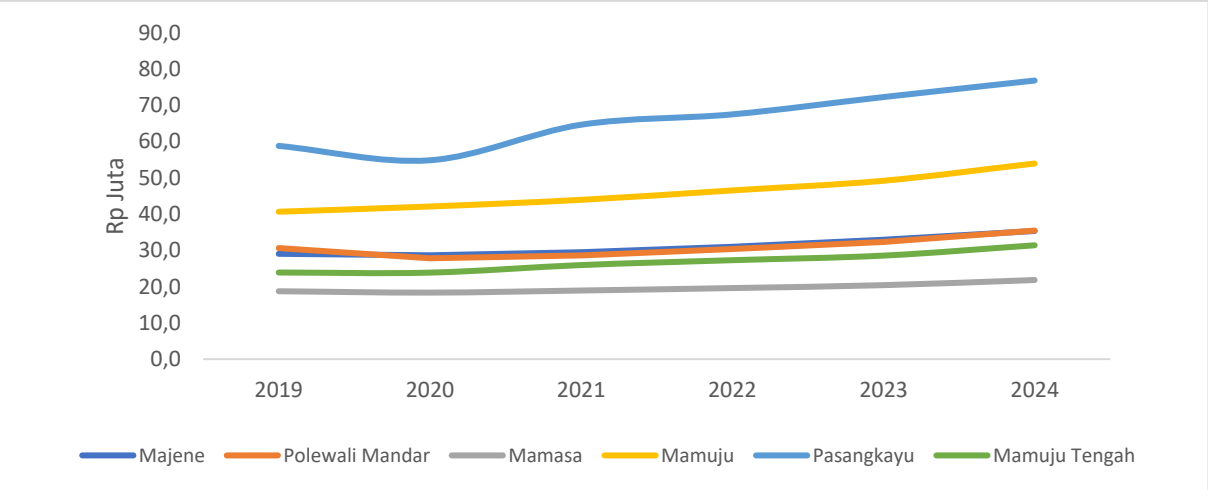
Gambar 2. 34
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia
Tahun 2019–2024




Sumber: BPS, diolah
*Catatan angka 2024 sangat sementara

Kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu yang relatif kuat setelah 2020 didorong oleh dominan sektor pertanian dan industri pengolahan, serta peningkatan net ekspor. Namun, meskipun mengalami tren positif, namun laju peningkatannya melambat dan capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita nasional, yang menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 35
PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019-2024



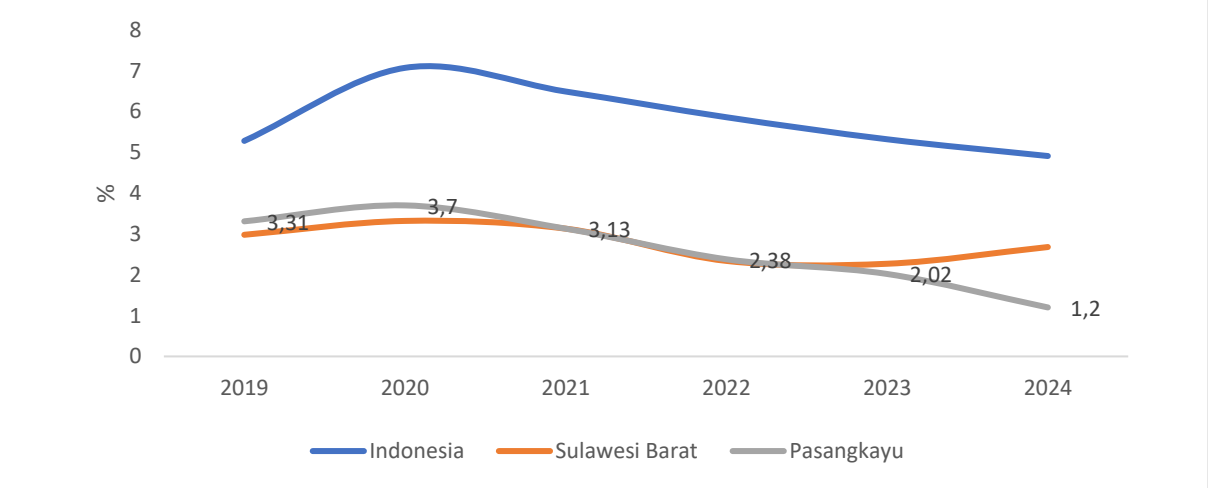

Sumber: BPS, diolah
*Catatan angka 2024 sangat sementara

Selama tahun 2019-2024, PDRB per kapita antar kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan di antara masing-masing kabupaten. Pada tahun 2019, Pasangkayu memiliki nilai PDRB per kapita sebesar Rp58,8 juta, yang merupakan nilai tertinggi di antara kabupaten lainnya, diikuti oleh Mamuju dengan Rp40,6 juta. Kabupaten lain seperti Majene dan Mamasa menunjukkan nilai yang lebih rendah, yaitu masing-masing Rp29,0 juta dan Rp18,7 juta. Tren pertumbuhan selama periode tersebut juga menunjukkan peningkatan di semua kabupaten. Pada tahu 2024, Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp76,8 juta, sedangkan Mamuju naik menjadi Rp 53,9 juta dan Majene naik ke Rp35,3 juta. Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah juga mengalami kenaikan, dengan masing-masing mencapai Rp35,4 juta dan Rp31,4 juta. Sedangkan Mamasa berada di posisi paling bawah dengan Rp21,8 juta pada tahun 2024. Kabupaten Pasangkayu secara konsisten memimpin dalam hal PDRB per kapita dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat, mengindikasikan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun perlu dicermati masih rendahnya diversifikasi industri dan ketergantungan terhadap ekspor komoditas.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pasangkayu justru menurun dari 2,02 persen pada 2023 menjadi 1,2 persen pada 2024, meskipun disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan adanya dinamika struktural dalam pasar tenaga kerja. Secara teoritis, perlambatan ekonomi umumnya berimplikasi pada peningkatan pengangguran akibat berkurangnya permintaan tenaga kerja. Namun, dalam konteks ini, penurunan tingkat pengangguran dapat mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor informal, atau berkurangnya jumlah angkatan kerja akibat migrasi dan faktor demografi. Selain itu, sektor konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh stabil serta potensi kebijakan pemerintah dalam mendukung lapangan kerja informal dapat menjadi faktor yang menahan kenaikan angka pengangguran.

Gambar 2. 36
Perkembangan TPT Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024



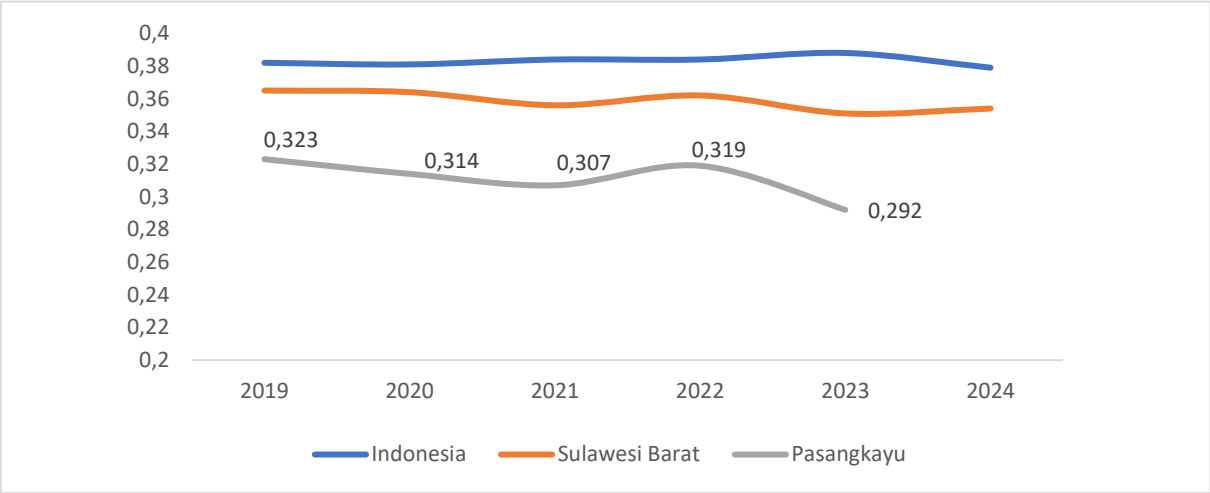

Sumber: BPS, diolah

**Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Perbaikan yang terus terjadi dari sisi kesejahteraan masyarakat secara umum perlu dibarengi dengan distribusi yang lebih merata ke seluruh kelompok pendapatan sehingga dapat menurunkan ketimpangan antar kelompok pendapatan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat yaitu rasio gini. Adapun perkembangan rasio gini Kabupaten Pasangkayu pada periode 2019-2023 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, indeks gini Kabupaten Pasangkayu tercatat sebesar 0,323 terus mengalami penurunan menjadi 0,292 di tahun 2023. Level ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasangkayu khususnya pada tahun 2023 telah tergolong dalam kategori rendah, sebab berada di bawah angka 0,3. Hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan kesejahteraan serta distribusi manfaat ekonomi pada berbagai kelompok pendapatan khususnya kelompok menengah ke bawah. Sementara itu, bila dibandingkan dengan capaian indeks gini di Provinsi

Sulawesi Barat dan Nasional, kinerja Kabupaten Pasangkayu juga tergolong lebih baik, sebab sejak tahun 2019-2023, capaiannya selalu lebih rendah. Artinya, pendapatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum relatif lebih merata dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Gambar 2. 37
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2019 – 2024




Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

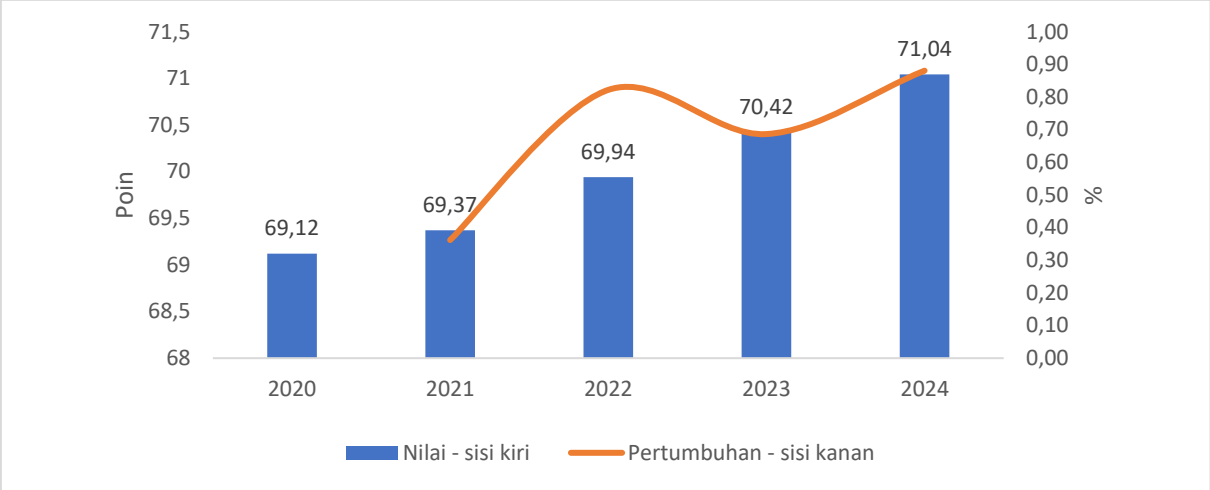
**Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu ukuran untuk menilai perkembangan modal manusia di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2020 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang menjadi indikator utama dalam pengukuran indeks ini. Nilai IPM mengalami peningkatan dari 69,12 tahun 2020 menjadi 71,04 pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang bervariasi setiap tahunnya. Pertumbuhan IPM sebesar 0,36 persen pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan awal pasca Covid-19, sementara peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2022 dengan angka 0,82 persen, yang dapat dikaitkan dengan perbaikan akses layanan dasar serta peningkatan partisipasi pendidikan dan kesehatan. Namun, pada 2023, laju pertumbuhan IPM mengalami sedikit perlambatan menjadi 0,69 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 0,88 persen pada tahun 2024.

Meskipun berada di atas rata-rata Sulawesi Barat (70,46) tahun 2024, IPM Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten lain. Kabupaten Majene mencatatkan IPM tertinggi sebesar 73,25, diikuti oleh Mamuju dengan 71,86, menunjukkan bahwa kedua daerah ini memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan

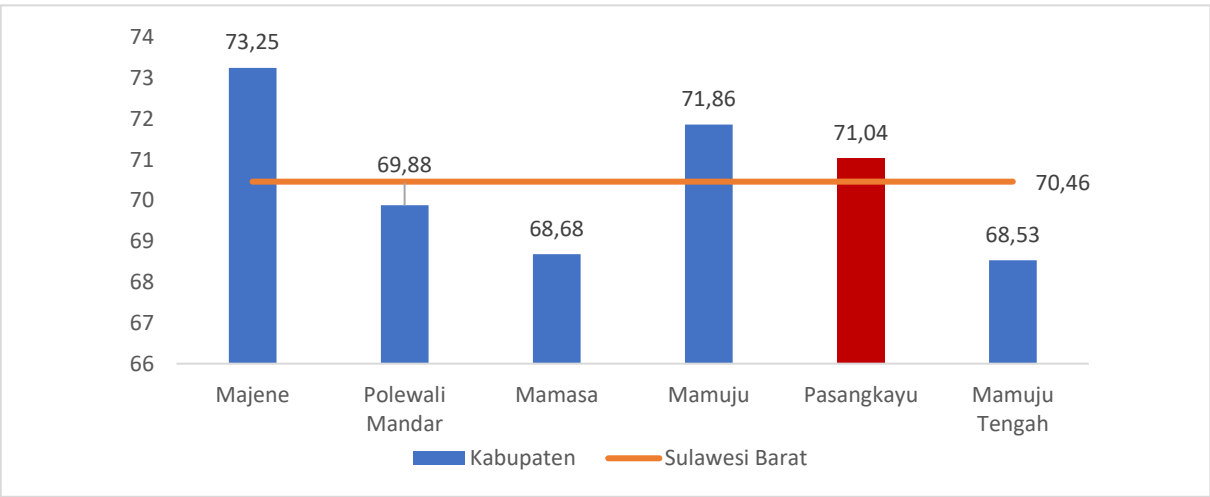
kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Pasangkayu masih belum setinggi kabupaten dengan IPM yang lebih baik, terutama dalam aspek keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2. 38
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat
*Catatan perhitungan IPM disesuaikan dengan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Gambar 2. 39
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat
*Catatan perhitungan IPM disesuaikan dengan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki IPM lebih rendah, seperti Polewali Mandar (69,88), Mamasa (68,68), dan Mamuju Tengah (68,53), Pasangkayu memang berada dalam posisi yang lebih baik. Namun, selisih yang kecil dengan rata-rata provinsi menunjukkan bahwa Pasangkayu belum sepenuhnya unggul dan masih menghadapi tantangan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan manusia dari kabupaten dengan IPM lebih tinggi. Untuk

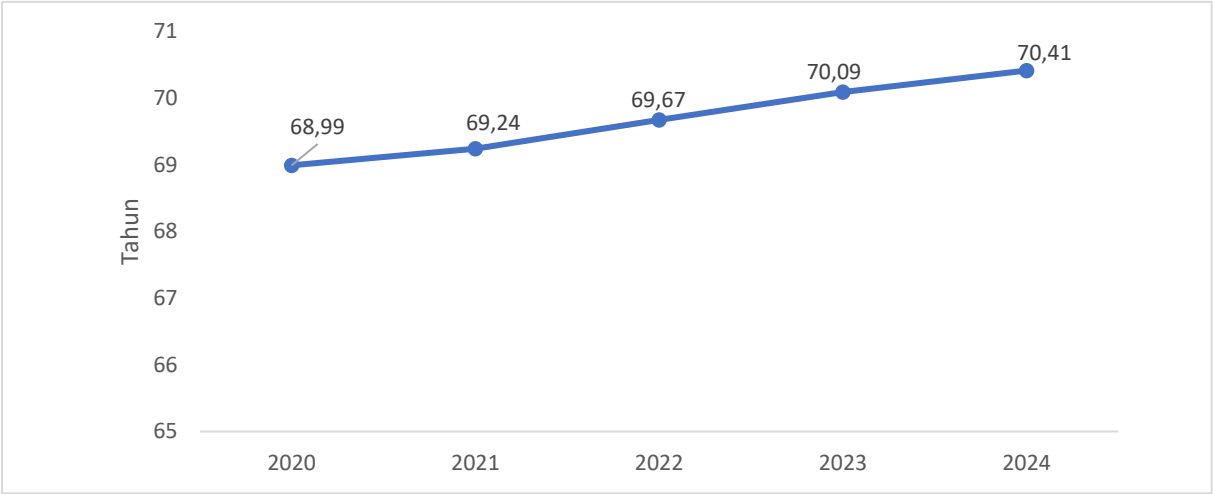
mempercepat peningkatan IPM, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kesenjangan dengan kabupaten yang lebih maju dapat dipersempit secara berkelanjutan.

### 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

### Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, UHH berada di angka 68,99 tahun, dan terus mengalami kenaikan menjadi 69,24 tahun pada tahun 2021, 69,67 tahun pada tahun 2022, serta 70,09 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai 70,41 tahun pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh membaiknya akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta kondisi sosial-ekonomi secara umum.

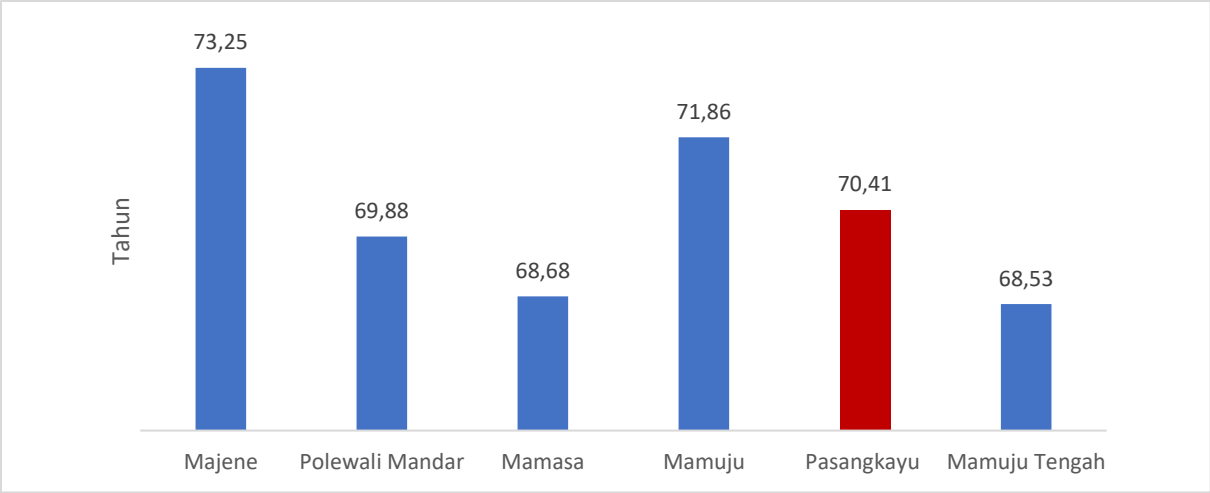
Gambar 2. 40
Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Capaian UHH Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 menempatkannya di posisi tengah jika dibandingkan dengan lima kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene mencatat angka tertinggi dengan UHH 73,25 tahun, disusul oleh Mamuju dengan 71,86 tahun. Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu sedikit lebih tinggi dibanding Polewali Mandar (69,88 tahun), Mamasa (68,68 tahun), dan Mamuju Tengah yang memiliki angka terendah yaitu 68,53 tahun. Posisi Pasangkayu yang berada di atas rata-rata provinsi mencerminkan kemajuan dalam aspek kesehatan dan kualitas hidup, namun masih terdapat ruang perbaikan agar dapat menyamai atau melampaui kabupaten dengan performa terbaik seperti Majene. Penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan gizi, serta intervensi sosial yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan usia harapan hidup lebih lanjut.

Gambar 2. 41
Usia Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

**Indeks Keluarga Sehat**

Menurut World Health Organization (WHO), keluarga sehat merupakan keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Untuk mengukur capaian keluarga sehat, Kementerian Kesehatan menyusun Indeks Keluarga Sehat (IKS). Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 indikator keluar sehat mencakup: 1). keluarga mengikuti program KB, 2). ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3). bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, 4). bayi mendapat ASI ekslusif, 5). balita mendapat pemantauan pertumbuhan, 6). penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, 7). penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, 8). penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, 9). anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10). keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional, 11). keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, 12). keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Namun, data Indeks Keluarga Sehat belum tersedia di level kabupaten/kota.

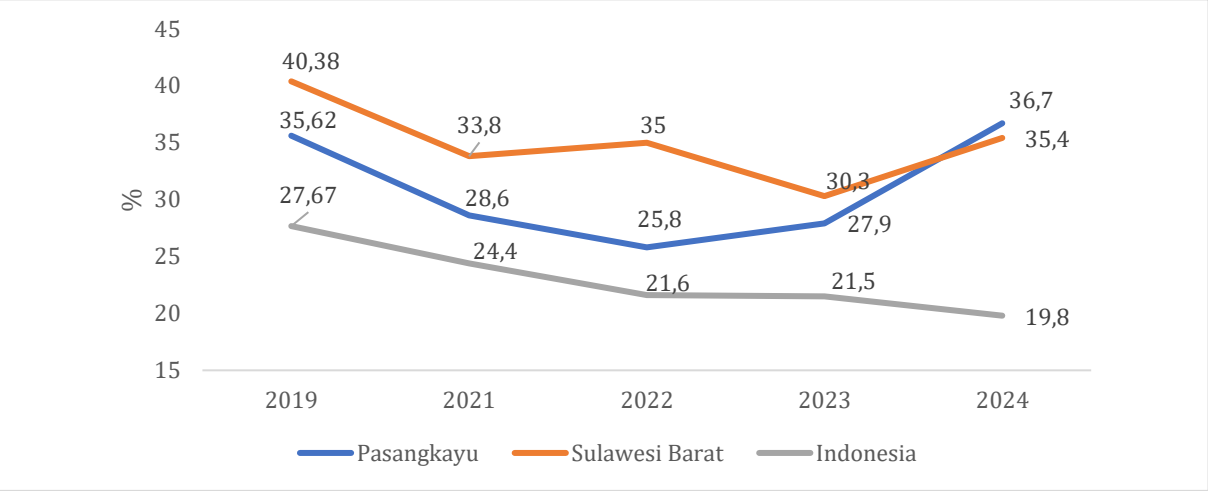
**Prevalensi Stunting**

*Stunting* merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan dimasukkan dalam RPJPN 2025-2045. Percepatan penurunan *stunting* dimasukkan sebagai salah satu *game changer* yang bisa mempengaruhi transformasi sosial. Selain itu, *stunting* dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagalnya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi karena akan sagat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dimasukkannya isu *stunting* secara tidak langsung mengharuskan semua pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut, termasuk pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

*Stunting* di Kabupaten Pasangkayu masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Angka prevalensi *stunting* tahun 2024 sebesar 36,7 persen, mengalami peningkatan berarti dari tahun sebelumnya (27,9%). Angka 36,7 persen menunjukkan bahwa ada 37 orang dari 100 anak usia 0-59 bulan (Balita) yang mengalami *stunting*. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 19,8 persen dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 35,4 persen. Jika dibandingkan dengan daerah lain, posisi Kabupaten Pasangkayu tertinggi kedua setelah Mamuju yang mencatatkan angka 38,7 persen.

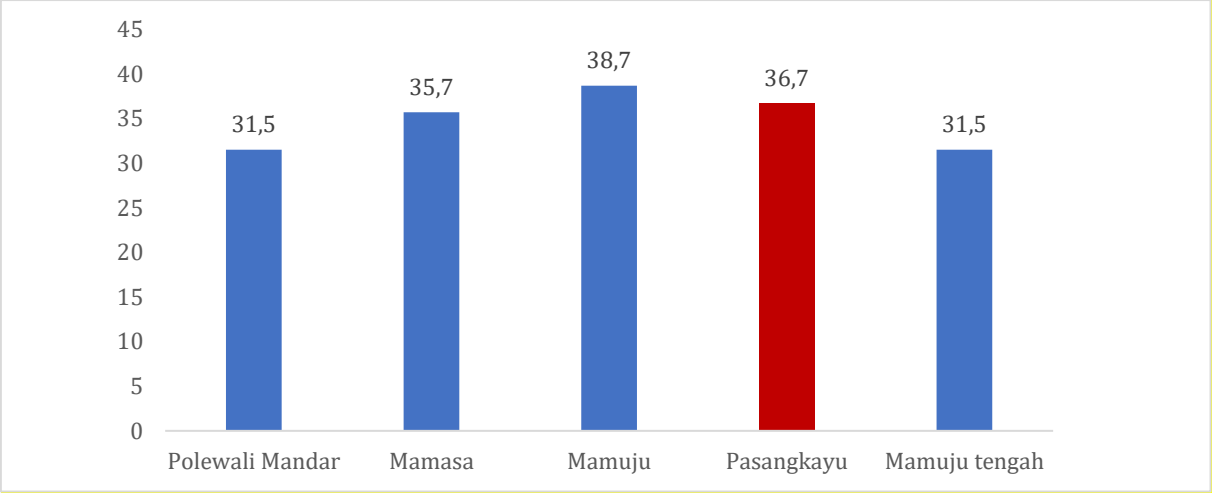
Tingginya angka stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga indikator keterbatasan pembangunan sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas jangka panjang. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah, prestasi pendidikan yang lebih buruk, dan peluang kerja yang lebih terbatas di masa depan. Konsekuensinya, stunting berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi daerah hingga 2–3 persen per tahun dalam jangka panjang akibat hilangnya potensi produktivitas tenaga kerja.

Gambar 2. 42
Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2024




Sumber: SSGI dan SKI oleh Kementerian Kesehatan

Gambar 2. 43
Perbandingan Prevalensi Stunting di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



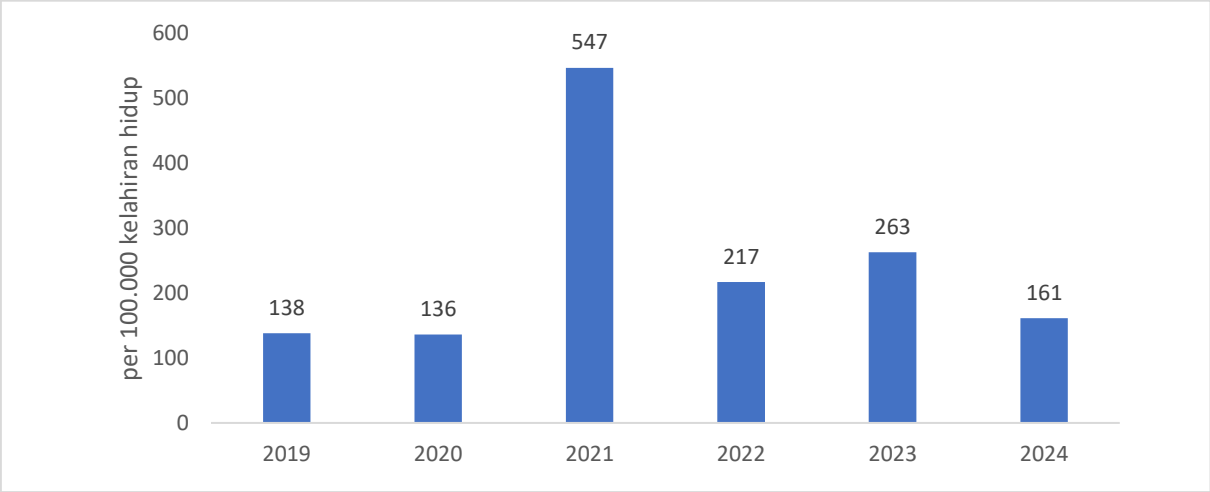

Sumber: SSGI 2024, diolah

**Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kunci dalam menilai kualitas sistem kesehatan maternal serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. AKI menjadi parameter yang sensitif terkait derajat kesehatan perempuan dan dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan, infrasktrutur, dan kesehatan ibu remaja. Di Kabupaten Pasangkayu, tren AKI menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2019–2024, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem layanan kesehatan maternal. Pada tahun 2019, AKI tercatat sebesar 138 per 100.000 kelahiran hidup, sedikit menurun menjadi 136 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan drastis hingga mencapai 547 per 100.000 kelahiran hidup, yang kemungkinan besar mencerminkan dampak gangguan layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19, keterbatasan fasilitas medis, atau faktor sosial-ekonomi yang menghambat akses perempuan terhadap layanan kesehatan esensial selama kehamilan dan persalinan.

Setelah lonjakan pada tahun 2021, AKI mulai menunjukkan tren penurunan, mencapai 217 pada tahun 2022 dan 263 pada tahun 2023, sebelum kembali turun ke 161 pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan setelah puncak krisis, angka tersebut masih jauh dari target nomor 3 Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030 yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan AKI dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya pemulihan dalam sistem layanan kesehatan maternal, namun masih dibutuhkan investasi lebih lanjut dalam akses layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta penguatan program intervensi berbasis komunitas untuk memastikan setiap ibu mendapatkan perawatan yang aman selama kehamilan dan persalinan.

Gambar 2. 44
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



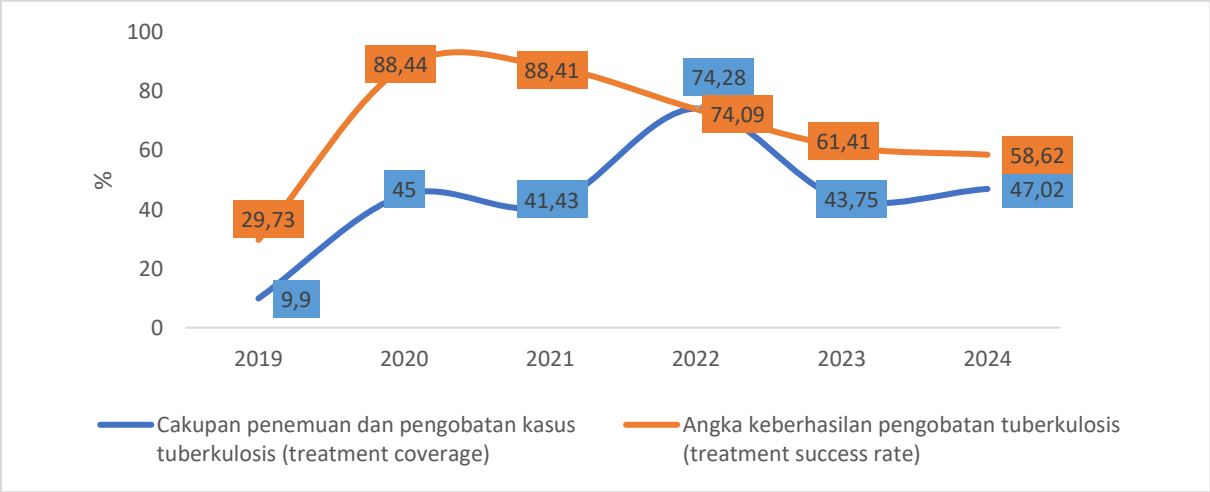

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Penanganan Tuberkulosis**

Penanganan tuberkulosis (TB) di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan dinamika yang kompleks dalam cakupan pengobatan dan tingkat keberhasilannya selama periode 2019–2024. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB (*treatment coverage*) meningkat secara signifikan dari 9,9 persen pada 2019 menjadi 45 persen pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perluasan akses layanan kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, pada tahun 2021 cakupan ini menurun menjadi 41,43 persen, sebelum mengalami lonjakan signifikan ke angka 74,09 persen pada tahun 2022. Setelah itu, cakupan kembali mengalami penurunan menjadi 43,75 persen pada tahun 2023 dan sedikit meningkat ke angka 47,02 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan tantangan dalam sistem kesehatan, seperti keterbatasan sumber daya, distribusi layanan yang tidak merata, atau faktor sosial yang mempengaruhi akses terhadap layanan TB.

Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan TB (*treatment success rate*) menunjukkan tren berbeda. Pada tahun 2019, tingkat keberhasilan berada di 29,73 persen, meningkat tajam ke 88,44 persen tahun 2020 dan tetap stabil di 88,41 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka ini turun signifikan menjadi 74,28 persen, lalu terus mengalami penurunan ke 61,41 persen pada tahun 2023 dan 58,62 persen pada tahun 2024. Tren ini dapat mengindikasikan tantangan dalam kepatuhan pasien terhadap pengobatan, resistensi obat, atau keterbatasan dalam sistem pemantauan dan pendampingan pasien.

Gambar 2. 45
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (*treatment coverage*) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*treatment success rate*) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



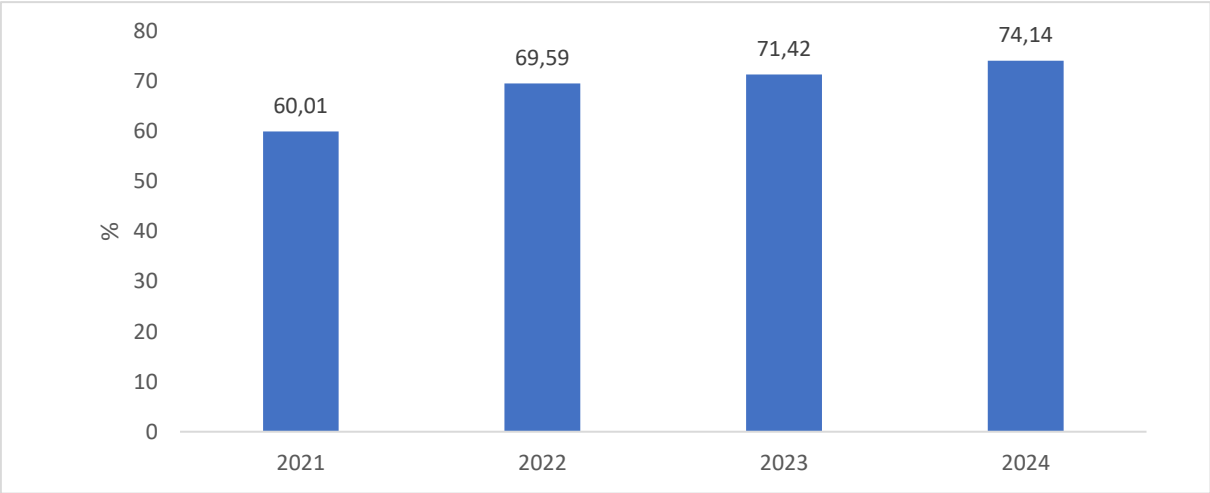

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, diolah

Penurunan dalam tingkat keberhasilan pengobatan bersamaan dengan fluktuasi cakupan pengobatan menunjukkan bahwa intervensi kesehatan masyarakat perlu lebih terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan akses, keberlanjutan pengobatan, serta pemantauan pasien untuk memastikan efektivitas intervensi. Diperlukan strategi yang lebih kuat, termasuk penguatan sistem kesehatan primer, penyediaan sumber daya yang lebih baik, dan kampanye kesadaran masyarakat, guna memastikan deteksi dini yang lebih luas dan tingkat keberhasilan pengobatan yang lebih stabil.

**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Selama periode 2021-2024, cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 60,01 persen, kemudian meningkat signifikan ke 69,59 persen pada tahun 2022, diikuti oleh kenaikan lebih lanjut ke 71,42 persen tahun 2023 dan mencapai 74,14 persen pada tahun 2024. Peningkatan cakupan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan, yang berpotensi mengurangi risiko finansial akibat biaya pengobatan yang tinggi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun terjadi kemajuan, cakupan JKN Kabupaten Pasangkayu masih terendah dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024, dimana Mamuju 92,40 persen, Majene 89,05 persen, Polewali Mandar 86,45 persen, Mamuju Tengah 85,15 dan Mamasa 78,70 persen.

Gambar 2. 46
Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024



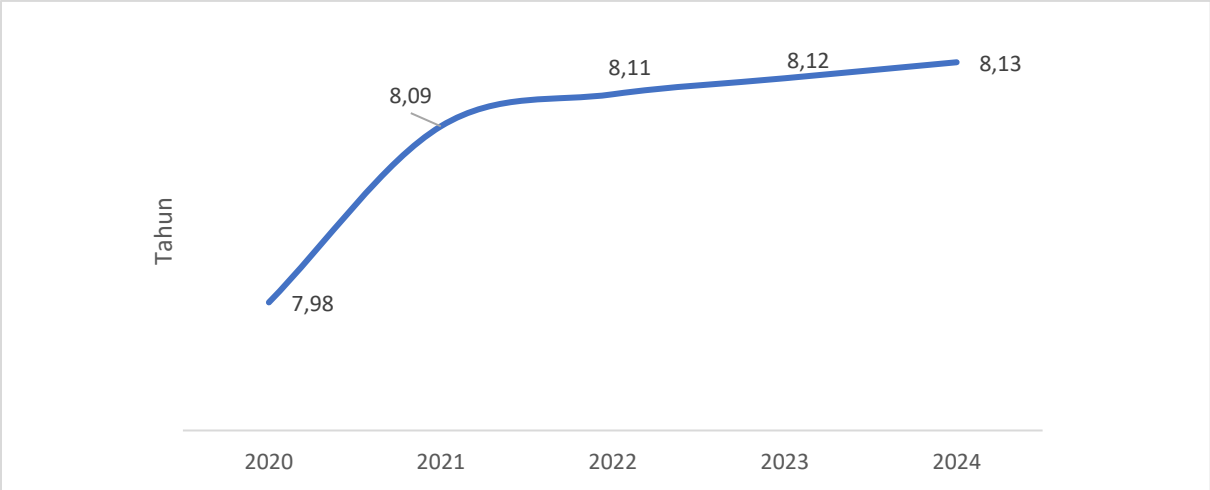

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

### 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

### Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pasangkayu dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, RLS berada di angka 7,98 tahun, lalu mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 8,09 tahun di tahun 2021. Namun, setelah lonjakan awal tersebut, peningkatannya mulai melambat, terlihat dari angka yang hanya naik tipis menjadi 8,11 tahun pada 2022, kemudian 8,12 tahun di 2023, dan mencapai 8,13 tahun pada 2024. Perlambatan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan rata-rata lama sekolah berjalan stagnan dalam tiga tahun terakhir, dan memerlukan intervensi kebijakan atau program strategis yang lebih kuat untuk mendorong percepatan peningkatan pendidikan formal.

Gambar 2. 47
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu 2020-2024

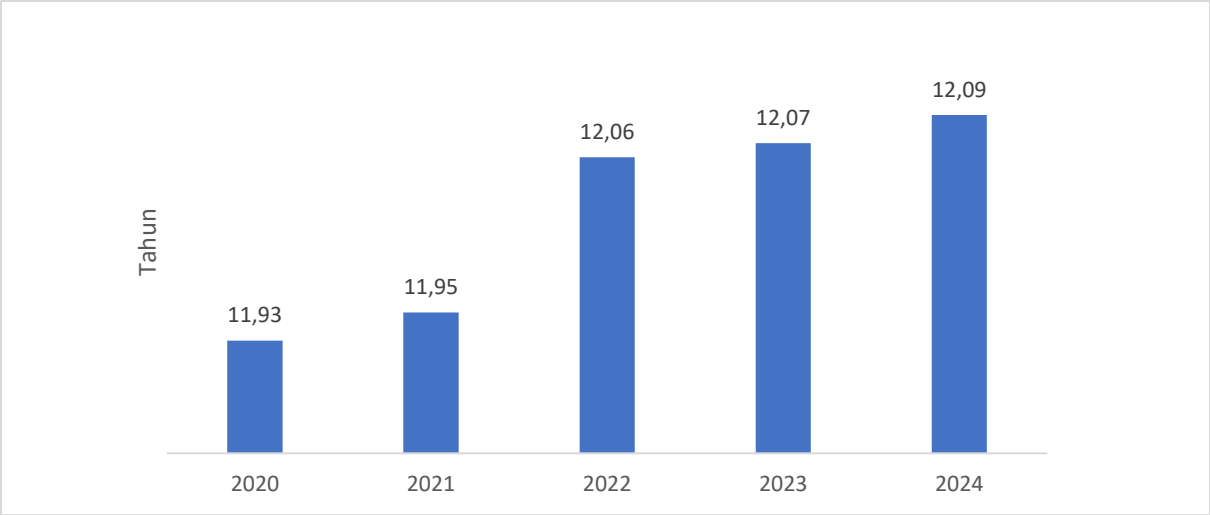



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

## Harapan Lama Sekolah

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan tren peningkatan dari 11,93 tahun pada 2020 menjadi 12,09 tahun pada 2024. Meski pertumbuhannya relatif stabil, laju peningkatan HLS pun terlihat mulai menurun pasca 2022. HLS mencerminkan seberapa lama anak-anak yang memasuki usia sekolah saat ini diperkirakan akan mengenyam pendidikan di masa depan, jika pola partisipasi pendidikan saat ini terus berlanjut. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa meskipun akses terhadap pendidikan di Pasangkayu telah membaik, dibutuhkan strategi intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Fokus perlu diberikan pada pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan partisipasi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi agar pertumbuhan RLS dan HLS tidak stagnan.

Gambar 2. 48
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

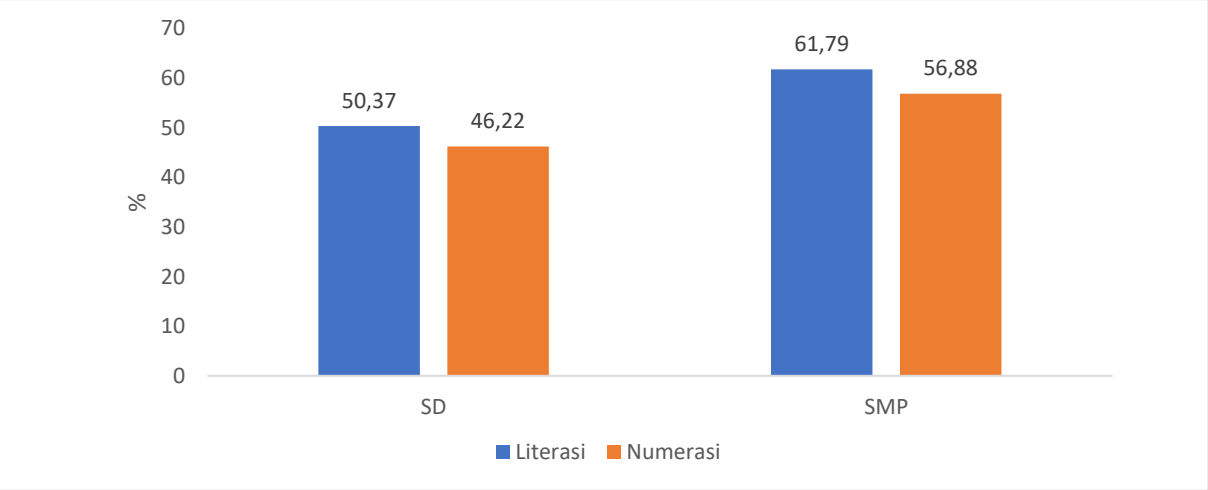
## Angka Literasi/Numerasi

Capaian angka literasi dan numerasi di Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 menunjukkan tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia. Pada jenjang SD, skor literasi hanya mencapai 50,37 persen dan numerasi 46,22 persen, yang berarti hampir setengah siswa belum menguasai kompetensi dasar membaca, menulis, dan berhitung. Meski terdapat peningkatan di jenjang SMP dengan angka literasi sebesar 61,79 persen dan numerasi sebesar 56,88 persen, ketertinggalan di kelas awal masih menjadi hambatan utama. Kesenjangan yang lebih besar pada numerasi mengindikasikan lemahnya penguasaan matematika dasar, yang berpotensi mengurangi minat dan kesiapan siswa untuk menekuni bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi di usia sekolah dasar berdampak langsung pada modal manusia, produktivitas, dan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang

di Kabupaten Pasangkayu. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan sosial. Dari sisi pendidikan, kualitas pengajaran di kelas awal masih belum sepenuhnya berbasis pada penguasaan kompetensi dasar, ditambah keterbatasan pelatihan guru dan minimnya bahan ajar yang menarik serta sesuai konteks lokal. Ketimpangan akses pendidikan juga berperan, di mana sekolah di wilayah terpencil atau perbatasan menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Dari sisi sosial, tingginya angka stunting (36,7%) berkontribusi pada rendahnya perkembangan kognitif anak, sehingga menghambat kemampuan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Lingkungan rumah tangga dengan tingkat literasi orang tua yang rendah, kurangnya kebiasaan membaca, dan terbatasnya sumber belajar di rumah turut memperdalam kesenjangan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering kali membuat anak kurang mendapat dukungan optimal untuk belajar, baik dari segi waktu, gizi, maupun fasilitas.

Gambar 2. 49
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

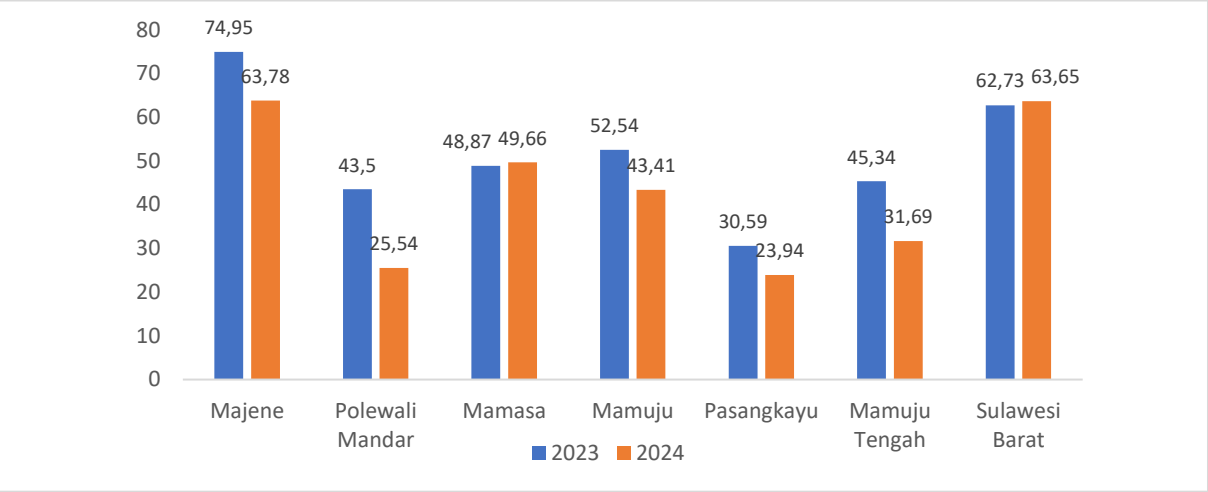



Sumber: Mendikdasmen, diolah

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Angka indeks yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya literasi, seperti perpustakaan, buku, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan, masih terbatas di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 30,59, mengalami penurunan menjadi 23,94 pada tahun 2024. Capaian IPLM Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2. 50
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023-2024




Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya IPLM Pasangkayu adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, yang hanya sebesar 0,0231, jauh di bawah Majene (1,00) dan Mamuju (0,8719). Hal ini menunjukkan masih lemahnya budaya literasi masyarakat dan rendahnya efektivitas promosi atau pelayanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran non-formal. Selain itu, rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu hanya 0,0487, yang juga terendah di Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas terhadap sumber bacaan, baik dari segi jumlah, variasi, maupun relevansi bahan pustaka. Ketercukupan koleksi yang rendah kemungkinan besar membuat perpustakaan menjadi kurang menarik untuk dikunjungi, apalagi digunakan secara aktif. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan hanya 0,0947 per hari, yang relatif rendah dibandingkan daerah lain.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

| Kabupaten /Kota | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Pemerataan Layanan Perpustakaan | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan | Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP | Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan | Jumlah Anggota Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majene | 63,78 | 1 | 0,2431 | 1 | 0,2035 | 1 | 1 | 0,0182 |
| Polewali Mandar | 25,54 | 0,19 | 0,0374 | 0,1211 | 0,039 | 1 | 0,0224 | 0,378 |
| Mamasa | 49,66 | 0,1269 | 1 | 0,6604 | 0,0522 | 0,6305 | 0,0062 | 1 |
| Mamuju | 43,41 | 0,2789 | 0,1804 | 0,3933 | 0,0804 | 1 | 0,8719 | 0,2338 |
| Pasangkayu | 23,94 | 0,3629 | 0,0487 | 0,1758 | 0,0947 | 0,7328 | 0,0231 | 0,238 |

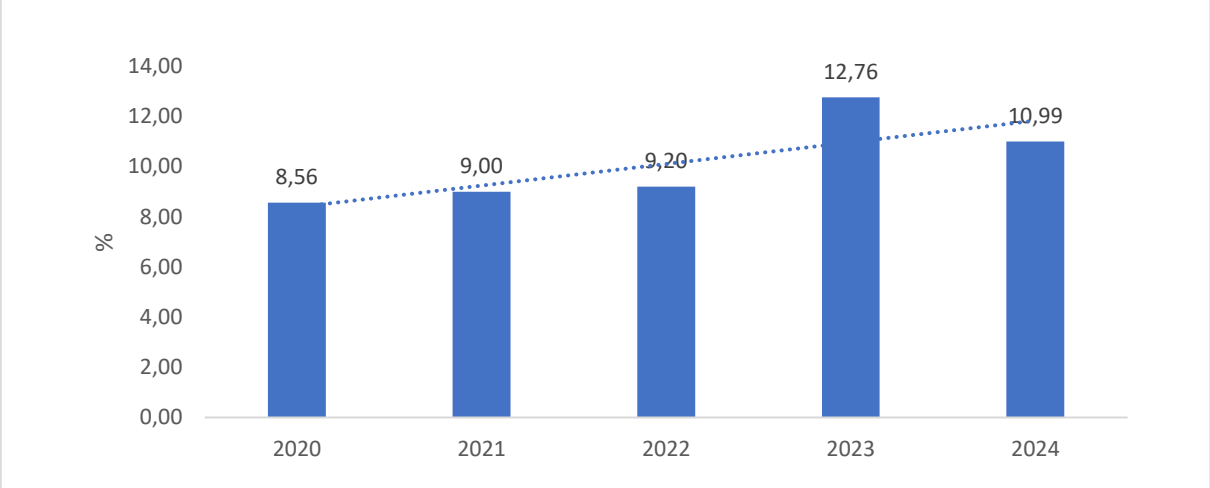
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamuju Tengah | 31,69 | 0,3775 | 0,2211 | 0,4563 | 0,2113 | 0,9403 | | 0,0116 |
| Sulawesi Barat | 63,65 | 0,3344 | 0,4046 | 1 | 0,094 | 1 | 0,6228 | 1 |

Indeks Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Akses terhadap pendidikan tinggi merupakan indikator kunci dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Data mengenai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019–2024, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2019, proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi berada di angka 8,24 persen, mengalami sedikit peningkatan ke 8,56 persen pada tahun 2020, dan terus naik menjadi 9,00 persen pada tahun 2021 serta 9,20 persen pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana angka ini melonjak ke 12,76 persen, yang dapat mencerminkan hasil dari kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, perluasan akses ke institusi pendidikan tinggi, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi.

Gambar 2. 51
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: BPS Pasangkayu, diolah

Namun, pada tahun 2024, proporsi ini mengalami sedikit penurunan ke 10,99 persen, yang dapat mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan tren positif, seperti faktor ekonomi, akses terhadap institusi pendidikan, atau perubahan dalam kebijakan tenaga kerja. Meskipun demikian, tren keseluruhan tetap menunjukkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dalam jangka panjang. Untuk memastikan keberlanjutan tren ini, diperlukan strategi yang mencakup investasi dalam infrastruktur pendidikan, kebijakan beasiswa yang lebih

luas, serta kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademik untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam ekonomi yang semakin berbasis pengetahuan.

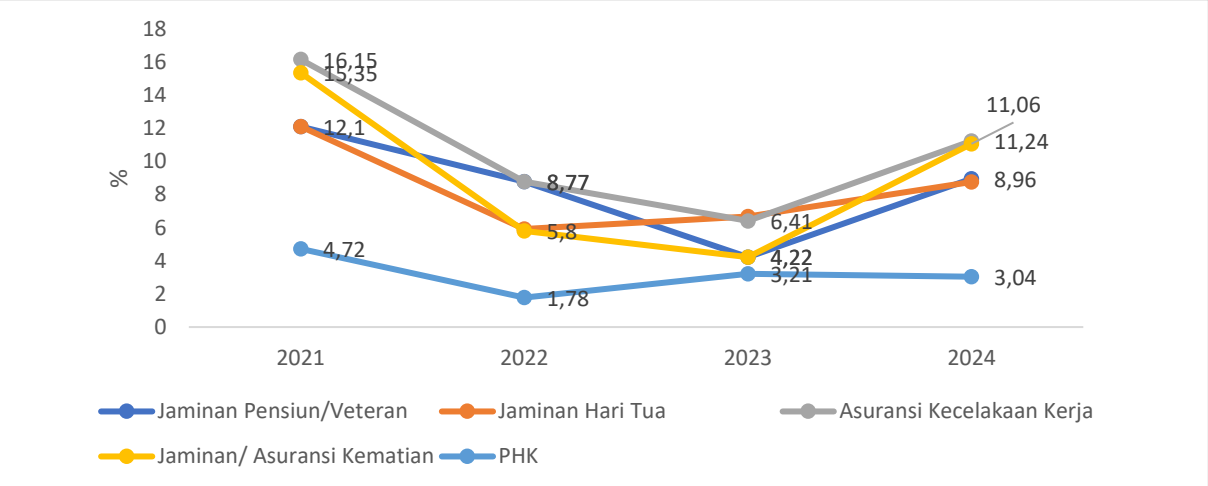
### 2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial**

Selama periode 2021 hingga 2024, tren persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya peningkatan perlindungan sosial, namun dengan ketimpangan distribusi antar jenis jaminan. Asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian konsisten menjadi dua komponen dengan cakupan tertinggi dibanding jenis jaminan lainnya. Sementara itu, cakupan jaminan hari tua dan pensiun veteran berfluktuasi dengan kecenderungan menurun setelah 2021, mencerminkan tantangan struktural dalam memperluas skema jaminan sosial yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal.

Meskipun terdapat peningkatan pada komponen pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 1,78 persen di tahun 2022 menjadi 3,04 persen pada tahun 2024, angka ini masih tergolong rendah dan mencerminkan terbatasnya jangkauan sistem jaminan ketenagakerjaan. Rendahnya cakupan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap guncangan pasar tenaga kerja.

Gambar 2. 52
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis di Kabupaten Pasangkayu 2024




Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

### 2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Bekebudayaan Maju

**Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Untuk mendukung pemajuan kebudayaan, diperlukan data dan informasi yang memadai agar

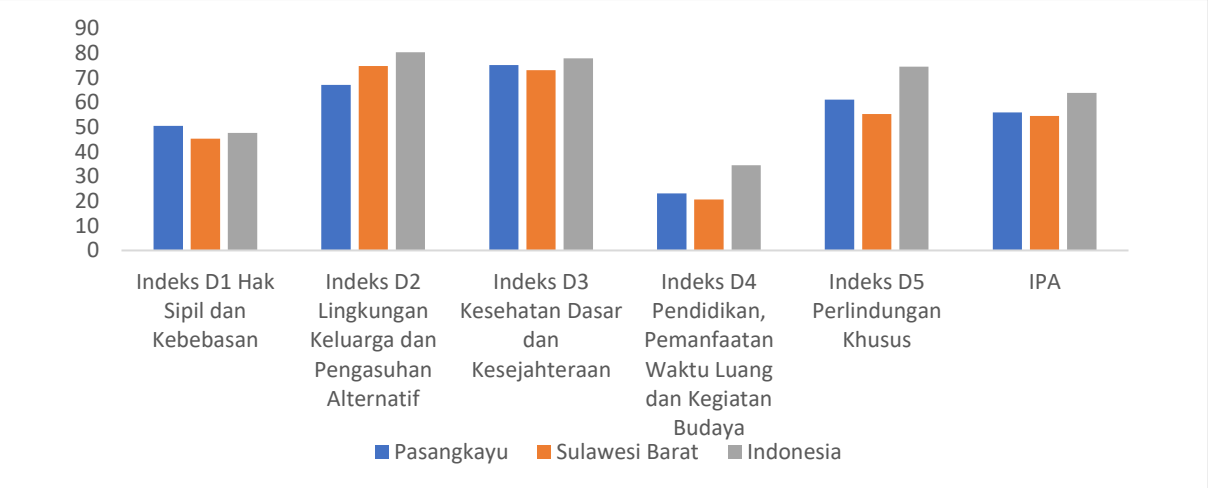
intervensi dapat dirumuskan dengan baik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi. IPK dibentuk dari 31 indikator yang tersebar ke dalam tujuh dimensi. Saat ini, IPK baru tersedia di level nasional dan provinsi, sehingga belum tersedia untuk Kabupaten Pasangkayu.

### 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

**Indeks Perlindungan Anak**

Anak merupakan aset bangsa, tetapi terkadang posisinya lemah sehingga mesti mendapatkan perlindungan dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Pasalnya, seringkali anak menjadi korban, baik dari keluarga sendiri maupun dari pihak lain di luar keluarganya. Untuk mengukur capaian perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terdapat lima klaster indikator yang membentuk IPA, yaitu 1). hak sipil dan kebebasan, 2). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3). kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4). pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5). perlindungan sosial. Upaya untuk untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Gambar 2. 53
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2023

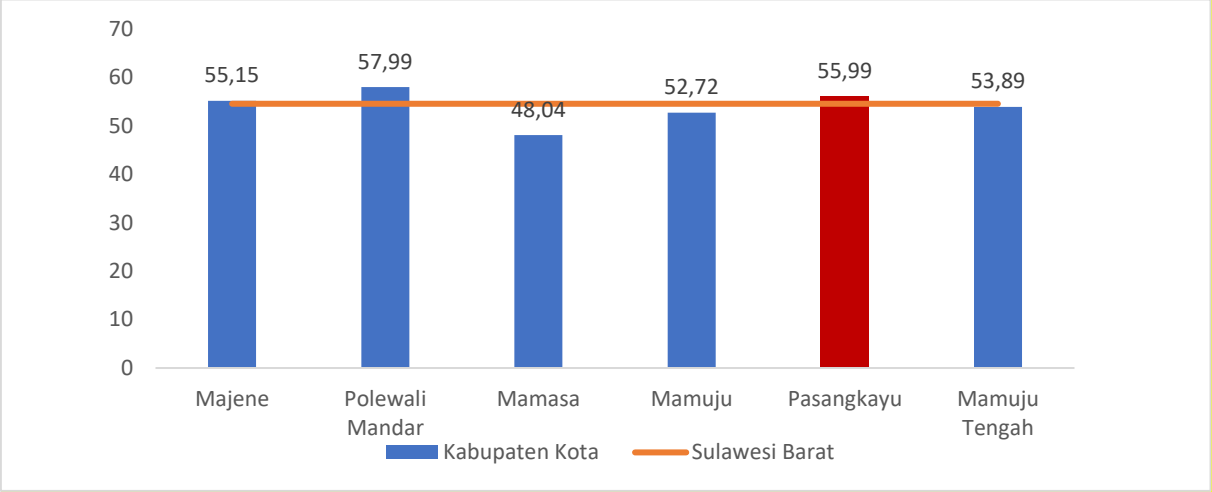



Sumber: Kementerian PPPA, diolah

Data Kementerian PPPA menunjukkan IPA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 sebesar 55,99, masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional (63,83). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi (55,53) masih lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kabupaten Pasangkayu menempati posisi tertinggi kedua nilai IPA, setelah Polewali

Mandar (57,99), lalu disusul Majene (55,15) dan Mamuju Tengah (53,89). Kabupaten Pasangkayu memilki capaian persentase tertinggi untuk Klaster penyusun IPA yaitu Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) (75,11) dan Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) dengan nilai 67,21.

Gambar 2. 54
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023




Sumber: Kementerian PPPA, diolah

**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Unit keluarga menjadi unit pengukuran keluarga yang menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa. Sementara itu, keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indeks Kualitas Keluarga dibentuk untuk mengukur capaian kualitas keluarga. Terdapat lima dimensi dan 25 indikator yanga membentuk IKK, yaitu:

- Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), terdiri dari dua indikator, yaitu memiliki akta kelahiran dan keluarga tinggal bersama.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri dari enam indikator, yaitu makan makanan sehat dan bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas enam indikator, yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja.

- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas lima indikator, yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator dobel untuk ayah dan ibu).
- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas enam indikator, yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, ada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan mengakses internet bersama anak dan orang tua.

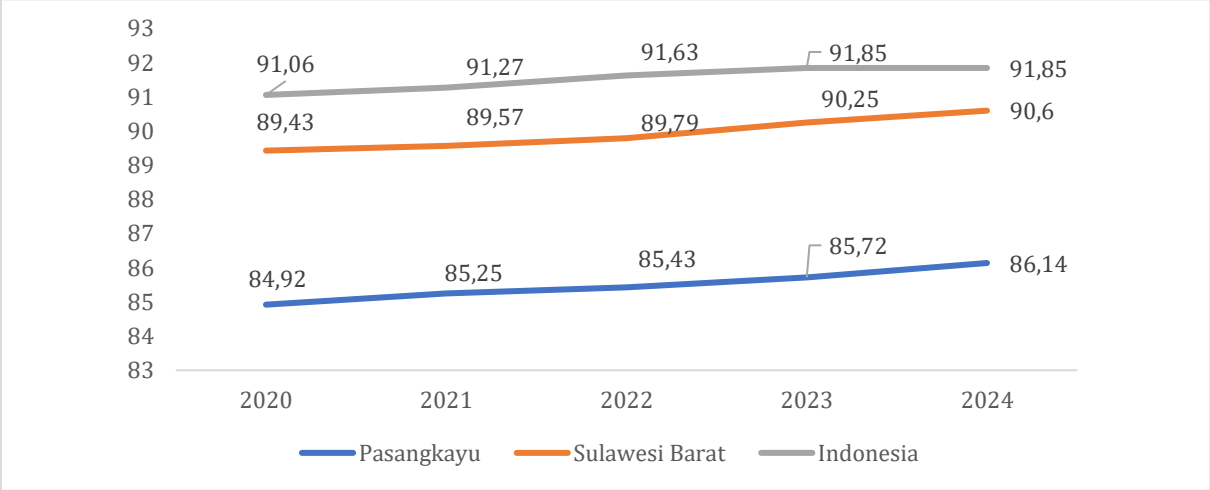
Saat ini, IKK baru tersedia di level provinsi, sehingga belum tersedia informasi mengenai capaian IKK Kabupaten Pasangkayu.

**Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/ Indeks Ketimpangan Gender**

Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh semua pihak secara adil dan merata. Namun terkadang, terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta partisipasi eoknomi dan politik. Untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender itu dicapai, disusun sejumlah indikator, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki. Jika IPG semakin mendekati angka 100, berarti kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Data menunjukkan IPG Kabupaten Pasangkau mengalami peningkatan dari 84,92 di tahun 2020 menjadi 86,14 di tahun 2023. Meskipun demikian, capaian IPG Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah dari capaian Provinsi (90,6) dan Nasional (91,85) pada tahun 2024. Lebih lanjut, IPG Kabupaten Pasangkayu tercatat yang paling rendah dibanding kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

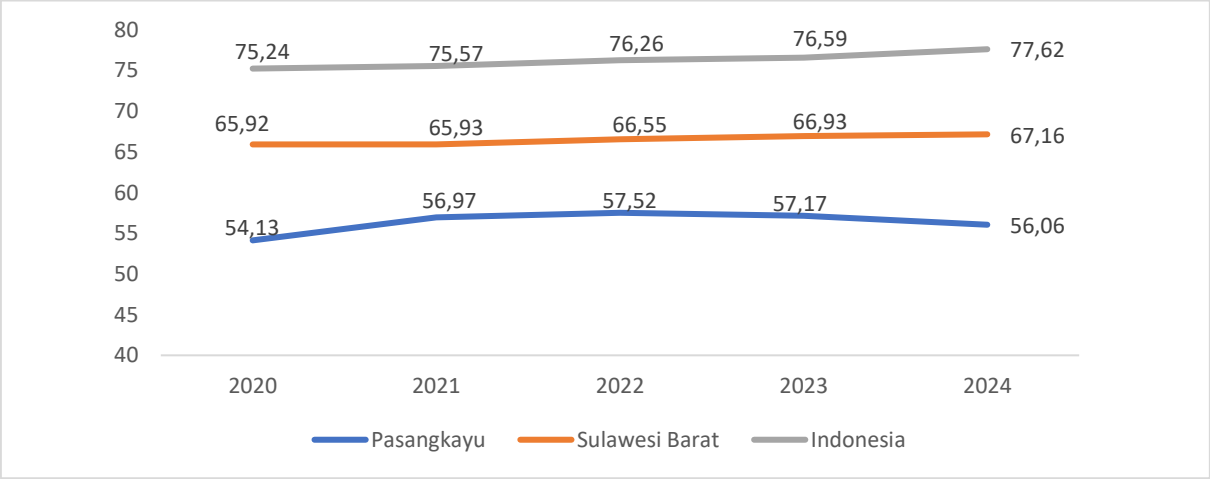
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan keseteraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Terdapat sejumlah indikator untuk mengukur IDG, yaitu persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Nilai IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari ketiga indikator tersebut. Semakin tinggi nilai IDG menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keseteraan gender di suatu wilayah. IDG Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 mencatatkan angka 56,06, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya (57,17). Selain itu, capaian IDG Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 masih lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional yang masing-masing 67,16 dan 77,62.

Gambar 2. 55
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2020 – 2024




Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2. 56
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2020 – 2024

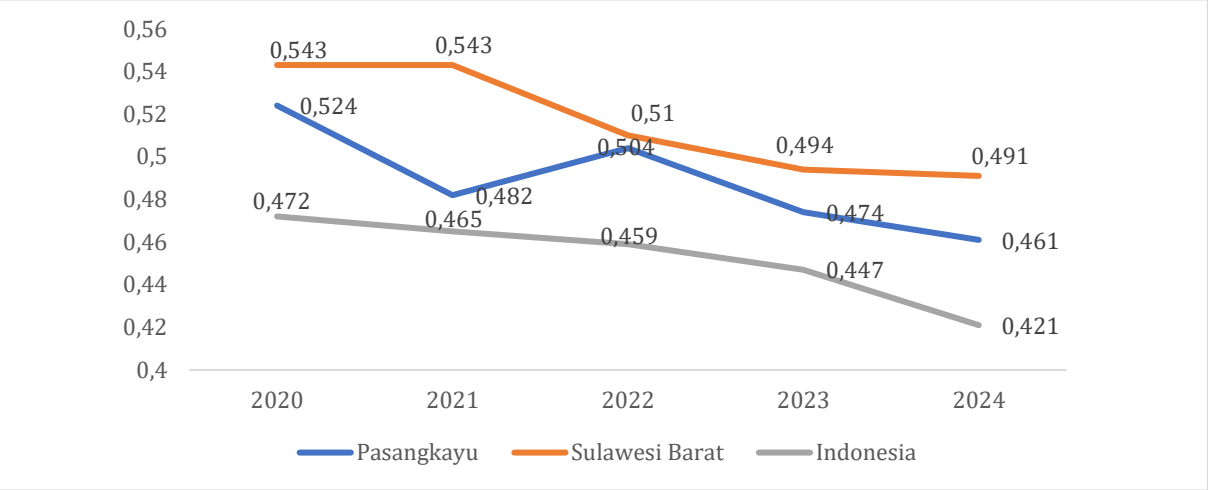



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Pasangkayu menunjukkan tren yang berfluktuasi tetapi cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan. Pada tahun 2020, IKG Kabupaten Pasangkayu berada di 0,524, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 0,482 pada 2021, yang dapat mencerminkan peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Namun, pada 2022 IKG kembali meningkat ke 0,504, sebelum akhirnya menurun lagi ke 0,461 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam pengurangan ketimpangan gender, masih terdapat volatilitas dalam pencapaian kesetaraan gender, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor struktural seperti kebijakan daerah, perubahan kondisi ekonomi, serta dinamika partisipasi perempuan

dalam sektor tenaga kerja dan politik. Dibandingkan dengan nasional, indeks ketimpangan gender Pasangkayu masih lebih tinggi, menunjukkan bahwa daerah ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih merata.

Gambar 2. 57
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia, 2020-2024




Sumber: BPS, diolah

**Indeks Pembangunan Pemuda**

Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia pemuda tersebut terkait erat dengan masa pendidikan menengah hingga tinggi, masa berada pada angkatan kerja produktif, masa usia subur pada perempuan, dan masa transisi dari remaja ke dewasa. Agar setiap periode tersebut menunjukkan fase yang dapat mempertinggi kualitas hidup pemuda, maka diperlukan ukuran yang meliputi capaian di berbagai dimensi pembangunan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 aspek, yaitu: 1). pembangunan individu, 2). pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan (3) partisipasi dan diskriminasi. Saat ini, data IPP masih disajikan di level nasional dan provinsi, sehingga belum tersedia untuk Kabupaten Pasangkayu.

## 2.1.3. Aspek Daya Saing

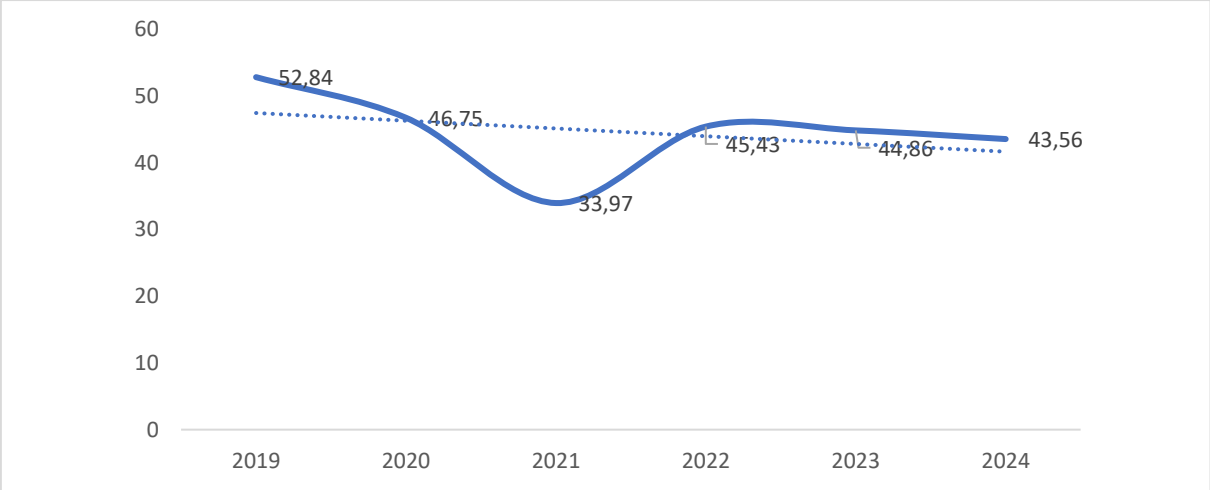
### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

**Angka Ketergantungan**

Saat masa bonus demografi, tingkat ketergantungan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2019, setiap 100 penduduk usia produktif harus memberikan dukungan kepada 52 penduduk yang tidak produktif. Angka ini kemudian mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, mencapai rasio ketergantungan sebesar 43,56 pada tahun 2024. Perubahan rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang juga menentukan perkembangan jumlah penduduk, yaitu angka

fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Hasil sensus penduduk *long form* (SP LF) tahun 2020 menunjukkan ketiga parameter ini mengalami pergeseran.

Gambar 2. 58
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

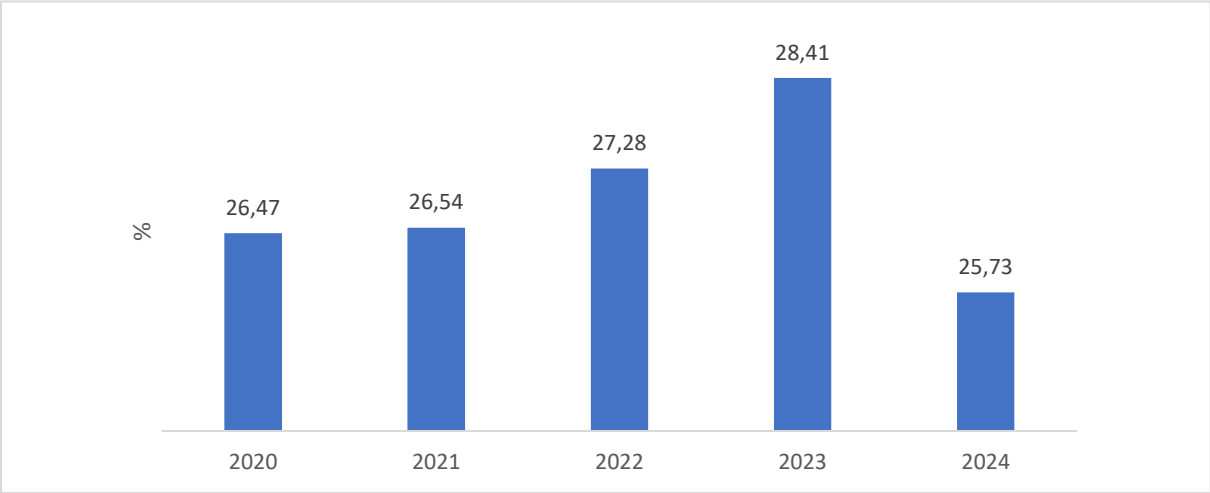
Angka *total fertility rate* (TFR) Kabupaten Pasangkayu menurun dari 3,53 pada sensus penduduk 2010 menjadi 2,54 pada periode SP LF 2020. Angka tersebut semakin mendekati *replacement rate* yaitu 2,10. Penurunan TFR pada dasarnya baik bagi rasio ketergantungan dalam jangka waktu tertentu, tapi negatif dampaknya bagi kondisi demografi secara keseluruhan. Itu sebabnya pemerintah daerah perlu menjaga agar TFR berada di level *replacement rate*. Angka kematian yang diukur dari angka kematian bayi juga mengalami penurunan. Selama sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu telah mengalami bonus demografi yang menyebabkan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 51 per 1.000 kelahiran hidup pada SP 2010 menjadi 32,69 per 1.000 kelahiran hidup pada SP LF 2020. Perbaikan infrastruktur kesehatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Pasangkayu telah meningkatkan kemampuan bertahan hidup bagi bayi yang baru lahir. Pemerintah daerah perlu mewaspadai migrasi keluar, karena pengaruhnya besar terhadap angka beban tanggungan. Meski belum tersedia data tentang jumlah migrasi keluar dan masuk, tapi hasil diskusi bersama perangkat daerah mengindikasikan bahwa ada arus migrasi keluar yang besar dari penduduk Kabupaten Pasangkayu ke daerah lain, salah satunya Kabupaten Morowali.

### 2.1.3.2. Ipteks, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

**Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Pada tahun 2020, kontribusi industri pengolahan Kabupaten Pasangkayu tercatat sebesar 26,47 persen, mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 (26,54%) dan terus meningkat menjadi 27,28 persen di tahun 2022, kemudian mencapai puncaknya di 28,41 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, rasio ini justru mengalami penurunan tajam menjadi 25,73 persen, level terendah dalam lima tahun terakhir. Salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah merosotnya hasil produksi olahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yang selama ini menjadi komoditas andalan dalam struktur industri pengolahan di wilayah tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam diversifikasi produk dan inovasi teknologi pascapanen, yang menyebabkan sektor industri pengolahan sangat bergantung pada satu komoditas primer. Ketika produksi TBS menurun—baik akibat cuaca, hama, atau gangguan rantai pasok—tidak ada substitusi yang cukup kuat dari komoditas lain atau dari inovasi proses produksi untuk menahan penurunan nilai tambah ekonomi. Rendahnya adopsi teknologi pengolahan modern, minimnya riset terapan lokal, serta kurangnya kolaborasi antara industri dan lembaga riset turut memperlemah ketahanan sektor ini.

Gambar 2. 59
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024



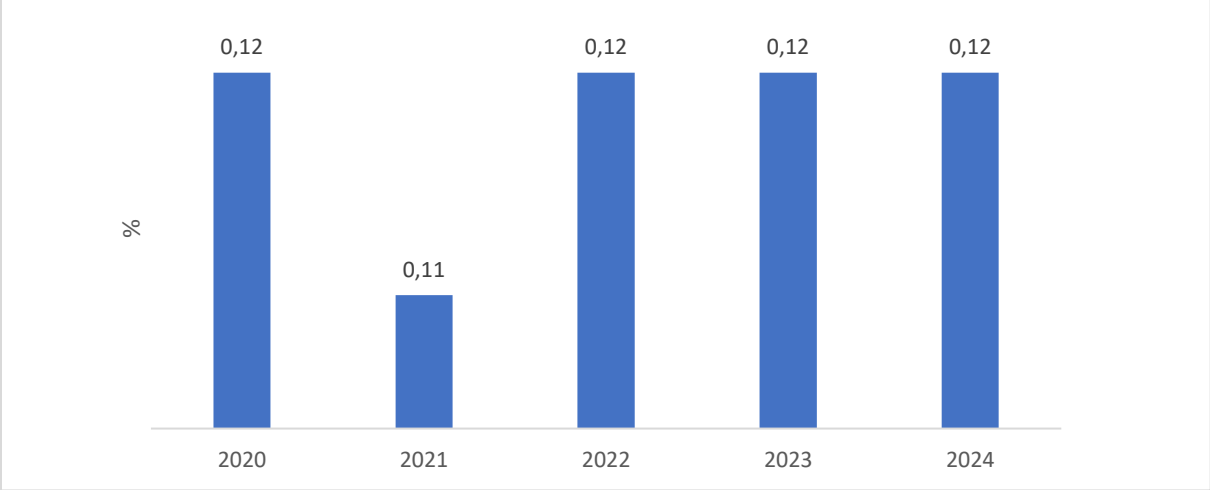

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**

Kontribusi sektor akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun terakhir (2020–2024) stagnan di angka 0,12 persen, bahkan sempat sedikit menurun ke 0,11% pada 2021. Rasio ini tergolong sangat kecil dan nyaris tidak mengalami perkembangan, mengindikasikan minimnya pertumbuhan produktivitas dan inovasi di sektor ini. Sektor akomodasi dan makanan-minuman seharusnya menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal karena keterkaitannya dengan pariwisata, budaya, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena

itu, penguatan kelembagaan inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan integrasi IPTEKS ke dalam rantai nilai sektor ini menjadi kunci untuk mengubah sektor yang stagnan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 60
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024



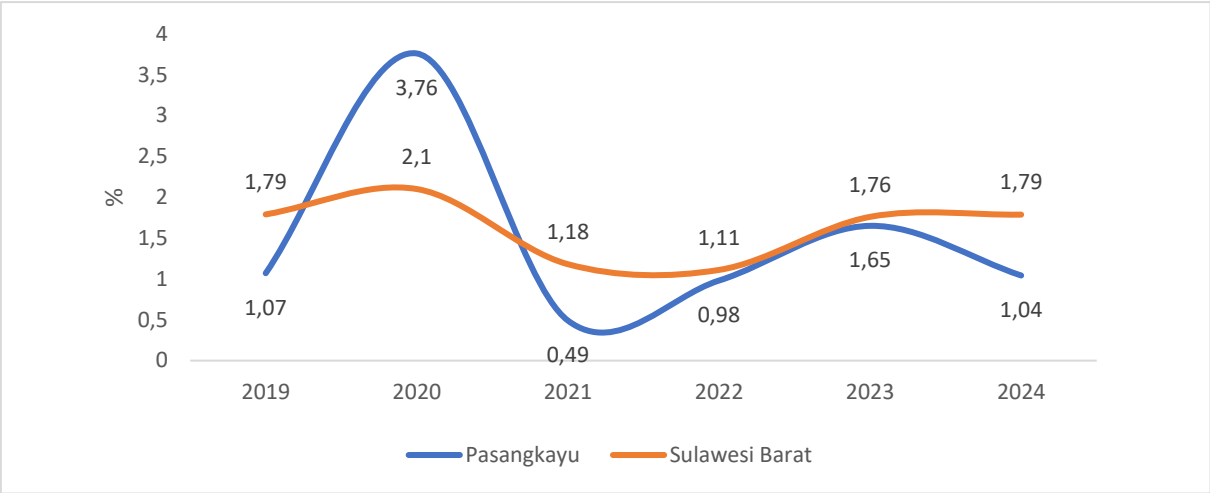

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Rasio Kewirausahaan**

Transformasi ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan Kabupaten Pasangkayu yang maju ditandai dengan pendapatan per kapita tinggi. Keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan peningkatan rasio kewirausahaan. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan menjadi 1,04 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,65 persen. Penurunan ini mengindikasikan melemahnya dinamika kewirausahaan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya daya serap tenaga kerja oleh sektor usaha, keterbatasan akses permodalan, atau tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, rasio kewirausahaan Pasangkayu juga tetap lebih rendah, mengingat Sulawesi Barat mengalami peningkatan rasio kewirausahaan dari 1,76 persen tahun 2023 menjadi 1,79 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ekosistem kewirausahaan di tingkat provinsi masih lebih stabil dibandingkan di Kabupaten Pasangkayu.

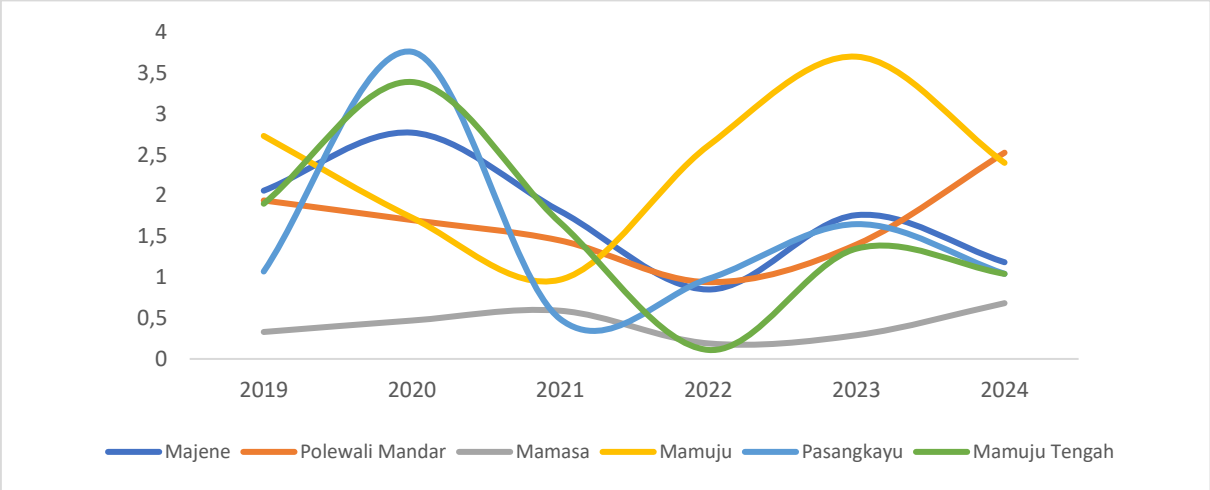
Penurunan rasio kewirausahaan ini menjadi tantangan bagi transformasi ekonomi daerah, terutama karena Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi besar dalam pengembangan wirausaha, didukung oleh populasi yang besar dan tingkat konsumsi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru, seperti penguatan akses permodalan, pendampingan bisnis, serta peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi usaha, guna meningkatkan daya tahan dan produktivitas sektor usaha kecil dan menengah di Pasangkayu.

Gambar 2. 61
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2024




Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

Gambar 2. 62
Perbandingan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Lainnya Tahun 2019-2024




Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

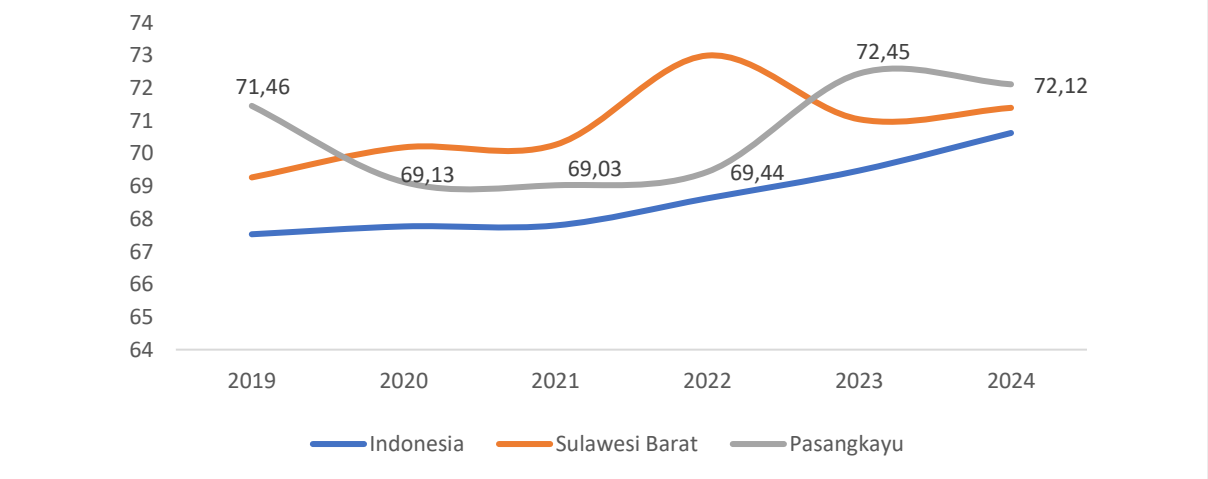
Dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Barat, Mamuju mencatatkan rasio kewirausahaan sebesar 2,40 persen pada 2024, yang lebih tinggi dibandingkan Pasangkayu. Hal ini mengindikasikan bahwa ekosistem kewirausahaan di Mamuju lebih berkembang, yang dapat dikaitkan dengan faktor seperti dukungan kebijakan, akses pasar, serta lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Sementara itu, Polewali Mandar mengalami peningkatan signifikan dari 1,4 persen di tahun 2023 menjadi 2,52 persen pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas kewirausahaan yang lebih dinamis, yang kemungkinan didukung oleh kebijakan daerah yang lebih efektif dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Sebaliknya, Majene mengalami penurunan dari 1,76 persen tahun 2023 menjadi 1,18 persen tahun 2024, meskipun angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Pasangkayu. Adapun Mamasa dan Mamuju Tengah masih memiliki rasio kewirausahaan yang relatif rendah, masing-masing 0,68 persen dan

1,04 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan tantangan struktural dalam pengembangan sektor usaha mandiri di kedua daerah tersebut.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dalam kegiatan produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif, sehingga semakin besar potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TPAK Kabupaten Pasangkayu cenderung fluktuatif selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, TPAK mencatatkan angka 71,46 persen, lalu terus menurun ke angka 69,03 persen pada tahun 2021, kemudian kembali naik menjadi 72,45 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, TPAK kemudian kembali menurun 0,33 poin menjadi 72,12 persen. Artinya, jika terdapat 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, maka sebanyak 72 orang merupakan angkatan kerja. Adapun 28 orang sisanya tergolong bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, bersekolah, dan berkegiatan lainnya. Turunnya TPAK ini disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2. 63
TPAK Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2019 – 2024



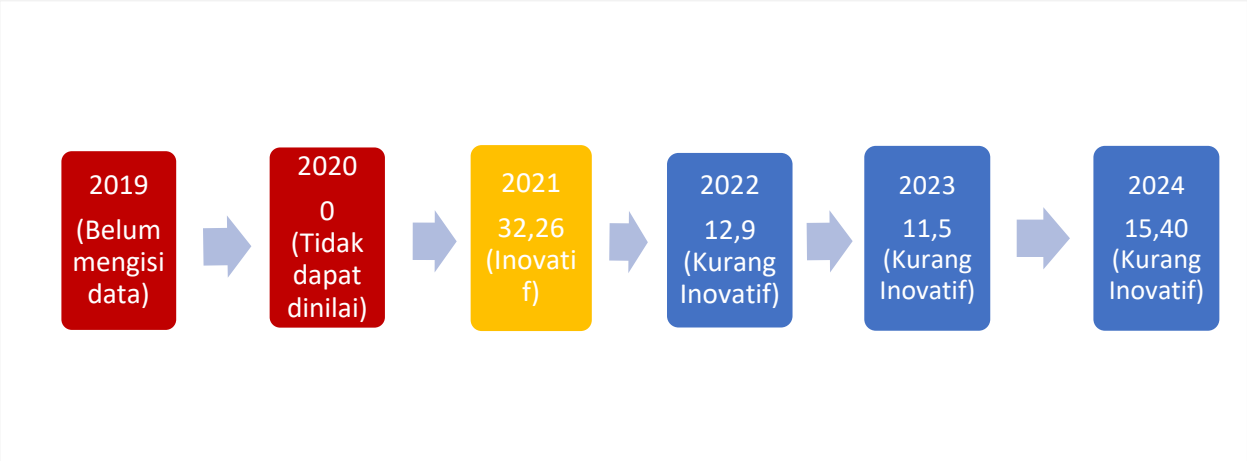

Sumber: BPS, diolah

**Indeks Inovasi Daerah**

Penelitian dan pengembangan menjadi faktor penentu untuk menghasilkan inovasi di Kabupaten Pasangkayu. Praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu masih termasuk kategori kurang dengan mencatatkan angka Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2024 sebesar 15,40 poin, meningkat dibanding tahun sebelumnya (11,5). Jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, IID Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dari Majene (36,02), Polewali Mandar (45,32), Mamuju Tengah (58,95) dan

Mamuju (44,69). Kabupaten dengan IID terendah di Provinsi Sulawesi Barat yakni Mamasa dengan capaian 12,70 poin.

Gambar 2. 64
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri, diolah

### 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

**Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

### 2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

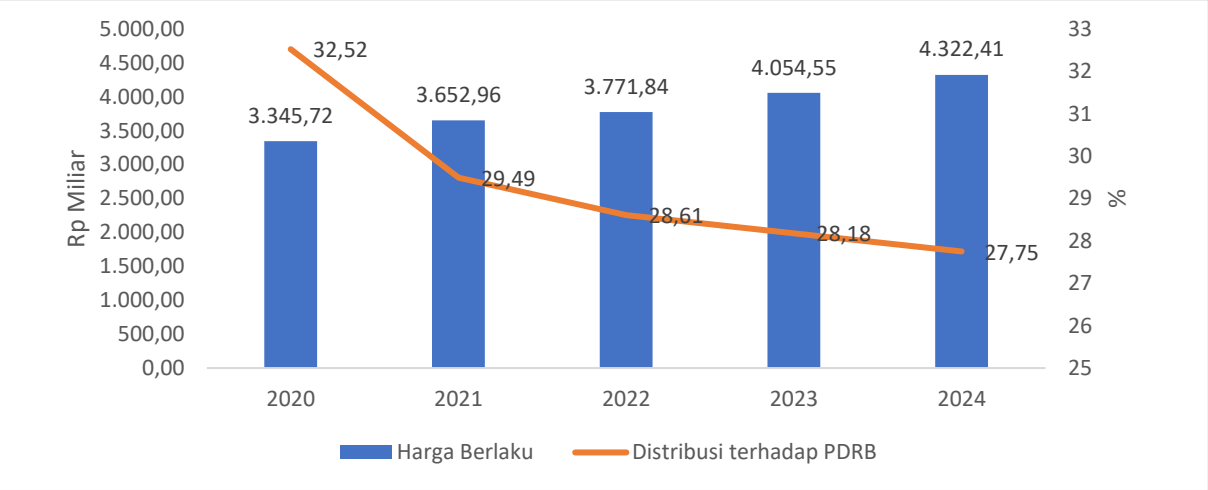
**Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Secara nominal (harga berlaku), PMTB mengalami kenaikan yang konsisten, dari Rp 3.345,72 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 4.322,41 miliar di tahun 2024. Namun, pada saat yang sama, kontribusi PMTB terhadap total PDRB justru menurun, dari 32,52 persen di 2020 menjadi 27,75 persen pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi peningkatan absolut dalam investasi fisik (seperti infrastruktur, mesin, dan bangunan), namun pertumbuhan sektor lain dalam PDRB lebih cepat, sehingga proporsi PMTB relatif menurun. Dalam konteks integrasi ekonomi domestik dan global, tren ini dapat dibaca sebagai dua sisi. Di satu sisi, pertumbuhan nilai PMTB menunjukkan adanya perluasan kapasitas produksi dan modernisasi infrastruktur ekonomi, yang penting untuk meningkatkan daya saing daerah di pasar

nasional dan internasional. Investasi ini berpotensi memperkuat keterhubungan Kabupaten Pasangkayu dengan rantai pasok domestik dan membuka peluang integrasi dengan pasar global, terutama jika difokuskan pada sektor ekspor seperti pertanian olahan, perikanan, dan energi terbarukan.

Namun di sisi lain, menurunnya proporsi PMTB terhadap PDRB mengindikasikan tantangan dalam optimalisasi investasi untuk mendorong produktivitas dan transformasi ekonomi jangka panjang. Hal ini bisa berarti bahwa investasi yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendorong integrasi ekonomi lintas wilayah atau global value chains (GVC). Misalnya, jika investasi belum menyasar teknologi logistik, manufaktur bernilai tambah, atau digitalisasi perdagangan, maka efek jangka panjang terhadap integrasi akan terbatas.

Gambar 2. 65
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

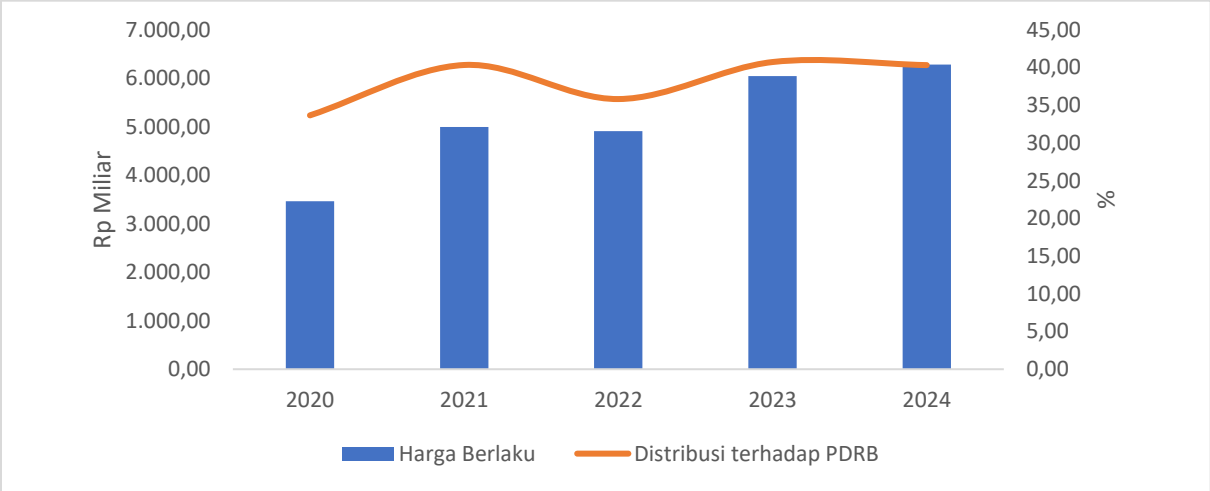



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Ekspor Barang dan Jasa**

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja net ekspor barang dan jasa Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren kenaikan yang solid, meningkat dari Rp3.464,79 miliar menjadi Rp6.284,92 miliar. Kontribusinya terhadap PDRB pun menguat, dari 33,68 persen pada 2020 hingga mencapai 40,75 persen di 2023, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 40,34 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan makin kuatnya keterhubungan ekonomi Kabupaten Pasangkayu dengan pasar domestik dan global, khususnya melalui ekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan produk perikanan, yang menjadi motor utama perdagangan luar wilayah. Namun demikian, fluktuasi kontribusi terhadap PDRB mengindikasikan adanya kerentanan struktural terhadap dinamika eksternal, termasuk harga komoditas global dan ketergantungan pada bahan mentah tanpa nilai tambah tinggi.

Gambar 2. 66
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024



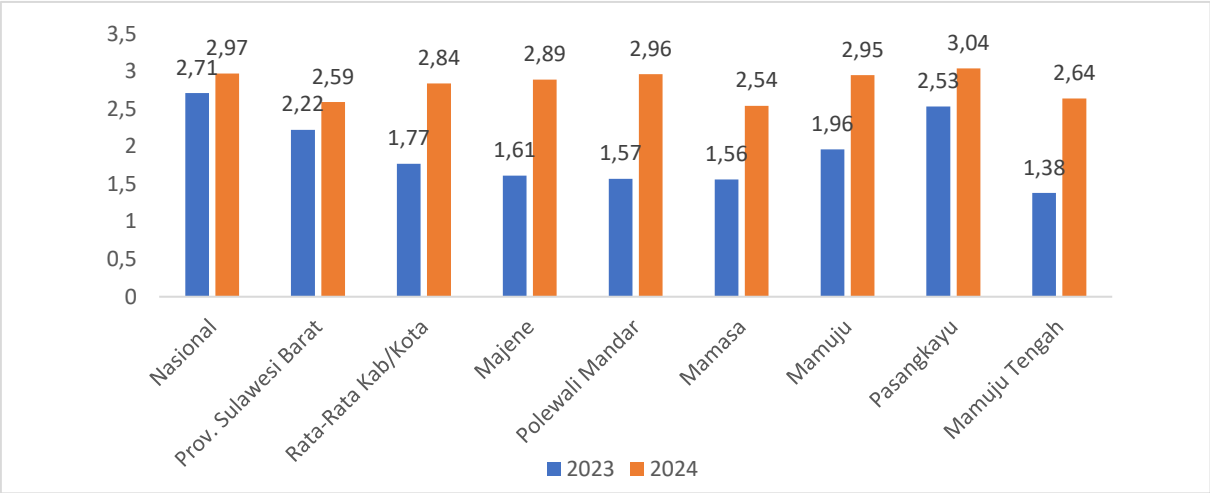

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

### 2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

**Indeks Daya Saing Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan layanan dasar yang mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien dan produktif sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Indeks infrastruktur mengukur keberadaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Indeks infrastruktur berikut ini diperoleh dari bahan perhitungan IDSD Kabupaten Pasangkayu yang bersumber dari BRIN. Perhitungan indeks infrastruktur mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan, layanan infrastruktur kereta api, bandara, pelabuhan, dan rasio elektrifikasi. Selama tahun 2023 dan 2024, indeks kualitas layanan infrastruktur Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan dari 2,53 pada 2023 menjadi 3,04 pada 2024. Angka ini menempatkan Pasangkayu sebagai Kabupaten dengan indeks kualitas layanan infrastruktur tertinggi di Sulawesi Barat pada 2024, melampaui daerah lain seperti Mamuju (2,95), Polewali Mandar (2,96), dan Majene (2,84). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, serta fasilitas transportasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2. 67
Indeks Daya Saing Infrastruktur Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2024




Sumber: BRIN, diolah

Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 2,97 pada 2024, Pasangkayu hanya sedikit lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam memastikan layanan infrastruktur yang optimal bagi seluruh masyarakat. Di tingkat Provinsi, Sulawesi Barat mencatatkan angka indeks sebesar 2,97, yang berarti bahwa Pasangkayu mulai mendekati standar infrastruktur rata-rata provinsi. Sementara itu, kabupaten lain seperti Mamasa (2,54) dan Mamuju Tengah (2,64) masih tertinggal, mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut belum secepat Kabupaten Pasangkayu.

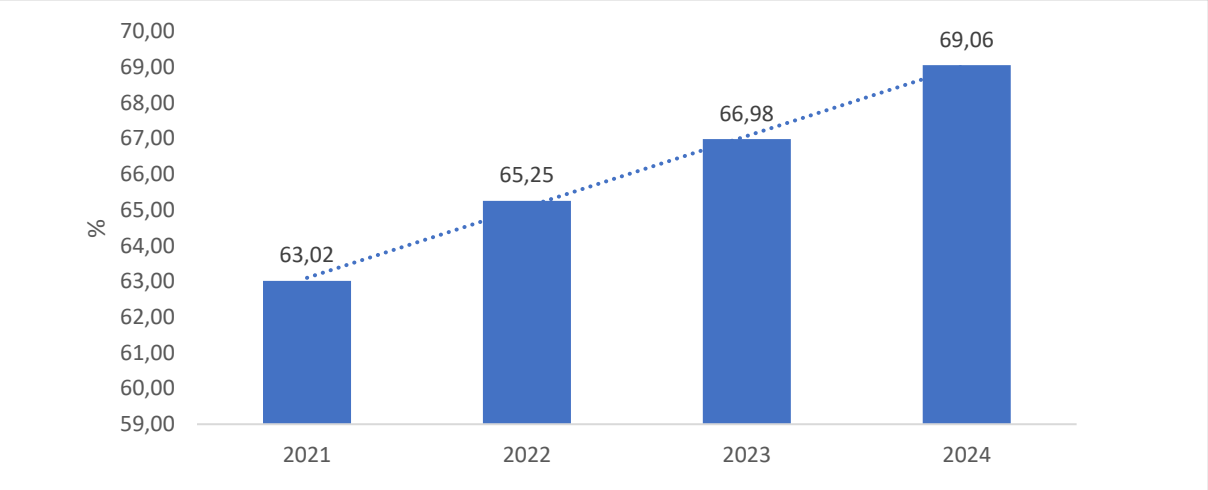
**Indeks Kualitas Layanan Infastruktur**

Dari aspek kualitas, layanan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan perbaikan berarti. Selama periode 2021 hingga 2024, kualitas layanan infrastruktur menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 63,02 tahun 2021 menjadi 69,06 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu telah memberikan dampak positif, baik dalam peningkatan konektivitas antarwilayah, efisiensi mobilitas penduduk, maupun peningkatan akses layanan publik. Perbaikan ini juga mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan infrastruktur, termasuk dalam hal pemeliharaan jalan, peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi, serta pengembangan layanan air bersih dan sanitasi yang lebih baik.

Meskipun indeks kualitas layanan infrastruktur menunjukkan tren positif, namun masih terdapat beberapa komponen yang masih menunjukkan angka yang rendah dan memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu aspek yang paling membutuhkan peningkatan adalah kondisi jalan dalam keadaan baik, yang ditahun 2021 hanya mencapai 10,20 persen dan meningkat secara bertahap menjadi 16,41 persen pada tahun 2024. Meskipun

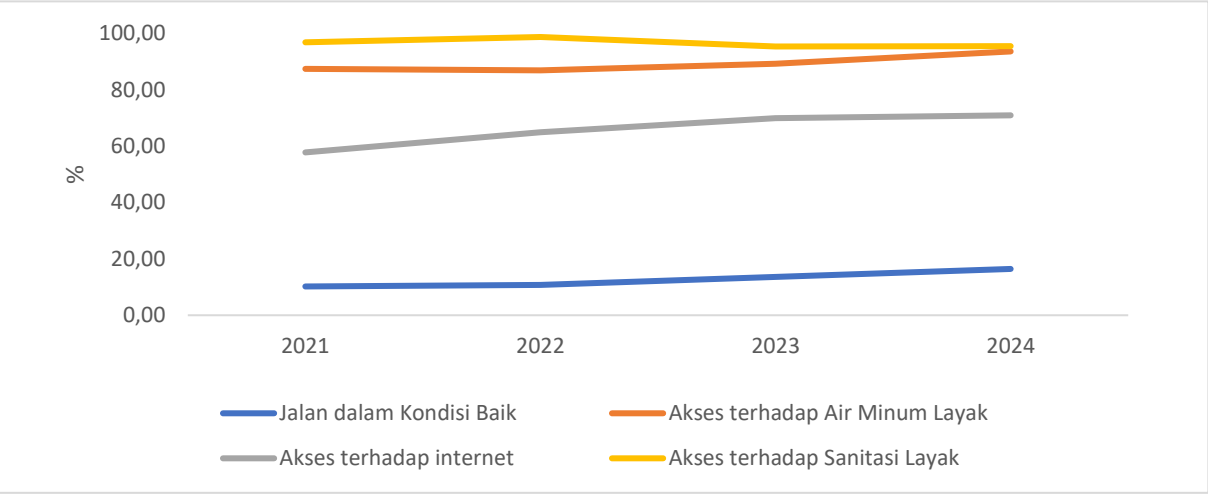
mengalami perbaikan, angka ini masih tergolong sangat rendah, menandakan bahwa sebagian besar atau lebih dari 80 persen jalan di Kabupaten Pasangkayu masih dalam kondisi sedang, rusak atau kurang layak. Infrastruktur jalan yang buruk dapat menghambat mobilitas penduduk, meningkatkan biaya logistik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor pertanian dan industri yang sangat bergantung pada akses transportasi yang memadai.

Gambar 2. 68
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Gambar 2. 69
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Komponen, 2021-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

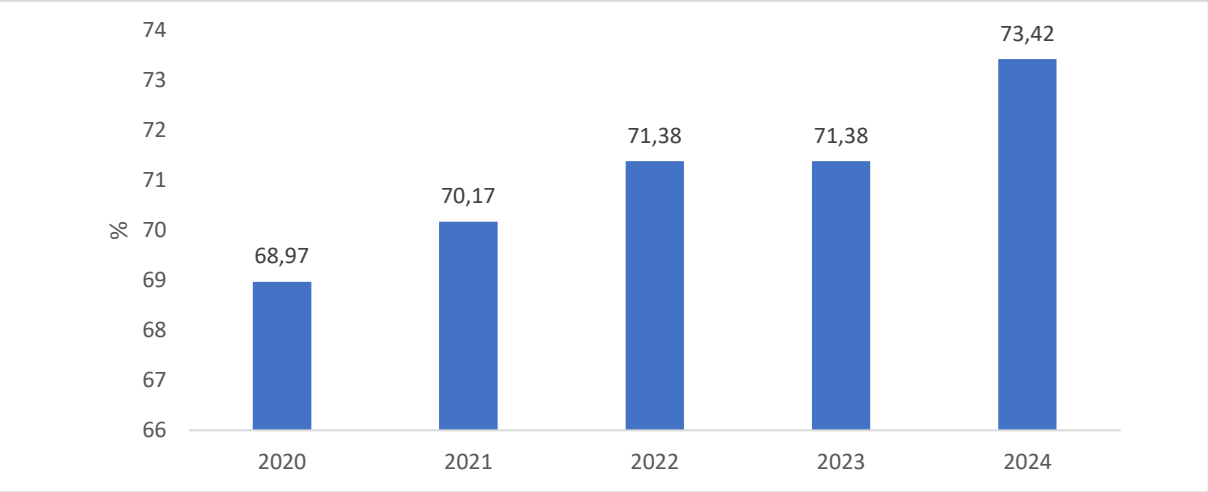
Selain itu, akses terhadap internet masih menjadi tantangan besar, meskipun mengalami peningkatan dari 57,73 persen pada tahun 2021 menjadi 70,87 persen pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30 persen penduduk yang belum mendapatkan akses telekomunikasi. Keterbatasan akses internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi digital di Kabupaten Pasangkayu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur jaringan internet, pemerataan

akses ke wilayah yang belum terjangkau, serta penguatan kapasitas digital masyarakat agar dapat lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk aktivitas sosial dan ekonomi.

**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Pasangkayu meningkat dari 68,97 persen pada tahun 2020 menjadi 73,42 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan layanan permukiman yang lebih baik, serta menandakan adanya perbaikan kualitas hidup yang konsisten, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam konteks pembangunan wilayah, tren ini memiliki implikasi penting bagi transformasi kawasan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di perdesaan, akses terhadap hunian layak menjadi prasyarat penting untuk mendorong produktivitas tenaga kerja, menarik investasi berbasis komunitas, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Sementara di kawasan perkotaan, peningkatan kualitas hunian mendukung pengembangan ekonomi jasa dan industri kreatif, serta mengurangi tekanan sosial akibat ketimpangan spasial. Dengan demikian, peningkatan akses hunian layak tidak hanya berdampak pada dimensi kesejahteraan, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk kawasan permukiman yang inklusif dan berdaya saing sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Gambar 2. 70
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukinan dan Pertanahan, diolah

**Persentase Desa Mandiri**

Persentase desa mandiri di Kabupaten Pasangkayu saat ini menempati posisi yang masih sangat terbatas, dengan persentase hanya sebesar 3,39 persen dari total desa yang ada ditahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah setempat masih tergolong dalam kategori desa berkembang maupun desa tertinggal, sehingga masih sangat membutuhkan intervensi dalam hal peningkatan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya lokal,

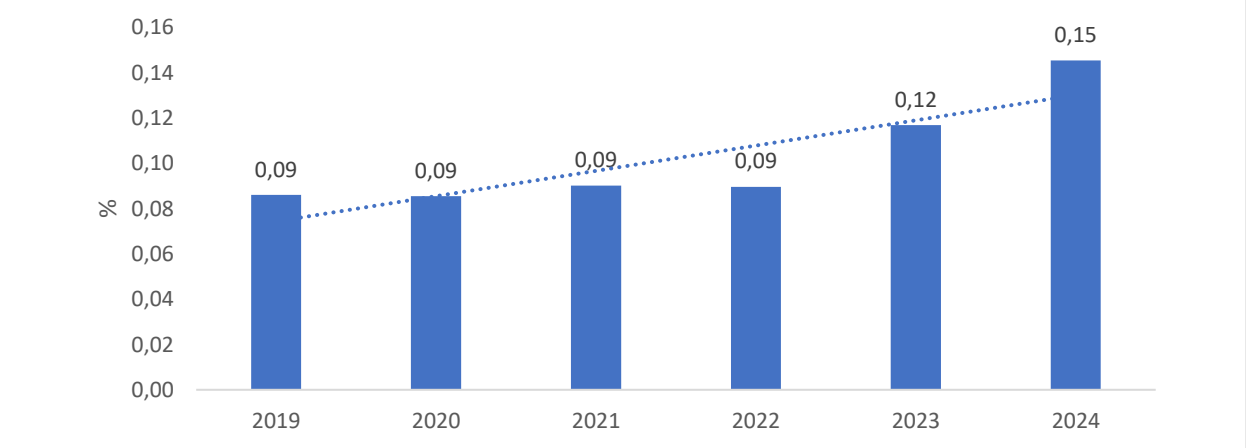
pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi warga. Pencapaian desa mandiri yang masih relatif kecil juga menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah dan kolaboratif dari pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat sipil untuk mendorong percepatan pemenuhan indikator desa mandiri, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan tata kelola, sehingga ke depan Kabupaten Pasangkayu dapat semakin mandiri dan berdaya saing.

### 2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

Sejatinya, rasio pajak terhadap PDRB merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Nilainya dihitung sebagai persentase dari pendapatan pajak terhadap skala perekonomian yang diukur dengan PDRB harga berlaku. Dengan kata lain, rasio pajak mencerminkan seberapa besar pendapatan regional daerah yang beralih ke pundi-pundi penerimaan pajak. Setiap satu persen rasio pajak menandakan bahwa satu persen pendapatan masyarakat masuk ke kas negara. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin besar kemampuan suatu negara menyediakan barang dan layanan publik tanpa bergantung pada utang. Artinya, peningkatan rasio pajak patut diupayakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam enam tahun terakhir, rasio pajak daerah Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren positif dari 0,09 persen tahun 2019 menjadi 0,15 persen tahun 2024. Ditengah perlambatan ekonomi, penerimaan pajak daerah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem pemungutan pajak, seperti meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, memperbaiki sistem digitalisasi pembayaran pajak, serta melakukan intensifikasi pajak pada sektor-sektor tertentu.

Gambar 2. 71
Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024

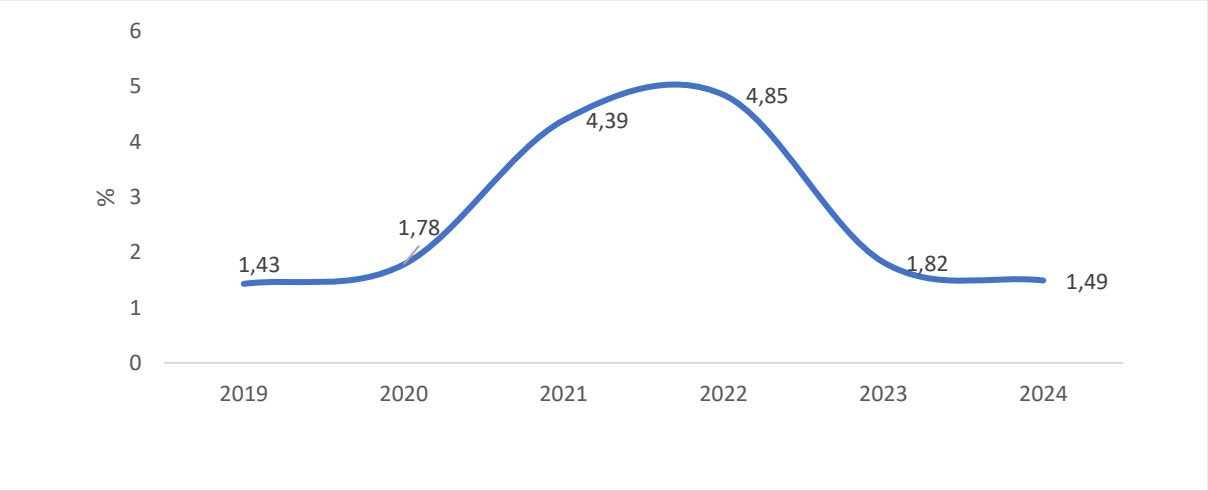



Sumber: DPJK dan BPS, diolah

**Inflasi**

Tingkat inflasi Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan signifikan dari 1,43 persen tahun 2019 hingga mencapai puncaknya di 4,85 persen pada tahun 2022, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 1,49 persen pada 2024. Lonjakan inflasi pada 2021-2022 disebabkan oleh faktor eksternal maupun domestik, seperti gangguan rantai pasok global, kenaikan harga komoditas, atau ekspansi permintaan pasca-pandemi. Periode ini juga bertepatan dengan tekanan inflasi yang lebih luas di berbagai negara akibat dampak dari kebijakan stimulus ekonomi dan lonjakan harga energi serta pangan di pasar internasional. Namun, setelah 2022, inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis hingga kembali ke kisaran yang lebih stabil di bawah 2 persen pada 2023 dan 2024, yang dapat mengindikasikan stabilisasi harga komoditas utama, atau melemahnya tekanan permintaan agregat. Jika dikaitkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu, kemungkinan ada dampak dari pelemahan daya beli masyarakat dan investasi yang kurang kuat, sehingga tekanan inflasi berkurang secara alami. Meskipun demikian, perhitungan inflasi ini mengacu pada perhitungan IHK di Kabupaten Mamuju, sehingga kurang mencerminkan perkembangan harga barang dan jasa yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 72
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 – 2024




Sumber: BPS, diolah
*Catatan angka 2024 sangat sementara

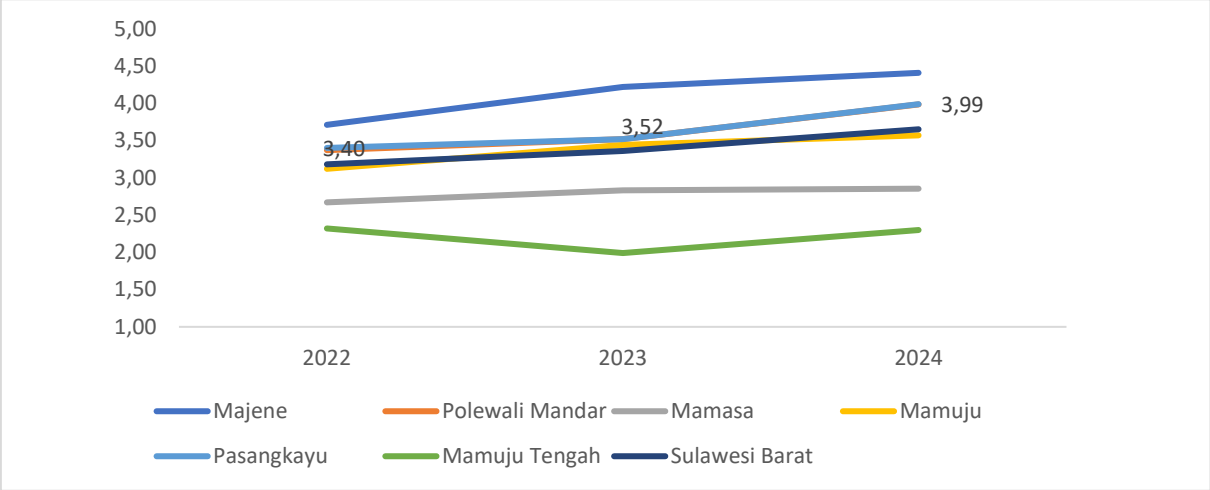
**Indeks Akses Keuangan Daerah/IKAD**

Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Pasangkayu selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yakni dari 3,40 pada tahun 2022 menjadi 3,99 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,59 poin dalam tiga tahun menandakan adanya perbaikan signifikan dalam ekosistem keuangan daerah, baik dari sisi ketersediaan lembaga keuangan maupun penetrasi layanan digital yang lebih luas. Pencapaian ini

memperlihatkan bahwa Kabupaten Pasangkayu mampu menjaga momentum inklusi keuangan di tingkat lokal, sekaligus membuktikan efektivitas upaya pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat dari 3,18 pada tahun 2022 menjadi 3,65 pada tahun 2024, posisi Kabupaten Pasangkayu berada sedikit di atas rata-rata provinsi. Capaian ini menempatkan Kabupaten Pasangkayu dengan nilai IKAD tertinggi kedua setelah Majene (4,41). Dengan demikian, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan daya saing yang relatif baik dalam konteks regional, meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat literasi keuangan dan memperluas jangkauan lembaga keuangan, agar dapat mendekati capaian kabupaten dengan performa tertinggi di provinsi.

Gambar 2. 73
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022-2024




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah

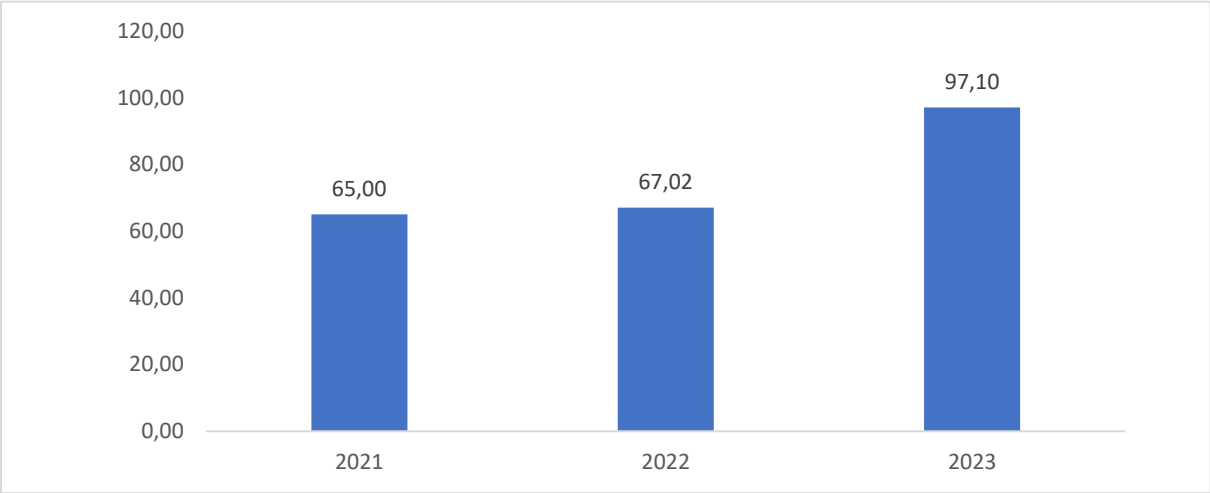
## 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

### 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

**Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 65,00 pada 2021 menjadi 97,10 pada 2023. Lompatan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam membangun regulasi dan tata kelola yang lebih berintegritas, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Kenaikan tajam tersebut tidak hanya menandakan perbaikan teknokratis dalam aspek hukum formal, tetapi juga menunjukkan bahwa agenda reformasi kelembagaan mulai berakar dalam praktik tata kelola lokal. Peningkatan ini berimplikasi luas terhadap iklim investasi, penyederhanaan perizinan, serta perlindungan hak-hak masyarakat, yang semuanya merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan responsif.

Gambar 2. 74
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



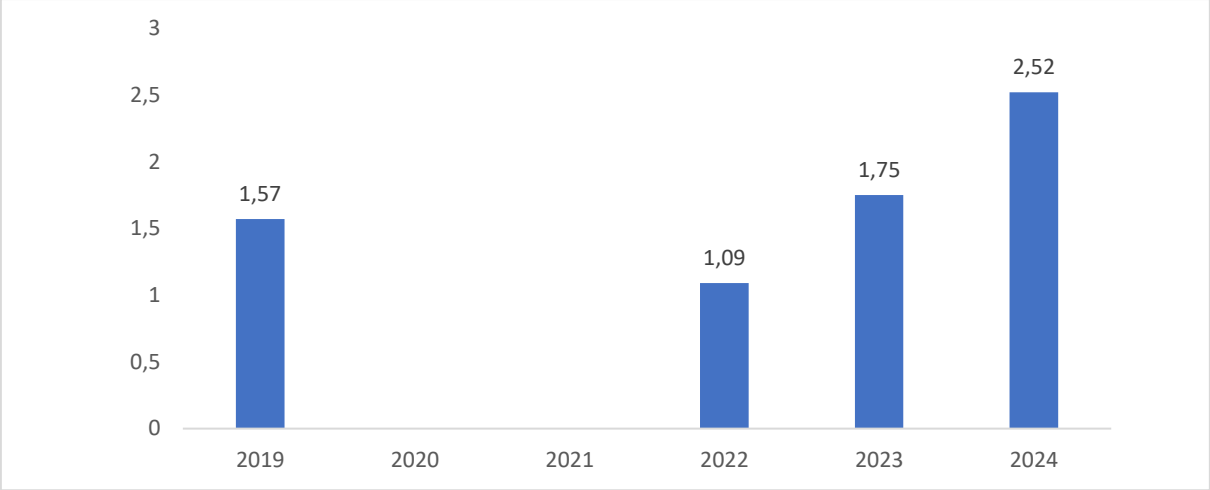

Sumber: Biro Hukum, diolah

**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Penerapan SPBE dalam aspek pemerintahan sebagai *key driver* transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Ujungnya adalah kepuasan masyarakat pengguna SPBE yang merupakan cerminan dari pemerintahan yang akuntabel dan layanan publik yang berkualitas. Paradigma SPBE ini bukan hanya semangat membangun aplikasi, melainkan moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Pada tahun 2024, indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 2,52 poin, naik 0,77 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, angka tersebut masih termasuk katageori “cukup”. Artinya tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Pasangkayu masih termasuk kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE di Kabupaten Pasangkayu masih perlu menjadi perhatian. Nilai indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional yang masing-masing mencatatkan angka 3,70 poin (Sangat Baik) dan 3,12 poin (Baik).

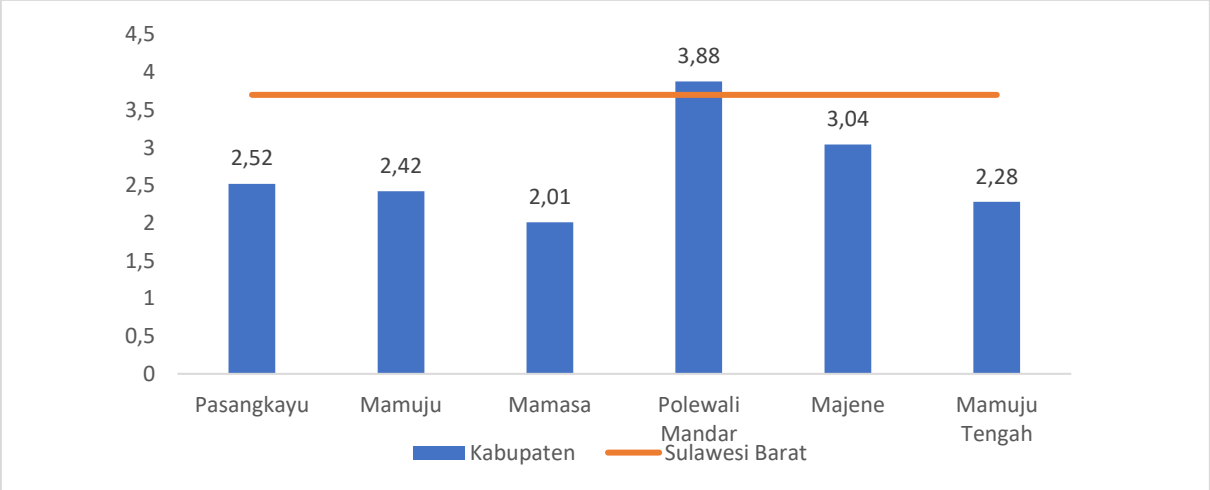
Gambar 2. 75
Indeks SPBE Kabupaten Pasangakayu, 2019-2024




Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, diolah

Pada level Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 masih tertinggal dari Polewali Mandar (3,88) dan Manjene (3,04). Dua daerah termasuk kategori sangat baik dan baik untuk layanan publik berbasis elektronik. Tiga daerah dengan indeks SPBE terendah yakni, Mamasa (2,01), Mamuju Tengah (2,28) dan Mamuju (2,42). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan SPBE belum optimal di banyak daerah di Provinsi Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 76
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Pasangakayu dengan Kabupaten Lainnya
di Provinsi Sulawesi Barat, 2024




Sumber: Kementerian PAN RB, diolah

**Indeks Pelayanan Publik**

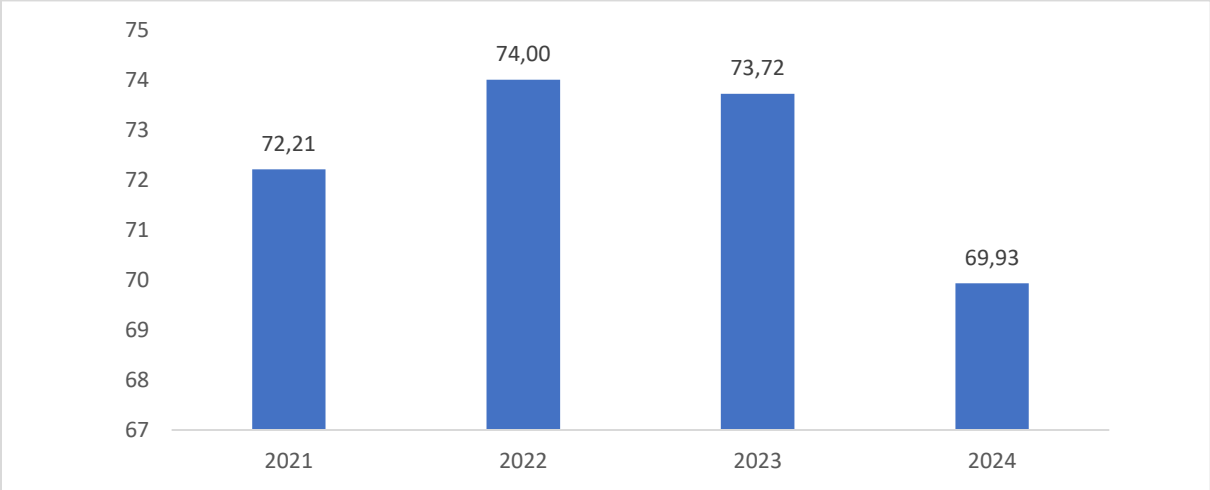
Pelayanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, dan terjamin belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di Kabupaten Pasangkayu. Tercermin dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,62 poin termasuk kategori C atau cukup, dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi 3,32 (B-, baik dengan catatan) serta Polewali Mandar 3,92 (B, baik)

dan Majene 3,04 (B-, baik dengan catatan). Kategori ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultansi dan pengaduan serta aspek inovasi masih perlu perbaikan berarti. Dalam aspek akuntabilitas kinerja instansi, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 tercatat sebesar 53,47 atau kategori CC (cukup/memadai). Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi dengan nilai 68,32 atau kategori B dan Kabupaten Polewali Mandar 72,04 dengan kategori BB.

**Indeks Integritas Nasional**

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pasangkayu memperlihatkan pola fluktuatif dalam empat tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 74,00 poin, sebelum menurun secara bertahap hingga mencapai 69,93 poin pada 2024. Penurunan ini patut dicermati karena dapat mencerminkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di tengah dinamika birokrasi dan tekanan eksternal terhadap institusi publik.

Gambar 2. 77
Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024




Sumber: Inspektorat, diolah

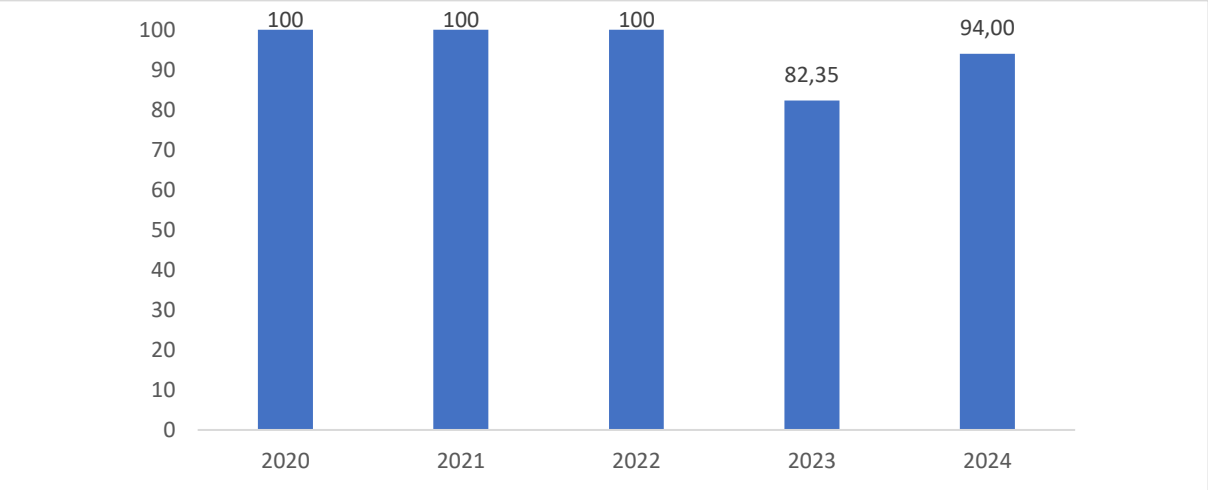
### 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Subtansial

**Persentase Penegakan PERDA**

Tingkat penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan signifikan dari 100 persen pada periode 2020–2022 menjadi 82,35 persen pada tahun 2023, sebelum kembali naik ke 94 persen pada tahun 2024. Meskipun tren tahun terakhir menunjukkan pemulihan, penurunan tajam di tengah periode menandakan adanya gangguan dalam konsistensi pelaksanaan regulasi di tingkat lokal—sebuah sinyal penting dalam menilai

kapasitas tata kelola daerah. Dalam kerangka regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, data ini mencerminkan bahwa kualitas peraturan bukan hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh keberlanjutan dalam implementasi dan pengawasan. Ketika penegakan menurun, efektivitas regulasi melemah, menciptakan celah bagi praktik yang tidak akuntabel serta menghambat kepercayaan publik dan dunia usaha.

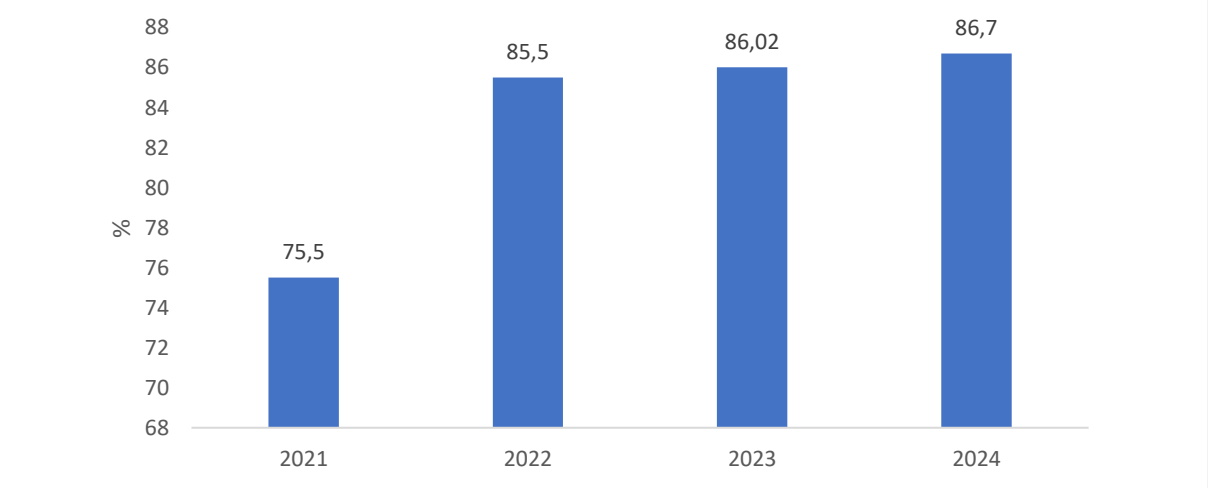
Gambar 2. 78
Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu, diolah

**Persentase Capaian Aksi HAM**

Gambar 2. 79
Persentase Capaian Aksi HAM di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu, diolah

Persentase capaian aksi HAM di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan signifikan, dari 75,5 persen pada tahun 2021 menjadi 86,7 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan tata kelola daerah. Tren positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan

penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan konsolidasi regulasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban**

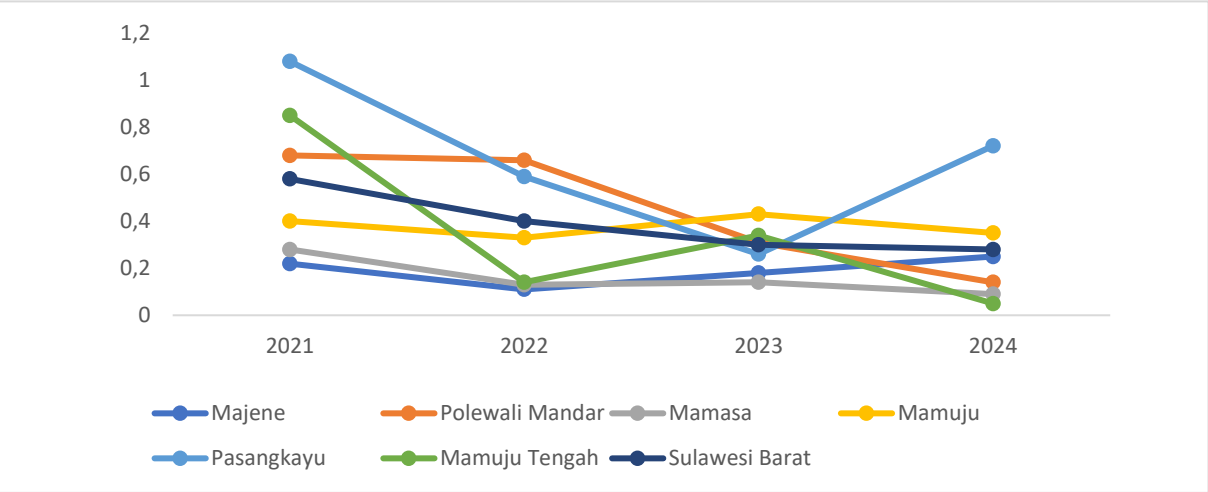
Kabupaten Pasangkayu mencatat Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Kamtibmas) sebesar 94 poin pada tahun 2024, yang menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada tingkat yang sangat baik. Angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, menekan angka kriminalitas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi. Nilai indeks yang tinggi ini menjadi modal penting dalam mendorong investasi, pembangunan desa, dan peningkatan kualitas hidup warga, sekaligus menegaskan pentingnya mempertahankan sinergi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman jangka panjang.

**Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan**

Berdasarkan data persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Sulawesi Barat dari tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2021, Pasangkayu mencatat angka 1,08 persen, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Meskipun sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 0,59 persen tahun 2022 dan 0,26 persen pada 2023, angka ini kembali meningkat cukup tajam menjadi 0,72 persen pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat, angka kejahatan di Pasangkayu pada tahun 2024 termasuk yang tertinggi, setelah Mamuju (0,35%), Majene (0,25%), Polewali Mandar (0,14%), Mamasa (0,09%), serta Mamuju Tengah (0,05%). Bahkan, angka Pasangkayu pada 2024 lebih dari dua kali lipat rata-rata provinsi Sulawesi Barat yang hanya sebesar 0,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di Kabupaten Pasangkayu masih menjadi perhatian utama, terutama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Naiknya angka kejahatan ini dapat berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat, yang selanjutnya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ini.

Gambar 2. 80
Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya Menurut Kabuapten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

### 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

**Indeks Daya Saing Daerah**

Pada tahun 2022, daya saing Kabupaten Pasangkayu kuat pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis dilihat dari nilai indeks pilar 11 yang mencapai angka maksimum yaitu 5 poin. Dinamisme bisnis merupakan bagian dari aspek ekosistem bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Nilai indeks 5 poin menjelaskan bahwa Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang mudah dalam memulai bisnis. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga cukup tinggi pada pilar 7 yaitu pasar produk dengan nilai indeks 4,20. Kelemahan Kabupaten Pasangkayu ada pada Pilar 3, Pilar 4, Pilar 5, Pilar 6, pilar 8, pilar 10, dan pilar 12. Pilar 3 menggambarkan kemampuan daerah dalam mengadopsi TIK, dimana Kabupaten Pasangkayu hanya mampu memperoleh nilai indeks 2,55. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Pasangkayu masih lambat dalam mengadopsi TIK untuk meningkatkan produktivitas daerah. Pilar 4, 5, dan 6 masing-masing menjelaskan tentang stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan. Untuk ketiga pilar ini, Kabupaten Pasangkayu hanya mendapat nilai indeks 2,48, 3,69, dan 2,76, masih relatif lebih rendah dari angka nasional dan Sulawesi Barat. Sementara untuk pilar 8, 10, dan 12, yang menggambarkan tentang pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi juga masih relatif rendah. Pilar 8, Kabupaten Pasangkayu hanya mendapat nilai 2,08, pilar 10 dan 12 lebih rendah lagi yaitu 0,15, dan 0,11.

Tabel 2.9
Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

| Kabupaten/kota | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasional | 4,14 | 2,91 | 3,57 | 3,05 | 3,76 | 3,73 | 2,68 | 3,73 | 2,66 | 1,31 | 5,00 | 2,62 | 3,26 |
| Sulawesi Barat | 4,18 | 2,57 | 3,45 | 2,41 | 3,33 | 3,47 | 3,98 | 4,14 | 3,23 | 0,10 | 5,00 | 1,40 | 3,10 |
| Majene | 4,17 | 2,62 | 2,40 | 2,14 | 3,23 | 3,34 | 3,14 | 4,05 | 2,48 | 0,24 | 5,00 | 1,60 | 2,87 |
| Polewali mandar | 4,54 | 1,91 | 2,46 | 2,40 | 3,23 | 2,91 | 2,94 | 3,90 | 3,09 | 0,62 | 5,00 | 1,51 | 2,88 |
| Mamasa | 3,79 | - | 1,74 | 2,03 | 3,92 | 2,87 | 3,22 | 3,68 | 1,98 | 0,15 | 5,00 | 0,64 | - |
| Mamuju | 4,03 | 2,81 | 3,43 | 2,56 | 3,69 | 2,83 | 3,14 | 3,57 | 3,14 | 0,55 | 5,00 | 1,32 | 3,01 |
| Mamuju tengah | - | 2,04 | 2,52 | 2,66 | 3,54 | 2,75 | 3,55 | 2,56 | 1,13 | 0,48 | 5,00 | 0,07 | - |
| Pasangkayu | - | - | 2,55 | 2,48 | 3,69 | 2,76 | 4,20 | 2,08 | - | 0,15 | 5,00 | 0,11 | - |

Sumber: BRIN

Sementara itu, pada tahun 2023 nilai IDSD Kabupaten Pasangkayu masih belum bisa dihitung karena data pilar 9 pada aspek pasar belum memenuhi, tapi jumlah nilai indeks berdasarkan pilar lebih banyak terisi dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan mendasar yang terlihat adalah penurunan tajam pada nilai indeks pilar 7 dan pilar 11 menjadi 0,78 dan 2,23, menunjukkan pasar produk dan dinamisme bisnis memburuk. Beberapa pilar yang sebelumnya rendah, mengalami kenaikan seperti pilar 3 dan 4 mencatat nilai indeks masing-masing 3,62 dan 3,66, pilar 6 sebesar 3,14, sementara pilar 8 naik ke angka 3,77. Walaupun mengalami kenaikan, nilai semua pilar Kabupaten Pasangkayu secara relatif masih lebih rendah dari angka nasional dan Sulawesi Barat.

Tabel 2.10
Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

| Nama Provinsi | Lingkungan Pendukung | | | | SDM | | | | Pasar | | Ekosistem Inovasi | | Skor IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| Nasional | 4,30 | 2,71 | 3,58 | 3,54 | 3,79 | 3,77 | 2,64 | 3,85 | 2,53 | 4,36 | 3,22 | 3,03 | 3,44 |
| Prov. Sulawesi Barat | 4,40 | 2,22 | 3,63 | 3,85 | 3,39 | 3,54 | 3,87 | 3,96 | 2,32 | 3,81 | 3,16 | 2,21 | 3,36 |
| Rata-Rata Kab/Kota | 4,07 | 1,77 | 3,47 | 3,15 | 3,59 | 3,22 | 1,91 | 3,62 | 1,28 | 3,78 | 3,13 | 1,63 | 3,02 |
| Majene | 4,36 | 1,61 | 3,55 | 3,07 | 3,24 | 3,38 | 2,41 | 3,94 | 1,13 | 3,66 | 4,41 | 3,01 | 3,15 |
| Polewali Mandar | 4,43 | 1,57 | 3,56 | 3,13 | 3,29 | 3,07 | 2,86 | 3,59 | 1,47 | 4,09 | 3,51 | 2,20 | 3,06 |
| Mamasa | 3,78 | 1,56 | 3,13 | 3,16 | 3,94 | 3,25 | 2,51 | 2,77 | 0,74 | 3,45 | 2,03 | 1,33 | 2,64 |
| Mamuju | 3,95 | 1,96 | 3,39 | 3,37 | 3,70 | 3,27 | 2,28 | 4,34 | 1,77 | 4,04 | 4,44 | 2,40 | 3,24 |
| Mamuju Tengah | 3,92 | 1,38 | 3,55 | 2,54 | 3,60 | 3,24 | 0,59 | 3,29 | - | 3,97 | 2,19 | 0,40 | - |
| Pasangkayu | 3,96 | 2,53 | 3,62 | 3,66 | 3,76 | 3,14 | 0,78 | 3,77 | - | 3,46 | 2,23 | 0,43 | - |

Sumber: BRIN

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 3,10, relatif masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Barat (3,24) dan Nasional

(3,43). Dari segi lingkungan pendukung, Pasangkayu memiliki skor yang cukup baik di beberapa pilar, seperti pilar 1 (4,20) dan pilar 3 (3,92), meskipun terdapat variasi pada pilar lainnya. Dua pilar dengan angka indeks yang masih rendah yakni pilar 7 (1,63) dan pilar 9 (1,58). Hal ini mencerminkan masih rendahnya keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil, serta sistem keuangan yang belum efektif memfasilitasi dunia usaha agar tumbuh secara produktif dan berkelanjutan.

Tabel 2.11.
Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

| Nama Kab/Kota | Lingkungan Pendukung | | | | SDM | | Pasar | | | | Ekosistem Inovasi | | SKOR IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| Nasional | 4,18 | 2,97 | 3,47 | 3,99 | 3,76 | 3,91 | 2,57 | 3,03 | 2,76 | 4,35 | 3,06 | 3,13 | 3,43 |
| Prov. Sulawesi Barat | 4,23 | 2,59 | 3,08 | 3,99 | 3,42 | 4,24 | 3,07 | 2,66 | 2,42 | 3,83 | 2,73 | 2,58 | 3,24 |
| Rata-Rata Kab/Kota | 4,25 | 2,84 | 3,7 | 3,68 | 3,51 | 4,07 | 3,4 | 3,52 | 2,29 | 3,8 | 4,3 | 1,98 | 3,4 |
| Majene | - | 2,89 | 3,92 | 3,55 | 3,13 | 4,24 | 4,72 | 4,02 | 2,22 | 3,68 | 4,15 | 3,17 | - |
| Polewali Mandar | 4,62 | 2,96 | 3,81 | 3,8 | 3,19 | 4,18 | 2,96 | 3,6 | 2,08 | 4,11 | 4,62 | 2,48 | 3,53 |
| Mamasa | 4,04 | 2,54 | 3,55 | 3,75 | 3,88 | 3,87 | 5 | 3,06 | 2,39 | 3,46 | 3,74 | 1,82 | 3,43 |
| Mamuju | 4,27 | 2,95 | 3,57 | 3,95 | 3,64 | 4,01 | 4,5 | 3,84 | 2,95 | 4,06 | 4,42 | 2,36 | 3,71 |
| Pasangkayu | 4,2 | 3,04 | 3,92 | 3,03 | 3,53 | 4,01 | 1,63 | 3,14 | 1,58 | 4 | 4,4 | 0,74 | 3,1 |
| Mamuju Tengah | 4,12 | 2,64 | 3,44 | 4,03 | 3,7 | 4,11 | 1,6 | 3,46 | 2,53 | 3,47 | 4,44 | 1,31 | 3,24 |

Sumber: BRIN

## 2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

### 2.1.4.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

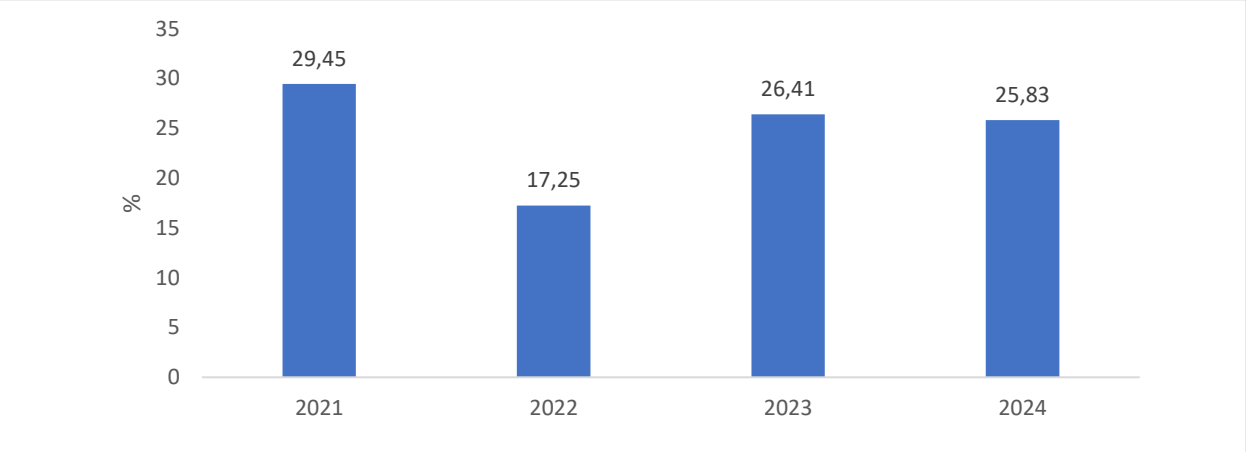
### A. Pendidikan

#### a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan prasekolah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan usia dini berkontribusi pada peningkatan kesiapan belajar anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Selama periode 2021-2024, persentase penduduk berumur 0-6 tahun yang masih atau pernah mengikuti pendidikan prasekolah di Kabupaten Pasangkayu cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, persentase partisipasi pendidikan prasekolah mencapai 29,45 persen, mencerminkan proporsi anak usia dini yang mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. Namun, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022, menjadi 17,25 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses pendidikan prasekolah. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan partisipasi menjadi 26,41 persen, yang dapat mencerminkan efektivitas

kebijakan daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, dengan persentase partisipasi mencapai 25,83 persen.

Gambar 2. 81
Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

**b. Angka Partisipasi Kasar**

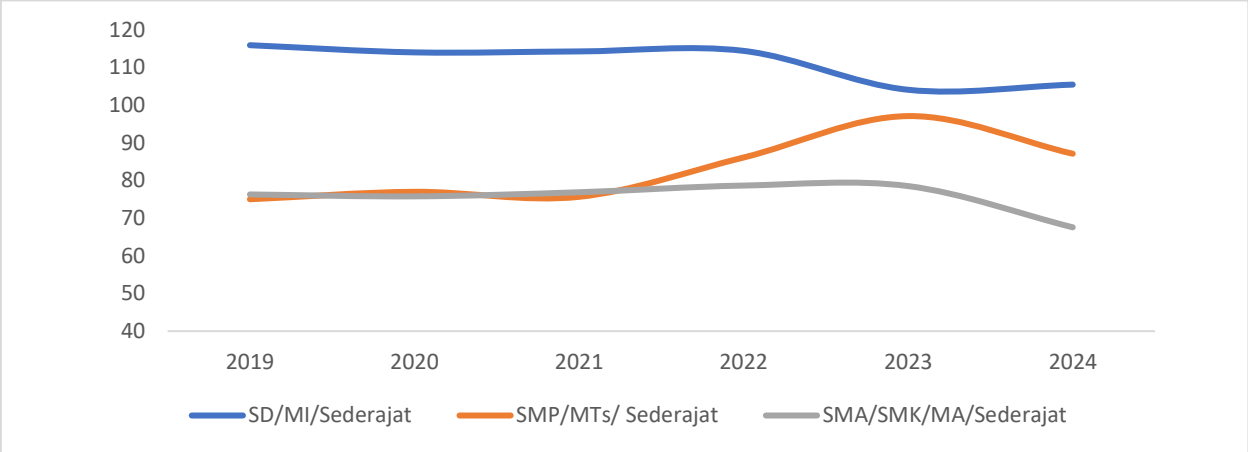
Angka Partisipasi Kasar (APK) menilai perbandingan antara jumlah penduduk dari berbagai usia yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan jumlah penduduk yang berada pada usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang belum mencukupi atau melebihi usia yang seharusnya pada jenjang tersebut. Perhitungan APK dilakukan pada tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA, serta jenjang pendidikan yang sederajat. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen, berarti terdapat penduduk yang bersekolah tetapi belum mencukupi umur atau melebih umur yang seharunya. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Dalam enam tahun terakhir, APK di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan fluktuasi di berbagai jenjang pendidikan, yaitu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. APK merupakan indikator penting dalam mengukur aksesibilitas pendidikan, dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah yang sesuai. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan adanya tren yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA/Sederajat).

Pada jenjang SD/MI/Sederajat, APK Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang relatif stabil namun sedikit menurun. Pada tahun 2019, APK mencapai 115,91 persen, menurun secara bertahap menjadi 114 persen pada tahun 2020, lalu 114,26 persen tahun 2021, dan kembali meningkat sedikit menjadi 114,4 persen tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini

turun signifikan menjadi 104,07 persen dan sedikit meningkat menjadi 105,44 persen pada tahun 2024. Tingginya APK SD/MI yang berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa selain anak usia 7-12 tahun, terdapat anak yang lebih tua atau lebih muda yang masih bersekolah di jenjang ini. Penurunan pada 2023 dan 2024 dapat mencerminkan berkurangnya angka pendaftaran peserta didik baru atau meningkatnya angka putus sekolah di tingkat SD. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar, keterbatasan infrastruktur sekolah, serta kendala ekonomi keluarga yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya.

Gambar 2. 82
APK Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Pada jenjang SMP/MTS/Sederajat, APK meningkat cukup signifikan dari 75,01 persen pada tahun 2019 menjadi 86,1 persen pada tahun 2022, dan bahkan mencapai puncaknya di 97,09 persen ditahun 2023. Namun, angka ini mengalami penurunan tajam menjadi 87,1 persen tahun 2024, yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 13 persen anak usia 13-15 tahun yang belum terakomodasi dalam pendidikan menengah pertama. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama, baik karena faktor geografis (akses sekolah yang jauh), keterbatasan sarana pendidikan, atau faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak bekerja lebih dini. Meskipun angka partisipasi masih relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam mempertahankan partisipasi pendidikan menengah pertama.

Selanjutnya, tren yang paling mengkhawatirkan terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat. APK pada jenjang ini relatif stabil dari 2019 hingga 2023, dengan angka 76,29 persen (2019), 75,78 persen (2020), 76,87 persen (2021), dan 78,65 persen (2022). Namun, terjadi penurunan dari 78,51 persen pada tahun 2023 menjadi 67,56 persen ditahun 2024. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa sekitar 32 persen penduduk usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA, yang dapat mengindikasikan meningkatnya angka putus sekolah.

Penurunan ini menjadi tantangan besar karena pendidikan menengah atas sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Kabupaten Pasangkayu.

**c. Angka Partisipasi Murni**

Dalam enam tahun terakhir, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan fluktuasi di berbagai jenjang pendidikan, yaitu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. APM merupakan indikator penting yang mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang benar-benar bersekolah di tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya, berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencakup semua peserta didik tanpa memperhitungkan batas usia.

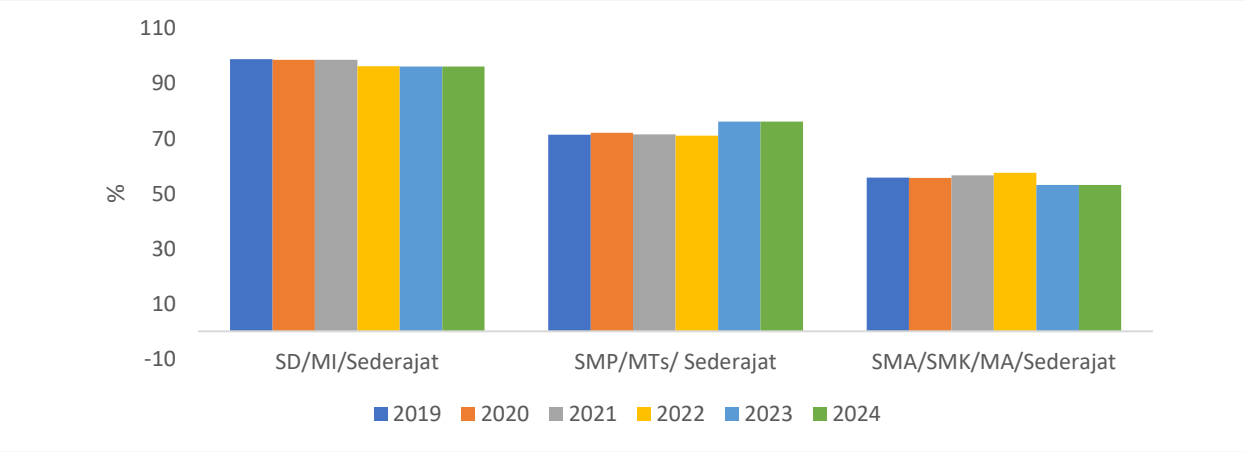
Pada jenjang SD/MI/Sederajat, APM Kabupaten Pasangkayu relatif tinggi dan stabil, tetapi mengalami sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, APM SD/MI tercatat sebesar 98,85 persen, kemudian mengalami penurunan sedikit menjadi 98,62 persen pada tahun 2020, lalu meningkat sedikit menjadi 98,65 persen pada tahun 2021. Namun, tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 96,3 persen, dan bertahan di angka 96,18 persen pada tahun 2023 dan 2024. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah bersekolah di jenjang SD/MI, tetapi ada sedikit penurunan dalam cakupan partisipasi murni sejak 2022, yang dapat mengindikasikan mulainya tantangan dalam mempertahankan tingkat pendaftaran dan mencegah putus sekolah di tingkat pendidikan dasar.

Pada jenjang SMP/MTS/Sederajat, APM mengalami peningkatan setelah periode stagnasi. Pada tahun 2019, APM SMP/MTS berada di angka 71,48 persen, sedikit meningkat menjadi 72,15 persen pada tahun 2020, tetapi kembali turun ke 71,59 persen pada tahun 2021 dan 71,04 persen pada 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 76,16 persen, dan angka ini bertahan di 76,17 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan menengah pertama, baik melalui pembangunan fasilitas pendidikan baru, kebijakan afirmatif bagi anak-anak kurang mampu, maupun peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah. Namun, angka ini juga mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 24 persen anak usia 13-15 tahun belum bersekolah di tingkat SMP/MTS, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama.

Pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat, APM mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan meningkatnya tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan di tingkat menengah atas. Pada tahun 2019, APM SMA/MA sebesar 55,91 persen, mengalami sedikit penurunan menjadi 55,79 persen pada 2020, lalu kembali meningkat menjadi 56,68 persen pada tahun 2021 dan 57,57 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi 53,22 persen, dan angka ini stagnan hingga tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 53 persen penduduk usia 16-18 tahun yang benar-benar bersekolah di SMA/SMK/MA/Sederajat, sementara hampir 47 persen lainnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang ini.

Gambar 2. 83
APM Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2019-2024



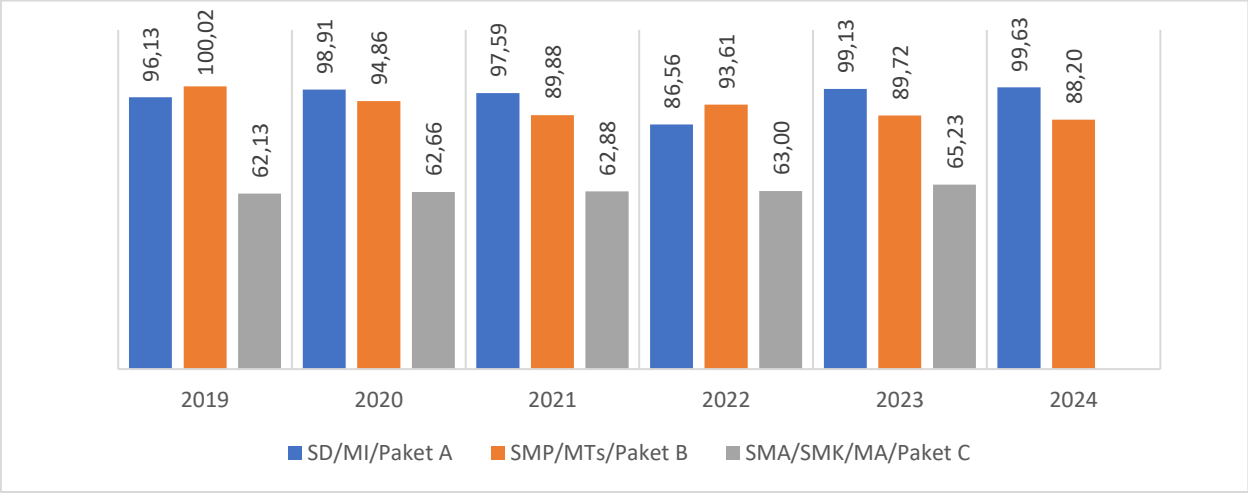

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**d. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator utama dalam menilai tingkat keterlibatan anak-anak dan remaja dalam sistem pendidikan formal. APS menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih aktif bersekolah. Peningkatan APS mencerminkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, sementara penurunan APS dapat mengindikasikan tantangan dalam sistem pendidikan, seperti keterbatasan akses, faktor ekonomi, atau masalah sosial lainnya. APS di Kabupaten Pasangkayu untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI/Paket A) berada pada tingkat yang sangat tinggi, dengan sedikit peningkatan dari 98,85 persen pada tahun 2019 menjadi 99,13 persen pada tahun 2023, dan tahun 2024 naik lagi ke 99,63 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD tetap bersekolah, mencerminkan keberhasilan kebijakan wajib belajar serta tersedianya akses pendidikan dasar yang relatif merata.

Untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/Paket B), angka partisipasi sekolah menunjukkan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, APS berada di angka 91,80 persen, meningkat menjadi 91,97 persen pada tahun 2020, tetapi kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 89,72 persen pada tahun 2023. Tahun 20024, angka turun lagi ke 88,20 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan siswa di tingkat pendidikan menengah pertama, seperti keterbatasan ekonomi keluarga atau kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan di daerah tertentu.

Gambar 2. 84
APS Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Sementara itu, angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA/Paket C) menunjukkan tren peningkatan dari 62,13 persen pada tahun 2019 menjadi 65,23 persen pada tahun 2023. Walaupun peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam keterlibatan siswa di jenjang pendidikan menengah atas, persentase ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang sebelumnya. Secara keseluruhan, APS Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah hampir merata, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan siswa di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Untuk meningkatkan APS pada jenjang yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan strategis yang berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih merata, bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, serta program peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah untuk masa depan generasi muda.

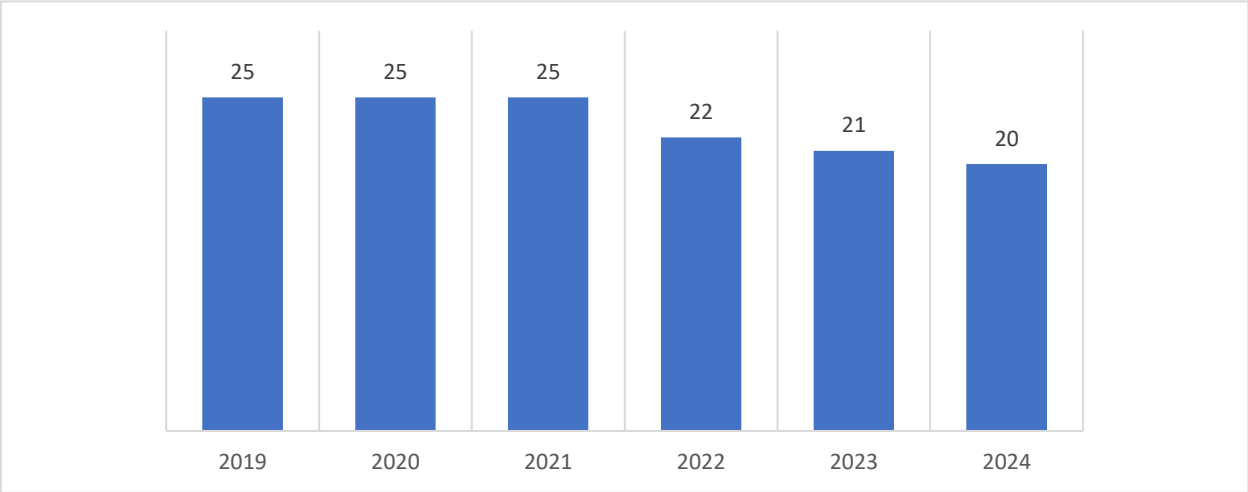
**e. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio guru dan murid merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk menilai kualitas dan mutu pendidikan di suatu daerah. Rasio ini mengacu pada perbandingan antara jumlah peserta didik dan jumlah guru di sebuah sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Pasangakyu. Rasio ini mencerminkan beban kerja guru serta tingkat perhatian individual yang diperoleh setiap murid di jenjang pendidikan dasar. Rasio yang terlalu tinggi dapat menyulitkan guru dalam memaksimalkan potensi dan bakat masing-masing murid, sehingga proses belajar-mengajar kurang berjalan optimal. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah memungkinkan guru untuk memberikan perhatian lebih baik kepada siswa, mengenali kelebihan dan kekurangan mereka, serta menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif.

Dalam konteks Kabupaten Pasangkayu, rasio guru dan murid di jenjang pendidikan dasar menunjukkan kencenderungan turun. Hal itu bukan berarti negatif, karena rasio guru murid

punya standar nasional. Jika angka rasionya turun tapi memenuhi standar nasional, itu justru pencapaian positif. Pada tahun tahun 2019, rasio guru-murid berada di angka 25, yang menunjukkan bahwa satu guru rata-rata mengajar 25 murid. Rasio ini tetap bertahan pada tahun 2021, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 22 pada tahun 2022. Penurunan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 21 dan 20. Penurunan tersebut merupakan pencapaian positif karena angka rasio 20 sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah 20 murid per satu orang guru dianggap angka optimal yang menunjang kualitas belajar mengajar.

Gambar 2. 85
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

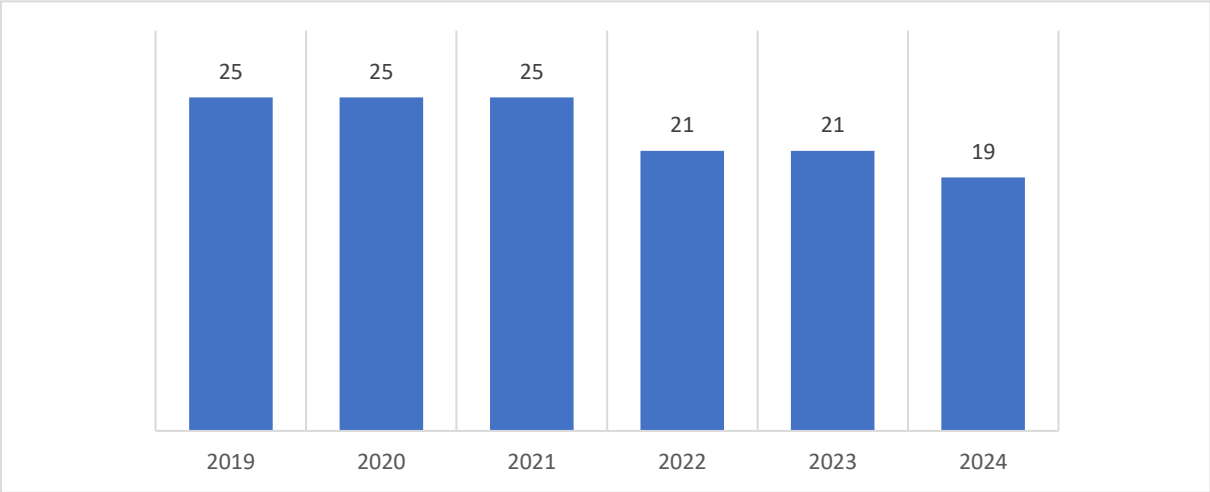



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**f. Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah**

Rasio guru-murid pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2024. Pada tahun 2019, rasio berada di angka 25, yang menunjukkan bahwa satu guru bertanggung jawab untuk mengajar rata-rata 25 siswa, dan bertahan hingga tahun 2021. Tahun 2022, angkanya turun ke 21, kemungkinan disebabkan karena ada penambahan guru adan penurunan jumlah siswa, dan angka tersebut sama di tahun 2023, dan turun lagi ke 19 di tahun 2024. Penurunan tersebut masih disebut capaian positif karena standar nasional rasio guru murid untuk pendidikan SMA, MA, dan SMK berada dalam rentang 15-20, dimana untuk SMA rasionya 20, sementara MA dan SMK rasionya 15.

Gambar 2. 86
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

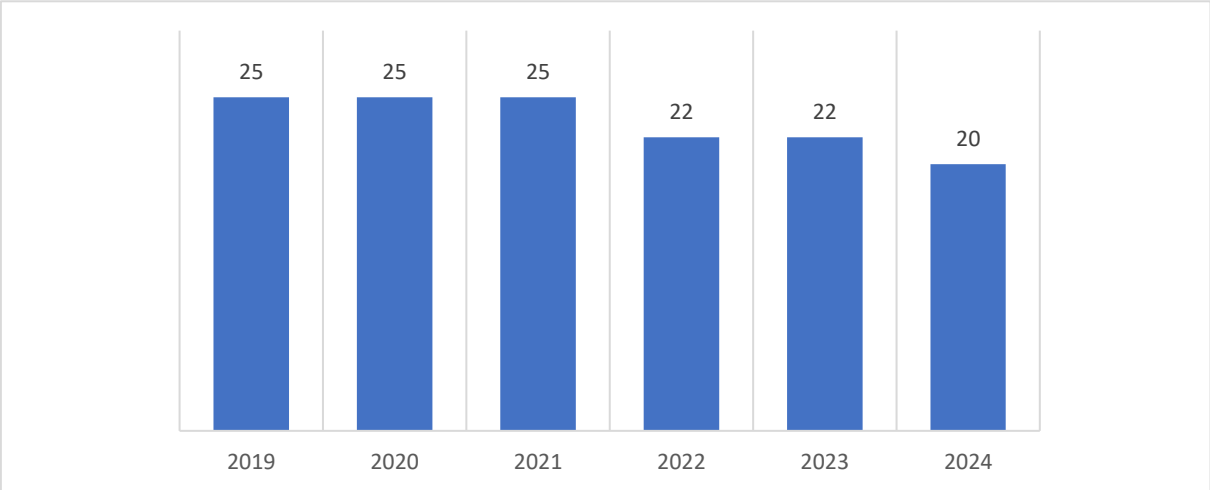



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**g. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar**

Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar mengukur ketersediaan guru dalam konteks jumlah murid di sekolah dasar, dengan skala per seribu murid. Semakin tinggi nilai rasio, semakin banyak guru yang tersedia untuk setiap kelas, yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara guru dan murid. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa satu guru menangani lebih banyak murid, yang berpotensi menurunkan efektivitas pengajaran. Indikator ini sangat penting dalam perencanaan pendidikan, terutama dalam distribusi tenaga pendidik dan alokasi sumber daya sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal.

Gambar 2. 87
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dalam enam tahun terakhir, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Kabupaten Pasangkayu cenderung turun, sejalan dengan angka rasio guru murid pendidikan

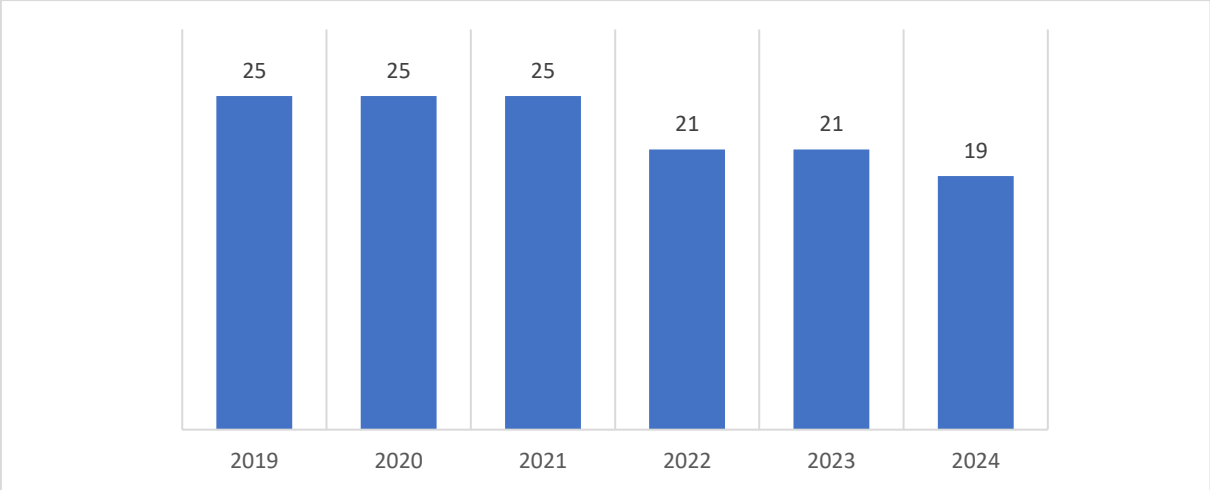
dasar. Tahun 2019 hingga 2021, rasio bertanhan di angka 25, kemudian turun di tahun 2022 dan 2023 menjadi 22. Tahun 2024, penurunan berlanjut ke angka rasio 20 untuk per guru dalam setiap kelas.

**h. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata Sekolah Menengah**

Kondisi yang sama juga terjadi pada rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata sekolah menengah. Indikator ini mengukur ketersediaan guru dalam konteks jumlah murid di sekolah menengah, dengan skala per seribu murid. Semakin tinggi nilai rasio, semakin banyak guru yang tersedia untuk setiap kelas, yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara guru dan murid. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa satu guru menangani lebih banyak murid, yang berpotensi menurunkan efektivitas pengajaran. Indikator ini sangat penting dalam perencanaan pendidikan, terutama dalam distribusi tenaga pendidik dan alokasi sumber daya sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal.

Dalam enam tahun terakhir, angka rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan. Tahun 2019 hingga 2023, angka rasio bertahan di level 25 per satu orang guru, kemudian turun ke 21 di tahun 2022 dan 2023. Tahun 2024 angkanya kembali turun menjadi 19.

Gambar 2. 88
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

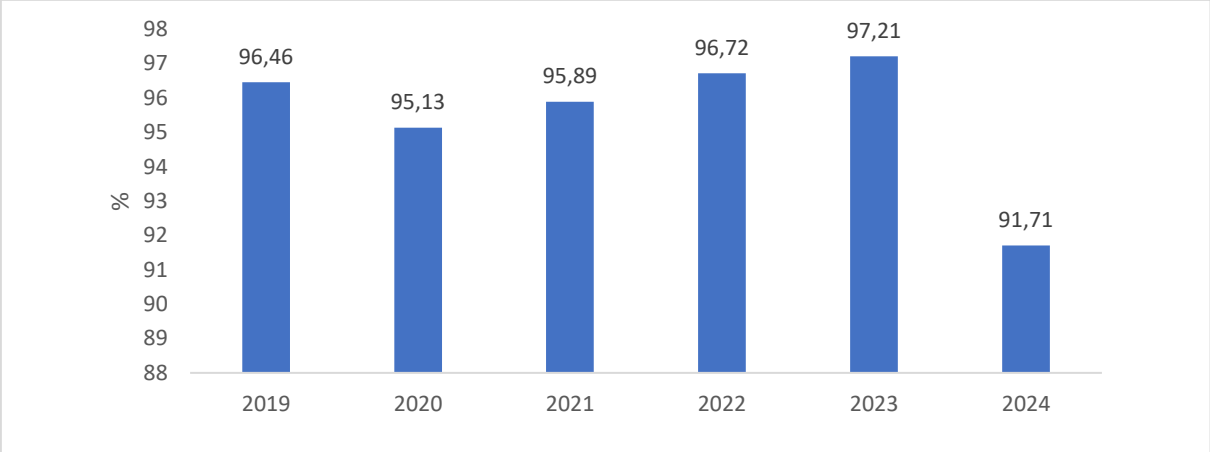
**i. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)**

Angka melek huruf merupakan indikator utama dalam menilai perkembangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Melek huruf, yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis, memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, akses terhadap informasi, serta kesempatan kerja. Persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Pasangkayu dalam periode

2019-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat melek huruf berada pada angka 96,46 persen, mencerminkan tingkat literasi yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 95,13 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses pendidikan atau dampak pandemi terhadap layanan pendidikan non-formal dan program pemberantasan buta huruf.

Pada tahun 2021, persentase kembali mengalami peningkatan menjadi 95,89 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023, dengan angka mencapai 97,21 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pendidikan daerah dalam memperluas akses literasi bagi masyarakat. Namun, tren ini mengalami perubahan signifikan pada tahun 2024, dengan tingkat melek huruf turun drastis menjadi 91,71 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan baru yang memengaruhi kemampuan literasi penduduk, seperti kurangnya program literasi bagi kelompok usia dewasa, keterbatasan fasilitas pendidikan bagi masyarakat pedesaan, atau faktor sosial-ekonomi yang membatasi akses pendidikan berkelanjutan.

Gambar 2. 89
Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat, diolah

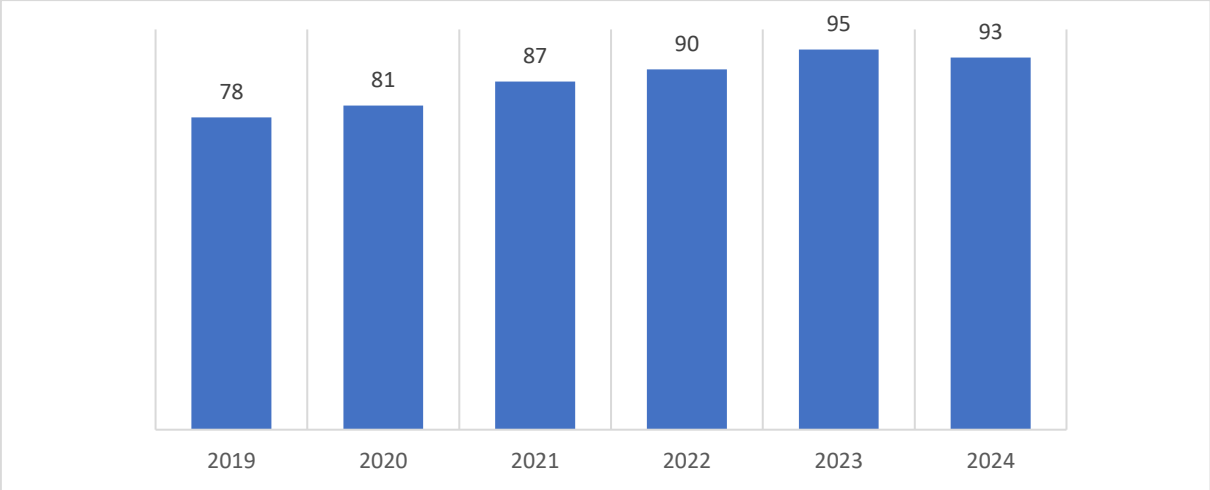
**j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Kualitas guru memegang peran krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan karena guru merupakan ujung tombak proses pembelajaran yang langsung berinteraksi dengan peserta didik. Guru yang kompeten tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif, memahami kebutuhan individual siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Kemampuan guru dalam memotivasi, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi turut menentukan keberhasilan siswa dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Investasi dalam peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan profesional, dan penguatan kesejahteraan akan berdampak langsung pada peningkatan

hasil belajar siswa, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, memperkuat kualitas guru bukan hanya langkah strategis untuk memajukan pendidikan, tetapi juga fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.

Salah satu parameter kualitas guru ada kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki. Dalam UU tentang Guru dan Dosen, Pasal 9 menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki guru adalah pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Walaupun telah disebutkan dalam UU, namun belum semua guru di Kabupaten Pasangkayu memiliki kualifikasi S1/D-IV. Berdasarkan data, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pasangkayu cenderung naik dalam enam tahun terakhir, mulai dari 78 persen di ahun 2019, kemudian sampai 95 persen di tahun 2023. Namun, memasuki tahun 2024, angkanya turun ke 93 persen.

Gambar 2. 90
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

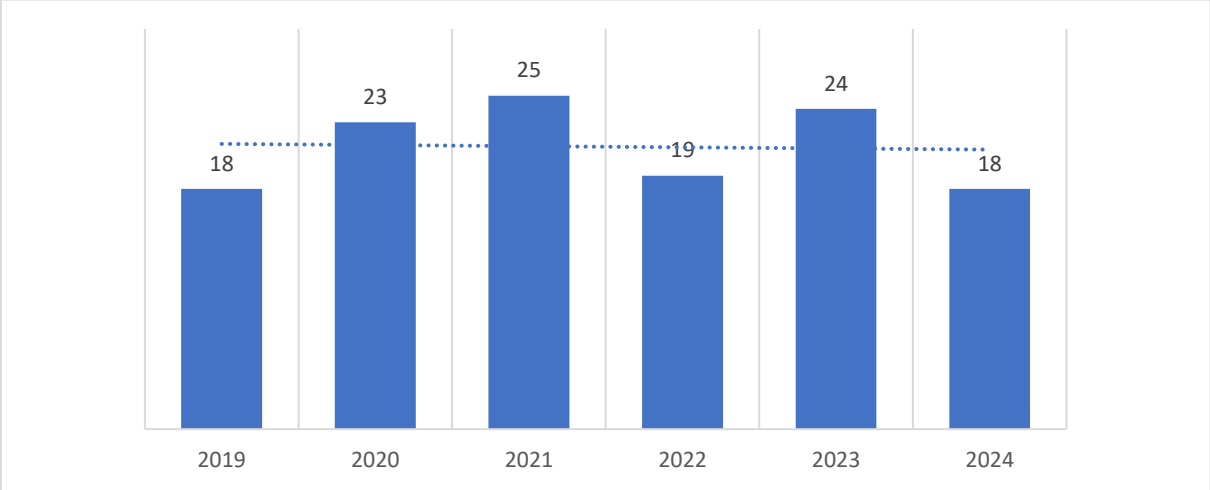
Faktor umum yang menyebabkan masih adanya guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV antara lain keterbatasan akses pendidikan tinggi di daerah terpencil, yang menyulitkan guru untuk melanjutkan studi. Selain itu, kendala ekonomi seperti biaya kuliah, transportasi, atau kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan sering menjadi penghalang utama, terutama bagi guru honorer atau yang berpenghasilan rendah. Kurangnya kesadaran atau motivasi untuk meningkatkan kompetensi akademik juga turut berpengaruh, terutama jika lingkungan kerja tidak menekankan urgensi kualifikasi tersebut. Di sisi lain, kebijakan instansi atau pemerintah yang belum sepenuhnya tegas dalam menegakkan standar kualifikasi, serta keterbatasan program pelatihan atau beasiswa yang terjangkau, turut memperlambat proses pemenuhan syarat ini. Kombinasi faktor struktural, finansial, dan kultural ini menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan solusi holistik dari berbagai pihak.

## B. Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0 - 11 bulan (kurang dari 1 tahun). Angka Kematian Bayi (AKB) merepresentasikan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur satu tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Selain mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi, indikator AKB juga mencerminkan kesehatan ibu dan lingkungan tempat tinggal bayi tersebut. Selama tahun 2019 hingga 2024, AKB di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan dari angka tertinggi yaitu 25 menjadi 18. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup bayi di Kabupaten Pasangkayu, tidak akan mencapai usia satu tahun sekitar 18 orang. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan berarti dalam perbaikan layanan kesehatan sejak ibu hamil hingga persalinan.

Gambar 2. 91
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024

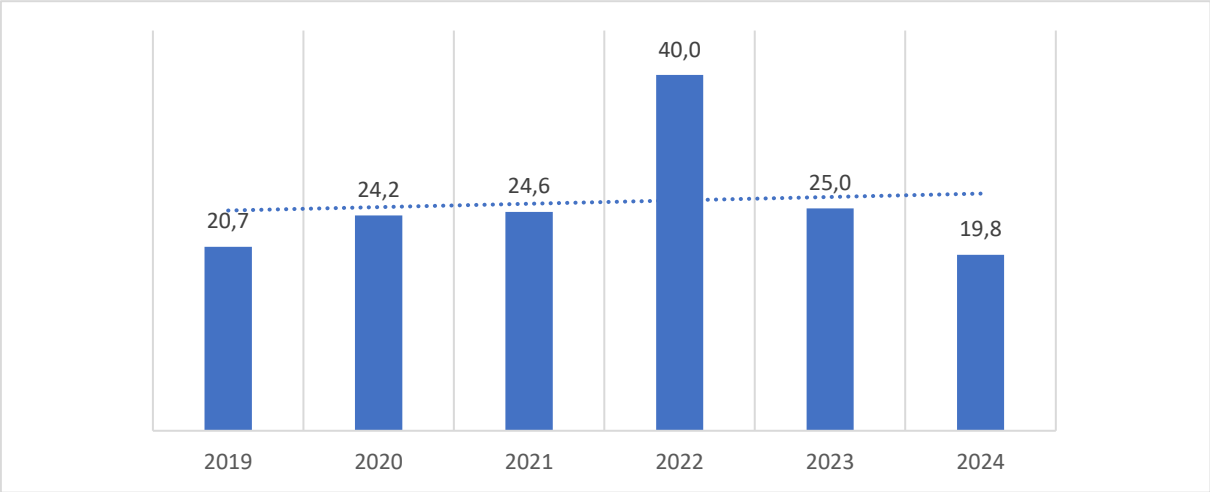



Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Pasangkayu

### b. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kesehatan balita (0-4) tahun sangat bergantung pada kesehatan lingkungan tinggal, kesehatan keluarga, status sosial/ekonomi keluarga. Sebab kesehatan balita tergolong rentan, maka peran keluarga dianggap sangat penting dalam melindungi dan memelihara kesehatan balita. Status sosial/ekonomi keluarga dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan balita karena asupan nutrisi balita sangat ditentukan oleh status sosial/ekonomi keluarga. Angka kematian balita (AKBa) mengukur jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 2. 92.
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Pasangkayu

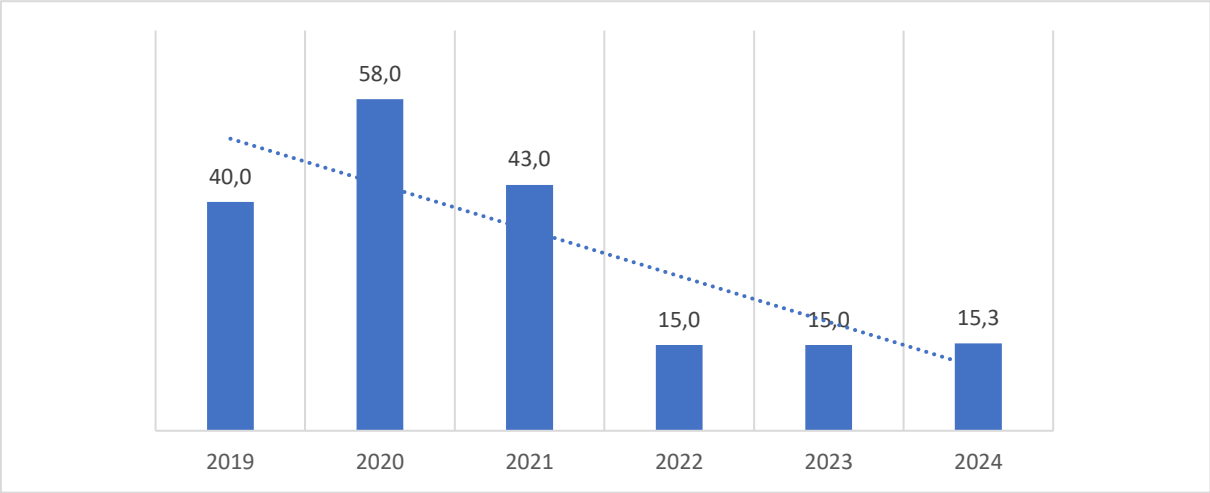
Dalam lima tahun terakhir, AKBa Kabupaten Pasangkayu cenderung naik. Pada tahun 2019, AKBa mencapai 20,7 per 1000 kelahiran hidup, lalu naik menjadi 24,2 per kelahiran hidup pada tahun 2020, dan di tahun 2022 mencapai angka tertinggi dalam periode enam tahun terakhir sebesar 40 per kelahiran hidup. Tahun 2023 dan 2024, pemerintah daerah berhasil menurunkan AKBa menjadi 25 dan 19,8, sebuah pencapaian positif yang mesti dipertahankan.

**c. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada masa bulan pertama pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat ditentukan oleh faktor bawaan anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau pada saat masa kehamilan. Maka sangat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan kematian neonatal dengan memelihara kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Dalam enam tahun terakhir, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup tercatat sebesar 40, kemudian naik menjadi 58 di tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 43 di tahun 2023. Penurunan signifikan terjadi di tahun 2022 dengan angka 15 dan bertahan hingga tahun 2023. Tahun 2024, ada kenaikan kecil menjadi 15,3. Perbaikan ini sejalan dengan program pemerintah untuk pencegahan kematian neonatal dengan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Gambar 2. 93
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

**d. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup**

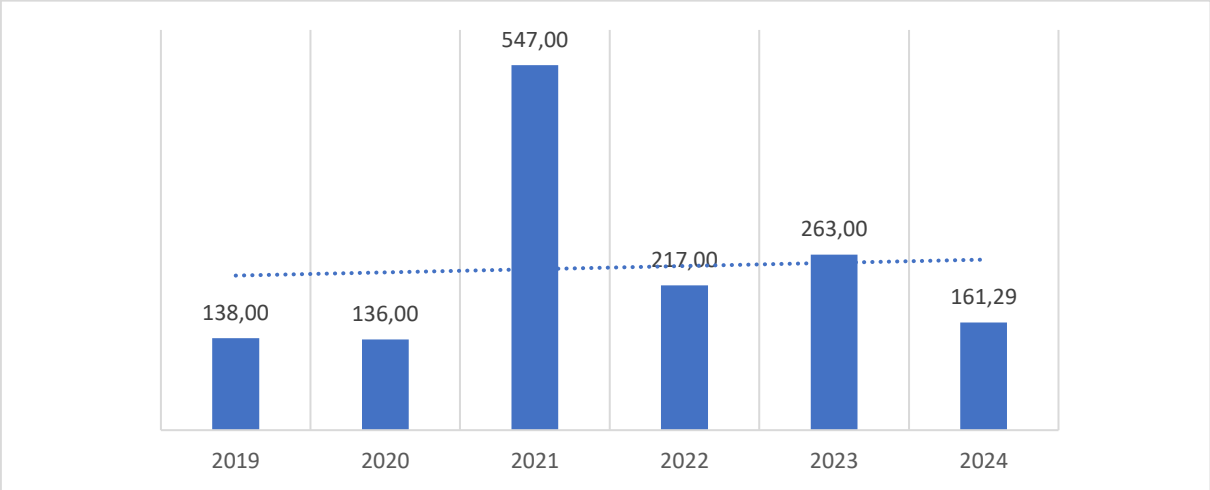
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI tidak hanya mencerminkan kualitas sistem kesehatan suatu negara, tetapi juga kesetaraan gender, akses pendidikan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa negara berkembang, terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, memiliki AKI tertinggi, sementara negara maju seperti Norwegia atau Jepang mencatat angka yang jauh lebih rendah. Tingginya AKI di beberapa daerah sering dikaitkan dengan keterbatasan layanan kesehatan dasar, sehingga menjadi fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB untuk mengurangi disparitas ini.

Faktor utama yang memengaruhi AKI meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, seperti ketersediaan tenaga medis terlatih, fasilitas darurat obstetri, serta pemeriksaan kehamilan rutin. Di banyak daerah terpencil, jarak ke rumah sakit atau biaya layanan menjadi hambatan serius. Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, dan ketidaksetaraan gender juga berperan besar. Ibu dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami risiko kehamilan atau enggan mencari pertolongan medis. Selain itu, praktik budaya seperti pernikahan dini, kehamilan remaja, atau tradisi yang menghambat keputusan perempuan atas tubuhnya turut meningkatkan risiko. Komplikasi medis seperti perdarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi selama kehamilan menjadi penyebab langsung kematian, terutama jika tidak ditangani secara cepat dan memadai.

Di Kabupaten Pasangkayu, pemerintah daerah berhasil menurunkan AKI, meski trennya dalam enam tahun terakhir cenderung naik. Angka kematian ibu tertinggi ada di tahun 2021 yaitu 547 orang per 100.000 kelahiran hidup, dari dari 136 orang per 100.000 kelahiran hidup. Tahun

2022, pemerintah daerah berhasil menurunkan AKI menjadi 217 orang, kemudian naik di tahun 2023 sebesar 263, dan akhirnya tahun 2024 mencapai 161,29.

Gambar 2. 94
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

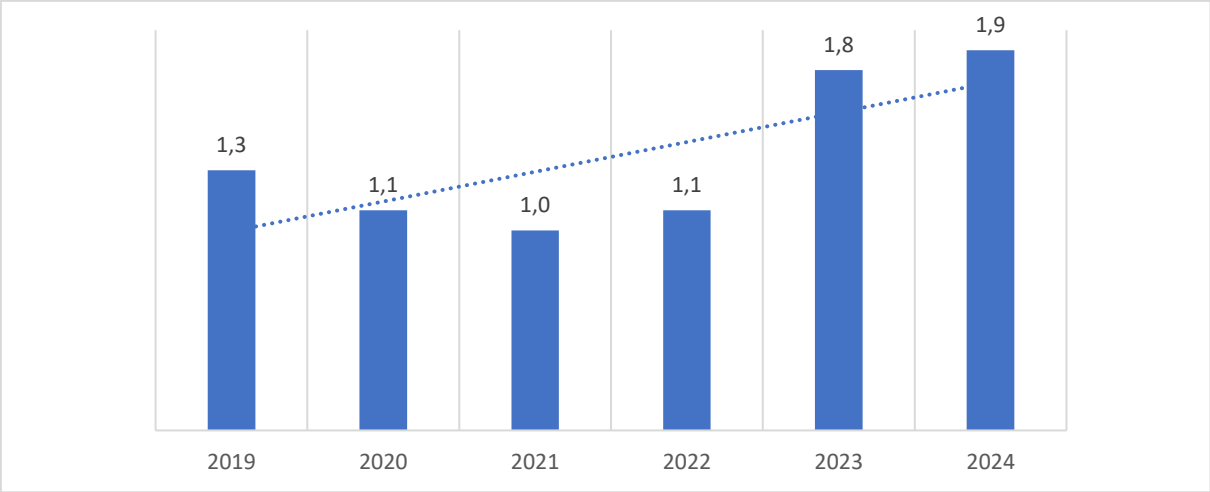
Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), diperlukan kebijakan holistik yang mencakup penguatan sistem kesehatan, pendidikan masyarakat, dan penanganan ketimpangan sosial-ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan maternal berkualitas, seperti pemeriksaan kehamilan rutin, persalinan oleh tenaga medis terlatih, dan layanan darurat obstetri di daerah terpencil melalui pembangunan fasilitas kesehatan atau program mobile clinic. Subsidi atau asuransi kesehatan dapat mengurangi hambatan biaya bagi keluarga miskin. Di sisi lain, edukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya antenatal care, dan pencegahan perkawinan dini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan kampanye masyarakat. Kebijakan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses pendidikan dan lapangan kerja juga penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan terkait kesehatan. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemangku adat diperlukan untuk mengatasi praktik budaya berisiko, sementara pelatihan bidan desa dan penggunaan teknologi telemedicine dapat menjadi solusi inovatif di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Dengan pendekatan multisektoral ini, AKI dapat ditekan secara signifikan.

**e. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Salah satu fasilitas kesehatan yang penting bagi masyarakat, khususnya Balita adalah Posyandu. Posyandu memiliki peran krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. Sebagai layanan kesehatan berbasis komunitas, Posyandu menyediakan akses mudah dan gratis untuk pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi dan pola hidup sehat. Keberadaannya memungkinkan

deteksi dini masalah kesehatan seperti stunting, gizi buruk, atau penyakit menular, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk. Selain itu, Posyandu memperkuat partisipasi aktif masyarakat melalui kader kesehatan yang terlatih, mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Dengan demikian, Posyandu tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menekan angka kematian ibu dan anak, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang minim fasilitas medis.

Gambar 2. 95.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



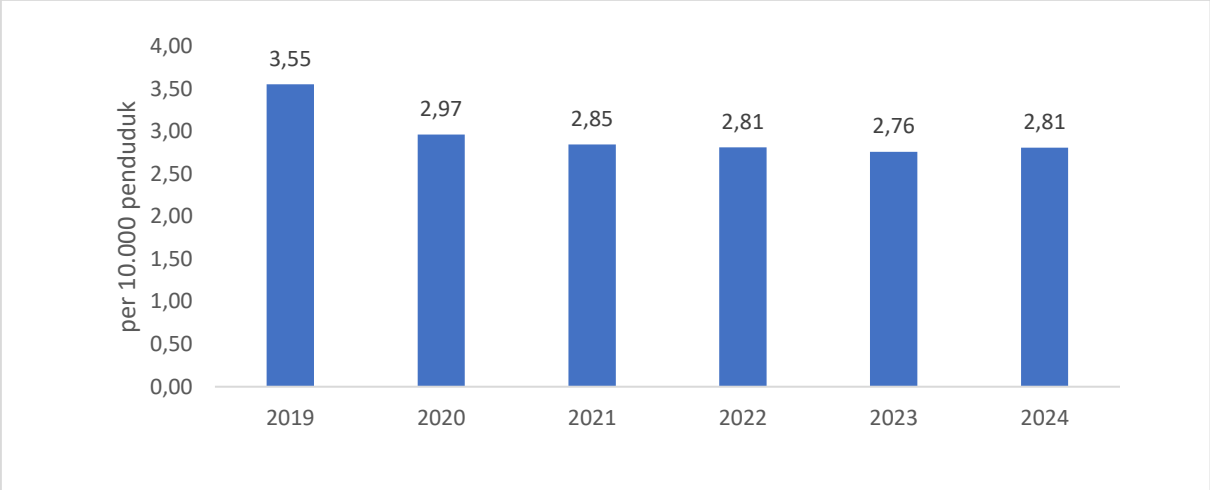

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Salah satu indikator mengukur akses terhadap terhadap Posyandu adalah rasio posyandu per satuan balita. Dalam enam tahun terakhir, rasio Posyandu Kabupaten Pasnagkayu mengalami kenaikan. Sempat turun dari tahun 2019 hingga 2021 sebesar 1,3 ke 1,0, tahun 2022 naik mulai dari 1,1. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2023 dengan angka 1,8 dan berlanjut di tahun 2024 menjadi 1,9. Angka tersebut menggambarkan bahwa sekitar 1-2 Posyandu di Kabupaten Pasangkayu melayani 1.000 Balita. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Posyandu di Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat membaik. Angka ini juga berada dalam batas ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 1:1000.

**f. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan aspek fundamental dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per 10.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2023 sebelum mengalami sedikit peningkatan pada 2024.

Gambar 2. 96
Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 3,55, yang mencerminkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif baik. Namun, angka ini mengalami penurunan bertahap menjadi 2,97 pada tahun 2020, 2,85 tahun 2021, 2,81 tahun 2022, dan mencapai titik terendah 2,76 pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan fasilitas kesehatan baru atau keterbatasan anggaran yang berdampak pada penyediaan layanan kesehatan. Meskipun pada 2024 rasio meningkat kembali menjadi 2,81, angka ini masih lebih rendah dibandingkan 2019, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan masih diperlukan.

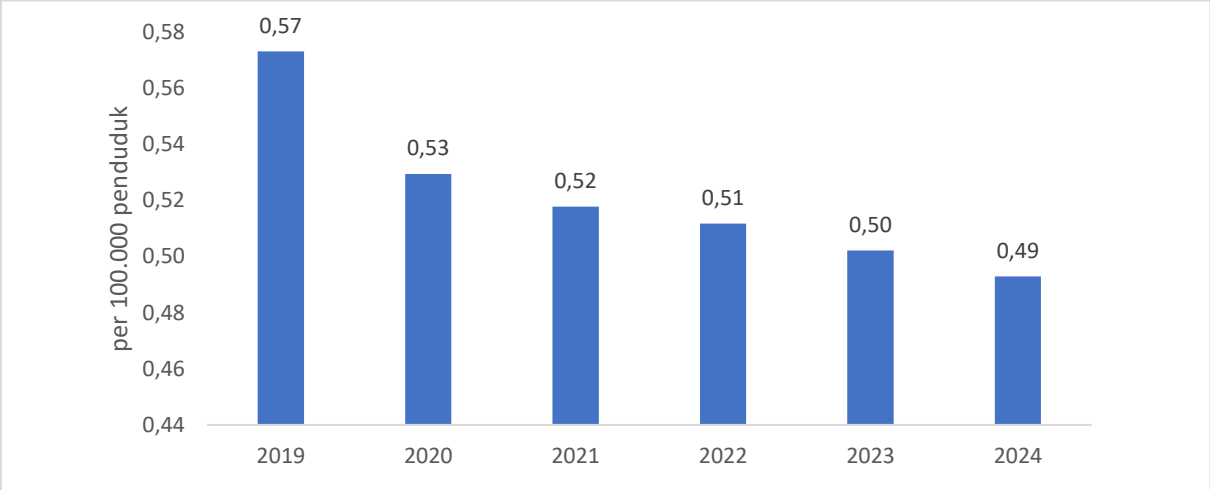
**g. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya kuratif untuk pelayanan kesehatan, preventif dilaksanakan oleh puskesmas, poliklinik, dan pustu. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena perananya yang vital untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, maka daya tampung rumah sakit harusnya memadai dan bisa melayani semua masyarakat.

Rasio rumah sakit di Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio rumah sakit tercatat sebesar 0,57 per 100.000 penduduk, lalu turun menjadi 0,49 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Artinya 1 rumah sakit untuk melayani lebih dari 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah rumah sakit sehingga angka tersebut tersebut mengalami penurunan. Hanya terdapat satu rumah sakit di Kabupaten Pasangkayu yang berada di Kecamatan Pasangkayu, kemudian terjadi peningkatan jumlah

penduduk dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Artinya, tanggungan rumah sakit dalam menyediakan pelayanan kesehatan menjadi semakin besar setiap tahunnya.

Gambar 2. 97
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

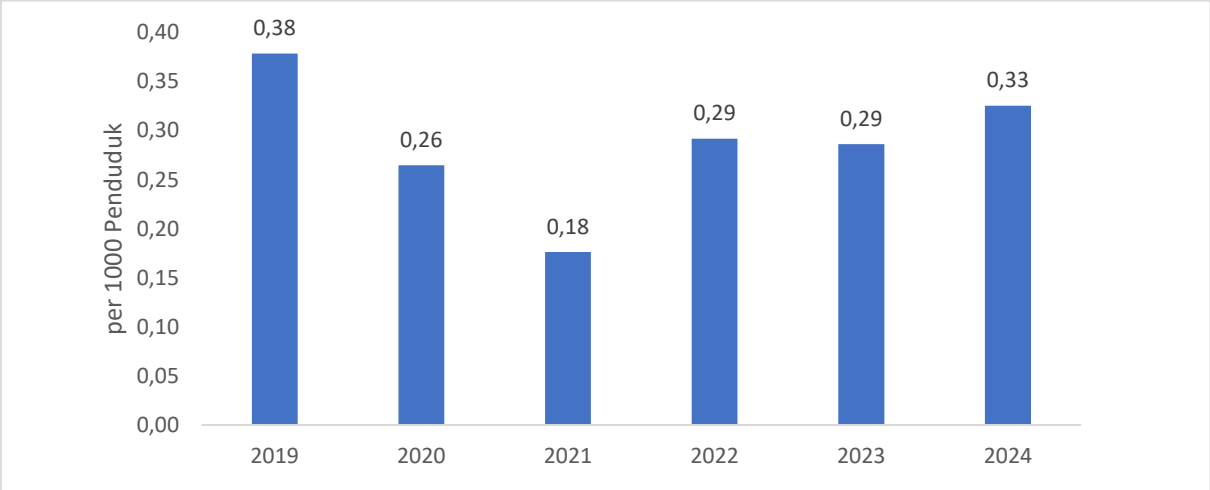



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**h. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter, merupakan faktor krusial dalam menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Rasio dokter per 1.000 penduduk menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan layanan medis. Selama periode 2019-2024, rasio dokter per 1.000 penduduk menunjukkan fluktuasi signifikan, yang dapat mencerminkan tantangan dan dinamika dalam distribusi serta ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 98
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Pada tahun 2019, Kabupaten Pasangkayu mencatatkan rasio dokter hanya sekitar 0,38 per 1.000 penduduk. Dengan rasio tersebut, berarti kurang dari 1 dokter di Kabupaten

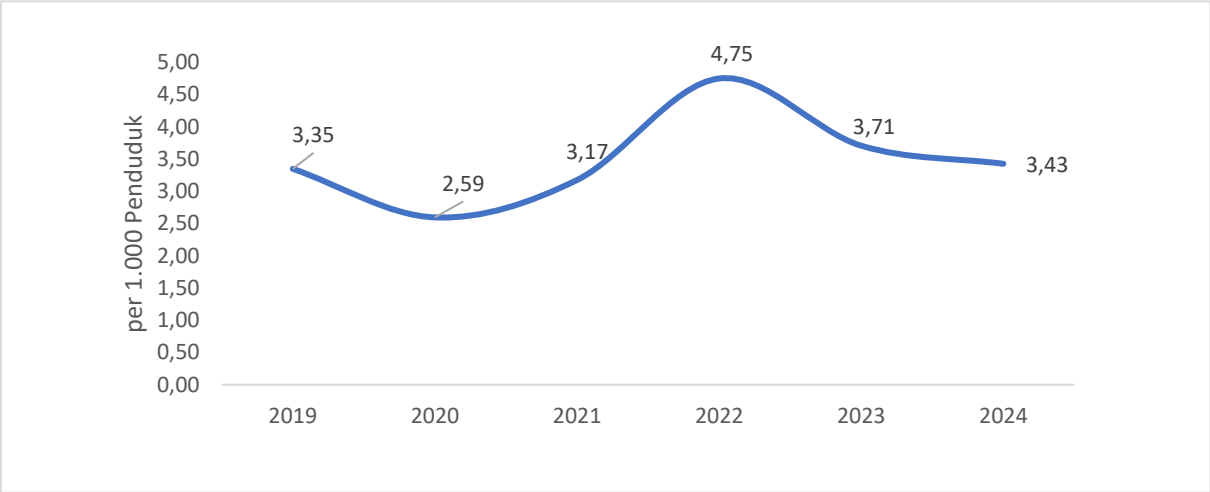
Pasangkayu harus melayani 1.000 penduduk atau dengan kata lain 1 dokter harus melayani sekitar 2.700 penduduk. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata atau standar yang ditetapkan WHO yang mencapai 1 dokter per 1.000 penduduk. Namun, angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 0,26, dan terus merosot hingga 0,18 pada tahun 2021. Penurunan tajam ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti redistribusi tenaga medis, peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah dokter, atau kendala dalam perekrutan dan retensi tenaga kesehatan di wilayah ini. Meskipun demikian, rasio dokter mulai meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 0,29 per 1.000 penduduk, sedikit stabil di angka 0,29 pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi 0,33 pada tahun 2024.

**i. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk**

Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas sistem kesehatan suatu wilayah dalam memberikan layanan medis yang memadai. Indikator ini mencerminkan jumlah tenaga kesehatan (termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya) yang tersedia untuk setiap 1.000 penduduk. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2024. Pada tahun 2019, rasio tenaga kesehatan berada di angka 3,35 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, sebelum mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 2,59 pada tahun 2020. Penurunan ini dapat mengindikasikan keterbatasan perekrutan tenaga medis baru atau peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kesehatan. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2021, dengan rasio meningkat kembali menjadi 3,17, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 di angka 4,75, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Kenaikan kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan rekrutmen tenaga medis tambahan atau peningkatan jumlah fasilitas kesehatan.

Setelah mencapai puncaknya, rasio kembali menurun menjadi 3,71 pada 2023 dan 3,43 pada 2024. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019-2021, tren penurunan ini dapat menjadi sinyal perlunya upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Faktor-faktor seperti mutasi, pengurangan tenaga kesehatan, serta pertumbuhan penduduk, dapat menjadi penyebab turunnya rasio ini.

Gambar 2. 99.
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



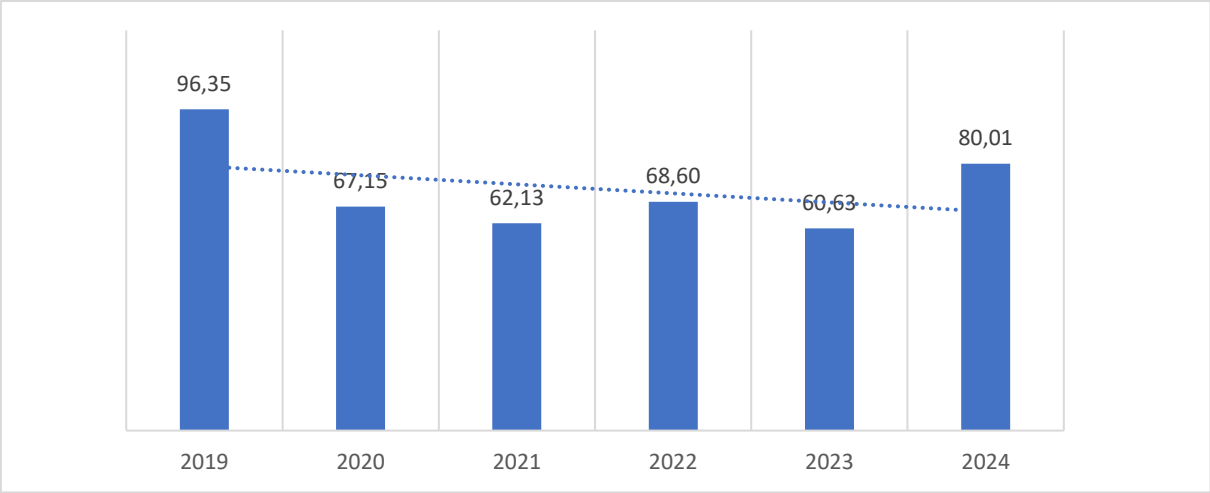

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**j. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan ibu serta bayi selama proses persalinan. Tenaga bidan atau dokter yang terlatih memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memantau perkembangan persalinan, mendeteksi dini komplikasi seperti perdarahan, preeklamsia, atau gawat janin, serta mengambil tindakan tepat waktu untuk mencegah risiko kematian atau cedera. Mereka juga memastikan prosedur persalinan dilakukan secara steril, mengurangi infeksi, dan memberikan pertolongan darurat seperti resusitasi neonatus jika diperlukan. Selain itu, pendampingan oleh tenaga kompeten memberikan edukasi tentang perawatan pascapersalinan dan pemantauan kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, keberadaan tenaga bidan profesional tidak hanya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan.

Dalam enam tahun terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pasangkayu cenderung turun. Angka tertinggi yang pernah dicapai adalah 96,35 persen tahun 2019, setelah itu turun, bahwa tak pernah mencapai angka 70 persen hingga tahun 2023. Tahun 2024, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan bertambah sehingga angka cakupannya naik ke 80,01 persen. Meski naik, angka tersebut belum mampu melampaui capaian tahun 2019. Sekaligus menunjukkan bahwa masih ada 19,99 persen dari seluruh sasaran ibu bersalin di Kabupaten Pasangkayu yang bersalin belum ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Gambar 2. 100
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Berbagai faktor menjadi penyebab masih adanya daerah di mana ibu bersalin tidak ditangani oleh tenaga kesehatan kompeten. Keterbatasan akses geografis, seperti lokasi terpencil, infrastruktur jalan buruk, atau jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, sering menghambat masyarakat menjangkau layanan kebidanan. Kendala ekonomi, termasuk biaya persalinan di fasilitas kesehatan atau ketiadaan jaminan kesehatan, juga membuat keluarga memilih pertolongan tradisional oleh dukun atau keluarga. Faktor budaya dan kepercayaan lokal turut berpengaruh, seperti keyakinan bahwa persalinan harus dilakukan di rumah dengan ritual tertentu atau kepercayaan berlebihan pada praktik turun-temurun. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko persalinan tanpa tenaga terlatih, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, memperparah situasi. Di sisi lain, distribusi tenaga bidan yang tidak merata—terkonsentrasi di perkotaan—menyebabkan kekurangan SDM kompeten di daerah pedesaan atau tertinggal. Kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam memperkuat sistem kesehatan dasar atau program pelatihan bagi tenaga lokal juga berkontribusi pada masalah ini. Kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan struktural ini memerlukan pendekatan holistik untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persalinan aman.

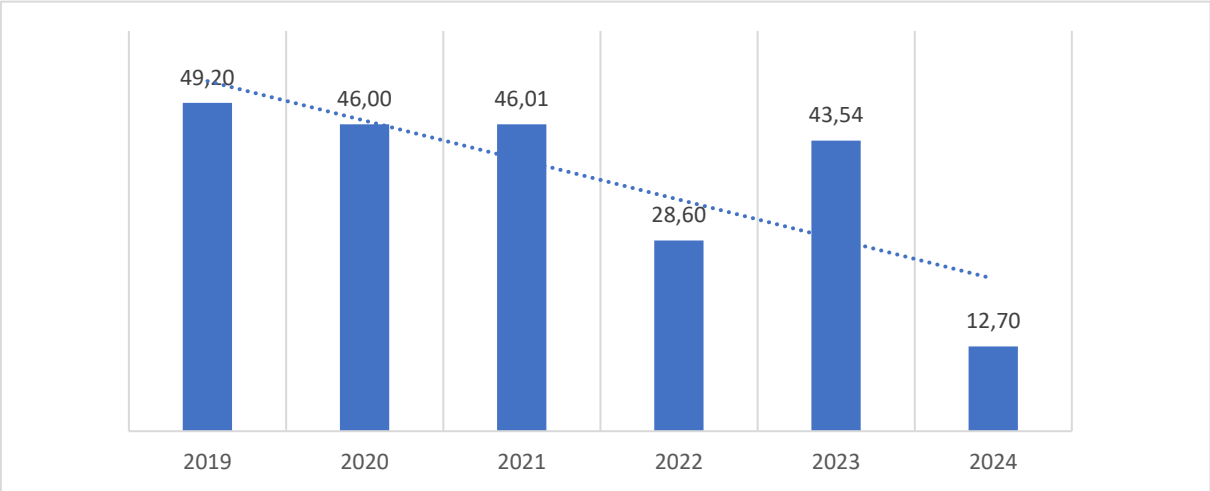
**k. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Universal Child Immunization adalah upaya global untuk memastikan setiap anak di seluruh dunia mendapatkan akses terhadap vaksinasi lengkap sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Program ini bertujuan melindungi anak-anak dari penyakit menular yang dapat dicegah melalui vaksin, seperti campak, polio, difteri, pertusis, dan hepatitis B. Inisiatif ini didorong oleh kolaborasi pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat untuk mencapai cakupan vaksinasi minimal 90 persen di semua wilayah, terutama di daerah terpencil atau rentan. Universal Child Immunization tidak hanya fokus pada penyediaan vaksin, tetapi juga

mengatasi hambatan seperti ketidaktahuan, ketidakpercayaan terhadap vaksin, atau keterbatasan infrastruktur kesehatan. Dengan demikian, program ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesetaraan layanan kesehatan bagi semua anak, tanpa memandang status sosial, geografi, atau ekonomi.

Pentingnya Universal Child Immunization terletak pada kemampuannya menyelamatkan nyawa, mengurangi angka kematian anak, dan mencegah wabah penyakit yang berpotensi melumpuhkan sistem kesehatan. Vaksinasi terbukti efektif menekan transmisi penyakit menular, sehingga melindungi tidak hanya individu yang divaksin, tetapi juga komunitas melalui kekebalan kelompok (*herd immunity*). Anak yang tidak divaksinasi berisiko menjadi sumber penularan, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi belum divaksin atau orang dengan sistem imun lemah. Selain itu, imunisasi universal mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang dengan mengurangi biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas akibat penyakit. WHO memperkirakan vaksinasi menyelamatkan 2-3 juta nyawa per tahun, menjadikannya salah satu investasi kesehatan paling efektif. Tanpa upaya kolektif ini, ketimpangan akses vaksin dapat memperlebar jurang ketidakadilan dan menghambat kemajuan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Gambar 2. 101
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Selama periode enam tahun terakhir, cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) di Kabupaten Pasangkayu terus menurun. Tahun 2019, Pasangkayu pernah mencapai cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 49,20 persen, menunjukkan bahwa dari 100 desa/keluarahan di Pasangkayu, ada 49 desa/keluaran yang sudah UCI. Alih-alih naik, angkanya turun di tahun 2020 menjadi 46 persen dan di tahun 2021 hanya 46,01 persen. Tahun 2022, cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Pasangkayu anjlok ke 28,60 persen. Angkanya sempat naik menjadi 43,54 persen tahun 2023, tapi turun lagi ke level paling rendah yaitu 12,70 persen.

Angka tersebut menunjukkan, hanya 12,70 persen dari total desa/kelurahan di Pasangkayu yang UCI.

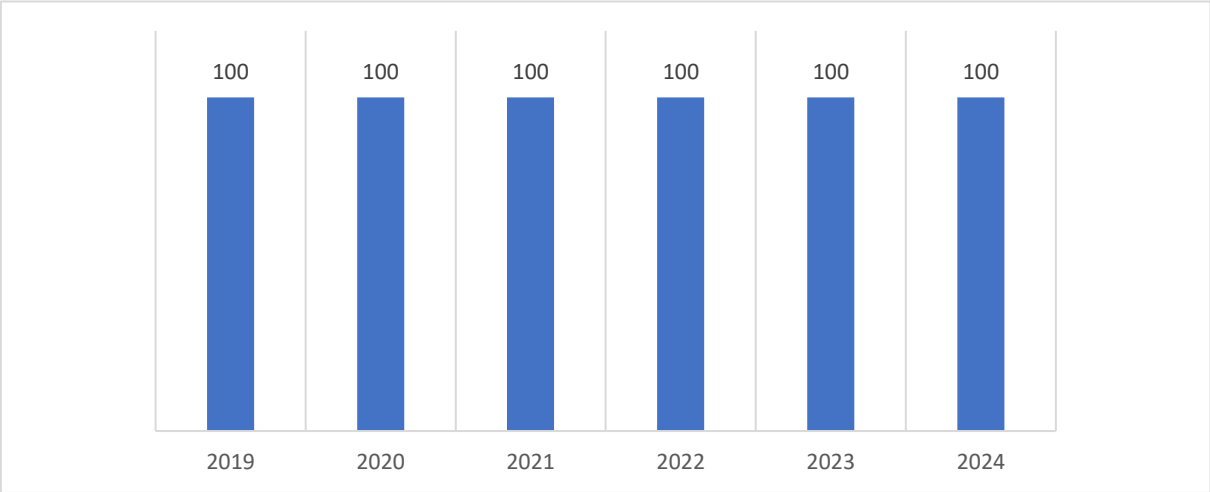
Beberapa daerah sulit mencapai Universal Child Immunization karena menghadapi kompleksitas hambatan multidimensi. Faktor geografis, seperti lokasi terpencil atau medan yang sulit, menyulitkan distribusi vaksin dan akses keluarga ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau kepulauan. Keterbatasan infrastruktur, termasuk kurangnya tenaga kesehatan terlatih, sistem rantai dingin (cold chain) yang tidak memadai, atau fasilitas kesehatan yang jauh, memperparah ketimpangan layanan. Faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, atau kepercayaan masyarakat pada mitos dan informasi salah tentang vaksin, menimbulkan keraguan atau penolakan imunisasi. Selain itu, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, atau bencana alam di wilayah tertentu mengganggu program vaksinasi dan mengalihkan prioritas sumber daya. Tanpa penanganan terintegrasi yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan anggaran kesehatan, dan inovasi teknologi untuk menjangkau daerah tertinggal, target imunisasi universal akan tetap menjadi tantangan yang belum terpecahkan.

**L. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Menangani baliga gizi buruk merupakan langkah kritis yang tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga memastikan masa depan generasi yang sehat dan produktif. Gizi buruk pada usia dini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan otak yang terhambat, serta sistem imun yang lemah, sehingga meningkatkan risiko penyakit infeksi, kecacatan, bahkan kematian. Dampak jangka panjangnya meliputi penurunan kemampuan kognitif, performa pendidikan yang buruk, dan produktivitas ekonomi yang rendah di masa dewasa, yang pada skala luas dapat memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Intervensi tepat waktu melalui pemberian asupan nutrisi esensial, edukasi pola makan kepada orang tua, serta akses layanan kesehatan terjangkau dapat memutus siklus gizi buruk, mengurangi beban ekonomi pada sistem kesehatan, dan menciptakan fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan kasus gizi buruk pada balita bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga investasi kolektif untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Balita gizi buruk sudah menjadi salah satu prioritas nasional dalam hal penanganan prevalensi stunting. Hal itu yang membuat pemerintah Kabupaten Pasangkayu menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Keseriusan pemerintah daerah terlihat dari angka cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Capaian 100 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merawat semua Balita yang menderita gizi buruk di sarana pelayanan kesehatan.

Gambar 2. 102
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

**m. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak**

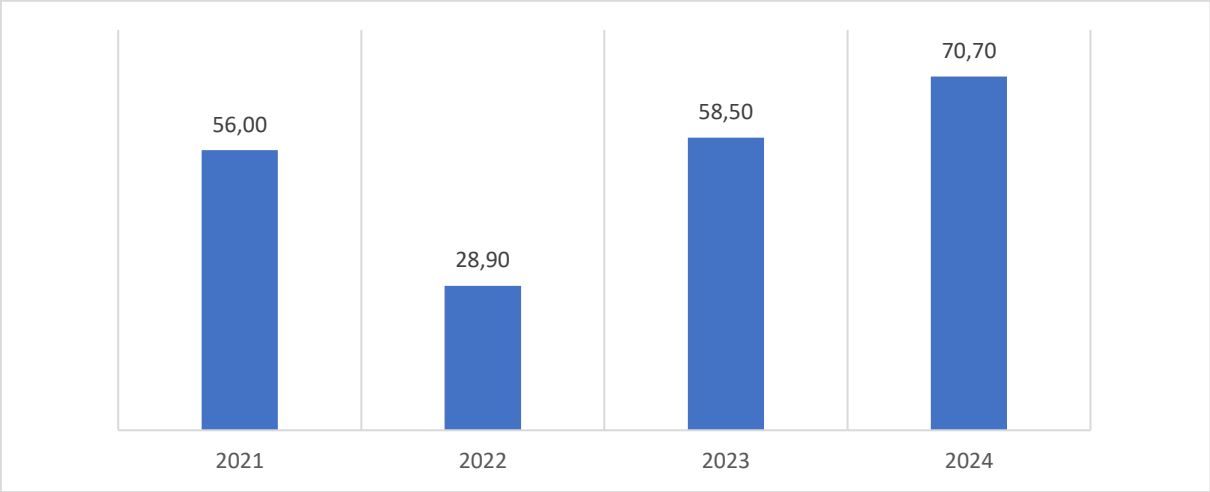
Campak merupakan salah satu penyakit menular yang terjadi akibat infeksi *Morbillivirus*. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus campak di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 32 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu minimnya kesadaran akan pentingnya imunisasi campak bagi anak-anak dan dewasa. Menyadari pentingnya pemberian imunisasi campak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluaran Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Salah satu ketentuan Permenkes tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program imunisasi, termasuk imunisasi campak.

Dalam empat tahun terakhir, angka persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan. Sempat turun di tahun 2022 dari 56 persen ke 28,90 persen, angkanya kemudian naik di tahun 2023 sebesar 58,50 persen. Kenaikan berlanjut di tahun 2024 menjadi 70,70 persen. Meski naik, angka tersebut menunjukkan belum semua anak usia 1 tahun di Pasangkayu mendapatkan imunisasi campak.

Penyebab masih adanya anak yang belum mendapat imunisasi campak sangat beragam. Anak yang belum mendapat imunisasi campak umumnya bisa disebabkan oleh faktor aksesibilitas terbatas ke layanan kesehatan (terutama di daerah terpencil), misinformasi atau ketakutan akan efek samping vaksin, ketidaktahuan orang tua tentang pentingnya imunisasi, serta kendala ekonomi seperti biaya transportasi atau prioritas kebutuhan lain. Dampak jangka panjangnya meliputi peningkatan risiko wabah campak yang dapat mengancam jiwa, komplikasi serius seperti pneumonia, ensefalitis, atau kematian pada anak. Selain itu, rendahnya cakupan imunisasi memperlambat upaya eradikasi penyakit, meningkatkan beban sistem kesehatan, dan memicu immune amnesia (melemahnya sistem imun jangka panjang) pada anak yang terinfeksi, membuat

mereka rentan terhadap penyakit lain. Hal ini juga mengancam kekebalan kelompok (herd immunity), terutama bagi bayi dan anak dengan kondisi medis yang tidak memungkinkan vaksinasi.

Gambar 2. 103
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024

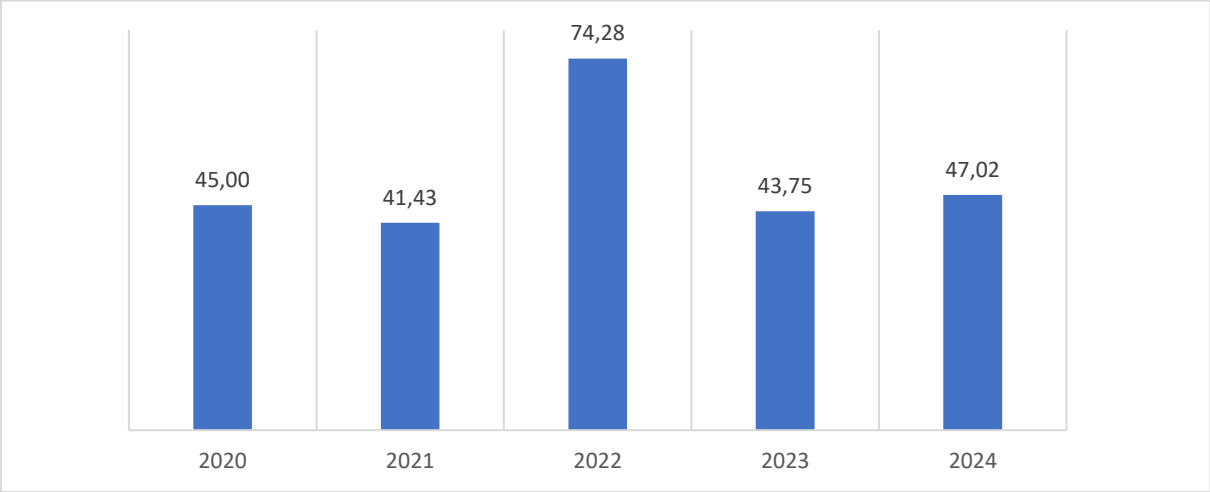



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

**n. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

Tuberkulosis paru adalah penyakit yang menular akut maupun kronis yang terutama menyerang paru, yang disebabakan oleh bakteri tahan asam (BTA) berbentuk batang yang bersifat Gram Positif (mycobacterium tuberculosis). Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BCA menunjukkan perbandingan antara jumlah penderita baru TBA BTA (+) yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.

Gambar 2. 104
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024



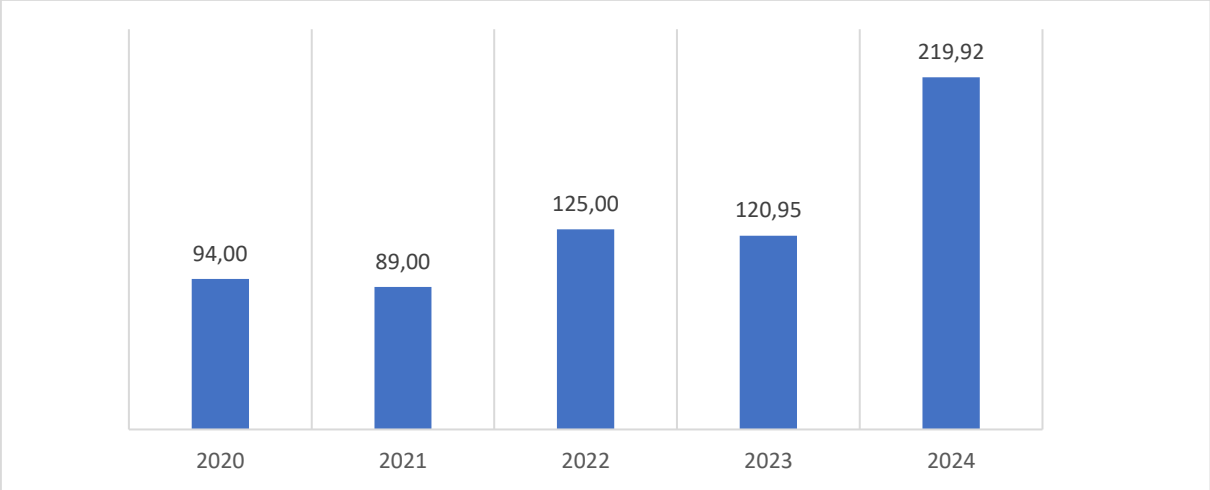

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Selama tahun 2020 hingga 2024, cakupan penderita penyakit TBC BTA yang memperoleh penanganan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan penderita penyakit TBC BTA yang memperoleh penanganan mencapai 45 persen, kemudian turun ke 41,43 persen tahun 2021. Tahun 2022, terjadi lonjakan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu menjadi 74,28 persen, namun kenaikan tersebut tak bisa dipertahankan. Tahun 2023, angkanya anjok lagi ke 43,75 persen, dan naik sedikit setahun kemudian jadi 47,02 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Pasangkayu tumbuh lebih tinggi dibandingkan penderita yang diobati.

**o. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)**

Tuberkulosis dapat disembuhkan dan dapat dicegah. TB menyebar dari orang ke orang melalui udara. Saat orang dengan TBC paru batuk, bersin, atau meludah, mereka mendorong kuman-kuman TBC ke udara. Hanya dengan menghirup sejumlah kecil kuman-kuman ini, seseorang dapat terinfeksi. Sekitar seperempat populasi dunia mengalami infeksi TBC. Ini berarti orang-orang pernah terinfeksi bakteri TBC tetapi tidak (belum) menjadi sakit akibat penyakit ini dan tidak dapat menularkannya. Orang yang terinfeksi bakteri TB berisiko 5–10 persen mengalami penyakit TBC sepanjang masa hidupnya. Orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan, seperti orang dengan HIV, malnutrisi, atau diabetes atau pengguna tembakau, lebih berisiko menderita penyakit.

Gambar 2. 105
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Sekitar 89 kasus TBC baru ditemukan pada 2021, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 94. Angkanya meningkat menjadi 125 kasus pada 2022, kemudian turun ke 120,95. Kenaikan singifikan terjadi di tahun 2024, dengan angka 219,92. Angka tersebut menunjukkan dari 100.000 penduduk, ada 219 orang yang menderita TBC . Risiko Menurut WHO,

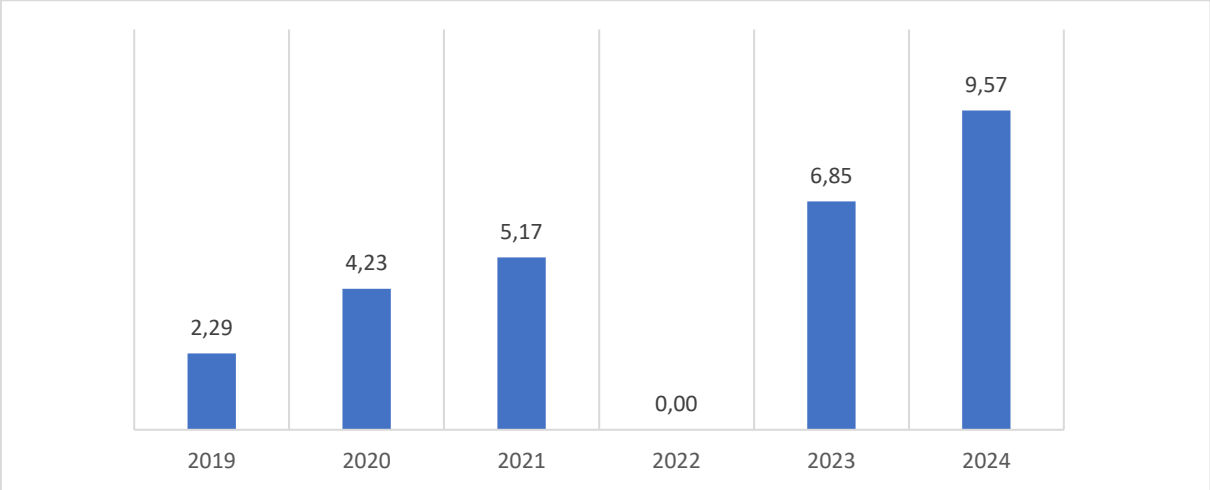
TBC aktif juga lebih tinggi pada orang-orang yang menderita kondisi-kondisi lain yang mengganggu sistem kekebalan. Selain itu, kekurangan gizi, gangguan penggunaan alkohol serta merokok dapat meningkatkan risiko lebih tinggi terkena TBC.

**p. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tingkat kematian akibat tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global yang serius, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2022, tuberkulosis menyebabkan sekitar 1,3 juta kematian di antara orang yang tidak terinfeksi HIV dan 187.000 kematian pada penderita HIV-positif, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular. Meskipun angka kematian global telah menurun sekitar 47% sejak tahun 1990, disparitas masih terjadi karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan, diagnosis yang terlambat, pengobatan yang tidak tuntas, serta faktor risiko seperti malnutrisi, kepadatan penduduk, dan resistensi obat (TB-MDR). Upaya pengendalian TB melalui program skrining, vaksinasi BCG, dan terapi antibiotik yang tepat telah membantu mengurangi mortalitas, tetapi tantangan seperti pendanaan, stigma sosial, dan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu layanan kesehatan masih menghambat kemajuan signifikan.

Kenaikan tingkat kematian Tuberkulosis dialami oleh Kabupaten Pasangkayu dalam enam tahun terakhir. Tahun 2019, sebanyak 2 orang penderita TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Angka tersebut naik menjadi 4,23 dan 5,17 msaing-masing ditahun 2020 dan 2021. Tahun 202 tercatat tak ada kematian karena TB, dan muncul kembali dengan angka yang lebih tinggi yaitu 6,85 di tahun 2023. Setahun kemudian, ada 9-10 orang penderita TB meninggal dari 100.000 penduduk.

Gambar 2. 106.
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



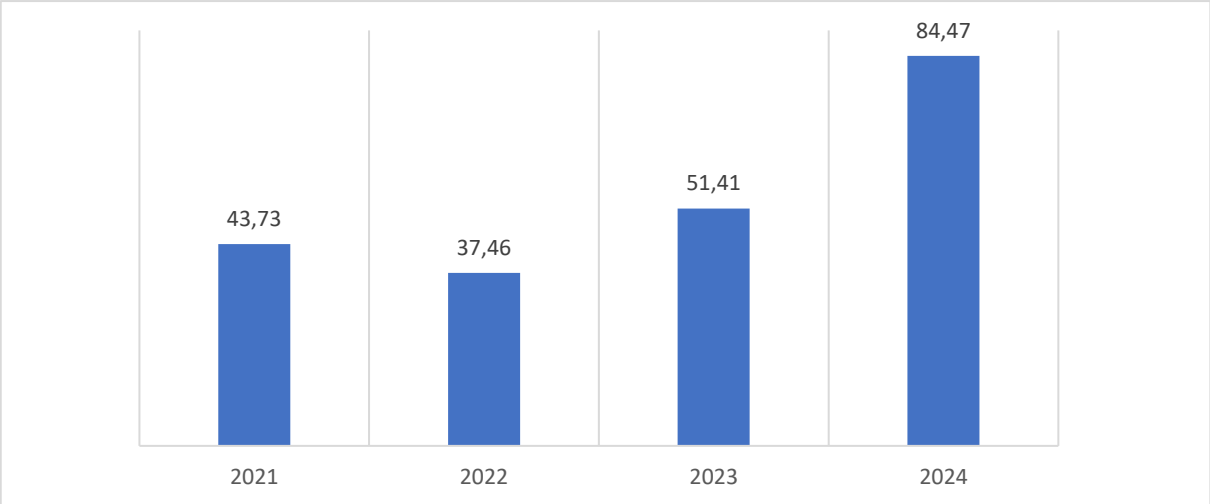

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Penderita tuberkulosis (TB) dapat meninggal dunia akibat beberapa faktor umum, seperti keterlambatan diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat waktu, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan jangka panjang (minimal 6 bulan) juga memicu resistensi bakteri Mycobacterium tuberculosis terhadap obat, sehingga TB berkembang menjadi bentuk yang lebih parah dan sulit diobati (seperti TB-MDR atau TB-XDR). Komplikasi seperti kerusakan paru-paru berat, gagal napas, atau penyebaran infeksi ke organ vital (misalnya otak atau ginjal) turut meningkatkan risiko kematian. Faktor lain meliputi komorbiditas seperti HIV/AIDS, diabetes, atau malnutrisi yang melemahkan sistem imun, serta kondisi sosial-ekonomi rendah yang menghambat akses ke nutrisi, sanitasi, dan perawatan kesehatan yang memadai. Kombinasi faktor medis dan non-medis ini sering memperburuk prognosis dan berujung pada kematian.

**q. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS**

Pemerintah mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly Observed Treatment Short-course, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap sejak tahun 1995. Program ini merupakan prioritas nasional untuk pengendalian TBC. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskemas yang integrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. Pada tahun 2019, proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi mencapai 43,73 persen, meningkat menjadi 51,41 persen pada tahun 2023. Kenaikan singifikan terjadi di tahun 2024 yaitu 84,47 persen. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pasangkayu dalam mengatasi TBC dibuktikan dengan memperbaiki sistem deteksi dan pelaporan.

Gambar 2. 107
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

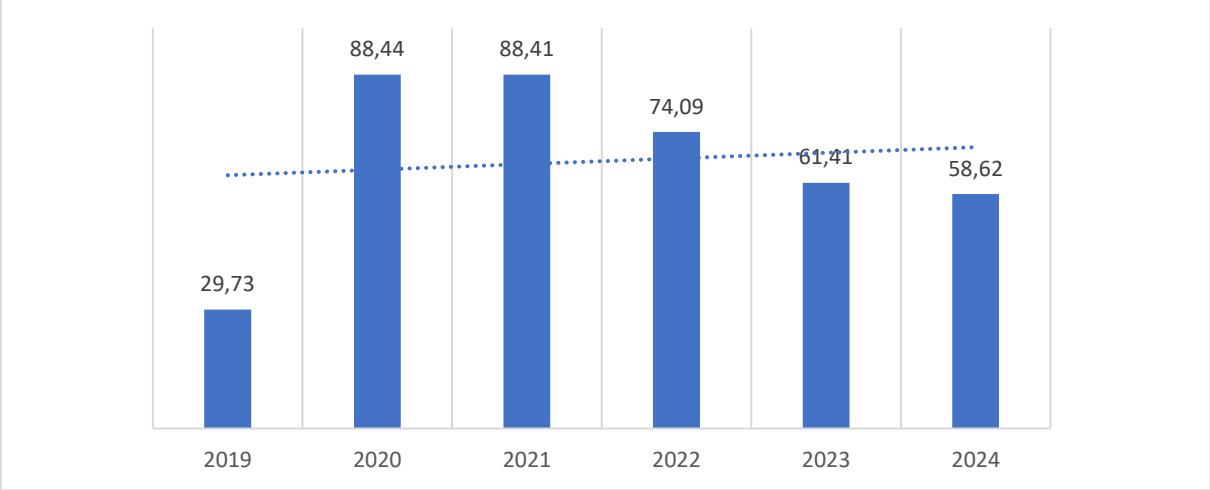
Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas, seperti meningkatkan kapasitas puskesmas dan posyandu melalui

pelatihan tenaga medis dalam diagnosis dini TBC menggunakan alat deteksi modern (misalnya, tes molekuler cepat seperti GeneXpert). Selain itu, penting menggalakkan kampanye edukasi masif tentang gejala TBC dan pentingnya skrining, terutama di daerah dengan angka penularan tinggi, melalui kolaborasi dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan layanan pemeriksaan gratis atau terjangkau, termasuk pemeriksaan dahak dan radiologi, serta memperluas program active case finding (penjaringan aktif) dengan mendatangi kelompok rentan, seperti penghuni padat permukiman kumuh, penderita HIV, atau lansia. Integrasi data kasus TBC dengan sistem informasi kesehatan terpadu dan pemberian insentif bagi fasilitas kesehatan yang berhasil meningkatkan deteksi kasus dapat menjadi pendorong efektif. Terakhir, penanganan faktor sosial seperti stigma dan hambatan ekonomi melalui bantuan transportasi atau nutrisi bagi pasien akan mendorong partisipasi masyarakat dalam skrining, sehingga deteksi dini dan penanganan tepat waktu dapat tercapai.

**r. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS**

Program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) adalah strategi penanggulangan TB yang menekankan pengawasan langsung pengobatan jangka pendek, memastikan pasien meminum obat secara teratur hingga sembuh, dan fokus pada penemuan dan penyembuhan pasien TB, terutama yang menular. Di Program ini, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami kecenderungan naik dalam enam tahun terakhir. Capaian tertinggi ada di tahun 2020 dan 2021 yaitu 88,44 persen dan 88,41 persen. Tahun 2022 hingga 2024, angka proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Pasangkayu turun dari 74,09 persen ke 61,41 persen, dan kemudian 58,62 persen. Penurunan tersebut mengidikasikan bahwa ada cukup banyak penderita TBC yang diobati, tapi tidak sembuh.

Gambar 2. 108
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



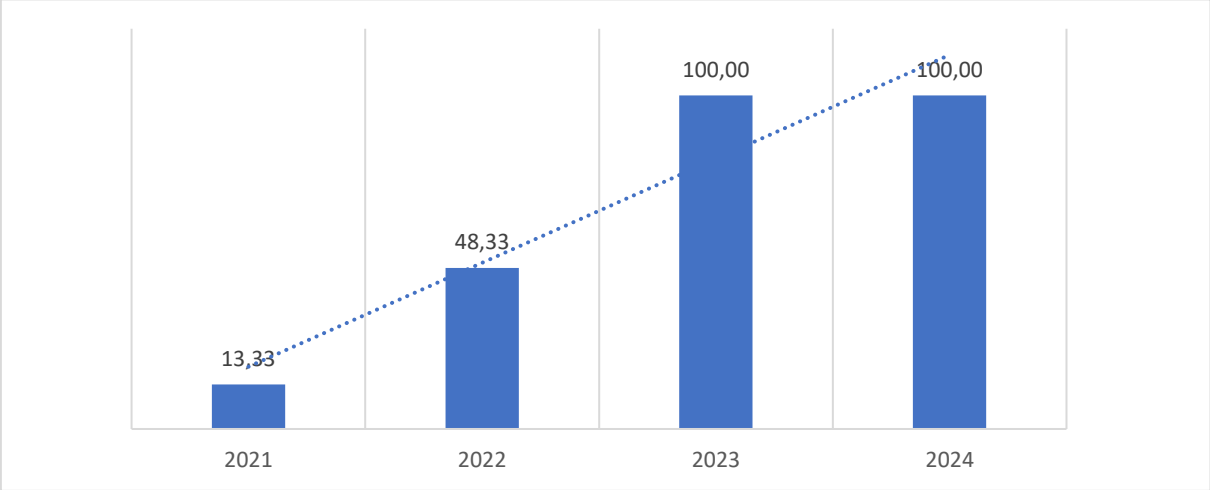

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Pengobatan tuberkulosis (TBC) dapat gagal akibat beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, ketidakpatuhan pasien dalam menjalani regimen pengobatan jangka panjang, sering kali karena putus obat setelah gejala membaik atau efek samping yang tidak tertahankan, memicu resistensi bakteri. Kedua, munculnya strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap obat, seperti TBC-MDR (multidrug-resistant) atau TBC-XDR (extensively drug-resistant), menyulitkan terapi karena keterbatasan efektivitas obat lini kedua. Ketiga, diagnosis yang terlambat atau tidak akurat menyebabkan penanganan tidak tepat sasaran. Faktor komorbid seperti HIV/AIDS atau malnutrisi juga melemahkan sistem imun, mengurangi respons tubuh terhadap pengobatan. Selain itu, keterbatasan akses layanan kesehatan, stok obat yang tidak konsisten, serta penggunaan obat substandar atau palsu turut berkontribusi pada kegagalan terapi. Tanpa dukungan sistemik, edukasi pasien, dan pemantauan ketat (seperti terapi pengawasan langsung/DOTS), risiko kekambuhan dan resistensi semakin meningkat.

**s. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah bentuk demam berdarah (DB) yang dapat mengancam jiwa. DBD adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Negara beriklim tropis dan subtropis beresiko tinggi terhadap penularan virus tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kenaikan temperatur yang tinggi dan perubahan musim hujan dan kemarau disinyalir menjadi faktor resiko penularan *virus dengue*. Penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan perbaikan berarti. Cakupan penemuan dan penangan penderita DBD meningkat dari 13,33 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2023 dan bertahan di tahun 2024.

Gambar 2. 109
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

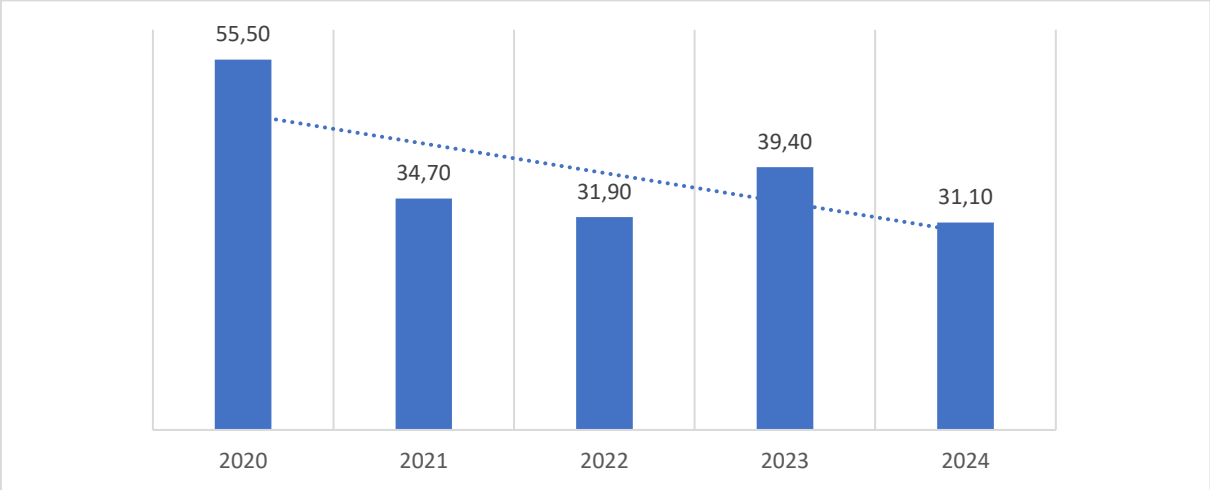
**t. Penderita Diare yang Ditangani**

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 milyar kasus diare dan 1,9 juta anak balita meninggal karena diare di seluruh dunia setiap tahun.

Dari semua kematian tersebut, 78 persen terjadi di negara berkembang, terutama di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan prevalensi diare untuk semua kelompok umur sebesar 8 persen dan angka prevalensi untuk balita sebesar 12,3 persen, sementara pada bayi, prevalensi diare sebesar 10,6 persen.

Di Kabupaten Pasangkayu, penanganan diare menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Penderita yang ditangani pada tahun 2019 mencapai 55,50 persen, kemudian turun menjadi 34,70 persen pada tahun 2020. Penurunan berlanjut di tahun 2022 sebesar 31,90 persen, sebelum naik di tahun 2023 menjadi 39,40 persen. Kenaikan tersebut tak bisa bertahan lama, karena tahun 2024 penderita diare yang ditangani di Kabupaten Pasangkayu kembali turun menjadi 31,10 persen, paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2. 110
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

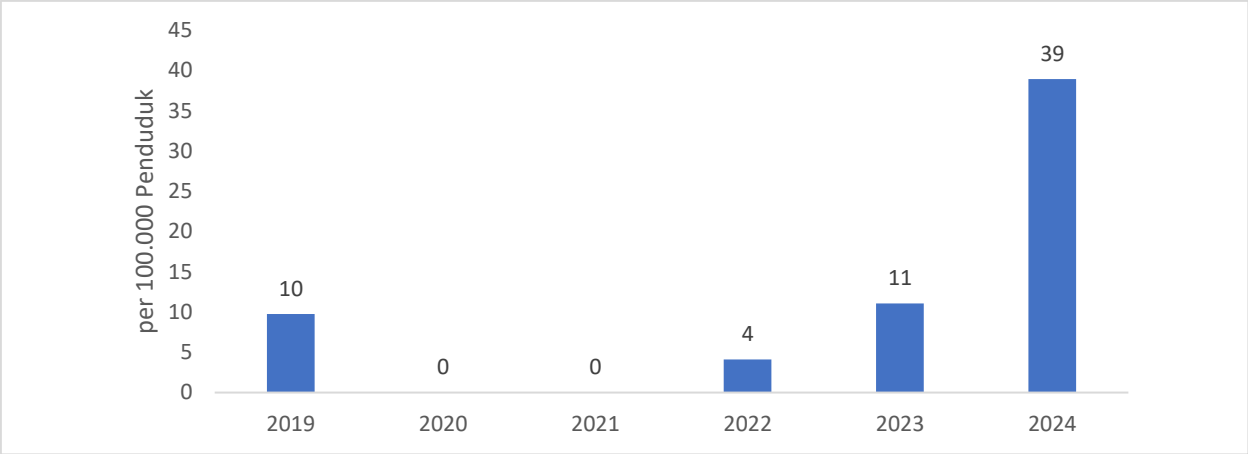
Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam menangani kasus diare, terutama terkait dengan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Salah satu masalah utama adalah akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, di mana banyak wilayah, khususnya di pedesaan atau daerah terpencil, masih bergantung pada sumber air terkontaminasi atau sistem pembuangan limbah yang buruk. Selain itu, upaya pencegahan melalui edukasi tentang kebersihan personal, seperti cuci tangan pakai sabun, sering terkendala oleh rendahnya literasi kesehatan dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Di sisi lain, kapasitas layanan kesehatan yang terbatas—mulai dari kurangnya tenaga medis, fasilitas memadai, hingga distribusi logistik seperti oralit dan obat-obatan—menyulitkan penanganan cepat, terutama saat terjadi wabah. Keterbatasan anggaran daerah juga memaksa pemerintah harus memprioritaskan program lain, sementara koordinasi antarinstansi terkait, seperti dinas kesehatan, lingkungan, dan PUPR, seringkali belum optimal. Tantangan tambahan muncul dari faktor lingkungan, seperti banjir atau musim hujan yang memperburuk penyebaran bakteri, serta

kurangnya data akurat untuk memetakan risiko dan mengevaluasi intervensi. Kombinasi faktor-faktor ini membuat penanganan diare memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan.

**u. Angka Kejadian Malaria**

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat, terutama di daerah tropis. Angka kejadian malaria per 100.000 penduduk menjadi indikator penting dalam menilai tingkat penyebaran penyakit ini serta efektivitas upaya pengendalian yang telah dilakukan. Angka kejadian malaria di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi yang signifikan dalam enam tahun terakhir.

Gambar 2. 111.
Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

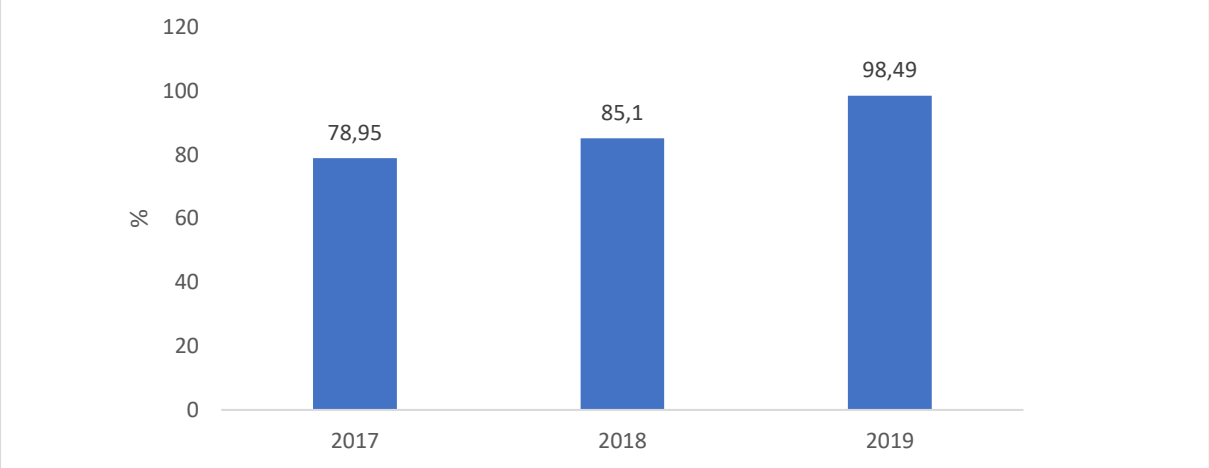
Pada tahun 2019, angka kejadian malaria tercatat sebesar 10 kasus per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada kasus yang dilaporkan (0 kasus), yang dapat mengindikasikan keberhasilan program pengendalian malaria atau keterbatasan dalam deteksi dan pelaporan kasus. Pada tahun 2022, kasus malaria mulai muncul kembali dengan angka 4 per 100.000 penduduk, yang kemudian meningkat menjadi 11 kasus pada 2023. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana angka kejadian malaria meningkat drastis menjadi 39 kasus per 100.000 penduduk. Peningkatan tajam ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan lingkungan, peningkatan populasi nyamuk vektor akibat perubahan iklim, atau penurunan efektivitas program pencegahan dan pengobatan malaria di Kabupaten Pasangkayu.

**p. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat**

Berhasilnya tujuan eliminasi malaria di Kabupaten Pasangkayu, terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat dan bebas dari malaria dapat terwujud dengan memberikan perhatian serius pada anak balita. Pada tahun 2019, proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat hampir mencapai 100 persen. Terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 78,95 persen. Dengan bebasnya Kabupaten Pasangkayu dari malaria,

akan memberikan dampak yang baik, seperti meningkatnya kepercayaan pengunjung terhadap Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 112
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

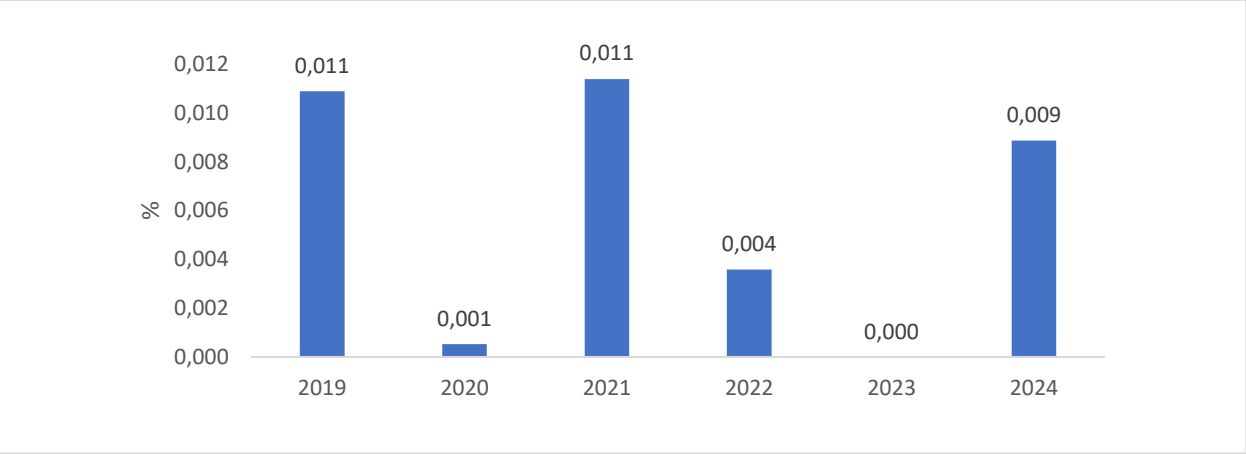
**w. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi**

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sementara, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Di Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2024. Pada tahun 2019, prevalensi HIV/AIDS tercatat sebesar 0,011 persen dari total populasi, yang menunjukkan adanya kasus yang teridentifikasi dalam jumlah 19 kasus. Tahun berikutnya, prevalensi turun signifikan menjadi 0,001 (1 kasus) pada 2020, yang dapat disebabkan oleh peningkatan program pencegahan atau keterbatasan dalam deteksi dan pelaporan kasus. Namun, pada tahun 2021, angka ini kembali meningkat ke 0,011 persen (22 kasus), yang bisa mengindikasikan adanya lonjakan kasus baru atau peningkatan kapasitas deteksi melalui skrining yang lebih luas.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali menjadi 0,004 persen (7 kasus), dan pada 2023, tidak ada kasus yang dilaporkan (0,000%), yang mungkin merupakan hasil dari intervensi kesehatan masyarakat yang lebih efektif atau keterbatasan dalam pelaporan kasus. Namun, pada tahun 2024, prevalensi kembali naik menjadi 0,009 persen (18 kasus), yang menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan kasus baru atau penguatan sistem pelaporan dan deteksi kasus. Tren ini menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dalam pencegahan dan pengendalian

HIV/AIDS di Kabupaten Pasangkayu. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV, program edukasi masyarakat, penguatan distribusi obat antiretroviral (ARV), serta pengurangan stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).

Gambar 2. 113
Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

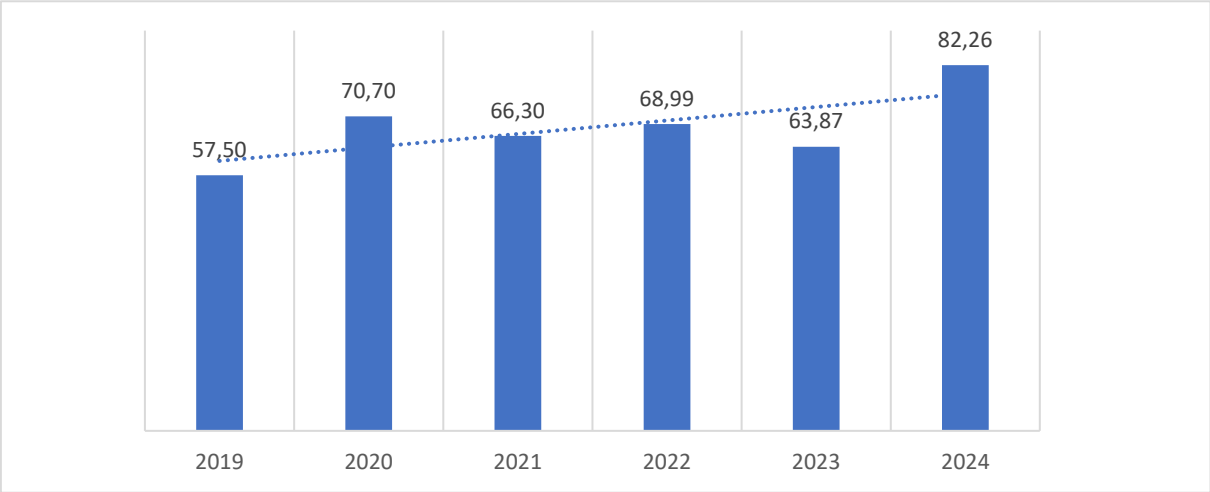
**x. Cakupan Kunjungan Bayi**

Bayi membutuhkan pelayanan kesehatan standar di fasilitas kesehatan untuk memastikan tumbuh kembang optimal dan deteksi dini masalah kesehatan. Pelayanan seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, pemantauan berat badan dan tinggi badan, serta skrining kondisi medis (seperti kuning atau gangguan metabolisme) dapat mencegah komplikasi serius. Tenaga kesehatan terlatih juga mampu memberikan edukasi kepada orang tua tentang perawatan bayi, pemberian ASI, dan nutrisi yang tepat. Akses ke layanan ini menekan risiko kematian bayi, meningkatkan kualitas hidup jangka panjang, dan membentuk fondasi kesehatan yang kuat sejak dini. Tanpa intervensi profesional, masalah kesehatan yang tidak terdeteksi berpotensi mengancam nyawa atau menyebabkan disabilitas permanen.

Upaya pemberian layanan kesehatan untuk bayi dapat diukur dari indikator cakupan kunjungan bayi. Indikator ini mengukur seberapa banyak bayi yang berkunjung ke fasilitas kesehatan relatif terhadap total bayi. Dalam enam tahun terakhir, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren naik. Tahun 2019, dari 100 orang bayi lahir hidup di Pasangkayu, hanya 57-48 bayi yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Setahun kemudian, angkanya naik cukup tinggi menjadi 70,70 persen, namun turun lagi di tahun 2021 jadi 66,30 persen. Angka tersebut sempat mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 sebesar 68,99 persen, dan kemudian turun di level paling rendah dalam enam tahun terakhir sebesar 63,67 persen, Tahun 2024, menjadi pencapain tertinggi yaitu 82,16 persen. Walaupun ada kecedenrungan naik, tapi

masih ada 17,74 persen bayi lahir hidup di Kabupaten Pasangkayu yang belum berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan standar.

Gambar 2. 114
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

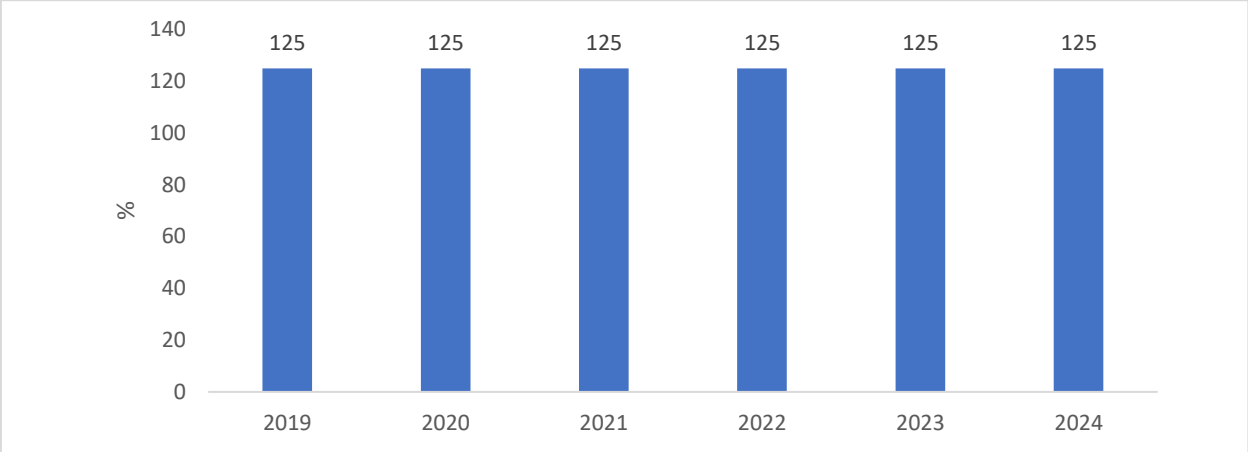



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

**y. Cakupan Puskesmas**

Cakupan puskesmas merupakan indikator penting dalam menilai distribusi fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Cakupan ini dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kecamatan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Cakupan puskesmas di Kabupaten Pasangkayu selama periode 2019-2024 berada pada angka 125 persen secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa jumlah puskesmas di wilayah ini melebihi jumlah kecamatan yang ada. Dengan kata lain, terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas, yang bisa mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Kecamatan tersebut antara lain, Sarudu (2 puskesmas), Baras (2 puskesmas) dan Pasangkayu (2 puskesmas). Meskipun cakupan yang stabil di angka 125 persen merupakan indikator yang baik dalam penyediaan fasilitas kesehatan, namun tetap mesti diperhatikan cakupan puskesmas dalam konteks distribusi dan kapasitas layanan. Misalnya, meskipun jumlah puskesmas cukup, faktor seperti jarak geografis, tenaga medis, serta kualitas layanan juga menjadi aspek penting dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan efektif bagi Masyarakat.

Gambar 2. 115.
Cakupan Puskesmas Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



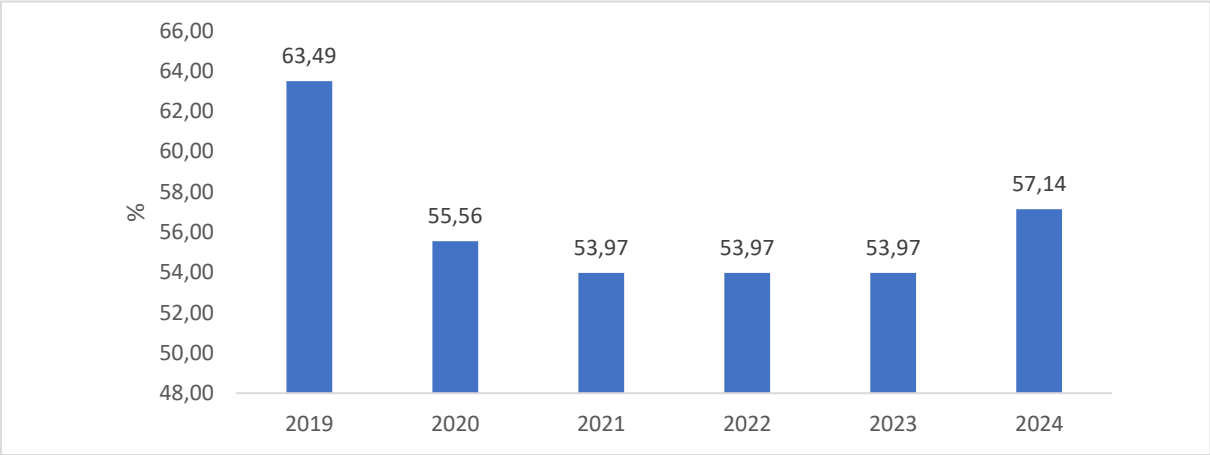

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**z. Cakupan Pembantu Puskesmas**

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa luas distribusi layanan kesehatan dasar hingga tingkat desa. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pustu yang tersedia dengan jumlah desa dalam suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi cakupan pustu, semakin baik akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa, terutama di daerah terpencil. Cakupan pustu di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2023, sebelum mengalami peningkatan kembali pada 2024. Pada tahun 2019, cakupan pustu mencapai 63,49 persen, menunjukkan bahwa lebih dari setengah desa memiliki pustu. Namun, angka ini menurun tajam menjadi 55,56 persen pada tahun 2020 dan terus turun menjadi 53,97 persen pada 2021, 2022, dan 2023, yang menunjukkan stagnasi dalam distribusi layanan pustu di tingkat desa.

Pada tahun 2024, cakupan pustu mengalami sedikit pemulihan menjadi 57,14 persen, yang dapat mengindikasikan adanya pembangunan atau reaktivasi fasilitas pustu yang sebelumnya tidak aktif. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan 2019, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan di tingkat desa masih belum sepenuhnya teratasi.

Gambar 2. 116
Cakupan Pembantu Puskesmas Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



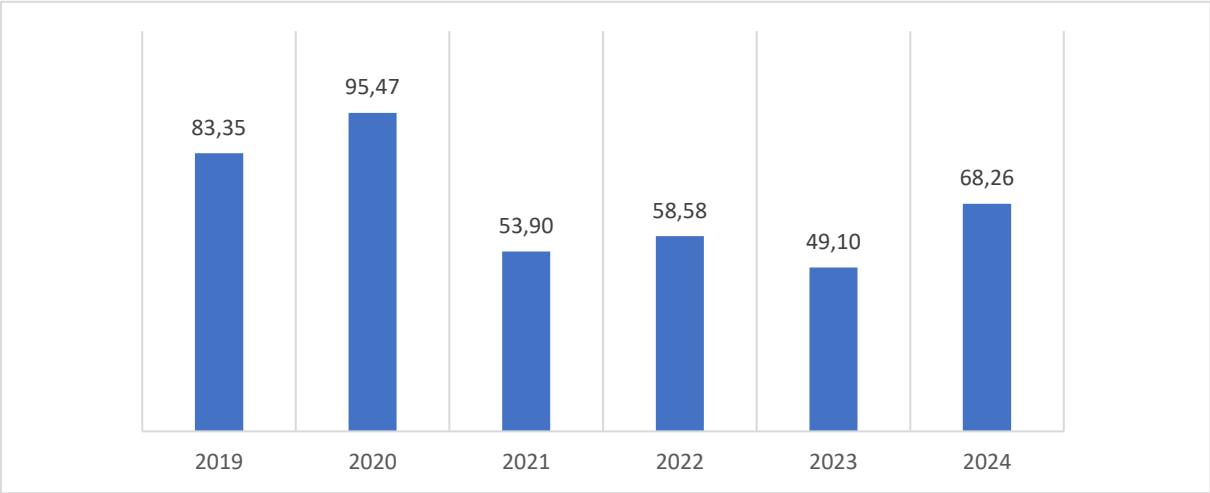

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**aa. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Pelayanan antenatal K4 adalah pelayanan kesehatan antenatal (ANC) yang harus diterima ibu hamil minimal empat kali selama kehamilan, dengan distribusi waktu yang dianjurkan: sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua, dan dua kali di trimester ketiga. Pelayanan antenatal K4 (Kunjungan Keempat) merupakan komponen krusial dalam pemantauan kesehatan ibu hamil yang melibatkan empat kali kunjungan pemeriksaan selama kehamilan. K4 penting karena memastikan deteksi dini komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, anemia, atau gangguan pertumbuhan janin melalui pemeriksaan berkala seperti pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi fundus uteri, serta tes laboratorium. Kunjungan ini juga menjadi sarana pemberian suplemen esensial (seperti zat besi dan asam folat), imunisasi TT (Tetanus Toxoid), serta edukasi tentang persiapan persalinan, nutrisi seimbang, dan tanda bahaya kehamilan. Dengan memenuhi K4, risiko kematian maternal dan neonatal dapat diminimalkan karena intervensi tepat waktu, pemantauan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran ibu dalam merawat diri dan janin. Pada akhirnya, K4 tidak hanya mendukung kehamilan sehat tetapi juga menjadi fondasi bagi persalinan aman dan kualitas hidup optimal bagi ibu dan bayi.

Pemerintah daerah seharusnya terus mendorong cakupan kunjungan ibu hamil K4, tapi dalam enam tahun terakhir Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan. Tahun 2020, Kabupaten Pasangkayu pernah mencapai angka tertinggi cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 95,47 persen, naik dari 83,35 persen. Setelah itu, angkanya anjlok ke 53,90 persen tahun 2021, bahkan tahun 2023 hanya 49,10 persen. Meskipun di tahun 2024 angkanya naik ke 68,26 persen, tapi masih relatif rendah dibandingkan capaian tahun 2019 dan 2020.

Gambar 2. 117
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Ibu hamil tidak mendapatkan layanan antenatal K4 (minimal empat kunjungan pemeriksaan kehamilan) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan akibat jarak yang jauh, kurangnya transportasi, atau biaya yang tidak terjangkau. Faktor sosial-budaya seperti ketidaktahuan akan pentingnya antenatal care, kepercayaan tradisional yang mengandalkan praktik non-medis, atau hambatan komunikasi dengan tenaga kesehatan juga berperan. Selain itu, ketidakteraturan jadwal layanan, kurangnya kesadaran dari petugas kesehatan, serta rendahnya dukungan keluarga atau lingkungan sekitar turut memengaruhi partisipasi ibu dalam memenuhi standar K4. Masalah sistemik seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan infrastruktur terbatas di daerah pedesaan atau terpencil juga memperparah kondisi ini.

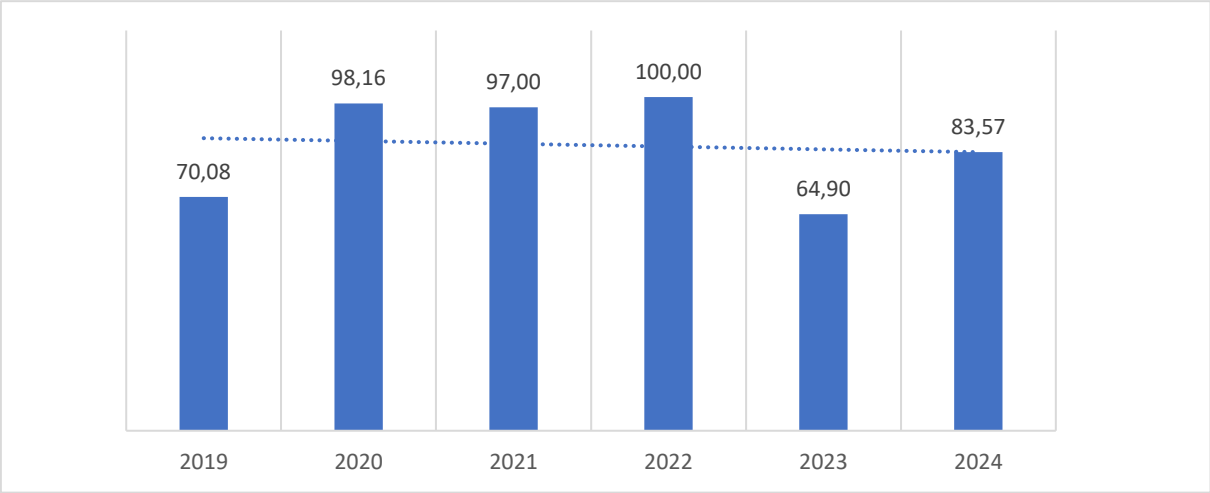
**ab. Cakupan Pelayanan Nifas**

Pelayanan nifas sesuai standar adalah perawatan komprehensif yang diberikan kepada ibu setelah melahirkan hingga 6 minggu pascapersalinan, bertujuan memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental, mendeteksi dini komplikasi, serta memberikan edukasi tentang perawatan diri dan bayi. Standar pelayanan ini mencakup pemantauan tanda vital, pengecekan kondisi rahim dan luka persalinan (baik perineum atau bekas operasi), penilaian perdarahan atau infeksi, dukungan menyusui, konseling nutrisi, serta skrining gangguan psikologis seperti baby blues atau depresi pascamelahirkan. Pelayanan nifas penting karena masa nifas merupakan periode kritis di mana risiko komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau preeklampsia masih tinggi. Dengan deteksi dan intervensi tepat, pelayanan ini dapat menurunkan angka kematian ibu, mempercepat pemulihan, serta memastikan ibu mampu merawat bayi secara optimal. Selain itu, edukasi yang diberikan membantu ibu menjalani transisi menjadi orang tua dengan lebih siap,

baik secara fisik maupun emosional, sehingga berdampak positif pada kesehatan jangka panjang ibu dan anak.

Sepanjang tahun 2019 hingga 2024, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Pasangkayu cenderung turun. Kinerja positif yang pernah dicapai berada di tahun 2020 hingga 2022 karena di tahun itu angka cakupan pelayanan nifas masing-masing mencapai 98,16 persen, 97 persen, dan 100 persen. Angka 100 persen menunjukkan bahwa di tahun 2022 semua ibu nifas di Kabupaten Pasangkayu telah memperoleh tiga kali pelayanan nifas sesuai standar. Namun, angka tersebut tak bisa dipertahankan, sebab tahun 2023 turun ke angka paling rendah yaitu 64,90 persen. Tahun 2024, terjadi kenaikan sampai 83,57 persen, tapi masih relatif rendah dibadingkan capaian tahun 2020 hingga 2022.

Gambar 2. 118.
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

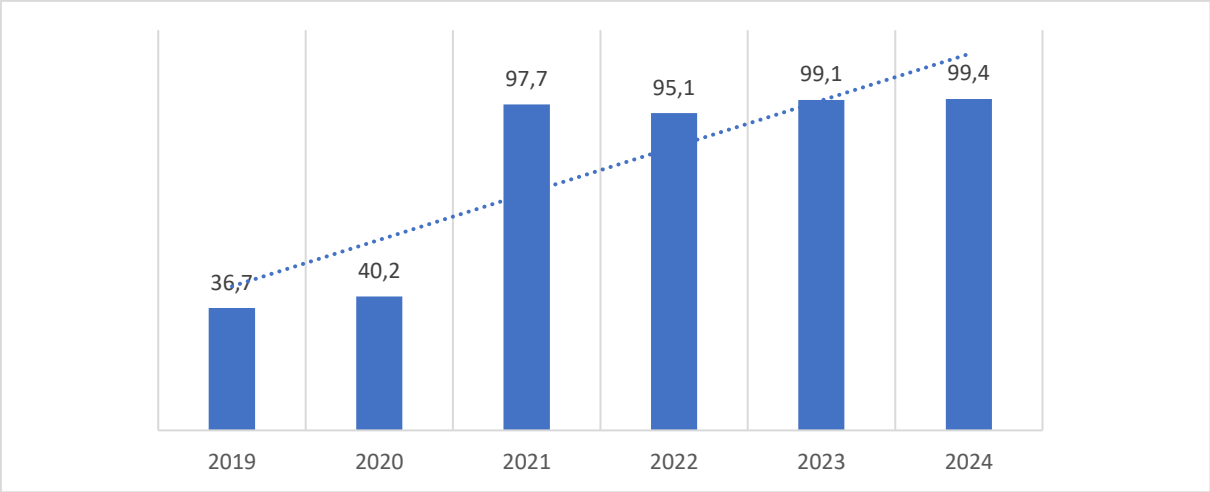
**ac. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani**

Neonatus dengan komplikasi memerlukan penanganan segera karena 28 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis adaptasi bayi dari lingkungan rahim ke dunia luar, di mana gangguan seperti kelahiran prematur (risiko gangguan pernapasan dan infeksi), asfiksia perinatal (kerusakan organ akibat kekurangan oksigen), infeksi berat (sepsis, meningitis), ikterus berbahaya (kernikterus), kelainan bawaan (cacat jantung, atresia usus), atau sindrom aspirasi mekonium dapat mengancam nyawa atau menyebabkan disabilitas permanen jika tidak ditangani cepat. Intervensi dini, seperti pemberian antibiotik, fototerapi, resusitasi, atau operasi darurat, tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga mencegah kerusakan otak, gangguan perkembangan, dan beban ekonomi jangka panjang akibat biaya perawatan disabilitas. Deteksi melalui skrining (APGAR, bilirubin) dan akses ke layanan neonatal intensif (NICU) menjadi kunci untuk memastikan organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru berkembang optimal, sekaligus memberikan dukungan psikologis bagi orang tua dalam menghadapi masa kritis ini.

Setiap keterlambatan penanganan berisiko mengurangi kualitas hidup anak dan meningkatkan mortalitas, sehingga kesigapan tim medis dan kesadaran keluarga menjadi penentu utama keselamatan neonatus.

Di Kabupaten Pasangkayu, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami kenaikan dalam enam tahun terakhir. Tahun 2019 dan 2020, hanya 36,7 persen dan 40,2 persen kejadian neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari total kejadian. Tahun 2021, angkanya naik signifikan sampai 97,7 persen. Tiga tahun selanjutnya, angka tersebut fluktuatif tapi tak singifikan, hingga akhirnya mencapai 99,4 persen tahun 2024.

Gambar 2. 119
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



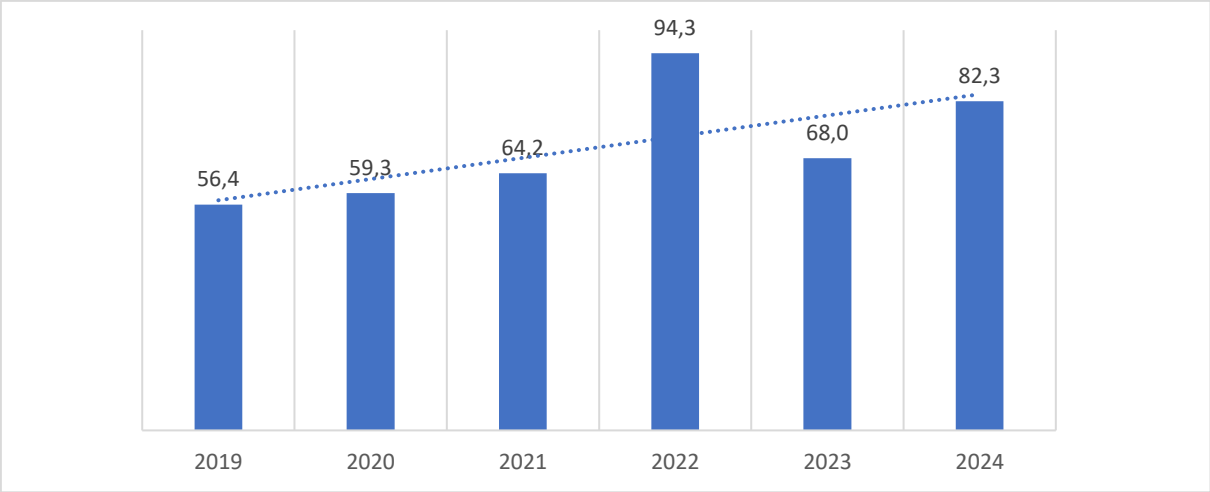

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

**ad. Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Pelayanan pemantauan minimal 8 kali untuk anak balita adalah rangkaian pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh tenaga medis atau kader kesehatan terhadap anak usia di bawah lima tahun, sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemeriksaan ini umumnya dilaksanakan pada periode tertentu, seperti saat bayi baru lahir, usia 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan dilanjutkan setiap 6 bulan hingga anak berusia 5 tahun. Dalam setiap sesi, petugas memantau pertumbuhan (melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala), perkembangan motorik dan kognitif, status imunisasi, serta mendeteksi dini risiko gangguan kesehatan seperti malnutrisi, stunting, atau penyakit infeksi. Pelayanan ini juga menjadi momen penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit. Pentingnya layanan ini terletak pada upaya pencegahan komplikasi kesehatan jangka panjang, memastikan anak tumbuh optimal sesuai potensi genetiknya, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian balita. Dengan deteksi dini, intervensi seperti suplementasi gizi, terapi stimulasi, atau vaksinasi dapat diberikan tepat waktu, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berdaya saing.

Kabupaten Pasangkayu mencatat kinerja positif dalam hal pelayanan pemantauan minimal 8 kali untuk anak Balita. Kinerja positif itu diukur dari tren kenaikan indikator cakupan pelayanan anak balita dalam enam tahun terakhir. Tahun 2019 hingga 2022, terjadi kenaikan persisten mulai dari 56,4 persen ke 59,3 persen, kemudian 64,2 persen, dan mencatat capaian tertinggi yaitu 94,3 persen. Tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup tajam di level 68 persen, sebelum kemudian naik lagi di tahun 2024 menjadi 82,3 persen. Kinerja positif ini harus dipertahankan dan terus melakukan perbaikan agar tahun selanjutnya anak Balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali bisa mencapai 100 persen.

Gambar 2. 120
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

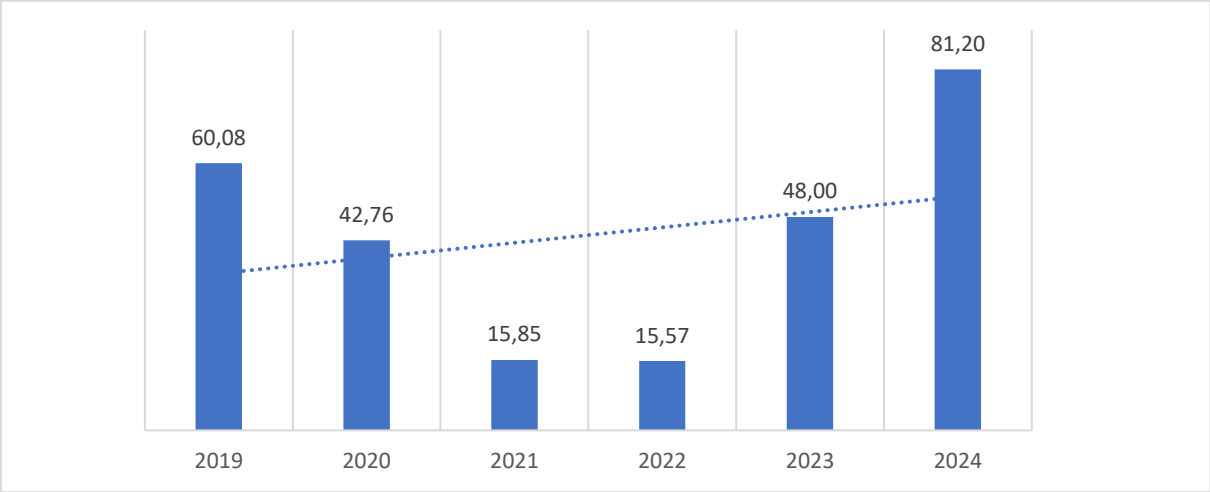
**ae. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**

Pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah dasar (SD) atau setingkat merupakan langkah krusial dalam memastikan tumbuh kembang optimal dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Pada masa ini, anak-anak rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kemampuan belajar, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, kekurangan gizi, atau infeksi menular. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin memungkinkan intervensi tepat waktu, mencegah kondisi tersebut berkembang menjadi lebih serius atau mengganggu prestasi akademik. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga membantu memantau status imunisasi, mengidentifikasi risiko penyakit kronis, serta mendeteksi tanda-tanda gangguan mental atau emosional seperti kecemasan dan kesulitan konsentrasi. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan produktif, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengupayan untuk meningkatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, terlihat dari tren enam tahun terakhir yang

mengalami kenaikan. Tahun 2019 hingga 2022, angka cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat terus turun, mulai dari 60,08 persen ke 42,76 persen, kemudian anjlok di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 15,85 persen dan 15,57 persen. Kenaikan baru terjadi di tahun 2023 sebesar 48 persen dan di tahun 2024 menjadi 81,20 persen. Angka 81,20 persen menunjukkan bahwa dari 100 orang siswa SD atau stingkat, 81 orang mendapatkan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih.

Gambar 2. 121
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

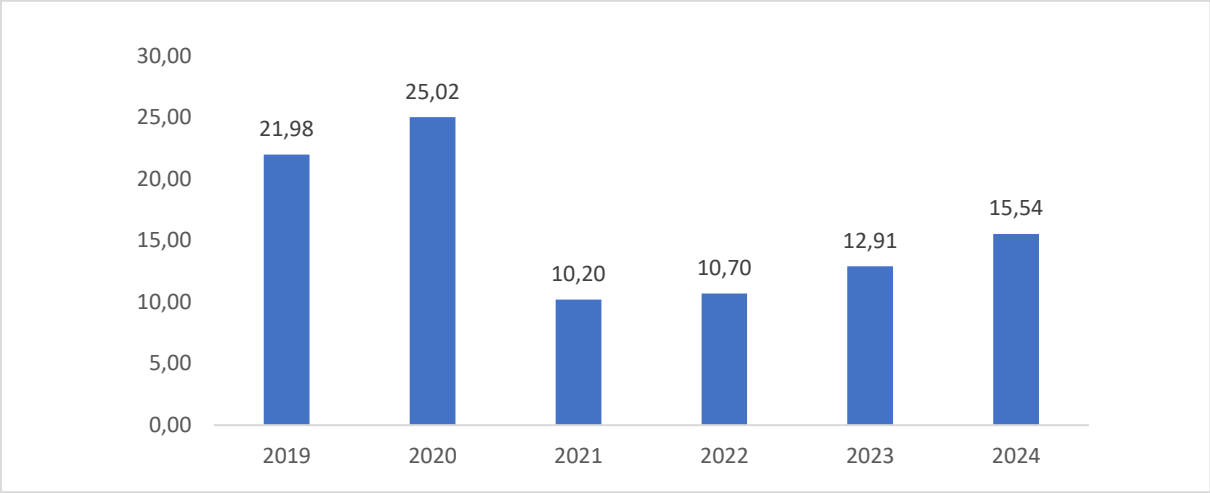
## C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### a. Rasio Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019, 21,98 persen dari total panjang jalan dilaporkan dalam kondisi baik, dan angka ini meningkat menjadi 25,02 persen pada tahun 2020, yang mencerminkan adanya perbaikan atau peningkatan kualitas jalan pada periode tersebut. Namun, setelah tahun 2020, terjadi penurunan drastis ke angka 10,20 persen pada tahun 2021 dan 10,70 persen pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jalan mengalami degradasi atau belum mendapatkan perawatan yang memadai. Penurunan tajam ini bisa disebabkan oleh faktor cuaca, peningkatan beban lalu lintas, dan utamanya keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan akibat refocusing.

Pada tahun 2023 dan 2024, kondisi jalan menunjukkan tren pemulihan, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 12,91 persen pada tahun 2023 dan 15,54 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan infrastruktur jalan yang mulai membuahkan hasil, meskipun masih belum mencapai tingkat yang sama dengan tahun 2019-2020.

Gambar 2. 122
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

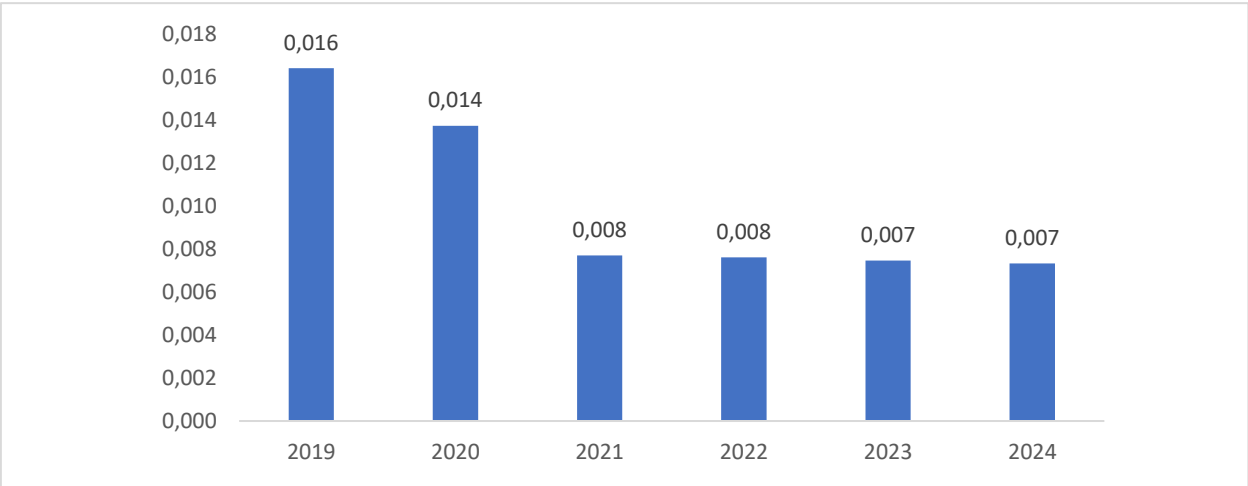



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, rasio ini tercatat sebesar 0,016, yang kemudian turun menjadi 0,014 pada 2020, dan mengalami penurunan lebih tajam ke 0,008 pada 2021. Setelah itu, rasio ini cenderung stagnan di angka 0,008 pada 2022, dan sedikit turun ke 0,007 pada 2023 dan 2024. Artinya bahwa setiap 1 orang penduduk di Kabupaten Pasangkayu memiliki akses terhadap rata-rata 0,007 kilometer (atau 7 meter) jalan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan jalan baru, sehingga rasio panjang jalan per kapita mengalami penurunan. Selain itu, kemungkinan adanya kerusakan atau pengurangan jalan yang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur baru dapat menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap tren ini.

Gambar 2. 123.
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

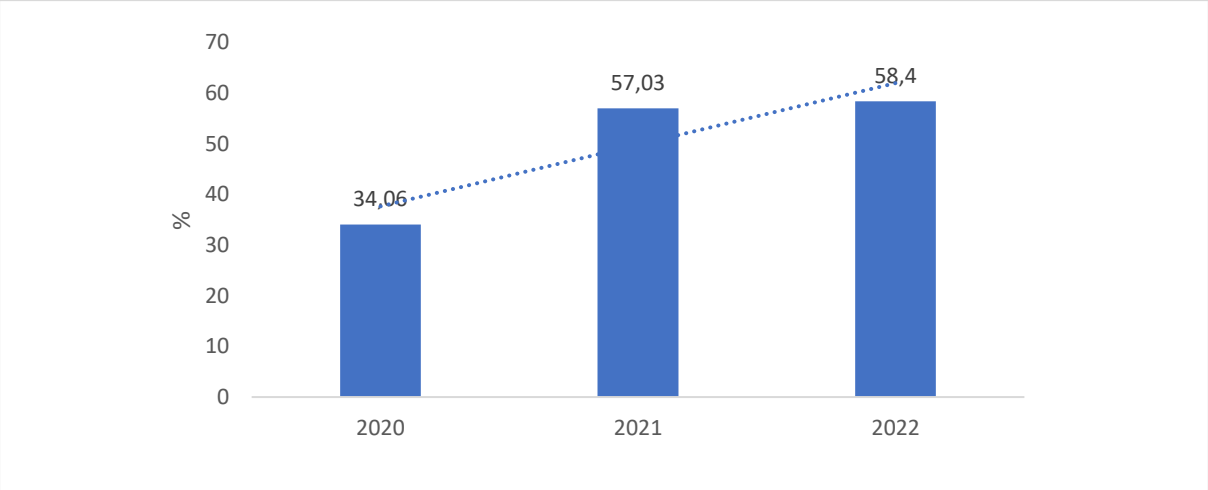



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**c. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)**

Kondisi jalan kabupaten yang baik menjadi indikator utama efisiensi ekonomi, karena kualitas jalan memengaruhi interaksi antar pusat kegiatan ekonomi. Persentase jalan kabupaten yang memungkinkan kecepatan lebih dari 40 km/jam mencerminkan panjang jalan kabupaten yang terpelihara dengan baik dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten di wilayah tersebut. Di Kabupaten Pasangkayu, persentase jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik (>40 km/jam) mengalami kenaikan meskipun relatif melambat pada periode 2021 hingga 2022. Persentase jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada tahun 2022 tercatat sebesar 58,4 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih ada 41,6 persen jalan kabupaten dalam kondisi belum baik.

Gambar 2. 124.
Presentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022

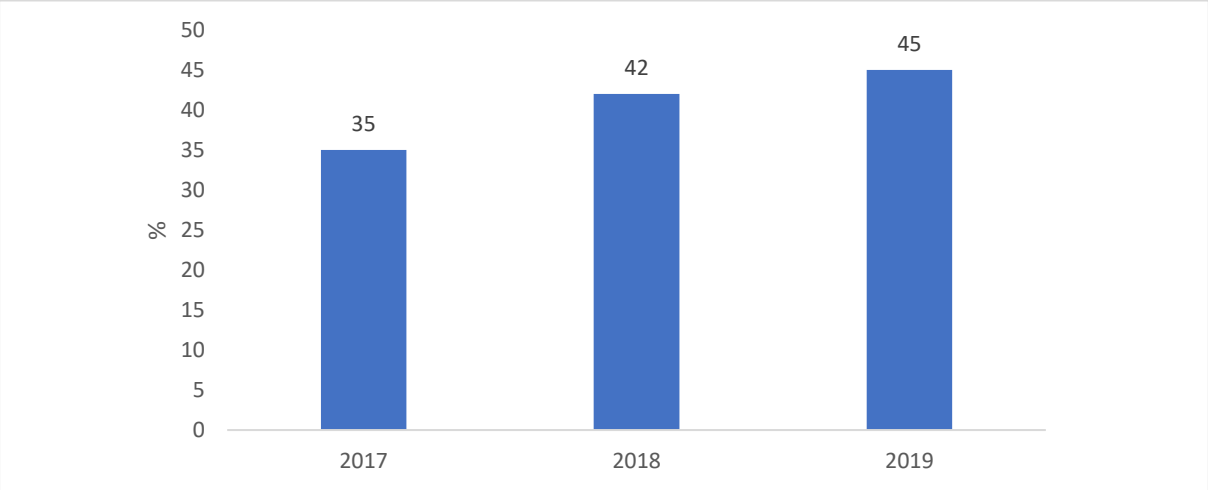



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu

**d. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di suatu kawasan. Pada tahun 2019, persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Pasangkayu mencapai 35 persen, meningkat 10 persen poin menjadi 45 persen pada tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan, namun masih ada 55 persen drainase dalam kondisi belum baik atau tersumbat. Kondisi ini bisa menimbulkan banjir hingga mengganggu kenyamanan dan kebersihan di kawasan Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 125.
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019

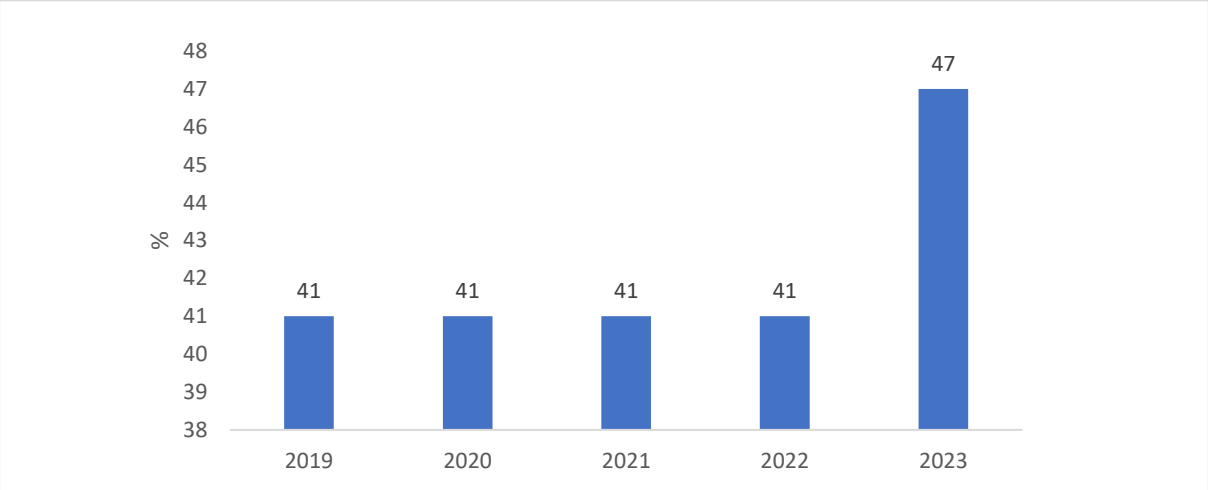



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu

**e. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Kualitas saluran irigasi sangat krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Di Kabupaten Pasangkayu, kondisi saluran irigasi yang baik berperan penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, sehingga persentase saluran irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik menjadi sebuah indikator yang vital. Persentase ini mencerminkan proporsi luas saluran irigasi yang terjaga dengan baik terhadap total luas saluran irigasi di kabupaten tersebut. Selama periode dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan dalam persentase saluran irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik, dari 41 persen pada tahun 2019 hingga 2022, meningkat menjadi 47 persen pada tahun 2023.

Gambar 2. 126.
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023



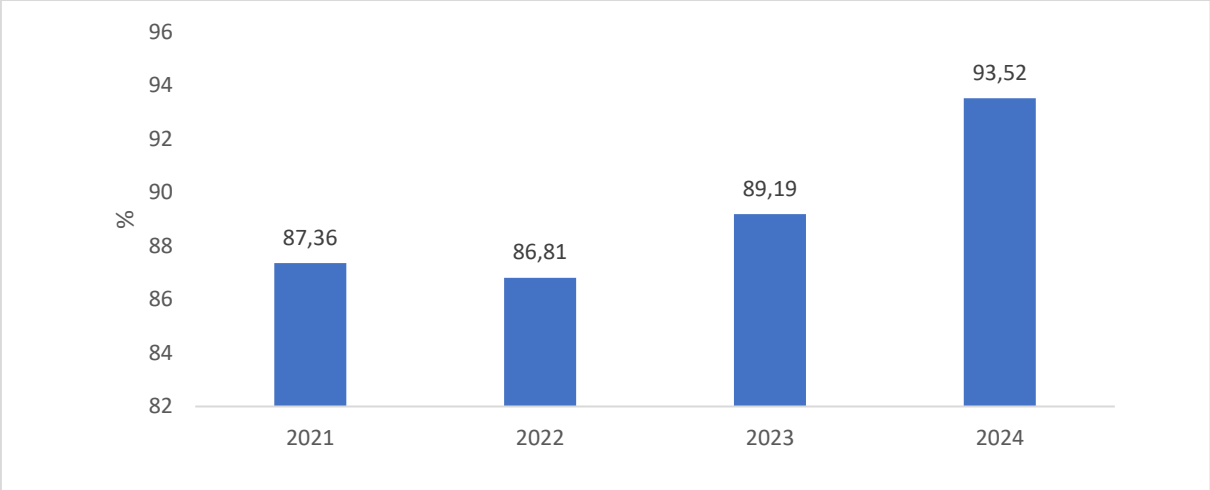

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu

**f. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak**

Air minum yang aman dan layak dikonsumsi berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, 87,36 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 86,81 persen pada 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kerusakan infrastruktur air bersih, keterbatasan sumber daya air, atau tantangan dalam distribusi layanan air ke wilayah tertentu.

Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali menjadi 89,19 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan air minum. Tren positif ini semakin menguat pada tahun 2024, dengan lonjakan signifikan menjadi 93,52 persen, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam periode ini. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pemerintah dalam memperluas akses air bersih, peningkatan kapasitas sistem distribusi, serta pembangunan infrastruktur air minum yang lebih baik di berbagai wilayah di Kabupaten Pasangkayu. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibanding Polewali Mandar yang mencatatkan angka 99,09 persen.

Gambar 2. 127
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

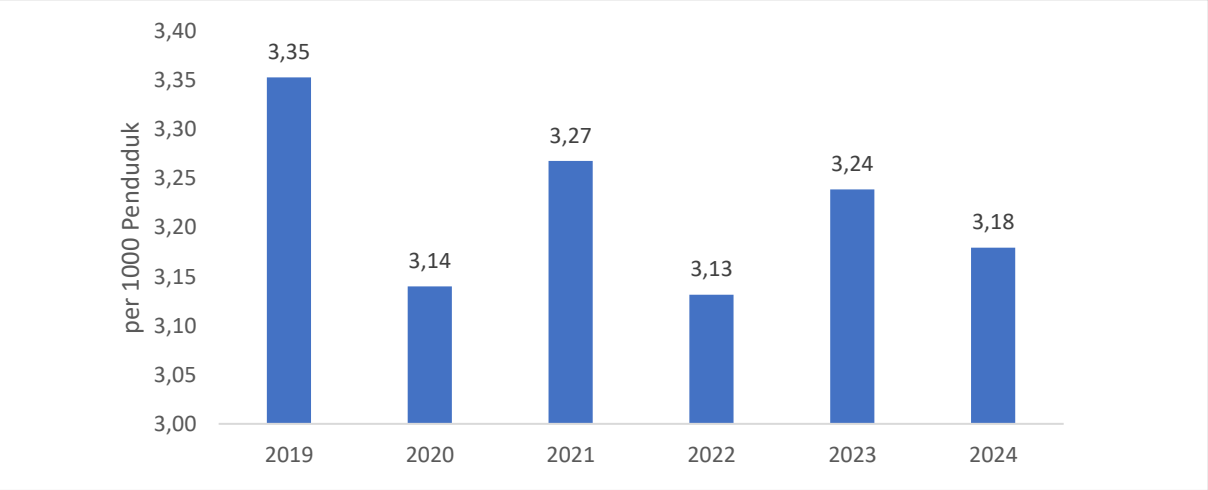
**g. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk merupakan indikator penting dalam menilai ketersediaan sarana peribadatan yang memadai bagi masyarakat. Ketersediaan tempat ibadah yang cukup dapat mendukung kebebasan beragama, kenyamanan dalam menjalankan ibadah, serta memperkuat kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Rasio tempat ibadah per

1.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 3,35 tempat ibadah per 1.000 penduduk, yang mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas keagamaan yang relatif baik. Namun, pada tahun 2020, rasio ini mengalami penurunan menjadi 3,14, yang mungkin disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pembangunan tempat ibadah baru.

Pada tahun 2021, rasio kembali meningkat menjadi 3,27, mengindikasikan adanya pembangunan atau penambahan tempat ibadah baru. Namun, pada tahun 2022, angka ini kembali menurun ke 3,13, yang menandakan bahwa pertumbuhan penduduk tetap lebih cepat dibandingkan dengan penambahan jumlah tempat ibadah. Pada tahun 2023, rasio meningkat kembali menjadi 3,24, sebelum sedikit menurun menjadi 3,18 pada 2024. Artinya bahwa setiap 1.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu memiliki akses terhadap rata-rata 3 tempat ibadah.

Gambar 2. 128.
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

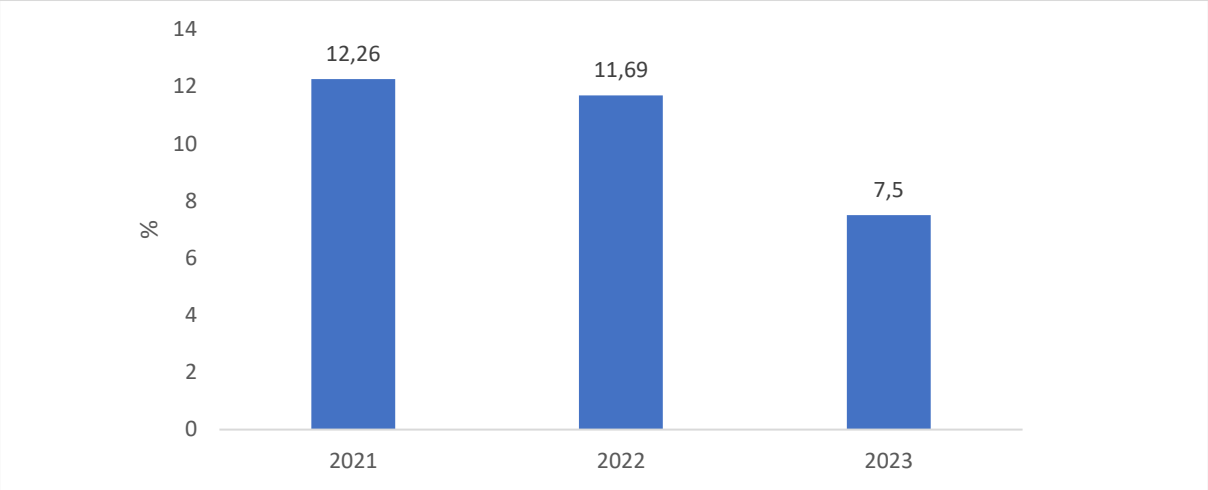



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**h. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Studi Baragona (2018) menyebutkan bahwa ada korelasi positif antara daerah yang hijau, jumlah taman, dengan tingkat kejahatan. Daerah yang hijau dengan banyak taman yang asri telah menurunkan tingkat kejahatan sebanyak 10 persen, menurunkan kekerasan dengan senjata api hingga 17 persen, dan sebanyak 75 persen masyarakatnya merasa aman bepergian ke luar rumah. Secara keseluruhan, proporsi ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dengan status HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, porsi ruang terbuka hijau mencapai 12,26 persen, turun berarti menjadi 7,5 persen pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh konversi lahan untuk kegiatan ekonomi.

Gambar 2. 129
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023

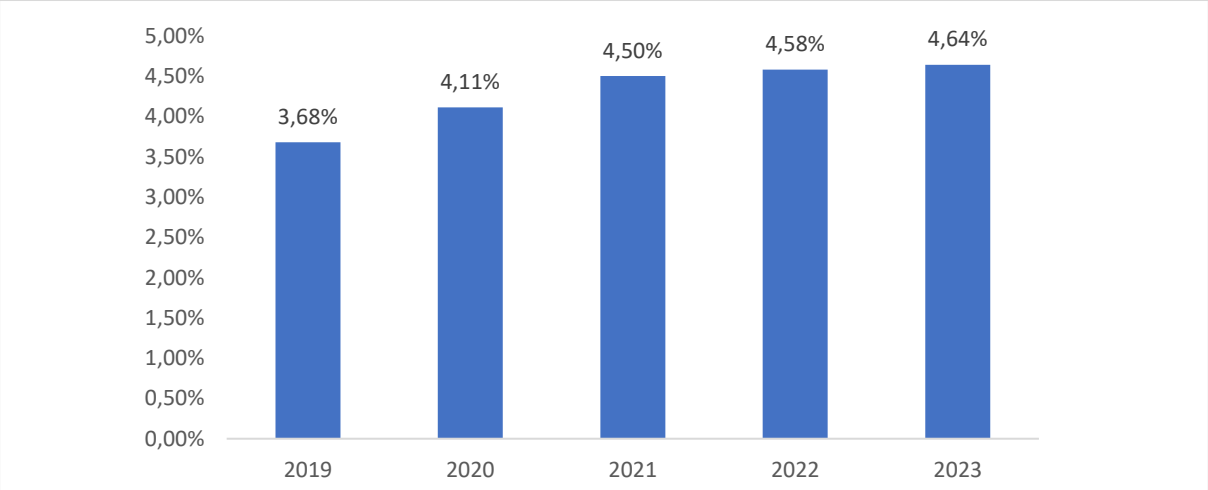



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu

**i. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan**

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk pemilik bangunan yang ingin membangun, menghancurkan, memperbesar, memperkecil, atau merenovasi bangunan. Tujuan IMB adalah untuk memastikan bangunan dibangun dengan aman dan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemilik bangunan yang memiliki IMB mendapatkan perlindungan hukum penuh, sehingga bangunan yang dibangun tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Gambar 2. 130
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu

Selama lima tahun terakhir, proporsi bangunan yang memiliki IMB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, proporsi ini mencapai 3,68 persen hingga 4,11 persen, lalu terus meningkat menjadi 4,64 persen di tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan jumlah bangunan yang mengikuti prosedur perizinan, mencerminkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen perizinan yang sah untuk pembangunan. Kesadaran ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga memastikan keamanan dan legalitas bangunan, serta mendukung tata ruang kota yang lebih teratur dan terencana dengan baik.

**j. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Layak**

Pada tahun 2024, sebanyak 68,25 persen rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meski angka ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk telah menikmati layanan air bersih yang layak, namun masih terdapat sekitar sepertiga rumah tangga yang belum terlayani dengan optimal. Kondisi ini menandakan perlunya upaya lanjutan dalam memperluas jaringan infrastruktur air bersih, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, guna memastikan pemerataan akses dan mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

**k. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (*safely managed*) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya ART sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Tingkat akses rumah tangga terhadap sanitasi aman di Kabupaten Pasangkayu masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 15,4 persen pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, seperti toilet dengan sistem pembuangan tertutup dan pengolahan limbah yang layak. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan terpadu dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

**l. Ketataan terhadap RTRW**

Tingkat ketataan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di suatu daerah mencerminkan seberapa besar pembangunan yang dilakukan telah mengikuti arahan perencanaan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Pasangkayu, tingkat ketataan terhadap RTRW mencapai 78 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah sejalan dengan rencana tata ruang. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna

memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan di masa mendatang.

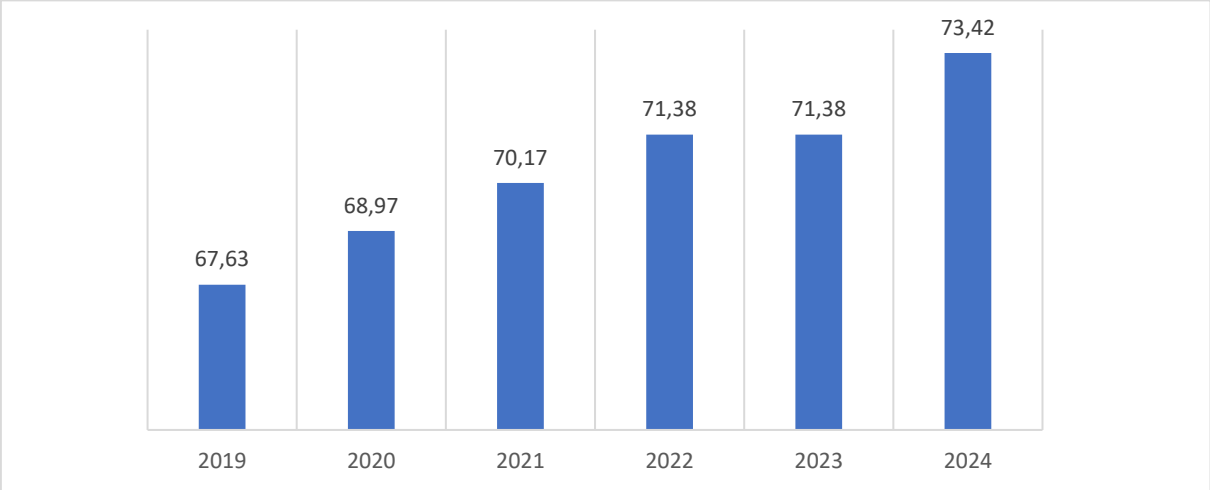
## D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

### a. Rasio Rumah Layak Huni

Pembangunan infrastruktur permukiman bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus didukung oleh strategi yang solid, berdasarkan data dan regulasi yang dapat mengantisipasi tantangan masa depan. Infrastruktur permukiman, seperti penataan lingkungan, penerangan jalan, drainase, jalan lingkungan, air minum, dan manajemen sampah, merupakan bagian integral dari sistem yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Infrastruktur permukiman yang baik juga berdampak positif pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit lingkungan, seperti yang ditularkan melalui air atau nyamuk. Fasilitas air minum dan drainase yang efisien membantu mencegah banjir dan kerusakan properti. Jaringan penerangan jalan yang memadai meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sementara jalan yang baik mendukung mobilitas dan aksesibilitas. Semua ini berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur permukiman bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga investasi dalam pembangunan yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Gambar 2. 131.
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

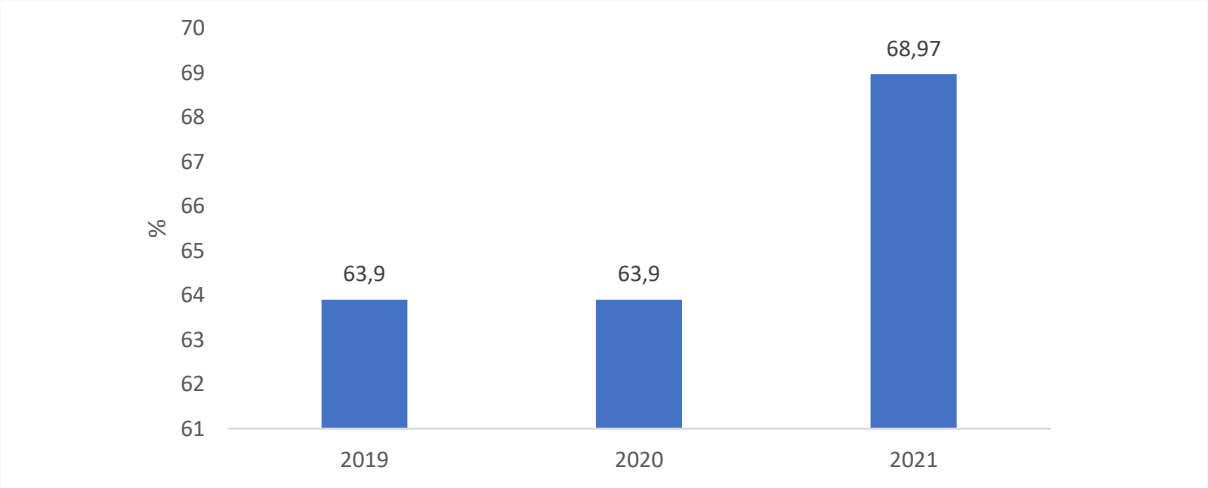
Di Kabupaten Pasangkayu, rasio rumah yang layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada awal periode ini, angkanya mencapai 67,63 persen, lalu meningkat menjadi 68,97 persen pada tahun 2020 dan mencatatkan 70,17 persen pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan rasio mencapai 71,38 persen dan di tahun 2024

menjadi 73,42 persen. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses rumah yang layak huni bagi penduduk Kabupaten Pasangkayu.

**b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Ketersediaan rumah layak huni mencakup persyaratan rumah yang memenuhi standar keselamatan, luas minimum yang memadai, dan kondisi kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, salah satu indikator utama rumah layak huni adalah ketersediaan rumah yang memenuhi syarat, dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 100 persen. Dari tahun 2019 hingga 2021, ketersediaan rumah layak huni menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu mencapai 63,9 persen, meningkat menjadi 68,97 persen di tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan rumah yang memenuhi standar layak huni, yang mengindikasikan perbaikan dalam kualitas dan ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini belum memenuhi SPM atau masih ada 31,03 persen rumah tangga yang memiliki rumah tidak layak huni.

Gambar 2. 132.
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2021




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

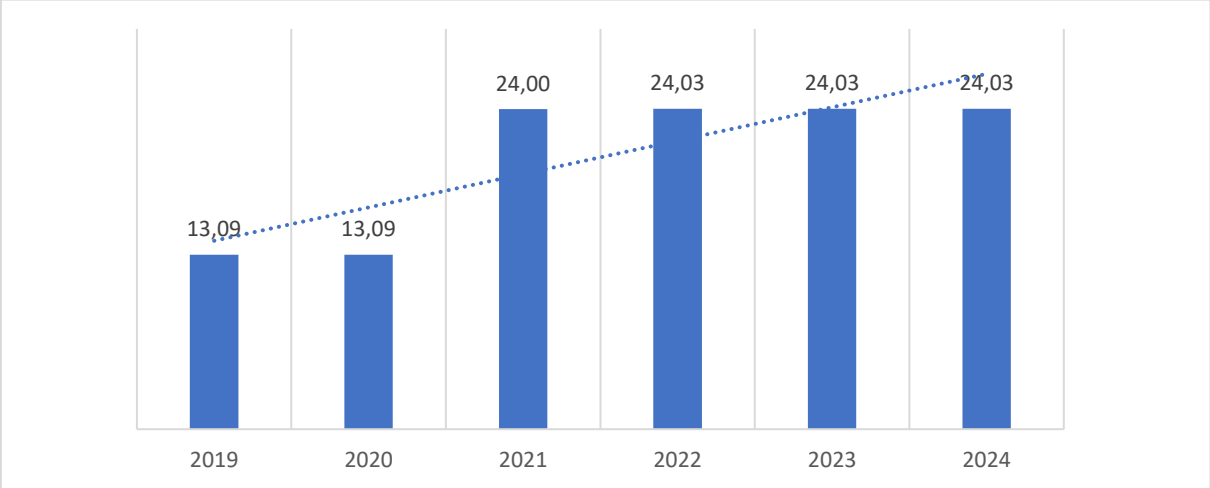
**c. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu langkah krusial dalam menjamin hak dasar masyarakat akan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Rumah layak huni harus memenuhi standar minimal seperti akses air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi udara baik, serta struktur bangunan yang kokoh dan tahan bencana. Untuk memastikan keterjangkauan, diperlukan skema subsidi pemerintah, kemitraan dengan pengembang properti, atau program pembiayaan berbasis bunga rendah yang memudahkan MBR mengakses kepemilikan rumah. Selain itu, lokasi perumahan harus strategis, dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan

transportasi umum, agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, pembangunan rumah terjangkau tidak hanya mengurangi kesenjangan permukiman, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan stabilitas sosial-ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dalam enam tahun terakhir tren cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu yang diperuntukkan kepada MBR mengalami kenaikan, namun masih sangat rendah. Tahun 2019 dan 2020, angkanya masih 13,09 persen, kemudian naik cukup tinggi di tahun 2021 menjadi 24 persen. Tahun 2022 hingga 2024 angka tersebut tidak lagi berubah, menunjukkan bahwa dari total MBR di Kabupaten Pasangkayu, hanya 24 persen yang menempati rumah layak huni dan terjangkau dan 76 persen MBR tingga di rumah tidak layak huni. Satu-satunya faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi karena pemerintah daerha belum mampu menyediakan rumah layak huni yang terjangkau oleh MBR.

Gambar 2. 133.
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak yang Terjangkau Huni di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

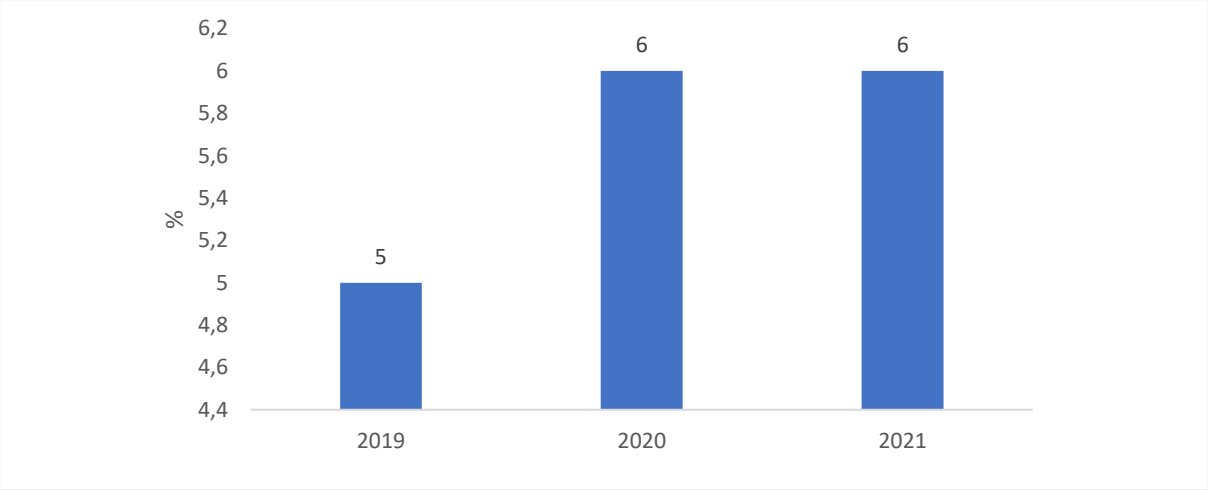
Pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala dalam menyediakan rumah layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akibat terbatasnya anggaran, tingginya harga tanah, serta kompleksitas birokrasi perizinan dan koordinasi antarsektor. Keterbatasan lahan yang terjangkau di wilayah perkotaan, minimnya insentif bagi pengembang swasta untuk membangun hunian murah, dan ketergantungan pada anggaran pusat yang tidak selalu memadai turut memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan terintegrasi, seperti peningkatan alokasi dana khusus perumahan MBR dalam APBD, penyederhanaan regulasi perizinan berbasis digital, pemberian insentif fiskal (contoh: keringanan pajak) bagi pengembang yang berpartisipasi, serta optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan menjamin kepastian hukum. Selain itu, penataan ulang kebijakan tata ruang untuk alokasi lahan khusus hunian terjangkau dan penerapan sistem

subsidi silang dalam sektor properti dapat menjadi solusi jangka panjang guna menjawab ketimpangan akses perumahan.

**d. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, indikator lingkungan yang sehat dan aman melibatkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ketersediaan PSU menjadi krusial dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Namun, dalam tiga tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman dengan dukungan PSU di Kabupaten Pasangkayu hanya naik 1 persen poin dari 5 persen di tahun 2019 menjadi 6 persen pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan tantangan serius dalam memenuhi standar lingkungan yang aman dan sehat.

Gambar 2. 134
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2021




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

**e. Persentase Areal Kawasan Kumuh**

Persentase areal kawasan kumuh di suatu daerah menjadi indikator penting dalam menilai kualitas permukiman dan tata kelola wilayah. Di kabupaten Pasangkayu, luas kawasan yang masih tergolong kumuh mencapai 5,54 persen dari total wilayah permukiman pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah telah tertata dengan baik, masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, akses air bersih, sanitasi layak, serta pengelolaan lingkungan di sejumlah area. Upaya penanganan terpadu dan kolaboratif antar pihak perlu terus diperkuat untuk menurunkan angka ini secara signifikan.

**E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

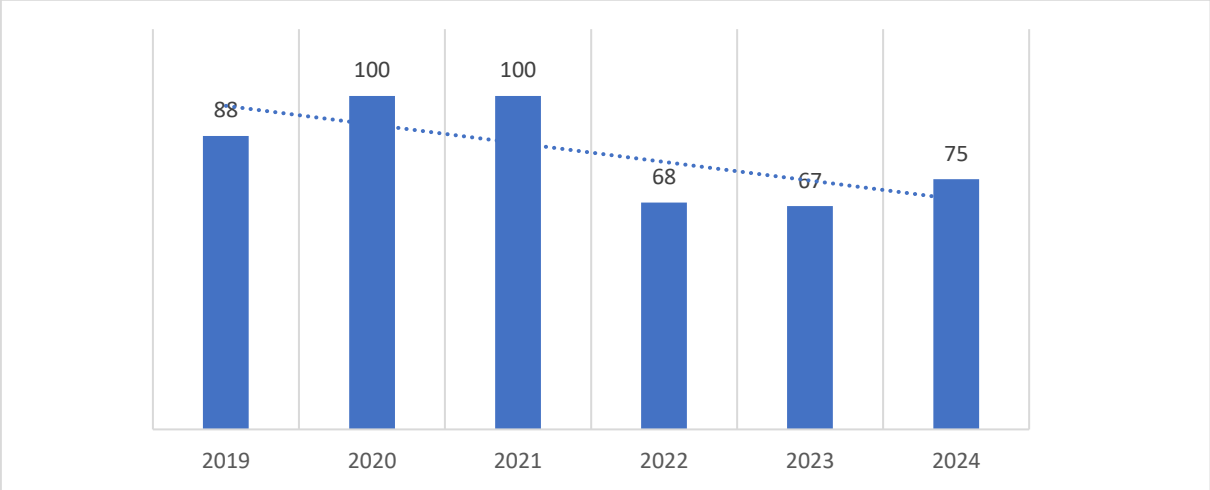
**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) memegang peran krusial dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan. Kehadiran mereka tidak hanya mencegah tindak

kriminal melalui patroli dan pengawasan proaktif, tetapi juga menjadi penengah dalam konflik warga, mengurangi eskalasi masalah yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Dengan berkolaborasi bersama kepolisian dan pemerintah setempat, petugas Linmas memperkuat sistem keamanan terpadu, memastikan respons cepat terhadap gangguan keamanan. Mereka juga aktif mengedukasi masyarakat tentang kesadaran hukum dan prosedur keselamatan, membangun partisipasi warga dalam upaya pencegahan pelanggaran. Di situasi darurat seperti bencana atau kecelakaan, peran mereka menjadi tulang punggung penanganan awal, menjaga koordinasi agar tidak timbul kepanikan. Dengan demikian, petugas Linmas bukan hanya penjaga ketertiban, tetapi juga pilar terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan.

Dalam enam tahun terakhir, angka cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pasangkayu cenderung turun. Tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Pasangkayu pernah mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa petugas Linmas ukup untuk memberikan pelayanan di semua wilayah Pasangkayu. Setelah itu, angkanya turun mulai dari 68 persen, 67 persen, dan jadi 75 persen masing-masing di tahun 2022, 2023, dan 2024.

Gambar 2. 135.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



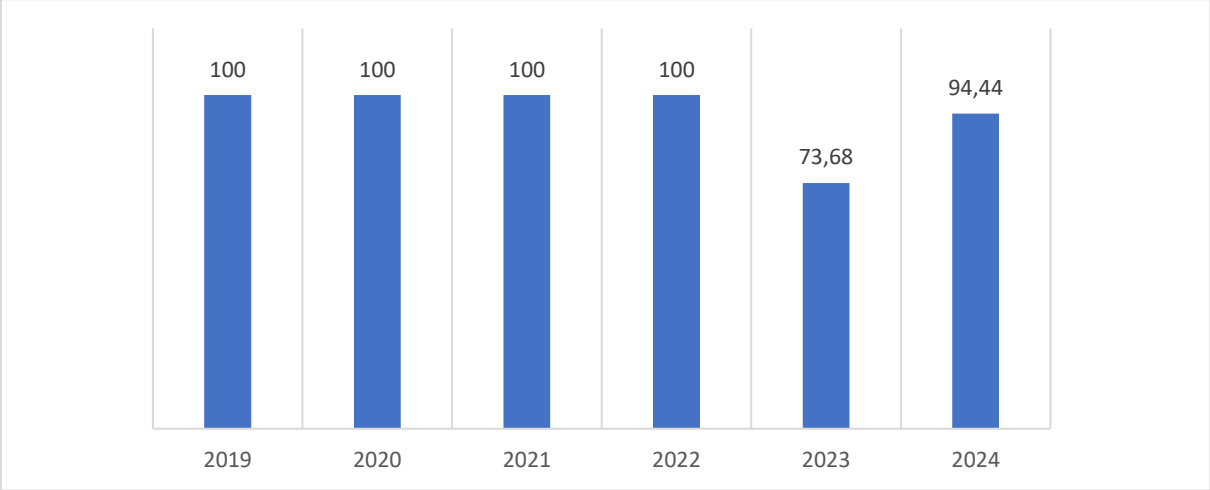

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

**b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Dari tahun 2019 hingga 2022, Kabupaten Pasangkayu mencatatkan tingkat penyelesaian pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran K3 yang terjadi berhasil ditangani oleh Satpol PP. Meskipun jumlah petugas linmas di daerah ini masih tergolong rendah, mereka berhasil menyelesaikan setiap kasus pelanggaran K3. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh jumlah pelanggaran yang relatif rendah, sehingga memudahkan pencapaian tingkat penyelesaian yang sempurna. Dengan tingkat penyelesaian yang konsisten ini, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan

komitmennya dalam menegakkan standar K3 dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun pada tahun 2023, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan berarti ke angka 73,68 persen, sebelum kemudian naik lagi ke 94,44 persen tahun 2024. Meski begitu, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian 2019 hingga 2021.

Gambar 2. 136.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

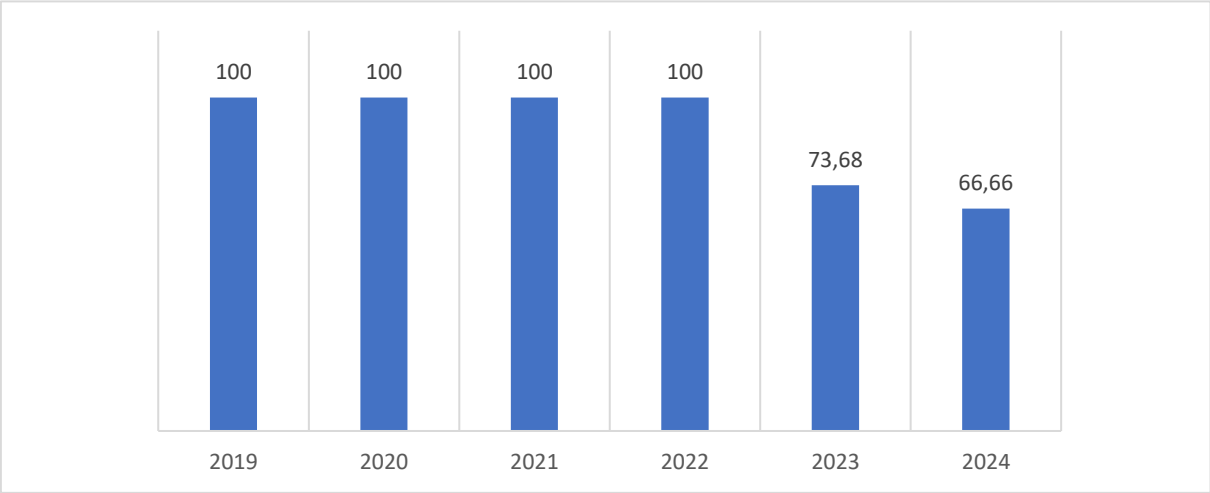



Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

**c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota**

Kebakaran merupakan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan potensi merusak harta benda dan menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pelayanan yang selalu siap merespons kejadian kebakaran. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berhasil mencapai cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 persen di tahun 2019 hingga 2022. Angka 100 persen menunjukkan bahwa pelayanan bencana kebakaran yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa menjangkau semua wilayah Kabupaten Pasangkayu. Namun angka tersebut tak bisa dipertahankan di tahun 2023 karena mengalami penurunan ke 73,68 persen dan turun lagi di tahun 2024 jadi 66,66 persen

Gambar 2. 137
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



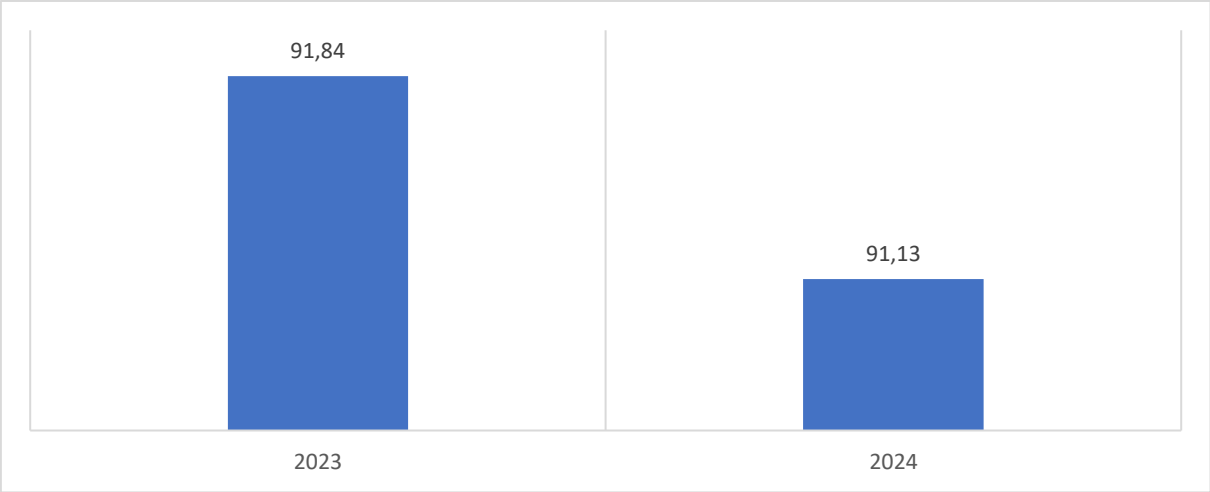

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

**d. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Indikator tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan ukuran kritis untuk menilai efisiensi dan efektivitas layanan pemadam kebakaran dalam merespons insiden kebakaran atau keadaan darurat. Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak laporan diterima hingga unit pemadam tiba di lokasi kejadian. Tingkat waktu tanggap yang optimal mencerminkan kesiapan infrastruktur, seperti distribusi pos pemadam yang strategis, ketersediaan armada dan peralatan, serta koordinasi tim darurat. Semakin cepat respons, semakin tinggi peluang mengurangi kerusakan materi, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan risiko perluasan kebakaran. Pemantauan indikator ini juga membantu mengidentifikasi hambatan operasional, seperti kepadatan lalu lintas atau keterbatasan sumber daya, sehingga menjadi dasar evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas layanan dan penjaminan keselamatan publik di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu berhasil mencatat angka 91,84 persen dalam Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) tahun 2023. Itu artinya dari semua kasus kabakaran yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023, 91,84 persen berhasil direspon dalam waktu maksimal 15 menit. Namun di tahun 2024, angkanya turun ke 91,13 persen.

Gambar 2. 138
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Pasangkayu, 2023-2024 (%)




Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

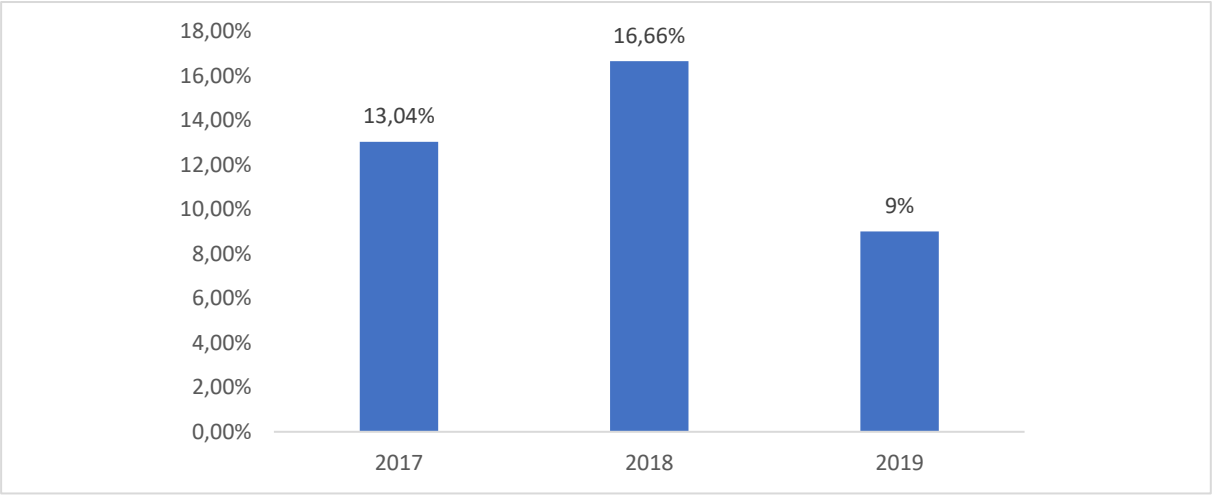
Penyebab Petugas kesulitan mencapai tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks. Pertama, kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan sering menghambat pergerakan armada pemadam kebakaran, terutama pada jam sibuk atau di area dengan infrastruktur jalan sempit. Kedua, keterbatasan sumber daya, seperti jumlah unit operasional yang tidak memadai, ketiadaan pos pemadam di daerah terpencil, atau peralatan yang kurang modern, dapat memperlambat respons. Ketiga, kondisi geografis, seperti wilayah pegunungan, rawa, atau kepulauan, menyulitkan akses ke lokasi kejadian. Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antara pusat penerima laporan, petugas di lapangan, dan instansi terkait (seperti kepolisian atau ambulans) juga berpotensi menimbulkan penundaan. Faktor lain termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan insiden secara cepat atau memberikan informasi yang akurat, serta cuaca ekstrem (hujan deras, kabut, atau banjir) yang mengganggu mobilitas tim darurat. Kombinasi faktor-faktor ini menuntut evaluasi menyeluruh dan penanganan strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan kebakaran.

## F. Sosial

### a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan nasional memerlukan kesejahteraan sosial, yang merupakan komponen integral dari proses pembangunan tersebut. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok utama yang menjadi fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Berbagai isu seperti kerawanan sosial, masalah ekonomi, ketunasusilaan, kecacatan, perilaku menyimpang, keterpencilan, eksploitasi, diskriminasi, dan kerentanan sosial dapat menjadikan individu atau kelompok sebagai PMKS dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Di sisi lain, bencana alam dan sosial, yang sulit diprediksi secara tepat dan cepat, menambah kompleksitas dalam penanganan masalah ini.

Gambar 2. 139
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, 2017-2019



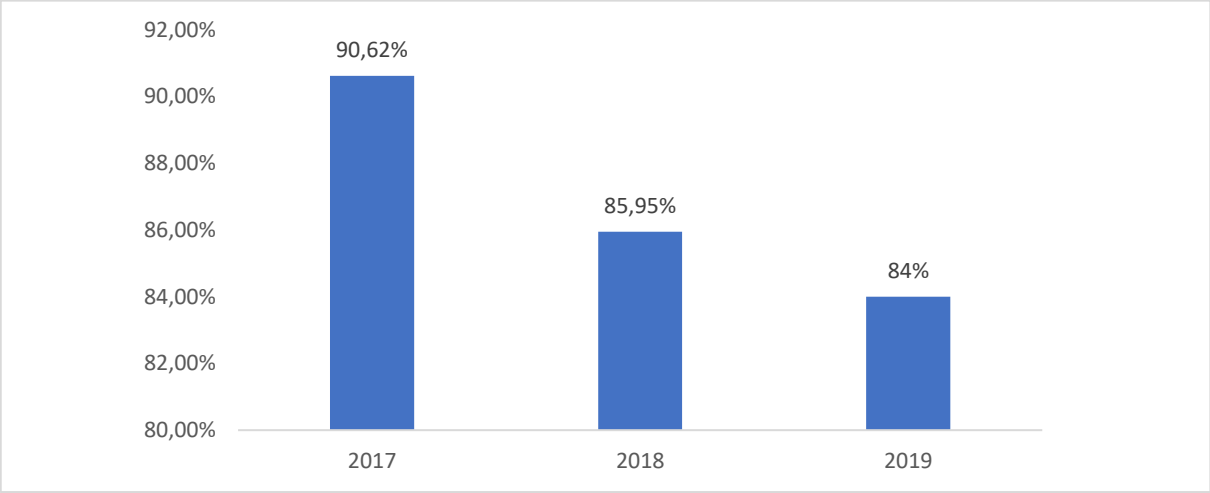

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

Bantuan sosial adalah dukungan yang diberikan kepada masyarakat tanpa mengharapkan balas jasa. Tujuannya adalah untuk menjangkau seluruh PMKS guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan memastikan mereka dapat mencapai serta mempertahankan kehidupan yang layak. Namun, selama tiga tahun terakhir, hanya sekitar 12,9 persen PMKS yang menerima bantuan sosial. Artinya, 87,1 persen dari kelompok ini tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka. Pada tahun 2017, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah 13,04 persen, meningkat menjadi 16,66 persen pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, angka ini menurun drastis menjadi 9 persen, menyisakan 91 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial. Penurunan ini menunjukkan rendahnya akses mereka terhadap bantuan sosial dan menghambat keterlibatan mereka dalam proses pembangunan, padahal mereka adalah kelompok yang sangat rentan terhadap guncangan.

**b. Persentase PMKS yang Tertangani**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang untuk menjalankan fungsi sosial mereka. Tujuan dari penanganan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup, dan keberlanjutan; memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian; serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, penanganan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Gambar 2. 140
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

Namun, data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, persentase PMKS yang tertangani mencapai 90,62 persen, tetapi angka ini menurun menjadi 85,95 persen pada tahun 2018 dan turun lebih jauh menjadi 84 persen pada tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah PMKS, tetapi tetap menunjukkan perlunya perhatian dan upaya pemerintah yang lebih intensif. Kelompok ini tetap merupakan bagian yang sangat rentan, terutama terhadap dampak bencana alam, sehingga perhatian dan tindakan pemerintah sangat krusial untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan.

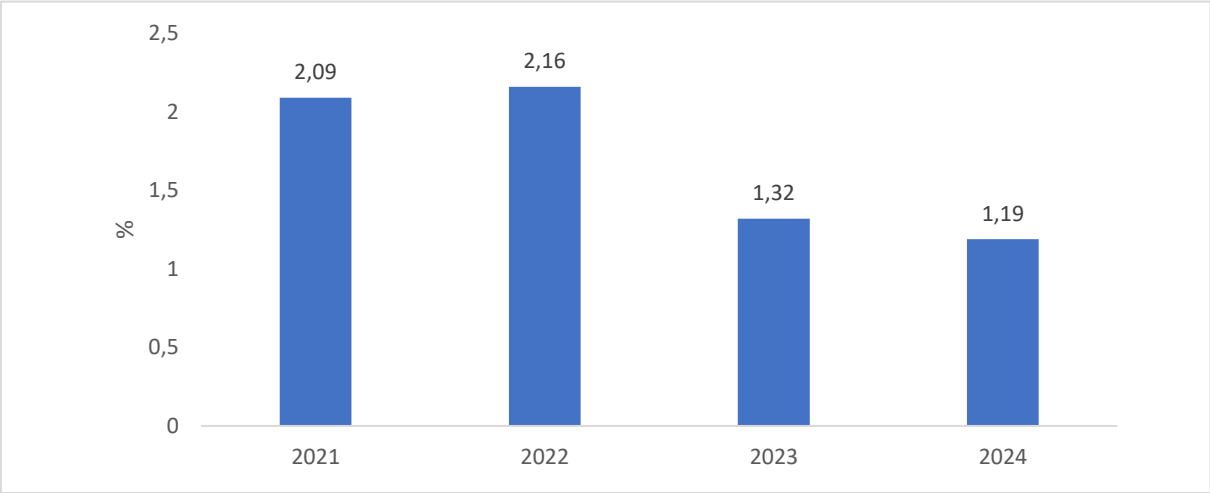
### 2.1.4.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

## A. Tenaga Kerja

#### a. Rasio lulusan S1/S2/S3

Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang berdampak pada kesejahteraan individu serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, berdasarkan data dalam grafik, terjadi tren penurunan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi di Kabupaten Pasangkayu dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, 2,09 persen dari total penduduk di atas 5 tahun mengakses pendidikan tinggi, angka ini sempat meningkat menjadi 2,16 persen pada tahun 2022. Namun, setelah itu terjadi penurunan signifikan menjadi 1,32 persen pada tahun 2023 dan terus menurun hingga 1,19 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aksesibilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Pasangkayu, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Gambar 2. 141
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dengan Status Pendidikan Tinggi
di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024



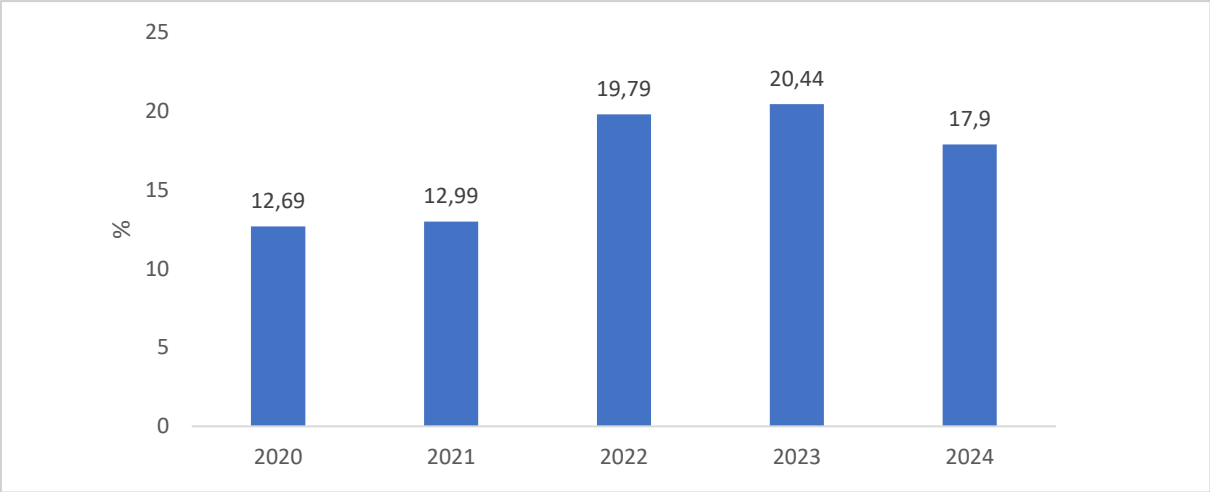

Sumber :BPS, diolah

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi kendala ekonomi, di mana tingginya biaya pendidikan tinggi bisa menjadi hambatan bagi banyak keluarga. Selain itu, terbatasnya infrastruktur perguruan tinggi di wilayah ini, serta kurangnya program beasiswa dan dukungan finansial bagi calon mahasiswa, dapat turut mempengaruhi tren ini. Faktor sosial dan preferensi individu juga bisa berperan, seperti kecenderungan masyarakat untuk langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi.

**b. Persentase Tenaga Kerja yang Pernah Mengikuti Pelatihan**

Pelatihan tenaga kerja merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan pekerja, sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Berdasarkan data Sakernas 2020–2024, persentase tenaga kerja di Kabupaten Pasangkayu yang pernah mengikuti pelatihan mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, hanya 12,69 persen tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan, kemudian meningkat sedikit menjadi 12,99 persen pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing mencapai 19,79 persen dan 20,44 persen. Namun, pada tahun 2024, persentase ini sedikit menurun menjadi 17,9 persen. Tren ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja di Pasangkayu telah mengalami perkembangan positif, terutama pada periode 2022–2023. Namun, penurunan di tahun 2024 bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam akses atau efektivitas program pelatihan, sehingga diperluan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam program pelatihan agar daya saing tenaga kerja semakin meningkat dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.

Gambar 2. 142.
Persentase Pekerja yang Pernah Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024




Sumber: Sakernas 2020 – 2024 (diolah)

**Produktivitas Tenaga Kerja**

**Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**

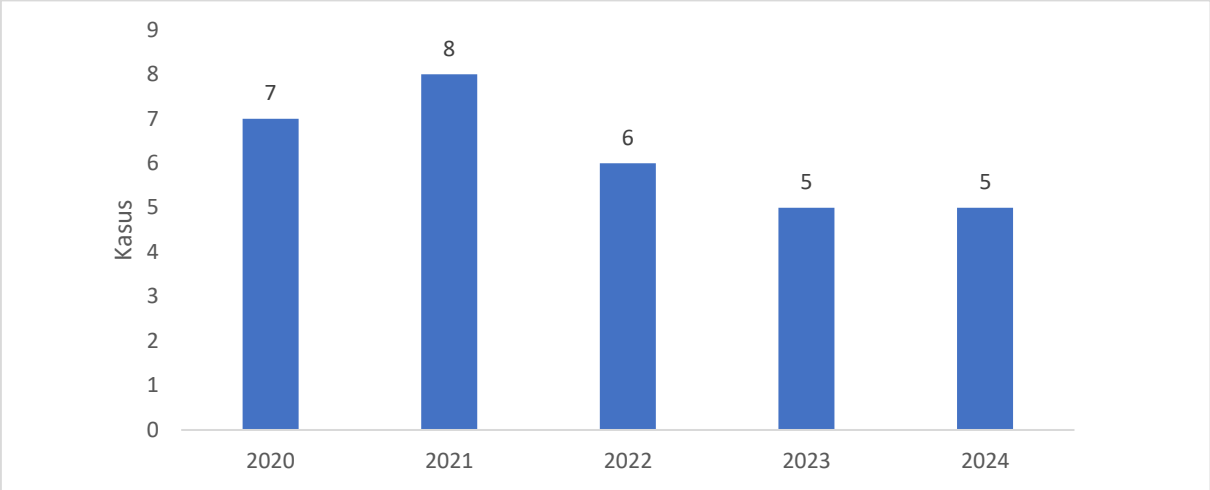
**Rata-rata Tingkat Upah Pekerja di Sektor Formal**

**B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Rasio KDRT**

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejak 16 tahun lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga [UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 (2)].

Gambar 2. 143
Jumlah KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

Di Kabupaten Pasangkayu, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 7 pada tahun 2020, meningkat menjadi 8 kasus pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2022, dan pada tahun 2023–2024 stabil di angka 5 kasus. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab KDRT antara lain tekanan ekonomi rumah tangga, ketidakstabilan pekerjaan, serta perbedaan peran dan ekspektasi gender yang masih kuat di masyarakat. Konflik rumah tangga juga dapat dipicu oleh masalah komunikasi, kecemburuan, atau perilaku konsumtif yang berlebihan. Tingginya stres pascapandemi, kurangnya akses layanan konseling keluarga, dan masih adanya anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi turut memperlambat upaya pencegahan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pelaporan membuat sebagian korban enggan melapor, sehingga data resmi kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

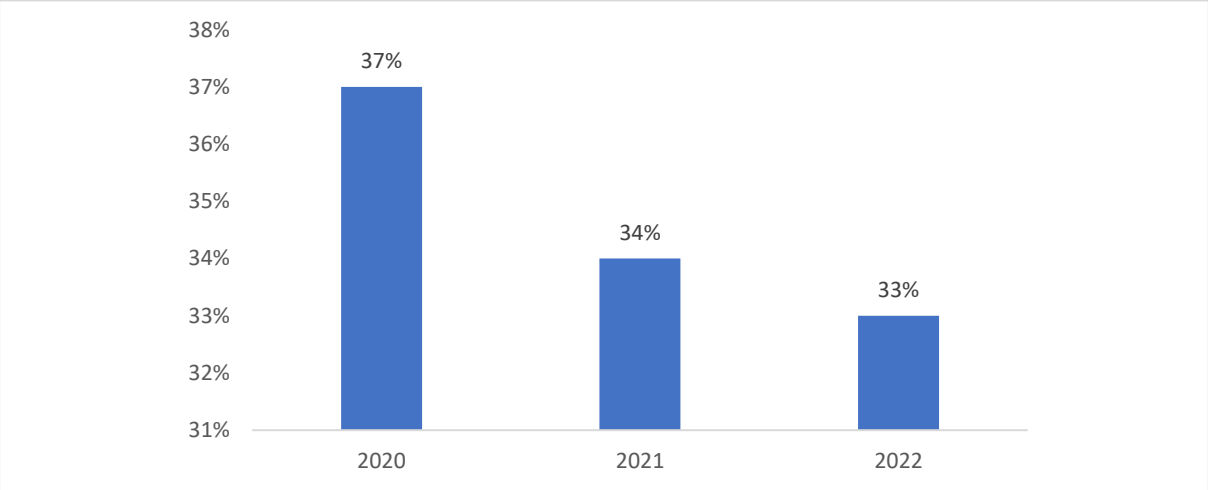
**b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan seringkali hanya mencerminkan bagian kecil dari masalah yang sebenarnya ada di masyarakat. Kasus-kasus ini memiliki dampak serius pada kesehatan korban, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkualitas sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus KtP/A, salah satunya melalui fungsi Unit Pelayanan Terpadu (UPT). UPT adalah unit fungsional yang menyediakan layanan terpadu bagi saksi dan korban tindak kekerasan.

Dalam tiga tahun terakhir, cakupan penanganan KtP/A oleh petugas terlatih di UPT menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, persentase kasus yang mendapatkan

penanganan oleh petugas terlatih adalah 37 persen. Angka ini menurun menjadi 34 persen pada tahun 2021 dan turun lagi menjadi 33 persen pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari unit pelayanan terpadu di Kabupaten Pasangkayu, masih ada tantangan dalam meningkatkan cakupan dan efektivitas penanganan kasus KtP/A.

Gambar 2. 144
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022

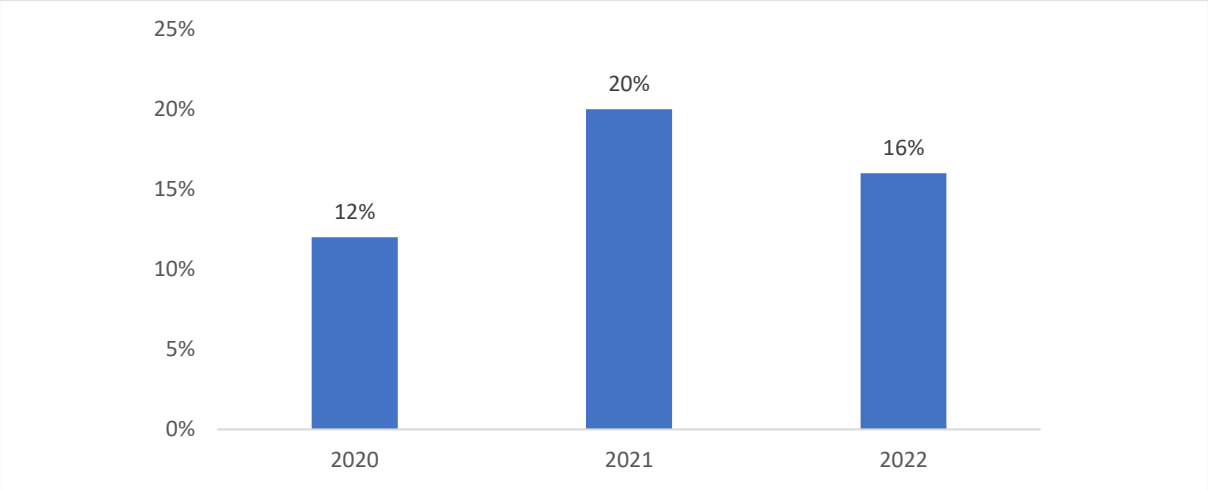



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

**c. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Kerap kali, korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Dari tahun 2020 hingga 2022, cakupan layanan kesehatan untuk korban kekerasan yang ditangani oleh tenaga medis terlatih di puskesmas dan rumah sakit menunjukkan variasi. Pada tahun 2020, hanya ada sekitar 12 persen korban yang menerima layanan kesehatan yang sesuai, angka ini meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2021, namun turun kembali menjadi 15 persen pada tahun 2022. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, agar mereka mendapatkan penanganan optimal.

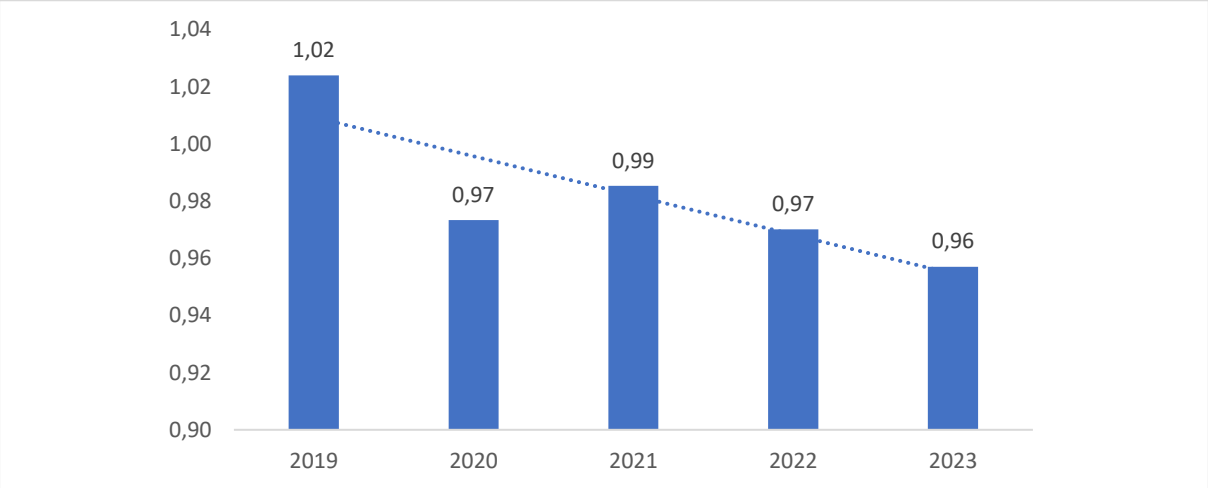
Gambar 2. 145
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022




Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

**d. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD**

Gambar 2. 146
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu
*Catatan: Data terakhir yang tersedia hingga Tahun 2023

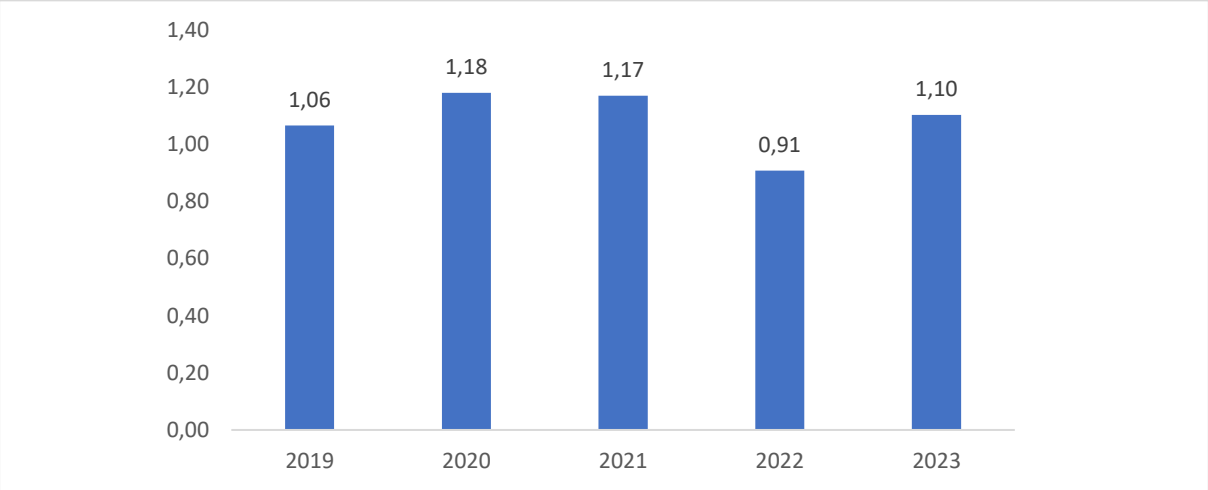
Secara global, tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Tujuan tersebut secara khusus terdapat pada tujuan ke empat, yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Dengan kata lain, pembangunan pendidikan harus menjamin laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Terbukanya akses perempuan untuk bersekolah dapat menekan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin. Pada jenjang pendidikan SD, masih terjadi

kesenjangan akses pendidikan berdasarkan gender. Rasio APM pada tahun 2023 mencapai 0,96, terus menurun dari angka 1,02 pada tahun 2019.

**e. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP**

Berbeda dengan jenjang pendidikan SD, kesenjangan gender terhadap pendidikan SMP tidak terjadi. Selama lima tahun terakhir, rasio APM antara perempuan dan laki-laki lebih besar dari 1 poin. Dari tahun 2019, rasio APM perempuan/laki-laki di SMP tercatat sebesar 1,06, lalu naik menjadi 1,18 pada tahun 2020, kemudian kembali turun menjadi 0,91 poin. Capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio APM perempuan/laki di SMP naik menjadi 1,10 poin. Angka ini menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan SMP, jumlah siswa perempuan masih lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki, mengindikasikan adanya tidak adanya ketimpangan gender yang terus berlangsung di tingkat pendidikan di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 147
. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



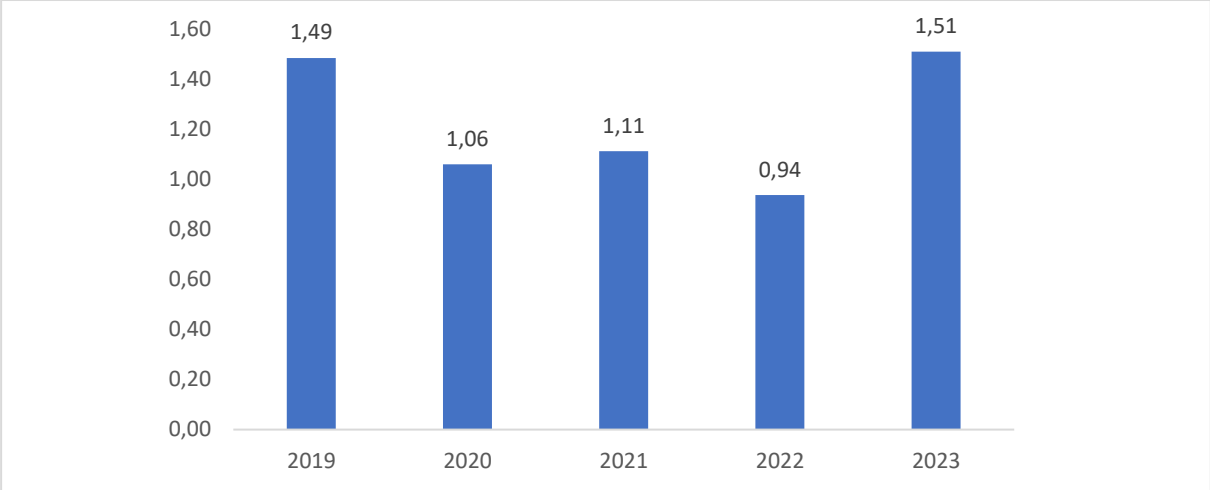

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

*Catatan: Data terakhir yang tersedia hingga Tahun 2023

**f. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA**

Dari tahun 2019 hingga 2023, rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pasangkayu mencatakan angka rata-rata 1. Pada tahun 2019, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA mencapai 1,49, lalu terus menurun menjadi 0,94 pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 1,51 pada tahun 2023 dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan berarti dalam kesetaraan gender di pendidikan SMA, dimana APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki.

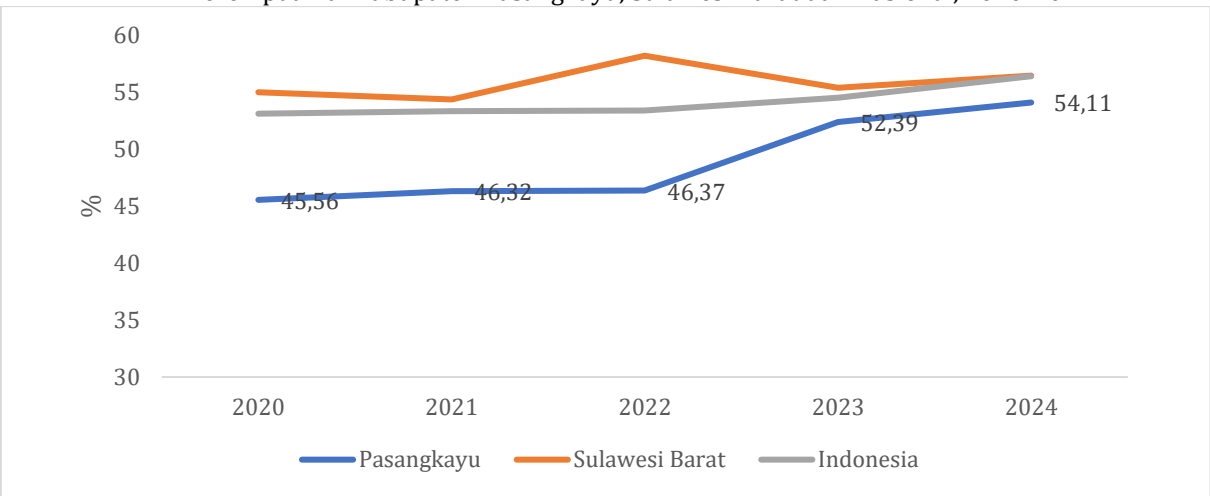
Gambar 2. 148
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu
*Catatan: Data terakhir yang tersedia hingga Tahun 2023

**g. TPAK Perempuan**

Gambar 2. 149
TPAK Perempuan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Nasional, 2020-2024




Sumber: BPS, diolah

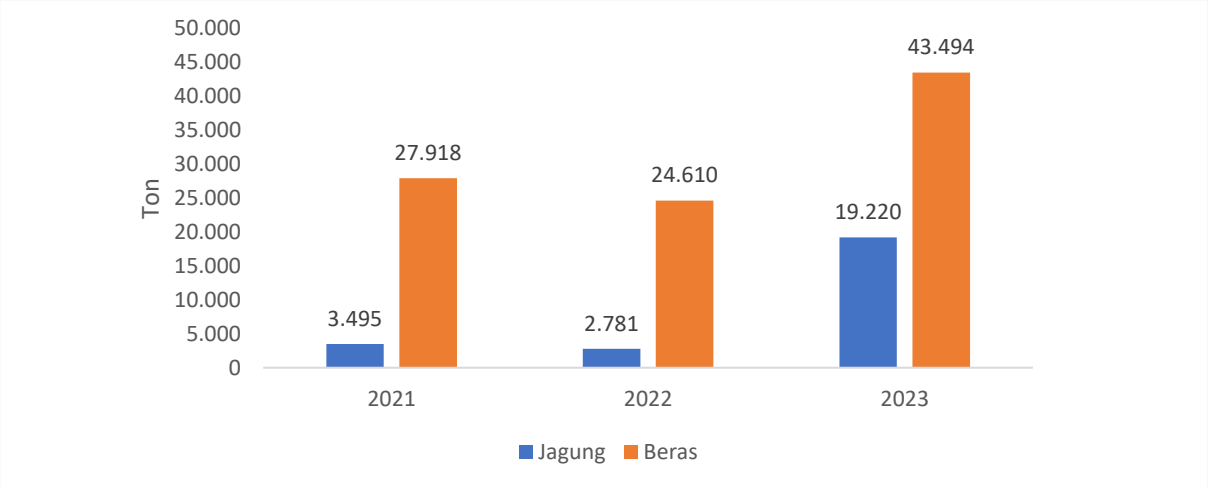
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 45,56 persen pada tahun 2020 menjadi 54,11 persen di tahun 2024. Kenaikan ini menandakan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, angka TPAK Perempuan Pasangkayu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 56,46 persen, dan juga di bawah angka nasional sebesar 56,42 persen pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif dan pemberdayaan ekonomi yang lebih intensif bagi perempuan, khususnya dalam peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak.

## C. Pangan

### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan utama dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan utama seperti beras dan jagung, Kabupaten Pasangkayu menerapkan penguatan cadangan pangan melalui perum bulog, pengendalian impor dan ekspor pangan, serta penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan. Hasilnya stok beras dan jagung dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2021, ketersediaan stok beras mencapai 27.918 ton, lalu turun menjadi 24.610 ton pada tahun 2022. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor produksi dan distribusi. Dari sisi produksi, cuaca yang kurang mendukung (anomali curah hujan atau serangan hama) dapat menurunkan hasil panen padi. Selain itu, kenaikan permintaan konsumsi, baik untuk kebutuhan lokal maupun pengiriman keluar daerah, juga berpotensi memperkecil stok. Faktor distribusi seperti keterlambatan pasokan atau berkurangnya cadangan di gudang Bulog akibat penyaluran program bantuan pangan turut memengaruhi jumlah stok akhir tahun.

Gambar 2. 150.
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2023




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

Pada tahun 2023 kemudian stok beras naik berarti menjadi 43.494 ton. Lonjakan ini kemungkinan dipicu oleh keberhasilan panen yang lebih baik akibat perbaikan musim tanam, intensifikasi pertanian, atau penerapan teknologi pertanian yang meningkatkan produktivitas. Kebijakan pemerintah daerah dan pusat, seperti optimalisasi lahan sawah, penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih lancar, atau penetapan harga gabah/beras yang menguntungkan petani, juga dapat mendorong peningkatan produksi. Selain itu, adanya impor atau pasokan beras dari luar daerah sebagai langkah stabilisasi harga dan stok menjelang periode tertentu (misalnya

Ramadan dan Idul Fitri) dapat menyebabkan stok tercatat meningkat signifikan. Sementara itu, ketersediaan jagung juga menunjukkan kenaikan dari 3.495 ton pada tahun 2021 menjadi 19.220 ton pada tahun 2023.

**b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**

Selain untuk melihat ketersediaan pangan utama, analisis ketersediaan energi dan protein per kapita penting dilakukan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Pasangkayu. Ketahanan pangan merujuk pada kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Adapun mutu atau kualitas pangan ditentukan oleh keamanan pangan, gizi, pemerataan akses, dan keterjangkauan. Untuk melihat kebutuhan pangan penduduk, pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengukur tingkat konsumsi dan konversi energi bahan pangan.

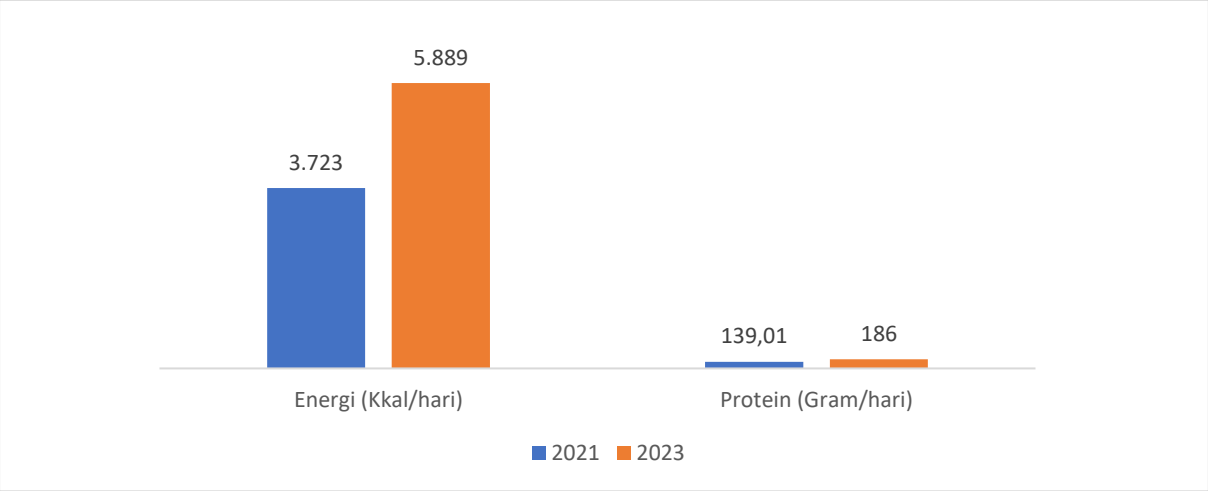
Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kecukupan gizi ini dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah 2.100 Kkal dan 57 gram protein. Standar ini merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2008. Dinas Ketahanan Pangan mencatat, rata-rata konsumsi per kapita per hari kalori dan protein di Kabupaten Pasangkayu sudah di atas standar kecukupan konsumsi protein harian. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 adalah 5.889 kkal. Sementara protein 186 gram.

Kenaikan ketersediaan energi dari 3.723 kkal/kapita/hari pada 2021 menjadi 5.889 kkal/kapita/hari pada 2023, serta peningkatan ketersediaan protein dari 139,01 gram/kapita/hari menjadi 186 gram/kapita/hari, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pasokan pangan di Kabupaten Pasangkayu. Dari sisi produksi, peningkatan ini kemungkinan dipicu oleh hasil panen yang lebih baik pada komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan hasil perikanan, seiring dengan perbaikan musim tanam, distribusi pupuk bersubsidi yang lebih lancar, dan pemanfaatan teknologi pertanian atau perikanan yang meningkatkan produktivitas. Peran sektor perikanan, yang menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Pasangkayu, juga berkontribusi signifikan pada lonjakan ketersediaan protein, mengingat ikan adalah sumber protein utama di wilayah ini.

Selain itu, perbaikan jaringan distribusi pangan dan kelancaran arus barang pasca-pandemi membuat pasokan pangan lebih stabil. Kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, stabilisasi harga, dan penambahan stok melalui pasokan dari luar daerah turut memperkuat ketersediaan energi dan protein. Dari perspektif ketahanan pangan, capaian ini

mencerminkan peningkatan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meskipun pemerataan distribusi dan keterjangkauan harga tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Gambar 2. 151
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2023




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

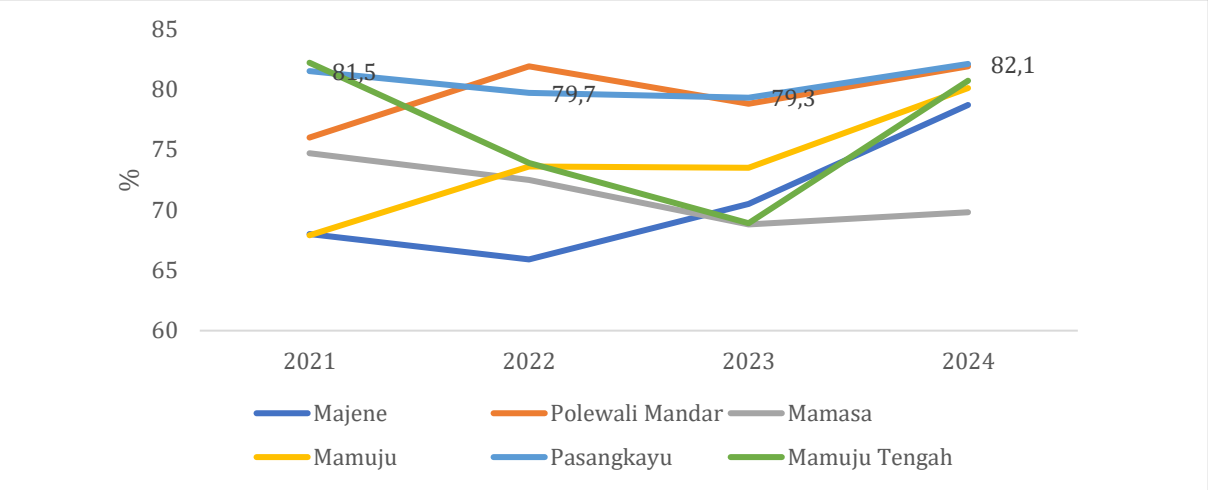
**Skor Pola Pangan Harapan**

Skor pola pangan harapan konsumsi adalah nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam memengaruhi keadaan gizi seseorang, khususnya pada generasi Z, agar menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Namun, masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras dan terigu, pangan lokal tersingkirkan.

Kabupaten Pasangkayu secara konsisten menunjukkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang tinggi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Pasangkayu mencatat skor sebesar 81,5 dan terus meningkat hingga mencapai 82,1 di tahun 2024, menjadikannya salah satu kabupaten dengan konsumsi pangan paling beragam dan mendekati pola gizi seimbang. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, Pasangkayu bersaing ketat dengan Mamuju Tengah, yang meskipun sempat mengalami penurunan tajam ke angka 68,9 pada 2023, berhasil *rebound* menjadi 80,7 pada tahun 2024. Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan stabilitas tinggi, dengan skor tertinggi 81,9 pada 2022 dan 2024. Sementara itu, Majene dan Mamasa mencatat skor yang lebih fluktuatif dan cenderung rendah, khususnya Mamasa yang stagnan di bawah angka 70 sepanjang periode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

dalam keragaman konsumsi pangan antarwilayah, yang perlu diatasi melalui intervensi kebijakan pangan dan gizi yang lebih merata dan kontekstual.

Gambar 2. 152
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pasangkayu dan Daerah Lainnya, 2021-2024

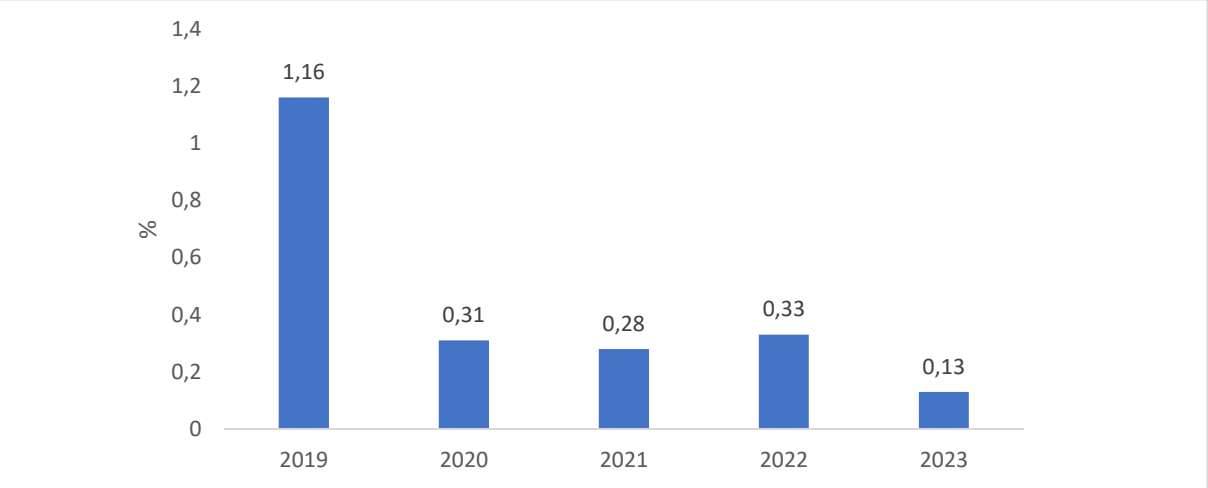



Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah

## D. Pertanahan

### a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Gambar 2. 153.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

Masih ada lebih 90 persen bidang tanah di Kabupaten Pasangkayu yang masih belum bersertifikat pada tahun 2023. Artinya, kepemilikan rakyat atas lahan di Kabupaten Pasangkayu belum berkekuatan hukum tetap dan berpotensi terus memicu konflik pertanahan. Persoalannya persentase luas lahan bersertifikat terus menurun dari tahun 2019 yang pernah mencapai 1,16 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya konflik antar tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat

dengan BUMN. Konflik pertanahan pasalnya akan semakin sulit diselesaikan dan bisa mengganggu ketentraman rakyat jika dibiarkan bermasalah selama bertahun-tahun.

**b. Persentase Luas Tanah Kosong yang Dikelola**

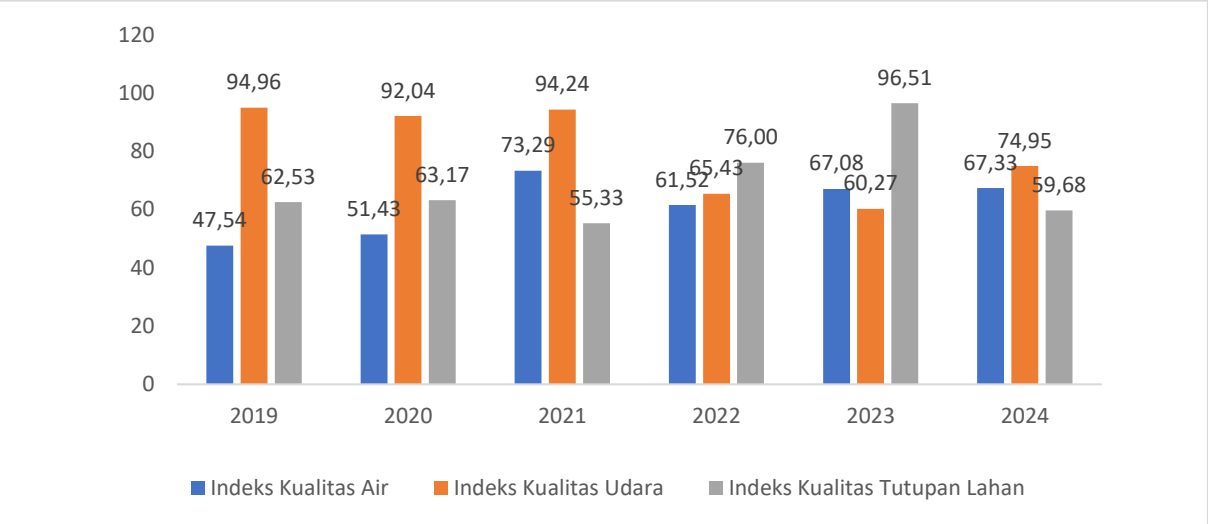
Pada tahun 2024, persentase luas tanah kosong yang dikelola di Kabupaten Pasangkayu mencapai 99,06 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh lahan kosong di wilayah ini telah dimanfaatkan secara aktif, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, maupun penggunaan lainnya. Capaian ini mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan lahan yang sangat tinggi, yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Namun, tingginya tingkat pemanfaatan ini juga menuntut perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan, agar pengelolaan lahan tidak menimbulkan degradasi lingkungan atau konflik pemanfaatan ruang di masa depan.

**E. Lingkungan Hidup**

**a. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang beragam selama periode 2019–2024. Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan signifikan dari 47,54 pada tahun 2019 menjadi 67,33 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kondisi air di wilayah tersebut. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 94,96 pada 2019 ke 92,04 pada 2020, lalu meningkat kembali menjadi 94,24 pada 2021, tetapi kemudian cenderung menurun hingga mencapai 60,27 pada 2023 sebelum sedikit meningkat menjadi 74,95 pada 2024.

Gambar 2. 154
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024




Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

Di sisi lain, Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan pola yang bervariasi, dengan peningkatan pada tahun 2022 mencapai 76,00, tetapi mengalami lonjakan tajam ke 96,51 pada

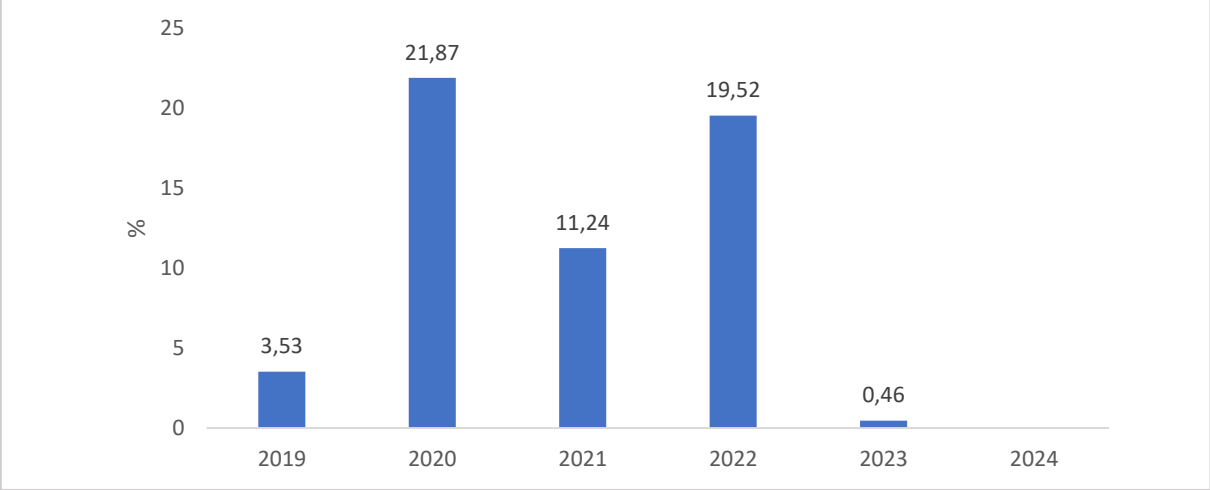
2023 sebelum kembali turun ke 59,68 pada 2024. Pola ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam penggunaan dan pengelolaan lahan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan dalam kualitas air, tren pada kualitas udara dan tutupan lahan menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Pasangkayu.

**b. Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani**

Persentase jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2019–2023. Pada tahun 2019, hanya 3,53 persen sampah yang berhasil ditangani. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2020 menjadi 21,87 persen, yang dipicu oleh adanya program intensif penanganan sampah dengan dukungan anggaran memadai, pengadaan armada angkut baru, atau peningkatan kinerja petugas kebersihan. Namun, pada tahun 2021, angka ini turun drastis ke angka 11,24 persen, yang bisa disebabkan oleh pemangkasan anggaran akibat penyesuaian APBD pasca-pandemi, berkurangnya jam operasional layanan, atau kerusakan fasilitas seperti truk sampah dan TPS.

Pada tahun 2022 mencatat kenaikan kembali menjadi 19,52 persen, diduga terkait dengan pemulihan anggaran dan peningkatan kembali aktivitas pengangkutan serta program kebersihan. Pada tahun 2023 capaian jumlah sampah yang tertangani merosot tajam menjadi hanya 0,46 persen, mengindikasikan adanya gangguan besar seperti kerusakan armada secara masif, penutupan atau pembatasan operasional TPA, konflik lahan TPA, berkurangnya tenaga kerja kebersihan, lemahnya koordinasi lintas instansi, atau minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasangkayu belum stabil dan membutuhkan perbaikan tata kelola yang konsisten.

Gambar 2. 155
Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024




Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

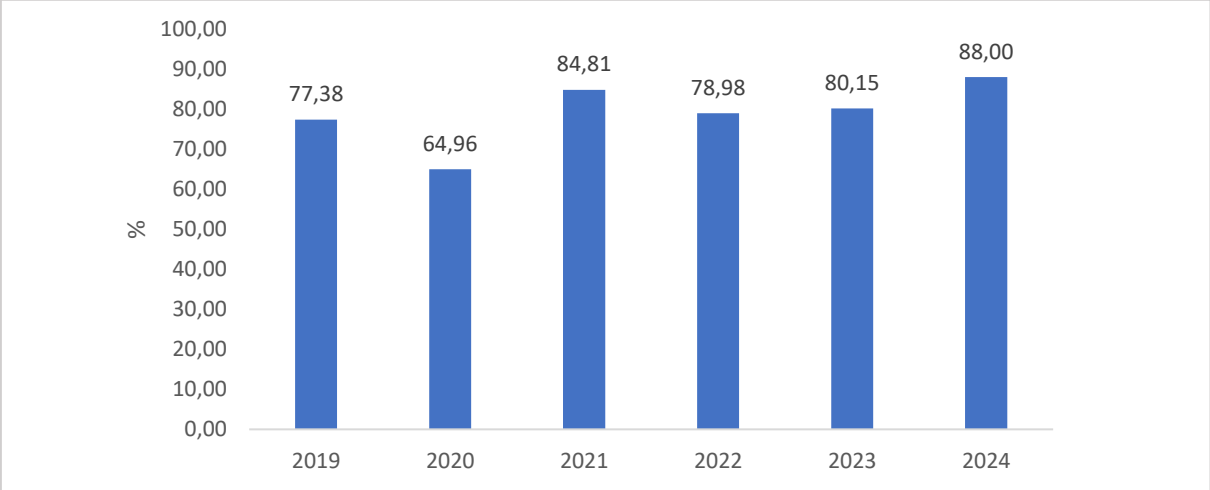
## F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### a. Rasio Penduduk ber KTP

Persentase penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dalam periode 2019–2024. Pada tahun 2019, tercatat 77,38% penduduk telah memiliki KTP, namun angka ini menurun signifikan pada 2020 menjadi 64,96%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan layanan administrasi kependudukan atau perubahan demografi. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan hingga 84,81%, yang mengindikasikan adanya upaya intensif dalam perekaman data kependudukan.

Setelah mengalami sedikit penurunan pada 2022 menjadi 78,98%, angka kepemilikan KTP kembali meningkat secara bertahap pada 2023 (80,15%) dan mencapai 88,00% pada 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Ke depannya, upaya untuk mencapai cakupan 100% penduduk ber-KTP perlu terus diperkuat agar seluruh warga memiliki identitas resmi yang dapat mendukung berbagai layanan publik.

Gambar 2. 156
Persentase Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Pasangkayu, 2019 – 2024



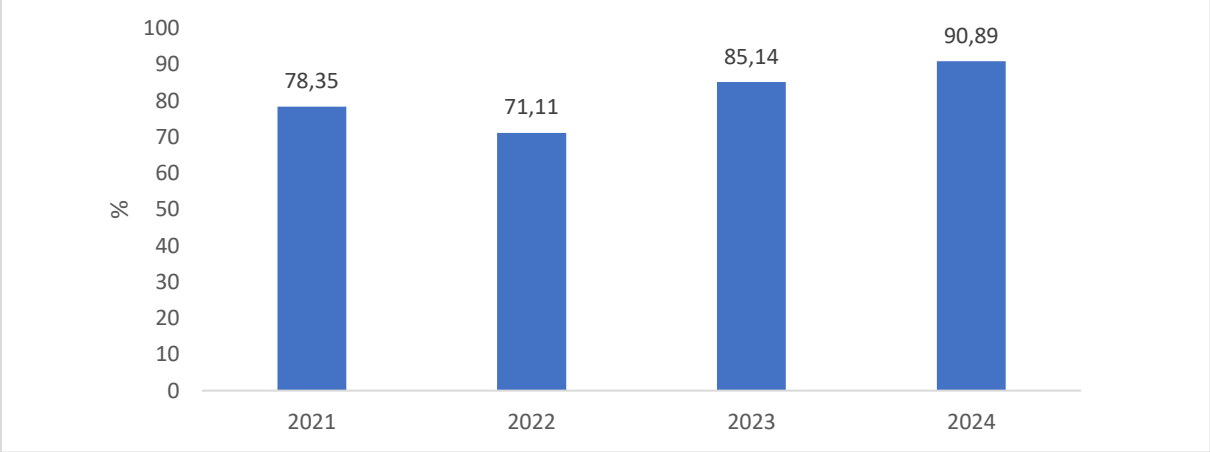

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

### b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti identitas hukum seorang anak, memberikan akses terhadap berbagai hak sipil, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kepemilikan akta kelahiran yang tinggi menunjukkan efektivitas sistem administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran. Berdasarkan grafik, persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, 78,35 persen anak usia 0-4 tahun telah memiliki akta kelahiran. Namun, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 71,11 persen, yang dapat mengindikasikan tantangan dalam

pencatatan kelahiran, seperti akses terbatas ke layanan administrasi kependudukan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen ini. Tren positif terjadi pada tahun 2023, di mana angka kepemilikan akta kelahiran meningkat signifikan menjadi 85,14 persen, dan terus meningkat pada 2024 mencapai 90,89 persen, menunjukkan perbaikan dalam sistem pencatatan sipil serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong pencatatan kelahiran bagi seluruh anak.

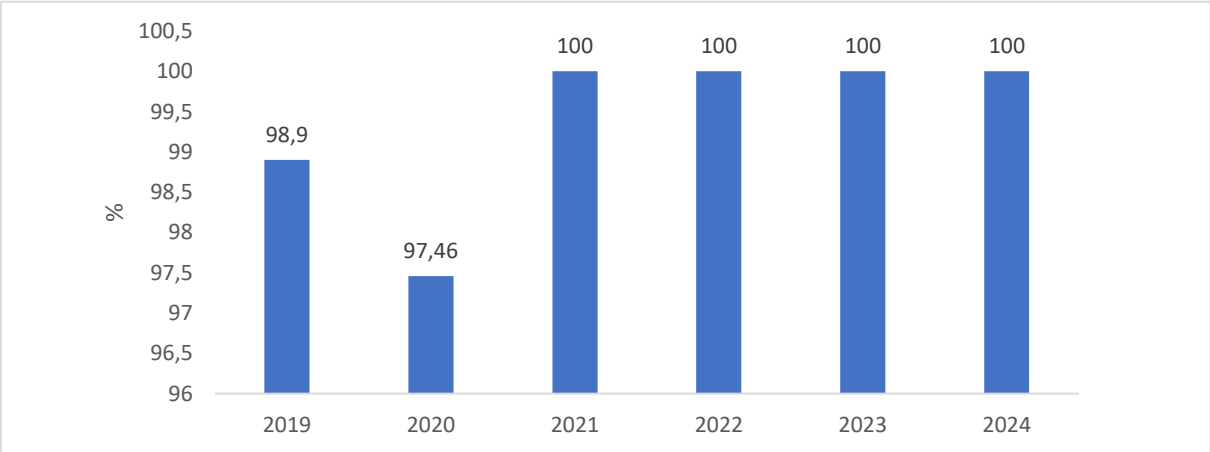
Gambar 2. 157
Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

**c. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

Gambar 2. 158.
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

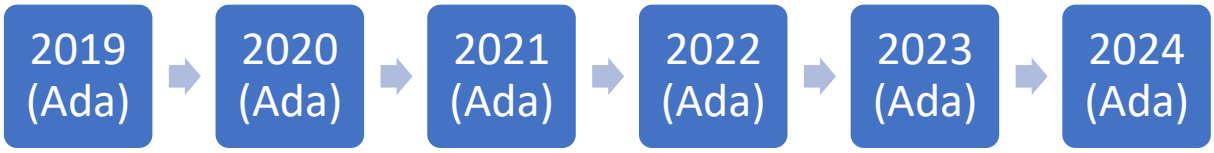
Kartu Tanda Penduduk atau kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan sebatas penanda identitas diri. Tetapi juga merupakan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi prasyarat untuk mengurus berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan pertanahan. Dalam enam tahun terakhir,

kepemilikan penduduk terhadap NIK menunjukkan capaian yang berarti. Pada tahun 2024, seluruh penduduk usia lima tahun keatas atau 100 persen telah memiliki NIK.

**d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten**

Database kependudukan adalah data individu atau perseorangan yang terstruktur melalui kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan sensus penduduk. Database kependudukan penting karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah atau negara, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah. Data kependudukan di antaranya kelahiran, kematian, pepindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Selama enam tahun terakhir, database kependudukan di Kabupaten Pasangkayu sudah ada. Database telah digunakan oleh berbagai instansi terkait untuk verifikasi atau memastikan kebenaran infomasi yang disampaikan oleh penduduk mengenai indentitas dirinya dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dari instansi terkait.

Gambar 2. 159
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

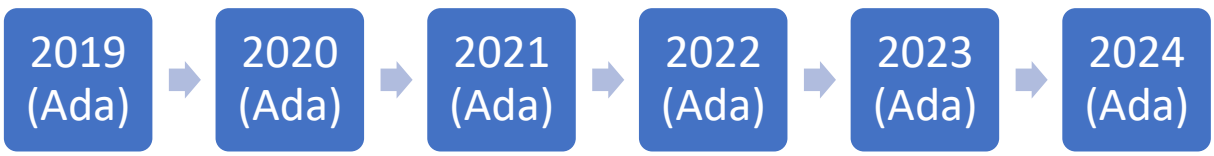



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu

**e. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik. Selama periode pengamatan 2019 hingga 2024, Kabupaten Pasangkayu sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK.

Gambar 2. 160
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu

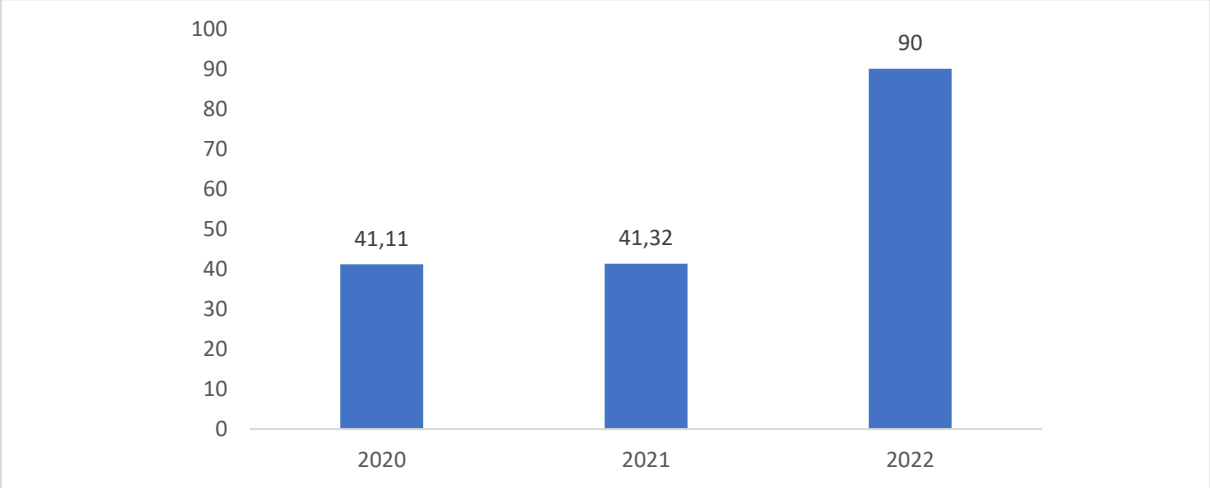
**f. Rasio Pasangan yang Memiliki Akta Nikah**

Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Pasangkayu tercatat hanya sebesar 0,45 atau 45 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasangan belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum, akses terhadap layanan publik, hak waris, dan kepastian status anak dalam hukum. Rendahnya angka ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas pernikahan, terbatasnya akses terhadap layanan pencatatan sipil, atau kendala biaya dan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga agama, dan masyarakat untuk mendorong pencatatan pernikahan secara sah melalui layanan yang mudah, terjangkau, dan inklusif.

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gambar 2. 161
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu

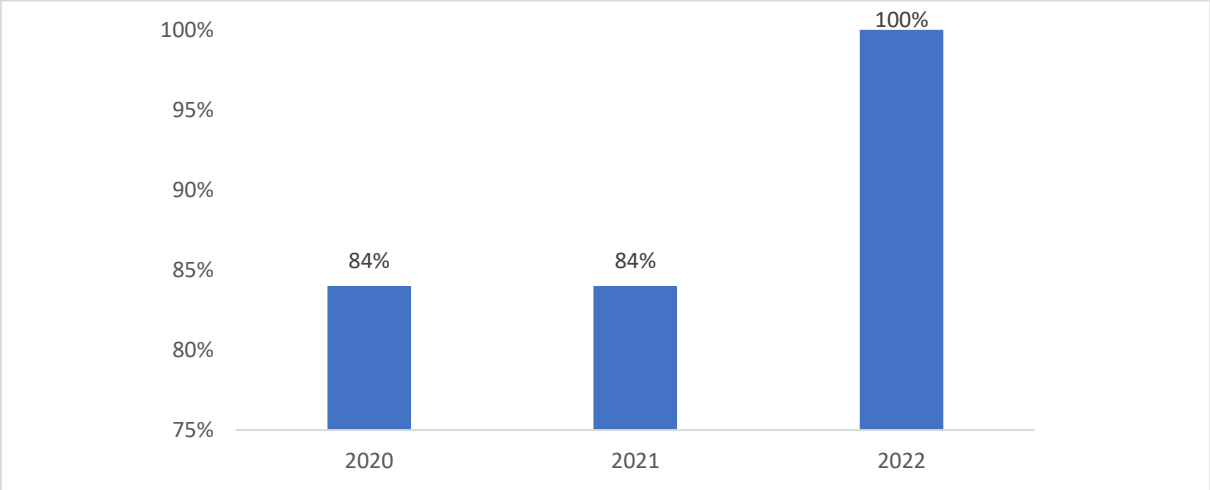
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dann berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dimana fungsi PKK sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak di masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kemajuan signifikan dalam jumlah kelompok binaan PKK. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tercatat sebesar 41,11 kelompok. Angka ini meningkat menjadi 41,32 kelompok pada tahun 2021, dan melonjak tajam menjadi 90 kelompok pada tahun 2022.

Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas dan peran PKK di wilayah tersebut.

**b. Persentase PKK Aktif**

Gerakan PKK adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberdayakan perempuan, dengan struktur pengelolaan yang dimulai dari tingkat dasar berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri. PKK dikelola oleh perempuan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan peluang partisipasi aktif kepada mereka. Di Kabupaten Pasangkayu, semua unit PKK menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi mencapai 100 persen pada tahun 2022, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan dalam pengembangan diri.

Gambar 2. 162
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



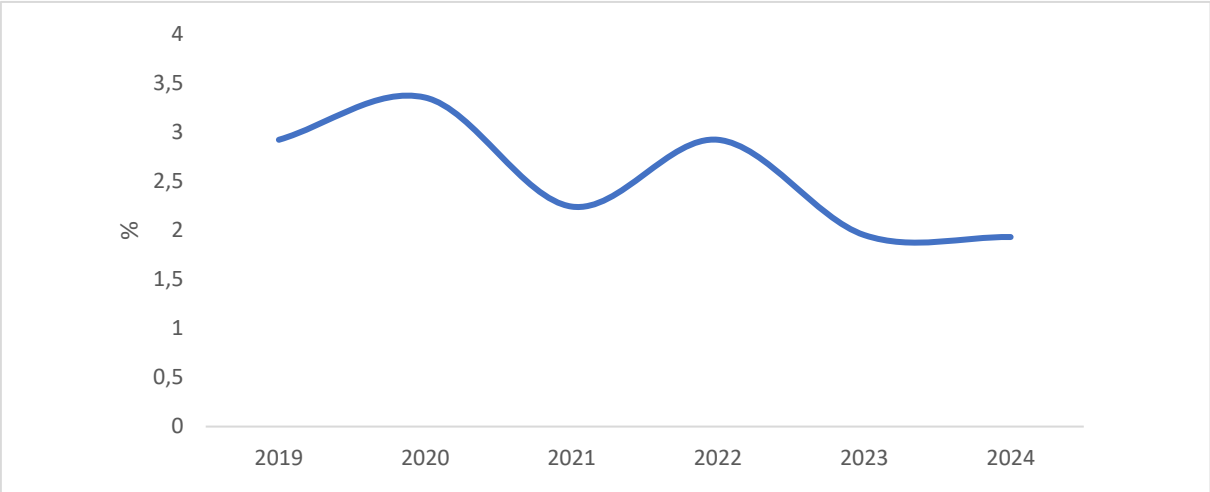

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu

**H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**a. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Dalam enam tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan tercatat sebesar 2,92 persen, lalu naik menjadi 3,35 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan penduduk menurun menjadi 2,24 persen, lalu kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 2,92 persen di tahun 2022. Tahun berikutnya, laju pertumbuhan kembali menurun sedikit menjadi 1,95 persen, kemudian kembali menurun sedikit ke angka 1,93 persen. Kabupaten Pasangkayu harus bisa menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk memastikan gelombang lansia yang terjadi di masa depan tidak terlalu membebani. Pada 2035, jumlah lansia di Kabupaten Pasangkayu diprediksi meningkat dua kali lipat dari saat ini. Pada saat yang sama, peluang untuk mendapatkan bonus demografi mulai tertutup.

Gambar 2. 163
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

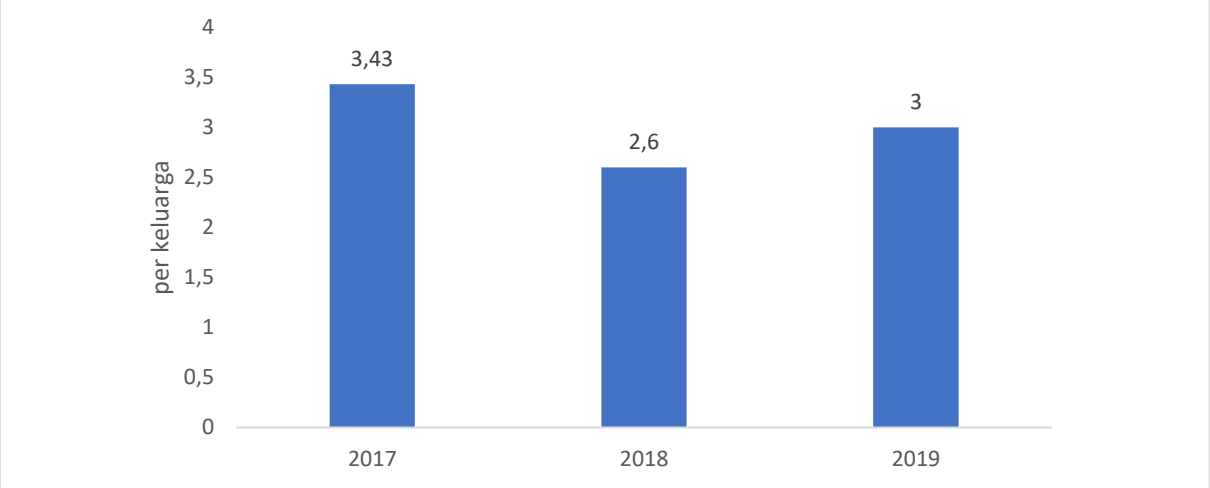



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**b. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Kelahiran merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk.Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara atau seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana (KB). Angka standar pencapaian ideal, dimana berarti 2 orang anak yang per keluarga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu sebesar 3 orang per keluarga.

Gambar 2. 164
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019



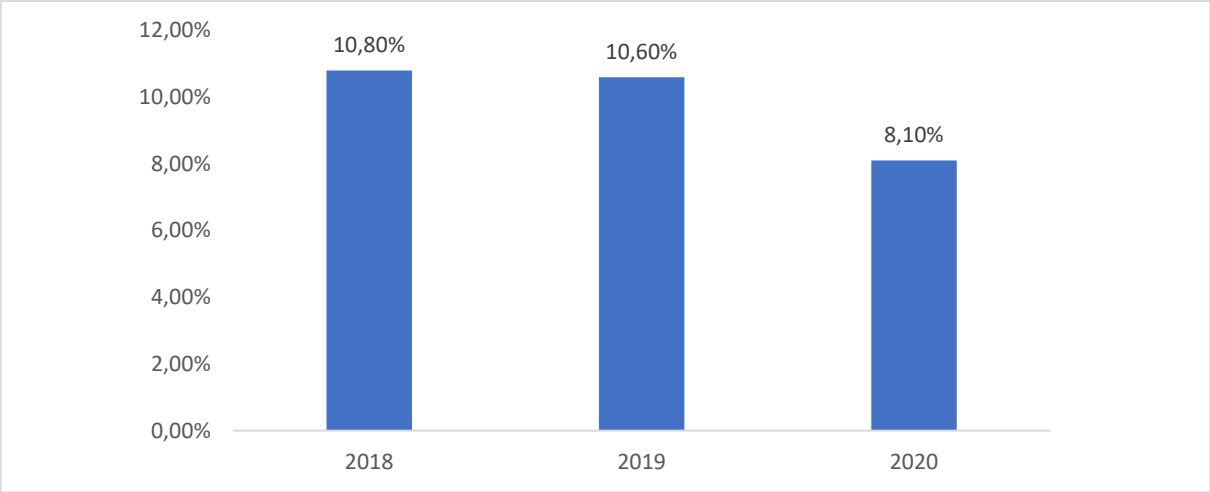

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**c. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)**

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang memiliki kebutuhan kontrasepsi tetapi tidak terpenuhi, atau yang dikenal dengan istilah "unmet need," mencerminkan kekurangan dalam penyediaan alat kontrasepsi. Kondisi ini terjadi ketika PUS yang ingin menggunakan alat

kontrasepsi tidak dapat melakukannya karena alat atau metode yang mereka inginkan tidak tersedia, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam cakupan unmet need. Pada tahun 2018, persentase PUS yang kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi adalah 10,8 persen. Angka ini terus menurun menjadi 8,1 persen pada tahun 2020.

Gambar 2. 165
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu, 2018-2020

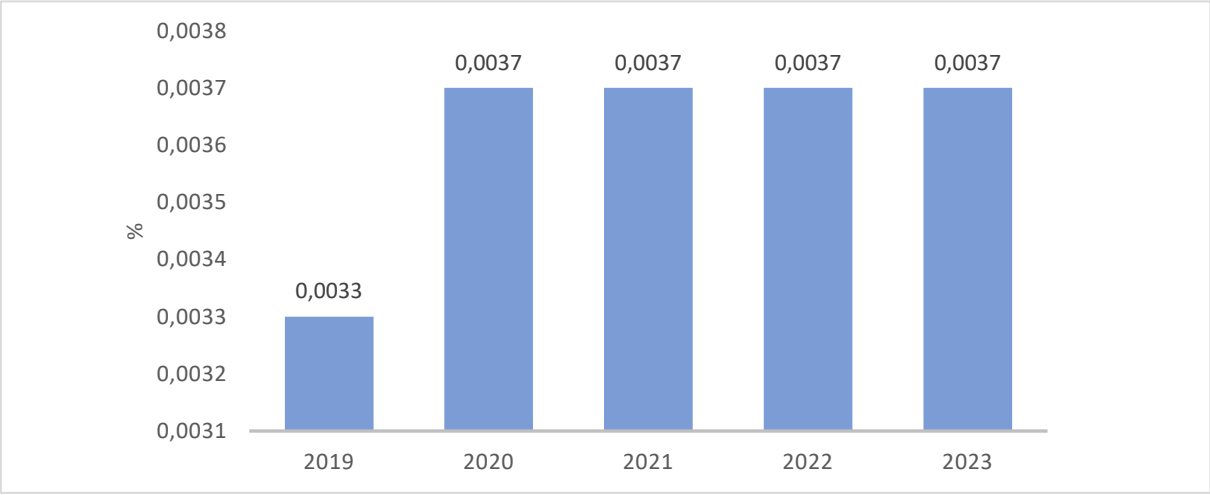



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## I. Perhubungan

### a. Persentase Layanan Angkutan Darat

Gambar 2. 166
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023




Sumber: Dinas Perhubungan

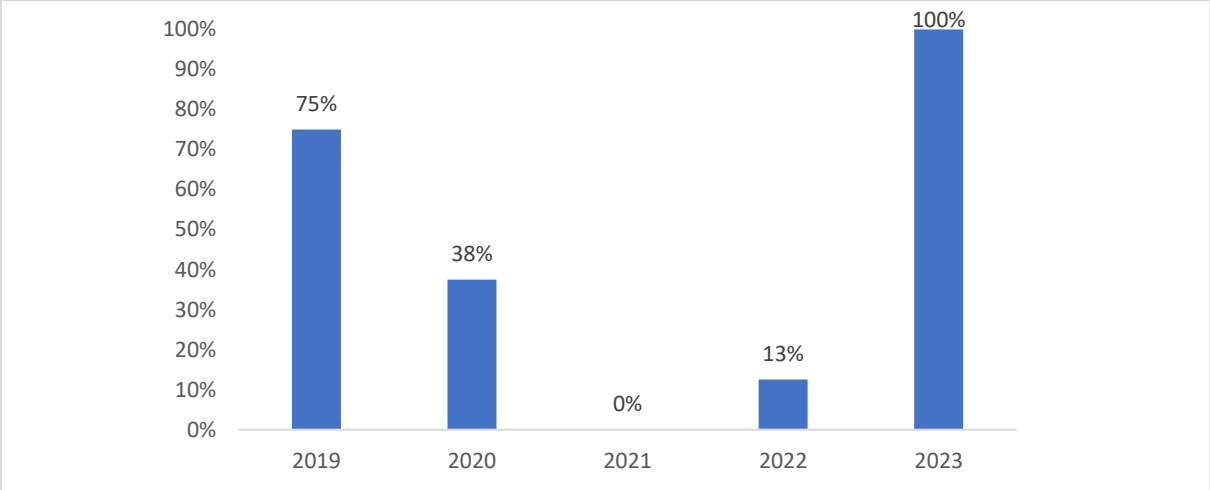
Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi faktor penting dalam pengembangan moda transportasi umum, karena kenaikan jumlah penduduk sejalan dengan mobilitas barang dan penumpang. Dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dalam persentase layanan angkutan darat. Persentase layanan angkutan

darat menunjukkan angka yang konsisten dalam periode yang dianalisis, dengan nilai yang stabil pada 0,0033% hingga 0,0037%. Selama periode 2019-2023, tidak terlihat adanya fluktuasi signifikan, menunjukkan kestabilan dalam layanan angkutan darat.

**b. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Kecelakaan yang menimpa kendaraan besar kerap terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak layak jalan atau tidak lolos uji KIR. Perlu diketahui bahwa menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Pada tahun 2023, persentase kepemilikan KIR angkutan umum sudah mencapai 100 persen pada tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya dari 16 angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu semuanya sudah lolos uji KIR.

Gambar 2. 167
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



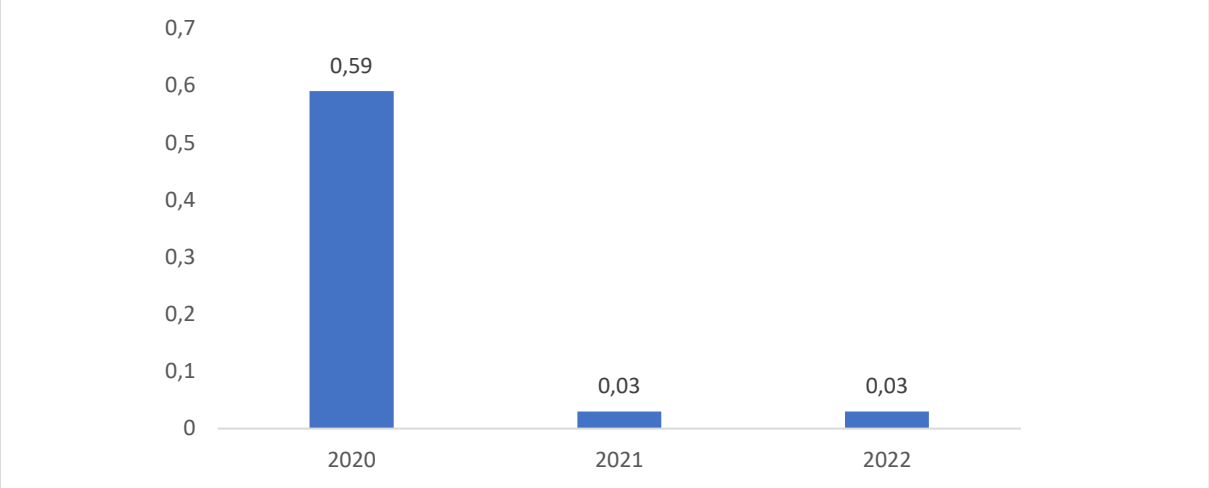

Sumber: Dinas Perhubungan

**c. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Efisiensi dan efektivitas penggunaan kendaraan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Semakin tinggi jumlah kendaraan, semakin penting peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukungnya. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan menjadi parameter krusial dalam pengembangan infrastruktur jalan. Di Kabupaten Pasangkayu, terjadi penurunan signifikan dalam rasio ini selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,59, yang berarti setiap 1 kendaraan dilayani oleh jalan sepanjang 0,59 km2. Namun, angka ini turun tajam menjadi 0,03 pada tahun

2021 dan 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai. Kemungkinan lain adalah kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan kendaraan.

Gambar 2. 168.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2021

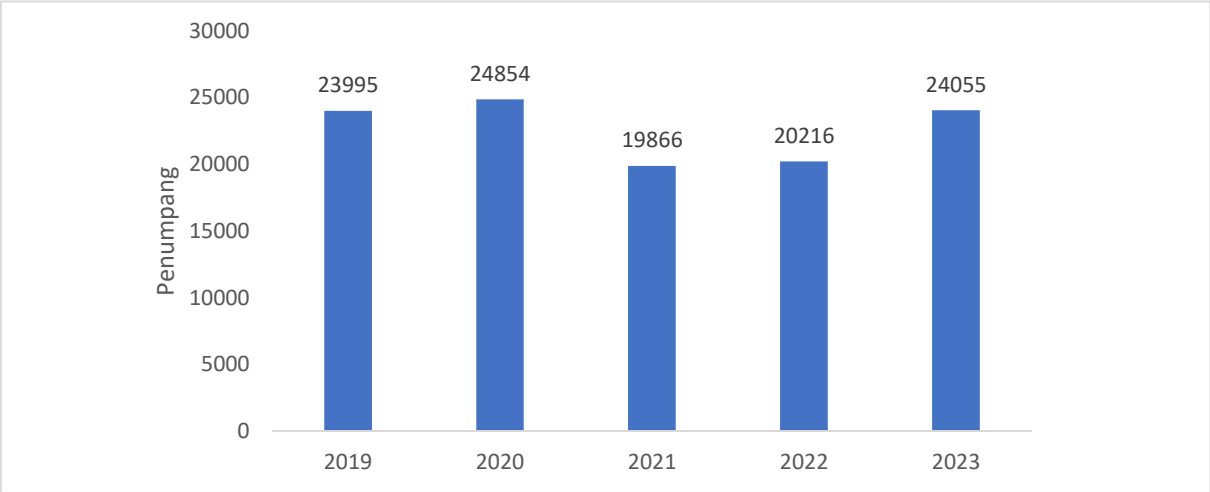



Sumber: Dinas Perhubungan

**d. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum**

Masyarakat diyakini akan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menjadi pengguna transportasi umum jika waktu tempuh yang diberikan bisa lebih cepat. Selama ini, pengguna kendaraan pribadi sulit menerima transportasi umum karena waktu tempuhnya lebih lama dan estimasi yang diberikan tidak sesuai. Selama lima tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam jumlah orang yang diangkut menggunakan angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu, yang secara langsung dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Pada tahun 2019, sebanyak 23.995 orang menggunakan angkutan umum, jumlah ini meningkat menjadi 24.854 orang pada tahun 2020. Namun demikian, terjadi penurunan signifikan menjadi 19.866 orang pada tahun 2021, sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan 20.216 orang yang terangkut. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan lebih lanjut menjadi 21.302 orang yang menggunakan angkutan umum. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika mobilitas masyarakat di Kabupaten Pasangkayu selama periode tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti perkembangan infrastruktur transportasi, perubahan dalam preferensi penggunaan angkutan umum, serta kondisi ekonomi dan sosial yang berkembang.

Gambar 2. 169.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



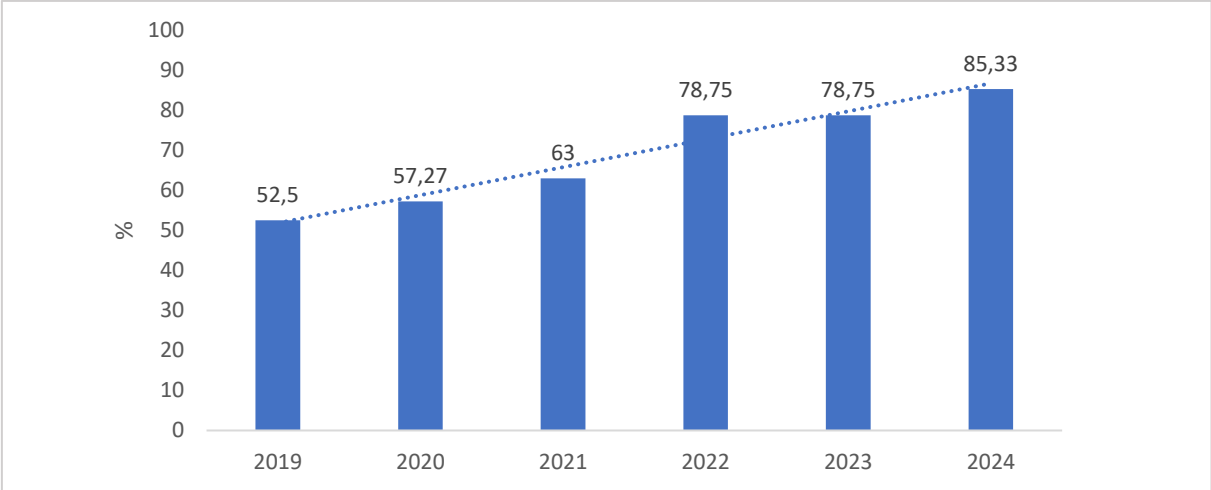

Sumber: Dinas Perhubungan

## J. Komunikasi dan Informatika

### a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Informasi yang tepat dan akurat tidak akan tersebar dengan baik tanpa adanya layanan telekomunikasi yang memadai. Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk memperluas layanan komunikasi telah diterapkan, agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses informasi dan berpartisipasi aktif. Cakupan layanan telekomunikasi mengukur seberapa besar wilayah yang tercakup layanan ini dibandingkan dengan total luas wilayah. Dalam lima tahun terakhir, cakupan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu terus meningkat. Pada tahun 2019, cakupannya mencapai 52,5%, naik menjadi 85,33% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemajuan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 170.
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

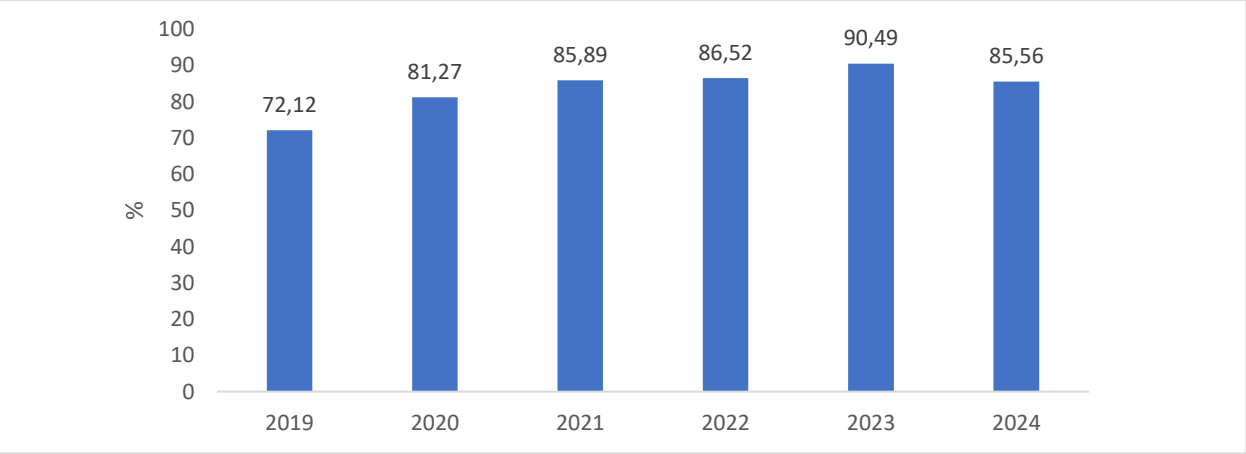



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

**b. Persentaase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon**

Jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. Hal tersebut diungkap Google dalam survei terbarunya, *Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone*. Adapun angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah ponsel yang terkoneksi internet (celluler mobile connections) yang dipublikasikan Data Reportal pada Januari 2023. Jumlah ponsel aktif di Indonesia tersebut melampaui total penduduk yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Artinya kemungkinan satu orang ada yang menggunakan lebih dari satu ponsel.

Gambar 2. 171
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang menggunakan HP/telepon
di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

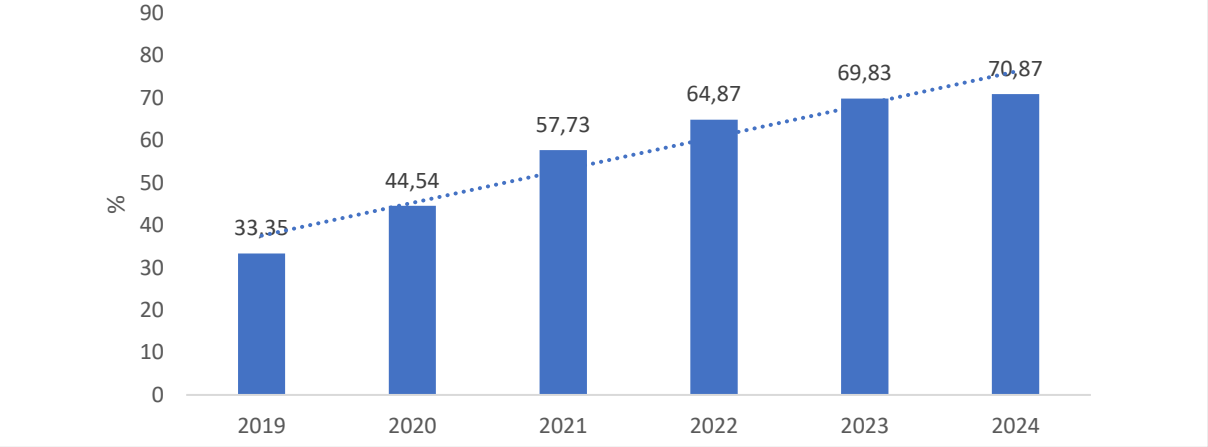
Di Kabupaten Pasangkayu, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 72,12 persen, meningkat menjadi 90,49 persen pada tahun 2023, lalu menurun menjadi 85,56 persen. Artinya masih ada 14,44 persen penduduk usia 5 tahun keatas yang belum memiliki akses terhadap HP/Telepon. Selain itu, masih terjadi ketimpangan antar kelompok pengeluaran, dimana masyarakat dengan 20 persen pengeluaran teratas memiliki akses terhadap HP/telepon sebesar 93 persen, sementara kelompok 40 persen terbawah hanya 86,37 persen.

**c. Proporsi Penduduk Dengan Akses Internet**

Segala aktivitas manusia saat ini semakin banyak yang bergantung pada teknologi digital, terlebih sejak pandemi Covid-19. Mulai dari urusan pekerjaan, sekolah, bepergian, hiburan, hingga belanja untuk kebutuhan sehari-hari pun amat bergantung pada internet. Indonesia juga memainkan peranan penting untuk ekonomi digital di tingkat kawasan. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2025

mendatang diperkirakan sebesar 330 miliar dollar AS dan akan meroket menjadi 1 triliun dollar AS pada 2030. Dari angka tersebut, kontribusi Indonesia diperkirakan sebesar 40 persen dari nilai ekonomi digital di kawasan. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menyumbang 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Internet juga menjadi daya ungkit untuk bangkitnya ekonomi mikro di masyarakat. Pemerintah menargetkan pada 2025 sebanyak 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah masuk ekosistem go digital. Artinya, seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, terutama untuk urusan pemasaran lewat lokapasar Indonesia.

Gambar 2. 172.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Akses dan penggunaan internet merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat literasi digital dan integrasi masyarakat dalam ekonomi berbasis teknologi. Peningkatan jumlah pengguna internet menunjukkan perluasan infrastruktur telekomunikasi, meningkatnya keterjangkauan layanan internet, serta perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan digital. Berdasarkan grafik, persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan signifikan selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019, hanya 33,35 persen penduduk yang mengakses internet secara aktif. Angka ini terus meningkat menjadi 44,54 persen pada tahun 2020, 57,73 persen pada tahun 2021, 64,87 persen pada tahun 2022, 69,83 persen pada tahun 2023, dan mencapai 70,87 persen pada tahun 2024. Tren pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan adopsi internet yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat.

**d. Persentase Dokumen Publik yang Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Secara Online**

Tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan 75 persen dokumen publik telah tersedia dan dapat diakses secara online

oleh masyarakat pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berbasis digital. Ketersediaan dokumen secara daring memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi penting dengan lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, masih terdapat 25 persen dokumen yang belum tersedia secara digital, yang perlu menjadi fokus perbaikan ke depan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih menyeluruh dan merata.

**e. Persentase Layanan Publik yang Dilaksanakan secara Online**

Di era masyarakat yang makin melek digital, memang muncul tuntutan lebih besar lagi terhadap kecepatan pelayanan publik dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Penelitian McKinsey tahun 2020 tentang *Digital Public Service* mengungkapkan kondisi tersebut. Dikatakan, digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. Di Kabupaten Pasangkayu, tahun 2024 sebanyak 85 persen layanan publik telah dilaksanakan secara online, mencerminkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pelayanan publik. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas urusan administrasi kini dapat diakses masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat 15 persen layanan yang belum terdigitalisasi, yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan layanan daring, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses digital.

**f. Indeks Domain Kebijakan SPBE**

Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pasangkayu berada pada angka 2,9 tahun 2024, yang mencerminkan bahwa regulasi, kebijakan, dan pedoman terkait penerapan SPBE sudah mulai terbentuk namun masih perlu diperkuat. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan arah kebijakan untuk mendukung digitalisasi birokrasi, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan indeks ini, diperlukan perbaikan dalam konsistensi regulasi, integrasi lintas sektor, serta pemutakhiran kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik. Penguatan domain kebijakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif di era digital.

**g. Indeks Domain Tata Kelola SPBE**

Indeks domain tata kelola SPBE di Kabupaten Pasangkayu berada pada angka 1,2 tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa tata kelola SPBE masih berada pada tahap sangat dasar. Nilai ini mencerminkan lemahnya koordinasi, belum optimalnya pembentukan tim pengelola SPBE, serta belum tersusunnya strategi dan rencana kerja yang terintegrasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendorong digitalisasi pemerintahan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan kebijakan dan mekanisme kerja yang jelas agar tata kelola SPBE dapat berkembang menuju level yang lebih matang dan terstruktur.

**h. Indeks Domain Manajemen SPBE**

Pada tahun 2024, indeks domain manajemen SPBE Kabupaten Pasangkayu hanya mencapai angka 1,0 menunjukkan bahwa pengelolaan SPBE di daerah ini masih berada pada tahap awal dan belum terstruktur dengan baik. Rendahnya nilai ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan manajemen risiko, pengelolaan perubahan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja SPBE secara sistematis. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup penyusunan rencana manajemen SPBE yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data untuk memastikan tata kelola SPBE yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

**i. Indeks Domain Layanan SPBE**

Sementara itu, indeks domain layanan SPBE di Kabupaten Pasangkayu mencapai nilai 3,69 tahun 2024, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan layanan publik berbasis digital telah berada pada tingkat baik dan terintegrasi. Nilai ini menunjukkan bahwa berbagai jenis layanan sudah tersedia secara elektronik, mudah diakses masyarakat, dan mampu menjawab kebutuhan pengguna secara efektif. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan transformasi digital dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik. Namun demikian, untuk mencapai level pelayanan prima, diperlukan peningkatan kualitas layanan, penguatan keamanan data, serta keterlibatan pengguna dalam perbaikan berkelanjutan berbasis umpan balik masyarakat.

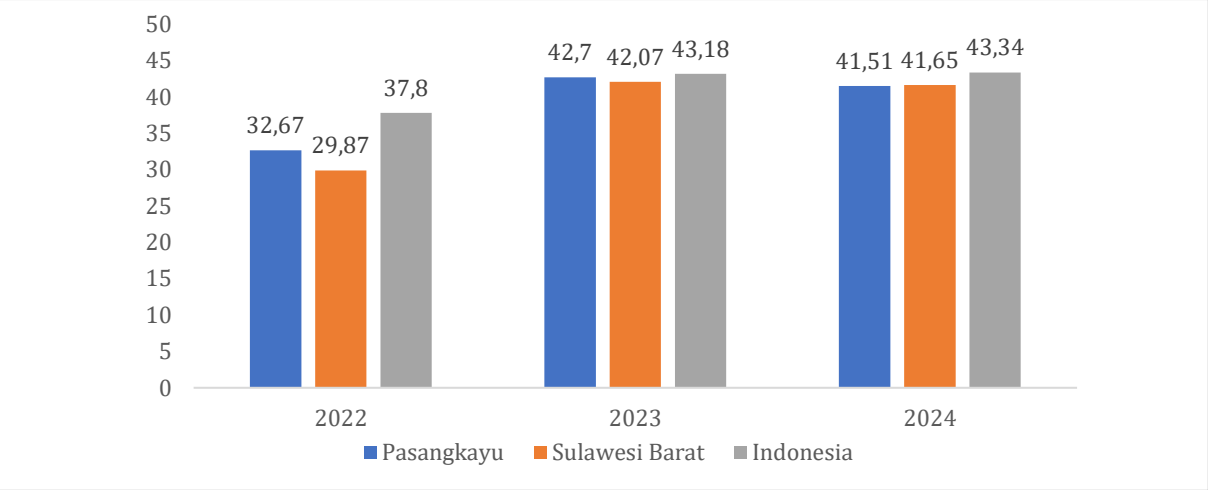
**j. Indeks Masyarakat Digital Indonesia**

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada

forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan signifikan dari 32,67 pada tahun 2022 menjadi 42,7 pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 41,51 (kategori cukup) pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan, secara umum Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren kemajuan dalam adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, Pasangkayu masih berada pada posisi kompetitif, meski pada 2024 sedikit di bawah angka provinsi (41,65). Namun, dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 43,34, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal, menandakan perlunya penguatan dibeberapa komponen utamanya seperti pada aspek pemberdayaan dan pekerjaan.

Gambar 2. 173.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Nasional, 2022-2024




Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, diolah

## K. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

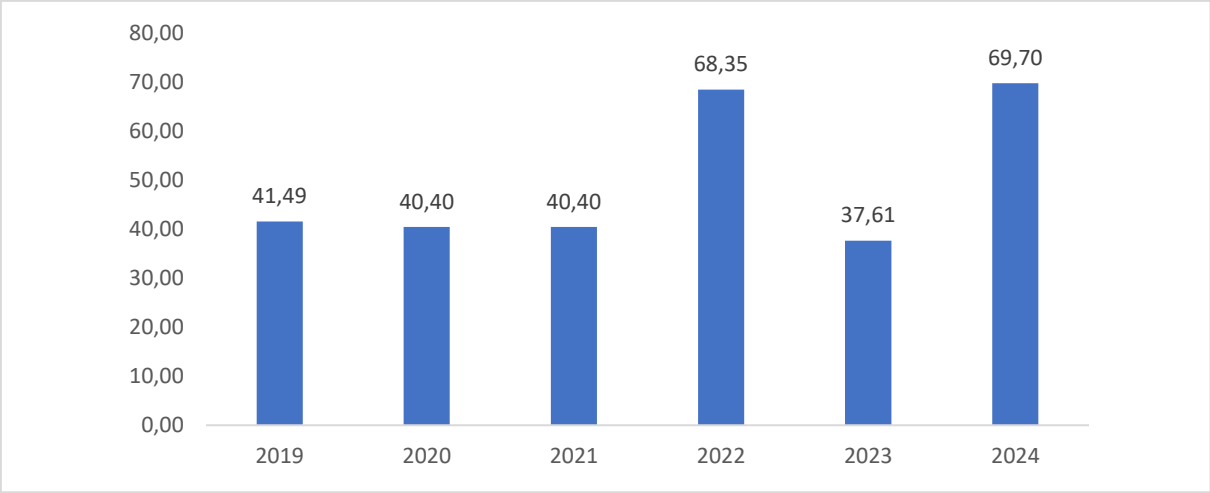
### a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Persentase koperasi aktif mengukur seberapa banyak koperasi yang masih beroperasi secara produktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019, koperasi aktif tercatat sebesar 41,49 persen, lalu mengalami sedikit penurunan menjadi 40,40 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021. Stabilitas angka ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut belum ada peningkatan signifikan dalam aktivitas koperasi, yang

mungkin disebabkan oleh tantangan operasional atau kurangnya inovasi dalam pengelolaan koperasi.

Pada tahun 2022, terjadi lonjakan drastis dalam persentase koperasi aktif, mencapai 68,35 persen, yang menunjukkan adanya pemulihan atau revitalisasi koperasi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh program dukungan pemerintah, digitalisasi usaha, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif. Namun, pada tahun 2023, angka ini kembali turun signifikan menjadi 37,61 persen, yang bisa mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan koperasi, seperti manajemen yang kurang efektif, keterbatasan modal, atau dampak eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 2024, persentase koperasi aktif kembali meningkat menjadi 69,70 persen, menandakan adanya upaya revitalisasi dan dukungan berkelanjutan bagi koperasi di daerah tersebut. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan dan potensi pertumbuhan sektor koperasi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2. 174
Persentase Koperasi yang Aktif di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah

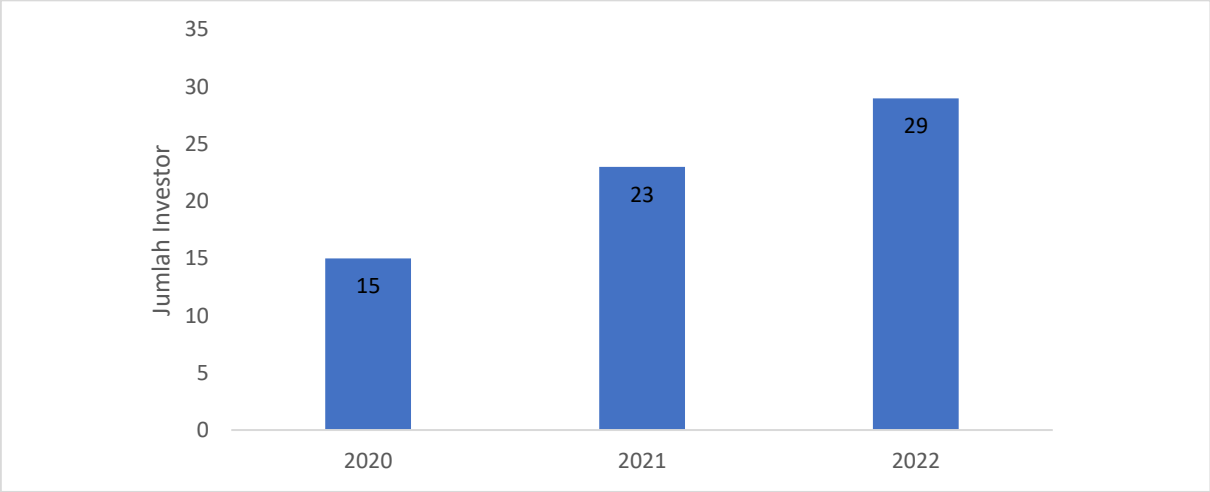
## L. Penanaman Modal

### a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pandemi tidak hanya mengubah perilaku yang kasatmata, seperti menjaga jarak dan mencuci tangan, tetapi juga perilaku yang tidak terlihat seperti berinvestasi. Situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19 membuat lebih banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi. Namun, edukasi diperlukan untuk mengimbangi lonjakan investor baru. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu terus meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 15 investor, meningkat menjadi 23 investor pada tahun 2021, dan mencapai 29 investor pada tahun 2022. Pasca-pandemi, minat investasi nasional dan daerah terdorong oleh tingginya kesadaran masyarakat akan diversifikasi sumber pendapatan

serta pemanfaatan peluang bisnis baru yang muncul dari perubahan pola konsumsi. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan penguatan sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan perdagangan memberikan prospek keuntungan yang lebih menarik bagi investor.

Gambar 2. 175
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2022

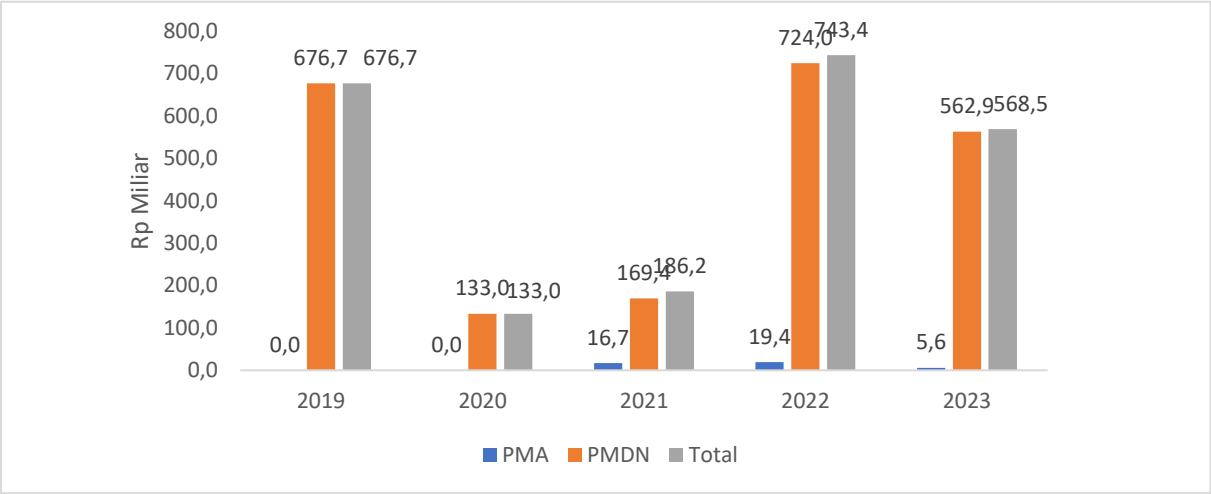



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

**b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Investasi dalam pembangunan memiliki peran penting dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Penelitian "*G20 Global Infrastructure Hub*" menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik pada umumnya, hingga kurang lebih 1,5 kali dalam masa dua hingga lima tahun. Selama periode 2019 hingga 2023, realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pasangkayu cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai PMA dan PMDN mencapai Rp676,7 Miliar, lalu turun menjadi Rp133 Miliar pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 hingga 2022 menujukkan kenaikan menjadi Rp734,4 Miliar, lalu kemudian kembali turun menjadi Rp568,5 Miliar. Penurunan ini disebabkan oleh keputusan *wait and see* oleh investor pada musim Pemilu dan Pilkada. Secara umum, investasi di Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh jenis PMDN dengan kontribusi sekitar rata-rata 97,5 persen per tahun. Artinya 2,5 persen dikontribusikan oleh PMA. Hal ini menunjukkan juga bahwa daya tarik investasi terutama bagi investor asing masih relatif rendah di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa faktor penghambat masuknya investor asing kemungkinan meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung ekspor, ketersediaan tenaga kerja terampil yang masih terbatas, persepsi risiko keamanan atau kepastian hukum, serta minimnya promosi potensi daerah di pasar internasional.

Gambar 2. 176
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023

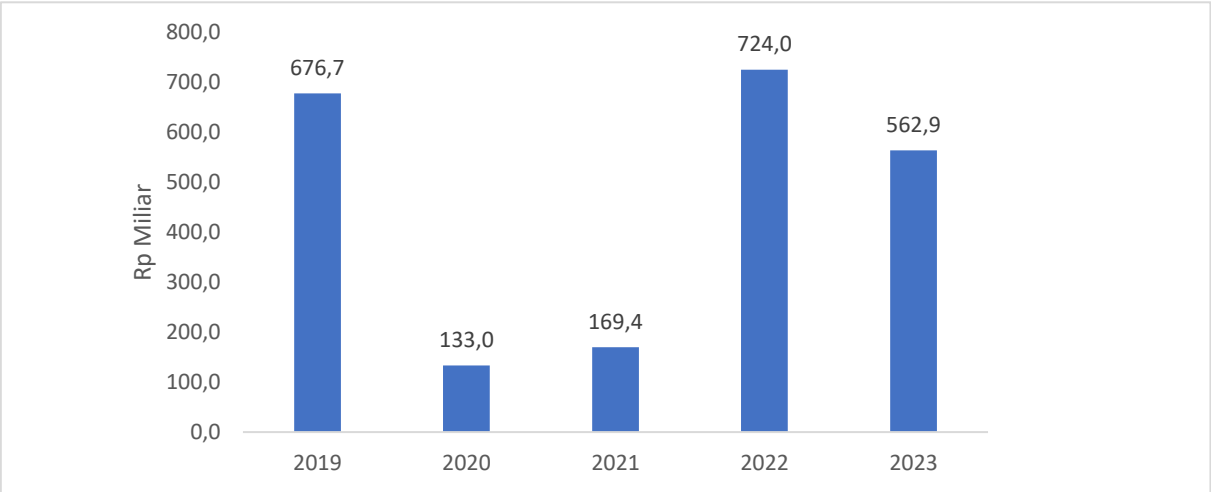



Sumber: BKPM, diolah

**c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**

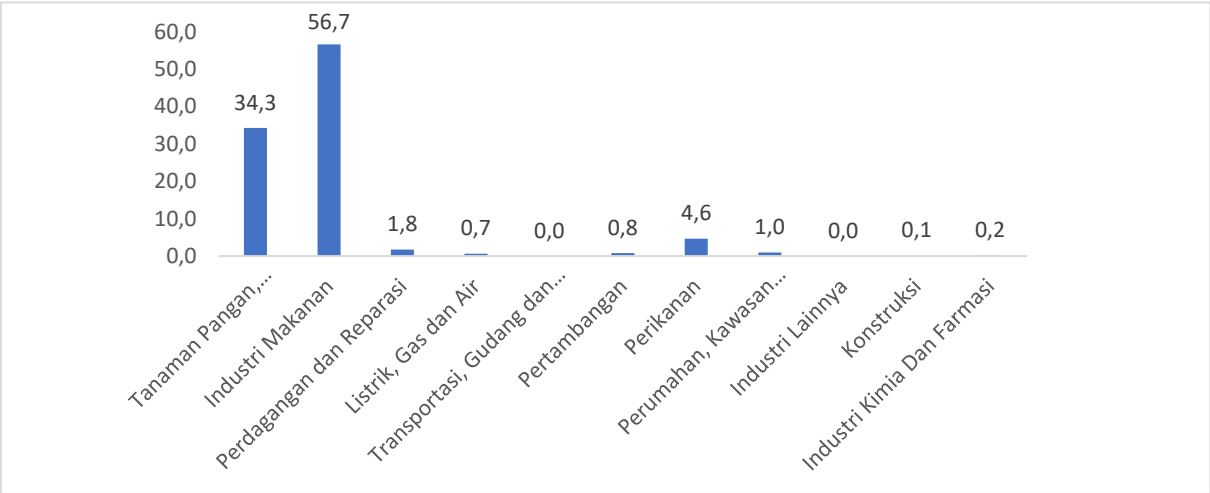
Selama lima tahun terakhir, realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai realisasi PMDN mencapai Rp676,7 Miliar, lalu turun menjadi Rp 133,0 Miliar pada tahun 2020, kemudian kembali meningkat menjadi Rp724 Miliar pada tahun 2022 dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi PMDN turun menjadi Rp562,9 Miliar. Secara total, nilai realisasi PMDN selama periode 2019-2023 mencapai Rp 2,27 Triliun yang sebagian besar disumbang oleh PMDN di sektor tanaman pangan, industri makanan dan perikanan.

Gambar 2. 177.
Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BKPM, diolah

Gambar 2. 178
Porsi Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



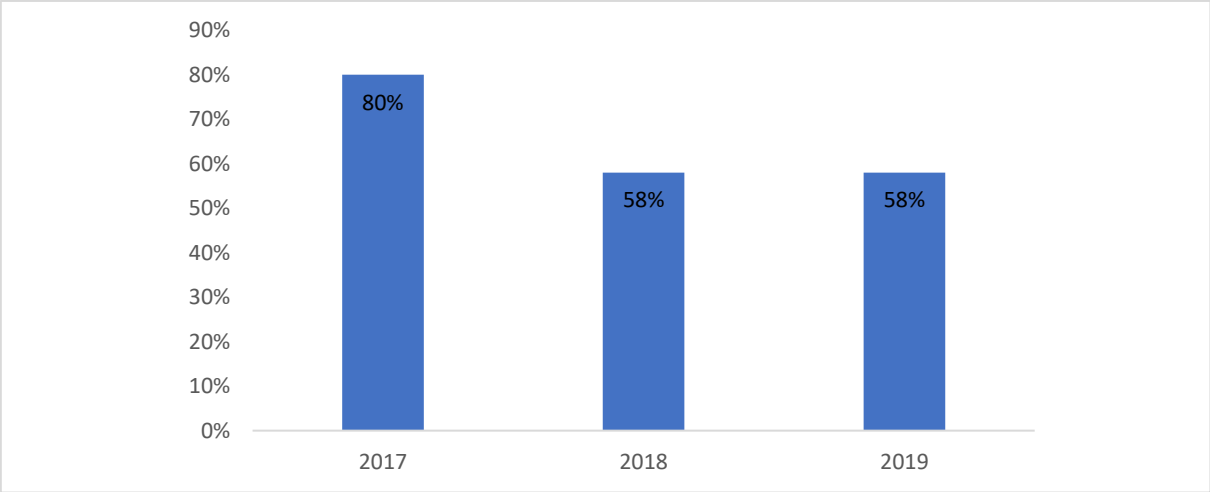

Sumber: BKPM, diolah

## M. Kepemudaan dan Olahraga

### a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan pemuda adalah agenda strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan berperan dalam pembangunan bangsa. Ini menjadi semakin penting dalam konteks bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun mendatang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan peran pemuda dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Organisasi kepemudaan berfungsi sebagai wadah bagi pemuda untuk berkumpul dan bekerja sama, mendukung cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Organisasi pemuda di tingkat daerah sangat penting karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan dan berkontribusi pada pembangunan. Namun, dalam lima tahun terakhir, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017, hanya 80 persen organisasi pemuda yang aktif, dan angka ini turun menjadi 58 persen pada tahun 2019. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial terutama dalam kegiatan pembangunan kepemudaan.

Gambar 2. 179
. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



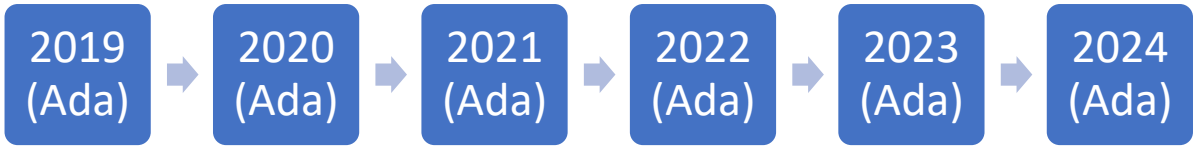

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, diolah

## N. Statistik

### a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan elemen kunci dalam siklus perencanaan pembangunan, karena ketersediaannya sangat penting untuk merumuskan masalah dan melakukan monitoring serta evaluasi. Data harus mudah diakses dan komprehensif, mencakup semua indikator pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah dan data mikro sektoral. Dalam menjalankan tahapan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah memanfaatkan sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu contoh terbaik adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun bukan inisiatif pemerintah daerah, SIPD sangat membantu dalam memperbaiki dan memperbarui data, sehingga mudah diakses saat dibutuhkan. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu telah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi.

Gambar 2. 180
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



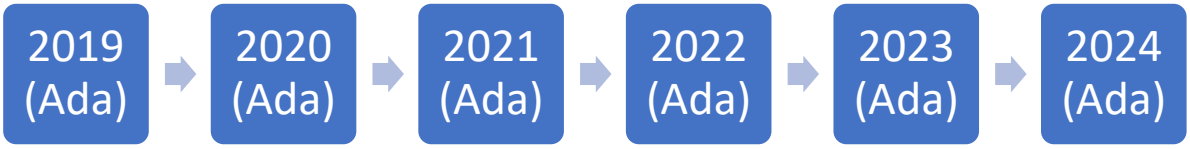

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

### b. Buku Kabupaten dalam Angka

Salah satu publikasi penting dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu adalah Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka. Publikasi ini merupakan referensi utama bagi

perencana dan pengambil kebijakan daerah karena menyediakan data yang komprehensif. Buku ini mencakup berbagai informasi, termasuk kondisi geografi dan iklim, struktur pemerintahan, serta perkembangan sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, buku ini juga menyajikan data perbandingan kondisi perekonomian antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka telah diterbitkan secara berkala dari tahun 2019 hingga 2024.

Gambar 2. 181
Buku Kabupaten dalam Angka di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**c. Buku PDRB**

Publikasi BPS Kabupaten Pasangkayu yang juga sangat penting dan sering digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku ini terbagi menjadi dua, yaitu PDRB berdasarkan lapangan usaha dan PDRB berdasarkan pengeluaran. PDRB berdasarkan lapangan usaha memuat data PDRB dari 17 sektor usaha, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Data ini mencakup kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dan pendapatan per kapita, disajikan dalam bentuk runtun waktu lima tahunan. PDRB berdasarkan pengeluaran memuat konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, inventori dan neraca perdagangan barang dan jasa di tingkat Kabupaten. Buku in tersedia dan mudah diakses melalui website BPS. BPS Kabupaten Pasangkayu selalu menyajikan data ini dalam bentuk runtun waktu lima tahunan setiap kali publikasi.

Gambar 2. 182
Buku PDRBdi Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**d. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Kebijakan**

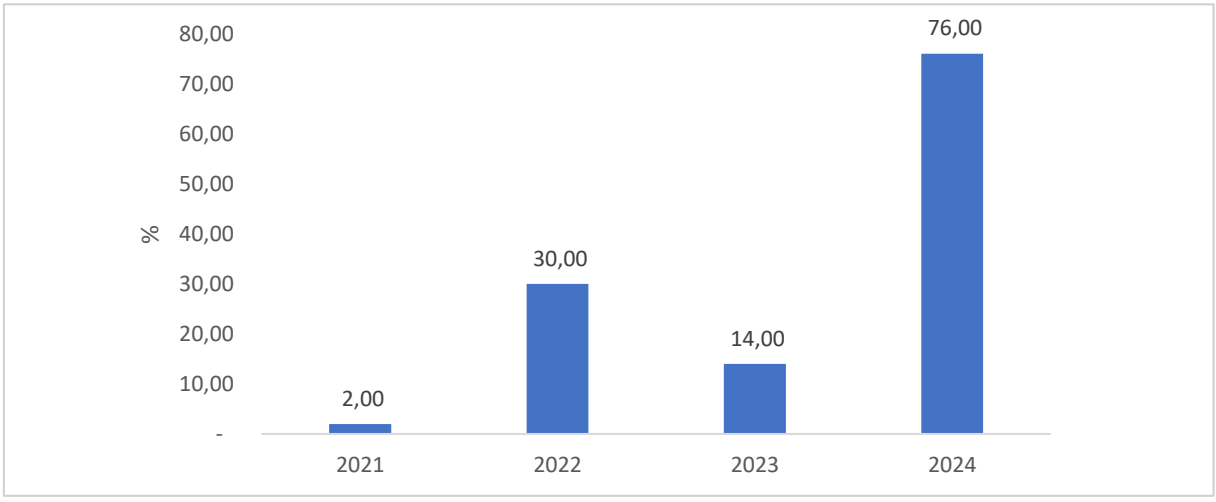
Pada tahun 2024, sebanyak 50 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasangkayu telah menggunakan data statistik dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Angka ini mencerminkan bahwa separuh perangkat daerah sudah mulai mengintegrasikan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*) dalam tata kelola pemerintahan. Namun, capaian ini juga menandakan bahwa masih terdapat setengah dari OPD yang belum secara optimal memanfaatkan data statistik dalam pengambilan keputusan, sehingga potensi terjadinya kebijakan yang tidak tepat sasaran masih cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas SDM, ketersediaan data yang mudah diakses, serta komitmen pimpinan untuk mendorong budaya kerja berbasis data di seluruh lini pemerintahan.

**O. Persandian**

**a. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunIkasi Perangkat Daerah**

Penggunaan sandi dalam komunikasi oleh perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, hanya 2% perangkat daerah yang telah menerapkan sandi dalam komunikasi. Angka ini meningkat pesat menjadi 30% pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 76,00 persen di tahun 2024. Ke depannya, konsistensi dalam penggunaan sandi perlu dijaga dan ditingkatkan agar keamanan komunikasi di lingkungan pemerintahan semakin optimal.

Gambar 2. 183
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi
di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**b. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Persandian dalam Perencanaan dan Kebijakan**

Pada tahun 2024, sekitar 70 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasangkayu telah menggunakan sistem persandian dalam proses perencanaan dan kebijakan,

yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap aspek keamanan informasi dan perlindungan data strategis pemerintahan. Penggunaan sistem persandian merupakan langkah penting dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data, terutama dalam era digital yang penuh dengan potensi ancaman siber. Meskipun capaian ini cukup baik, masih terdapat 30 persen OPD yang belum menerapkan sistem persandian, sehingga perlu didorong percepatan implementasinya secara menyeluruh melalui pelatihan, penguatan regulasi, serta penyediaan infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai.

**P. Kebudayaan**

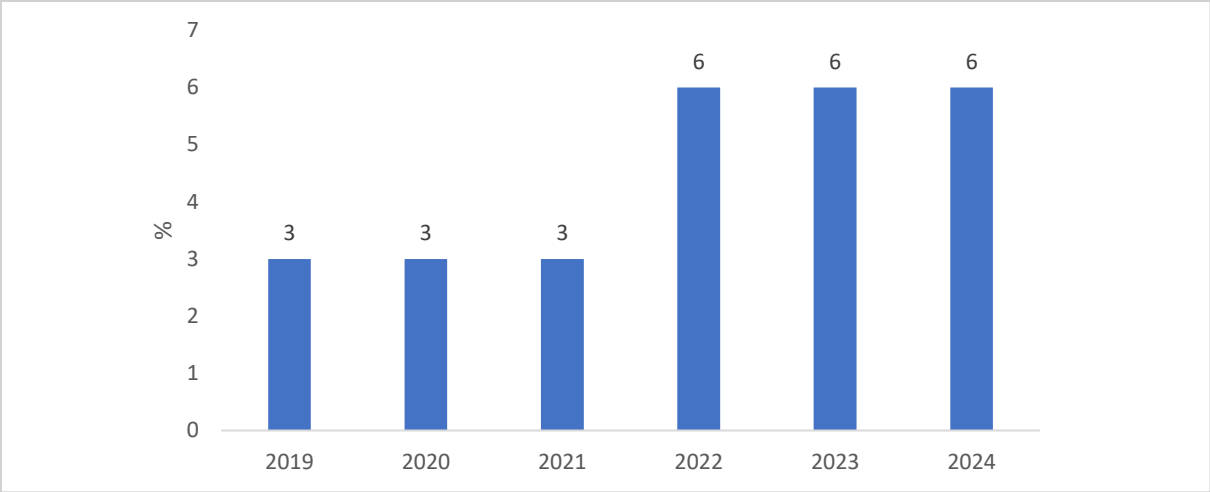
**a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga kebiasaan masyarakatnya, yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Seiring dengan berjalannya waktu, ragam kebudayaan masyarakat dirangkum dalam sebuah kegiatan seni budaya, yang disebut dengan festival budaya. Kegiatan ini merupakan gabungan dari rangkaian budaya, juga meliputi perasaan untuk merayakan hal yang sama. Biasanya pelaksanaan festival berlangsung setahun sekali, dengan rangkaian kegiatan yang panjang, serta memuat atraksi budaya, kegiatan yang menginspirasi, atau hanya unjuk budaya kepada turis yang datang. Penyelenggaraan festival umumnya memiliki tema-tema yang menarik dan berbeda setiap tahunnya. Festival juga erat kaitannya dengan tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang menjadi kebanggaan daerahnya. Selama lima tahun terakhir, hanya ada satu kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya yakni pada tahun 2019. Selama 2020 hingga 2023 tidak terdapat kegiatan festival seni dan budaya.

**b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**

Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Pada tahun 2024, terdapat 6 Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah daerah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.

Gambar 2. 184
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**c. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**

Karya budaya adalah sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor, dari letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Selama periode 2019 hingga 2023 tidak ada karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Pasangkayu

**d. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**

Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dikelola secara terpadu. Selama lima tahun terakhir, hanya ada satu cagar budaya yang dikelola secara terpadu yakni pada tahun 2019. Selama 2020 hingga 2023 tidak ada cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

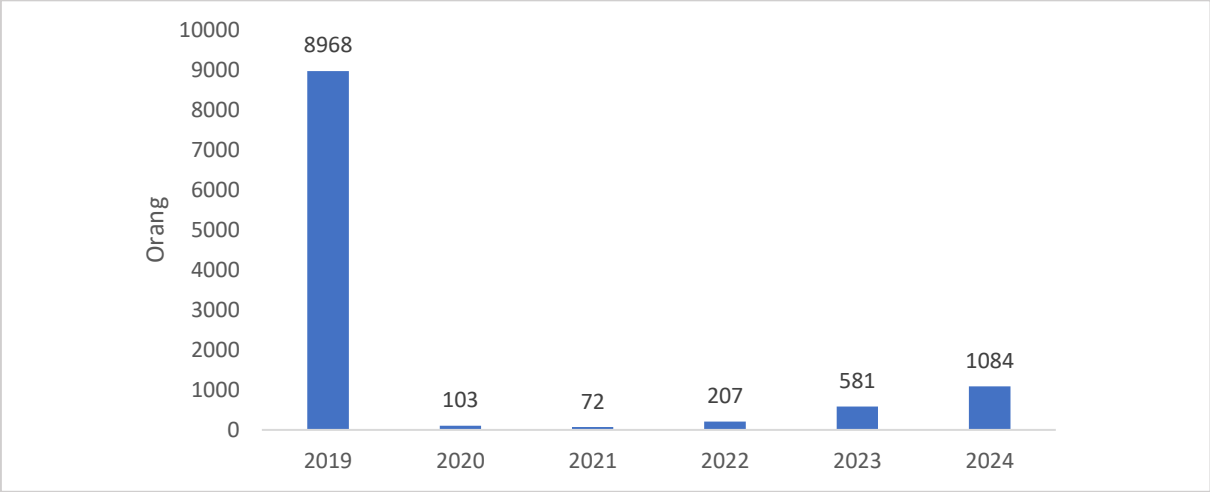
**Q. Perpustakaan**

**a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Transformasi perpustakaan diperlukan untuk memperkuat perannya sebagai sarana pembelajaran. Pemanfaatan sumber bacaan dengan menggunakan teknologi informasi diharapkan membantu masyarakat dalam menjawab kebutuhan sehari-hari. Peran perpustakaan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Perbaikan kualitas layanan perpustakaan dan tingginya minat baca masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tercatat 8969 pengunjung, menurun drastis menjadi 103 orang pada tahun 2020, dan 72 orang pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, lalu naik menjadi 581 pengunjung di tahun 2023 dan 1084 di tahun 2024. Angka ini masih

mencerminkan rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan dan budaya literasi, menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan minat, terutama di kalangan pelajar, terhadap perpustakaan.

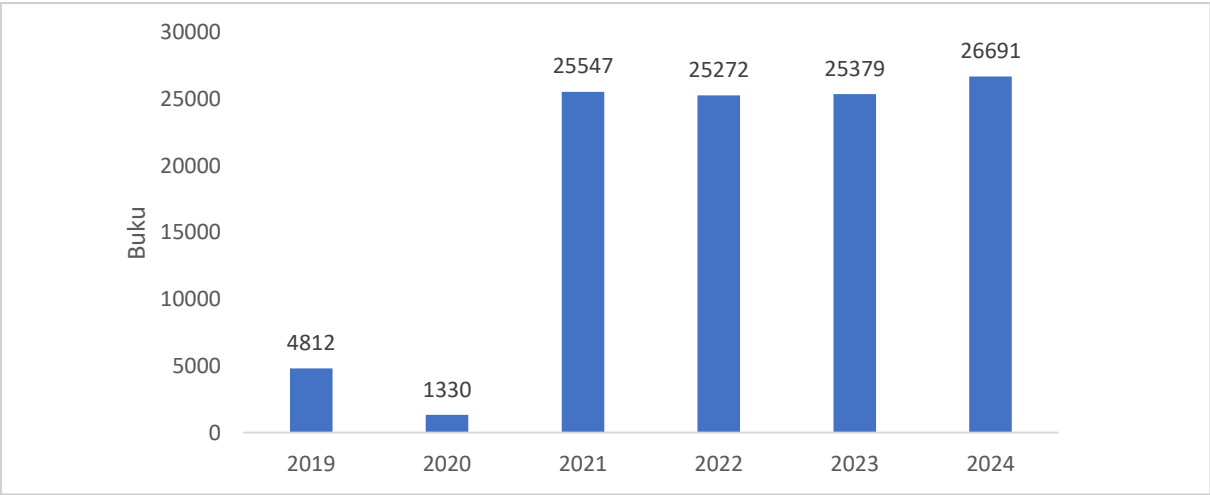
Gambar 2. 185
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

**b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Gambar 2. 186
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

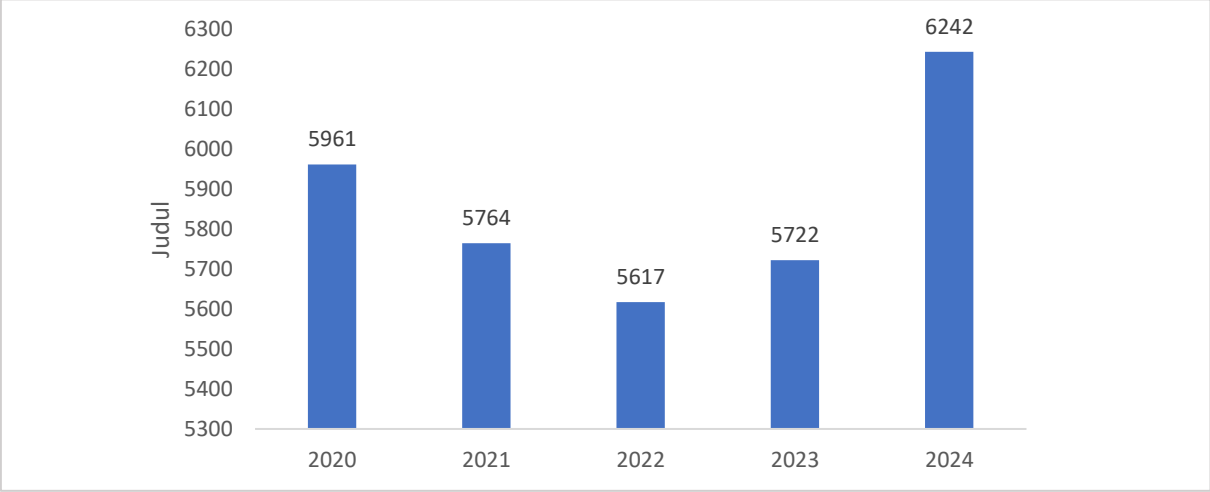
Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, perpustakaan harus menyediakan koleksi buku yang lebih beragam. Oleh karena itu, pustakawan perlu fokus pada penambahan koleksi dan inventarisasi yang baik. Selama lima tahun terakhir, koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan berarti. Pada tahun 2019, tersedia 4,812 eksamplar, meningkat menjadi 26.691 eksemplar pada tahun 2024. Peningkatan koleksi buku ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Penambahan koleksi buku mencerminkan

upaya pengembangan pelayanan oleh pustakawan yang berhasil menarik lebih banyak pengunjung.

**c. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**

Selain jumlah buku, variasi judul koleksi buku juga krusial bagi pustakawan untuk diperhatikan. Pengembangan dan inventarisasi judul yang baik penting untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai usia. Selama empat tahun terakhir, jumlah judul buku di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019, terdapat 5.961 judul, turun menjadi 5.617 judul pada tahun 2022, dan bertambah lagi menjadi 5.722 judul pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah koleksi buku kembali naik signifikan menjadi 6.242. Kenaikan jumlah judul ini mencerminkan perbaikan dalam koleksi buku perpustakaan.

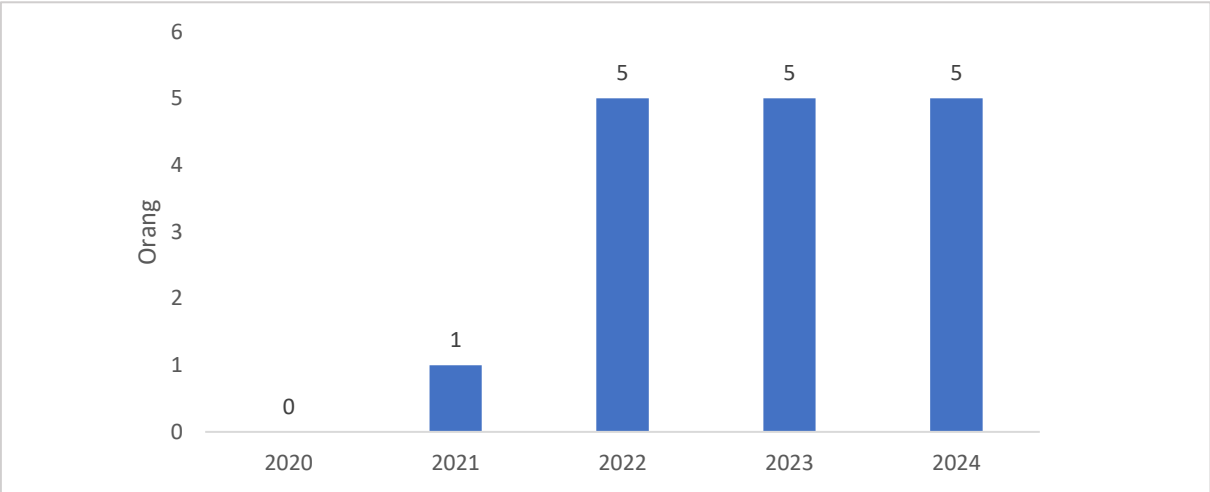
Gambar 2. 187
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

**d. Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

Gambar 2. 188
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

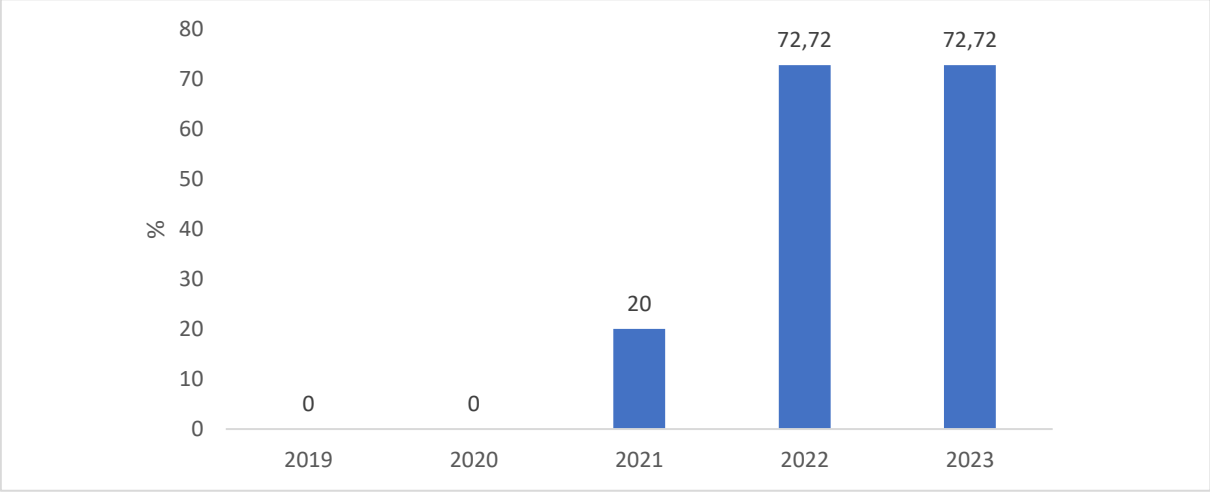
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, belum ada tenaga bersertifikat, namun pada 2021 mulai terdapat satu orang yang memiliki sertifikasi. Peningkatan drastis terjadi pada 2022, di mana jumlah tenaga bersertifikat mencapai lima orang, dan angka ini tetap stabil hingga 2024.

## R. Kearsipan

### a. Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian adalah aspek krusial dalam perencanaan pembangunan, karena teknokrat perlu menilai pencapaian masa lalu yang terdokumentasi dalam arsip. Mengingat pentingnya pengarsipan, berbagai regulasi telah disusun, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksana, untuk menetapkan standar baku pengarsipan dari tingkat nasional hingga daerah. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mencapai 72,72 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 21 persen. Hali ini adanya perbaikan dalam memenuhi standar pengarsipan yang baik. Pengarsipan yang baku sangat penting untuk memastikan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta memperbaiki sistem kearsipan.

Gambar 2. 189.
Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

### b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Penerapan arsip elektronik atau e-arsip sudah mulai banyak dilirik oleh Pemerintah Daerah. Nyatanya ini memang sangat diperlukan, karena selain mampu menyediakan data yang terintegrasi dan cepat, juga dapat meminimalisir penggunaan kertas. Pemerintah saat ini tengah merasakan urgensi penerapan e-arsip, sehingga selain menyiapkan infrastruktur juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kearsipan melalui pengadaan formasi arsiparis yang

lebih banyak pada saat rekrutmen pegawai. Dari perspektif tata kelola pemerintahan ada beberapa hal perlu menjadi perhatian yakni bagaimana menciptakan SDM kearsipan yang responsif terhadap perkembangan tren, pelaksanaan transformasi digital, kemampuan penyajian data yang solid dan berkesinambungan, dan pengembangan infrastruktur kearsipan. Selama tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Pasangkayu tidak sama sekali melakukan pengembangan SDM pengelola kearsipan.

**c. Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan sesuai dengan Ketentuan Retensi Arsip**

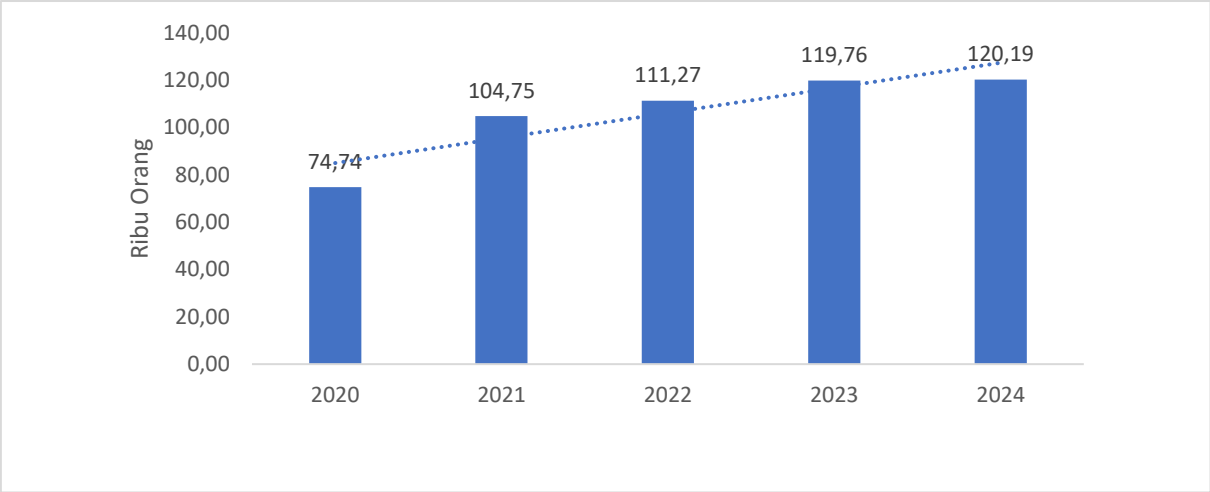
Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan retensi arsip di Kabupaten Pasangkayu baru mencapai 35 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa mayoritas arsip belum dikelola secara optimal sesuai standar kearsipan yang berlaku. Kondisi ini berisiko terhadap hilangnya dokumen penting yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, pelayanan publik, serta pertanggungjawaban administrasi. Rendahnya angka ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan kapasitas OPD dalam pengelolaan arsip, termasuk penerapan sistem klasifikasi, retensi, serta penyelamatan arsip vital. Upaya percepatan digitalisasi arsip, pelatihan SDM, dan penguatan peraturan internal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan dan keberlanjutan informasi pemerintahan.

**2.1.4.4.3. Layanan Urusan Pilihan**

**A. Pariwisata**

**a. Kunjungan Wisata**

Gambar 2. 190
Kunjungan Wisata di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu, memiliki potensi pariwisata yang besar. Terdapat 64 objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasangkayu. Selama enam tahun 2020 hingga 2023, jumlah kunjungan menunjukkan

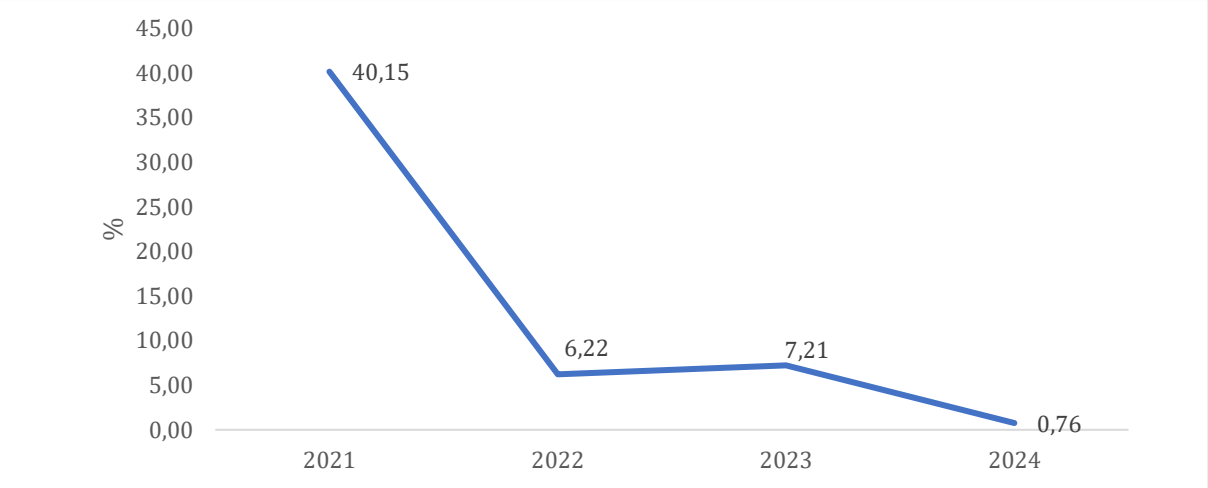
tren positif. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan sebesar 74.471 orang terus naik menjadi 119.757 orang pada tahun 2023. Dari total kunjunagn tersebut terdri dari 119.747 kunjungan dari wisatawan nusantara dan 10 kunjungan dari wisatawan mancanegara. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan kembali naik ke angka 120.192 orang, yang keseluruhan adalah wisatawan nusantara.

**b. Lama Kunjungan Wisata**

Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah merupakan indikator penting untuk menilai dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Namun, ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, karena rendahnya rata-rata lama menginap dapat mengurangi peluang wisatawan untuk berbelanja. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Pasangkayu selama periode 2021-2023 hanya satu hari. Beberapa faktor berkontribusi pada rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan seperti daya tarik destinasi yang masih rendah. Selain itu, kesadaran wisata dari masyarakat lokal juga berperan penting termasuk keramahan atau tidak menyambut wisatawan dengan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

**c. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**

Gambar 2. 191.
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

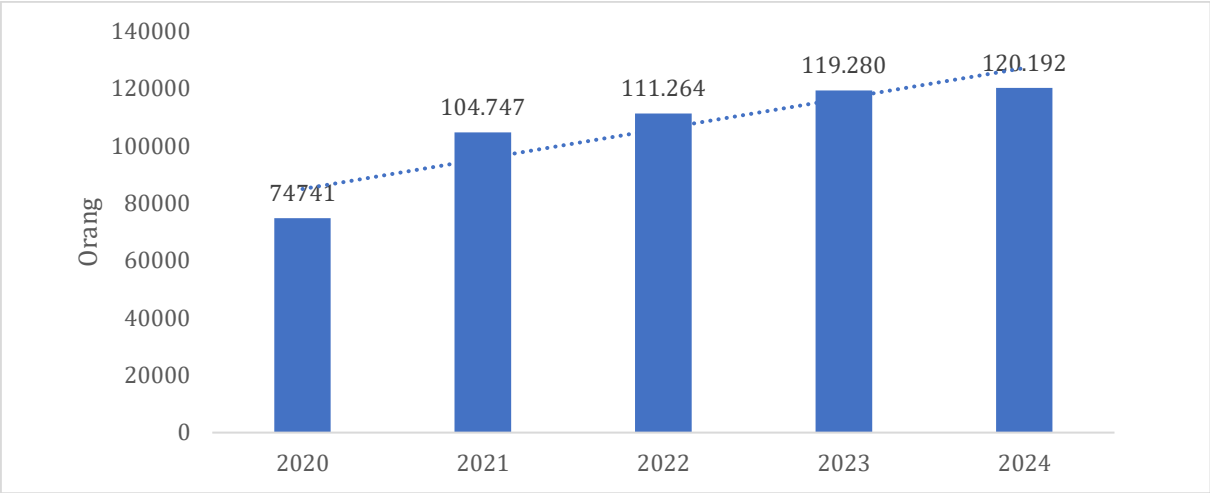
Pertumbuhan jumlah wisatawan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat lonjakan signifikan sebesar 40,15 persen, kemungkinan besar sebagai efek pemulihan pascapandemi COVID-19. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berlanjut secara konsisten, dengan angka menurun menjadi 6,22 persen ditahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 7,21 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan kembali melambat drastis menjadi hanya 0,76 persen, mengindikasikan perlambatan minat kunjungan wisatawan atau adanya hambatan struktural dalam pengembangan sektor pariwisata. Statistik ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi

promosi, perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata, serta diversifikasi atraksi wisata agar sektor ini dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan.

**d. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara**

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara masih mendominasi di Kabupaten Pasangkayu dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Dari 74.741 kunjungan pada tahun 2020, angka tersebut melonjak menjadi 104.747 pada 2021, mencerminkan pemulihan signifikan setelah pandemi. Kenaikan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan 111.264 kunjungan pada tahun 2022, 119.280 pada tahun 2023, dan mencapai 120.192 pada tahun 2024. Meski laju pertumbuhannya melambat, tren ini tetap menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi yang kuat sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Untuk menjaga momentum ini, diperlukan penguatan promosi pariwisata, peningkatan kualitas destinasi, serta penyediaan infrastruktur dan layanan yang lebih ramah wisatawan.

Gambar 2. 192
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024

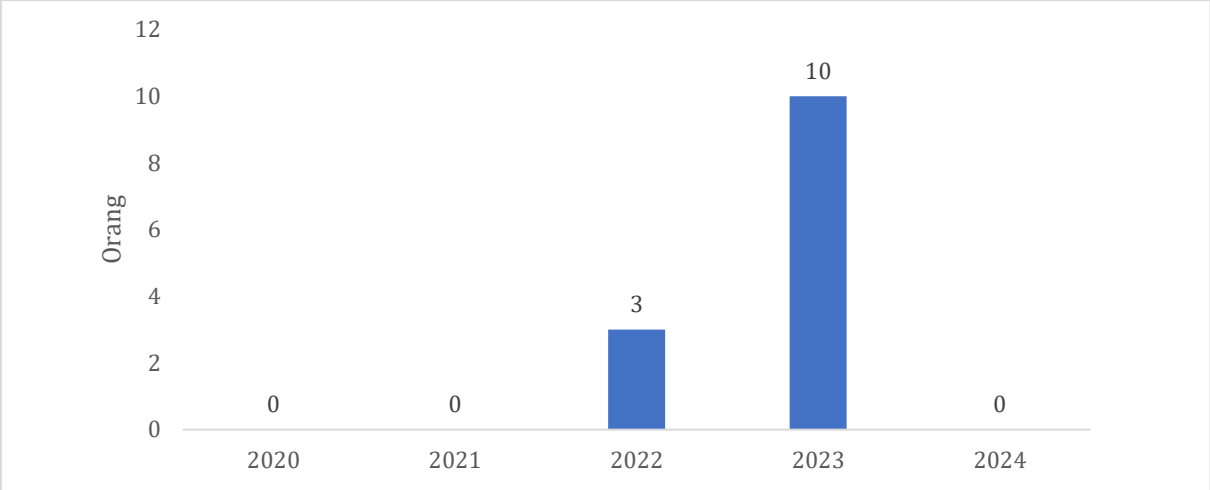



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**e. Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing**

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Pasangakyu masih sangat terbatas dan belum menunjukkan tren yang stabil. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak tercatat adanya kunjungan dari wisatawan asing, kemungkinan besar akibat pembatasan perjalanan internasional selama masa pandemi COVID-19. Tahun 2022 mulai mencatat kunjungan sebanyak 3 orang, meningkat menjadi 10 orang pada 2023, namun kembali turun ke angka nol pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa destinasi di Kabupaten Pasangkayu belum menjadi tujuan wisata yang dikenal di pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam memperkuat daya tarik wisata, promosi ke pasar global, serta penyediaan infrastruktur dan layanan yang sesuai dengan standar internasional agar sektor wisata mancanegara dapat mulai berkembang.

Gambar 2. 193
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

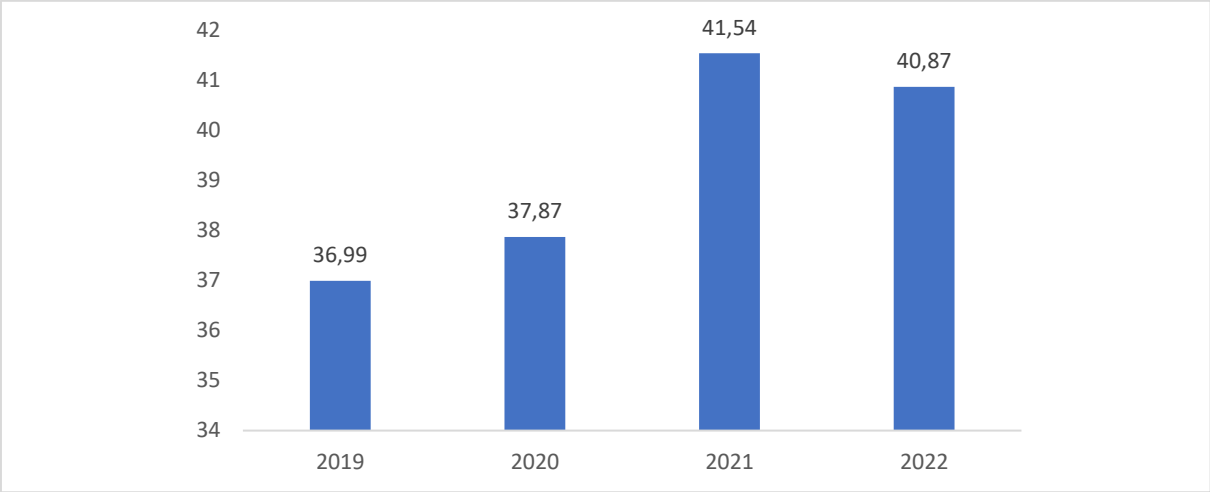
## B. Pertanian

### a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yang dikarunia sumber daya alam melimpah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Pasangkayu termasuk salah satu penyumbang ekonomi terbesar hingga 40,87 persen pada tahun 2022. Namun capaian tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 41,64 persen. Dalam empat tahun terakhir ini, pengembangan bidang pertanian/perkebunan di Kabupaten Pasangkayu memiliki beberapa hambatan, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, serta kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.

Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yang dikarunia sumber daya alam melimpah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Pasangkayu termasuk salah satu penyumbang ekonomi terbesar hingga 40,87 persen pada tahun 2022. Namun capaian tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 41,54 persen. Dalam empat tahun terakhir ini, pengembangan bidang pertanian/perkebunan di Kabupaten Pasangkayu memiliki beberapa hambatan, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, serta kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.

Gambar 2. 194
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022

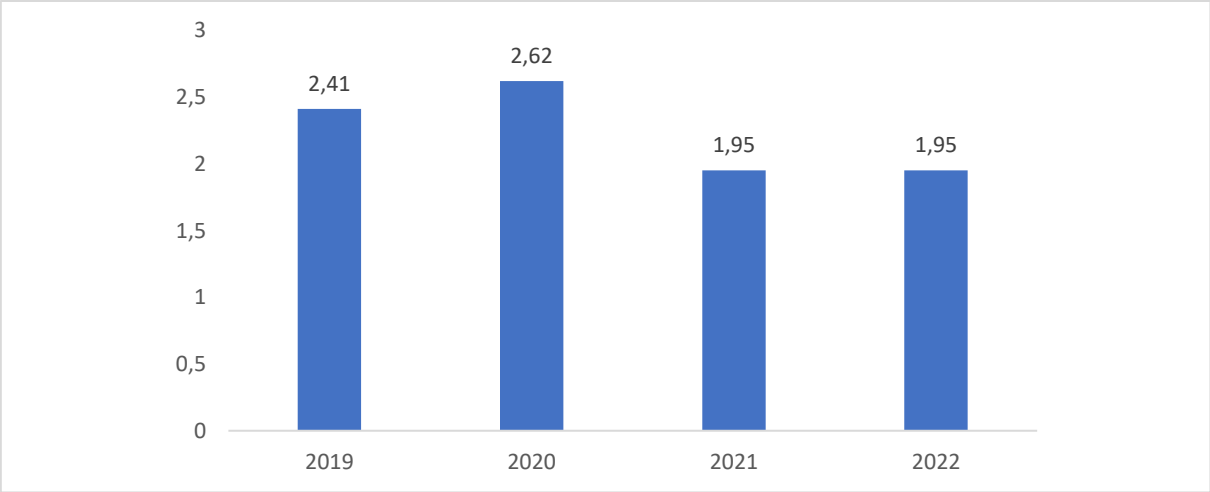



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**b. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB**

Tanaman palawija disebut sebagai solusi terbaik dan memiliki fungsi utama sebagai tanaman rotasi saat musim kemarau. Palawija adalah tanaman selain padi yang biasa ditanam di sawah atau di ladang. Tanaman palawija merupakan tanaman hasil panen kedua di samping padi. Di Kabupaten Pasangkayu tanaman palawija terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Peran sub sektor pertanian ini terhada PDRB pada tahun 2022 mencapai 1,95 persen. Capaian ini menurun dari tahun 2020 yang sempat mencapai 2,62 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh produksi yang turun akibat serangan hama dan konversi lahan.

Gambar 2. 195.
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022



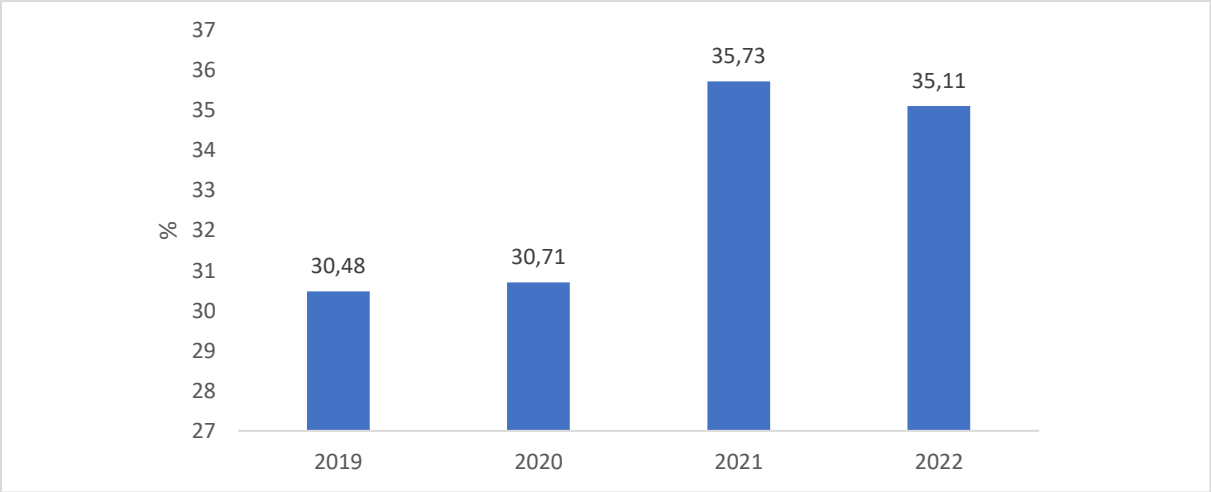

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**c. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB**

Penyumbang utama sektor pertanian secara umum terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu yakni sub sektor perkebunan dengan porsi sekitar 35,11 persen terhadap PDRB pada

tahun 2022. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,73 persen. Tanaman perkebunan yang banyak menyumbang perekonomi Kabupaten Pasangkayu yakni kelapa sawit, lalu disusul kakao dan juga kelapa. Luas area tanaman perkebunan kelapa sawit mencapai 59,933 hektar dari perkebunan rakyat. Kemudian luas perkebunan untuk Kakao dan Kelapa masing-masing 12.804 hektar dan 4.753 hektar.

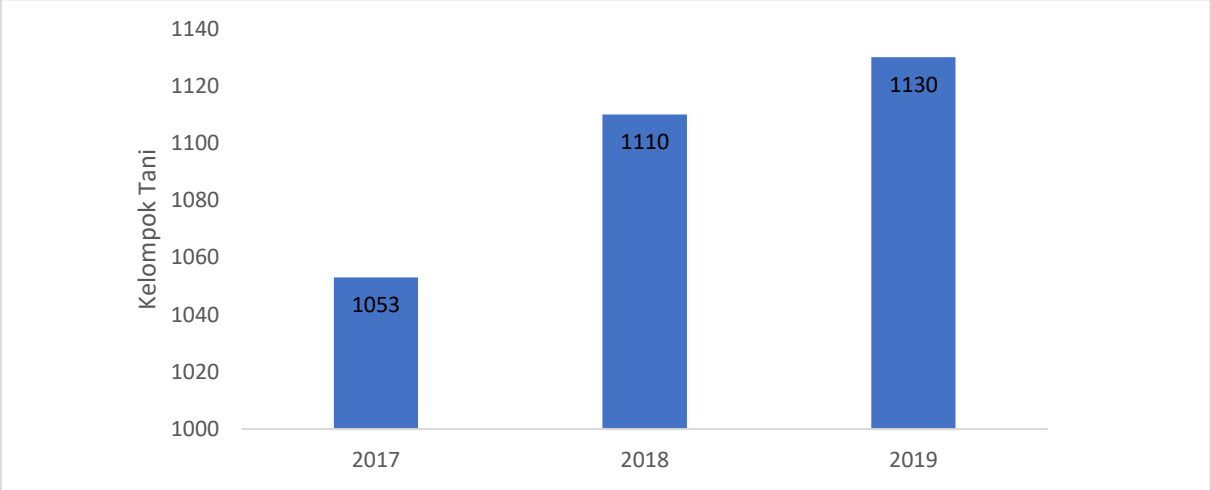
Gambar 2. 196.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2022




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**d. Cakupan Bina Kelompok Petani**

Gambar 2. 197
Jumlah Kelompok Tani yang Di Bina di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019




Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu aktif dalam pembinaan kelompok tani, seperti terlihat dari peningkatan jumlah kelompok tani binaan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, terdapat 1.053 kelompok tani yang dibina, dan jumlah ini meningkat menjadi 1.130 kelompok pada tahun 2019. Pembinaan ini meliputi penguatan kelompok tani menjadi

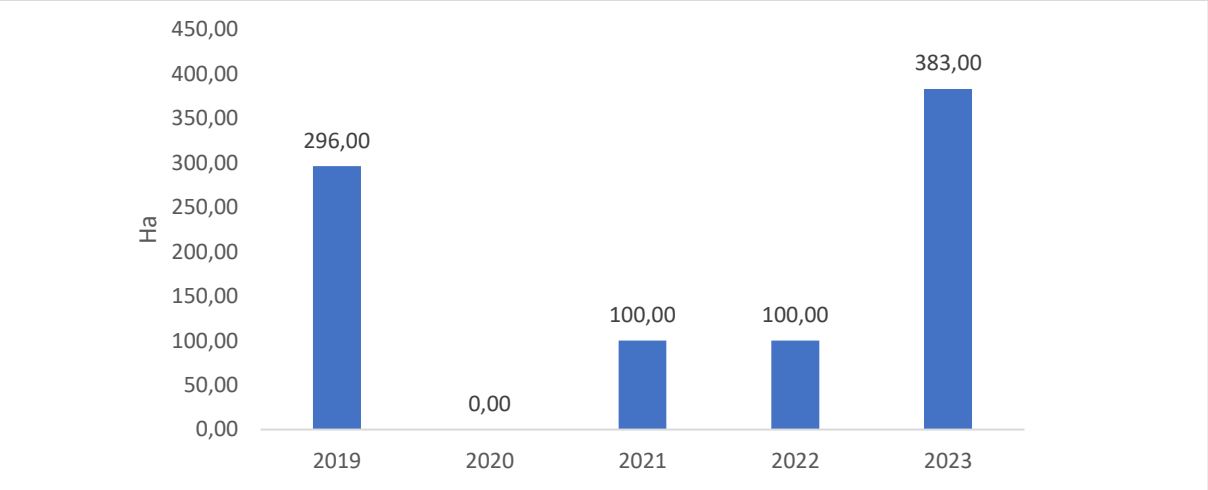
kelembagaan yang kuat dan mandiri, peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan usaha tani, serta penilaian kelas kemampuan kelompok tani.

## C. Kehutanan

### a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hal ini juga dilakukan agar Kabupaten Pasangkayu terhindar dari bencana hidrologis seperti kekeringan yang dapat berakibat pada bencana kemanusiaan. Selama lima tahun terakhir, luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 296 Ha, lalu turun menjadi 100 Ha pada tahun 2021 dan 2022, kemudian naik kembali menjadi 383 Ha pada tahun 2023.

Gambar 2. 198
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

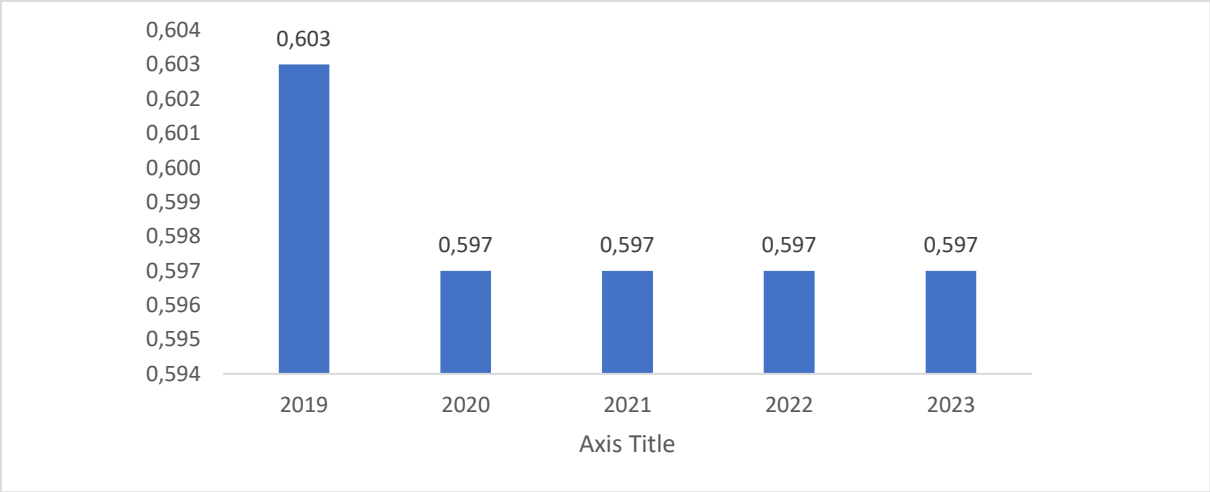
### b. Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di Kabupaten Pasangkayu cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan tercatat 0,603, lalu kemudian turun menjadi 0,597. Penurunan ini menunjukkan turunnya peran kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati.

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di Kabupaten Pasangkayu cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan tercatat 0,603, lalu kemudian turun

menjadi 0,597. Penurunan ini menunjukkan turunnya peran kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati.

Gambar 2. 199
Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

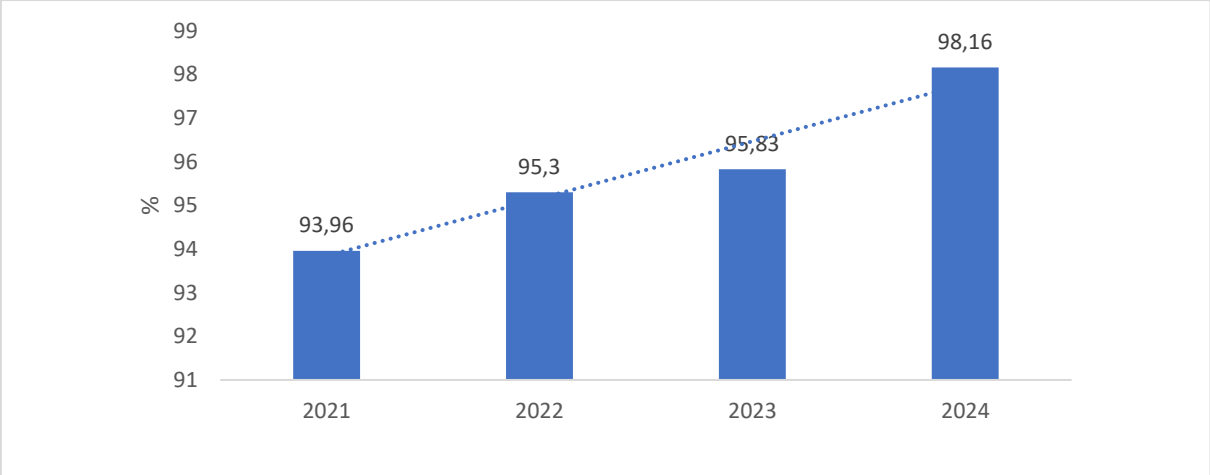
## D. Energi dan Sumber Daya Mineral

### a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN

Akses listrik merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, 93,96% rumah tangga telah menggunakan listrik PLN, dan angka ini terus meningkat menjadi 95,3% pada 2022, 95,83% pada 2023, hingga mencapai 98,16% pada 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan upaya pemerintah dan PLN dalam memperluas jaringan listrik serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

Faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain ekspansi jaringan listrik ke daerah terpencil, peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan listrik, serta adanya program subsidi dan bantuan elektrifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat sekitar 1,84% rumah tangga yang belum terjangkau listrik PLN. Untuk mencapai cakupan 100%, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur listrik di wilayah yang masih belum teraliri, meningkatkan kualitas pasokan agar lebih andal, serta mengembangkan energi terbarukan sebagai solusi bagi daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Pasangkayu dapat menikmati listrik yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Gambar 2. 200
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

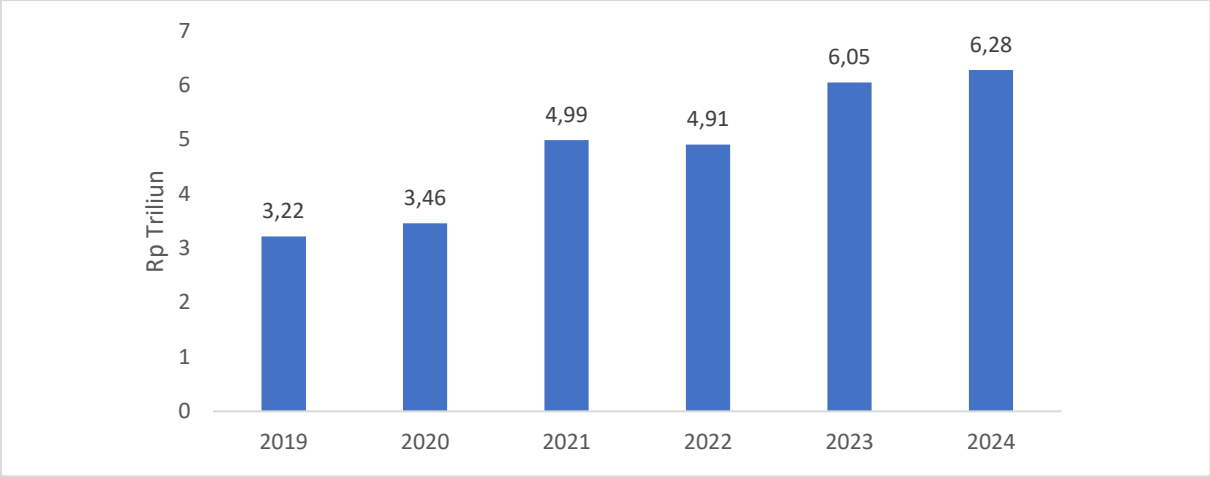
## E. Perdagangan

### a. Ekspor Bersih perdagangan

Aktivitas perdagangan antar daerah dapat diukur melalui volume dan nilai ekspor-impor barang dan jasa. Dalam PDRB sisi pengeluaran, impor barang merupakan komponen yang mengurangi nilai tambah. Jika impor melebihi ekspor, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan sebaliknya. Selisih positif antara ekspor dan impor disebut surplus neraca perdagangan, sedangkan selisih negatif disebut defisit. Sebagai daerah dengan perekonomian yang berorientasi ekspor terutama CPO, Kabupaten Pasangkayu mencatatkan net ekspor positif setiap tahunnya, menandakan bahwa daerah ini surplus untuk neraca perdagangan. Nilai net ekspor di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, net ekspor tercatat sebesar Rp3,22 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp3,46 triliun pada 2020. Pertumbuhan yang lebih pesat terlihat pada tahun 2021, di mana net ekspor mencapai Rp4,99 triliun, meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi Rp4,91 triliun pada 2022. Namun, tren pemulihan kembali terlihat pada 2023 dan 2024 dengan peningkatan berturut-turut menjadi Rp6,05 triliun dan Rp6,28 triliun.

Meskipun tren ini menunjukkan perkembangan positif, fluktuasi yang terjadi pada 2022 mengindikasikan adanya faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi perdagangan, seperti perubahan harga komoditas global, kebijakan perdagangan, atau kendala dalam distribusi ekspor. Untuk memastikan pertumbuhan net ekspor yang lebih stabil dan berkelanjutan, diperlukan strategi diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan kerja sama perdagangan dengan pasar global.

Gambar 2. 201
Net Ekspor di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



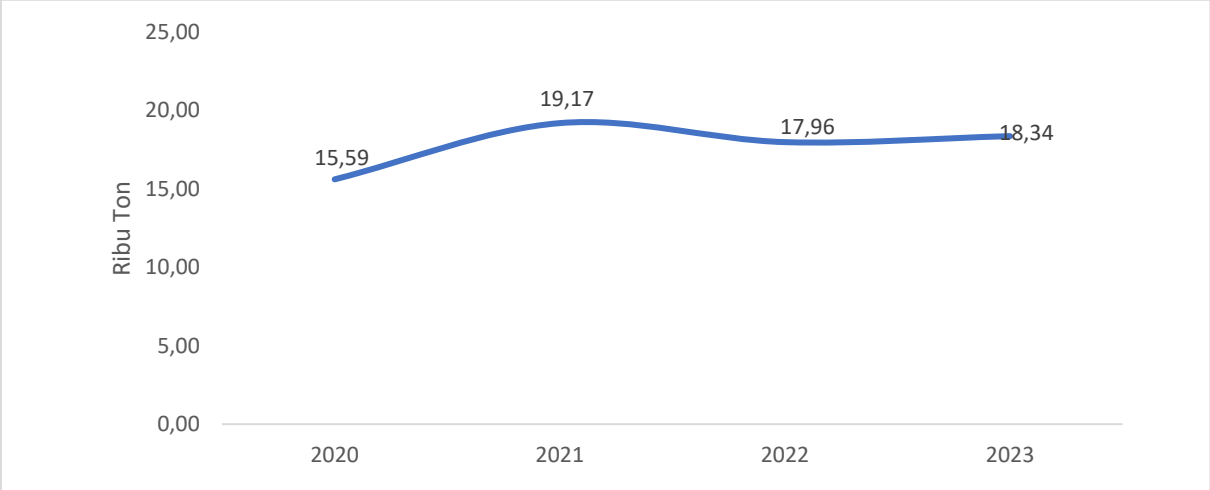

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu
*Angka berdasarkan harga berlaku; 2023: Angka Sementara 2024: Angka Sangat Sementara

## G. Transmigrasi

## H. Kelautan dan Perikanan

### a. Produksi Perikanan

Gambar 2. 202
Produksi Perikanan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

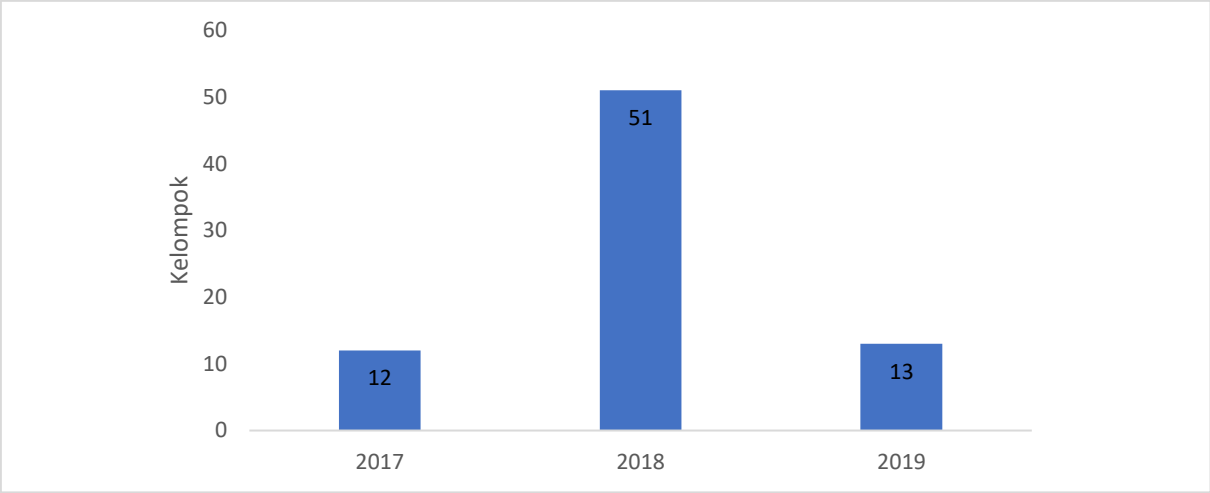
Meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu terdiri dari daratan, daerah ini berhasil memproduksi komoditas perikanan yang signifikan setiap tahunnya. Produksi perikanan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, produksi perikanan tercatat sebesar 15,59 ribu ton, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 19,17 ribu ton, yang mencerminkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas perikanan. Namun, pada tahun 2022, produksi perikanan mengalami sedikit penurunan menjadi 17,96 ribu ton, sebelum kembali mengalami peningkatan menjadi 18,34 ribu ton pada tahun 2023. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kondisi cuaca, ketersediaan stok ikan,

kebijakan pengelolaan perikanan, serta tingkat investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan.

**b. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Peran nelayan sangat penting dalam meningkatkan produksi komoditas perikanan, namun seringkali kondisi ekonomi rumah tangga nelayan tidak mencerminkan potensi produksi mereka. Banyak nelayan yang terlibat dalam penangkapan komoditas strategis justru berada dalam kategori miskin. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok nelayan tidak hanya memengaruhi aktivitas penangkapan atau pembudidayaan ikan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan mereka. Jumlah kelompok binaan Pemda justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 12 kelompok binaan yang meningkat menjadi 51 kelompok pada tahun 2018, namun turun menjadi 13 kelompok pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan Pemda Kabupaten Pasangkayu belum efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan kelompok nelayan.

Gambar 2. 203
Jumlah Kelompok Nelayan yang Di Bina di Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019




Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

## 2.1.4.4.4. Penunjang Urusan

**A. Perencanaan Pembangunan**

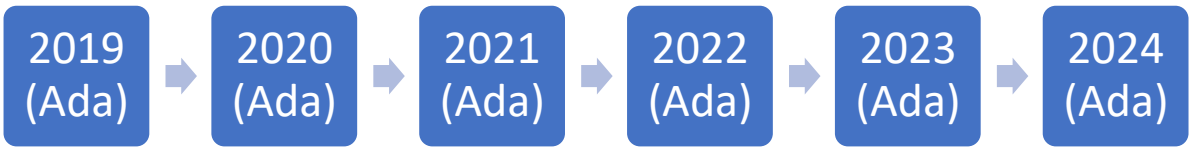
**a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

Dokumen RPJPD penting selain karena memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, juga karena merupakan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Karena merupakan kewajiban, maka bagi Pemda yang tidak membuat atau menetapkan RPJPD dengan Perda maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Menyusun dokumen RPJPD salah satu tugas kepala daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas kepala daerah diantaranya adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu (yang saat itu disusun dengan nama Kabupaten masih Mamuju Utara) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025. Rencana jangka panjang ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau RPJMD, kemudian dijabarkan lagi dalam rencana tahunan yakni RKPD.

Gambar 2. 204
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024

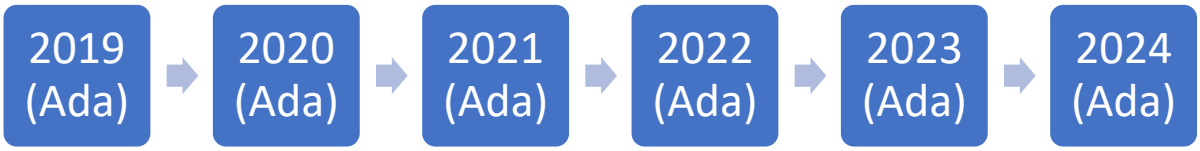



Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**b. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Isi dokumen RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang telah Ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Gambar 2. 205
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024

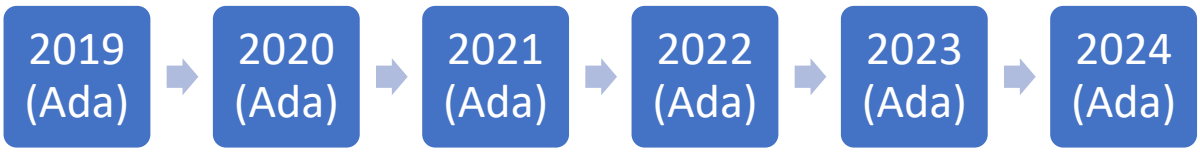



Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RKPD menjadi acuan untuk menyusun Renja OPD dan merupakan pedoman saat penyusunan RAPBD, sehingga sulit untuk menyusun anggaran jika Pemda tidak menyusun lebih dulu RKPD. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2019 hingga 2024 telah membuat dan menetapkan RKPD. Hal ini menunjukkan berjalannya penyusunan perencanaan daerah tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Terakhir, RKPD 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Gambar 2. 206
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024

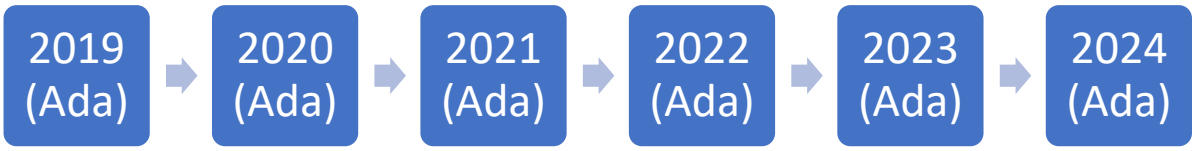



Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kabupaten Pasangkayu telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034.

Gambar 2. 207
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024



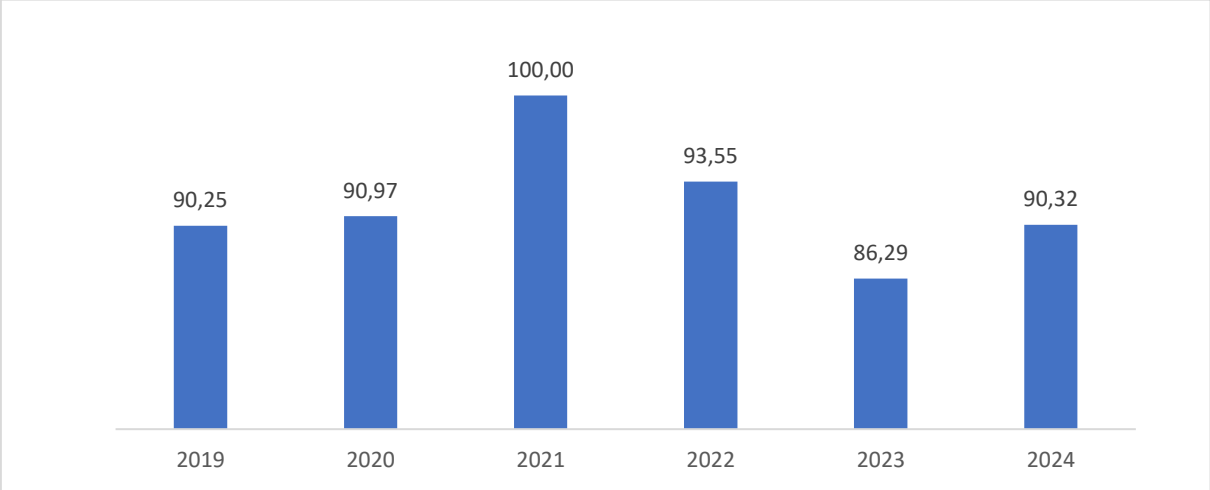

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**

Konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terarah. RPJMD sebagai peta jalan pembangunan lima tahun mendefinisikan visi, misi, dan prioritas strategis, sementara RKPD memecahnya menjadi program dan kegiatan tahunan yang konkret. Jika kedua dokumen ini selaras, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah tahunan secara sistematis mendukung tujuan jangka panjang, menghindari pemborosan anggaran, serta meminimalkan risiko tumpang tindih program. Konsistensi ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, karena masyarakat dapat melihat kesinambungan antara perencanaan dan implementasi. Dengan menjaga keselarasan RPJMD dan RKPD, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga membangun fondasi pembangunan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Bappeda, tidak semua program yang ada dalam RPKD sama dengan program dalam RPJMD. Hal itu dapat diukur dari indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD. Satu-satunya capaian 100 persen hanya di tahun 2021 selama periode enam tahun terakhir, sementara tahun 2019, 2020, 2022 hingga 2024 tidak mencapai 100 persen. Tahun 2024 penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD hanya 90,32 persen, menunjukkan bahwa dari seluruh program yang ada dalam RKPD, hanya 90,32 persen yang sama dengan program RPJMD, sisanya tidak ada dalam RPJMD.

Gambar 2. 208
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, 2019-2024 (%)



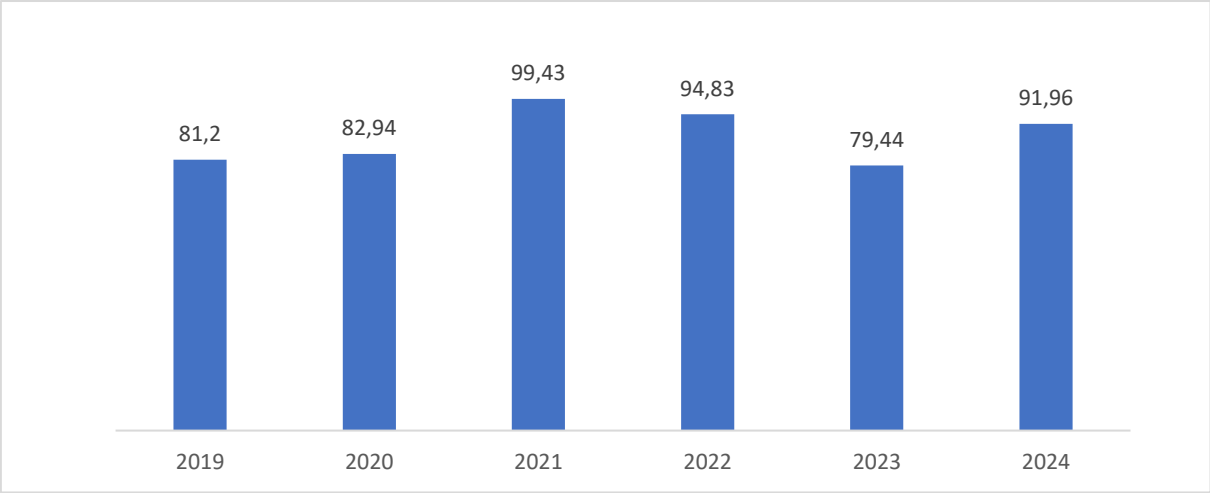

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**

Konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan strategis memuat prioritas program dan kegiatan yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat, sementara APBD menjadi instrumen pendanaan untuk merealisasikan program tersebut. Ketika keduanya selaras, alokasi anggaran dapat tepat sasaran, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien untuk mendukung target pembangunan. Inkonsistensi antara RKPD dan APBD berisiko menyebabkan pemborosan anggaran, ketimpangan pembangunan, atau bahkan gagalnya pencapaian tujuan prioritas. Selain itu, keselarasan ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, karena masyarakat dapat melihat transparansi antara rencana yang dijanjikan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, integrasi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran tidak hanya mendorong efektivitas pembangunan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Seharusnya semua program yang ada dalam APBD sama dengan jumlah program yang ada di RKPD. Namun di Kabupaten Pasangkayu, hal tersebut belum terjadi, diukur berdasarkan indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD. Sepanjang tahun 2019 hingga 2024, tak ada satu tahunpun angka penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD yang mencapai 100 persen. Tahun 2019, angka penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD hanya 81,2 persen, menunjukkan bahwa hanya 81,2 persen program yang ada di RKPD yang masuk ke APBD. Persentasenya naik dua tahun berturut yaitu 82,94 persen tahun 2020 dan 99,43 persen tahun 2021. Capaian tahun 2021 menjadi angka tertinggi, karena setalah itu angkanya lebih rendah, hingga di tahun 2024 hanya 91,96 persen

Gambar 2. 209
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, 2019-2024 (%)




Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

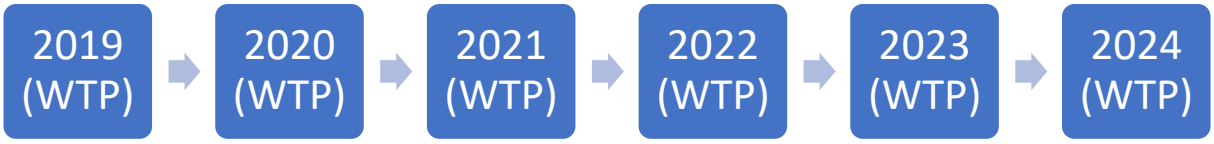
Ketidakkonsistenan antara RKPD dan APBD dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antara tim perencana dan pihak penyusun anggaran, sehingga prioritas program dalam RKPD tidak diimbangi dengan alokasi dana yang memadai di APBD. Perubahan kebijakan atau kepentingan politik yang mendadak, misalnya intervensi kepala daerah atau DPRD untuk mengalokasikan anggaran ke proyek tertentu di luar prioritas RKPD, juga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Selain itu, kapasitas teknis yang terbatas dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti ketidakmampuan memprediksi kebutuhan riil atau keterbatasan data akurat, dapat menyebabkan RKPD tidak realistis sehingga sulit diintegrasikan ke dalam APBD. Di sisi lain, dinamika perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau fiskal daerah yang tidak terantisipasi dalam proses perencanaan turut memicu ketidakselarasan, karena APBD harus menyesuaikan situasi aktual sementara RKPD cenderung kaku. Belum lagi lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kedua dokumen tersebut, sehingga kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak terdeteksi secara dini.

## B. Keuangan

### a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam enam tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu mendapatkan WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Artinya bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Gambar 2. 210
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

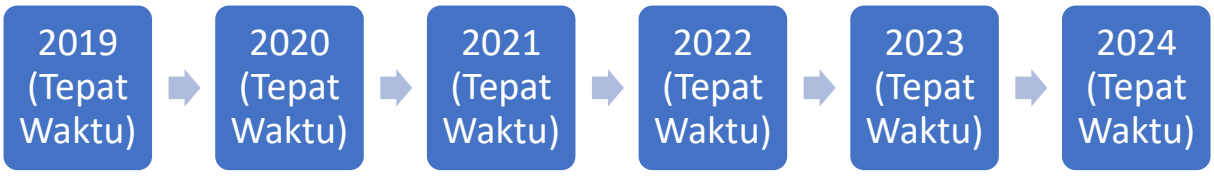



Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**b. Penetapan APBD**

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Pasangkayu, dalam enam tahun terakhir, Pemda Pasangkayu selalu menetapkan APBD-nya tetap waktu. Semua APBD tahun 2019 hingga 2024 ditetapkan sebelum memasuki tahun baru atau pada akhir tahun berjalan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 211
Penetapan APBD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024



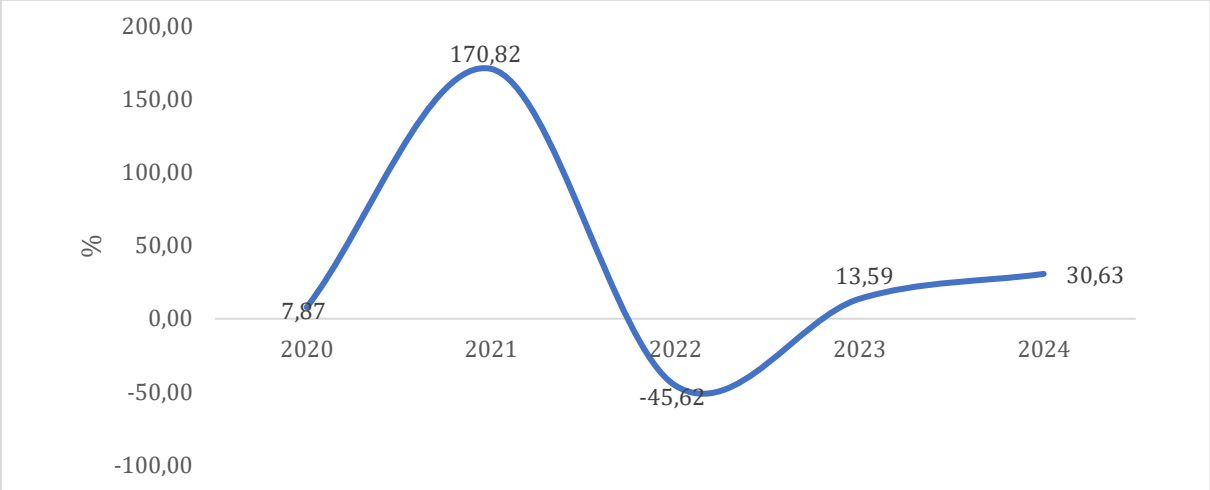

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasangkayu

**c. Persentase Penurunan SILPA**

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dan menggambarkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang belum stabil. Pada tahun 2020, SILPA tercatat Rp22,89 miliar atau naik sebesar 7,87 persen, kemudian drastis mengalami kenaikan menjadi Rp61,99 miliar atau meningkat 170,82 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan negatif sebesar 45,62 persen, yang berarti SILPA menurun menjadi Rp33,71 miliar. Tahun 2023 kembali menunjukkan kenaikan menjadi Rp38,29 miliar atau sebesar meningkat 13,59 persen dan meningkat lagi menjadi 30,63 persen pada 2024 atau tercatat sebesar Rp50,02 miliar. Ketidakteraturan tren ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam

perencanaan dan penyerapan anggaran, termasuk penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di OPD, agar SILPA dapat ditekan secara proporsional dan mencerminkan efisiensi serta efektivitas belanja daerah.

Gambar 2. 212
Persentase Penurunan SILPA SSdi Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024




Sumber: DJPK, diolah

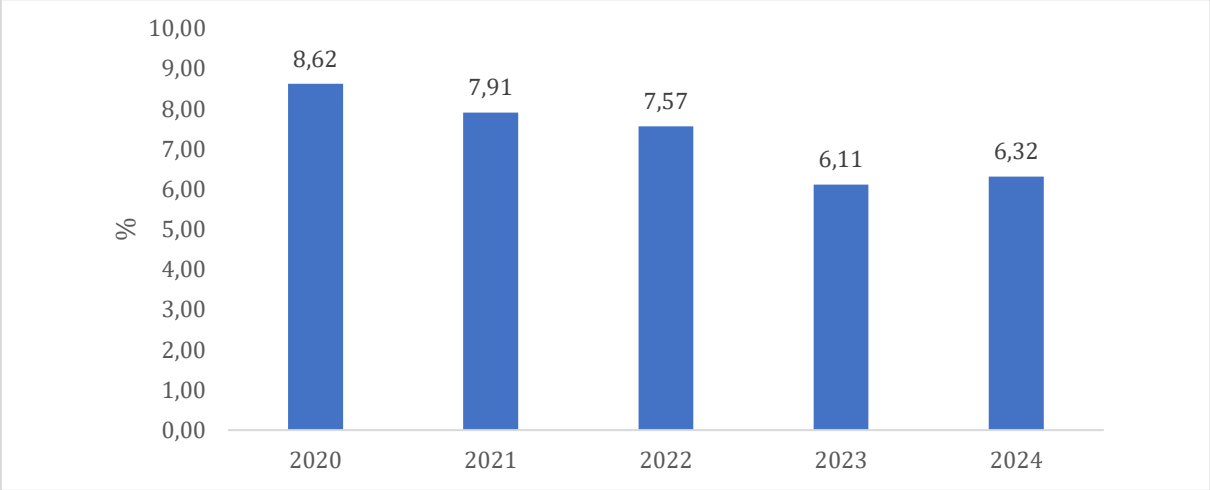
**d. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**

**e. Persentase Penambahan Aset Tetap**

**f. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD**

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi berada pada angka 8,62 persen, namun terus menurun menjadi 7,91 persen di 2021, 7,57 persen di 2022, hingga mencapai titik terendah 6,11 persen pada 2023. Meskipun mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,32 persen di tahun 2024, angka ini masih menunjukkan penurunan dibanding awal periode. Tren ini mengindikasikan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau entitas sejenis dalam menyumbang PAD belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan tata kelola BUMD, termasuk strategi investasi, efisiensi operasional, serta penguatan model bisnis agar kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah dapat lebih maksimal.

Gambar 2. 213
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024



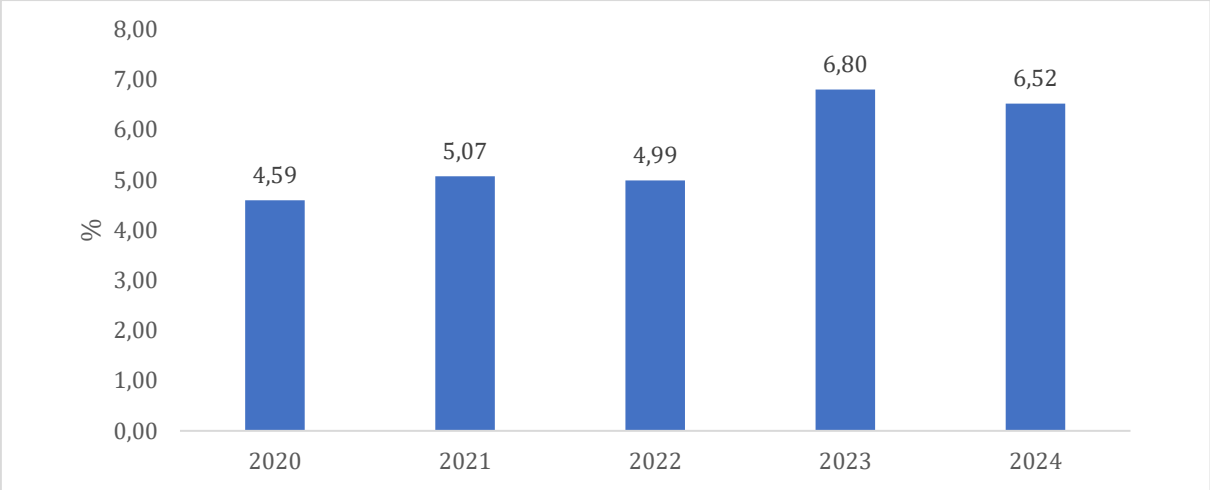

Sumber: DJPK, diolah

**g. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Meski desentralisasi fiskal sudah berjalan selama dua dekade lebih, pengelolaan dana di daerah belum efektif. Kemandirian fiskal daerah terpantau masih rendah dan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Belanja daerah pun tidak efektif dan masih dibayangi problem klasik menumpuknya dana pemerintah daerah di perbankan dari tahun ke tahun. Kemandirian fiskal dapat diukur dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diterima daerah terkait dalam suatu waktu.

Selama lima tahun terakhir, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusi PAD tercatat sebesar 4,59 persen, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,07 persen pada 2021. Setelah itu, sedikit menurun menjadi 4,99 persen ditahun 2022 sebelum melonjak signifikan ke 6,80 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 angka ini kembali sedikit menurun menjadi 6,52 persen. Meskipun peningkatan secara keseluruhan tampak menjanjikan, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius dalam menggali potensi ekonomi lokal, memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Gambar 2. 214
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024



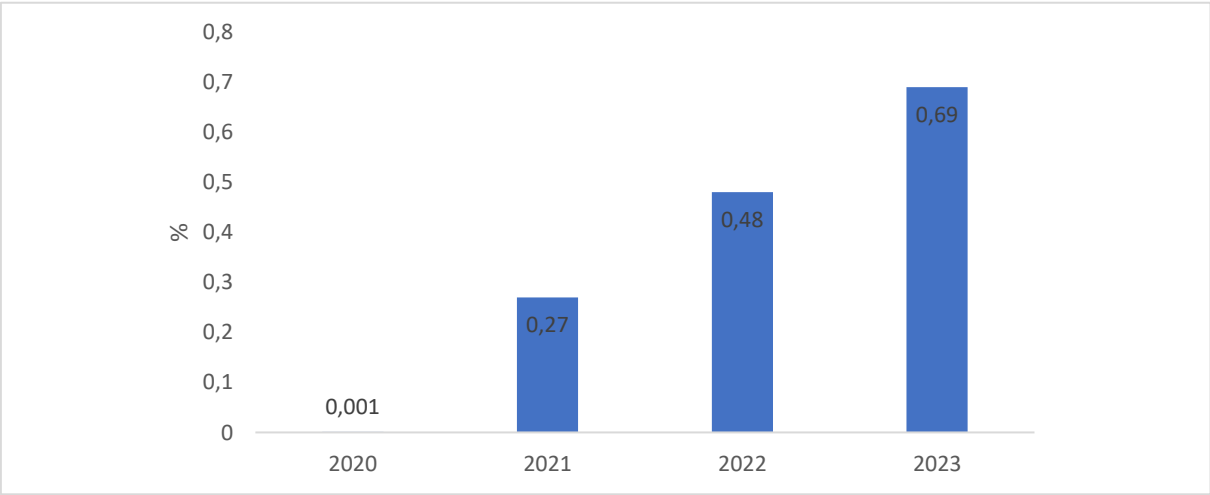

Sumber: DJPK, diolah

## C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

### a. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal untuk ASN tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga krusial untuk pengembangan karir mereka. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, pelatihan tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk kenaikan pangkat. Pada tahun 2020, hanya 0,001 persen ASN di Pemda Kabupaten Pasangkayu yang mengikuti pelatihan formal. Angka ini meningkat secara signifikan, menjadi 0,27 persen pada tahun 2021, 0,48 persen pada tahun 2022, dan mencapai 0,69 persen pada tahun 2023. Meskipun ada tren peningkatan, persentase ini masih relatif rendah, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya meningkatkan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan.

Gambar 2. 215
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023



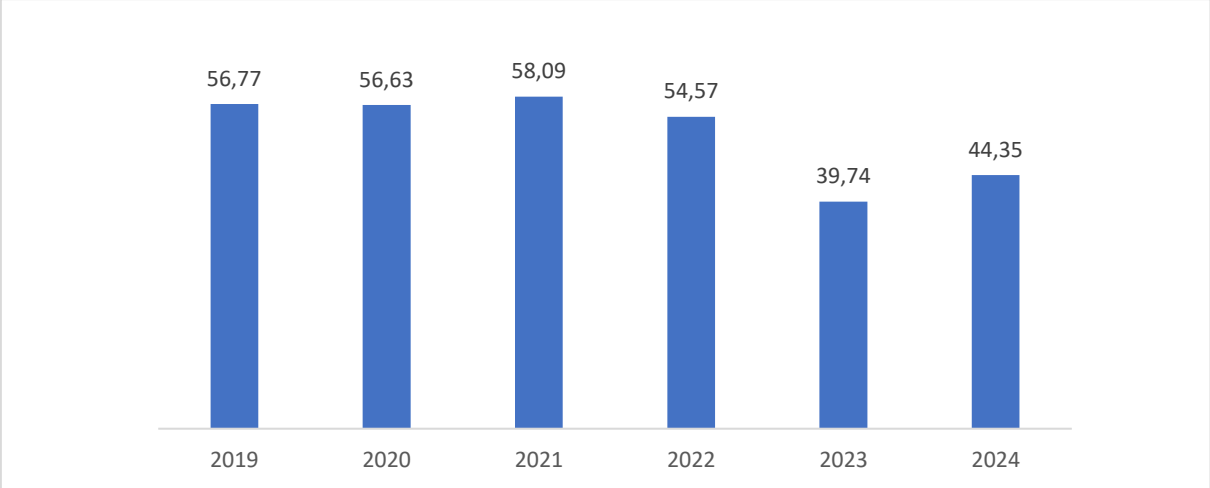

Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

**b. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki urgensi yang tinggi dalam memastikan terciptanya birokrasi yang kompeten, adaptif, dan berintegritas. Pelatihan struktural tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pejabat, tetapi juga mempersiapkan mereka dalam menghadapi dinamika perubahan sistem pemerintahan, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, serta tantangan global yang memerlukan respons strategis. Dengan mengikuti program ini, pejabat ASN dapat memperdalam pemahaman tentang kebijakan nasional, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan prinsip akuntabilitas, sehingga mampu mengambil keputusan yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan struktural juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai etika dan integritas, yang krusial dalam mencegah malpraktik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa peningkatan kapabilitas melalui pelatihan yang terstruktur, risiko inefisiensi, ketidaksiapan menghadapi disrupsi, serta ketertinggalan dalam inovasi layanan publik akan semakin tinggi, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Di Kabupaten Pasangkayu, belum semua pejabat ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2019 hingga 2021, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural turun dari 56,77 persen ke 56,63 persen, kemudian naik lagi jadi 58,09 persen. Capaian tahun 2021 menjadi angka tertinggi dalam enam tahun terakhir karena setelah itu realisasinya turun, dimulai 54,57 persen tahun 2022, kemudian anjlok ke 39,74 persen tahun 2023, dan hanya 44,35 persen di tahun 2024.

Gambar 2. 216
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural
di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

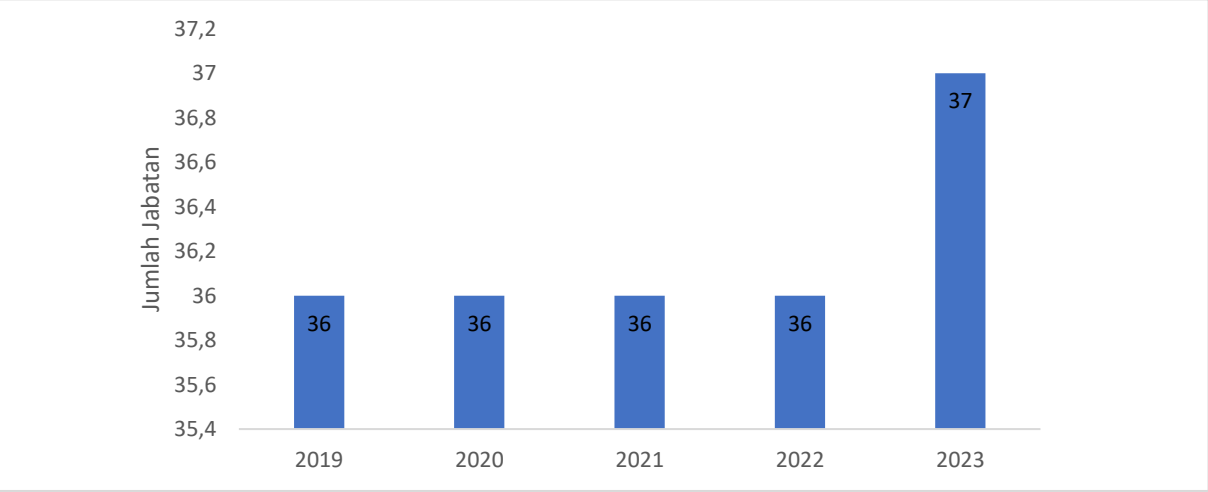



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

**c. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN terbagi menjadi tiga level: Utama, Madya, dan Pratama. Pada level pemerintah daerah (kabupaten/kota), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dalam kategori JPT Pratama. Di Kabupaten Pasangkayu, jumlah JPT Pratama pada periode 2019 hingga 2022 tercatat sebanyak 36 orang. Namun, pada tahun 2023, jumlah JPT Pratama meningkat menjadi 37. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor I Tahun 2023 mengenai struktur dan fungsi perangkat daerah, total jumlah dinas dan badan mencapai 44, yang terdiri dari 37 JPT Pratama ditambah 2 posisi untuk Sekda dan Sekretaris DPRD, sehingga total JPT Pratama berjumlah 39 jabatan.

Gambar 2. 217
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023

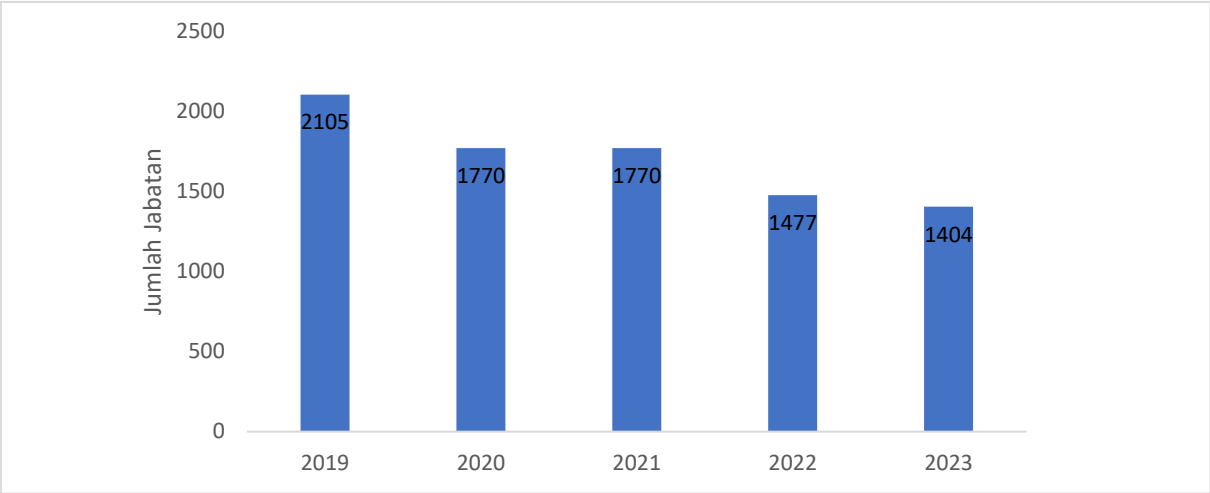



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

**d. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Jabatan Administrasi mencakup fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan ini terbagi menjadi tiga kategori: Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Pejabat Administrator bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, sementara Pejabat Pengawas mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana. Pejabat Pelaksana, di sisi lain, melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kualitas layanan publik sangat bergantung pada ketiga jabatan ini, sehingga jumlahnya perlu disesuaikan dengan cakupan pelayanan yang diberikan. Selama lima tahun terakhir, jumlah Jabatan Administrasi di instansi Pemda Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah jabatan ini mencapai 2.105, namun turun menjadi 1.404 pada tahun 2023.

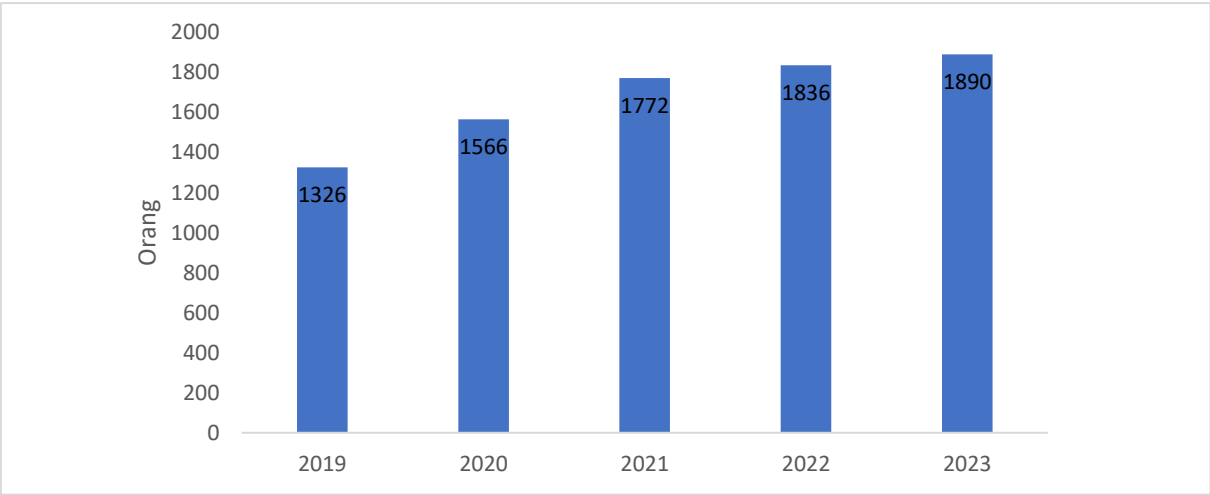
Gambar 2. 218.
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

**e. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**

Gambar 2. 219
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2023




Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

Jabatan Fungsional (JF) adalah kelompok jabatan yang berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Pemerintah saat ini sedang mengalihkan perhatian ke Jabatan Fungsional, mengingat rencana penghapusan Eselon III dan IV, dan berpotensi untuk menggantikannya dengan Jabatan Fungsional. Langkah ini diambil karena pemerintah merasa bahwa jumlah jabatan struktural terlalu banyak dan lebih menekankan pada administrasi daripada keahlian khusus. Dr. Adi Suryanto dari Kepala LAN menyarankan bahwa penyederhanaan jabatan struktural dan peningkatan jabatan fungsional akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih gesit dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pemangku Jabatan Fungsional mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 1.326 orang dalam jabatan ini. Angka ini meningkat

menjadi 1.566 pada tahun 2020, dan terus naik menjadi 1.772 pada tahun 2021. Tahun 2022, jumlahnya mencapai 1.836 orang, dan pada tahun 2023, bertambah lagi menjadi 1.890 orang.

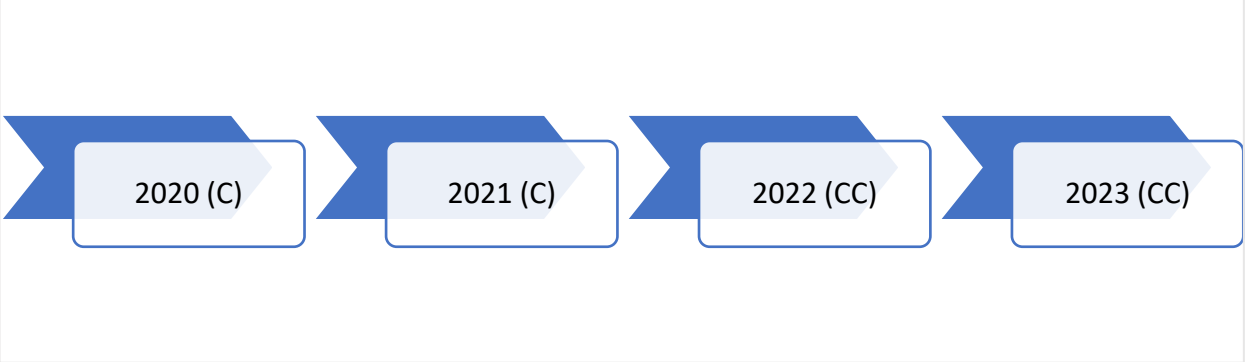
**f. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**

Pada tahun 2024, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional di Kabupaten Pasangkayu baru mencapai 0,92 persen, angka yang sangat rendah dan memprihatinkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN belum mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas yang memadai untuk menunjang kinerja dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rendahnya angka ini berisiko terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memperluas akses pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan jabatan guna menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

**D. Pengawasan**

**a. Indeks Reformasi Birokrasi**

Gambar 2. 220
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasangkayu, 2020-2023




Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, diolah

Dalam menciptakan lingkungan kelembagaan dan pemerintahan yang mampu menghasilkan regulasi yang adaptif, taat asas, berintegritas, tangkas dan kolaboratif, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini Kabupaten Pasangkayu masih diperhadapkan dengan inefisiensi regulasi dan birokrasi serta pelayanan publik yang belum prima. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2023 termasuk kategori CC (cukup/memadai), masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. Capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat dengan kategori baik (B, baik) dan Kabupaten Polewali Mandar (B, baik). Meskipun demikian terdapat perbaikan yang

berarti dari tahun-tahun sebelumnya yang mengategorikan IRB Kabupaten Pasangkayu masih kurang (C).

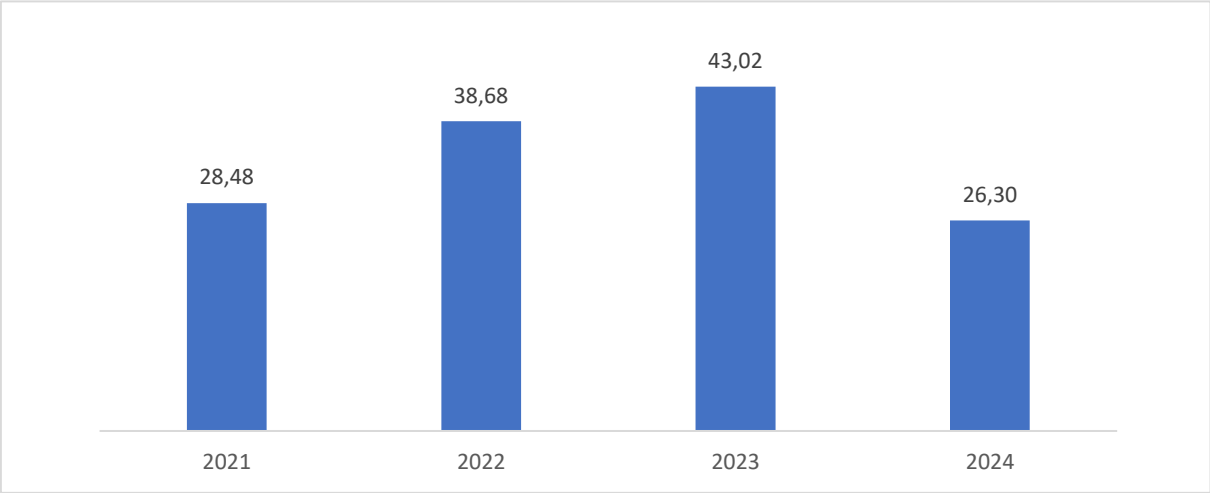
**c. Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah pusat dan daerah semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan fokus pada pengawasan. Pengawasan ini bertujuan memastikan pencapaian sasaran pemerintah, serta mendeteksi secara dini penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran. Untuk melaksanakan tugas ini, pemerintah memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BPK bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, sementara APIP melakukan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pengawasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 dan regulasi lainnya. Temuan dari hasil pemeriksaan yang tidak sesuai standar harus ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Permenpan No. 9 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan sangat penting untuk perbaikan manajemen pemerintahan dan pemulihan citra pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan tindak lanjut temuan dianggap sebagai pemborosan sumber daya keuangan negara.

Di Kabupaten Pasangkayu, persentase tindak lanjut temuan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, daerah ini menindaklanjuti 28,48 persen temuan fungsional, meningkat menjadi 38,68 persen pada tahun 2022, dan mencapai 43,02 persen pada tahun 2023. Angkanya turun di tahun 2024 menjadi 26,30 persen, angka yang sangat rendah. Sementara itu, untuk temuan dari BPK, pejabat terkait mungkin tidak menindaklanjuti temuan jika dikategorikan sebagai Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. TPTD dapat mencakup keadaan kahar seperti bencana alam, pemogokan, atau alasan sah lainnya, yang harus dibuktikan dengan penjelasan yang sesuai. Rendahnya persentase tindak lanjut temuan di Pemda Pasangkayu mencerminkan masalah dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Permenpan No. 9 Tahun 2009, situasi ini menunjukkan adanya pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan dan aparatur daerah, terlepas dari alasan yang mendasarinya.

Gambar 2. 221
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Pasangkayu, 2021-2024

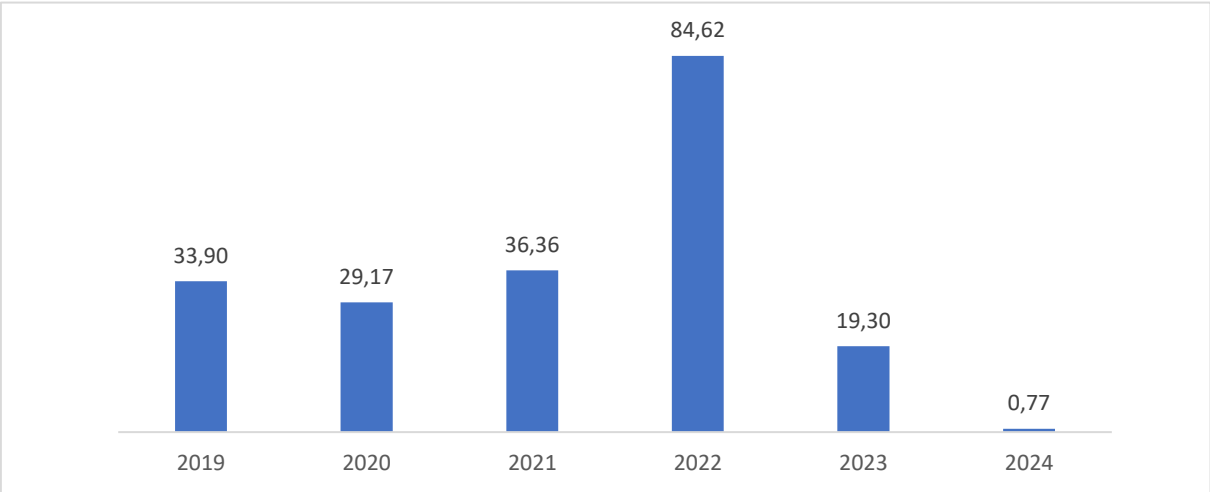



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

**d. Persentase Pelanggaran Pegawai**

Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, seperti korupsi, nepotisme, atau ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, dapat berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik. Ketidakdisiplinan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai berpotensi menghambat proses administrasi, memperlambat distribusi bantuan sosial, atau menurunkan akurasi data yang dibutuhkan masyarakat. Dampaknya, masyarakat sebagai penerima layanan menjadi korban ketidakadilan, seperti antrean panjang, layanan yang tidak transparan, atau alokasi sumber daya yang tidak merata. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, pelanggaran tersebut dapat melemahkan efektivitas kebijakan publik serta menciptakan citra buruk yang sulit diperbaiki, sehingga menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 222
Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

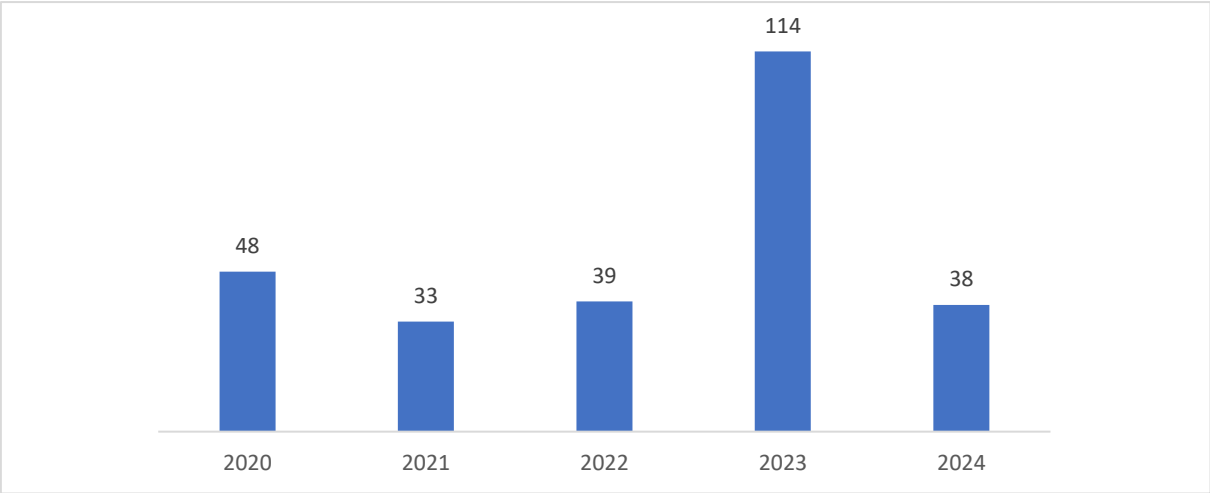
Dalam enam tahun terakhir pelanggaran pegawai dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu turun signifikan. Tahun 2019 hingga 2021, persentase pelanggaran pegawai mencapai 33,90 persen, 29,17 persen, dan 36,36 persen. Tahun 2022, angkanya tiba-tiba naik sangat drastis menjadi 84,62 persen, yang berarti dari total pegawai dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu, 84,62 persen dikenai sanksi. Kondisinya kembali membaik di tahun 2023 dan 2024 karena persentase pelanggaran pegawai tersisa 19,30 persen dan 0,77 persen.

Untuk menurunkan pelanggaran pegawai, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan represif yang terstruktur. Pertama, penguatan sistem pengawasan melalui audit internal berkala dan penggunaan teknologi digital untuk memantau kinerja serta kehadiran pegawai dapat meminimalkan praktik penyimpangan. Kedua, pelatihan etika kerja dan integritas secara rutin perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab pelayanan publik. Di sisi lain, transparansi proses layanan melalui platform terbuka, seperti publikasi data anggaran atau alur administrasi, dapat mengurangi celah korupsi dan nepotisme. Pemerintah juga harus memberlakukan sanksi tegas dan konsisten bagi pelanggar, disertai mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk memastikan akuntabilitas. Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan bagi pegawai berkinerja baik dapat memotivasi peningkatan disiplin. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, budaya integritas di lingkungan birokrasi dapat terbangun, sehingga pelanggaran pegawai berkurang dan kualitas layanan publik semakin optimal.

**e. Jumlah Temuan BPK**

Meskipun BPK Provinsi Sulawesi Barat memberikan opini WTP pada laporan keuangan Kabupaten Pasangkayu, laporan tersebut masih mengandung kesalahan. Data dari Inspektorat Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan temuan dari BPK, dari 33 kasus pada tahun 2021 menjadi 39 kasus tahun 2022 dan naik sangat tinggi tahun 2023 sebanyak 114 kasus. Tahun 2024, angkanya turun signifikan menjadi 38 kasus, namun secara nominal angka tersebut masih tinggi. Penyebab utama dari temuan berulang adalah SPI yang belum efektif dalam mencegah penyimpangan.

Gambar 2. 223.
Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Pasangkayu, 2020-2024




Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

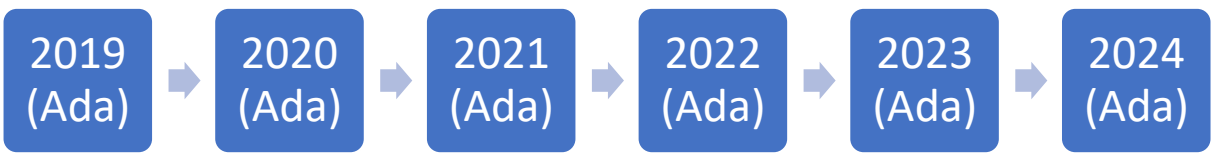
### 2.1.4.4.5. Pendukung Urusan Pemerintahan

**A. Sekretariat Dewan**

**a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan instrumen utama bagi alat kelengkapan DPRD untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan. Karena bersifat wajib, maka DPRD Kabupaten Pasangkayu sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan membuat RKT pada masing-masing alat kelengkapan sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Dengan adanya RKT DPRD, diharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasangkayu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar 2. 224.
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

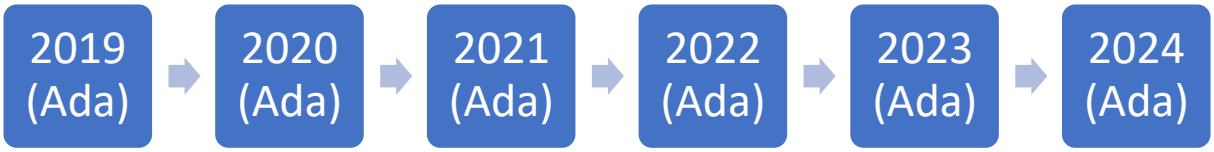



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

**b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Rencana kerja DPRD mesti disusun dalam rangka melaksanakan tiga fungsi utama yaitu pengawasan, Pembentukan Perda, dan anggaran. Beberapa jenis kegiatan untuk menjalankan fungsi pengawasan misalnya rapat-rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaahan Perda, peningkatan kualitas SDM, koordinasi dan konsultasi terkait pengawasan. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Pasangkayu. Selama tahun 2019 hingga 2024, RKT DPRD yang berisi berbagai program kerja dari masing-masing alat kelengkapan sudah dibuat dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. 225
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024

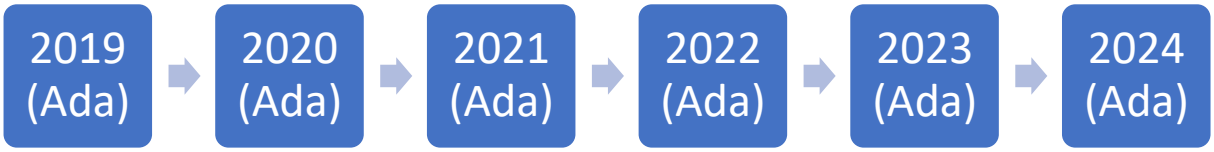



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

**c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Sama halnya dengan ke dokumen RPJMD dan RKPD, program-program DPRD Kabupaten Pasangkayu juga sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Semua kebutuhan anggaran DPRD diatur oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, program yang disusun dalam RKT DPRD juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan untuk dijadikan dasar dalam penggunaan anggaran.

Gambar 2. 226
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD di Kabupaten Pasangkayu, 2019-2024




Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

### 2.1.4.4.6. Kewilayahan

**A. Kecamatan**

**a. Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 30 kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pasangakyu. Jumlah ini mencerminkan upaya aktif pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna memastikan layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan terintegrasi. Koordinasi yang baik menjadi fondasi penting dalam mencegah tumpang tindih kebijakan, mempercepat penyelesaian masalah lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

**b. Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 40 kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat akar rumput. Kegiatan koordinasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan kelembagaan desa, pengelolaan potensi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Keberlanjutan dan efektivitas koordinasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

**c. Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 32 kegiatan koordinasi terkait upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah ini. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kerja sama antarinstansi, termasuk dengan aparat keamanan dan masyarakat, guna menciptakan suasana yang aman dan tertib. Kegiatan koordinasi ini meliputi pencegahan gangguan sosial, penanganan potensi konflik, serta pengawasan terhadap

aktivitas masyarakat. Ke depan, koordinasi serupa perlu terus ditingkatkan agar upaya menjaga stabilitas dan kenyamanan warga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**d. Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilevel Kecamatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi yang efektif lintas sektor. Sepanjang tahun ini, tercatat 37 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan program lintas bidang. Dari forum-forum diskusi, rapat teknis, hingga sinergi antarperangkat daerah, seluruh kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Di tengah kompleksitas urusan pemerintahan, koordinasi menjadi jembatan yang menyatukan arah dan langkah agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan harapan warga.

**e. Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum**

Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan koordinasi terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta standar pelayanan publik. Melalui forum koordinasi ini, berbagai persoalan di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama, sekaligus memperkuat peran pembinaan dalam mendukung kinerja perangkat daerah. Ke depan, keberlanjutan dan peningkatan kualitas koordinasi ini perlu menjadi prioritas agar pembinaan dan pengawasan tidak bersifat administratif semata, tetapi juga berdampak pada perbaikan sistemik penyelenggaraan pemerintahan.

### 2.1.4.4.7. Pemerintahan Umum

**A. Kesatuan Bangsa dan Politik**

**a. Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Ada Sekelompok Orang Dari Agama Lain yang Melakukan Kegiatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal**

Pada tahun 2024, sebanyak 75 persen rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu menyatakan setuju apabila ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Angka ini mencerminkan tingkat toleransi antarumat beragama yang cukup tinggi di masyarakat, serta menjadi indikator positif dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis. Meski demikian, masih terdapat 25 persen yang belum sepenuhnya menerima keberagaman tersebut, yang menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan pendidikan multikultural sejak dini. Mendorong dialog lintas

iman, kolaborasi antar komunitas, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi kunci dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga kerukunan di tengah perbedaan.

## 2.2. Gambaran Keuangan Daerah

### 2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

#### A. Realisasi Pendapatan Daerah

Gambaran keuangan daerah diuraikan dalam dokumen RPJMD untuk memberikan pemahaman tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 hingga 2024. Kondisi keuangan daerah yang dimaksud adalah kapasitas atau kemampuan keuangan Kabupaten Pasangkayu dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pasangkayu, pertama-tama perlu dipahami kondisi pendapatan daerah beserta komponennya, kondisi belanja daerah beserta komponennya, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur APBD Kabupaten Pasangkayu. Pemahaman tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan diperoleh dari analisis data perkembangan realisasi anggaran selama lima tahun. Selain itu, analisis dan diskusi juga harus mencakup perkembangan neraca daerah, yang meliputi aset, hutang daerah, dan ekuitas dana. Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu juga akan menyajikan rasio-rasio keuangan yang bisa menggambarkan tingkat kesehatan keuangan daerah. Selain itu, bagian ini akan menyajikan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun ke depan yaitu tahun 2025 hingga 2029 agar semua pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran sejauh mana kapasitas keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun ke depan.

Pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi karena dihadapkan dengan tantangan pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Volatilitas tersebut menunjukkan kondisi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu tidak stabil dalam lima tahun terakhir dan menyebabkan rata-rata pertumbuhannya hanya -0,57 persen. Pada tahun awal pandemi, pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp.860,86 miliar, tahun 2021 mulai turun ke Rp.811,95 miliar atau berkurang -2,18 persen. Saat pandemi mulai bisa dikendalikan dan kondisi perekonomian bergerak ke arah pemulihan, pendapatan daerah menunjukkan sinyal positif karena ada kenaikan 3,77 persen tahun 2022, tapi kenaikan itu tak berkesinambungan karena di tahun 2023 pendapatan daerah turun lagi sebesar -1,66 persen. Penurunan tersebut membuat pendapatan daerah hanya mencapai Rp.828,56 miliar. Akan tetapi, pendapatan daerah kembali membaik di tahun 2024, yakni mencapai sebesar Rp.852,85 miliar, dengan kenaikan sebesar 2,93 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian,

pemerintah daerah sepertinya masih kesulitan menaikkan pendapatan daerah lebih tinggi dari tahun 2020.

Faktor utama yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu sangat rendah dan cenderung negatif dalam lima tahun terakhir adalah penurunan komponen pendapatan transfer, khususnya transfer pemerintah pusat. Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah, utamanya transfer pemerintah pusat. Tahun 2024, proporsi transfer pemerintah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu mencapai angka 91,98 persen dan khusus transfer pemerintah pusat mencapai 81,49 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap Rp. 1 miliar pendapatan daerah, ada kontribusi transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 814,9 juta. Akibat ketergantungan fiskal yang tinggi, maka pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu sangat bergantung pada dinamika keuangan pemerintah pusat.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari pendapatan transfer tumbuh negatif, sebesar -0,20 persen. Penurunan terjadi di tahun 2020 sebesar -0,23 persen dari Rp.796,23 miliar ke Rp.794,41 miliar, kemudian di tahun 2021 turun -6,12 persen dengan total pendapatan transfer Rp.745,78 miliar. Tahun 2022, pendapatan transfer sempat mengalami kenaikan 6,64 persen menjadi Rp.795,30 miliar, tapi setahun kemudian kembali turun ke level -3,35 persen. Penurunan pendapatan transfer tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh kebijakan *re-focusing* dan re-alokasi anggaran pemerintah pusat untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Tahun 2020 pemerintah pusat hanya memberikan Rp.643,77 miliar dalam bentuk dana perimbangan, lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai Rp.679,51 miliar. Tahun 2021, angka transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan hingga totalnya Rp.659,17 miliar atau bertambah 2,39 persen dan kenaikannya berlanjut di tahun 2022 dengan mencatat Rp.700,97 miliar atau bertambah 6,34 persen, sebelum akhirnya turun di tahun 2023 sebesar -2,72 persen sehingga angka agregatnya hanya Rp.681,90 miliar. Namun, transfer pemerintah pusat kembali naik menjadi Rp.695,02 miliar di tahun 2024 seiring dengan pemulihan ekonomi. Dari total pendapatan transfer pemerintah, komponen terbesar adalah DAU, kemudian DAK fisik, DAK non fisik, bagi hasil pajak, dan paling rendah adalah dana bagi hasil sumberdaya alam.

Selain dana perimbangan, Kabupaten Pasangkayu juga memperoleh pendapatan transfer lain dari pemerintah pusat, dimana komponen pendapatannya adalah dana penyesuaian dan dana desa. Sepanjang tahun 2019 hingga 2024, rata-rata perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya negatif yaitu -9,22 persen, menunjukkan kecenderungan selama periode tersebut pendapatannya cenderung turun. Penurunan terjadi di tahun 2020, 2021, dan 2023 masing-masing sebesar -29,20 persen, -6,04 persen, dan -13,53 persen. Dari dua komponen pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, yang terkoreksi paling tajam adalah Dana Penyesuaian.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu untuk membiayai sendiri kebutuhannya melalui sumber pendapatan yang dihasilkan sendiri masih sangat rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu. Tahun 2024, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 7,16 persen, dan kondisi ini sudah bertahan sejak Indonesia menerapkan otonomi daerah. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Pasangkayu mencapai 7,29 persen. Tahun 2020, PAD yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah mencapai Rp.39,54 miliar. Saat pandemi Covid-19, PAD Pasangkayu mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp.41,20 miliar tahun 2021 dan Rp.46,83 miliar tahun 2022 atau tumbuh 4,20 persen dan 13,69 persen. Pemerintah daerah berhasil menjaga momentum kenaikan tersebut di tahun 2023 dengan mencatat realisasi PAD sebesar Rp.59,37 miliar atau naik 26,77 persen. Kenaikan berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian PAD sebesar Rp.61,10 miliar atau tumbuh 2,92 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, PAD Pasangkayu tak banyak mengalami perubahan singifikan, padahal idealnya otonomi daerah selain menyerahkan kewenangan kepada daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan, juga memberikan kewenangan daerah mengelola fiskalnya. Menyerahkan kewenangan mengelola fiskal ke pemerintah daerah agar daerah mampu meningkatkan PAD dan diharapkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlahan berkurang sebab pemerintah daerah dianggap lebih tahu potensi daerah mereka masing-masing. Justru yang terjadi adalah ketergantungan fiskal yang besar dan mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*. Efek flypaper, sebuah konsep dalam bidang keuangan publik yang menjelaskan bahwa bahwa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran publik lokal (belanja daerah) lebih besar dibandingkan dengan peningkatan setara dalam pendapatan asli daerah (Dahlby & Ferede, 2016). Fenomena ini terjadi karena sumber pendapatan utama tidak berasal dari kerja keras pemerintah daerah (PAD), tapi berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bisa menghabiskan uang (belanja daerah) tanpa harus khawatir tentang pendapatan daerah karena mereka tak perlu bersusah payah mengumpulkan dan hanya menunggu transfer pemerintah pusat.

Kecenderungan itu juga terlihat jelas di Kabupaten Pasangkayu, apalagi dilihat lebih spesifik pada komponen PAD-nya. Dari empat komponen PAD, komponen terbesar yang menyumbang terhadap PAD Pasangkayu justru bukan dari pajak dan retribusi, tapi dari komponen lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari 16 komponen dan semuanya tidak membutuhkan usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkannya seperti hasil penjualan BMD (barang milik daerah) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; dll. Komponen ini pada prinsipnya memiliki potensi yang terbatas karena bergantung pada ketersediaan BMD yang ingin dijual, vendor yang mengalami keterlambatan menyelesaikan pekerjaannya, ada wajib pajak yang dikenakan denda, dll.

Alih-alih mendorong pendapatan pajak dan retribusi, justru pemerintah Kabupaten Pasangkayu lebih banyak mendapat sumber PAD-nya dari komponen lain-lain PAD yang sah. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai 29,43 persen, dengan kontribusi rata-rata 44,24 persen, sementara pendapatan pajak dan retribusi kontribusi rata-rata hanya 28,09 persen dan 20,91 persen. Tahun 2020, lain-lain PAD yang sah sempat mengalami penurunan -12,16 persen dari Rp.11,30 miliar menjadi Rp.9,93 miliar, tapi dua tahun selanjut secara beruntun angkanya naik sebesar 18,89 persen tahun 2021 dengan total pendapatan Rp.11,80 miliar dan 141,97 persen tahun 2022 sehingga mencapai Rp.28,56 miliar. Tahun 2023, meski pertumbuhannya lebih rendah, tapi angkanya masih dua digit yaitu 21,52 persen dengan total Rp. 34,70 miliar. Penurunan lain-lain PAD yang sah berlanjut di tahun 2024, yakni hanya sebesar Rp.26,70 miliar.

Kabupaten Pasangkayu membukukan pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 22,60 persen, sementara retribusi daerah tumbuh lebih lambat sebesar 2,16 persen. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan pajak mencatat perubahan yang cenderung positif dan cenderung naik. Tahun 2020, pendapatan pajak naik 1,25 persen dari Rp.8,68 miliar tahun 2019 ke Rp.8,79 miliar dan berlanjut di tahun 2021 dengan pertumbuhan 27,07 persen sehingga totalnya mencapai Rp.11,17 miliar. Tahun 2022, laju pertumbuhannya sempat terkoreksi lebih rendah tapi masih positif yaitu 5,80 persen dengan realisasi Rp.11,82 miliar, namun tahun 2023 bertambah 42,23 persen hingga jumlahnya sampai Rp. 16,81 miliar. Pada tahun 2024 mencapai Rp22,96 miliar atau tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun mengalami kenaikan, tapi proporsi pajak daerah dalam struktur PAD Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah dari komponen lain-lain PAD yang sah.

Berbeda dengan pajak, pendapatan dari retribusi daerah cenderung turun dalam lima tahun terakhir. Rata-rata perubahannya memang positif, tapi tren pertumbuhan tahunannya cenderung turun. Hal itu disebabkan karena selama tiga tahun berturut-turut pendapatan retribusi turun, mulai dari -16,11 persen tahun 2020, kemudian -14,02 persen tahun 2021, dan yang paling parah -78,09 persen tahun 2022. Pada tiga tahun tersebut, pendapatan retribusi yang diterima pemerintah daerah hanya Rp.17,41 miliar, Rp.14,97 miliar, dan Rp.3,28 miliar. Kenaikan

hanya terjadi di tahun 2023 sebesar 43,73 persen dengan total pendapatan Rp. 4,71 miliar. Kenaikan berlanjut di tahun 2024 sebesar 75,26 persen, sehingga menjadi Rp.8,26 miliar, tetapi angka ini masih lebih rendah dibanding posisi tiga tahun sebelumnya.

Jika merujuk pada UU No. 28 tahun 2009, sumber pendapatan pajak dan retribusi cukup banyak. Untuk level kabupaten/kota, ada 11 jenis pajak dan 31 jenis retribusi (meski sebagian sudah dicabut oleh peraturan perundang-undangan) yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Meski begitu, nampaknya aktivitas perekonomian di Kabupaten Pasangkayu tidak semua masuk dalam kategori pajak dan retribusi tersebut atau jika pun termasuk, potensinya sangat rendah sehingga ada objek pajak yang dipungut tapi pendapatannya rendah dan kemungkinan ada objek pajak yang belum dipungut karena potensinya tidak ada atau rendah.

Tahun 2022, pemerintah menerbitkan regulasi baru yaitu UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengubah komponen pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pada UU No. 28 tahun 2009 jumlah komponen pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten/kota sebanyak 11 jenis, di UU No. tahun 2022 hanya sembilan jenis pajak. Meski begitu, diperkirakan pendapatan dari pajak di regulasi terbaru akan lebih besar karena ada beberapa komponen pajak yang potensinya besar seperti opsen PKB dan opsen BBNKB. Kebijakan opsen pajak merupakan upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak pemerintah daerah. Namun UU No. 1 tahun 2022 belum diterapkan di Kabupaten Pasangkayu meski regulasi ini sudah berlaku pada 5 Januari 2022 dan diperpanjang hingga dua tahun yaitu 5 Januari 2024. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu PP No. 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun per Juli 2024 belum ada dasar hukum di level Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan UU No. 1 tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih menggunakan UU No. 28 tahun 2009 sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kemudian diturunkan ke peraturan daerah.

Komponen PAD Kabupaten Pasangkayu yang proporsinya paling rendah terhadap PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama tahun 2020 hingga 2024, rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan terhadap total PAD hanya 6,76 persen dengan rata-rata perubahan yang negatif yaitu -3,26 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penyertaan modal daerah yaitu penyertaan modal di BUMD atau BUMN. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah terus menurun, mulai dari -9,27 persen tahun 2020, kemudian -4,55 persen tahun 2021, berlanjut jadi -2,33 persen tahun 2022, dan di tahun 2023 turun lagi -1,05 persen. Hanya pada tahun 2024, komponen PAD ini mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

Data realisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu sangat rentan terhadap perubahan kebijakan di level pemerintah pusat karena ketergantungan fiskalnya yang tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tak ada perubahan signifikan dalam komposisi komponen pendapatan daerah, masih di dominasi oleh transfer pemerintah. Pemerintah daerah juga belum mengimplementasikan UU No. 1 Tahun 2022, padahal diperkirakan dengan regulasi terbaru ini, proporsi PAD akan membesar dan perlahan dapat mengurangi ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rincian tentang realisasi pendapatan daerah dan rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, diuraikan pada tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024.

Masih belum optimalnya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan PAD, khususnya pajak daerah retribusi disebabkan banyak faktor. Selain masalah regulasi, temuan BPK Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan masih ada "kebocoran" pendapatan pajak daerah, salah satunya dari pajak hotel. Menurut BPK, pemerintah daerah tidak memungut pajak hotel berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (10%). Hal ini bisa terjadi karena kesalahan penafsiran atas regulasi atau karena keterbatasan kompetensi SDM yang membidangi urusan ini.

Tabel 2.12
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **1** | **Pendapatan** | **860.864.595.993** | **811.950.072.859** | **842.548.646.860** | **828.565.205.837** | **852.847.983.622** | -0,57% |
| 1.1 | **Pendapatan Asli Daerah** | **39.536.365.300** | **41.195.629.637** | **46.833.564.003** | **59.370.848.813** | **61.101.297.061** | 7,29% |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 8.789.556.473 | 11.168.774.409 | 11.816.980.972 | 16.807.664.021 | 22.965.168.782 | 22,60% |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 17.409.658.751 | 14.969.595.943 | 3.279.849.141 | 4.714.260.496 | 8.262.414.576 | 2,16% |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.410.421.938 | 3.255.417.849 | 3.179.607.497 | 3.146.110.906 | 3.173.536.172 | -3,26% |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 9.926.728.138 | 11.801.841.436 | 28.557.126.394 | 34.702.813.390 | 26.700.177.530 | 29,43% |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **794.408.642.838** | **745.781.718.998** | **795.300.374.807** | **768.664.685.044** | **784.455.018.458** | -0,20% |
| **1.2.1** | **Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)** | **643.767.261.212** | **659.167.007.691** | **700.970.635.310** | **681.904.851.030** | **695.020.759.614** | 0,54% |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 9.518.875.410 | 21.725.236.423 | 18.134.798.773 | 10.116.542.067 | 9.531.487.000 | 5,65% |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 797.711.224 | 3.763.912.505 | 2.076.832.122 | 14.070.260.145 | 12.192.946.000 | 179,18% |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 459.368.611.000 | 453.516.929.000 | 452.894.338.704 | 473.350.213.036 | 496.999.363.000 | -0,01% |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 125.195.457.106 | 137.405.103.649 | 163.373.261.075 | 104.368.130.391 | 102.005.217.974 | -0,55% |
| 1.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 48.886.606.472 | 42.755.826.114 | 64.491.404.636 | 79.999.705.391 | 74.291.745.640 | 11,79% |
| **1.2.2** | **Transfer Pemerintah Pusat /Lainnya** | **65.571.497.000** | **61.612.781.600** | **62.219.653.600** | **53.799.805.000** | **54.694.684.000** | -9,22% |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuaian | 65.571.497.000 | - | 10.755.538.000 | - | | 4,03% |
| 1.2.2.2 | Dana Desa | - | 61.612.781.600 | 51.464.115.600 | 53.799.805.000 | 54.694.684.000 | -3,42% |
| **1.2.3** | **Transfer Pemerintah Provinsi** | **85.069.884.626** | **25.001.929.707** | **32.110.085.897** | **32.960.029.014** | **34.739.574.844** | 43,74% |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | 22.622.653.822 | 25.001.929.707 | 31.775.329.896 | 32.672.529.014 | 34.739.574.844 | 9,14% |
| 1.2.3.2 | Bantuan Keuangan | 62.447.230.804 | - | 334.756.001 | 287.500.000 | - | 2440,83% |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **26.919.587.855** | **24.972.724.224** | **414.708.050** | **529.671.980** | **7.291.668.103** | 233,44% |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 26.368.200.000 | 358.569.094 | 414.708.050 | 529.671.980 | 736.129.795 | -9,64% |
| 1.3.2 | Pendapatan Lainnya | 551.387.855 | 24.614.155.130 | - | - | 6.555.538.308 | 2175,00% |

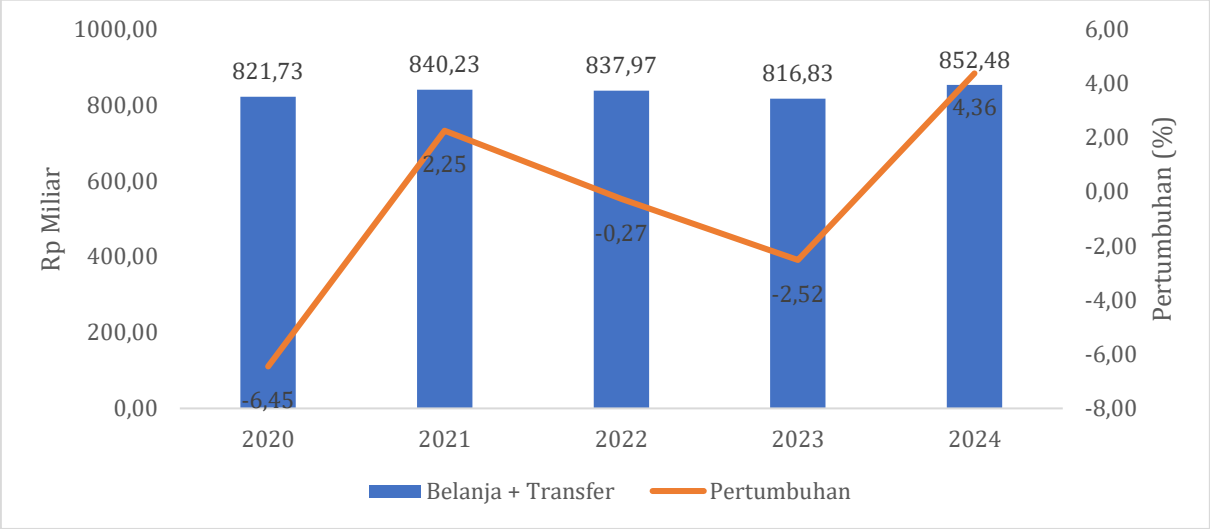
Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

## B. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Searah dengan tren perubahan pendapatan daerah, belanja daerah Kabupaten Pasangkayu juga cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 – 2023, total belanja daerah mengalami penurunan. Analisisnya bisa diarahkan pada kecenderungan pemerintah daerah menurunkan belanja daerah karena pendapatan daerah yang menurun, atau dimungkinkan juga akibat adanya kebijakan penghematan, atau justru bisa disebabkan karena persoalan administratif seperti keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dll.

Tahun 2020, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp.821,73 miliar, lalu meningkat 2,25 persen menjadi Rp.840,23 miliar pada tahun 2021. Namun dua tahun selanjutnya secara persisten angkanya turun -0,27 persen tahun 2022 dan -2,52 persen tahun 2023 dengan realisasi masing-masing Rp.837,97 miliar dan Rp.816,83 miliar. Meski situasi pandemi sudah berakhir di tahun 2023, tapi belanja daerah justru turun menunjukkan indikasi efek pandemi masih belum sepenuhnya hilang. Kenaikan baru terjadi di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,36 persen dengan capaian belanja sebesar Rp.852,48 miliar.

Gambar 2. 227
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

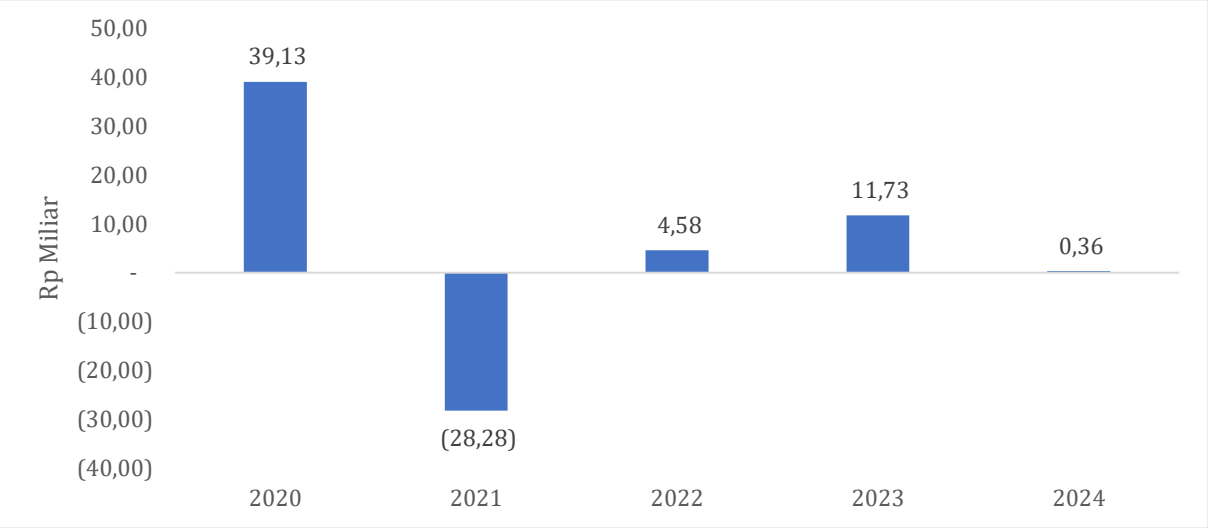



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Penurunan belanja daerah ini bisa jadi merupakan langkah positif pemerintah daerah jika alasan mendasar dilakukannya pengurangan karena alasan efisiensi belanja daerah yang selama ini dinilai tidak rasional. Namun, jika penurunan ini disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah mengelola fiskal daerah secara efektif, maka dampaknya negatif terhadap pembangunan daerah karena bisa mengindikasikan ada program yang tidak berjalan secara efektif. Indikasi pertama nampaknya lebih relevan dilihat dari nilai surplus/defisit anggaran pemerintah daerah yang terlihat normal dalam lima tahun terakhir. Surplus yang tidak lazim hanya terjadi di tahun 2020 disaat daerah berjibaku menghadapi pandemi, anggaran Kabupaten Pasangkayu justru surplus Rp.39,13 miliar. Tahun 2021, anggaran pemerintah daerah mengalami

defisit Rp.28,28 miliar, kemudian kembali surplus di tahun selanjutnya dengan angka Rp.4,58 miliar tahun 2022 dan Rp.11,73 miliar tahun 2023. Surplus masih terjadi di tahun 2024 sebesar Rp.0,36 miliar, meskipun dengan angka yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Surplus tidak selalu menunjukkan kinerja positif keuangan daerah, sebab ada kemungkinan surplus tersebut terjadi karena ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola anggaran secara baik. Pada prinsipnya APDB daerah tidak boleh menyisakan uang karena jika terjadi surplus, anggaran tersebut harus dialokasikan ke beberapa hal yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 228
Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)




Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Meski realisasi surplus masih dalam batas wajar, tapi indikasi bahwa pemerintah daerah masih belum optimal mengelola keuangan daerah muncul jika mengamati realisasi belanja realisasi belanja. Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, capaian realisasi belanja dan transfer tidak pernah mencapai 100% dari anggaran yang direncanakan. Tahun 2021, capaian realisasi belanja dan transfer hanya 94,54 persen atau ada selisih Rp.48,49 miliar antara realisasi dan anggaran, sementara di tahun 2022 capaiannya naik jadi 95,65 persen dengan selisih Rp. 38,07 miliar. Tahun 2023, hanya 95,42 persen anggaran yang bisa direalisasikan dari besaran target Rp.856,00 miliar atau ada selisih Rp. 39,17 miliar. Sementara pada tahun 2024, hanya 95,48 persen anggaran belanja yang direalisasikan atau selisih sebesar Rp.40,34 miliar.

Realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target bisa disebabkan karena banyak faktor, salah satu yang umum adalah masalah teknis dalam pengelolaan anggaran seperti masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti kelambatan dalam penetapan pemenang tender. Ketidakcermatan dalam mengelola belanja daerah juga menjadi faktor, seperti yang dikemukakan

dalam temuan BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2023. Salah satu temuan BPK adalah Pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras didasarkan pada data keluarga tidak mutakhir sehingga membuat pemerintah daerah berpotensi mengeluarkan anggaran diluar ketentuan sehingga membebani keuangan negara. Temuan lain adalah pembayaran tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada pegawai yang menjalankan cuti besar/cuti alasan penting. Dalam wawancara BPK, empat staf kepegawaian dan tiga Bendahara Pengeluaran mengungkapkan bahwa pembayaran TPP tetap diberikan kepada pegawai yang sedang cuti besar atau cuti alasan penting karena ketidaklengkapan dalam mencatat jumlah hari kerja pegawai yang sedang cuti. Selain itu, tidak ada verifikasi terhadap kebenaran perhitungan TPP dan SPP sebelum pencairan SP2D ke BPKAD. Kesalahan semacam ini membuat pengelola anggaran harus mengembalikan anggaran yang mengalami kelebihan pembayaran ke kas daerah sehingga menyebabkan realisasi sulit mencapai target anggaran.

Pada komponen belanja, penurunan terjadi terutama pada belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Rata-rata pertumbuhan belanja modal selama 2020 – 2024 turun sebesar minus 7,68 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal mencapai Rp.225,08 miliar, lalu turun menjadi Rp.182,03 miliar di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin sedikitnya proporsi dan jumlah belanja modal yang dialokasikan pada APBD. Padahal, belanja modal memiliki peran penting untuk mengungkit aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Di sisi lain, belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,47 persen per tahun. Salah satu komponen penting dalam belanja operasi ini adalah belanja pegawai dengan peranan rata-rata sebesar 57 persen terhadap total belanja operasi dan peranan sebesar 35 persen terhadap total belanja daerah. Belanja pegawai juga terus meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebeasr 1,77 persen per tahun.

Tabel 2.13
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

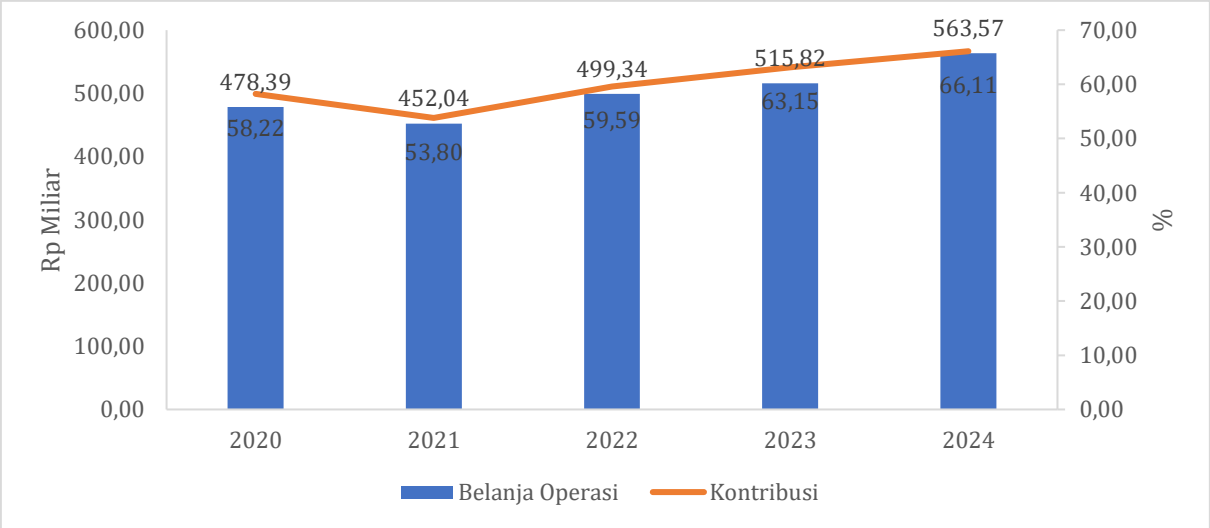
| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
| **1** | **Belanja** | **727.281.844.005** | **731.273.033.878** | **738.483.950.060** | **713.933.362.251** | **746.087.485.394** | -0,52% |
| **1.1** | **Belanja Operasi** | **478.394.949.845** | **452.038.608.172** | **499.339.728.495** | **515.820.956.700** | **563.569.908.071** | 3,47% |
| 1.1.1 | Belanja Pegawai | 283.814.163.069 | 267.378.260.483 | 292.039.202.053 | 283.442.561.180 | 298.942.450.068 | 1,77% |
| 1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.051.926.822 | 166.032.692.805 | 175.452.902.211 | 198.846.542.411 | 227.464.421.857 | 4,38% |
| 1.1.3 | Belanja Hibah | 34.959.422.454 | 16.652.957.384 | 31.495.624.231 | 33.141.853.109 | 36.825.036.146 | 65,19% |
| 1.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 996.000.000 | 1.974.697.500 | 352.000.000 | 390.000.000 | 338.000.000 | -10,80% |
| 1.1.5 | Belanja Bantuan | - | - | - | - | | NA |
| 1.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 573.437.500 | - | - | - | | NA |
| **1.2** | **Belanja Modal** | **225.079.176.313** | **272.605.838.183** | **237.236.268.565** | **197.783.625.551** | **182.034.249.323** | -7,68% |
| 1.2.1 | Belanja Modal Tanah | 2.031.821.500 | 1.576.139.561 | 1.703.032.928 | 999.732.700 | 1.556.819.900 | -13,44% |
| 1.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53.758.248.267 | 35.046.614.878 | 49.711.893.112 | 23.481.480.203 | 33.154.767.773 | 4,13% |
| 1.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.562.124.098 | 67.317.537.497 | 47.336.732.078 | 64.160.323.251 | 43.406.647.247 | -7,04% |
| 1.2.4 | Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan | 107.963.594.308 | 167.231.548.288 | 137.995.574.447 | 109.042.548.297 | 103.170.690.203 | -3,89% |
| 1.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.763.388.140 | 1.433.997.959 | 489.036.000 | 97.765.100 | 672.874.200 | 67,86% |
| 1.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | 1.776.000 | 72.450.000 | NA |
| **1.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **23.807.717.847** | **6.628.587.523** | **1.907.953.000** | **328.780.000** | **483.328.000** | -35,66% |
| 1.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 23.807.717.847 | 6.628.587.523 | 1.907.953.000 | 328.780.000 | 483.328.000 | 576,13% |
| **2** | **Transfer** | **94.451.922.604** | **108.958.794.100** | **99.486.293.052** | **102.897.030.524** | **106.396.589.423** | -0,15% |
| 2.1 | Belanja Bagi Hasil | - | 820.215.500 | 1.194.999.500 | 1.398.679.900 | 1.724.590.695 | NA |
| 2.2 | Dana Desa | 59.447.230.804 | - | - | - | | NA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Bantuan Keuangan | 35.004.691.800 | 108.138.578.600 | 98.291.293.552 | 101.498.350.624 | 104.671.998.728 | 34,77% |
| **Total Belanja dan Transfer** | | **821.733.766.609** | **840.231.827.978** | **837.970.243.112** | **816.830.392.775** | **852.484.074.817** | -2,10% |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Data belanja daerah Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan berbagai hal mendasar tentang keuangan daerah, salah satunya adalah prioritas belanja. Dalam struktur APBD Kabupaten Pasangkayu, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja operasi, sama seperti kondisi dibanyak daerah di Indonesia. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Komponen belanja operasi adalah belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Sepanjang periode lima tahun terakhir, proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah Kabupaten Pasangkayu cenderung naik, terutama di tahun 2022, 2023, dan 2024. Setelah sempat naik menjadi 58,22 persen di tahun 2020, proporsi belanja operasi turun di tahun 2021 ke angka 53,80 persen. Selama tiga tahun tersebut, realisasi belanja operasi secara beruntun turun, mulai dari Rp.478,39 miliar di tahun 2020 dan menjadi Rp.452,04 miliar di tahun 2021. Tahun 2022, pemerintah daerah menaikkan alokasi belanja operasi hingga 59,59 persen dari total belanja daerah dengan realisasi sebesar Rp.499,34 miliar dan berlanjut di tahun 2023 hingga 63,15 persen atau setara Rp.515,82 miliar. Kenaikan berlanjut hingga menjadi Rp.563,57 miliar di tahun 2024 dengan proporsi sebesar 66,11 persen. Angka tersebut menjadi nilai tertinggi belanja operasi Kabupaten Pasangkayu untuk enam tahun terakhir.

Gambar 2. 229
Realisasi Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

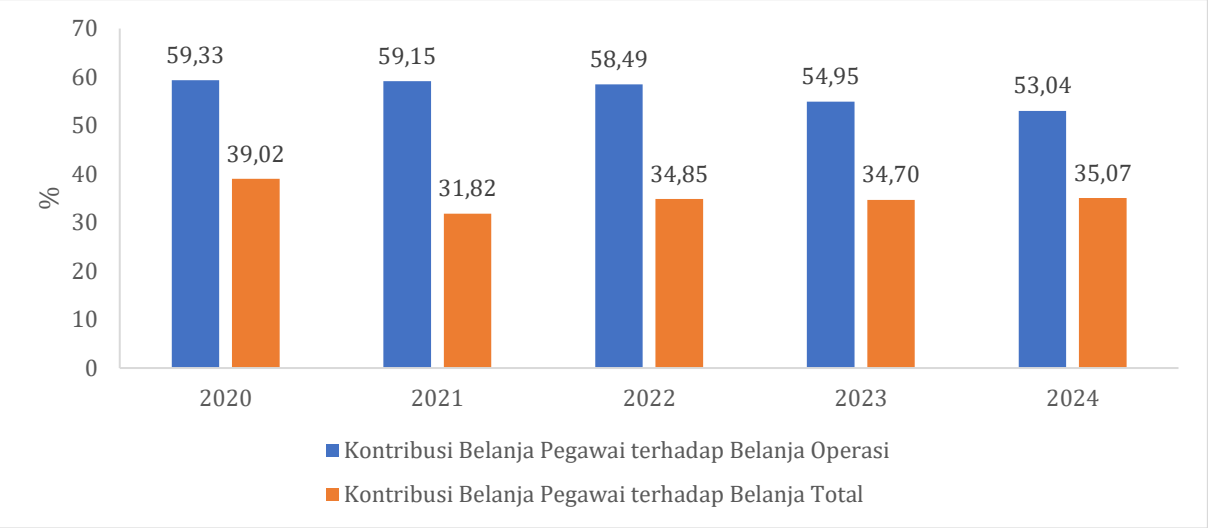



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Sebagian besar belanja operasi dan total belanja daerah dihabiskan untuk belanja pegawai yang diartikan dalam regulasi sebagai kompensasi terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Bentuk kompensasi tersebut antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta honorarium. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, rata-rata proporsi

belanja pegawai Kabupaten Pasangkayu terhadap belanja operasi dan total belanja mencapai 57 persen dan 35,07 persen selama lima tahun terakhir, lebih dari 1/3 total belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Pada tahun 2021 hingga 2024 ada kecenderungan penyusutan besaran proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi dari 59,15 persen ke 53,04 persen. Sementara disisi lain, proporsinya terhadap total belanja daerah cenderung membesar dari 31,82 persen ke 35,07 persen.

Gambar 2. 230
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2024 (%)



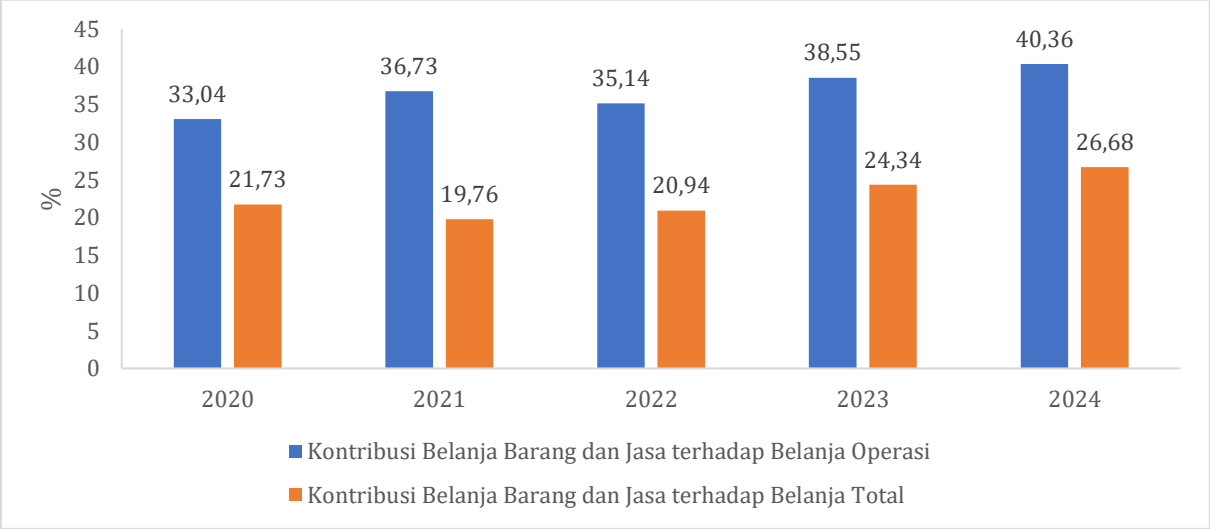

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Komponen belanja operasi kedua terbesar adalah belanja barang dan jasa. Dalam PP No.12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa belanja barang dan jasa merupakan belanja pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa lain.

Rata-rata proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja operasi dan total belanja daerah mencapai 33,46 persen dan 22,19 persen selama interval waktu 2020-2024. Dibandingkan dengan belanja pegawai, proporsi belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi relatif dinamis terlihat dari angkanya yang naik di tahun 2021 dari 33,04 persen ke 36,73 persen, kemudian turun di tahun 2022 menjadi 35,14 persen, dan meningkat sampai 40,36 persen untuk tahun 2024. Untuk proporsi terhadap total belanja daerah, sepanjang tahun 2021 hingga 2024, angkanya cenderung naik, mulai dari 19,76 persen, kemudian naik menjadi 26,68 persen. Dari total belanja barang dan jasa, ada dua komponen yang paling besar anggaranya yaitu belanja jasa

dan belanja perjalanan dinas. Tahun 2023, pemerintah daerah menghabiskan anggaran Rp.77,23 miliar atau setara dengan 38,84 persen dari total belanja barang dan jasa untuk kepentingan belanja jasa dan Rp.45,00 miliar atau 22,63 persen digunakan untuk perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas inilah yang seringkali menjadi sorotan, terutama oleh pemerintah pusat sebab angkanya terlalu besar. Dalam konteks Kabupaten Pasangkayu, belanja perjalanan dinas jauh lebih besar dibandingkan beberapa komponen belanja modal seperti belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin. Pemerintah daerah perlu memperhatikan hal tersebut, sebab jauh lebih penting bagi daerah membelanjakan uang untuk menambah aset dibandingkan membiayai perjalanan dinas yang seringkali tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 2. 231
Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Operasi dan Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 (%)



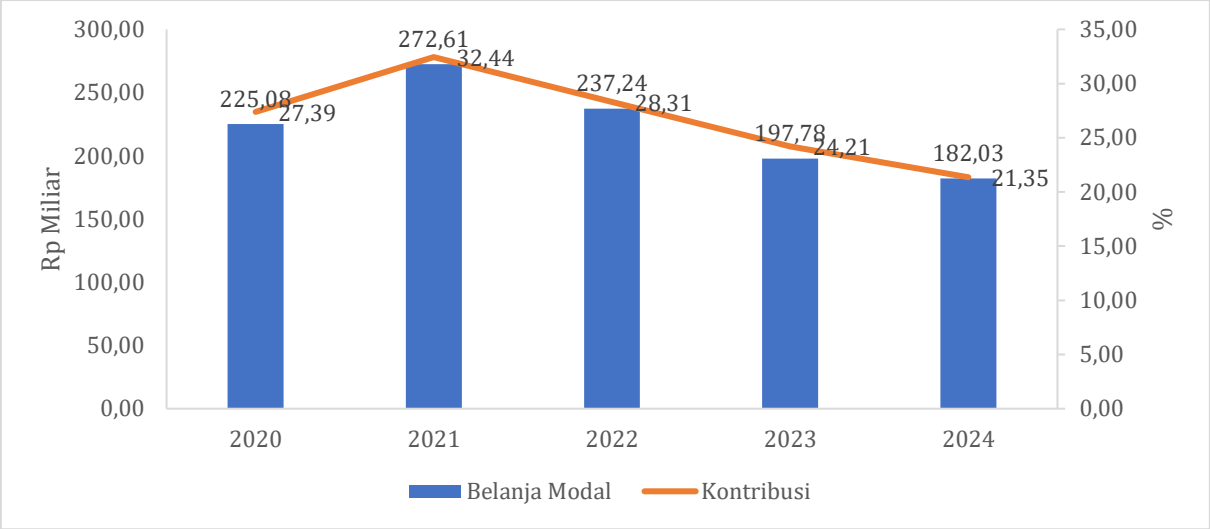

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Dibandingkan dengan belanja operasi, proporsi belanja modal jelas lebih rendah dan trennya dalam lima tahun terakhir cenderung turun. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja ini seharusnya diperbesar proporsinya dalam struktur belanja daerah karena sangat berkaitan kepemilikan aset pemerintah daerah, salah satunya infrastruktur. Jika belanja modal naik, hal tersebut mengindikasikan adanya Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, di Kabupaten Pasangkayu, porsinya terus menurun.

Tahun 2020, total belanja daerah sebesar Rp.225,08 miliar atau 27,39 persen. Walau sempat naik ke Rp.272,61 miliar atau 32,44 persen di tahun 2021, tapi tiga tahun selanjutnya secara berturut-turut porsinya turun hingga menjadi 21,35 persen di tahun 2024 dengan nilai

sebesar Rp.182,03 miliar. Sebagian besar belanja modal digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi, jaringan dengan proporsi sebesar 55,13 persen dari total belanja modal tahun 2023, kemudian belanja modal gedung dan bangunan 32,44 persen, sisanya untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, dan untuk aset lainnya.

Gambar 2. 232.
Realisasi Belanja Modal dan Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024




Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Kendati proporsi belanja modal jalan, irigasi, jaringan paling tinggi dalam struktur belanja modal, tapi jika dibandingkan nilai dengan komponen belanja operasi seperti belanja pegawai, angka tersebut masih sangat rendah, padahal belanja modal sangat penting bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat telah berkali-kali memberikan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, salah satunya kritik terhadap besarnya proporsi komponen belanja operasi (terutama belanja perjalanan dinas) dibandingkan komponen belanja modal. Situasi ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia dan berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga untuk mengubah pola lama tersebut, pemerintah menentukan batasan proporsi belanja pegawai dalam UU No.1 Tahun 2022. Pasal 146 menjelaskan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 masih mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 30 persen dari total belanja daerah, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal di undangkannya UU No. 1 tahun 2022 . Untuk belanja infrastruktur, pemerintah memberikan batas bawah di Pasal 147 bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sementara di Kabupaten Pasangkayu, total belanja modalnya saja masih 27,70 persen dari total belanja daerah.

Komponen pengeluaran daerah kabupaten Pasangkayu yang paling rendah adalah belanja tidak terduga dan transfer. Dalam regulasi terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja transfer di masukkan sebagai salah satu komponen belanja daerah. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Sedangkan belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tahun 2024, Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan anggaran cukup tinggi untuk belanja transfer, angkanya mencapai Rp.106,40 miliar atau setara 12,48 persen dari total belanja dan transfer. Komponen transfer terbesar adalah bantuan keuangan, nilai mencapai Rp. 104,67 miliar tahun 2024 atau 98,38 persen dari total belanja transfer. Bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan umum kabupaten Pasangkayu kepada desa yang terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa. Untuk belanja tak terduga, realisasinya tahun 2024 hanya Rp.0,48 miliar. Uang tersebut digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penanganan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di tahun 2024.

Hasil analisis data belanja daerah menunjukkan beberapa hal mendasar yang penting menjadi perhatian pemerintah daerah seperti belanja daerah yang cenderung turun dalam lima tahun terakhir, proporsi komponen belanja operasi yang lebih tinggi dari komponen belanja modal, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah yang terus menurun, proporsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur yang masih butuh penyesuaian sesuai dengan ketentuan UU, dan berbagai tantangan teknis lainnya. Pada prinsipnya belanja daerah harus dikelola secara efisien, tapi juga mesti memperhatikan efektivitas pencapaian kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga harus lebih cermat memperhatikan komponen belanja yang tidak terlalu penting atau tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan perlahan-lahan mengurangi alokasi anggaran untuk komponen belanja semacam ini.

Permendagri No.86 tahun 2007 membagi beberapa klasifikasi belanja daerah selain yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Salah satu klasifikasi belanja yang juga penting dianalisis adalah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Belanja kebutuhan aparatur adalah klasifikasi belanja yang mengumpulkan semua belanja kebutuhan aparatur dalam dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan implementasi program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tabel 2.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 (Miliar Rp)

| No | Uraian | Nilai Belanja (Miliar Rp) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **223,69** | **243,43** | **237,46** | **259,71** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 201,96 | 211,25 | 211,85 | 236,22 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 9,50 | 20,17 | 12,76 | 11,75 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH | 12,12 | 11,95 | 12,43 | |
| 3.1 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD | 11,39 | 11,26 | 11,28 | 10,70 |
| 3.2 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| 3.3 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,28 |
| 3.4 | Belanja Operasional KDH/WKDH | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Belanja Pemungutan Pajak Daerah | 0,11 | 0,06 | 0,42 | 0,43 |
| **B** | **Belanja Langsung** | **325,57** | **298,74** | **266,62** | **250,45** |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 5,63 | 4,36 | 4,22 | 2,68 |
| 2 | Belanja Uang Lembur | - | - | - | - |
| 3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | - | 0,20 | 0,40 | 0,25 |
| 4 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS**) | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,27 |
| 5 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 6,01 | 9,62 | 8,03 | 12,51 |
| 6 | Belanja Makan dan Minum Pegawai | 6,50 | 6,38 | 8,25 | 7,08 |
| 7 | Belanja Pakaian Kerja | 0,46 | 0,77 | 0,46 | 0,63 |
| 8 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 0,53 | 0,98 | 1,15 | 1,24 |
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas | 32,52 | 37,86 | 45,00 | 42,76 |
| 10 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | - | - | - | - |
| 11 | Belanja Pemulangan Pegawai | - | - | - | - |
| 12 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll) | 272,61 | 237,24 | 197,78 | 182,03 |
| **Total** | | **549,26** | **542,17** | **504,08** | **510,16** |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu menurun dari Rp.549,26 miliar tahun 2021 ke Rp.542,17 miliar tahun 2022, dan Rp.504,08 miliar untuk tahun 2023. Namun angka ini kembali meningkat menjadia Rp.510,16 miliar di tahun 2024. Komponen terbesar dari belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah belanja langsung, dengan proporsi rata-rata dalam empat tahun sebesar 54,08 persen, sementara belanja tidak langsung hanya 45,19 persen. Komposisi ini terlihat baik, karena belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Namun belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ini yang belakangan menjadi salah satu isu terkait dengan besarnya belanja yang dinikmati oleh aparatur dibandingkan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jika diproporsikan antara belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah (tidak termasuk transfer), maka terlihat besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya untuk memenuhi kebutuhan aparatur saja. Tahun 2021, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja mencapai 75,11 persen, kemudian turun ke 73,42 persen di tahun 2022, dan untuk tahun 2023 angkanya 70,61 persen. Selama tiga tahun tersebut rerata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tembus 73,04 persen, artinya jika belanja daerah sebesar Rp. 1 miliar, Rp. 730 juta digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur, sementara yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat hanya Rp.230 juta saja. Jika dimasukkan komponen transfer, maka proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2021 hingga 2024 menjadi masing-masing 65,37 persen, 64,70 persen, 61,71 persen, dan 66,11 persen. Ada dua komponen belanja yang perlu diperhatikan karena angkanya cukup besar yaitu belanja perjalanan dinas dan belanja modal yang hanya dinikmati oleh aparatur pemerintah saja seperti belanja mobil dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, dll. Sementara belanja yang berkaitan gaji dan tunjangan aparatur, butuh keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi.

Tabel 2.15.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2024

| No. | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Miliar Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Miliar Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahun 2021 | 549,26 | 840,23 | 65,37% |
| 2 | Tahun 2022 | 542,17 | 837,97 | 64,70% |
| 3 | Tahun 2023 | 504,08 | 816,83 | 61,71% |
| 4 | Tahun 2024 | 563,56 | 852,48 | 66,11% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu, diolah

Beberapa komponen belanja pemenuhan kebutuhan aparatur harus disediakan karena termasuk dalam kategori belanja wajib dan belanja mengikat. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja wajib dan belanja mengikat punya dua tujuan yaitu pertama, ketika APBD pemerintah daerah tidak ada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat mengeluarkan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dengan mempedomani anggaran tahun sebelumnya. Kedua, kedua, Ketika Kas pemerintah daerah tidak mencukupi untuk

pengeluaran belanja yang telah direncanakan sebelumnya, maka belanja mengikat dan wajib yang harus menjadi prioritas pengeluaran daerah.

Permendagri No.86 tahun 2017 mengidentifikasi beberapa komponen belanja wajib dan mengikat yaitu belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, pembayaran pokok utang, dan beberapa komponen lain. Pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk periode waktu 2021 hingga 2023 cenderung bertambah, Rp. 215,48 miliar tahun 2021, Rp.223,15 miliar tahun 2022, dan Rp.223,86 miliar tahun 2023. Semua belanja wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu masuk dalam komponen belanja tidak langsung karena tak ada uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pengeluaran, sehingga angka total belanja tidak langsung sama dengan total pengeluaran wajib dan mengikat.

Tabel 2.16.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2024 (Miliar Rp)

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **215,48** | **223,15** | **223,86** | **247,31** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 203,47 | 211,25 | 211,85 | 236,00 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,33 |
| 3 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 11,39 | 11,26 | 11,28 | 10,70 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,28 |
| 5 | Belanja Bunga | - | - | - | |
| 6 | Belanja bagi hasil | - | - | - | |
| **B** | **Pembiayaan Pengeluaran** | **-** | **-** | **-** | |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | |
| 2 | Pembayaran pokok utang | - | - | - | |
| **Total (A+B)** | | **215,48** | **223,15** | **223,86** | **247,31** |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Kondisi belanja daerah Kabupaten Pasangkayu sangat dipengaruhi oleh kebijakan belanja daerah yang ditetapkan pemerintah daerah. Kebijakan daerah merupakan arah yang ditetapkan dalam menggunakan anggaran daerah. Belanja daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah cerminan dari kebijakan belanja yang ditetapkan. Secara rinci kebijakan belanja daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 hingga 2024 diuraikan dalam tabel Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 dibawah ini:

Tabel 2.17
Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024

| Kebijakan Belanja Daerah | | | |
|---|---|---|---|
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Menerbitkan Peraturan Bupati tentang pemberian TPP bagi ASN | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang pemberian TPP bagi ASN | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang pemberian TPP bagi ASN | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP bagi ASN |
| Menerbitkan Peraturan bupati tentang pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN | Menerbitkan Peraturan bupati tentang pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN | Menerbitkan Peraturan bupati tentang pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN | Menerbitkan Peraturan bupati tentang pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN |
| Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja | Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja |
| Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum |
| Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang standar satuan harga | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang standar satuan harga | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang standar satuan harga | Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang standar satuan harga |
| Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD |
| Berpedoman pada dengan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | Berpedoman pada dengan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | Berpedoman pada dengan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | Berpedoman pada dengan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya |
| Berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Standar | Berpedoman pada Peraturan Presiden | Berpedoman pada Peraturan Presiden | Berpedoman pada Peraturan Presiden |

| Kebijakan Belanja Daerah | | | |
|---|---|---|---|
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Harga Satuan Regional | tentang Standar Harga Satuan Regional | tentang Standar Harga Satuan Regional | tentang Standar Harga Satuan Regional |
| Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah |
| Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah |
| | | Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya | Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya |
| | | Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

## C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dalam struktur APBD memainkan peran penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai investasi jangka panjang yang esensial, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dengan adanya komponen pembiayaan yang solid, pemerintah daerah dapat mengelola likuiditas, mempercepat realisasi proyek-proyek strategis, dan merespons kebutuhan mendesak dengan lebih fleksibel. Selain itu, diversifikasi

sumber pendanaan melalui pembiayaan daerah mengurangi ketergantungan pada pendapatan tunggal dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pembiayaan daerah punya dua komponen utama yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama rentang waktu lima tahun terakhir, penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi penerimaan pembiayaan terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu Rp.62,02 miliar, naik 170,93 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 yang hanya Rp.22,89 miliar. Tahun 2022, angkanya anjlok ke Rp.33,71 miliar atau turun -45,65 persen, kemudian bertambah 13,58 persen tahun 2023 dengan total nilai Rp.38,29 miliar dan pada tahun 2024 menjadi Rp.50.04 miliar. Satu-satunya komponen penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasangkayu adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sehingga angka penerimaan pembiayaan sama dengan komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Pada uraian tentang pendapatan daerah, realisasi komponen PAD dan pendapatan transfer Kabupaten Pasangkayu melampaui targetnya, sehingga hasil tersebut menjadi sumber penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran.

Selama enam tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu hanya memiliki penerimaan pembiayaan, tidak ada pengeluaran pembiayaan. Realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pasangkayu yang nihil menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak punya pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, tidak melakukan penyertaan modal daerah, tidak membentuk dana cadangan, dan tidak memberikan pinjaman kepada pihak lain. Hal itu membuat pembiayaan netto angkanya sama dengan penerimaan pembiayaan, kecuali di tahun 2021 karena ada koreksi Silpa sebesar Rp.0,03 miliar dan tahun 2024 karena ada penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Dengan pembiayaan netto ditambah/dikurangi dengan

surplus/defisit APBD, maka diperoleh SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2019 hingga 2024 yang cenderung naik. Tahun 2020 menjadi kenaikan tertinggi dari Rp.22,89 miliar tahun 2019 ke Rp.62,02 miliar tahun 2020. Meski tahun 2021 penerimaan pembiayaan paling besar, tapi ada defisit APBD sebesar Rp.28,28 miliar yang harus ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sehingga SILPA-nya tersisa Rp.33,71 miliar. Tahun 2022 hingga 2024, SILPA pemerintah daerah naik masing-masing sebesar Rp. 38,29 miliar, Rp.50,02 miliar, dan Rp.50,41 miliar karena terjadi surplus APBD.

Tabel 2.18
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pembiayaan** | | | | | |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **22.892.798.163** | **62.023.627.547** | **33.708.761.252** | **38.287.165.001** | **50.045.678.063** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu | 22.892.798.163 | 62.023.627.547 | 33.708.761.252 | 38.287.165.001 | 50.021.978.063 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | 23.700.000 |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | - | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Koreksi Silpa** | **-** | **33.111.175** | **-** | **-** | **-** |
| Jumlah Koreksi Silpa | - | 33.111.175 | - | - | |
| **Pembiayaan Netto** | **22.892.798.163** | **61.990.516.372** | **33.708.761.252** | **38.287.165.001** | **50.045.678.063** |
| **SILPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran)** | **62.023.627.547** | **33.708.761.253** | **38.287.165.000** | **50.021.978.063** | **50.409.586.868** |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Ketentuan mengenai SILPA sudah diatur dalam regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil. Jika dalam perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Namun kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak sepenuhnya mengikuti regulasi tersebut, sebab selama lima tahun terakhir SILPA tidak pernah nol, bahkan angkanya mencapai puluhan miliar rupiah dengan kecenderungan yang semakin membesar, terutama dalam tiga tahun terakhir. Selain tidak mengikuti regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan semacam ini tentu tidak sejalan dengan

tujuan keuangan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas. Hal ini telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah lima tahun ke depan.

Karena tak ada pengeluaran pembiayaan, komponen perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2020 hingga 2024 sama angkanya dengan SILPA. Angka masing-masing komponen dalam perubahan saldo anggaran diuraikan secara rinci dalam tabel perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

Tabel 2.19
Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024
(Miliar Rp)

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 22,89 | 62,02 | 33,71 | 38,29 | 50,02 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 22,89 | 62,02 | 33,71 | 38,29 | 50,02 |
| **Sub Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 62,02 | 33,71 | 38,29 | 50,02 | 50,41 |
| **Sub Total** | **62,02** | **33,71** | **38,29** | **50,02** | **50,41** |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Anggaran Lebih Akhir** | **62,02** | **33,71** | **38,29** | **50,02** | **50,41** |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Saat keuangan daerah mengalami defisit, pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Tabel penutup defisit riil anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 menguraikan tentang sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit keuangan daerah. Pada analisis sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu sering surplus dibandingkan defisit.

Tabel 2.20
Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 (Miliar Rp)

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Realisasi Pendapatan Daerah** | **811,95** | **842,55** | **828,57** | **852,85** |
| | Dikurangi Realisasi | | | | |
| **2** | Belanja Daerah | 840,23 | 837,97 | 816,83 | 852,48 |
| **3** | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A** | **(Defisit Riil) / Surplus** | **-28,28** | **4,58** | **11,73** | **0,36** |
| | Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan: | | | | |
| **4** | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 61,99 | 33,71 | 38,29 | 50,05 |
| **5** | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **61,99** | **33,71** | 38,29 | 50,05 |
| **A+B** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | **33,71** | **38,29** | **50,02** | **50,41** |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

Selama tahun 2021 hingga 2024, defisit hanya terjadi di tahun 2021 sebesar Rp28,28 miliar, tiga tahun selanjutnya mengalami surplus. Untuk menutup defisit yang terjadi di tahun 2021, satu-satunya sumber yang digunakan pemerintah daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang angkanya mencapai Rp61,99 miliar karena nilai sisa lebih perhitungan anggaran masih jauh lebih besar dibandingkan defisit sehingga tak perlu ada pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, atau penerimaan piutang daerah. Setelah menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran untuk menutup defisit, tersisa Rp 33,71 miliar anggaran dalam bentuk sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Karena tahun 2022 hingga 2024 yang terjadi adalah surplus, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan lebih besar yaitu berturut-turut sebesar Rp 38,29 miliar, Rp 50,02 miliar, dan Rp 50,41 miliar

Tabel 2.21
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024
(%)

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Defisit Riil) / Surplus (Miliar Rp) | -28,28 | 4,58 | 11,73 | 0,36 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 219,20% | 736,26% | 326,27% | 13,638% |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 119,20% | 836,26% | 426,27% | 13,738% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu, diolah

Satu-satunya komponen penutup defisit anggaran pemerintah daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, setidaknya sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Jika dilihat lebih rinci, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran bersumber dari beberapa komponen yaitu pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau

akibat lainnya, dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Tahun 2021, komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terbesar adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, proporsinya mencapai 80,46 persen dari total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau setara Rp.49,90 miliar, kemudian komponen pelampauan penerimaan PAD 11,52 persen atau Rp.7,14 miliar, sementara sisanya dikontribusi dari pelampauan penerimaan dana perimbangan dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.22
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024

| No | Uraian | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Miliar Rp | % Dari SiLPA | Miliar Rp | % Dari SiLPA | Miliar Rp | % Dari SiLPA | Miliar Rp | % Dari SiLPA |
| **Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** | | 62,02 | 100,00 % | 38,29 | 100,00% | 50,02 | 100,00 % | 50,41 | 100,00% |
| 1 | Pelampauan penerimaan PAD | 7,14 | 11,52% | 0,82 | 2,13% | 4,86 | 9,71% | 50,02 | 99,23% |
| 2 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 0,96 | 1,55% | 25,30 | 66,07% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 3 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 4,02 | 6,48% | 2,08 | 5,44% | - | 0,00% | 0,02 | 0,05% |
| 4 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 49,90 | 80,45% | - | 0,00% | 33,43 | 66,83% | - | 0,00% |
| 5 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - | 0,00% | 7,04 | 18,38% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 6 | Kegiatan lanjutan | - | 0,00% | - | 0,00% | 11,73 | 23,46% | 0,36 | 0,72% |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Tahun 2022, sisa lebih perhitungan anggaran turun ke Rp.38,29 miliar dengan komposisi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Komponen yang berkontribusi besar adalah pelampauan penerimaan dana perimbangan dengan proporsi 66,07 persen atau Rp.25,30 miliar, kemudian komponen kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 18,38 persen atau Rp.7,04 miliar. Pelampauan penerimaan PAD dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing hanya menyumbang 2,13 persen dan 5,44 persen.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu mencatat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, angkanya mencapai Rp.50,02 miliar. Dari angka total tersebut, 66,83 persen berasal dari pelampauan penerimaan dana perimbangan, 23,46 persen merupakan kegiatan lanjutan. Sisanya dikontribusi oleh pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara komponen Pelampauan penerimaan PAD dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya tercatat 0. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2024,

dimana terdapat SILPA sebesar Rp.50,41 miliar, yang sebagian besar (99,23%) dikontribusikan oleh pelampauan penerimaan PAD, yaitu senilai Rp.50,02 miliar.

### 2.2.2. Neraca Daerah

Belanja daerah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya mempengaruhi komponen dalam neraca daerah, terutama pada komponen aset. Bagian ini akan menganalisis neraca keuangan Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun terakhir. Menganalisis data neraca keuangan daerah sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu. Dengan memahami posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, pemerintah daerah dapat mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi risiko keuangan, memastikan keberlanjutan operasional, dan mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat. Selain itu, dengan mengevaluasi kualitas dan likuiditas aset serta stabilitas kewajiban, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Dalam enam tahun terakhir, nilai aset pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan, tapi arah pertumbuhannya menurun. Pertumbuhan aset paling tinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 5,83 persen, naik dari Rp.1.959,79 miliar tahun 2019 ke Rp. 2.074,09 miliar, tahun selanjutnya terus turun. Tahun 2022, aset pemerintah daerah hanya tumbuh 3,30 persen dengan nilai nominal Rp. 2.142,48 miliar, setahun kemudian cuma naik 2,51 persen menjadi Rp. 2.196,26 miliar, dan tahun 2023 paling rendah yaitu 0,07 persen yang nilainya Rp. 2.197,80 miliar. Bahkan pada tahun 2024, jumlah aset mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,61 persen dengan capaian sebesar Rp.2.185,95 miliar. Penyebab melambatnya pertumbuhan aset pemerintah daerah karena terjadi deselerasi pada komponen aset tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas, termasuk pemerintah daerah, untuk digunakan dalam kegiatan operasi sehari-hari dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi (biasanya lebih dari satu tahun). Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan operasional biasa, melainkan digunakan untuk mendukung aktivitas utama entitas tersebut. Besar-kecilnya nilai aset tetap tergantung pada belanja modal yang dikeluarkan pemerintah. Dalam analisis belanja modal, terlihat tren perubahan belanja modal menurun, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan aset tetap. Selama interval waktu 2020-2024, aset tetap berkontribusi rata-rata 95,69 persen terhadap total aset pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu. Jika pertumbuhannya turun, maka pengaruhnya langsung terhadap penurunan total aset. Tahun 2022, nilai aset tetap naik 4,13 persen, dari Rp.1.905,33 miliar ke Rp.1.983,99 miliar, tapi tiga tahun beruntun angkanya terus turun, mulai

dari 4,08 persen tahun 2021, kemudian 1,55 persen tahun 2022, di tahun 2023 anjlok ke -0,71 persen, bahkan menjadi negatif di tahun 2024 sebesar -0,61 persen.

Akumulasi penyusutan adalah sebab utama menurunnya pertumbuhan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu. Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Dari tahun 2020 hingga 2024, akumulasi penyusutan aset tetap pemerintah daerah naik signifikan. Rata-rata selama periode tersebut, akumulasi penyusutan aset mencapai 16,82 persen, dengan nilai penyusutan rerata Rp. 1.304,75 miliar. Tahun 2024, nilai akumulasi penyusutan mencapai Rp.1.803,37 miliar atau naik 13,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya belanja modal ditambah naiknya akumulasi penyusutan menyebabkan nilai aset terus menurun.

Komponen aset pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu yang mengalami tren pertumbuhannya naik adalah aset lancar. Tahun 2020, aset lancar pemerintah daerah sempat naik 90,34 persen, dari Rp.39,59 miliar ke Rp.75,36 miliar, kemudian merosot -33,84 persen setahun kemudian. Meski begitu, tahun 2022, aset lancar naik lagi sebesar 7,61 persen menjadi Rp.53,65 miliar dan berlanjut di tahun 2023 dengan tumbuh 32,12 persen yang membuat total aset lancar pemerintah daerah sampai Rp.71,85 miliar di tahun 2024. Aset lancar terbesar adalah kas di kas daerah, nilainya tahun 2024 mencapai Rp.47,03 miliar, kemudian persediaan sebesar Rp.9,58 miliar, piutang pajak Rp. 13,37 miliar, sementara sisanya tersebar di komponen lain. Lebih rinci tentang realisasi aset lancar disajikan dalam tabel neraca keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020-2024.

Dari komponen tersebut, yang menarik adalah komponen piutang pajak. Piutang pajak merupakan pajak daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), tetapi belum dibayar oleh wajib pajak daerah. Dari tahun ke tahun piutang pajak pemerintah Kabupaten Pasangkayu terus naik. Tahun 2020, pemerintah daerah mencatat piutang pajak sebesar Rp.10,81 miliar, dan kenaikannya konsisten di tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.11,37 miliar dan Rp.12,22 miliar. Tahun 2023, nilainya mengalami sedikit penurunan ke Rp.11,90 miliar, tetapi kembali meningkat menjadi Rp.13,30 miliar pada tahun 2024. Piutang pajak tersebut merupakan bisa ditagihkan kepada pihak yang berhutang. Namun yang jadi persoalan adalah, sebagian dari piutang tersebut dinilai tak bisa tertagih. Rata-rata penyisihan piutang pajak dalam lima tahun terakhir proporsinya 76,16 persen dari total piutang pajak, bahkan tahun 2023, sebesar 80,01 persen piutang pajak diestimasikan tidak tertagih. Hanya 19,99 persen atau setara Rp.2,38 miliar piutang pajak yang diperkirakan dapat ditagih.

Dibandingkan dengan aset, kewajiban jangka pendek pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu relatif kecil. Dalam neraca keuangan daerah, pemerintah daerah hanya punya kewajiban jangka pendek dengan nilai paling besar Rp.16,52 miliar tahun 2023, lalu turun menjadi Rp.12,25 miliar di tahun 20204. Kewajiban jangka pendek tersebut terdiri dari Utang PFK, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dari empat komponen kewajiban jangka pendek, utang belanja paling dominan karena angkanya mencapai Rp.12,21 miliar, sisanya terbagi ke utang PFK, pendapatan diterima dimuka, dan utang jangka pendek lainnya di tahun 2024.

Dengan aset yang besar dan kewajiban jangka pendek yang relatif kecil, keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam enam tahun terakhir bisa dikategorikan “sehat” dengan mengacu pada indikator rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang menjadi indikator kesehatan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2024 diuraikan dalam tabel analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024.

Tabel 2.23
Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 57.993.436.571,17 | 32.918.550.186,69 | 37.269.210.228,46 | 47.270.952.363,06 | 47.026.184.207,50 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 18.376.832,00 | 63.499.770,00 | 100.243.677,16 | - | 606.700,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 3.766.198,00 | - | 17.282.100,00 | 45.438.055,00 | 24.690.551,58 |
| Kas di Bendahara BLUD | - | - | 768.442.445,95 | 160.887.995,97 | 689.377.573,10 |
| Kas di Bendahara JKN | 691.342.229,00 | 128.201.657,00 | 528.841,00 | 136.691.071,00 | 280.168.446,00 |
| Kas di Bendahara BOK | - | - | - | 2.382.021.867,00 | 2.310.624.308,00 |
| Kas di Bendahara Dana BOS | 3.351.165.427,00 | 670.643.850,00 | 136.435.079,00 | 22.764.461,00 | 77.393.087,00 |
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | - | - | - | 6.758.105,29 | 579.723,00 |
| Piutang Pajak | 10.812.607.889,43 | 11.368.936.207,43 | 12.217.112.516,30 | 11.900.443.964,30 | 13.306.318.107,30 |
| Penyisihan Piutang Pajak | (8.086.079.776,26) | (8.889.104.215,46) | (9.432.866.583,49) | (9.521.548.980,69) | (10.012.659.375,34) |
| Piutang Pajak Netto | 2.726.528.113,17 | 2.479.831.991,97 | 2.784.245.932,81 | 2.378.894.983,61 | 3.293.658.731,96 |
| Piutang Retribusi | 412.708.750,00 | 553.182.578,00 | 585.630.625,00 | 812.310.284,00 | 1.286.617.101,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | (202.292.410,00) | (280.882.819,14) | (287.184.499,38) | (313.071.802,40) | (478.628.026,09) |
| Piutang Retribusi Netto | 210.416.340,00 | 272.299.758,86 | 298.446.125,62 | 499.238.481,60 | 807.989.074,91 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | - | - | 1.013.694.125,50 | 4.398.395.816,24 | 6.652.314.326,24 |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | - | - | (5.068.470,63) | (21.991.979,09) | (262.127.461,32) |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto | - | - | 1.008.625.654,87 | 4.376.403.837,15 | 6.390.186.864,92 |
| Piutang Sumbangan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - |
| Penyisihan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - |
| Piutang Sumbangan Pihak Ketiga Netto | - | - | - | - | - |
| Beban Dibayar Di Muka | 1.782.779.210,63 | 1.072.835.602,93 | 413.768.566,11 | 653.806.803,80 | 318.083.857,33 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 338.636.333,34 | 334.906.333,34 | 332.809.333,34 | 303.741.333,34 | 272.709.333,34 |
| Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | (240.428.758,34) | (244.497.133,34) | (250.807.138,34) | (256.139.808,34) | (236.388.833,34) |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | 98.207.575,00 | 90.409.200,00 | 82.002.195,00 | 47.601.525,00 | 36.320.500,00 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 207.716.123,00 | 203.316.123,00 | - | 198.821.123,00 | 184.447.623,00 |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | (191.771.123,00) | (187.371.123,00) | - | (143.071.273,00) | (145.270.623,00) |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto | 15.945.000,00 | 15.945.000,00 | - | 55.749.850,00 | 39.177.000,00 |
| Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | - | - | - | - | - |
| Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | - | - | - | - | - |
| Piutang Transfer Bagi Hasil Netto | - | - | - | - | - |
| Piutang Lain-lain | 185.169.404,00 | 184.659.404,00 | 180.449.404,00 | 206.671.904,00 | 1.162.264.845,05 |
| Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih | (185.169.404,00) | (184.659.404,00) | (180.449.404,00) | (180.580.516,50) | (185.683.900,10) |
| Piutang Lain-lain Netto | - | | - | 26.091.387,50 | 976.580.944,95 |
| Persediaan | 8.471.651.872,00 | 12.146.071.484,25 | 10.774.965.010,07 | 12.825.095.041,42 | 9.584.070.863,77 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | **75.363.615.367,97** | **49.858.288.501,70** | **53.654.195.856,05** | **70.888.395.828,40** | **71.855.692.434,02** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | |
| lnvestasi Non Permanen | | | | | |
| Dana Bergulir | 632.585.733,34 | 632.585.733,34 | 632.585.733,34 | 632.585.733,34 | 608.885.733,34 |
| Dana Bergulir Diragukan Tertagih | (632.585.733,34) | (632.585.733,34) | (632.585.733,34) | (632.585.733,34) | (608.885.733,34) |
| JUMLAH lnvestasi Non Permanen | - | - | - | - | |
| lnvestasi Permanen | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemda | 10.048.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 |
| JUMLAH lnvestasi Permanen | 10.048.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 | 17.395.000.000,00 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **10.048.000.000,00** | **17.395.000.000,00** | **17.395.000.000,00** | **17.395.000.000,00** | **17.395.000.000,00** |
| **ASET TETAP** | | | | | |
| Tanah | 169.167.984.953,00 | 171.534.521.628,00 | 173.286.703.090,14 | 174.246.475.790,14 | 175.803.295.690,14 |
| Peralatan dan Mesin | 491.035.445.672,61 | 534.151.360.620,22 | 553.379.095.327,99 | 582.255.941.533,48 | 590.802.860.469,83 |
| Gedung dan Bangunan | 712.093.990.763,47 | 776.293.766.530,37 | 830.881.279.693,37 | 885.446.277.010,59 | 942.115.670.930,71 |
| Jalan, Jaringan dan lnstalasi | 1.546.783.398.076,41 | 1.754.641.360.738,75 | 1.874.880.064.810,75 | 1.973.692.615.347,35 | 2.125.206.644.262,64 |
| Aset Tetap Lainnya | 8.495.350.804,00 | 8.507.722.996,00 | 8.514.847.996,00 | 8.532.206.996,00 | 9.111.918.369,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 64.434.846.543,00 | 32.867.027.329,00 | 32.245.751.027,60 | 52.615.291.272,00 | 29.104.102.831,65 |
| Akumulasi Penyusutan | (1.008.017.925.920,61) | (1.213.142.043.110,18) | (1.376.361.580.539,29) | (1.594.777.520.379,79) | (1.803.378.820.000,14) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | **1.983.993.090.891,88** | **2.064.853.716.732,16** | **2.096.826.161.406,56** | **2.082.011.287.569,77** | **2.068.765.672.553,83** |
| **ASET LAINNYA** | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 81.018.000,00 | 34.722.000,00 | | - | - |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | - | - | 196.216.123,00 | - | 298.976.570,83 |
| Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian | - | - | (190.063.623,00) | - | - |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto | - | - | 6.152.500,00 | - | 298.976.570,83 |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | - | - | 12.422.690.124,86 | 12.422.690.124,86 | 12.422.690.124,86 |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | - | - | (5.649.488.582,00) | (6.273.096.795,00) | (6.896.705.008,00) |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto | - | - | 6.773.201.542,86 | 6.149.593.329,86 | 5.525.985.116,86 |
| Aset Tak Berwujud | 1.210.457.862,00 | 960.742.162,00 | 1.132.550.962,00 | 1.132.550.962,00 | 1.132.550.962,00 |
| Akumulasi Amortisasi Asel Tak Berwujud | (471.382.456,00) | (364.145.307,00) | (573.474.619,00) | (793.898.424,00) | (983.601.342,00) |
| Aset Tak Berwujud Netto | 739.075.406,00 | 596.596.855,00 | 559.076.343,00 | 338.652.538,00 | 148.949.620,00 |
| Aset Lain-lain | 3.867.811.074,33 | 9.742.339.180,34 | 21.043.962.628,34 | 21.016.952.257,40 | 21.967.582.146,40 |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | **4.687.904.480,33** | **10.373.658.035,34** | **28.382.393.014,20** | **27.505.198.125,26** | **27.941.493.454,09** |
| **JUMLAH ASET** | **2.074.092.610.740,18** | **2.142.480.663.269,19** | **2.196.257.750.276,80** | **2.197.799.881.523,43** | **2.185.957.858.441,94** |
| **KEWAJIBAN** | | | | | |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 34.459.710,00 | 8.634.441,00 | 4.977.371,00 | 3.535.855,00 | 37.728,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 191.560.255,66 | 104.437.242,02 | 78.780.481,22 | 53.987.651,45 | 29.126.896,11 |
| Utang Belanja | 364.000.000,00 | 245.870.551,00 | 330.237.687,00 | 16.453.147.868,45 | 12.217.598.577,45 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 6.380.087.790,45 | 6.406.816.599,45 | 6.714.933.357,05 | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | 2.225.592.989,40 | 2.439.228.643,40 | 2.387.222.284,40 | - | - |
| Utang Retensi | 4.154.494.801,05 | 3.893.369.186,05 | 4.316.992.072,65 | - | - |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | - | 74.218.770,00 | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **6.970.107.756,11** | **6.765.758.833,47** | **7.128.928.896,27** | **16.521.390.374,90** | **12.257.482.201,56** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **6.970.107.756,11** | **6.765.758.833,47** | **7.128.928.896,27** | **16.521.390.374,90** | **12.257.482.201,56** |
| **JUMLAH EKUITAS** | **2.067.122.502.984,07** | **2.135.714.904.435,72** | **2.189.128.821.380,53** | **2.181.278.491.148,53** | **2.173.700.376.240,38** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **2.074.092.610.740,18** | **2.142.480.663.269,19** | **2.196.257.750.276,80** | **2.197.799.881.523,43** | **2.185.957.858.441,94** |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Tabel 2.24
Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio cair (Quick Ratio) = (Aset Lancar – Persediaan): Kewajiban Jangka Pendek | 557,40 | 601,48 | 351,44 | 508,03 |
| 2 | Rasio hutang terhadap total aset (debet ratio) = Total Hutang : Total Aset | 0,32 | 0,32 | 0,75 | 0,56 |
| 3 | Rasio Ekuitas dana terhadap total aset = Total Ekuitas Dana : Total Aset | 99,68 | 99,68 | 99,25 | 99,44 |
| 4 | Rasio belanja operasi terhadap total belanja = Belanja Operasi : Total Belanja | 53,80 | 59,59 | 63,15 | 66,11 |
| 5 | Rasio belanja modal terhadap Total belanja = Belanja Modal : Total Belanja | 32,44 | 28,31 | 24,21 | 21,35 |
| 6 | Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan = PAD : Total Pendapatan | 5,07 | 5,56 | 7,17 | 7,16 |
| 7 | Debt Service Coverage Ratio =(( PAD + BagiHasil Pajak/NonPajak + DAU) – (Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa)) : Total Pendapatan | 10,69 | 6,22 | 9,01 | 6,26 |
| 8 | Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan = Dana Perimbangan : Total Pendapatan | 91,85 | 94,39 | 92,77 | 91,98 |

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kabupaten Pasangkayu

Tiga rasio keuangan yang bisa dijadikan parameter mengukur tingkat kesehatan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu adalah *quick ratio*, Rasio hutang terhadap total aset (rasio solvabilitas), dan rasio ekuitas dana terhadap total aset. *Quick ratio* mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah membayar kewajibannya. Tahun 2021 hingga 2024, angka *quick rasio* selalu diatas 100 persen, masing-masing 557,40 persen di tahun 2021, lalu meningkat menjadi 508,03 persen di tahun 2024. Secara umum *quick ratio* di atas 100 persen menunjukan kinerja keuangan yang baik atau bisa diinterpretasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Hal itu disebabkan karena aset lancar pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu relatif lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya.

Rasio kedua adalah Rasio hutang terhadap total aset (debt ratio), mengukur seberapa besar penggunaan utang oleh pemerintah daerah untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Dalam empat tahun terakhir, debt rasio pemerintah daerah masih di bawah 1, tahun 2024 angkanya 0,56%. Debt ratio sebesar 0,56 persen menunjukkan bahwa utang hanya mencakup 0,56 persen dari total aset pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu atau dengan kata lain, dari setiap Rp.100 miliar total aset yang dimiliki pemerintah daerah, hanya Rp.0,65 miliar yang merupakan utang. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi keuangan yang sangat kuat dengan ketergantungan sangat kecil pada utang. Ini mengindikasikan likuiditas dan solvabilitas yang sangat baik, di mana aset jauh lebih besar daripada kewajiban utang.

Rasio keuangan ketiga adalah rasio ekuitas dana terhadap total aset. Rasio ekuitas dana terhadap total aset adalah rasio keuangan yang mengukur proporsi total ekuitas dana terhadap

total aset yang dimiliki oleh suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari total aset yang didanai oleh ekuitas, dibandingkan dengan bagian yang didanai oleh utang. Angka rasio ekuitas pemerintah daerah tahun 2024 sebesar 99,44 persen sebenarnya lebih rendah dari tahun 2021 dan 2022 yang mencapai 99,68 persen. Meski begitu, angkanya masih mendekati 100 persen, menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan sebagian sebesar ditanggung oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu secara mandiri. Ini juga menunjukkan bahwa keuangan daerah bisa bertahan dalam jangka panjang untuk membiayai program Pembangunan daerah tanpa harus mengandalkan sumber pembiayaan eksternal.

Beberapa rasio keuangan yang juga menarik dicermati adalah *debt service coverage rasio*. Rasio ini mengukur seberapa mampu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari operasinya. Indikator ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan utang kepada pemerintah daerah. Tahun 2024, DSCR pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu mencapai 6,26 persen, naik dari 6,22 persen di tahun 2022, tetapi turun dibanding posisi tahun 2023 sebesar 9,01 persen. Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Rasio *Debt Service Coverage Ratio* dipersyaratkan minimal 2,5 persen (Pasal 12, PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah), sehingga dengan capaian DSCR 6,26 persen, menunjukkan masih terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman, jika diperlukan.

### 2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

#### A. Asumsi Indikator Sosial Ekonomi

Besaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah bergantung pada beberapa variabel sosial ekonomi. Jika indikator-indikator ini menunjukkan tren penurunan, maka pendapatan daerah juga akan menurun, dan sebaliknya. Hal ini karena indikator sosial ekonomi merupakan bagian dari dasar pengenaan pajak (tax base). Basis pajak mencakup total pendapatan, properti, aset, konsumsi, transaksi, atau aktivitas ekonomi lainnya yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak. Indikator sosial ekonomi mempengaruhi pendapatan daerah (*fiscal capacity*) melalui dasar pengenaan pajak tersebut. Salah satu variabel yang termasuk dalam definisi basis pajak adalah aktivitas ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika aktivitas ekonomi tumbuh pesat, basis pajak akan meningkat, sehingga pendapatan daerah dari pajak juga akan naik. Sebaliknya, jika aktivitas ekonomi melambat, terutama jika terjadi kontraksi seperti saat ini, basis pajak akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pajak.

Dari sisi belanja daerah, proyeksi indikator sosial ekonomi berpengaruh terhadap kebutuhan fiskal (*fiscal need*) pemerintah daerah. Saat ekonomi melambat, seperti akibat pandemi, pemerintah daerah akan berusaha mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi ke

kondisi normal. Upaya ini memerlukan anggaran yang lebih besar, sehingga kebutuhan fiskal meningkat. Demikian juga jika sebagian masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup, yang berdampak pada peningkatan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.

Indikator sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun ke depan meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflasi, dan tingkat kemiskinan. Jika dikelompokkan, indikator-indikator ini mencerminkan aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Proyeksi lima indikator ini disajikan dalam tabel proyeksi asumsi indikator sosial ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029.

Tabel 2.25
Proyeksi Asumsi Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| Indikator | Baseline 2024 | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,68 | 3,62 | 4,60 | 5,57 | 6,54 | 7,51 | 7,51 |
| PDRB per Kapita (Juta Rp) | 76,80 | 81,50 | 86,76 | 92,83 | 99,55 | 107,66 | 107,66 |
| TPT (%) | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
| Inflasi (%) | 1,49 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 2 |
| Angka Kemiskinan (%) | 5,21 | 5,02 | 4,76 | 4,51 | 4,24 | 4,00 | 4,00 |

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun

Dalam tabel yang menguraikan proyeksi indikator sosial ekonomi Kabupaten Pasangkayu, angka proyeksinya dibuat lebih moderat dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Meski begitu, angka indikator-indikator diperkirakan terus membaik dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi diestimasi mencatat laju pertumbuhan yang positif dengan skema yang bergerak lambat. Tahun 2025 hingga 2028, ekonomi daerah diperkirakan masih di bawah 7 persen. Angka pertumbuhan 7 persen diproyeksi akan tercapai di tahun 2029. Angka pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lambat dalam lima tahun ke depan dipasang dengan pertimbangan upaya transformasi sosial dan transformasi ekonomi masih berada pada tahap awal, sehingga belum signifikan hasil yang diperoleh. Karena pertumbuhan ekonomi diperkirakan naik, maka indikator yang berkaitan yaitu PDRB per Kapita akan meningkatkan, sementara TPT, Inflasi, dan angka kemiskinan diperkirakan terkendali dan membaik untuk lima tahun ke depan.

## B. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi beberapa indikator sosial ekonomi menunjukkan optimisme bahwa kondisi sosial ekonomi Kabupaten Pasangkayu akan terus membaik dalam lima tahun ke depan. Isu pandemi yang sebelumnya masih menjadi permasalahan utama yang dijadikan dasar asumsi proyeksi, kini tak relevan lagi digunakan. Oleh sebab itu, optimisme ini juga seharusnya tercermin

dalam proyeksi pendapatan daerah karena variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah dan komponennya diperkirakan akan terus meningkat selama interval waktu tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu diprediksi sedikit melambat terutama disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi di tahun 2025 seiring dengan efisiensi anggaran. Hal ini berdampak pada perlambatan pada peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sedikit penurunan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun pertumbuhan yang akseleratif diperkirakan terjadi di tahun 2026 hingga 2030, sehingga rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke depan sebesar 5-6 persen. Perkiraan kenaikan laju pertumbuhan pendapatan disebabkan oleh asumsi indikator makro ekonomi yang terus tumbuh dan diperkirakan ada kenaikan pendapatan transfer dan PAD, sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah di seting dengan angka yang konstan sepanjang lima tahun ke depan, dan baru meningkat di tahun 2030.

Dalam komponen PAD, diharapkan pajak dan retribusi mengambil peran lebih besar dibandingkan komponen lain-lain PAD yang sah, itu sebabnya peningkatan komponen lain-lain PAD yang sah diperkirakan melambat, tapi dikompensasi dengan kenaikan pada komponen pajak dan retribusi daerah. Dengan skema proyeksi pajak dan retribusi daerah meningkat, diharapkan tahun 2029 proporsi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai masing-masing 34,00 persen dan 18,25 persen. Untuk transfer pemerintah, tak banyak mengalami perubahan, dimana proporsi terbesar diperkirakan masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dalam transfer pemerintah pusat, DAU masih menjadi komponen yang porsinya terbesar. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu disajikan dalam tabel proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2030.

Tabel 2.26
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030 (Rp)

| Uraian | Realisasi 2024 | Proyeksi (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Pendapatan** | **852.847.983.622** | **855.404.415.649** | **867.972.974.934** | **879.254.729.858** | **892.724.379.068** | **908.384.435.773** | **917.242.267.402** |
| **1. Pendapatan Asli Daerah** | **61.101.297.061** | **65.112.445.446** | **69.351.090.194** | **71.222.624.800** | **74.172.208.716** | **78.222.279.340** | **82.361.583.040** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 22.965.168.782 | 23.820.354.747 | 24.470.201.904 | 25.230.911.055 | 26.090.256.898 | 27.070.063.614 | 28.000.379.121 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 8.262.414.576 | 9.000.862.670 | 9.980.285.220 | 10.560.569.748 | 11.230.539.268 | 12.990.813.032 | 15.030.298.412 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.173.536.172 | 3.210.428.046 | 3.250.326.333 | 3.300.873.368 | 3.350.576.692 | 3.400.876.435 | 3.420.292.009 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 26.700.177.530 | 29.080.799.982 | 31.650.276.737 | 32.130.270.628 | 33.500.835.857 | 34.760.526.258 | 35.910.613.498 |
| **2. Pendapatan Transfer** | **784.455.018.458** | **783.111.970.203** | **791.441.884.739** | **800.852.105.058** | **811.372.170.352** | **822.982.156.433** | **827.700.684.362** |
| **Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)** | **695.020.759.614** | **694.721.970.203** | **702.111.884.739** | **710.462.105.058** | **719.792.170.352** | **730.092.156.433** | **734.280.684.362** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 9.531.487.000 | 10.310.467.327 | 10.420.842.831 | 10.540.634.916 | 10.680.272.607 | 10.830.239.470 | 10.890.090.208 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 12.192.946.000 | 14.330.235.338 | 14.490.218.377 | 14.660.413.255 | 14.850.437.327 | 15.060.259.922 | 15.150.133.441 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 496.999.363.000 | 482.250.603.242 | 487.370.118.405 | 493.170.642.541 | 499.650.560.251 | 506.810.112.906 | 509.720.022.769 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 102.005.217.974 | 106.330.622.170 | 107.460.684.029 | 108.740.258.090 | 110.170.878.426 | 111.740.700.314 | 112.380.335.486 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 74.291.745.640 | 81.500.042.126 | 82.370.021.097 | 83.350.156.255 | 84.440.021.740 | 85.650.843.821 | 86.140.102.458 |
| **Transfer Pemerintah Pusat /Lainnya** | **54.694.684.000** | **54.810.000.000** | **55.390.000.000** | **56.050.000.000** | **56.790.000.000** | **57.600.000.000** | **57.930.000.000** |
| Dana Penyesuaian | | - | - | - | - | - | - |
| Dana Desa | 54.694.684.000 | 54.810.000.000 | 55.390.000.000 | 56.050.000.000 | 56.790.000.000 | 57.600.000.000 | 57.930.000.000 |
| **Transfer Pemerintah Provinsi** | **34.739.574.844** | **33.580.000.000** | **33.940.000.000** | **34.340.000.000** | **34.790.000.000** | **35.290.000.000** | **35.490.000.000** |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | 34.739.574.844 | 33.290.000.000 | 33.640.000.000 | 34.040.000.000 | 34.490.000.000 | 34.980.000.000 | 35.180.000.000 |
| Bantuan Keuangan | - | 290.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
| **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **7.291.668.103** | **7.180.000.000** | **7.180.000.000** | **7.180.000.000** | **7.180.000.000** | **7.180.000.000** | **7.180.000.000** |
| Pendapatan Hibah | 736.129.795 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Pendapatan Lainnya | 6.555.538.308 | 6.680.000.000 | 6.680.000.000 | 6.680.000.000 | 6.680.000.000 | 6.680.000.000 | 6.680.000.000 |

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun

## C. Proyeksi Belanja Daerah

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah daerah harus mulai melakukan transformasi, sesuai rumusan RPJPD 2025-2045. Kata transformasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan hal-hal yang mendasar (*not business as usual*), sehingga membutuhkan belanja yang lebih besar untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam melakukan proyeksi belanja daerah sepanjang tahun 2025 hingga 2030. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, besaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp.746,08 miliar, sementara tahun 2025 angkanya diproyeksi naik sampai ke Rp.756,04 miliar. Untuk belanja transfer, realisasi hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp.106,40 miliar dan tahun 2025 jadi Rp. 107,74 miliar. Jika ditotal antara belanja dan transfer, maka realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 sebesar Rp.852,48 miliar dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar Rp.863,78 miliar. Tahun 2029, pemerintah daerah diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp.897,31 miliar, yang sebagian besar akan habis pada komponen belanja dan sisanya untuk transfer.

Komposisi belanja daerah diperkirakan mengalami perubahan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 2027, serta meningkatkan belanja modal dengan proporsi sebanyak 40 persen dari total belanja pada tahun 2027. Pada tahun 2024, proporsi belanja pegawai sebesar 35,1 persen dari total belanja, lalu menurun menjadi 30,9 persen di tahun 2027, dan pada tahun 2030 ditargetkan menjadi 30,2 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam belanja pegawai. Sementara itu, proporsi belanja modal terhadap total belanja di luar belanja transfer pada tahun 2024 sebesar 24 persen, dengan perkiraan meningkat menjadi 37 persen di tahun 2027, dan pada tahun 2030 menjadi 40,0 persen. Target 40 persen belanja modal baru tercapai di tahun 2030 karena dibutuhkan penyesuaian secara bertahap dengan tetap memperhatikan alokasi belanja lainnya. Komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih besar sejalan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif.

Tabel 2.27
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030 (Rp)

| Uraian | Realisasi 2024 | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Belanja** | **746.087.485.394** | **756.044.033.879** | **763.260.029.527** | **770.651.552.714** | **775.086.650.224** | **785.303.975.615** | **792.134.298.689** |
| **Belanja Operasi** | **563.569.908.071** | **540.786.300.000** | **507.643.170.000** | **487.404.340.000** | **481.163.871.900** | **476.865.188.838** | **475.696.122.028** |
| Belanja Pegawai | 298.942.450.068 | 285.590.000.000 | 272.238.000.000 | 271.830.300.000 | 271.422.600.000 | 271.014.900.000 | 273.313.272.000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 227.464.421.857 | 217.666.300.000 | 197.475.170.000 | 177.284.040.000 | 171.231.271.900 | 166.830.288.838 | 162.429.305.776 |
| Belanja Hibah | 36.825.036.146 | 37.290.000.000 | 37.680.000.000 | 38.040.000.000 | 38.260.000.000 | 38.770.000.000 | 39.697.563.061 |
| Belanja Bantuan Sosial | 338.000.000 | 240.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 255.981.191 |
| Belanja Bantuan Keuangan | | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Bagi Hasil | | - | - | - | - | - | - |
| **Belanja Modal** | **182.034.249.323** | **214.768.650.000** | **255.122.684.002** | **282.748.243.303** | **293.420.937.388** | **307.930.337.097** | **315.925.225.411** |
| Belanja Modal Tanah | 1.556.819.900 | 1.835.851.340 | 2.180.799.299 | 2.416.943.727 | 2.508.174.359 | 2.632.201.310 | 2.700.541.948 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.154.767.773 | 39.116.847.894 | 46.466.722.328 | 51.498.298.404 | 53.442.167.545 | 56.084.834.347 | 57.540.981.834 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.406.647.247 | 51.212.701.323 | 60.835.330.560 | 67.422.788.819 | 69.967.748.219 | 73.427.590.024 | 75.334.012.713 |
| Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan | 103.170.690.203 | 121.725.438.777 | 144.597.084.593 | 160.254.552.884 | 166.303.565.953 | 174.527.126.728 | 179.058.427.213 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 672.874.200 | 792.861.247 | 941.836.201 | 1.043.821.455 | 1.083.221.831 | 1.136.786.170 | 1.166.300.893 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 72.450.000 | 84.949.419 | 100.911.022 | 111.838.013 | 116.059.482 | 121.798.518 | 124.960.810 |
| **Belanja Tidak Terduga** | **483.328.000** | **489.083.879** | **494.175.525** | **498.969.411** | **501.840.936** | **508.449.680** | **512.951.251** |
| Belanja Tidak Terduga | 483.328.000 | 489.083.879 | 494.175.525 | 498.969.411 | 501.840.936 | 508.449.680 | 512.951.251 |
| **Transfer** | **106.396.589.423** | **107.736.166.376** | **108.857.762.190** | **109.913.766.951** | **110.546.310.959** | **112.002.095.528** | **112.993.708.615** |
| Belanja Bagi Hasil | 1.724.590.695 | 1.744.702.946 | 1.762.866.313 | 1.779.967.484 | 1.790.211.040 | 1.813.786.332 | 1.829.844.730 |
| Dana Desa | | - | - | - | - | - | - |
| Bantuan Keuangan | 104.671.998.728 | 105.991.463.429 | 107.094.895.877 | 108.133.799.466 | 108.756.099.919 | 110.188.309.196 | 111.163.863.885 |
| **Total Belanja + Transfer** | **852.484.074.817** | **863.780.200.254** | **872.117.791.717** | **880.565.319.664** | **885.632.961.183** | **897.306.071.143** | **905.128.007.305** |

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun

## D. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam ketentuan pembiayaan daerah, jika APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan belanja daerah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diperoleh proyeksi defisit anggaran. Tahun 2024, masih terjadi surplus sebesar Rp.0,37 miliar, tetapi diperkirakan terjadi defisit sebesar sebesar Rp.8,37 miliar di tahun 2025, lalu terus menurun hingga menjadi Rp.1,31 miliar di tahun 2027, kembali surplus mulai dari 2028 hingga 2030. Anggaran defisit di *setting* dengan maksud bahwa pemerintah membutuhkan banyak pengeluaran untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah. Proyeksi defisit anggaran sepanjang tahun 2025 hingga 2027 akan ditutupi oleh komponen pembiayaan daerah. Tahun 2025, angkanya diperkirakan Rp.50,41 miliar. Berdasarkan analisis historis data pembiayaan, dalam lima tahun terakhir tidak ada pengeluaran pembiayaan, sehingga proyeksinya untuk lima tahun ke depan tak ada pengeluaran pembiayaan. Karena tak ada pengeluaran pembiayaan, maka sisa lebih pembiayaan anggaran diperkirakan akan mencapai Rp. 66,86 miliar tahun 2030. Angka sisa lebih pembiayaan anggaran diperoleh dengan memperkurangkan antara pembiayaan netto dan defisit, karena pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit. Secara rinci proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2030 disajikan pada tabel proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030.

Tabel 2.28
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030

| Uraian | Realisasi 2024 | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Defisit/Surplus** | **363.908.805** | **(8.375.784.606)** | **(4.144.816.783)** | **(1.310.589.806)** | **7.091.417.885** | **11.078.364.630** | **12.114.260.097** |
| **Pembiayaan** | | | | | | | |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **50.045.678.063** | **50.409.586.868** | **42.033.802.263** | **37.888.985.479** | **36.578.395.674** | **43.669.813.559** | **54.748.178.189** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu | 50.021.978.063 | 50.409.586.868 | 42.033.802.263 | 37.888.985.479 | 36.578.395.674 | 43.669.813.559 | 54.748.178.189 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 23.700.000 | - | - | - | - | - | - |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK | 0 | - | - | - | - | - | - |
| **Koreksi Silpa** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jumlah Koreksi Silpa | 0 | - | - | - | - | - | - |
| **Pembiayaan Netto** | **50.045.678.063** | **50.409.586.868** | **42.033.802.263** | **37.888.985.479** | **36.578.395.674** | **43.669.813.559** | **54.748.178.189** |
| **SILPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran)** | **50.409.586.868** | **42.033.802.263** | **37.888.985.479** | **36.578.395.674** | **43.669.813.559** | **54.748.178.189** | **66.862.438.286** |

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun

## E. Perhitungan Kerangka Pendanaan (Kapasitas Riil Keuangan Daerah)

Perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menjadi dasar untuk menghitung kapasitas keuangan riil daerah. Kapasitas ini menggambarkan kemampuan keuangan Kabupaten Pasangkayu selama periode RPJMD (2025-2029) dalam membiayai tiga prioritas utama: pelayanan dasar (SPM), program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah. Dengan proyeksi peningkatan pendapatan dan pembiayaan daerah, kapasitas keuangan riil daerah juga diperkirakan naik setiap tahunnya.

Kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diproyeksi, dialokasikan pada tiga prioritas pengeluaran berdasarkan peraturan perundangan Permendagri 86/2017. Prioritas pertama, untuk belanja pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Prioritas kedua, untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah yang telah dirumuskan dan berdasarkan proses pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, bilamana janji-janji kepala daerah termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, maka dikategorikan sebagai prioritas pertama. Prioritas ketiga, untuk belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang tidak termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan. Berikut diuraikan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2030.

Dalam tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 terlihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperkirakan akan terus bertambah dalam lima tahun ke depan. Tahun 2025, angkanya berada di Rp.897,44 miliar dan di tahun 2030 jadi Rp.984,10 miliar. Hal itu disebabkan karena pendapatan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran tetap positif selama periode proyeksi. Kapasitas riil kemampuan keuangan uang yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai tiga prioritas yaitu pemenuhan SPM (prioritas pertama), pencapaian visi-misi kepala daerah terpilih (prioritas kedua), dan belanja untuk merealisasikan program di OPD (prioritas ketiga).

Pengeluaran pada prioritas pertama berkaitan dengan pemenuhan SPM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 yang dipertegas dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Prioritas kedua adalah semua janji politik yang disampaikan (visi, misi, program prioritas) kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Prioritas ketiga adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan perangkat daerah.

Tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030 menguraikan besaran penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas.

Tabel 2.29
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030 (Miliar Rp)

| Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 855.404.415.649 | 867.972.974.934 | 879.254.729.858 | 892.724.379.068 | 908.384.435.773 | 917.242.267.402 |
| Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | - | - | - | - | - | - |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 42.033.802.263 | 37.888.985.479 | 36.578.395.674 | 43.669.813.559 | 54.748.178.189 | 66.862.438.286 |
| Total penerimaan | 897.438.217.911 | 905.861.960.413 | 915.833.125.532 | 936.394.192.627 | 963.132.613.962 | 984.104.705.688 |
| Dikurangi: | | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | - | - |
| **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | **897.438.217.911** | **905.861.960.413** | **915.833.125.532** | **936.394.192.627** | **963.132.613.962** | **984.104.705.688** |

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun

Tabel 2.30
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2025-2030 (Miliar Rp)

| Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | **897.438.217.911** | **905.861.960.413** | **915.833.125.532** | **936.394.192.627** | **963.132.613.962** | **984.104.705.688** |
| Prioritas 1 | 358.975.287.165 | 362.344.784.165 | 366.333.250.213 | 374.557.677.051 | 385.253.045.585 | 393.641.882.275 |
| Prioritas 2 | 358.975.287.165 | 362.344.784.165 | 366.333.250.213 | 374.557.677.051 | 385.253.045.585 | 393.641.882.275 |
| Prioritas 3 | 179.487.643.582 | 181.172.392.083 | 183.166.625.106 | 187.278.838.525 | 192.626.522.792 | 196.820.941.138 |

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun

## 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Uraian permasalahan pembangunan daerah mesti menggambarkan permasalahan pokok daerah, serta akar permasalahan yang menjadi penyebab. Selanjutnya, uraian permasalahan pokok dan akar masalah ini akan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan). Rumusan permasalahan, baik secara makro maupun sektoral, akan menuntun dan mengarahkan perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah dalam dokumen ini, terutama diidentifikasi dari uraian Bab II, serta dari berbagai sumber seperti Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 dan laporan resmi lainnya.

**A. Permasalahan Level Makro Daerah**

**1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Tren perlambatan pertumbuhan ini telah terjadi, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Perlambatan ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu relatif lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Barat dan nasional, terutama di tahun 2022 dan 2024. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada sektor ekonomi penopang perekonomian Kabupaten Pasangkayu, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai dan volume produksi komoditas unggulan daerah, terutama kelapa sawit. Penurunan ini disebabkan oleh fluktuasi harga minyak sawit global yang mengalami tren menurun dalam beberapa tahun terakhir karena lesunya permintaan negara-negara importir minyak sawit, seperti Tiongkok. Implikasinya, sejumlah petani mengkonversi lahan miliknya dari perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas lainnya. Bahkan, sejumlah petani melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik. Penurunan produktivitas ini juga ditengarai oleh kondisi iklim, seperti kekeringan dalam waktu panjang, sehingga pasokan air berkurang. Rendahnya produktivitas di sektor pertanian

turut berpengaruh terhadap rendahnya konsumsi masyarakat dan melemahnya kegiatan investasi.

**2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Penduduk Produktif dalam Pasar Tenaga Kerja**

Partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Pasangkayu cenderung rendah (72,12%) atau berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju di tahun 2024. Artinya, masih cukup banyak atau hampir 30 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasangkayu yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya peluang kerja yang tersedia, sehingga sebagian penduduk, terutama perempuan, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Sebagian besar penduduk usia muda juga memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga belum terlibat dalam pasar tenaga kerja. Rendahnya partisipasi angkatan kerja ini dimungkinkan terjadi karena semakin terbatasnya lahan pertanian dan perkebunan untuk diusahakan. Pasalnya, harga lahan produktif mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga banyak penduduk usia produktif tidak bisa memiliki dan mengusahakan lahan. Aktivitas industri, terutama yang menjadi turunan dari komoditas pertanian dan perkebunan, belum sepenuhnya optimal, sehingga masih tersedia sedikit lapangan kerja di sektor. Sebagian penduduk hanya menjadi buruh di lahan perkebunan yang dimiliki oleh pemilik lahan atau perusahaan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya minat dari penduduk usia muda dan penduduk perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

**3. Masih Rendahnya Kualitas Pekerjaan Layak dan Berkelanjutan**

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang relatif rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2024, TPT Kabupaten Pasangkayu pada bulan Agustus hanya sebesar 1,20 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Sekilas, hal ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup baik. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, rendahnya TPT ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas ketenagakerjaan maupun ketahanan ekonomi daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu sangat didominasi oleh sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu komoditas utama, yaitu minyak sawit mentah (CPO), menjadikan perekonomian daerah sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Fluktuasi harga CPO di pasar internasional berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, terutama petani dan tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan.

Di sisi lain, rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi menyebabkan terbatasnya alternatif sumber penghidupan bagi masyarakat ketika sektor perkebunan mengalami perlambatan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang terserap di sektor informal dengan kondisi kerja yang tidak stabil. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan di Kabupaten Pasangkayu bukan hanya

terletak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan ketenagakerjaan. Upaya pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan beragam, serta penguatan daya tahan masyarakat terhadap guncangan eksternal, menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan dalam agenda pembangunan daerah ke depan.

**4. Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasangkayu tergolong tinggi selama beberapa tahun terakhir. Meskipun termasuk tertinggi kedua setelah Kabupaten Mamuju, tetapi tren pertumbuhan IPM Kabupaten Pasangkayu cenderung turun dalam 13 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya peningkatan komponen kesehatan, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Kabupaten Pasangkayu berada di urutan ke-empat di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju. Perlambatan UHH ini disebabkan oleh permasalahan pada sejumlah aspek yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, seperti rendahnya akses ke sumber air bersih dan akses air minum layak, masih terdapatnya cukup banyak rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi layak, angka morbiditas yang cukup tinggi, dan masih terjadinya penanganan kelahiran yang tidak dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih.

Di samping itu, kinerja aspek pendidikan juga masih relatif rendah. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pasangkayu tergolong paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan komponen pendidikan dari IPM, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), bersifat fluktuatif dengan tren menurun. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pengunungan. Di samping, sebaran tenaga pendidik juga belum merata, sehingga masih terjadi terjadi ketimpangan capaian pendidikan antar wilayah.

**5. Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin**

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kinerja yang belum optimal. Persentase penduduk miskin memang cenderung sedikit menurun, tetapi jumlah penduduk miskin justru menunjukkan tren meningkat, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang relatif lebih lambat dibanding pertumbuhan garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang menjadi standar pengeluaran minimal untuk tidak dikategorikan miskin tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan yang diproksikan oleh pengeluaran per kapita riil. Sementara itu, rendahnya daya beli masyarakat ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, terutama kelapa sawit. Rumah tangga yang kegiatan ekonomi-nya bergantung pada kelapa sawit sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak kelapa sawit. Pada saat harga minyak sawit turun, maka harga TBS di tingkat petani juga akan akan turun. Hal ini

berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga, baik yang berperan sebagai pemilik lahan maupun buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, ketergantungan masyarakat dari pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar Pasangkayu juga turut berkontribusi pada tingginya biaya hidup, terutama untuk kebutuhan pangan, seperti beras, telur, jagung, dan lainnya. Ganguan dalam distribusi bahan pangan bisa berdampak meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok, sehingga rumah tangga berpendapatan rendah akan berpotensi masuk dalam kategori miskin. Tingginya biaya hidup ini berkontribusi pada tingginya beban pengeluran rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu.

**6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Aktivitas ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu membawa implikasi negatif bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga berimplikasi pada daya dukung lingkungan yang semakin menurun. Dampak negatif dari aktivitas masyarakat ini tercermin pada capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasangkayu yang cenderung tertinggal dari kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Salah satu persoalan lingkungan hidup yang dihadapi di Kabupaten Pasangkayu adalah kelangkaan air bersih, yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Kualitas Air. Hal ini dipengaruhi oleh eksploitasi yang berlebihan pada air bawah tanah. Selain itu, limbah yang dihasilkan oleh pabrik, terutama pengolahan kelapa sawit, juga berdampak pada kualitas air dan udara di Kabupaten Pasangkayu. Di samping itu, tingginya konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, baik di sisi hulu maupun hilir, membuat berkurangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya ekosistem lingkungan. Implikasi lainnya adalah ancaman banjir yang semakin meningkat karena kemampuan hutan untuk menyerap air semakin berkurang. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sekitar, terutama terlihat pada volume sampah yang belum tertangani hingga mencapai 85 persen di tahun 2022.

**7. Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pemerintah berfungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal fungsi pemerintahan, pemerintah bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahann masih relatif rendah, yang terlihat dari Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya dukungan terhadap pengembangan Sumberdaya Manusia aparat yang profesional.

Selain itu, masih terjadinya inefisiensi birokrasi, pelayanan yang belum berorientasi pada masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang masih rendah juga menjadi penyebab masih belum optimalnya pelayanan pemerintahan.

Sumberdaya manusia aparat masih cukup rendah kapabilitasnya karena proses rekrutmen ASN dan pengangkatan pejabat belum sepenuhnya dilandasi oleh pertimbangan *merit based.* Sementara itu, rotasi ASN ke posisi tertentu juga belum sepenuhnya dilandasi oleh kebutuhan organisasi. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas terhadap ASN juga seringkali tidak efektif karena kerapkali belum ditindaklanjuti dengan praktik yang berkelanjutan mengingat cepatnya rotasi posisi di pemerintahan. Penilaian dan pengawasan kinerja aparat pemerintahan juga seringkali cenderung kurang substantif dan lebih didasarkan pada capaian di atas kertas. Kondisi ini yang membuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pasangkayu masih belum optimal.

**8. Masih Rendahnya Kemandirian Fiskal Daerah**

Desentralisasi fiskal mengamanatkan kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, yang bersumber dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih cukup tinggi di Kabupaten Pasangkayu. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 6,44 persen tahun 2023 dan 6,52 persen tahun 2024. Ini berarti, sebagian besar atau sekitar 93 persen pendapatan daerah diperoleh dari transfer dan pendapatan lainnya. Rendahnya pendapatan asli daerah ini disebabkan oleh masih belum optimalnya pengumpulan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Di samping itu, perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa menjadi penyebab rendahnya potensi penerimaan pajak.

Belum optimalnya pengumpulan pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti belum memadainya pendataan wajib pajak dan objek pajak, adopsi teknologi digital dalam pengumpulan pajak dan retribusi yang masih relatif rendah, serta petugas pajak dan retribusi yang cenderung pasif dan kurang inovatif. Sementara itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi ditengarai oleh masih kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pelayanan publik pemerintah, serta masih adanya persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa pajak dan retribusi rawan disalahgunakan oleh pejabat pemerintah.

**B. Permasalahan Level Mikro Sektoral (Urusan Pemerintahan)**

Permasalahan di level urusan pemerintahan mencakup berbagai urusan pemerintahan daerah di level kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, terdapat sejumlah urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan penunjang. Setiap urusan pemerintahan tersebut menghadapi sejumlah persoalan, sebagai berikut:

**Urusan Wajib**

1. Pendidikan
   - Masih tingginya angka putus sekolah.
   - Masih terbatasnya fasilitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan akses terbatas.
   - Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
   - Penyebaran guru sekolah yang belum merata antar kecamatan.
2. Kesehatan
   - Masih terbatasnya kapasitas layanan fasilitas kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, dan Posyandu untuk menampung pasien.
   - Masih timpangnya sebaran fasilitas kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan.
   - Masih rendahnya akses bayi dan balita terhadap pelayanan kesehatan.
   - Masih rendahnya pelayanan kesehatan ibu pasca persalinan.
   - Masih rendahnya pelayanan terhadap penderita penyakit TBC.
   - Masih rendahnya penanganan terhadap penderita diare.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih banyaknya jalan kabupaten dalam kondisi yang tidak/kurang baik.
   - Masih besarnya proporsi drainase dalam kondisi tidak baik.
   - Masih tingginya proporsi irigasi kabupaten dalam kondisi tidak baik.
   - Masih tingginya penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak.
   - Masih rendahnya rasio ruang terbuka hijau.
   - Masih rendahnya rasio bangunan ber-IMB.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.
   - Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman dengan didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   - Masih terbatasnya jumlah petugas linmas.
   - Masih rendahnya jangkauan pelayanan bencana kebakaran.
6. Sosial
   - Masih rendahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial.

- Masih rendahnya proporsi PMKS yang mendapatkan penanganan.

7. Ketenagakerjaan
   - Masih rendahnya kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi pekerja.
   - Masih relatif tingginya pekerja di sektor informal dibanding sektor formal.
   - Masih relatif rendahnya kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor formal.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih terjadinya aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
   - Masih rendahnya cakupan pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
   - Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan terlatih untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
   - Masih tingginya kesenjangan capaian pendidkan antara laki-laki dengan perempuan di setiap jenjang
   - Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga DPRD dan lembaga swasta.
   - Masih terjadinya kesenjangan literasi antara laki-laki dengan perempuan.
9. Pangan
   - Masih rentannya ketersediaan komoditas pangan karena pasokan masih tergantung dari wilayah lainnya.
   - Masih rendahnya konsumsi protein per kapita penduduk.
   - Masih tingginya fluktuasi harga komoditas pangan.
10. Lingkungan Hidup
    - Masih tingginya pencemaran terhadap air dan udara.
    - Terjadinya degradasi luas kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan.
    - Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.
11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk.
    - Belum optimalnya pencatatan migrasi masuk dan migrasi keluar penduduk.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Belum seluruhnya kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendapatkan pembinaan
    - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih rendahnya ketersediaan KB sehingga terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmeet need).
- Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

14. Perhubungan
    - Masih rendahnya layanan angkutan darat.
    - Masih rendahnya angkutan umum yang memiliki KIR.
    - Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur jalan relatif terhadap jumlah penduduk.
15. Komunikasi dan Informatika
    - Masih rendahnya akses terhadap layanan telekomunikasi.
    - Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur layanan telekomunikasi.
16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - Masih terbatasnya kapasitas produksi UMKM.
    - Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran.
    - Masih terbatasnya akses permodalan UMKM.
    - Masih rendahnya jumlah koperasi aktif.
17. Penanaman Modal
    - Belum optimalnya kegiatan promosi potensi investasi kepada calon investor.
    - Masih rendahnya pemberian fasilitas, berupa insentif dan kemudahan, bagi para investor.
    - Belum optimalnya iklim investasi, seperti perizinan dan ketersediaan tenaga kerja terampil.
18. Kepemudaan dan Olahraga
    - Masih rendahnya persentase organisasi pemuda aktif.
    - Masih rendahnya akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan permodalan untuk wirausaha muda.
    - Masih rendahnya pendampingan dan pembinaan terhadap atlit olahraga.
19. Statistik
    - Belum dilakukan updating data dan informasi pembangunan daerah secara reguler pada sistem data dan statistik terintegrasi.
    - Masih rendahnya pemanfaatan data statistik dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah.
20. Perpustakaan
    - Masih rendahnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di perpustakaan.
    - Masih rendahnya minat baca masyarakat.
    - Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan.
    - Masih rendahnya penambahan koleksi judul buku di perpustakaan daerah.

21. Kearsipan
    - Masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengelola arsip secara baku.
    - Masih terbatasnya kapasitas SDM OPD untuk menerapkan arsip yang baku.

**Urusan Pilihan**

1. Pariwisata
    - Masih rendahnya daya tarik destinasi wisata
    - Masih rendahnya *hospitality* dari pekerja di industri pariwisata.
    - Masih rendahnya jumlah kunjungan ke objek wisata, terutama dari wisatawan mancanegara.
    - Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata.
2. Pertanian
    - Masih terbatasnya akses pada pupuk bersubsidi.
    - Masih rendahnya akses pada bibit yang berkualitas.
    - Belum optimalnya peran kelompok tani dalam mendorong peningkatan produksi.
    - Menurunnya produktivitas komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, karena sebagian sudah berumur tua.
    - Masih terbatasnya adopsi teknologi produksi pertanian.
3. Perdagangan
    - Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok UMKM, terutama yang berstatus informal.
    - Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha.
    - Masih kurangnya pengetahuan dalam promosi dan pemasaran produk UMKM.
    - Masih rendahnya adopsi teknologi informasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk.
4. Perindustrian
    - Masih kurangnya insentif dan kemudahan bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan
    - Masih rendahnya adopsi teknologi dalam kegiatan produksi.
    - Masih rendahnya penciptaan nilai tambah produk industri.
5. Kelautan dan Perikanan
    - Masih rendahnya produksi komoditas perikanan dan kelautan.
    - Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk aktivitas produksi dan distribusi komoditas perikanan dan kelautan.

- Belum efektifnya fungsi dari kelompok nelayan dalam pembinaan dan pengembangan anggota.
- Menurunnya cakupan pembinaan kelompok nelayan.

**Penunjang Urusan**

1. Perencanaan Pembangunan
   - Masih belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam menyusun dokumen perencanaan.
   - Masih terbatasnya ketersediaan data-data sektoral yang bersumber dari OPD.
   - Belum optimalnya pemanfaatan SIPD oleh pemerintah daerah.
2. Keuangan
   - Belum maksimalnya kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah.
   - Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
   - Belum optimalnya adopsi teknologi dalam pemungutan pajak dan retribusi.
   - Masih rendahnya kualitas belanja pemerintah daerah untuk pembangunan daerah.
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
   - Belum sesuainya pengadaan ASN dengan kebutuhan rill pemerintahan.
   - Belum sesuainya penempatan ASN dengan kompetensi jabatan.
   - Belum ojektifnya sistem penilaian kinerja ASN.
   - Belum dilaksanakannya secara konsisten dan konsekuen penerapan peraturan disiplin pegawai.
   - Masih rendahnya keterlibatan ASN dalam kegiatan pelatihan.
   - Masih sedikitnya ASN yang berpendidikan magister/doktor.
4. Penelitian dan Pengembangan
   - Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan pembangunan daerah.
   - Masih terbatasnya kemampuan ASN pemerintah daerah dalam melakukan penelitian.
   - Masih terbatasnya kemampuan ASN pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan hasil penelitian.
   - Masih rendahnya inovasi daerah.
5. Pengawasan
   - Belum memadainya pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dan aset daerah (perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan), khususnya di tingkat OPD.
   - Masih rendahnya kompetensi SDM untuk menjalankan fungsi pengawasan.
   - Masih lemah komitmen untuk penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap tingkatan manajemen pemerintahan daerah.

6. Sekretariat Dewan
    - Masih terbatasnya SDM terampil dan profesional di Sekretariat DPRD.
    - Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan.

### 2.3.2. Isu Strategis

Menurut Permendagri 86/2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Inmendagri 2/2025, isu Sstrategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Isu strategis yang diuraikan mencakup isu strategis global, nasional, hingga regional yang dapat mempengaruhi Kabupaten Pasangkayu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini sebagian bersumber dari dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2045.

### A. Isu Strategis Global

#### a. Perubahan Iklim

Saat ini, dunia global menghadapi ancaman perubahan iklim yang ditandai dengan suhu bumi yang semakin meningkat, musim kering yang lama, perubahan pola curah hujan, dan lainnya. Salah satu penyebab dari perubahan ilkim adalah pemanasan global seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia. Menurut Greenpeace, pendorong utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas, untuk pembangkit energi dan transportasi. Kegiatan ini menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menjebak panas ke atmosfer, mengakibatkan pemanasan planet dan gangguan iklim.

Perubahan iklim berdampak sangat signifikan bagi aktivitas manusia, tak terkecuali di Kabupaten Pasangkayu. Salah satu implikasinya adalah penurunan produktivitas komoditas perkebunan sebagai dampak dari kekeringan yang berkepanjangan dan curah hujan yang tidak menentu. Komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit memerlukan curah hujan dan cahaya matahari yang cukup. Namun ganguan iklim seperti El Nino bisa berpengaruh terhadap kurangnya asupan air, sehingga berpotensi menganggu pertumbuhan tanaman, seperti kelapa sawit. Di sisi lain, paparan sinar matahari yang berlebihan bisa berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan tanaman, seperti kelapa sawit. Oleh karena itu, gangguan iklim ini akan mempengaruhi produktivitas kelapa sawit dan komoditas pertanian lainnya di Kabupaten Pasangkayu. Penurunan produktivitas ini akan mempengaruhi pendapatan petani, yang pada

akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu, isu perubahan iklim ini harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam perumusan perencanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, terutama untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

**b. Digitalisasi**

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa banyak perubahan bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu implikasi dari semakin berkembangnya teknologi adalah digitalisasi. Digitalisasi merupakan fenomena global yang membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan.

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, data, dan proses dari format fisik atau analog ke digital. Digitalisasi melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk menjalankan berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual atau teknologi analog. Manfaat yang diperoleh dari digitalisasi di antaranya adalah efisiensi operasional, akses dan distribusi data, analisis data, penyimpanan data, dan keamanan data. Secara umum, digitalisasi memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan di berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Digitalisasi telah memberikan dampak signifikan bagi berbagai aspek kehidupan manusia, di antaranya seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Di bidang ekonomi, digitalisasi berkontribusi pada peningkatan produktivitas melalui proses bisnis yang lebih efisien, serta terciptanya sejumlah lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, analisis data, dan keamanan data. Di bidang pendidikan, digitalisasi telah membawa perubahan besar pada kemudahan akses informasi untuk kegiatan pembelajaran, serta perubahan pola interaksi sosial. Di bidang lingkungan, digitalisasi dapat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui manajemen sumberdaya yang lebih baik. Di bidang pemerintahan, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, serta menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik.

Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu juga terpengaruh oleh masifnya perkembangan digitalisasi. Aktivitas ekonomi diharapkan semakin efisien dan bisa membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, efisiensi dan kemudayan pelayanan publik bisa semakin meningkat dengan adopsi teknologi digital dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perencanaan dalam lima tahun ke depan perlu mendorong adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

**c. Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) atau TPB/SDGs merupakan inisiatif global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Agenda ini mencakup 17 tujuan utama dan 169 target yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. TPB/SDGs ini merupakan penyempuranaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tidak hanya ikut serta dalam penandatanganan *UN Sustainable Development Summit*, namun juga menindaklanjuti kesepakan global tersebut menjadi agenda pembangunan nasional. Dalam menjamin pelaksanaan TPB/SDGs dalam agenda perencanaan pembangunan, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mencapai target TPB/SDGs di tahun 2030, perlu sinergi di berbagai level pemerintahan. Selain pemerintah pusat, pemerintah di tingkat daerah juga perlu memasukkan agenda TPB ini dalam perencanaan pembagunan daerah dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Integrasi agenda TPB dalam dokumen perencanaan daerah ini bertujuan untuk memastikan adanya kontribusi dari setiap daerah dalam mendukung pencapaian TPB secara nasional, yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada pencapaian TPB global. Di sisi lain, agenda TPB yang diintegrasikan dalam perencanaan daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, membutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan pendanaan. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu guna mengoptimalkan kontribusi pada pencapaian TPB nasional dan global.

**d. Kondisi Geopolitik dan Keamanan Global**

Saat ini, dunia global dilanda ketidakstabilan politik dan keamanan seiring dengan terjadinya perang antara Rusia dengan Ukrania dan invasi Israel ke Palestina. Di samping itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan China turut berkontribusi terhadap dinamika politik dan ekonomi global. Perang Rusia – Ukrania telah berdampak pada fluktuasi harga sejumlah komoditas ekspor dan impor. Sementara itu, invasi Israel ke Palestina tidak hanya melibatkan dua negara, tapi juga melibatkan negara-negara yang pro dan kontra terhadap invasi tersebut, sehingga memunculkan ketegangan secara global. Lebih lanjut, ketegangan antara Amerika

Serikat dan China, dua raksasa ekonomi dunia ini, dalam bentuk perang dagang turut berimbas pada stabilitas politik dan ekonomi global.

Instabilitas geopolitik dan keamanan global yang terjadi akhir-akhir ini telah berdampak pada aktivitas ekonomi domestik di Indonesia. Yang cukup terasa adalah dampak dari tergangunya perdagangan global sehingga sejumlah negara pengekspor tidak bisa menjual barang ke luar negeri. Di sisi lain, negara pengimpor juga tidak bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk kepentingan domestik. Kondisi ini bisa disebabkan oleh terjadinya perang militer ataupun perang dagang yang terjadi antar negara. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dengan perang militer ataupun perang dagang, tetapi Indonesia turut terdampak dari fluktuasi harga, penurunan permintaan dari negara pengimpor, dan hambatan untuk memperoleh barang dari negara pengekspor. Perang antara Rusia – Ukrania misalnya, membuat Indonesia kesulitan mendapatkan gandum dari Ukrania mengingat selama ini Indonesia merupakan pengimpor gandum dari Ukrania. Di sisi lain, negara-negara yang terlibat perang juga mengurangi permintaan produk-produk yang diimpor dari Indonesia. Secara umum, kondisi geopolitik global dan keamanan bisa berimbas pada pelemahan ekonomi global, yang turut berpengaruh terhadap perekonomian domestik di Indonesia.

Kabupaten Pasangkayu sebagai wilayah yang berkontribusi signifikan dalam ekspor minyak sawit di Provinsi Sulawesi Barat akan terpengaruh oleh dinamika politik global ini melalui fluktuasi harga minyak sawit global. Jika harga minyak sawit global turun, maka harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani juga akan turun, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dinamika politik dan keamanan global ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif untuk mencegah dampak negatif dari fluktuasi harga minyak sawit global tersebut.

**B. Isu Strategis Nasional**

**a. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa implikasi pada perekonomian wilayah. Pembangunan IKN ini memang di desain untuk menjadi sumber pertumbuhan baru Indonesia dan menjadi *economic super hub* yang menggerakan rantai nilai perekonomian Indonesia. Itu artinya keberadaan IKN tidak hanya memberikan *multiplier effect* terhadap Provinsi Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan, tapi juga akan berdampak terhadap wilayah di sekitar Pulau Kalimantan, salah satunya Kabupaten Pasangkayu yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari sisi letak geografis, Kabupaten Pasangkayu memiliki kedekatan wilayah dengan IKN. Jarak Kabupaten Pasangkayu dari IKN hanya 215 Km ditempuh melalui jalur laut. Agar dapat terkoneksi dengan IKN, Kabupaten Pasangkayu mesti memperkuat infrastruktur transportasi,

terutama transportasi laut. Setelah terkoneksi, perlu memperkuat sektor mana yang berpotensi dikerjasamakan dengan IKN. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu perlu memaksimalkan komoditas atau produk yang bisa menyangga pembangunan IKN atau kehidupan sosial ekonomi IKN. Hal inilah yang akan memicu efek pembangunan IKN terhadap pembangunan Kabupaten Pasangkayu ke depan.

Keberadaan IKN ini memang harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Pasangkayu melalui kerjasama strategis dengan IKN. Badan Otorita IKN telah menetapkan 8 (delapan) sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah yang berpotensi dikerjasamakan oleh mitra IKN, antara lain: (i) sektor ekonomi dan industri, (ii) logistik dan konektivitas, (iii) sdm dan ketenagakerjaan, (iv) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (v) pariwisata dan ekonomi kreatif, (vi) energi dan kelistrikan, (vii) pertanian dan ketahanan pangan, dan (viii) pengelolaan sumber daya air. Jika memenuhi salah satu dari delapan sektor kerjasama, maka potensi Kabupaten Pasangkayu untuk menjadi daerah mitra IKN terbuka luas. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu perlu merumuskan kebijakan dan program yang bisa mendorong optimalisasi kerjasama dengan IKN, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan.

**b. Ancaman Krisis Energi**

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi fosil menimbulkan ancaman bagi ketersediaan energi secara nasional. Pasalnya, cadangan sumber daya alam energi fosil di Indonesia terus berkurang setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, tanpa penemuan cadangan yang baru, terhitung dari tahun 2020, minyak bumi bumi di Indonesia diperkirakan akan habis dalam sembilan tahun ke depan (2029), gas bumi akan habis 22 tahun ke depan (2042), dan batu bara akan habis dalam 65 tahun mendatang (2082). Meskipun Indonesia tergolong memiliki cadangan fosil yang masih sangat besar, tetapi tetap perlu diantisipasi keterbatasan energi tersebut dalam jangka panjang. Salah satu bukti bahwa cadangan sumber daya alam terus berkurang adalah posisi Indonesia yang tidak lagi menjadi negara net eksportir minyak sejak tahun 1997 hingga sekarang.

Salah satu implikasi riil dari ancaman krisis energi ini adalah kelangkaan pasokan energi ke masyarakat, di antaranya seperti BBM, gas, dan listrik. Kelangkaan pasokan energi ini akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Meskipun isu ancaman kelangkaan energi ini merupakan isu nasional, bahkan juga internasional, tetapi implikasinya akan dirasakan hingga level lokal, tak terkecuali di Kabupaten Pasangkayu. Keterbatasan pasokan energi, seperti BBM dengan harga yang terjangkau, tidak hanya akan menghambat kegiatan ekonomi, tapi juga berpotensi menimbulkan isu sosial dan

keamanan. Hal ini tentunya perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam menyusun perencanaan, terutama untuk lima tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bisa berkontribusi dalam mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Saat ini, proporsi penggunaan energi baru dan terbarukan masih relatif rendah. Dengan potensi kelapa sawit yang tinggi, Kabupaten Pasangkayu bisa berperan dalam mendorong pemanfaatan biogas untuk energi listrik dan pemanfaatan biodiesel untuk energi bahan bakar. Namun, dibutuhkan investasi dan komitmen dari pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan tersebut. Upaya yang bertahap dan tersistematis perlu dimuruskan dalam kebijakan dan program dalam lima tahun ke depan.

**c. Ancaman Krisis Pangan**

Meskipun Indonesia dikaruniai wilayah subur dan berpotensi tumbuhnya komoditas pangan, tetapi produksi sejumlah komoditas pangan masih relatif rendah dibanding kebutuhan pangan. Akibatnya, sebagian komoditas pangan mesti diimpor dari negara lain. Di tingkat nasional, saat ini sejumlah bahan pangan strategis memang masih diimpor dari negara lain, seperti besar, gula, dan daging. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan negara Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar. Parahnya, apabila terjadi gangguan dalam pasokan, maka harga pangan akan melambung tinggi dan bahkan tidak mungkin pasokan pangan dari luar akan berkurang atau berhenti. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil studi Bappenas (2019), yang menyatakan bahwa terjadi defisit pada neraca pangan nasional, dimana yang diproduksi lebih rendah dibanding yang dikonsumsi. Masih menurut studi Bappenas, diperkirakan defisit pada neraca pangan tersebut akan semakin membesar di masa mendatang.

Meskipun dampak dari ancaman krisis pangan ini bisa berbeda antar provinsi dan/atau kabupaten/kota, tetapi dampak yang lebih besar akan dirasakan oleh wilayah yang tidak menjadi basis produksi pangan. Kabupaten Pasangkayu termasuk wilayah yang bukan penghasil utama produk pangan. Di Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi produksi padi Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 0,8 persen dari total produksi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasangkayu memiliki ketergantungan padi/beras dari wilayah di sekitarnya. Salah satu implikasi dari ketergantungan pangan adalah ancaman terhambatnya pasokan pangan dari wilayah lain, serta harga yang cenderung lebih tinggi apabila terjadi gangguan pada proses distribusi. Untuk itu, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Pasangkayu perlu menjadi perhatian khusus dalam dokumen perencanaan, khususnya dalam lima tahun ke depan.

**C. Isu Strategis Regional**

**a. Pulau Sulawesi Sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya**

Dalam Rancangan Akhir RPJN 2025 – 2045, Pulau Sulawesi akan dijadikan sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya. Upaya untuk menjadikan Pulau Sulawesi sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi dan industri berbasis sumberdaya tidak lepas dari potensi yang dimiliki. Secara geografis, Pulau Sulawesi berada di ALKI II dan ALKI II yang berpotensi mendukung Wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional di wilayah KTI. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan juga berpotensi mendorong pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi sebagai daerah penyangga IKN. Kontribusi Pulau Sulawesi sebagai daerah penyangga IKN dalam dimaksimalkan melalui peningkatan nilai tambah beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasangkayu yang potensial mendorong pembangunan di Pulau Sulawesi adalah beberapa diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, dan kakao.

Arah pembangunan Pulau Sulawesi yang diinginkan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 merupakan peluang bagi Kabupaten Pasangkayu untuk mengembangkan dua komoditas perkebunan potensial selain dari kelapa sawit, yaitu kelapa dan kako. Karena dianggap sebagai komoditas yang bisa mendorong pembangunan di Pulau Sulawesi, maka kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan komoditas unggulan. Ini bisa menjadi momentum bagi Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada satu komoditas yaitu kelapa sawit.

Di sisi lain, pengembangan wilayah Sulawesi sebagai wilayah Industri Berbasis Mineral telah mendorong pengembangan industri turunan komoditas pertambangan di sejumlah wilayah, seperti Morowali dan Bantaeng. Hal ini membuat wilayah tersebut berkembang sangat pesat dan menjadi daya tarik bagi wilayah sekitarnya. Khusus di Kabupaten Pasangkayu, sebagian penduduk yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik, telah berpindah ke Kabupaten Morowali. Hal ini berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia produktif di Kabupaten Pasangkayu. Kondisi ini mesti diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memastikan lapangan kerja yang tersedia bisa memberikan pendapatan yang cukup dan menyejahterahkan, sehingga penduduk tidak perlu mencari sumber penghidupan di daerah lainnya.

**b. Kerjasama Regional Pulau Sulawesi**

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh enam provinsi di Pulau Sulawesi dapat dikembangkan dan dikerjasamakan untuk mendorong kemajuan ekonomi wilayah. Salah satu upaya untuk mendorong kerjasama antar provinsi melalui pembangunan jaringan transportasi yang

menghubungkan antar satu provinsi dengan provinsi yang lain, serta dukungan kelembagaan yang dapat mendorong terjalinnya kerjasama tersebut.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki rencana untuk membangun jaringan transportasi kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan provinsi di Pulau Sulawesi mulai dari Sulawesi Selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado). Pembangunan sarana dan prasarana kereta api akan memperlancar perpindahan manusia dan barang dari suatu provinsi ke provinsi lain dengan harga yang relatif lebih murah dan waktuk tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana ini turut mendukung pengembangan kegiatan pariwisata dan industri yang dimiliki oleh setiap provinsi. Saat ini, jaringan transportasi rel kereta api tahap pertama sedang dibangun dengan rute Makassar – Parepare. Ke depan, pembangunan rel kereta api akan menjangkau seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

Selain keterhubungan antar provinsi, perlu dukungan kelembagaan untuk memastikan koordinasi dan sinergi bisa terjalin optimal. Saat ini, sudah terbentuk Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) sejak tahun 2000. Badan ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kerjasama antar provinsi di Pulau Sulawesi guna memajukan provinsi-provinsi yang menjadi anggotanya. Badan ini juga telah memiliki Sekretariat yang berkantor pusat di Kota Makassar. Keberadaan BKPRS ini sangat strategis mengingat anggota-anggotanya adalah para Gubernur di Pulau Sulawesi. Selain sebagai wadah untuk menjalin kerjasama antar provinsi, keberadaan BKPRS ini juga bisa menguatkan *positioning* pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi dalam menyampaikan aspirasi dan dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat.

Kerjasama antar pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi semakin diperlukan, terutama sejak pemerintah pusat menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pulau terdekat dari IKN, Sulawesi berpeluang untuk menjadi penopang utama IKN, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun pemerintah provinsi di Sulawesi mesti berkolaborasi dan saling mendukung untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Tentunya, manfaat dari kerjasama ini dapat dirasakan juga oleh Kabupaten Pasangkayu, sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya. Kabupaten Pasangkayu bisa berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi IKN, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan untuk mendorong optimalisasi ini perlu dirumuskan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Pasangkayu, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

**c. Sulawesi Barat sebagai Sentra Produksi Komoditas Perkebunan**

Sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan, merupakan sektor yang berkontribusi utama bagi perekonomian Sulawesi Barat. Provinsi ini memang telah lama dikenal sebagai salah

satu sentra penghasil komoditas perkebunan di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan iklim tropis yang ideal, daerah ini menjadi pusat produksi berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kelapa, dan kopi. Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Peran strategis Provinsi Sulawesi Barat dalam sektor perkebunan menjadikannya wilayah yang sangat penting dalam rantai pasok komoditas perkebunan Indonesia. Selain itu, melimpahnya komoditas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi menjadikan wilayah ini sebagai pusat industri pengolahan produk perkebunan yang berdaya saing.

Salah satu komoditas perkebunan utama di Provinsi Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Kebun kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas areal tanaman sebesar 108.512 ha pada tahun 2024, yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju. Hal ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Pulau Sulawesi. Hal ini pula yang mendorong perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit. Didukung oleh kondisi alam, wilayah ini juga telah menjadi lokasi tujuan investasi bagi perusahaan kelapa sawit berskala nasional dan lokal.

Sebagian besar hasil dari produk perkebunan juga diolah menjadi produk turunan kelapa sawit seperti minyak sawit mentah (CPO) yang telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan devisa yang besar bagi Indonesia. Selain itu, pengolahan produk turunan kelapa sawit ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat lokal, meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat memegang peran penting bagi pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan di wilayah ini. Di samping itu, kolaborasi Kabupaten Pasangkayu dengan daerah lain yang juga menjadi penghasil kelapa sawit, terutama di lingkup Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam rangka pengolahan produk turunan yang berkelanjutan.

**d. Konflik Agraria**

Konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari dua dekade di Kabupaten Pasangkayu menjadi isu pentingnya tata kelola pertanahan yang sistemik, terutama dalam hal kejelasan dan perlindungan hak kepemilikan warga. Data terkini mengungkapkan bahwa di 30 dari 59 desa, terjadi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan total lahan konflik seluas 1.372 hektar. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada melemahnya nilai ekonomi lahan masyarakat karena kehilangan fungsi agunan dan akses pembiayaan produktif, tetapi juga menimbulkan

risiko sosial jangka panjang seperti konflik horizontal, ketidakpercayaan pada lembaga pemerintah, serta stagnasi investasi berbasis komunitas.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, krisis kepastian hukum atas tanah tersebut telah menghambat distribusi manfaat ekonomi secara inklusif, memperburuk ketimpangan struktural, dan melemahkan fondasi keberlanjutan fiskal daerah. Ketiadaan peta indikatif konflik, lemahnya koordinasi lintas kelembagaan, serta belum terbentuknya mekanisme penyelesaian agraria yang responsif telah memperburuk situasi. Apabila tidak ditangani secara sistemik melalui reformasi kebijakan pertanahan dan dukungan kelembagaan yang kuat, maka konflik agraria ini berpotensi menjadi penghambat utama agenda inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Pasangkayu.

**e. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Kabupaten Pasangkayu menghadapi tingginya kerentanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, termasuk ketimpangan akses terhadap sumber daya, konflik agraria yang berkepanjangan, serta urbanisasi yang tidak terkelola secara inklusif. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah tindak kejahatan yang tercatat di Kabupaten Pasangkayu mencapai 222 kasus, menjadikannya wilayah dengan angka kriminalitas tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Mamuju (365 kasus). Tingkat risiko penduduk menjadi korban tindak pidana tercatat sebesar 111 kasus per 100.000 penduduk, yang mencerminkan kerentanan kamtibmas yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah provnsi. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya infrastruktur pelayanan keamanan, rendahnya kapasitas kelembagaan keamanan sipil di tingkat desa, serta belum optimalnya fungsi deteksi dini melalui forum-forum masyarakat.

Ketidakstabilan kamtibmas memiliki implikasi langsung terhadap iklim investasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika masyarakat merasa tidak aman dan hukum tidak hadir secara adil, partisipasi dalam program pembangunan menurun, risiko sosial meningkat, dan biaya sosial-ekonomi (seperti biaya keamanan swadaya, pengangguran akibat gangguan aktivitas ekonomi, dan potensi eksodus penduduk produktif) cenderung meningkat. Oleh karena itu, isu kamtibmas harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah, tidak hanya sebagai urusan sektoral kepolisian, melainkan agenda lintas sektor yang mencakup pendekatan preventif, penguatan kohesi sosial, serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk mewujudkan ruang hidup yang aman dan inklusif.

# BAB III
# VISI, MISI, DAN
# PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### 3.1.1. Visi

Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah dimenangkan oleh Pasangan Bupati/Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa, SH. dan Dr. Hj. Herny, S. Sos, M.Si. dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pasangan ini mengusung Visi:

**"Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman"**

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Visi Pasangan Bupati/Wakil Bupati Terpilih kemudian menjadi Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029. Visi tersebut mengandung beberapa pokok Visi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Visi Sejahtera**, mengandung makna sebagai kemauan kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mewujudkan masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejahtera juga ditandai dengan kehidupan masyarakat yang bermartabat, mandiri, berakhlak, berbudaya dan religius serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

**Visi Maju,** adalah sinkronisasi dari Visi Indonesia Maju. Visi maju mengandung makna kemauan yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan pemerintahan daerah yang kuat. Visi Maju juga ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata, yang memungkinkan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

**Visi Berkelanjutan,** adalah suatu keharusan bahwa visi pembangunan daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Visi berkelanjutan mengandung makna keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk meneruskan dan menjaga kesinambungan pembangunan serta bersinergi dan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya sudah baik akan diteruskan dan ditingkatkan dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

**Berlandaskan Keberagaman,** mengandung makna bahwa keberagaman sebagai potensi atau kekayaan, etos kerja, budaya pemersatu, serta kekuatan dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah yang berdasarkan kondisi Kabupaten Pasangkayu yang multikultur.

Dalam proses penyusunannya, Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dan juga memperhatikan kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai oleh Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana telah disajikan di dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029.

### 3.1.2. Misi

Misi yang akan dijalankan untuk mencapai Visi Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 adalah:

1. **Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas.**
   Membangun infrastruktur daerah guna mendukung kawasan perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM dalam rangka menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.**
   Menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengembalian anak putus sekolah. Meningkatkan layanan kesehatan, kualitas SDM kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan.
3. **Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata**
   Menyediakan sarana dan prarana pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pemantapan ketahanan dan ketersediaan pangan daerah.
4. **Mewujudkan transformasi sosial.**
   Meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menanggulangi stunting, dan mencegah gizi buruk/kronis.
5. **Mewujudkan transformasi digital.**
   Memperkuat transformasi digital, mengembangkan riset dan inovasi daerah, dan mendorong kemajuan iptek.

6. **Memperkuat tata kelola pemerintahan.**

   Memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, melakukan pembinaan hukum, serta meningkatkan kompetensi SDM Aparatur.

7. **Menjaga kelestarian lingkungan hidup.**

   Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengelola SDA secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

8. **Memperkuat mental spritual.**

   Membina mental spiritual, merevitalisasi rumah ibadah dan rumah tahfidz, moderasi beragama serta memperkuat gerakan Cinta Masjid dan Cinta Al-Quran (CMCA).

Rumusan Misi tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok Visi, dengan maksud untuk menunjukkan upaya yang hendak dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Keterkaitan ini juga penting untuk menunjukkan dukungan Misi terhadap pencapaian Visi.

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| No. | Misi | Pokok Visi |
|---|---|---|
| 1. | Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas | Maju |
| 2. | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia | Sejahtera |
| 3. | Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata | Sejahtera |
| 4. | Mewujudkan transformasi sosial | Sejahtera |
| 5. | Mewujudkan transformasi digital | Maju |
| 6. | Memperkuat tata kelola pemerintahan | Maju |
| 7. | Menjaga kelestarian lingkungan hidup | Berkelanjutan |
| 8. | Memperkuat mental spritual | Berlandaskan Keberagaman |

## A. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045, Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu tahun 2045 dirumuskan sebagai berikut:

**“Kabupaten Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan “**

Keselarasan antara Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan
Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 | Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 |
|---|---|
| Kabupaten Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan | Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman |

Tampak bahwa Visi jangka menengah Kabupaten Pasangkayu (2025-2029) benar-benar selaras dengan Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu (2025-2045). Semua pokok Visi yang ada di dalam pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 juga menjadi pokok Visi dalam pernyataan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045. Hanya saja, pada Visi jangka menengah ditambahkan pokok Visi Berlandaskan Keberagaman dengan maksud untuk memberi penekanan bahwa masyarakat Kabupaten Pasangkayu sangat beragam, terusa dari segi etnis dan agama. Namun, mereka diharapkan dapat tetap hidup berdampingan dalam suasana damai, saling menghormati, dan penuh toleransi.

Sedangkan keselarasan antara Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan
Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 -2029

| Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 | Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 |
|---|---|
| Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat (1) | Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata (3)<br>Mewujudkan transformasi digital (5) |
| Meningkatkan taraf hidup masyarakat (2) | Mewujudkan transformasi sosial (4) |
| Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas (3) | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (2) |
| Menciptakan pemerataan pembangunan daerah (4) | Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas (1) |
| Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas (5) | Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas (1) |
| Menciptakan rasa aman dan tenteram (6) | Memperkuat mental spritual (8) |
| Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan (7) | Menjaga kelestarian lingkungan hidup (7) |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (8) | Memperkuat tata kelola pemerintahan (6) |

Seperti halnya keselarasan pada Visi, juga tampak bahwa Misi jangka menengah Kabupaten Pasangkayu (2025-2029) juga selaras dengan Misi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu (2025-2045). Baik Misi jangka menengah maupun Misi jangka panjang, masing-masing memiliki 8 (delapan) Misi yang selaras dari sisi substansi. Perbedaan keduanya hanya terletak pada cara mengurutkan Misi dan redaksi Misi. Misalnya, pada Misi jangka panjang "mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat" ditempatkan sebagai Misi Pertama.

Sedangkan pada Misi jangka menengah "membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata" ditempatkan sebagai Misi Ketiga dengan redaksi yang sedikit berbeda.

## B. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029, Visi Provinsi Sulawesi Barat adalah:

**"Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera"**

Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Keselarasan Visi RPJM**D** Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Barat Tahun 2025-2029

| Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 | Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 |
|---|---|
| Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera | Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman |

Terlihat bahwa Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 relatif lebih ringkas dibandingkan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029. Namun kedua Visi tampak sinkron dimana keduanya memuat pokok Visi Maju dan Sejahtera, meskipun memiliki pemaknaan yang sedikit berbeda. Namun Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu secara eksplisit menyebutkan pokok Visi Berkelanjutan, sedangkan nuansa berkelanjutan di dalam Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat hanya tertuang di dalam penjelasan pokok Visi Maju. Begitu pula Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu mencantumkan Keberagaman sebagai pokok Visi untuk mempertegas bahwa kondisi masyarakat Pasangkayu sangat heterogen, baik dari segi suku atau etnis, maupun dari segi agama dan kepercayaan.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 | Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2029 |
|---|---|
| Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (1) | Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata (3)<br>Mewujudkan transformasi digital (5) |
| Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2) | Mewujudkan transformasi sosial (4) |
| Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter (3) | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (2) |
| Membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (4) | Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas (1) |

| Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 | Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2029 |
|---|---|
| | Menjaga kelestarian lingkungan hidup (7) |
| Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. (5) | Memperkuat tata kelola pemerintahan (6)<br>Memperkuat mental spritual (8) |

Meskipun jumlah Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 relatif lebih sedikit (hanya ada 5 Misi) dibandingkan dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 (ada 8 Misi), tetapi dari segi substansi tetap memiliki keselarasan. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat relatif lebih ramping karena menggabungkan beberapa substansi kedalam satu rumusan Misi. Misalnya, Misi keempat, yaitu "membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup", dimana menggabungkan dimensi infrastruktur dengan dimensi lingkungan hidup. Sementara Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu, masing-masing dirumuskan dalam pernyataan Misi tersendiri, yaitu "mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas (Misi Pertama) dan "menjaga kelestarian lingkungan hidup" (Misi Ketujuh).

### 3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dengan sepenuhnya mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029, sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran dimaksud dirumuskan secara lebih terukur, dengan Indikator dan Target Kinerja yang jelas, yang ditetapkan setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| Elemen | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Visi** | **Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman** | | | | | | | | | |
| **Misi 1** | **Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas** | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah | Indeks Infrastruktur*) | Indeks | 69,06 | 71,04 | 72,94 | 74,97 | 76,92 | 78,88 | 80,87 |
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya konektivitas wilayah | Indeks konektivitas **) | Indeks | 87,5 | 93,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 1.2 | Terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan industri | Persentase terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk kawasan industri ***) | Persen | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Misi 2** | **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia** | | | | | | | | | |
| Tujuan 2 | Meningkatkan pembangunan manusia | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,04 | 71,66 | 72,26 | 72,84 | 73,40 | 73,94 | 73,94 |
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | Indeks | 60,68 | 62,19 | 63,05 | 63,91 | 64,77 | 65,63 | 65,63 |
| Sasaran 2.2 | Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan | Indeks Kesehatan | Indeks | 77,06 (2023) | 77,76 | 78,16 | 78,56 | 78,96 | 79,36 | 79,39 |
| **Misi 3** | **Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata** | | | | | | | | | |

| Elemen | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tujuan 3 | Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 0,68 | 3,62 | 4,60 | 5,57 | 6,54 | 7,51 | 7,51 |
| Sasaran 3.1 | Membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen | 1,92 | 3,14 | 3,63 | 4,12 | 4,61 | 5,11 | 5,11 |
| Sasaran 3.2 | Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen | 25,73 | 26,00 | 27,04 | 28,08 | 29,12 | 30,16 | 30,16 |
| Sasaran 3.3 | Meningkatnya lapangan kerja | Tingkat Pengangguran | Persen | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
| Sasaran 3.4 | Membaiknya pemerataan pendapatan | Indeks Gini | Indeks | 0,298 | 0,290 | 0,287 | 0,284 | 0,282 | 0,280 | 0,280 |
| **Misi 4** | **Mewujudkan transformasi sosial** | | | | | | | | | |
| Tujuan 4 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | PDRB Per Kapita | Rp Juta | 76,80 | 81,50 | 86,76 | 92,83 | 99,55 | 107,66 | 107,66 |
| Sasaran 4.1 | Membaiknya taraf hidup masyarakat miskin | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5,21 | 5,02 | 4,76 | 4,51 | 4,24 | 4,00 | 4,00 |
| Sasaran 4.2 | Membaiknya penanganan stunting | Angka Prevalensi Stunting | Persen | 36,7 | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 17,50 | 15,00 | 15,00 |
| **Misi 5** | **Mewujudkan transformasi digital** | | | | | | | | | |

| Elemen | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tujuan 5 | Meningkatkan pembangunan digital | Indeks Masyarakat Digital | Indeks | 41,51 | 42,72 | 44,40 | 46,20 | 48,10 | 50,00 | 50,00 |
| Sasaran 5.1 | Berkembangnya literasi digital | Indeks Literasi Digital | Indeks | 41,51 | 45,01 | 50,05 | 55,25 | 58,25 | 62,05 | 62,05 |
| Sasaran 5.2 | Meningkatnya penerapan digilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,52 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,70 | 4,00 | 4,00 |
| **Misi 6** | **Memperkuat tata kelola pemerintahan** | | | | | | | | | |
| Tujuan 6 | Mendorong reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | 57,90 (2023) | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 72,50 | 75,00 | 75,00 |
| Sasaran 6.1 | Membaiknya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,5 | 3,5 |
| Sasaran 6.2 | Meningkatnya inovasi daerah | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 15,40 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Misi 7** | **Menjaga kelestarian lingkungan hidup** | | | | | | | | | |
| Tujuan 7 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 93,26 | 93,50 | 93,80 | 94,20 | 94,60 | 95,00 | 95,00 |
| Sasaran 7.1 | Menurunnya emisi gas rumah kaca | Penurunan Emisi GRK | Ton Co2 e | 28 | 78.080,90 | 88.448,03 | 105.510,84 | 121.556,37 | 118.847,06 | 135.084,22 |
| **Misi 8** | **Memperkuat mental spritual** | | | | | | | | | |

| Elemen | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tujuan 8 | Meningkatkan kualitas kehidupan sosial | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 77,09 | 79,09 | 80,09 | 81,09 | 82,09 | 84 | 84 |
| Sasaran 8.1 | Membaiknya kondisi keluarga | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | Indeks | 63,42 | 65,28 | 67,14 | 69 | 70,86 | 72,72 | 72,72 |
| Sasaran 8.2 | Membaiknya kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat | Angka Kriminalitas | Kasus | 222 (2023) | 187 | 171 | 150 | 132 | 112 | 112 |

Keterangan:

*) Indeks infrastruktur daerah, merupakan indeks komposit yang terdiri atas persentase jalan kabupatendalam kondisi mantap, persentase RT yang memiliki akses terhadap air bersih, persentase RT yang memperoleh jaringan listrik (tingkat elektrifikasi), dan persentase RT yang memiliki akses terhadap jaringan internet. pelanggaran

**) Indeks konektivitas wilayah, diukur dengan penggabungan indeks angkutan jalan dan indeks angkutan penyeberangan.

***) Persentase terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk kawasan industri, diukur dengan ketersediaan infrastruktur jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

## 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

### 3.2.1. Strategi

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, selanjutnya dirumuskan Strategi. Secara konseptual, Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan dan sasaran, atau solusi untuk suatu masalah. Di dalam Inmendagri 2/2025, Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah | Meningkatnya konektivitas wilayah | Mendorong konektivitas wilayah, infrastruktur pendukung kawasan industri, dan infrastruktur dasar melalui peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas; Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra perekonomian produktif di desa, dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | Terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan industri | |
| Meningkatkan pembangunan manusia | Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sapras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata; Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat. |
| | Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi | Membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah melalui penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima; Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan; Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/ transportasi laut. |
| | Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan | |
| | Meningkatnya lapangan kerja | Memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat melalui penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan di era ekonomi digital serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga; Perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda; Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan. |
| | Membaiknya pemerataan pendapatan | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Membaiknya taraf hidup masyarakat miskin | Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP, BPJS-JKN-KIS untuk memperkuat program UHC, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan kerja; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif, pengendalian penduduk perlindungan perempuan dan anak serta penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. |
| | Membaiknya penanganan stunting | Mengakselerasi penanganan stunting melalui pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri, dan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil. |
| Meningkatkan pembangunan digital | Berkembangnya literasi digital | Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0, dan peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal. |
| | Meningkatnya penerapan digilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| Mendorong reformasi birokrasi | Membaiknya kualitas pelayanan publik | Meningkatkan kualitas layanan publik yang ditopang oleh digitalisasi pelayanan melalui perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah; Perbaikan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan perizinan dan peluang investasi; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan publik; Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan; Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan *core value* ASN; Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP; Mendorong pembangunan infrastruktur digital dan Pusat Data Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi MPP dan SPBE sebagai sarana integrasi layanan publik pemerintah daerah. |
| | Meningkatnya inovasi daerah | Peningkatan dan penerapan inovasi daerah untuk mengoptimalisasi PAD dan pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif. |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Menurunnya emisi gas rumah kaca | Menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau; Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan hidup |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| | | dan SDA berkelanjutan, penyediaan sanitasi dan air bersih serta ekonomi biru. |
| Meningkatkan kualitas kehidupan sosial | Membaiknya kondisi keluarga | Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan menerapkan GEDSI melalui pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal; Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas; dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga. |
| | Membaiknya ketertiban dan ketentraman masyarakat | Mewujudkan harmonisasi sosial sebagai upaya mendorong ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial; Peningkatan pembangunan mental spiritual, bantuan pembangunan rumah ibadah, rumah tahfidz, moderasi beragama dan penguatan gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alquran (CMCA); Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan politik dan wawasan kebangsaan serta pembanguan sarana prasarana keolahragaan; Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, untuk menciptakan ketenteraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana. |

### 3.2.2. Penahapan Pembangunan Daerah

Penahapan pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan daerah tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu selama periode 2025-2029. Secara garis besar, prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan bertumpu pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan,

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pengelolaan risiko bencana dan mitigasi bencana. Selain prioritas pembangunan daerah, bagian ini juga disertakan dengan lokus pembangunan yaitu lokasi atau lokus implementasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu. Sesuai dengan arahan Inmendagri 2/2025, penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan. Wilayah pengembangan yang dicantumkan dalam bagian ini diambil dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024-2043. Prioritas pembangunan daerah beserta lokus pembangunan daerah lebih rinci disajikan dalam tabel Penahapan Pembangunan dan Lokus Pembangunan Kabupaten Pasangkayu tahun 2026-2030.

Tabel 3.8
Penahapan Pembangunan dan Lokus Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Periode 2026-2030

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Mendorong konektivitas wilayah, infrastruktur pendukung kawasan industri, dan infrastruktur dasar melalui peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas; Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra perekonomian produktif di desa, dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) | Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten dan desa | Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten dan desa | Revitalisasi rumah tidak layak huni dan penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak | Penyediaan infrastruktur telekomunikasi (internet), terutama ditingkat desa | Pembangunan infrastruktur perhubungan laut | 1. Kawasan transportasi<br>2. Kawasan perdesaan |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sapras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan | Pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana pendidikan PAUD dan fasilitas kesehatan | Pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan | Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan | Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan | Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan | Seluruh Kecamatan |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| kesehatan yang merata; Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat | | | | | | |
| Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah melalui penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima; Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan; Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/transportasi laut. | Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM | Penguatan kelembagaan petani dan UMKM | Perluasan akses permodalan bagi petani dan pelaku UMKM | Penguatan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan produk UMKM | Perluasan akses pasar bagi produk olahan pertanian dan UMKM | 1. Kawasan perkebunan rakyat<br>2. Kawasan tanaman pangan<br>3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan<br>4. Kawasan hutan<br>5. Kawasan hortikultura<br>6. Kawasan Perkebunan<br>7. Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya<br>8. Kawasan peruntukan industri |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat melalui penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan di era ekonomi digital serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga; Perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda; Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan. | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi angkatan kerja untuk berwirausaha | Peningkatan kapasitas angkatan kerja berbasis teknologi dan sains, dan kewirausahaan terutama pada angkatan kerja pemuda | Peningkatan kapasitas angkatan kerja berbasis teknologi dan sains, dan kewirausahaan terutama pada angkatan kerja pemuda | Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja | Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja | Seluruh Kecamatan |
| Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP, BPJS-JKN-KIS untuk memperkuat program UHC, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; Peningkatan kesejahteraan dan | Peningkatakan kualitas data penduduk miskin secara berkala sebagai dasar pemetaan, perencanaan, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan | Penyediaan perlindungan sosial (bantuan dan jaminan sosial) yang komprehensif, inklusif, dan adaptif | Pemantapan graduasi penduduk miskin | Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis wirausaha | Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya penyediaan anggaran | Seluruh Kecamatan |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan kerja; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif, pengendalian penduduk perlindungan perempuan dan anak serta penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. | | | | | | |
| Mengakselerasi penaganan stunting melalui pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri, dan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil. | Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif dan Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) untuk | Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) | Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan | Peningkatan akses pangan bergizi | Seluruh Kecamatan |
| Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata | Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pekerja sektor pariwisata pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan | Penguatan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan untuk pelaku Ekonomi Kreatif dan pelaku usaha UMKM sektor pariwisata | Pengembangan sistem pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata | Perluasan akses pasar bagi produk ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata | 1. Kawasan perkotaan<br>2. Kawasan pariwisata |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| dan ekonomi digital era industry 4.0, dan peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal | | | | | | |
| Meningkatkan dan menerapkan inovasi daerah untuk mengoptimalisasi PAD dan pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif. | Penyediaan fasilitas pendukung untuk riset dan pengembangan | Peningkatan kapasitas penelitian dan invovasi para ASN | Pengembangan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah | Pengembangan invoasi pada pelaku ekonomi kreatif dan pelaku UMKM sektor pariwisata | Pengembangan invoasi pada pelaku ekonomi kreatif dan pelaku UMKM sektor pariwisata | Seluruh Kecamatan |
| Meningkatkan kualitas layanan publik yang ditopang oleh digitalisasi pelayanan melalui perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah; Perbaikan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan perizinan dan peluang investasi; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan publik; Penguatan perencanaan, pelaksanaan, | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan peran mall pelayanan publik | Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Investasi | Peningkatan kapasitas aparatur untuk mendukung tata kelola pelayanan publik yang berkualitas | Penguatan Digitalisasi Layanan Publik, termasuk perizinan investasi | Penguatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik | Kecamatan Pasangkayu |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan; Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan core value ASN; Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP; Mendorong pembangunan infrastruktur digital dan Pusat Data Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi MPP dan SPBE sebagai sarana integrasi layanan publik pemerintah daerah. | | | | | | |
| Menurunkan emisi gas gumah kaca melalui pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas | Peningkatan kualitas air melalui pengurangan tingkat | Peningkatan kualitas tutupan lahan melalui penurunan laju deforestasi | Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih, serta pengolahan limah rumah | Penguatan implementasi ekonomi biru dalam mengolala sumberdaya | Penguatan implementasi ekonomi hijau dalam mengelola sumberdaya kehutanan | 1. Kawasan hutan<br>2. Kawasan ekosistem mangrove<br>3. Kawasan perikanan |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| lingkungan hidup dan ekonomi hijau; Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan, penyediaan sanitasi dan air bersih serta ekonomi biru. | pencemaran limbah | | tangga dan industri melalui metode 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) | kelautan dan perikanan | | tangkap dan budidaya |
| Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan menerapkan GEDSI melalui pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal; Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas; Pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga. | Penguatan Kualitas Ketahanan Fisik keluarga | Penguatan kualitas ketahanan ekonomi | Penguatan kualitas ketahanan psikologi keluarga | Penguatan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga | Penguatan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga | Seluruh Kecamatan |
| Mewujudkan harmonisasi sosial sebagai upaya mendorong ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Peningkatan kualitas SDM Stalinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) | Peningkatakan kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan Tratibum yang efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan | Seluruh Kecamatan |

| Strategi | Penahapan Pembangunan (Prioritas Pembangunan Tahunan) | | | | | Lokus Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial; Peningkatan pembangunan mental spriritual, bantuan pembangunan rumah ibadah, rumah tahfidz, moderasi beragama dan penguatan gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alquran (CMCA); Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan politik dan wawasan kebangsaan serta serta pembanguan sarana prasarana keolahragaan; Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, untuk menciptakan ketenteraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana. | | | | | | |

### 3.2.3. Arah Kebijakan

Berdasarkan Strategi yang akan tempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, selanjutnya diselaraskan dengan Arah Kebijakan. Menurut Inmendagri 2/2025, Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini disajikan dua tabel yaitu tabel pertama merupakan tabel yang menunjukkan penjabaran Misi ke Arah Kebijakan dan tabel kedua menggambarkan keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 3.9
Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu

| Misi Kabupaten Pasangkayu | Arah Kebijakan Kabupaten Pasangkayu |
|---|---|
| 1. Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas<br>2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br>3. Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata<br>4. Mewujudkan transformasi social<br>5. Mewujudkan transformasi digital<br>6. Memperkuat tata kelola pemerintahan<br>7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup<br>8. Memperkuat mental spritual | Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, jaringan telekomunikasi, dan akses internet yang berkualitas dan merata. |
| | Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan mendukung kualitas aktivitas belajar-mengajar. |
| | Mengakselerasi peningkatan kualitas belajar mengajar. |
| | Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas. |
| | Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. |
| | Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas di semua fasilitas kesehatan. |
| | Memperkuat upaya preventif dengan mendorong Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat melalui sinergi antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. |
| | Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah. |
| | Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan dalam merangka memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah. |
| | Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan, khususnya kopi dan kakao. |
| | Pengembangan *smart fisheries* dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan. |
| | Pengembangan kawasan transmigrasi Sarudu Barat. |
| | Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi, dan *digital farming* bidang pertanian dan perkebunan. |

| Misi Kabupaten Pasangkayu | Arah Kebijakan Kabupaten Pasangkayu |
|---|---|
| | Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil. |
| | Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan. |
| | Membuat *road map*/peta investasi, termasuk visibility study (studi kelayakan) yang fokus pada potensi unggulan daerah. |
| | Melakukan pemasaran potensi investasi kepada potensial investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. |
| | Mendesain model insentif pajak maupun non pajak yang akan diberikan kepada calon investor. |
| | Memberikan insentif pajak maupun non pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. |
| | Memberikan pelatihan yang berkualitas bagi angkatan kerja agar mereka mendapatkan keahlian yang berupah tinggi. |
| | Meningkatkan akses masyarakat terhadap aset produktif dan akses pinjaman modal bagi mereka yang memiliki usaha. |
| | Melakukan pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan. |
| | Memperbaiki kualitas data calon penerima manfaat bantuan sosial |
| | Memperkuat sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. |
| | Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial yang relevan dengan kondisi kemiskinan, diluar yang telah diberikan pemerintah pusat. |
| | Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang tepat, dan imunisasi lengkap. |
| | Mendorong edukasi dan perilaku hidup bersih serta sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin oleh orang tua. |
| | Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata untuk mengakses pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. |
| | Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan UMKM sektor pariwisata. |
| | Menyediakan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. |
| | Memberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. |
| | Meningkatkan kualitas hasil kegiatan Kelitbangan yang berorientasi pada inovasi yang fungsional. |

| Misi Kabupaten Pasangkayu | Arah Kebijakan Kabupaten Pasangkayu |
|---|---|
| | Menghasilkan inovasi dari kegiatan Litbang yang fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. |
| | Memfasilitasi pelatihan yang berkualitas bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam memberikan layanan publik. |
| | Mendorong penerapan sistem merit secara komprehensif. |
| | Meningkatkan tingkat kematangan pada aspek domain kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. |
| | Membuat desain rencana pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumberdaya alam lokal. |
| | Membangun infrastruktur energi baru terbarukan |
| | Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk 3R. |
| | Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung 3R, dan menurunkan tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup. |
| | Mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. |
| | Meningkatkan kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga. |
| | Membangun sistem, strategi, dan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. |
| | Mengelola risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Selat Makassar. |

Tabel 3.10
Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| Mendorong konektivitas wilayah, infrastruktur pendukung kawasan industri, dan infrastruktur dasar melalui peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas; Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra perekonomian produktif di desa, dan pemanfaatan transportasi/ perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). | Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, jaringan telekomunikasi, dan akses internet yang berkualitas dan merata. |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sapras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas layanan pendidikan | Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan mendukung kualitas aktivitas belajar-mengajar. |
| | Mengakselerasi peningkatan kualitas belajar mengajar. |

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| dan Kesehatan yang merata; Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat. | Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas. |
| | Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. |
| | Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas di semua fasilitas kesehatan. |
| | Memperkuat upaya preventif dengan mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui sinergi antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. |
| | Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah. |
| Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah melalui penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima; Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan; Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/transportasi laut. | Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan dalam merangka memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah. |
| | Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan, khususnya kopi dan kakao. |
| | Pengembangan *smart fisheries* dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan. |
| | Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi, dan *digital farming* bidang pertanian dan perkebunan. |
| | Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil. |
| | Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan. |
| | Membuat road map/peta investasi, termasuk visibility study (studi kelayakan) yang fokus pada potensi unggulan daerah. |
| | Melakukan pemasaran potensi investasi kepada potensial investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. |
| | Mendesain model insentif pajak maupun non pajak yang akan diberikan kepada calon investor. |
| | Memberikan insentif pajak maupun non pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. |
| | Pengembangan kawasan transmigrasi Sarudu Baras. |
| Memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat melalui penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan di era ekonomi digital serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga; Perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda; | Memberikan pelatihan yang berkualitas bagi angkatan kerja agar mereka mendapatkan keahlian yang berupah tinggi. |
| | Meningkatkan akses masyarakat terhadap aset produktif dan akses pinjaman modal bagi mereka yang memiliki usaha. |
| | Melakukan Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan. |

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan perluasan akses permodalan. | |
| Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP, BPJS-JKN-KIS untuk memperkuat program UHC, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan kerja; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif, pengendalian penduduk perlindungan perempuan dan anak serta penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. | Memperbaiki kualitas data calon penerima manfaat bantuan sosial. |
| | Memperkuat sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. |
| | Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial yang relevan dengan kondisi kemiskinan, diluar yang telah diberikan pemerintah pusat. |
| Mengakselerasi penaganan stunting melalui pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri, dan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil. | Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap. |
| | Mendorong edukasi dan perilaku hidup bersih serta sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin oleh orang tua. |
| Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industry 4.0, dan peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal. | Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata untuk mengakses pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. |
| | Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan UMKM sektor pariwisata. |
| | Menyediakan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. |
| | Memberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. |
| Peningkatan dan penerapan inovasi daerah untuk mengoptimalisasi PAD dan pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif. | Meningkatkan kualitas hasil kegiatan Kelitbangan yang berorientasi pada inovasi yang fungsional. |
| | Menghasilkan inovasi dari kegiatan Litbang yang fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. |
| Meningkatkan kualitas layanan publik yang ditopang oleh digitalisasi pelayanan melalui Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah; Perbaikan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan perizinan dan peluang investasi; Peningkatan kualitas dan | Memfasilitasi pelatihan yang berkualitas bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam memberikan layanan publik. |
| | Mendorong penerapan sistem merit secara komprehensif. |
| | Meningkatkan tingkat kematangan pada aspek domain kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. |

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan publik; Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan; Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan core value ASN; Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP; Mendorong pembangunan infrastruktur digital dan Pusat Data Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi MPP dan SPBE sebagai sarana integrasi layanan public pemerintah daerah. | |
| Menurunkan emisi gas gumah kaca melalui pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau; Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan, penyediaan sanitasi dan air bersih serta ekonomi biru. | Membuat desain rencana pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumberdaya alam lokal. |
| | Membangun infrastruktur energi baru terbarukan. |
| | Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk 3R. |
| | Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung 3R, dan menurunkan tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup. |
| | Mengelola risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Selat Makassar. |
| Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan menerapkan GEDSI melalui pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal; Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas; Pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga | Mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. |
| | Meningkatkan kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga. |
| Mewujudkan harmonisasi sosial sebagai upaya mendorong ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial; Peningkatan pembangunan mental spriritual, bantuan pembangunan rumah ibadah, rumah tahfidz, moderasi beragama dan penguatan gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alquran (CMCA); Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan politik dan wawasan kebangsaan serta serta pembangunan sarana prasarana keolahragaan; Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, untuk menciptakan ketenteraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana. | Membangun sistem, strategi, dan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. |

Tabel 3.11
Penyelarasan Arah Pengembangan Wilayah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu

| Arah Pengembangan Wilayah untuk Kab. Pasangkayu (RPJMD Provinsi Sulawesi Barat) | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1. Pengembangan komoditas sawit dan pengolahan sawit.<br>2. Pengembangan komoditas perikanan, terutama udang vaname.<br>3. Pengembangan wilayah transmigrasi. | Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah melalui penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima; Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan; Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/transportasi laut. | 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan dalam merangka memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah .<br>2. Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan.<br>3. Membuat road map/peta investasi, termasuk *visibility study* (studi kelayakan) yang fokus pada potensi unggulan daerah.<br>4. Melakukan pemasaran potensi investasi kepada potensial investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing.<br>5. Mendesain model insentif pajak maupun non pajak yang akan diberikan kepada calon investor.<br>6. Memberikan insentif pajak maupun non pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. |
| 1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi.<br>2. Pengembangan pusat-pusat perdagangan.<br>3. Pengembangan UMKM. | Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industry 4.0; Peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal. | 1. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata untuk mengakses pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.<br>2. Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan UMKM sektor pariwisata.<br>3. Menyediakan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk |

| Arah Pengembangan Wilayah untuk Kab. Pasangkayu (RPJMD Provinsi Sulawesi Barat) | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.<br>4. Memberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. |
| Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sapras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan yang merata; Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat. | 1. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan mendukung kualitas aktivitas belajar-mengajar.<br>2. Mengakselerasi peningkatan kualitas belajar mengajar<br>3. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas.<br>4. Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.<br>5. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas di semua fasilitas kesehatan.<br>6. Memperkuat upaya preventif dengan mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui sinergi antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat.<br>7. Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah. |
| | Mengakselerasi penaganan stunting melalui pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari | 1. Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 |

| Arah Pengembangan Wilayah untuk Kab. Pasangkayu (RPJMD Provinsi Sulawesi Barat) | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri, dan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil. | bulan, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap.<br>2. Mendorong edukasi dan perilaku hidup bersih serta sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin oleh orang tua. |

### 3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis Daerah dimaksud merupakan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030. Mengingat bahwa program prioritas Bupati/Wakil Bupati Terpilih tidak menggunakan nomenklatur sebagaimana telah diatur di dalam Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur.

Tabel 3.12
Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visi: "Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman"** | | | | | |
| **Misi 1: Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas** | Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah | | | Indeks Infrastruktur | |
| | | Sasaran 1.1: Meningkatnya konektivitas wilayah | | Indeks konektivitas | |
| | | | Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Program penyelenggaraan jalan |
| | | | Meningkatnya Aksesiblitas dan Layanan Angkutan Perairan | 1. Indeks Konektivitas Laut (%)<br>2. Persentase Ketersediaan Fasiitas Pelabuhan (%) | Program pengelolaan pelayaran |
| | | Sasaran 1.2: Terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan industri | | Persentase terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk kawasan industri | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase) | Program perencanaan dan pembangunan industri |
| | Tujuan 2: Meningkatkan | | | Indeks Pembangunan Manusia | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia** | pembangunan manusia | | | | |
| | | Sasaran 2.1: Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan | | Indeks Pendidikan | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | 1. APS usia 7 – 12 tahun<br>2. APS usia 13 – 15 tahun<br>3. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi | Program pengelolaan pendidikan |
| | | | Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik | 1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV<br>2. Rasio Jumlah Guru per Murid SD<br>3. Rasio Jumlah Guru per Murid SMP | Program pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Cakupan pembinaan atlet muda | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan |
| | | Sasaran 2.2: Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan | | Indeks Kesehatan | |
| | | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | 1. Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (Per 1.000 Kelahiran) | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))<br>4. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)<br>5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan<br>6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional<br>7. Usia Harapan Hidup<br>8. Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1. Angka Kesakitan (Morbiditas) (Per 1000 Penduduk)<br>2. Angka kesakitan (morbiditas) penyakit DBD (per 100.000 penduduk)<br>3. Angka kesakitan (morbiditas) penyakit diare (Per 1000 Penduduk)<br>4. Persentase kecamatan dengan ketersediaan obat esensial | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan |
| | | | Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan | 1. Rasio dokter per satuan penduduk<br>2. Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | |
| **Misi 3: Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan merata** | Tujuan 3: Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi | | | Pertumbuhan ekonomi | |
| | | Sasaran 3.1. Membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | | Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian | Cakupan petani yang mendapatkan penyuluhan | Program penyuluhan pertanian |
| | | | Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian | Persentase petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian |
| | | | Meningkatnya Cakupan Bantuan Prasarana Pertanian | Persentase petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Program pengelolaan perikanan tangkap |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Program pengelolaan perikanan budidaya |
| | | Sasaran 3.2.: Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan | | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Investasi | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan | Program pelayanan penanaman modal |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Persentase jumlah kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terinplementasikan (Persentase) | Program pengembangan iklim penanaman modal |
| | | | Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi | Program promosi penanaman modal |
| | | Sasaran 3.3: Meningkatnya lapangan kerja | | Tingkat Pengangguran | |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | 1. Rasio penduduk yang bekerja<br>2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi<br>3. Produktivitas Tenaga Kerja | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja |
| | | Sasaran 3.4: Membaiknya pemerataan pendapatan | | Indeks Gini | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang Tangguh dan Mandiri | 1. Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan<br>2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) |
| | | | Meningkatnya Daya Saing UMKM | 1. Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM | Program pengembangan UMKM |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Ekspor | |
| **Misi 4: Mewujudkan transformasi sosial** | Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | | | PDRB Per Kapita | |
| | | Sasaran 4.1: Membaiknya taraf hidup masyarakat miskin | | Persentase Penduduk Miskin | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial<br>2. Persentase PMKS yang Memperoleh Jaminan Kesehatan | Program perlindungan dan jaminan sosial |
| | | | Meningkatnya Kualitas Rumah Penduduk | Rasio Rumah Layak Huni | Program pengembangan perumahan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Program kawasan permukiman |
| | | | Menurunnya Kawasan Pemukiman Kumuh | Persentase Areal Kawasan Permukiman Kumuh | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh |
| | | | Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial | Program rehabilitasi sosial |
| | | Sasaran 4.2: Membaiknya penanganan stunting | | Angka Prevalensi Stunting | |
| | | | Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | 1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman<br>2. Persentase Rumah Tangga yang | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak | |
| | | | Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | 1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman<br>2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah |
| **Misi 5: Mewujudkan transformasi digital** | Tujuan 5: Meningkatkan pembangunan digital | | | Indeks Masyarakat Digital | |
| | | Sasaran 5.1: Berkembangnya literasi digital | | Indeks Literasi Digital | |
| | | | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Publik yang Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Secara Online | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik |
| | | Sasaran 5.2: Meningkatnya penerapan digilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Persentase Layanan Publik yang Dilaksanakan secara Online<br>2. Indeks Domain Kebijakan SPBE<br>3. Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Program pengelolaan aplikasi informatika |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Indeks Domain Manajemen SPBE<br>5. Indeks Domain Layanan SPBE | |
| **Misi 6: Memperkuat tata kelola pemerintahan** | Tujuan 6: Mendorong reformasi birokrasi | | | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | |
| | | Sasaran 6.1: Membaiknya kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | |
| | | | Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Program pengembangan sumber daya manusia |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian | Indeks sistem merit | Program kepegawaian daerah |
| | | | Menurunnya Kejadian Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran maupun Proses dan Kewenangan | Persentase Tindak Lanjut Temuan | Program penyelenggaraan pengawasan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Korban Bencana Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran |
| | | Sasaran 6.2: Meningkatnya inovasi daerah | | Indeks Inovasi Daerah | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil | Persentase implementasi rencana Kelitbangan | Program penelitian dan pengembangan daerah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan | Program riset dan inovasi daerah |
| | | | Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Program pengelolaan pendapatan daerah |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | 1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap<br>2. Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan<br>3. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD | Program pengelolaan barang milik daerah |
| **Misi 7: Menjaga kelestarian lingkungan hidup** | Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | |
| | | Sasaran 7.1: Menurunnya emisi gas rumah kaca | | Persentase Penurunan Emisi GRK | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | 1. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R<br>2. Persentase volume/timbulan | Program pengelolaan persampahan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sampah yang ditangani (Persen) | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>2. Indeks Kualitas Udara<br>3. Indeks Kualitas Air | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
| | | | Menurunnya Risiko Bencana | 1. Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana<br>2. Indeks risiko bencana | Program penanggulangan bencana |
| | | | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1. Ketaatan terhadap RTRW<br>2. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Persen) | Program penyelenggaraan penataan ruang |
| **Misi 8: Memperkuat mental spritual** | Tujuan 8: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | |
| | | Sasaran 8.1: Membaiknya kondisi keluarga | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) |
| | | | Meningkatnya Kualitas Keluarga | 1. Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga<br>2. Indeks kualitas keluarga | Program peningkatan kualitas keluarga |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | 1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan<br>2. Indeks Pemberdayaan Gender | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Program perlindungan perempuan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Program perlindungan khusus anak |
| | | Sasaran 8.2: Membaiknya kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat | | Angka Kriminalitas | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | | | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Persen) | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |

Tabel 3.13
Penyesuaian Nomenklatur Program Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

| Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu | Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 90/2019 Beserta Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024 |
|---|---|
| 1. Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.<br>2. Pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri.<br>3. Perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan Sarpras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru.<br>4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata.<br>5. Penyediaan makanan bergizi bagi anaka sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil. | 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.<br>2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.<br>3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.<br>4. Program pengelolaan pendidikan.<br>5. Program pendidik dan tenaga kependidikan. |
| Peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas;<br>Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/transportasi laut. | 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.<br>2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.<br>3. Program penyelenggaraan jalan.<br>4. Program pengelolaan pelayaran.<br>5. Program penyelenggaraan penataan ruang.<br>6. Program pengembangan perumahan.<br>7. Program kawasan permukiman.<br>8. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh. |
| 1. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial.<br>2. Peningkatan pembangunan mental spriritual, bantuan pembangunan rumah ibadah, rumah tahfidz, moderasi beragama dan penguatan gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alquran (CMCA).<br>3. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, untuk menciptakan ketentraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana. | 1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.<br>2. Program penanggulangan bencana.<br>3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.<br>4. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (diarahkan untuk pemberian bantuan keagamaan). |
| 1. Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi | 1. Program pengembangan iklim penanaman modal.<br>2. Program promosi penanaman modal.<br>3. Program pelayanan penanaman modal. |

| Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu | Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 90/2019 Beserta Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024 |
|---|---|
| atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah.<br>2. Perbaikan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan perizinan dan peluang investasi. | |
| 1. Penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan di era ekonomi digital serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga.<br>2. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan politik dan wawasan kebangsaan serta serta pembanguan sarana prasarana keolahragaan. | 1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. |
| 1. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima.<br>2. Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan. | 1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.<br>2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.<br>3. Program penyuluhan pertanian.<br>4. Program pengelolaan perikanan tangkap.<br>5. Program pengelolaan perikanan budidaya.<br>6. Program perencanaan dan pembangunan industri. |
| 1. Penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda.<br>2. Peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD dan pengembangan usaha-usaha ekonomin produktif. | 1. Program pengelolaan pendapatan daerah.<br>2. Program pengelolaan barang milik daerah.<br>3. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. |
| 1. Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau.<br>2. Peningkatan kualitas pembagunan lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan, penyediaan sanitasi dan air bersih serta ekonomi biru. | 1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<br>2. Program pengelolaan persampahan.<br>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (dairahakn untuk pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan). |
| 1. Pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal.<br>2. Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas. | 1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.<br>2. Program perlindungan perempuan.<br>3. Program peningkatan kualitas keluarga.<br>4. Program perlindungan khusus anak.<br>5. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). |
| Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan. | Program penyelenggaraan pengawasan. |
| 1. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk | 1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).<br>2. Program pengembangan UMKM. |

| Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu | Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 90/2019 Beserta Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024 |
|---|---|
| menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).<br>2. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal. | |
| 1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP, BPJS-JKN-KIS untuk memperkuat program UHC, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.<br>2. Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan kerja.<br>3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif, pengendalian penduduk perlindungan perempuan dan anak serta penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. | 1. Program perlindungan dan jaminan sosial.<br>2. Program penempatan tenaga kerja.<br>3. Program rehabilitasi sosial. |
| Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra perekonomian produktif di desa serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga. | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). |
| 1. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan *core value* ASN.<br>2. Perbaikan tatakelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP.<br>3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan publik.<br>4. Mendorong pembangunan infrastruktur digital dan Pusat Data Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi MPP dan SPBE sebagai sarana integrasi layanan publik pemerintah daerah.<br>5. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0. | 1. Program pengelolaan aplikasi informatika.<br>2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.<br>3. Program kepegawaian daerah.<br>4. Program pengembangan sumber daya manusia.<br>5. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.<br>6. Program penelitian dan pengembangan daerah. |

Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program, selanjutnya seluruh program tersebut dipetakan berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini penting dilakukan untuk memastikan terjadinya konsistensi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya, seluruh program

tersebut ditetapkan indikator kinerjanya dan target kinerjanya untuk 2029 berdasarkan data baseline 2024.

Tabel 3.14
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Indikator dan Target Kinerja Tahun 2029

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (Persen) | 93,52 | 98,1 |
| | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman | 68,25 | 70,01 |
| | Program penyelenggaraan jalan | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen) | 67,62 | 75,60 |
| | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | 68,45 | 69,45 |
| | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | 15,4 | 16,4 |
| | Program pengelolaan pelayaran | Indeks Konektivitas Laut | 15 | 24 |
| | | Persentase Ketersediaan Fasiitas Pelabuhan | 0 | 43 |
| 1. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan mendukung kualitas aktivitas belajar-mengajar<br>2. Mengakselerasi peningkatan kualitas belajar mengajar<br>3. Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dan serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga | Program pengelolaan pendidikan | APS usia 7 – 12 tahun | 99,63% | 100,00% |
| | | APS usia 13 – 15 tahun | 88,20% | 92,31% |
| | | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi | 10,35% | 14,33% |
| | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Cakupan pembinaan atlet muda | 10 | 56 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas | Program pendidik dan tenaga kependidikan | Rasio Jumlah Guru per Murid SD (Persen) | 12,7 | 16,3 |
| | | Rasio Jumlah Guru per Murid SMP (Persen) | 13,3 | 16,9 |
| | | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (Persen) | 81 | 96 |
| 1. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas di semua fasilitas kesehatan<br>2. Memperkuat upaya preventif dengan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui sinergi antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat.<br>3. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga untuk menurunkan stunting dengan fokus pada pada pendidikan pranikah (catin), kesehatan reproduksi, dan pemahaman gizi, serta dukungan keluarga dan masyarakat<br>4. Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kurang Energi | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | 18 | 11 |
| | | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | 19,8 | 16,8 |
| | | Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup | 15,3 | 8,3 |
| | | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (Persen) | 100 | 100 |
| | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 70,41 | 71,96 |
| | | Angka Kematian Ibu | 161,29 | 90,49 |
| | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | 74,14 | 93,57 |
| | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit DBD (per 100.000 penduduk) | 133,6 | 80 |
| | | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit diare (Per 1000 Penduduk) | 270 | 158 |
| | | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit malaria (Per 1000 Penduduk) | 0,4 | 0 |
| | | Persentase kecamatan dengan ketersediaan obat esensial (%) | 80 | 93 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Kronis (KEK), dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap | | | | |
| Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Rasio dokter per satuan penduduk | 0,33 | 0,65 |
| | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 3,43 | 5,64 |
| | | Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) | 25 | 45 |
| Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan dalam merangka memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian | 25 | 40 |
| | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian | 25 | 40 |
| | Program pengelolaan perikanan tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 8623,4 | 9002,7 |
| | Program pengelolaan perikanan budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 16527,36 | 17763,72 |
| | Program perencanaan dan pembangunan industri | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase) | 25,73 | 30,16 |
| Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan | Program penyuluhan pertanian | Cakupan petani yang mendapatkan penyuluhan | 25 | 40 |
| Mempermudah dan mempercepat pengurusan izin investasi | Program pelayanan penanaman modal | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan | 73 | 93,17 |
| 1. Membuat road map/peta investasi, termasuk visibility study (studi kelayakan) yang fokus pada potensi unggulan daerah<br>2. Mendesain model insentif pajak maupun non pajak yang akan diberikan kepada calon investor<br>3. Memberikan insentif pajak | Program pengembangan iklim penanaman modal | Persentase jumlah kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terinplementasikan (Persentase) | 100 | 100 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| maupun non pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten<br>4. Memberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif | | | | |
| Melakukan pemasaran potensi investasi kepada potensial investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing | Program promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi | 15,38 | 19,63 |
| Memberikan pelatihan yang berkualitas bagi angkatan kerja agar mereka mendapatkan keahlian yang berupah tinggi | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | Produktivitas Tenaga Kerja | 95 | 95 |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 17,9 | 29,8 |
| | | Rasio penduduk yang bekerja | 99 | 98,5 |
| 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap aset produktif dan akses pinjaman modal bagi mereka yang memiliki usaha<br>2. Melakukan Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.<br>3. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata untuk mengakses | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan (%) | 75 | 85 |
| | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) | 75 | 85 |
| | Program pengembangan UMKM | Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM (%) | 10 | 25 |
| | | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Ekspor | 10 | 25 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank<br>4. Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan produk UMKM sektor pariwisata | | | | |
| 1. Memperbaiki kualitas data calon penerima manfaat bantuan sosial.<br>2. Memperkuat sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. | Program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | 94,60 | 100 |
| | | Persentase PMKS yang Memperoleh Jaminan Kesehatan | 93 | 100 |
| | Program pengembangan perumahan | Rasio Rumah Layak Huni(Persen) | 73,07 | 79,12 |
| | Program kawasan permukiman | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 86,19% | 88,18% |
| | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Persentase Areal Kawasan Permukiman Kumuh | 4,49 | 2,38 |
| Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial yang relevan dengan kondisi kemiskinan, diluar yang telah diberikan pemerintah pusat | Program rehabilitasi sosial | Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial | 86 | 96 |
| 1. Menyediakan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif<br>2. Meningkatkan tingkat kematangan pada aspek domain kebijakan internal, tata | Program pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Layanan Publik yang Dilaksanakan secara Online | 85 | 100 |
| | | Indeks Domain Kebijakan SPBE | 2,52 | 2,7 |
| | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | 1,2 | 2,75 |
| | | Indeks Domain Manajemen SPBE | 1 | 3,55 |
| | | Indeks Domain Layanan SPBE | 3,69 | 4,25 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| kelola, manajemen, dan layanan SPBE | | | | |
| | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Persentase Dokumen Publik yang Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Secara Online | 75 | 100 |
| Meningkatkan kualitas hasil kegiatan Kelitbangan yang berorientasi pada inovasi yang fungsional | Program penelitian dan pengembangan daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%) | 15,4 | 15,65 |
| Menghasilkan inovasi dari kegiatan Litbang yang fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah | Program riset dan inovasi daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%) | 15,4 | 15,65 |
| | Program pengelolaan pendapatan daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 6,52 | 10,76 |
| | Program pengelolaan barang milik daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 5,3 | 7,9 |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 |
| | | Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD | 6,32 | 8,66 |
| Memfasilitasi pelatihan yang berkualitas bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam memberikan layanan publik | Program pengembangan sumber daya manusia | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%) | 0,92 | 2,02 |
| Mendorong penerapan sistem merit secara komprehensif | Program kepegawaian daerah | Indeks System Merit (Indeks) | 145,5 | 250 |
| | Program penyelenggaraan pengawasan | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 100 | 100 |
| 1. Membuat desain rencana pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumberdaya alam lokal<br>2. Membangun infrastruktur energi baru terbarukan | Program pengelolaan sumber Daya air (SDA) | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (Persen) | 42,56 | 47,71 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk 3R<br>2. Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung 3R, menurunkan tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana | Program pengelolaan persampahan | Persentase volume/timbulan sampah yang ditangani (Persen) | 22,80 | 49,33 |
| | | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | 2,41 | 12,57 |
| | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 67,79 | 73,1 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 93,71 | 94,11 |
| | | Indeks Kualitas Air | 63,6 | 73,73 |
| | Program penanggulangan bencana | Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman | 100 | 100 |
| | | Indeks risiko bencana | 176,8 | 155,35 |
| | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 91,13 | 75 |
| | Program penyelenggaraan penataan ruang | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Persen) | 8,38 | 31,47 |
| | | Ketaatan terhadap RTRW | 78 | 100 |
| Mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) | 50,75 | 68 |
| Meningkatkan kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga | Program peningkatan kualitas keluarga | Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga (%) | 3,64 | 3,77 |
| | | Indeks kualitas keluarga | 0,50 | 0,55 |
| | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 80 | 85 |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender | 60,86 | 72,96 |
| | Program perlindungan perempuan | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 | 93 |
| | Program perlindungan khusus anak | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas | 85 | 95 |

| Arah Kebijakan | Program Prioritas Pembangunan Daerah | Indikator | Baseline 2024 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|
| | | Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | | |
| Membangun sistem, strategi, dan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 94,44 | 100 |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Persen) | 94 | 100 |
| | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | 0 | 324 |

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta mencakup program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu. Dengan demikian, terdapat dua komponen program perangkat daerah, yaitu: (1) Program prioritas (strategik), yang mencakup program-program yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program pembangunan daerah atau program yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah, dan (2) Program yang terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Adapun daftar program perangkat daerah, indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, dan penanggung jawab masing-masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2029

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 269.262.369.160 | | 294.230.582.733 | | 323.478.808.213 | | 358.021.897.562 | | 396.168.764.180 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 172.798.702.066 | | 191.960.538.335 | | 212.191.673.504 | | 234.549.430.322 | | 259.256.821.767 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 172.798.702.066 | 63 | 191.960.538.335 | 68 | 212.191.673.504 | 71 | 234.549.430.322 | 75 | 259.256.821.767 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 94.863.827.094 | | 100.462.196.398 | | 109.269.278.709 | | 121.240.247.120 | | 134.382.791.159 | |
| Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | APS Usia 13-15 Tahun (%) | 99,63 | 99,79 | 99,99 | 94.863.827.094 | 100 | 100.462.196.398 | 100 | 109.269.278.709 | 100 | 121.240.247.120 | 100 | 134.382.791.159 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | APS Usia 7-12 Tahun (%) | 99,63 | 99,79 | 99,99 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berpendidikan Tinggi (%) | 10,35 | 10,49 | 12,09 | | 12,48 | | 13,33 | | 14,33 | | 14,33 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 1.397.840.000 | | 1.583.448.000 | | 1.771.856.000 | | 1.964.420.120 | | 2.239.351.254 | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Angka Literasi SD (%) | 50,37 | 52,87 | 55,37 | 1.397.840.000 | 57,87 | 1.583.448.000 | 60,37 | 1.771.856.000 | 62,87 | 1.964.420.120 | 65,37 | 2.239.351.254 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Angka Literasi SMP (%) | 61,79 | 62,89 | 63,99 | | 65,09 | | 66,19 | | 67,29 | | 68,39 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Angka Numerasi SD (%) | 46,22 | 49,12 | 52,02 | | 54,92 | | 57,82 | | 60,72 | | 63,62 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Angka Numerasi SMP (%) | 56,88 | 58,38 | 59,88 | | 61,38 | | 62,88 | | 64,38 | | 65,88 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 202.000.000 | | 224.400.000 | | 246.000.000 | | 267.800.000 | | 289.800.000 | |
| Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) | 27 | 33,65 | 34,65 | 202.000.000 | 35,65 | 224.400.000 | 36,65 | 246.000.000 | 37,65 | 267.800.000 | 38,65 | 289.800.000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Rasio Jumlah Guru per Murid SD (%) | 12,7 | 12,9 | 13,4 | | 14,1 | | 15,1 | | 16,3 | | 16,3 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| | Rasio Jumlah Guru per Murid SMP (%) | 13,3 | 13,4 | 13,8 | | 14,8 | | 16,2 | | 16,9 | | 16,9 | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 264.589.903.929 | | 349.228.774.294 | | 407.022.658.643 | | 476.987.446.794 | | 479.392.343.837 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 62.066.464.771 | | 107.477.648.224 | | 123.183.666.913 | | 142.087.780.182 | | 142.866.950.688 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 62.066.464.771 | 63 | 107.477.648.224 | 68 | 123.183.666.913 | 71 | 142.087.780.182 | 75 | 142.866.950.688 | DINAS KESEHATAN |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 198.061.695.054 | | 236.124.722.324 | | 277.146.460.742 | | 326.983.953.637 | | 328.571.254.383 | |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup) | 14 | 12 | 10 | 198.061.695.054 | 10 | 236.124.722.324 | 8 | 277.146.460.742 | 7 | 326.983.953.637 | 7 | 328.571.254.383 | DINAS KESEHATAN |
| | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (Per 1.000 Kelahiran) | 8 | 7 | 6 | | 6 | | 5 | | 6 | | 5 | | DINAS KESEHATAN |
| | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 161,29 | 158,05 | 133,75 | | 123,49 | | 103,87 | | 90,49 | | 90,49 | | DINAS KESEHATAN |
| | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang) | 14 | 12 | 10 | | 10 | | 8 | | 7 | | 7 | | DINAS KESEHATAN |
| | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 74,14 | 79,85 | 82,12 | | 86,33 | | 59,32 | | 93,57 | | 95 | | DINAS KESEHATAN |
| | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 70,41 | 70,79 | 71,19 | | 71,55 | | 71,92 | | 72,3 | | 72,68 | | DINAS KESEHATAN |
| | Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan (Persentase) | 84 | 80 | 80,5 | | 81 | | 81,5 | | 82 | | 83. | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 3.278.768.474 | | 4.136.677.834 | | 4.896.096.800 | | 5.749.476.238 | | 5.777.386.317 | |
| Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan | Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk) | 0,33 | 0,53 | 0,58 | 3.278.768.474 | 0,62 | 4.136.677.834 | 0,65 | 4.896.096.800 | 0,65 | 5.749.476.238 | 0,65 | 5.777.386.317 | DINAS KESEHATAN |
| | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk) | 4,07 | 3,89 | 4,71 | | 4,32 | | 5,24 | | 4,89 | | 4,89 | | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) | 25 | 25 | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | 45 | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 695.828.390 | | 899.361.336 | | 1.084.523.964 | | 1.307.777.189 | | 1.314.125.622 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase kecamatan dengan ketersediaan obat esensial (%) | 80 | 92,5 | 93 | 695.828.390 | 93 | 899.361.336 | 93 | 1.084.523.964 | 93 | 1.307.777.189 | 93 | 1.314.125.622 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 487.147.240 | | 590.364.576 | | 711.910.224 | | 858.459.548 | | 862.626.827 | |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Angka Kesakitan (Morbiditas) (Per 1000 Penduduk) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 487.147.240 | 0,1 | 590.364.576 | 0 | 711.910.224 | 0 | 858.459.548 | 0 | 862.626.827 | DINAS KESEHATAN |
| | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit DBD (per 100.000 penduduk) | 133,6 | 119 | 107 | | 97 | | 88 | | 80 | | 77 | | DINAS KESEHATAN |
| | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit diare (Per 1000 Penduduk) | 270 | 240 | 216 | | 194 | | 175 | | 158 | | 142 | | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase kecamatan dengan ketersediaan obat esensial (%) | 80 | 92,5 | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 243.888.893.015 | | 259.304.042.065 | | 278.581.084.470 | | 306.268.541.693 | | 307.237.782.187 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 15.965.993.140 | | 17.795.468.760 | | 20.248.127.775 | | 23.236.633.140 | | 23.349.432.330 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 15.965.993.140 | 63 | 17.795.468.760 | 68 | 20.248.127.775 | 71 | 23.236.633.140 | 75 | 23.349.432.330 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 22.386.816.979 | | 22.608.468.632 | | 22.719.294.459 | | 22.830.120.285 | | 22.940.946.112 | |
| Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%) | 42,56 | 42,17 | 43,55 | 22.386.816.979 | 44,94 | 22.608.468.632 | 46,32 | 22.719.294.459 | 47,71 | 22.830.120.285 | 49,1 | 22.940.946.112 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 9.171.696.880 | | 13.638.758.640 | | 20.302.172.950 | | 30.344.311.910 | | 30.491.614.395 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | 93,52 | 95,6 | 95,83 | 9.171.696.880 | 96,5 | 13.638.758.640 | 97,5 | 20.302.172.950 | 98,1 | 30.344.311.910 | 98,1 | 30.491.614.395 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (%) | 93,52 | 95,6 | 96 | | 96,5 | | 97,5 | | 98,1 | | 98,1 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 8.621.752.385 | | 9.993.789.405 | | 13.135.374.103 | | 18.298.721.147 | | 18.387.549.891 | |
| Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 8.621.752.385 | 16 | 9.993.789.405 | 16,2 | 13.135.374.103 | 16,4 | 18.298.721.147 | 16,4 | 18.387.549.891 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%) | 68,46 | 68,85 | 68,85 | | 69,05 | | 69,25 | | 69,45 | | 69,65 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 7.609.071.259 | | 9.496.690.318 | | 11.052.141.265 | | 13.605.364.979 | | 13.671.410.440 | |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Drainase | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%) | 52,4 | 52,5 | 52,5 | 7.609.071.259 | 52,6 | 9.496.690.318 | 52,8 | 11.052.141.265 | 52,9 | 13.605.364.979 | 52,9 | 13.671.410.440 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 86.812.025 | | 132.347.550 | | 132.996.312 | | 133.645.075 | | 134.293.837 | |
| Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung | Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan (%) | 5,95 | 7,27 | 9,22 | 86.812.025 | 9,22 | 132.347.550 | 16,28 | 132.996.312 | 21,88 | 133.645.075 | 21,88 | 134.293.837 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 22.373.520.000 | | 22.595.040.000 | | 22.705.800.000 | | 22.816.560.000 | | 22.927.320.000 | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 22.373.520.000 | 100 | 22.595.040.000 | 100 | 22.705.800.000 | 100 | 22.816.560.000 | 100 | 22.927.320.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 152.891.679.257 | | 158.723.903.200 | | 164.596.681.025 | | 171.290.142.020 | | 171.604.147.564 | |
| Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) | 67,62 | 70,82 | 72,28 | 152.891.679.257 | 72,28 | 158.723.903.200 | 74,94 | 164.596.681.025 | 75,6 | 171.290.142.020 | 75,6 | 171.604.147.564 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 1.245.370.400 | | 1.257.700.800 | | 1.263.866.000 | | 1.270.031.200 | | 1.276.196.400 | |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | 0 | 0 | 80 | 1.245.370.400 | 82 | 1.257.700.800 | 84 | 1.263.866.000 | 86 | 1.270.031.200 | 88 | 1.276.196.400 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 3.536.180.690 | | 3.061.874.760 | | 2.424.630.581 | | 2.443.011.937 | | 2.454.871.218 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang | Ketataan terhadap RTRW (%) | 78 | 80 | 85 | 3.536.180.690 | 90 | 3.061.874.760 | 95 | 2.424.630.581 | 100 | 2.443.011.937 | 100 | 2.454.871.218 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) | 8.38 | 9.11 | 11.92 | | 11.92 | | 23.31 | | 31.47 | | 31.47 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 4.400.441.666 | | 15.984.578.056 | | 16.505.392.282 | | 17.464.246.057 | | 17.549.023.951 | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.901.050.711 | | 3.579.424.756 | | 3.781.247.282 | | 3.994.930.907 | | 4.014.323.776 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 78,45 | 78,5 | 78,95 | 2.901.050.711 | 80 | 3.579.424.756 | 80,25 | 3.781.247.282 | 80,3 | 3.994.930.907 | 80,5 | 4.014.323.776 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 291.430.955 | | 5.603.793.300 | | 6.205.452.500 | | 6.865.398.050 | | 6.898.725.225 | |
| Meningkatnya Kualitas Rumah Penduduk | Rasio Rumah Layak Huni (%) | 73,07 | 73,7 | 75,39 | 291.430.955 | 75,39 | 5.603.793.300 | 78,15 | 6.205.452.500 | 79,12 | 6.865.398.050 | 79,12 | 6.898.725.225 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 656.500.000 | | 3.955.560.000 | | 3.605.950.000 | | 3.623.540.000 | | 3.641.130.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) | 86,19 | 86,71 | 87,04 | 656.500.000 | 87,41 | 3.955.560.000 | 87,8 | 3.605.950.000 | 88,18 | 3.623.540.000 | 88,5 | 3.641.130.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 252.500.000 | | 1.343.340.000 | | 1.351.667.500 | | 1.360.187.100 | | 1.366.789.950 | |
| Menurunnya Kawasan Pemukiman Kumuh | Persentase Areal Kawasan Permukiman Kumuh (%) | 4,49 | 4,49 | 3,86 | 252.500.000 | 3,19 | 1.343.340.000 | 2,84 | 1.351.667.500 | 2,38 | 1.360.187.100 | 2,03 | 1.366.789.950 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 298.960.000 | | 1.502.460.000 | | 1.561.075.000 | | 1.620.190.000 | | 1.628.055.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Publik | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU (%) | 68,97 | 68,98 | 69,2 | 298.960.000 | 69,25 | 1.502.460.000 | 69,5 | 1.561.075.000 | 70 | 1.620.190.000 | 71 | 1.628.055.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 21.839.294.816 | | 27.283.790.888 | | 25.037.071.716 | | 25.063.663.778 | | 26.016.222.180 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 17.405.060.517 | | 21.449.646.594 | | 19.838.270.406 | | 19.801.545.821 | | 20.328.685.844 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 90 | 90 | 17.405.060.517 | 92 | 21.449.646.594 | 92 | 19.838.270.406 | 95 | 19.801.545.821 | 95 | 20.328.685.844 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 296.904.650 | | 914.218.860 | | 840.500.000 | | 844.600.000 | | 791.775.000 | |
| Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | 94,44 | 100 | 100 | 178.475.080 | 100 | 618.418.860 | 100 | 543.250.000 | 100 | 545.900.000 | 100 | 491.625.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 94 | 96 | 98 | 118.429.570 | 100 | 295.800.000 | 100 | 297.250.000 | 100 | 298.700.000 | 100 | 300.150.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 2.712.860.000 | | 3.355.800.000 | | 2.822.850.000 | | 2.814.990.000 | | 3.112.245.000 | |
| Menurunnya Risiko Bencana | | | | | 2.712.860.000 | | 3.355.800.000 | | 2.822.850.000 | | 2.814.990.000 | | 3.112.245.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | 176,8 | 173,26 | 170,49 | | 166,59 | | 161,47 | | 155,35 | | 150 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | 1.424.469.649 | | 1.564.125.434 | | 1.535.451.310 | | 1.602.527.957 | | 1.783.516.336 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Korban Bencana Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 91,13 | 75 | 75 | 1.424.469.649 | 75 | 1.564.125.434 | 75 | 1.535.451.310 | 75 | 1.602.527.957 | 75 | 1.783.516.336 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 5.088.202.240 | | 6.653.892.480 | | 8.189.159.600 | | 7.563.248.800 | | 7.023.510.000 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.267.676.240 | | 3.463.740.480 | | 4.568.244.600 | | 3.875.230.800 | | 3.849.579.000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 2.267.676.240 | 63 | 3.463.740.480 | 68 | 4.568.244.600 | 71 | 3.875.230.800 | 75 | 3.849.579.000 | DINAS SOSIAL |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 327.240.000 | | 636.480.000 | | 1.009.625.000 | | 963.050.000 | | 465.750.000 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang Tertangani (%) | 94,6 | 97 | 97 | 327.240.000 | 98 | 636.480.000 | 98 | 1.009.625.000 | 99 | 963.050.000 | 99 | 465.750.000 | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 367.640.000 | | 406.980.000 | | 445.875.000 | | 535.600.000 | | 486.450.000 | |
| Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%) | 86 | 87 | 90 | 367.640.000 | 93 | 406.980.000 | 93 | 445.875.000 | 96 | 535.600.000 | 97 | 486.450.000 | DINAS SOSIAL |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 2.027.676.000 | | 2.047.752.000 | | 2.064.965.000 | | 2.085.338.000 | | 2.116.161.000 | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%) | 94,6 | 96 | 96 | 2.027.676.000 | 97 | 2.047.752.000 | 98 | 2.064.965.000 | 98 | 2.085.338.000 | 98 | 2.116.161.000 | DINAS SOSIAL |
| | Persentase PMKS yang Memperoleh Jaminan Kesehatan (%) | 96 | 98 | 98 | | 99 | | 99 | | 100 | | 100 | | DINAS SOSIAL |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 97.970.000 | | 98.940.000 | | 100.450.000 | | 104.030.000 | | 105.570.000 | |
| Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Pasca Bencana (%) | 96,4 | 97 | 97 | 97.970.000 | 98 | 98.940.000 | 98 | 100.450.000 | 100 | 104.030.000 | 100 | 105.570.000 | DINAS SOSIAL |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 3.531.970.000 | | 4.887.840.000 | | 4.307.050.000 | | 5.255.060.000 | | 4.136.895.000 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.632.161.000 | | 3.632.322.000 | | 2.932.627.500 | | 3.770.933.000 | | 2.645.563.500 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 2.632.161.000 | 63 | 3.632.322.000 | 68 | 2.932.627.500 | 71 | 3.770.933.000 | 75 | 2.645.563.500 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 50.500.000 | | 51.000.000 | | 51.250.000 | | 51.500.000 | | 51.750.000 | |
| Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Kegiatan yang Mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (Persentase) | 0 | 0 | 0 | 50.500.000 | 55 | 51.000.000 | 60 | 51.250.000 | 65 | 51.500.000 | 70 | 51.750.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 252.500.000 | | 479.400.000 | | 512.500.000 | | 515.000.000 | | 517.500.000 | |
| Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Rasio penduduk yang bekerja (%) | 99 | 97,7 | 97,8 | 252.500.000 | 97,82 | 479.400.000 | 97,9 | 512.500.000 | 98,5 | 515.000.000 | 98,75 | 517.500.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%) | 17,9 | 22,1 | 23,6 | | 25,9 | | 26,9 | | 29,8 | | 30 | | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Produktivitas Tenaga Kerja (%) | 95 | 92 | 93 | | 93 | | 93 | | 95 | | 97 | | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 172.609.000 | | 271.218.000 | | 364.797.500 | | 459.277.000 | | 461.506.500 | |
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 0 | 0 | 50 | 172.609.000 | 50 | 271.218.000 | 75 | 364.797.500 | 75 | 459.277.000 | 75 | 461.506.500 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 424.200.000 | | 453.900.000 | | 445.875.000 | | 458.350.000 | | 460.575.000 | |
| Meningkatnya Tingkat Upah Pekerja di Sektor Formal | Rata-rata Tingkat Upah Pekerja di Sektor Formal (%) | 0,01 | 1,058 | 1,058 | 424.200.000 | 1,058 | 453.900.000 | 1,058 | 445.875.000 | 1,058 | 458.350.000 | 1,1 | 460.575.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 10.399.602.349 | | 9.156.372.709 | | 9.176.557.813 | | 9.229.713.888 | | 9.627.067.962 | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.286.403.589 | | 3.351.276.238 | | 3.404.245.313 | | 3.586.423.888 | | 3.645.802.962 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 3.286.403.589 | 63 | 3.351.276.238 | 68 | 3.404.245.313 | 71 | 3.586.423.888 | 75 | 3.645.802.962 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 1.307.950.000 | | 1.280.100.000 | | 1.272.050.000 | | 1.230.850.000 | | 1.252.350.000 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 80 | 80 | 82 | 1.307.950.000 | 82 | 1.280.100.000 | 85 | 1.272.050.000 | 85 | 1.230.850.000 | 86 | 1.252.350.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (%) | 60,86 | 61,38 | 64,04 | | 64,04 | | 69,78 | | 72,96 | | 74 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 1.166.550.000 | | 800.700.000 | | 1.115.200.000 | | 739.540.000 | | 1.100.205.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di | 100 | 80 | 83 | 1.166.550.000 | 86 | 800.700.000 | 90 | 1.115.200.000 | 93 | 739.540.000 | 95 | 1.100.205.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 1.269.570.000 | | 800.700.000 | | 717.500.000 | | 1.038.240.000 | | 879.750.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga | Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga (%) | 3,64 | 3,77 | . | 1.269.570.000 | . | 800.700.000 | . | 717.500.000 | . | 1.038.240.000 | . | 879.750.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| | Indeks Kualitas Keluarga (Indeks) | 0,5 | 0,51 | 0,52 | | 0,53 | | 0,54 | | 0,55 | | 0,55 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 1.302.900.000 | | 1.295.910.000 | | 1.292.012.500 | | 1.260.720.000 | | 1.266.840.000 | |
| Meningkatnya Capaian Pemenuhan Hak Anak. | Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Rasio) | 0,01 | 0,01 | . | 1.302.900.000 | . | 1.295.910.000 | . | 1.292.012.500 | . | 1.260.720.000 | . | 1.266.840.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| | Capaian Status Kota Layak Anak (%) | 0 | 0 | 55 | | 57 | | 60 | | 65 | | 65 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 2.066.228.760 | | 1.627.686.471 | | 1.375.550.000 | | 1.373.940.000 | | 1.482.120.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) | 85 | 85 | 90 | 2.066.228.760 | 90 | 1.627.686.471 | 90 | 1.375.550.000 | 95 | 1.373.940.000 | 95 | 1.482.120.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 2.689.225.526 | | 3.284.086.305 | | 3.482.605.387 | | 3.726.238.689 | | 3.921.834.028 | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.119.335.551 | | 2.257.535.025 | | 2.382.521.783 | | 2.513.851.031 | | 2.652.356.901 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 2.119.335.551 | 63 | 2.257.535.025 | 68 | 2.382.521.783 | 71 | 2.513.851.031 | 75 | 2.652.356.901 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 517.791.852 | | 777.506.638 | | 833.512.382 | | 926.819.685 | | 963.478.878 | |
| Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%) | 122,5 | 128,6 | 135 | 517.791.852 | 141,8 | 777.506.638 | 148,8 | 833.512.382 | 156,3 | 926.819.685 | 160 | 963.478.878 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 25.163.039 | | 205.182.786 | | 220.341.764 | | 236.736.181 | | 254.475.968 | |
| Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan Masyarakat | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 17,46 | 14,29 | 11,11 | 25.163.039 | 7,94 | 205.182.786 | 4,76 | 220.341.764 | 3,17 | 236.736.181 | 1,58 | 254.475.968 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%)) | 4,97 | 4,72 | 4,49 | | 4,26 | | 4,05 | | 3,85 | | 3,85 | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 26.935.084 | | 43.861.856 | | 46.229.458 | | 48.831.792 | | 51.522.281 | |
| Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 26.935.084 | 100 | 43.861.856 | 100 | 46.229.458 | 100 | 48.831.792 | 100 | 51.522.281 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 6.790.085.714 | | 9.366.674.571 | | 11.240.750.356 | | 13.397.519.000 | | 13.462.555.500 | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 101.000.000 | | 247.146.000 | | 248.357.500 | | 249.569.000 | | 250.780.500 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) | 70 | 75 | 80 | 101.000.000 | 85 | 247.146.000 | 90 | 248.357.500 | 95 | 249.569.000 | 95 | 250.780.500 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan (%) | 67,37 | 73,9 | 80,42 | | 86,94 | | 93,47 | | 100 | | 100 | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | 6.095.350.000 | | 8.231.400.000 | | 10.321.750.000 | | 12.432.100.000 | | 12.492.450.000 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 23,08 | 26,92 | 38,46 | 6.095.350.000 | 53,85 | 8.231.400.000 | 73,08 | 10.321.750.000 | 96,15 | 12.432.100.000 | 100 | 12.492.450.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | | | 15.150.000 | | 392.700.000 | | 138.375.000 | | 139.050.000 | | 139.725.000 | |
| Meningkatnya Optimalisasi Lahan yang Belum Produktif | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) | 32,63 | 5,03 | 21,58 | 15.150.000 | 25,18 | 392.700.000 | 25,18 | 138.375.000 | 23,02 | 139.050.000 | 23,02 | 139.725.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | 578.585.714 | | 495.428.571 | | 532.267.856 | | 576.800.000 | | 579.600.000 | |
| Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) | 67,37 | 73,9 | 80,42 | 578.585.714 | 86,94 | 495.428.571 | 93,47 | 532.267.856 | 100 | 576.800.000 | 100 | 579.600.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 12.673.434.766 | | 14.005.946.444 | | 14.048.978.044 | | 14.919.061.927 | | 14.479.159.557 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.019.110.365 | | 4.323.266.015 | | 4.313.708.496 | | 4.358.653.259 | | 4.379.811.770 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 72,1 | 72,5 | 73,3 | 4.019.110.365 | 73,8 | 4.323.266.015 | 77,2 | 4.313.708.496 | 77,6 | 4.358.653.259 | 77,6 | 4.379.811.770 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 747.400.000 | | 1.132.200.000 | | 1.137.750.000 | | 1.658.300.000 | | 1.148.850.000 | |
| Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kegiatan, Rencana, Program (KRP) terhadap Lingkungan Hidup | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 97 | 97 | 98 | 747.400.000 | 98 | 1.132.200.000 | 98 | 1.137.750.000 | 98 | 1.658.300.000 | 98 | 1.148.850.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1.346.455.290 | | 1.414.629.483 | | 1.421.563.941 | | 1.428.498.399 | | 1.435.432.857 | |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) | 67,79 | 68,76 | 69,91 | 1.346.455.290 | 69,91 | 1.414.629.483 | 72,01 | 1.421.563.941 | 73,1 | 1.428.498.399 | 73,1 | 1.435.432.857 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 63,6 | 66,45 | 67,74 | | 67,74 | | 71,93 | | 73,73 | | 73,73 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 93,71 | 93,71 | 93,81 | | 93,91 | | 94,01 | | 94,11 | | 94,11 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 691.850.000 | | 698.700.000 | | 702.125.000 | | 705.550.000 | | 708.975.000 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persentase) | 0 | 95 | 95 | 691.850.000 | 95 | 698.700.000 | 95 | 702.125.000 | 95 | 705.550.000 | 95 | 708.975.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 57.280.000 | | 58.140.000 | | 58.425.000 | | 58.710.000 | | 58.995.000 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Limbah Berbahaya | Persentase B3 dan Limbah B3 yang Diolah (%) | 0 | 95 | 95 | 57.280.000 | 95 | 58.140.000 | 95 | 58.425.000 | 95 | 58.710.000 | 95 | 58.995.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 156.550.000 | | 158.100.000 | | 158.875.000 | | 159.650.000 | | 160.425.000 | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase B3 dan Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 0 | 1 | 1 | 156.550.000 | 1 | 158.100.000 | 1 | 158.875.000 | 1 | 159.650.000 | 1 | 160.425.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 80.800.000 | | 81.600.000 | | 82.000.000 | | 82.400.000 | | 82.800.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 0 | 95 | 95 | 80.800.000 | 95 | 81.600.000 | 95 | 82.000.000 | 95 | 82.400.000 | 95 | 82.800.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 24.240.000 | | 24.480.000 | | 24.600.000 | | 24.720.000 | | 24.840.000 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 0 | 75 | 78 | 24.240.000 | 79 | 24.480.000 | 80 | 24.600.000 | 83 | 24.720.000 | 85 | 24.840.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 5.549.749.111 | | 6.114.830.946 | | 6.149.930.607 | | 6.442.580.269 | | 6.479.029.930 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | Persentase volume/timbulan sampah yang ditangani (%) | 22,8 | 29,27 | 33,46 | 5.549.749.111 | 33,46 | 6.114.830.946 | 44,42 | 6.149.930.607 | 49,33 | 6.442.580.269 | 49,33 | 6.479.029.930 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R (%) | 2,417 | 4,45 | 6,48 | | 8,513 | | 10,546 | | 12,577 | | 14,61 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 4.571.664.000 | | 5.475.564.000 | | 5.253.842.500 | | 6.088.021.000 | | 6.116.229.000 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.074.642.000 | | 3.836.526.000 | | 3.581.145.000 | | 4.458.664.000 | | 4.427.212.500 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54 | 55 | 61 | 3.074.642.000 | 63 | 3.836.526.000 | 68 | 3.581.145.000 | 71 | 4.458.664.000 | 75 | 4.427.212.500 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 1.279.872.000 | | 1.220.838.000 | | 1.380.572.500 | | 1.207.057.000 | | 1.342.291.500 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk (Rasio) | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 1.279.872.000 | 0,94 | 1.220.838.000 | 0,96 | 1.380.572.500 | 0,98 | 1.207.057.000 | 1 | 1.342.291.500 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Pemanfaatan data kependudukan pendaftaran penduduk (Lembaga) | 2 | 4 | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Persentase Penduduk yang Memiliki NIK (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 1,23 | 1,23 | 1,25 | | 1,27 | | 1,3 | | 1,32 | | 1,35 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | 29 | 29,5 | 30 | | 30,5 | | 31 | | 31,5 | | 32 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 217.150.000 | | 418.200.000 | | 292.125.000 | | 422.300.000 | | 346.725.000 | |
| Meningkatnya Cakupan Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil | Rasio bayi berakte kelahiran (Rasio) | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 217.150.000 | 0,97 | 418.200.000 | 0,98 | 292.125.000 | 0,99 | 422.300.000 | 1 | 346.725.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Rasio Pasangan yang Memiliki Akta Nikah (Rasio) | 0,44 | 0,48 | 0,52 | | 0,56 | | 0,6 | | 0,64 | | 0,68 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Pemanfaatan data kependudukan pencatatan sipil (Lembaga) | 2 | 4 | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 7.662.528.510 | | 8.820.298.592 | | 10.406.912.785 | | 12.931.578.066 | | 12.702.482.718 | |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.261.694.482 | | 4.984.127.373 | | 6.055.165.650 | | 7.111.918.369 | | 6.825.592.245 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 50,21 | 60,02 | 64,76 | 4.261.694.482 | 70,05 | 4.984.127.373 | 70,5 | 6.055.165.650 | 80,04 | 7.111.918.369 | 80,1 | 6.825.592.245 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | 95.950.000 | | 102.000.000 | | 148.420.000 | | 174.852.800 | | 204.681.600 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Kualitas Penataan Desa | Persentase Desa yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (%) | 70,02 | 72,4 | 80 | 95.950.000 | 84,45 | 102.000.000 | 90,15 | 148.420.000 | 95 | 174.852.800 | 95 | 204.681.600 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | Persentase PKK Aktif (%) | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 1.237.756.939 | | 1.435.193.350 | | 1.659.021.709 | | 2.905.129.232 | | 2.919.231.801 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (%) | 15,21 | 22,02 | 24,5 | 1.237.756.939 | 30 | 1.435.193.350 | 47,5 | 1.659.021.709 | 55 | 2.905.129.232 | 60,05 | 2.919.231.801 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 2.067.127.089 | | 2.298.977.869 | | 2.544.305.426 | | 2.739.677.665 | | 2.752.977.072 | |
| Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 0 | 0 | 54,1 | 2.067.127.089 | 60 | 2.298.977.869 | 65,15 | 2.544.305.426 | 70,08 | 2.739.677.665 | 70,08 | 2.752.977.072 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 11.441.813.381 | | 12.244.618.662 | | 13.108.343.802 | | 12.096.966.943 | | 12.967.130.083 | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 2.689.034.100 | | 1.754.818.200 | | 1.919.220.250 | | 1.442.422.300 | | 2.093.194.350 | |
| Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%) | 1,93 | 1,44 | 1,43 | 2.689.034.100 | 0,99 | 1.754.818.200 | 0,96 | 1.919.220.250 | 0,75 | 1.442.422.300 | 0,75 | 2.093.194.350 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 5.631.985.533 | | 6.899.507.766 | | 7.017.378.882 | | 7.255.549.999 | | 6.754.641.115 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase peningkatan Cakupan peserta ber-KB (%) | 90 | 90 | . | 5.631.985.533 | . | 6.899.507.766 | . | 7.017.378.882 | . | 7.255.549.999 | . | 6.754.641.115 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (%) | 16 | 15,5 | 15 | | 14,5 | | 14 | | 13,5 | | 12 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 3.120.793.748 | | 3.590.292.696 | | 4.171.744.670 | | 3.398.994.644 | | 4.119.294.618 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks) | 50,75 | 60,15 | 62 | 3.120.793.748 | 64 | 3.590.292.696 | 66 | 4.171.744.670 | 68 | 3.398.994.644 | 70 | 4.119.294.618 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| | Persentase Desa/Kelurahan yang Berstastus Kampung Keluarga Berkualitas (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 10.379.871.000 | | 12.519.684.000 | | 16.909.322.500 | | 16.362.322.500 | | 14.900.791.500 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.370.171.000 | | 6.210.984.000 | | 7.079.572.500 | | 7.931.772.500 | | 6.340.306.500 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 40 | 40 | 65 | 6.370.171.000 | 70 | 6.210.984.000 | 70 | 7.079.572.500 | 80 | 7.931.772.500 | 90 | 6.340.306.500 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 3.939.000.000 | | 5.931.300.000 | | 9.450.500.000 | | 5.268.450.000 | | 4.348.035.000 | |
| Meningkatnya Aksesibilitas Penumpang Angkutan Darat | Indeks Konektivitas Darat (%) | 52,5 | 52,5 | 61,25 | 3.939.000.000 | 61,25 | 5.931.300.000 | 70 | 9.450.500.000 | 70 | 5.268.450.000 | 70 | 4.348.035.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 66,67 | 66,67 | 83,33 | | 83,33 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | 70.700.000 | | 377.400.000 | | 379.250.000 | | 3.162.100.000 | | 4.212.450.000 | |
| Meningkatnya Aksesiblitas dan Layanan Angkutan Laut | Indeks Konektivitas Laut (%) | 15 | 15 | 24 | 70.700.000 | 24 | 377.400.000 | 24 | 379.250.000 | 24 | 3.162.100.000 | 24 | 4.212.450.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Persentase Ketersediaan Fasiitas Pelabuhan (%) | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 14 | | 43 | | 43 | | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 6.184.836.000 | | 6.884.082.000 | | 7.131.540.000 | | 7.529.918.000 | | 7.757.946.000 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.167.866.000 | | 4.438.122.000 | | 4.416.315.000 | | 4.393.568.000 | | 4.461.471.000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 4.167.866.000 | 63 | 4.438.122.000 | 68 | 4.416.315.000 | 71 | 4.393.568.000 | 75 | 4.461.471.000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 838.300.000 | | 918.000.000 | | 973.750.000 | | 947.600.000 | | 993.600.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Publik yang Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Secara Online (%) | 75 | 80 | 85 | 838.300.000 | 85 | 918.000.000 | 90 | 973.750.000 | 100 | 947.600.000 | 100 | 993.600.000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 1.178.670.000 | | 1.527.960.000 | | 1.741.475.000 | | 2.188.750.000 | | 2.302.875.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks Domain Kebijakan SPBE (Indeks) | 2,52 | 2,6 | 2,6 | 1.178.670.000 | 2,6 | 1.527.960.000 | 2,65 | 1.741.475.000 | 2,7 | 2.188.750.000 | 2,8 | 2.302.875.000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | Persentase Layanan Publik yang Dilaksanakan secara Online (%) | 85 | 90 | 90 | | 95 | | 98 | | 100 | | 100 | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | Indeks Domain Layanan SPBE (Indeks) | 3,69 | 3,75 | 3,9 | | 4,1 | | 4,15 | | 4,25 | | 4,25 | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | Indeks Domain Manajemen SPBE (Indeks) | 1 | 1,5 | 2,15 | | 2,55 | | 3,25 | | 3,55 | | 3,55 | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Indeks) | 1,2 | 1,65 | 1,85 | | 2,05 | | 2,55 | | 2,75 | | 2,75 | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 3.680.548.897 | | 4.188.904.521 | | 4.391.312.785 | | 4.814.985.265 | | 4.945.054.179 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.500.149.363 | | 3.711.544.521 | | 3.916.225.285 | | 4.132.095.265 | | 4.265.576.679 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 3.500.149.363 | 63 | 3.711.544.521 | 68 | 3.916.225.285 | 71 | 4.132.095.265 | 75 | 4.265.576.679 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 31.815.000 | | 53.040.000 | | 52.787.500 | | 52.530.000 | | 52.267.500 | |
| Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 69,7 | 71,79 | 72,18 | 31.815.000 | 76,21 | 53.040.000 | 80,51 | 52.787.500 | 82,45 | 52.530.000 | 82,45 | 52.267.500 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 42.534.534 | | 106.080.000 | | 105.575.000 | | 105.060.000 | | 104.535.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang Tangguh dan Mandiri | Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan (%) | 75 | 75 | 80 | 42.534.534 | 80 | 106.080.000 | 85 | 105.575.000 | 85 | 105.060.000 | 90 | 104.535.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) | 75 | 75 | 80 | | 80 | | 85 | | 85 | | 90 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 106.050.000 | | 318.240.000 | | 316.725.000 | | 525.300.000 | | 522.675.000 | |
| Meningkatnya Daya Saing UMKM | Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM (%) | 10 | 15 | 15 | 106.050.000 | 20 | 318.240.000 | 20 | 316.725.000 | 25 | 525.300.000 | 25 | 522.675.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Ekspor (Persentase) | 10 | 15 | 15 | | 20 | | 20 | | 25 | | 25 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 5.224.550.188 | | 6.346.393.045 | | 6.722.718.199 | | 7.302.265.967 | | 8.123.032.179 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.409.216.588 | | 4.039.687.525 | | 4.456.213.599 | | 4.916.471.817 | | 5.425.066.629 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 3.409.216.588 | 63 | 4.039.687.525 | 68 | 4.456.213.599 | 71 | 4.916.471.817 | 75 | 5.425.066.629 | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 292.900.000 | | 631.380.000 | | 431.422.500 | | 375.136.300 | | 494.349.120 | |
| Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Persentase jumlah kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terinplementasikan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 292.900.000 | 100 | 631.380.000 | 100 | 431.422.500 | 100 | 375.136.300 | 100 | 494.349.120 | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 404.000.000 | | 448.800.000 | | 496.100.000 | | 548.372.000 | | 606.137.400 | |
| Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 15,38 | 16,15 | 16,96 | 404.000.000 | 17,8 | 448.800.000 | 18,69 | 496.100.000 | 19,63 | 548.372.000 | 20,61 | 606.137.400 | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 638.683.600 | | 693.575.520 | | 749.863.350 | | 811.094.100 | | 877.698.630 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Investasi | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan (Persentase) | 73 | 76,65 | 80,48 | 638.683.600 | 84,5 | 693.575.520 | 88,73 | 749.863.350 | 93,17 | 811.094.100 | 97,83 | 877.698.630 | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 479.750.000 | | 532.950.000 | | 589.118.750 | | 651.191.750 | | 719.780.400 | |
| Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal | persentase realisasi total terhadap target investasi (Persentase) | 76,72 | 78,64 | 80,6 | 479.750.000 | 82,62 | 532.950.000 | 84,64 | 589.118.750 | 86,8 | 651.191.750 | 88,97 | 719.780.400 | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 3.737.000.000 | | 4.656.300.000 | | 5.147.037.500 | | 5.689.359.500 | | 6.894.812.925 | |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 1.060.500.000 | | 1.683.000.000 | | 1.860.375.000 | | 2.056.395.000 | | 2.273.015.250 | |
| Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Persentase Wirausaha Muda (%) | 0,35 | 0,95 | 1,02 | 1.060.500.000 | 1,1 | 1.683.000.000 | 1,2 | 1.860.375.000 | 2,03 | 2.056.395.000 | 2,03 | 2.273.015.250 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 2.676.500.000 | | 2.973.300.000 | | 3.286.662.500 | | 3.632.964.500 | | 4.621.797.675 | |
| Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%) | 10 | 11 | 15 | 2.676.500.000 | 25 | 2.973.300.000 | 35 | 3.286.662.500 | 56 | 3.632.964.500 | 56 | 4.621.797.675 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 161.600.000 | | 204.000.000 | | 225.500.000 | | 988.800.000 | | 993.600.000 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 161.600.000 | | 204.000.000 | | 225.500.000 | | 988.800.000 | | 993.600.000 | |
| Meningkatnya Penggunaan Data Statistik dalam Perencanaan dan Kebijakan | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Kebijakan (%) | 50 | 50 | 65 | 161.600.000 | 70 | 204.000.000 | 75 | 225.500.000 | 80 | 988.800.000 | 90 | 993.600.000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 141.400.000 | | 132.600.000 | | 148.625.000 | | 144.200.000 | | 155.250.000 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 141.400.000 | | 132.600.000 | | 148.625.000 | | 144.200.000 | | 155.250.000 | |
| Meningkatnya Penggunaan Sistem Persandian dalam Perencanaan dan Kebijakan | Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Persandian dalam Perencanaan dan Kebijakan (%) | 70 | 75 | 80 | 141.400.000 | 85 | 132.600.000 | 90 | 148.625.000 | 95 | 144.200.000 | 100 | 155.250.000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 6.038.164.115 | | 6.331.463.943 | | 6.438.146.294 | | 6.548.114.490 | | 6.608.974.300 | |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.159.564.115 | | 4.403.663.943 | | 4.470.146.294 | | 4.539.614.490 | | 4.575.199.300 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 4.159.564.115 | 63 | 4.403.663.943 | 68 | 4.470.146.294 | 71 | 4.539.614.490 | 75 | 4.575.199.300 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 1.161.500.000 | | 1.173.000.000 | | 1.178.750.000 | | 1.184.500.000 | | 1.190.250.000 | |
| Meningkatnya Inventarisasi dan Revitalisasi terhadap Karya Budaya | Jumlah Karya Budaya yang Dinventarisasi dan Direvitalisasi (Angka) | 0 | 0 | 0 | 1.161.500.000 | 1 | 1.173.000.000 | 2 | 1.178.750.000 | 3 | 1.184.500.000 | 3 | 1.190.250.000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 252.500.000 | | 255.000.000 | | 256.250.000 | | 257.500.000 | | 258.750.000 | |
| Meningkatnya Kegiatan Festival Keseniaan Tradisional | Jumlah Festival Kesenian Tradisional yang Diselengarakan (Kegiatan) | 0 | 0 | 0 | 252.500.000 | 1 | 255.000.000 | 2 | 256.250.000 | 2 | 257.500.000 | 3 | 258.750.000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 464.600.000 | | 499.800.000 | | 533.000.000 | | 566.500.000 | | 584.775.000 | |
| Meningkatnya Kelestarian Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya | Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit) | 6 | 6 | 7 | 464.600.000 | 8 | 499.800.000 | 9 | 533.000.000 | 10 | 566.500.000 | 10 | 584.775.000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 4.241.150.835 | | 6.128.618.747 | | 6.567.934.757 | | 7.207.643.481 | | 7.959.546.798 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.192.177.814 | | 4.580.963.567 | | 5.096.299.207 | | 5.582.955.471 | | 6.117.639.063 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 3.192.177.814 | 63 | 4.580.963.567 | 68 | 5.096.299.207 | 71 | 5.582.955.471 | 75 | 6.117.639.063 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 1.018.673.021 | | 1.511.955.180 | | 1.430.635.550 | | 1.591.728.010 | | 1.800.507.735 | |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang) | 1.084 | 949 | 1.191 | 1.018.673.021 | 1.191 | 1.511.955.180 | 1.639 | 1.430.635.550 | 1.859 | 1.591.728.010 | 1.859 | 1.800.507.735 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 30.300.000 | | 35.700.000 | | 41.000.000 | | 32.960.000 | | 41.400.000 | |
| Meningkatnya Ketersediaan Buku dan Naskah Kuno | Jumlah Koleksi Judul Buku dan Naskah Kuno di Perpustakaan Daerah (Buah) | 6.242 | 5.777 | 5.794 | 30.300.000 | 5.794 | 35.700.000 | 5.822 | 41.000.000 | 5.834 | 32.960.000 | 5.834 | 41.400.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 388.850.000 | | 474.300.000 | | 514.550.000 | | 556.200.000 | | 626.175.000 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 292.900.000 | | 367.200.000 | | 381.300.000 | | 412.000.000 | | 460.575.000 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | Persentase OPD yang Mengelola Arsip secara Baku (%) | 72,72 | 80 | 85 | 292.900.000 | 85 | 367.200.000 | 95 | 381.300.000 | 95 | 412.000.000 | 95 | 460.575.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 95.950.000 | | 107.100.000 | | 133.250.000 | | 144.200.000 | | 165.600.000 | |
| Meningkatnya Perlindungan Terrhadap Arsip Daerah | Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan sesuai dengan Ketentuan Retensi Arsip (%) | 35 | 37 | 40 | 95.950.000 | 45 | 107.100.000 | 50 | 133.250.000 | 70 | 144.200.000 | 80 | 165.600.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 11.743.461.566 | | 18.226.465.737 | | 26.674.686.158 | | 29.946.306.578 | | 30.096.851.998 | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.944.030.013 | | 3.836.589.893 | | 3.752.896.707 | | 3.771.203.520 | | 3.789.510.333 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,14 | 55 | 58 | 3.944.030.013 | 61 | 3.836.589.893 | 64 | 3.752.896.707 | 67 | 3.771.203.520 | 70 | 3.789.510.333 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 2.039.516.714 | | 4.912.454.844 | | 8.011.535.505 | | 9.801.616.166 | | 9.849.196.827 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 8.623,4 | 8.653,7 | 8.705,6 | 2.039.516.714 | 8.783,95 | 4.912.454.844 | 8.889,36 | 8.011.535.505 | 9.002,7 | 9.801.616.166 | 9.164,75 | 9.849.196.827 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 4.350.225.721 | | 7.558.200.000 | | 11.239.125.000 | | 12.838.950.000 | | 12.906.450.000 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 16.527,359 | 16.671,15 | 16.871,2 | 4.350.225.721 | 17.124,27 | 7.558.200.000 | 17.432,5 | 11.239.125.000 | 17.763,72 | 12.838.950.000 | 18.154,52 | 12.906.450.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 1.409.689.118 | | 1.919.221.000 | | 3.671.128.946 | | 3.534.536.892 | | 3.551.694.838 | |
| Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan | Produksi Olahan Hasil Kelautan dan perikanan (Kg) | 13.318 | 13.717 | 14.169,7 | 1.409.689.118 | 14.679,8 | 1.919.221.000 | 15.252,3 | 3.671.128.946 | 15.892,9 | 3.534.536.892 | 16.608,1 | 3.551.694.838 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 4.318.255.000 | | 4.530.024.000 | | 4.778.447.500 | | 4.935.502.500 | | 5.079.453.975 | |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 1.540.755.000 | | 1.607.724.000 | | 1.666.035.000 | | 1.726.898.000 | | 1.765.730.700 | |
| Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Lokal | Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan (Hari) | 2 | 2 | 2 | 1.540.755.000 | 2 | 1.607.724.000 | 2 | 1.666.035.000 | 2 | 1.726.898.000 | 2 | 1.765.730.700 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 1.868.500.000 | | 1.953.300.000 | | 2.036.162.500 | | 2.127.104.500 | | 2.226.973.275 | |
| Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing (Orang) | 0 | 5 | 5 | 1.868.500.000 | 7 | 1.953.300.000 | 8 | 2.036.162.500 | 10 | 2.127.104.500 | 10 | 2.226.973.275 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang) | 120,192 | 131,19 | 134,642 | | 139,739 | | 143,82 | | 145,82 | | 150 | | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 909.000.000 | | 969.000.000 | | 1.076.250.000 | | 1.081.500.000 | | 1.086.750.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Pembinaan (%) | 70 | 50 | 65 | 909.000.000 | 75 | 969.000.000 | 80 | 1.076.250.000 | 95 | 1.081.500.000 | 95 | 1.086.750.000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (%) | 65 | 95 | 100 | | 75 | | 80 | | 90 | | 90 | | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 15.007.885.727 | | 17.031.619.631 | | 18.833.242.604 | | 19.340.335.040 | | 21.258.866.539 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.322.331.043 | | 9.438.149.261 | | 10.151.884.547 | | 10.840.719.866 | | 11.993.186.512 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 8.322.331.043 | 63 | 9.438.149.261 | 68 | 10.151.884.547 | 71 | 10.840.719.866 | 75 | 11.993.186.512 | DINAS PERTANIAN |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 50 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 3.189.697.723 | | 3.833.817.005 | | 4.593.264.375 | | 4.044.130.859 | | 4.343.124.977 | |
| Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian (%) | 25 | 25 | 25 | 3.189.697.723 | 30 | 3.833.817.005 | 35 | 4.593.264.375 | 40 | 4.044.130.859 | 45 | 4.343.124.977 | DINAS PERTANIAN |
| | Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 2.401.518.006 | | 2.526.479.412 | | 2.691.712.115 | | 2.873.558.478 | | 3.129.599.673 | |
| Meningkatnya Cakupan Bantuan Prasarana Pertanian | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian (%) | 25 | 25 | 25 | 2.401.518.006 | 30 | 2.526.479.412 | 35 | 2.691.712.115 | 40 | 2.873.558.478 | 45 | 3.129.599.673 | DINAS PERTANIAN |
| | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 579.795.307 | | 661.572.000 | | 764.537.250 | | 883.506.705 | | 1.020.964.909 | |
| Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Persentase hewan terkendali dari penyakit (%) | 0 | 0 | 0 | 579.795.307 | 0 | 661.572.000 | 0 | 764.537.250 | 0 | 883.506.705 | 0 | 1.020.964.909 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 514.543.648 | | 571.601.953 | | 631.844.317 | | 698.419.132 | | 771.990.468 | |
| Meningkatnya cakupan petani yang mendapatkan penyuluhan | Cakupan Petani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian (%) | 25 | 25 | 25 | 514.543.648 | 30 | 571.601.953 | 35 | 631.844.317 | 40 | 698.419.132 | 45 | 771.990.468 | DINAS PERTANIAN |
| | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 202.971.953 | | 223.992.000 | | 223.911.250 | | 223.819.000 | | 223.715.250 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 101.971.953 | | 121.992.000 | | 121.411.250 | | 120.819.000 | | 120.215.250 | |
| Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabil) Satuan (%) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 101.971.953 | 0,75 | 121.992.000 | 0,75 | 121.411.250 | 0,75 | 120.819.000 | 0,75 | 120.215.250 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persentase) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | 101.000.000 | | 102.000.000 | | 102.500.000 | | 103.000.000 | | 103.500.000 | |
| Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor | Nilai Ekspor Bersih (Net Ekspor) (triliun rupiah) | 6,28 | 7,45 | 7,53 | 101.000.000 | 8,76 | 102.000.000 | 8,87 | 102.500.000 | 10,06 | 103.000.000 | 10,06 | 103.500.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 227.250.000 | | 280.500.000 | | 358.750.000 | | 489.250.000 | | 491.625.000 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 227.250.000 | | 280.500.000 | | 358.750.000 | | 489.250.000 | | 491.625.000 | |
| Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase) | 25,73 | 26 | 27,042 | 227.250.000 | 28,081 | 280.500.000 | 29,12 | 358.750.000 | 30,16 | 489.250.000 | 30,16 | 491.625.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | 70.700.000 | | 576.300.000 | | 579.125.000 | | 581.950.000 | | 584.775.000 | |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 20.200.000 | | 474.300.000 | | 476.625.000 | | 478.950.000 | | 481.275.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase) | 34,49 | 21,67 | 16,67 | 20.200.000 | 16,67 | 474.300.000 | 16,67 | 476.625.000 | 20 | 478.950.000 | 21,67 | 481.275.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 50.500.000 | | 102.000.000 | | 102.500.000 | | 103.000.000 | | 103.500.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigras | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya (%) | 34,49 | 21,67 | 16,67 | 50.500.000 | 16,67 | 102.000.000 | 16,67 | 102.500.000 | 20 | 103.000.000 | 21,67 | 103.500.000 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 44.568.120.200 | | 51.063.159.003 | | 53.681.371.928 | | 58.002.165.495 | | 57.928.822.230 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 31.883.161.724 | | 36.012.463.060 | | 38.283.689.250 | | 42.227.449.498 | | 42.085.584.869 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | 31.883.161.724 | 63 | 36.012.463.060 | 68 | 38.283.689.250 | 71 | 42.227.449.498 | 75 | 42.085.584.869 | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Tata Pemerintahan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Hukum |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Kerjasama |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Perekonomian |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Sumber Daya Alam |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Umum |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Organisasi |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Protokuler dan Komunikasi Pimpinan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 11.422.495.442 | | 12.755.733.275 | | 12.929.520.193 | | 13.118.332.195 | | 13.264.101.817 | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 321 | 323 | 11.422.495.442 | 323 | 12.755.733.275 | 324 | 12.929.520.193 | 324 | 13.118.332.195 | 326 | 13.264.101.817 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | Bagian Tata Pemerintahan |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 294 | 294 | | 294 | | 294 | | 294 | | 294 | | Bagian Hukum |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 5 | 7 | | 7 | | 8 | | 8 | | 10 | | Bagian Kerjasama |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Perekonomian |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | KELURAHAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN MARTAJAYA |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | KELURAHAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN SARJO |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN BARAS |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 75 | 77 | 78 | | 80 | | 82 | | 83 | | 83,5 | | KECAMATAN SARUDU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 1.262.463.034 | | 2.294.962.668 | | 2.468.162.485 | | 2.656.383.802 | | 2.579.135.544 | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 7 | 12 | 1.262.463.034 | 13 | 2.294.962.668 | 14 | 2.468.162.485 | 15 | 2.656.383.802 | 15 | 2.579.135.544 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Tata Pemerintahan |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Bagian Perekonomian |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan (Dokumen) | 0 | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | Bagian Sumber Daya Alam |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Umum |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 45.316.840.590 | | 50.927.487.180 | | 48.601.819.225 | | 48.695.573.680 | | 50.752.114.065 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 28.201.826.000 | | 33.630.777.000 | | 30.743.696.250 | | 31.548.951.500 | | 32.627.650.500 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 28.201.826.000 | 63 | 33.630.777.000 | 68 | 30.743.696.250 | 71 | 31.548.951.500 | 75 | 32.627.650.500 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 17.115.014.590 | | 17.296.710.180 | | 17.858.122.975 | | 17.146.622.180 | | 18.124.463.565 | |
| Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Dalam Bentuk Perda | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) | 70 | 100 | 100 | 17.115.014.590 | 100 | 17.296.710.180 | 100 | 17.858.122.975 | 100 | 17.146.622.180 | 100 | 18.124.463.565 | SEKRETARIAT DPRD |
| | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | 95 | 95 | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT DPRD |
| | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 95 | 95 | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 9.841.039.155 | | 11.370.071.071 | | 12.150.970.155 | | 12.757.831.880 | | 14.372.526.044 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.718.793.492 | | 5.951.755.097 | | 6.162.631.173 | | 6.356.371.450 | | 7.299.127.863 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 5.718.793.492 | 63 | 5.951.755.097 | 68 | 6.162.631.173 | 71 | 6.356.371.450 | 75 | 7.299.127.863 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 3.477.441.160 | | 4.102.758.398 | | 4.619.719.455 | | 4.974.640.138 | | 5.582.699.416 | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 3.477.441.160 | 100 | 4.102.758.398 | 100 | 4.619.719.455 | 100 | 4.974.640.138 | 100 | 5.582.699.416 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 644.804.503 | | 1.315.557.576 | | 1.368.619.527 | | 1.426.820.292 | | 1.490.698.765 | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) dengan RKPD dan RPJMD (%) | 100 | 100 | 100 | 644.804.503 | 100 | 1.315.557.576 | 100 | 1.368.619.527 | 100 | 1.426.820.292 | 100 | 1.490.698.765 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 152.321.348.447 | | 168.187.835.760 | | 182.743.111.112 | | 196.131.000.076 | | 209.913.699.862 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 28.478.850.929 | | 30.517.908.586 | | 32.143.813.554 | | 32.950.397.841 | | 33.589.531.673 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | 28.478.850.929 | 63 | 30.517.908.586 | 68 | 32.143.813.554 | 71 | 32.950.397.841 | 75 | 33.589.531.673 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 117.332.216.335 | | 130.346.373.010 | | 142.895.878.219 | | 155.500.703.513 | | 168.282.314.198 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 30 | 31 | 40 | 117.332.216.335 | 42 | 130.346.373.010 | 43 | 142.895.878.219 | 45 | 155.500.703.513 | 48 | 168.282.314.198 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Selesai Tepat Waktu (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 1.017.904.260 | | 1.436.429.555 | | 1.598.023.246 | | 1.349.124.766 | | 1.459.984.113 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 5,3 | 6,01 | 6,08 | 1.017.904.260 | 7 | 1.436.429.555 | 7,06 | 1.598.023.246 | 7,9 | 1.349.124.766 | 8 | 1.459.984.113 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD (%) | 6,32 | 6,46 | 6,76 | | 6,89 | | 7,82 | | 8,66 | | 8,7 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 5.492.376.923 | | 5.887.124.609 | | 6.105.396.093 | | 6.330.773.956 | | 6.581.869.878 | |
| Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 154,71 | 100 | 100 | 5.492.376.923 | 100 | 5.887.124.609 | 100 | 6.105.396.093 | 100 | 6.330.773.956 | 100 | 6.581.869.878 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 8.432.690.113 | | 10.219.418.512 | | 12.323.416.446 | | 14.860.236.803 | | 17.918.848.647 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.024.428.559 | | 4.877.129.263 | | 5.881.244.114 | | 7.091.919.731 | | 8.551.615.827 | |
| Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 58 | 60 | 4.024.428.559 | 63 | 4.877.129.263 | 65 | 5.881.244.114 | 68 | 7.091.919.731 | 70 | 8.551.615.827 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 4.408.261.554 | | 5.342.289.249 | | 6.442.172.332 | | 7.768.317.072 | | 9.367.232.820 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian | Indeks System Merit (Indeks) | 145,5 | 151 | 166 | 4.408.261.554 | 197 | 5.342.289.249 | 229 | 6.442.172.332 | 250 | 7.768.317.072 | 261 | 9.367.232.820 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 1.313.000.000 | | 1.591.200.000 | | 1.918.800.000 | | 2.313.792.000 | | 2.790.028.800 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 1.313.000.000 | | 1.591.200.000 | | 1.918.800.000 | | 2.313.792.000 | | 2.790.028.800 | |
| Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%) | 0,92 | 1,13 | 1,36 | 1.313.000.000 | 1,36 | 1.591.200.000 | 1,8 | 1.918.800.000 | 2,02 | 2.313.792.000 | 2,02 | 2.790.028.800 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 4.545.605.616 | | 4.820.723.224 | | 4.864.977.143 | | 4.911.504.612 | | 4.960.544.054 | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 3.131.605.616 | | 3.392.723.224 | | 3.429.977.143 | | 3.469.504.612 | | 3.511.544.054 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%) | 15,4 | 15,45 | 15,5 | 3.131.605.616 | 15,55 | 3.392.723.224 | 15,6 | 3.429.977.143 | 15,65 | 3.469.504.612 | 15,7 | 3.511.544.054 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 1.414.000.000 | | 1.428.000.000 | | 1.435.000.000 | | 1.442.000.000 | | 1.449.000.000 | |
| Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%) | 15,4 | 15,45 | 15,5 | 1.414.000.000 | 15,55 | 1.428.000.000 | 15,6 | 1.435.000.000 | 15,65 | 1.442.000.000 | 15,7 | 1.449.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 14.796.868.759 | | 15.525.921.797 | | 16.366.276.441 | | 17.252.310.588 | | 18.202.862.652 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.183.564.873 | | 8.513.200.546 | | 8.966.824.241 | | 9.444.986.144 | | 9.965.377.372 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 8.183.564.873 | 100 | 8.513.200.546 | 100 | 8.966.824.241 | 100 | 9.444.986.144 | 100 | 9.965.377.372 | INSPEKTORAT |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 55 | 61 | | 63 | | 68 | | 71 | | 75 | | INSPEKTORAT |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 5.243.624.539 | | 5.560.318.696 | | 5.866.953.917 | | 6.190.351.864 | | 6.531.422.221 | |
| Menurunnya Kejadian Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran maupun | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 100 | 100 | 100 | 5.243.624.539 | 100 | 5.560.318.696 | 100 | 5.866.953.917 | 100 | 6.190.351.864 | 100 | 6.531.422.221 | INSPEKTORAT |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Proses dan Kewenangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 1.369.679.347 | | 1.452.402.555 | | 1.532.498.283 | | 1.616.972.580 | | 1.706.063.059 | |
| Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi | Persentase OPD yang Telah Mencapai Maturitas SPIP Level 2 ke atas (%) | 100 | 100 | 100 | 1.369.679.347 | 100 | 1.452.402.555 | 100 | 1.532.498.283 | 100 | 1.616.972.580 | 100 | 1.706.063.059 | INSPEKTORAT |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 44.584.416.837 | | 52.189.234.324 | | 61.111.041.587 | | 67.108.166.995 | | 70.882.677.590 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 40.770.770.367 | | 47.786.083.707 | | 56.265.837.002 | | 61.492.987.810 | | 65.168.041.617 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | 40.770.770.367 | 60,95 | 47.786.083.707 | 61,45 | 56.265.837.002 | 61,75 | 61.492.987.810 | 61,95 | 65.168.041.617 | KECAMATAN PASANGKAYU |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KELURAHAN PASANGKAYU |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KELURAHAN MARTAJAYA |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,75 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KELURAHAN BAMBALAMOTU |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN SARJO |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,96 | | KECAMATAN BARAS |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,96 | | 61,96 | | KELURAHAN BARAS |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,75 | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | 61,95 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 85 | 86 | 86,3 | | 86,6 | | 87 | | 88 | | 89 | | KECAMATAN SARUDU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 59,03 | 60,35 | 60,75 | | 60,95 | | 61,45 | | 61,75 | | 61,95 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 581.350.788 | | 725.002.387 | | 791.146.202 | | 1.481.089.113 | | 900.110.694 | |
| Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | 581.350.788 | 5 | 725.002.387 | 7 | 791.146.202 | 7 | 1.481.089.113 | 7 | 900.110.694 | KECAMATAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN SARJO |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KELURAHAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | KECAMATAN BULUTABA |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 2 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 30 | 32 | 35 | | 37 | | 40 | | 42 | | 42 | | KECAMATAN SARUDU |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 7 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 2.541.890.992 | | 2.864.722.812 | | 3.162.976.797 | | 3.155.235.532 | | 3.787.406.374 | |
| Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | 2.541.890.992 | 6 | 2.864.722.812 | 7 | 3.162.976.797 | 8 | 3.155.235.532 | 8 | 3.787.406.374 | KECAMATAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KELURAHAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KELURAHAN MARTAJAYA |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | KELURAHAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KECAMATAN SARJO |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 1 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 40 | 43 | 45 | | 48 | | 51 | | 55 | | 55 | | KECAMATAN SARUDU |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kali) | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 178.839.185 | | 207.636.657 | | 225.357.817 | | 244.200.032 | | 259.353.399 | |
| Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | 178.839.185 | 4 | 207.636.657 | 4 | 225.357.817 | 5 | 244.200.032 | 5 | 259.353.399 | KECAMATAN PASANGKAYU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | KECAMATAN SARJO |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 32 | 35 | 37 | | 40 | | 42 | | 43 | | 43 | | KECAMATAN SARUDU |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 168.115.005 | | 222.896.061 | | 246.520.807 | | 270.878.582 | | 292.330.789 | |
| Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | 168.115.005 | 2 | 222.896.061 | 4 | 246.520.807 | 4 | 270.878.582 | 4 | 292.330.789 | KECAMATAN PASANGKAYU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN SARJO |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KELURAHAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 37 | 40 | 42 | | 45 | | 47 | | 47 | | 47 | | KECAMATAN SARUDU |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 343.450.500 | | 382.892.700 | | 419.202.962 | | 463.775.926 | | 475.434.717 | |
| Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | 343.450.500 | 2 | 382.892.700 | 4 | 419.202.962 | 4 | 463.775.926 | 4 | 475.434.717 | KECAMATAN PASANGKAYU |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN PEDONGGA |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN TIKKE RAYA |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | KECAMATAN BAMBALAMOTU |
| | | | | | | | | | | | | | | KELURAHAN BAMBALAMOTU |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN BAMBAIRA |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN SARJO |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | KECAMATAN BARAS |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | KECAMATAN BULUTABA |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | 7 | | KECAMATAN LARIANG |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 31 | 33 | 36 | | 39 | | 42 | | 45 | | 45 | | KECAMATAN SARUDU |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | KECAMATAN DAPURANG |
| | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum (Kali) | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | KECAMATAN DURIPOKU |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 9.360.716.449 | | 10.989.203.030 | | 12.757.322.022 | | 14.689.025.110 | | 14.993.206.057 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.013.524.586 | | 5.997.256.131 | | 7.063.372.835 | | 8.357.125.975 | | 8.552.944.547 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%) | 54,15 | 60 | 62 | 5.013.524.586 | 64 | 5.997.256.131 | 66 | 7.063.372.835 | 68 | 8.357.125.975 | 70 | 8.552.944.547 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 909.000.000 | | 1.101.600.000 | | 1.328.400.000 | | 1.601.856.000 | | 1.609.632.000 | |

| KODE / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Ada Sekelompok Orang Dari Agama Lain yang Melakukan Kegiatan yi Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal (%) | 75 | 80 | 81 | 909.000.000 | 82 | 1.101.600.000 | 83 | 1.328.400.000 | 84 | 1.601.856.000 | 85 | 1.609.632.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 1.166.551.939 | | 1.372.922.350 | | 1.594.082.834 | | 1.736.830.617 | | 1.745.261.834 | |
| Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang beretika, demokratis, dan berbudaya. | Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang beretika, demokratis, dan berbudaya. (Persentase) | 70 | 70 | 70 | 1.166.551.939 | 72 | 1.372.922.350 | 74 | 1.594.082.834 | 79 | 1.736.830.617 | 80 | 1.745.261.834 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 900.113.212 | | 1.006.047.746 | | 1.113.102.288 | | 1.191.168.010 | | 1.274.575.379 | |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat | Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Salah Satu Anggota Rumah Tangga Berteman Dengan Orang Lain yang Berbeda Suku (%) | 75 | 80 | 81 | 900.113.212 | 82 | 1.006.047.746 | 83 | 1.113.102.288 | 84 | 1.191.168.010 | 85 | 1.274.575.379 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 1.371.526.712 | | 1.511.376.803 | | 1.658.364.065 | | 1.802.044.508 | | 1.810.792.297 | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Meningkatkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari konflik sosial (Persentase) | 70 | 70 | 70 | 1.371.526.712 | 72 | 1.511.376.803 | 74 | 1.658.364.065 | 79 | 1.802.044.508 | 80 | 1.810.792.297 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **1.275.658.570.519** | | **1.485.546.563.324** | | **1.642.003.171.217** | | **1.818.395.783.757** | | **1.890.216.800.827** | |

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah beserta wakilnya. Visi dan misi tersebut kemudian dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), sementara indikator kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diukur pada akhir masa jabatan. Dengan demikian, IKD merupakan hasil kumulatif dari pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang bersifat berdampak (impact based), serta indikator kinerja program yang berfokus pada hasil (outcome based) yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah selama periode RPJMD. Selain itu, juga ditentukan indikator serta target kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. IKU mencerminkan hasil dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu untuk periode 2025-2029. Dalam konteks RPJMD, tahun 2024 berfungsi sebagai tahun dasar (baseline), sedangkan tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD, dan tahun 2029 menandai akhir dari periode RPJMD tersebut.

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pasangkayu 2025-2030

| No | IKU | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Indeks Infrastruktur | Indeks | 69,06 | 71,04 | 72,94 | 74,97 | 76,92 | 78,88 | 80,87 |
| 2 | Indeks konektivitas | Indeks | 87,5 | 93,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk kawasan industri | Persen | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,04 | 71,66 | 72,26 | 72,84 | 73,40 | 73,94 | 74,55 |
| 5 | Indeks Pendidikan | Indeks | 60,68 | 62,19 | 63,05 | 63,91 | 64,77 | 65,63 | 66,74 |
| 6 | Indeks Kesehatan | Indeks | 77,06 (2023) | 77,76 | 78,16 | 78,56 | 78,96 | 79,36 | 79,86 |
| 7 | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 0,68 | 3,62 | 4,60 | 5,57 | 6,54 | 7,51 | 7,51 |
| 8 | Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen | 1,92 | 3,14 | 3,63 | 4,12 | 4,61 | 5,11 | 5,11 |
| 9 | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen | 25,73 | 26,00 | 27,04 | 28,08 | 29,12 | 30,16 | 30,94 |
| 10 | Tingkat Pengangguran | Persen | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,0 |
| 11 | Indeks Gini | Indeks | 0,298 | 0,290 | 0,287 | 0,284 | 0,282 | 0,280 | 0,275 |
| 12 | PDRB Per Kapita | Rp Juta | 76,80 | 81,50 | 86,76 | 92,83 | 99,55 | 107,66 | 112,302 |

| No | IKU | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 13 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5,21 | 5,02 | 4,76 | 4,51 | 4,24 | 4,00 | 3,76 |
| 14 | Angka Prevalensi Stunting | Persen | 36,7 | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 17,50 | 15,00 | 14 |
| 15 | Indeks Masyarakat Digital | Indeks | 41,51 | 42,72 | 44,40 | 46,20 | 48,10 | 50,00 | 51,53 |
| 16 | Indeks Literasi Digital | Indeks | 41,51 | 45,01 | 50,05 | 55,25 | 58,25 | 62,05 | 65,05 |
| 17 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,52 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,70 | 4,00 | 4,28 |
| 18 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | 57,90 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 72,50 | 75,00 | 79,03 |
| 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,5 | 3,55 |
| 20 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 15,40 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 58,87 |
| 21 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 93,26 | 93,50 | 93,80 | 94,20 | 94,60 | 95,00 | 95,30 |
| 22 | Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Ton Co2 e | 28 | 78.080,90 | 88.448,03 | 105.510,84 | 121.556,37 | 118.847,06 | 135.084,22 |
| 23 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 77,09 | 79,09 | 80,09 | 81,09 | 82,09 | 84 | 85 |
| 24 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | Indeks | 63,42 | 65,28 | 67,14 | 69 | 70,86 | 72,72 | 74,58 |
| 25 | Angka Kriminalitas | Kasus | 222 (2023) | 187 | 171 | 150 | 132 | 112 | 94 |

### 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan pembangunan di tingkat perangkat daerah yang mencerminkan pencapaian program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Kabupaten Pasangkayu untuk periode 2025-2029. Tahun 2024 berfungsi sebagai tahun dasar (baseline), sementara tahun 2025 menandai awal pelaksanaan RPJMD, dan tahun 2029 merupakan akhir dari periode RPJMD tersebut.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pasangkayu 2025-2030

| No | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 57,34 | 61,35 | 65,65 | 70,24 | 75,16 | 80,42 | 80,42 |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | 4,97 | 4,72 | 4,49 | 4,26 | 4,05 | 3,85 | 3,85 |
| 4 | Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum | % | 93,52 | 95,6 | 95,83 | 96,5 | 97,5 | 98,1 | 98,1 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 93,26 | 93,50 | 93,80 | 94,20 | 94,60 | 95,00 | 95,30 |

| No | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,4 | 16,4 |
| 9 | Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Ton Co2 e | 28 | 78.080,90 | 88.448,03 | 105.510,84 | 121.556,37 | 118.847,06 | 135.084,22 |
| 10 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 176,8 | 173,26 | 170,49 | 166,59 | 161,47 | 155,35 | 150,00 |
| 12 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,93 | 1,44 | 1,43 | 0,99 | 0,96 | 0,75 | 0,7 |
| 13 | Rasio Penduduk | % | 106,3 | 106,0 | 105,5 | 104,9 | 104,6 | 104,1 | 103,6 |
| 14 | Kepadatan Penduduk | Orang/ Km2 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 0,68 | 3,62 | 4,60 | 5,57 | 6,54 | 7,51 | 7,51 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,21 | 5,21 | 5,02 | 4,76 | 4,51 | 4,24 | 4,00 |
| 3 | PDRB Per Kapita | Rp Juta | 77 | 76,80 | 81,50 | 86,76 | 92,83 | 99,55 | 107,66 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 |
| 5 | Indeks Gini | Angka | 0,298 | 0,290 | 0,287 | 0,284 | 0,282 | 0,280 | 0,280 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 71,04 | 71,66 | 72,26 | 72,84 | 73,40 | 73,94 | 73,94 |
| 7 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,41 | 70,79 | 71,19 | 71,55 | 71,92 | 72,30 | 72,68 |
| 9 | Prevalensi Stunting | % | 36,7 | 22,5 | 20,3 | 18,3 | 16,4 | 14,86 | 13,59 |
| 10 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,13 | 8,19 | 8,27 | 8,28 | 8,34 | 8,39 | 8,44 |
| 11 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,09 | 12,27 | 12,41 | 12,58 | 12,69 | 12,86 | 13,00 |
| 12 | Angka Literasi SD | % | 54,49 | 59,49 | 64,49 | 69,49 | 74,49 | 79,49 | 79,49 |
| 13 | Angka Numerasi SD | % | 52,6 | 57,6 | 62,6 | 67,6 | 72,6 | 77,6 | 77,6 |
| 14 | Angka Literasi SMP | % | 60,79 | 64,79 | 68,79 | 72,79 | 76,79 | 80,79 | 80,79 |
| 15 | Angka Numerasi SMP | % | 56,88 | 58,38 | 59,88 | 61,38 | 62,88 | 64,38 | 65,88 |
| 16 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 14,87 | 50,3 | 55,3 | 60,3 | 65,3 | 70,3 | 70,3 |
| 17 | Indeks Literasi Digital | Angka | 41,51 | 45,01 | 50,05 | 55,25 | 58,25 | 62,05 | 65,05 |
| 18 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | 7,0 | 12,3 | 16,9 | 24,1 | 29,5 | 36,1 | 42,0 |
| 19 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 77,09 | 79,09 | 80,09 | 81,09 | 82,09 | 84 | 85 |
| 20 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | % | 2,94 | 4,67 | 3,01 | 3,32 | 3,58 | 4,21 | 4,21 |
| 21 | Indeks Perlindungan Anak | Angka | 63,73 | 64,5 | 68,0 | 69,07 | 69,35 | 70,01 | 70,01 |
| 22 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Angka | 69,71 | 69,80 | 69,95 | 70,15 | 70,35 | 71,50 | 71,50 |
| 23 | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,461 | 0,449 | 0,441 | 0,421 | 0,411 | 0,398 | 0,384 |
| 24 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 86,14 | 86,365 | 86,663 | 86,997 | 87,300 | 87,579 | 87,900 |
| 25 | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 14,25 | 14,78 | 15,05 | 15,26 | 15,7 | 16,25 | 16,512 |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Ketergantungan | % | 43,56 | 44,27 | 45,63 | 46,48 | 47,02 | 47,65 | 48,17 |

| No | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 25,73 | 26,00 | 27,042 | 28,081 | 29,12 | 30,16 | 30,16 |
| 3 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 5 | Rasio Kewirausahaan | % | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,24 | 1,34 | 1,82 | 2,36 |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 72,12 | 73,25 | 74,60 | 75,71 | 76,32 | 77,66 | 78,67 |
| 7 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 15,40 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % | 27,75 | 28,66 | 29,17 | 30,40 | 31,21 | 32,03 | 32,93 |
| 13 | Net Ekspor Barang dan Jasa | % | 40,34 | 41,46 | 41,76 | 42,04 | 42,47 | 43,07 | 43,34 |
| 14 | Indeks Infrastruktur | Angka | 69,06 | 71,04 | 72,94 | 74,97 | 76,92 | 78,88 | 80,87 |
| 15 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | % | 73,42 | 86,71 | 87,04 | 87,41 | 87,80 | 88,18 | 88,18 |
| 16 | Persentase Desa Mandiri | % | 3,39 | 3,66 | 3,93 | 4,20 | 4,46 | 4,73 | 5 |
| 17 | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB | % | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
| 18 | Tingkat Inflasi | % | 1,49 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 2 |
| 19 | Indeks Akses Keuangan Daerah/IKAD | Angka | 3,99 | 4,03 | 4,05 | 4,07 | 4,09 | 4,12 | 4,13 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 97,10 | 97,30 | 97,90 | 98,00 | 98,10 | 98,50 | 98,50 |
| 2 | Indeks SPBE | Angka | 2,52 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,70 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,62 | 2,7 | 2,9 | 3,01 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 4 | Indeks Integritas Nasional | Angka | 69,93 | 70,68 | 71,40 | 72,67 | 73,41 | 74,40 | 75,41 |
| 5 | Persentase Penegakan Perda | % | 94,00 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 86,7 | 90,9 | 95,00 | 97,07 | 98,05 | 98,10 | 98,10 |
| 9 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 10 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4 |
| 11 | Nilai SAKIP Daerah | Angka | 50,21 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 |

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Pasangkayu 2025-2030

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 1 | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 1.2 | APS Usia 13-15 Tahun | % | 99,63 | 99,79 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3 | APS Usia 7-12 Tahun | % | 99,63 | 99,79 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berpendidikan Tinggi | % | 10,35 | 10,49 | 12,09 | 12,48 | 13,33 | 14,33 | 14,33 | |
| 1.5 | Angka Literasi SD | % | 50,37 | 52,87 | 55,37 | 57,87 | 60,37 | 62,87 | 65,37 | |
| 1.6 | Angka Literasi SMP | % | 61,79 | 62,89 | 63,99 | 65,09 | 66,19 | 67,29 | 68,39 | |
| 1.7 | Angka Numerasi SD | % | 46,22 | 49,12 | 52,02 | 54,92 | 57,82 | 60,72 | 63,62 | |
| 1.8 | Angka Numerasi SMP | % | 56,88 | 58,38 | 59,88 | 61,38 | 62,88 | 64,38 | 65,88 | |
| 1.9 | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 27 | 33,65 | 34,65 | 35,65 | 36,65 | 37,65 | 38,65 | |
| 1.10 | Rasio Jumlah Guru per Murid SD | % | 12,7 | 12,9 | 13,4 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 16,3 | |
| 1.11 | Rasio Jumlah Guru per Murid SMP | % | 13,3 | 13,4 | 13,8 | 14,8 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | |
| 2 | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | |
| 2.1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jiwa | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | |
| 2.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 2.2 | Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | % | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | |
| 2.3 | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit malaria | Per 1000 Penduduk | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.5 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | % | 74.14 | 79.85 | 82.12 | 86.33 | 59.32 | 93.57 | 95 | |
| 2.6 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 2.7 | Persentase kecamatan dengan ketersediaan obat esensial | % | 80 | 92.5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 2.8 | Rasio Dokter per Satuan Penduduk | Per 1000 Penduduk | 0.33 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 2.9 | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk | Per 1000 Penduduk | 4.07:4.07 | 3.89:3.89 | 4.71:4.71 | 4.32:4.32 | 5.24:5.24 | 4.89:4.89 | 4.89:4.89 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 2.10 | Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan | Persentase | 84 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 83. | |
| 2.11 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 70.41 | 70.79 | 71.19 | 71.55 | 71.92 | 72.30 | 72.68 | |
| 2.12 | Angka Kematian Balita | Per 100.000 Kelahiran Hidup | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 2.13 | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | Per 1.000 Kelahiran | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 2.14 | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | 161.29 | 158.05 | 133.75 | 123.49 | 103.87 | 90.49 | 90.49 | |
| 2.1 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. | Orang | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 2.1 | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit DBD | per 100.000 penduduk | 133.6 | 119 | 107 | 97 | 88 | 80 | 77 | |
| 2.1 | Angka kesakitan (morbiditas) penyakit diare | Per 1000 Penduduk | 270 | 240 | 216 | 194 | 175 | 158 | 142 | |
| 3 | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 3.1 | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.2 | Cakupan Area Pelayanan Persampahan | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.3 | Ketataan terhadap RTRW | % | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| 3.4 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 054.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 3.5 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik | % | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | |
| 3.6 | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik | % | 42.56 | 42.17 | 43.55 | 44.94 | 46.32 | 47.71 | 49.10 | |
| 3.7 | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 67.62 | 70.82 | 72.28 | 72.28 | 74.94 | 75.60 | 75.60 | |
| 3.8 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | % | 68.46 | 68.85 | 68.85 | 69.05 | 69.25 | 69.45 | 69.65 | |
| 3.9 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak | % | 93.52 | 95.6 | 96.00 | 96.5 | 97.5 | 98.1 | 98.1 | |
| 3.10 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Persentase | 0 | 0 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| 3.11 | Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan | % | 5.95:5.95 | 7.27:7.27 | 9.22:9.22 | 9.22:9.22 | 16.28:16.28 | 21.88:21.88 | 21.88:21.88 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 3.12 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | % | 8.38:8.38 | 9.11:9.11 | 11.92:11.92 | 11.92:23.31 | 23.31:23.31 | 31.47:31.47 | 31.47:31.47 | |
| 4 | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 78.45 | 78.50 | 78.95 | 80.00 | 80.25 | 80.30 | 80.50 | |
| 4.2 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 73.07 | 73.70 | 75.39 | 75.39 | 78.15 | 79.12 | 79.12 | |
| 4.3 | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU | % | 68.97 | 68.98 | 69.20 | 69.25 | 69.50 | 70.00 | 71.00 | |
| 4.4 | Persentase Areal Kawasan Permukiman Kumuh | % | 4.49 | 4.49 | 3.86 | 3.19 | 2.84 | 2.38 | 2.03 | |
| 4.5 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 86.19 | 86.71 | 87.04 | 87.41 | 87.80 | 88.18 | 88.50 | |
| 4.6 | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | % | 68.97 | 68.98 | 69.20 | 69.25 | 69.50 | 70.00 | 70.00 | |
| 4.7 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah | % | 18.87 | 18.17 | 20.08 | 20.32 | 20.57 | 20.85 | 20.85 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | |
| 4.8 | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | % | 4.49 | 4.49 | 3.86 | 3.19 | 2.84 | 2.38 | 2.03 | |
| 4.9 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 86.19 | 86.71 | 87.04 | 87.41 | 87.80 | 88.18 | 88.18 | |
| 5 | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 5.1 | Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* | daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2 | Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 5.3 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 5.4 | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | 66.66 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
| 5.5 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 5.6 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Menit | 91.13 | 91.23 | 92.43 | 93.54 | 94.65 | 95.76 | 96 | |
| 5.7 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 94.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.8 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 90 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 | |
| 5.9 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 5.10 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 5.11 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.12 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 176.8 | 173.26 | 170.49 | 166.59 | 161.47 | 155.35 | 150.00 | |
| 5.13 | Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.14 | Persentase penanganan tanggap bencana darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.15 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.16 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.17 | Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 6.1 | Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial | % | 86 | 87 | 90 | 93 | 93 | 96 | 97 | |
| 6.2 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | 94.60 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
| 6.3 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Pasca Bencana | % | 96.40 | 97.00 | 97.00 | 98 | 98 | 100 | 100 | |
| 6.4 | Persentase PMKS yang Tertangani | % | 94.60 | 97 | 97.00 | 98 | 98 | 99 | 99 | |
| 6.5 | Persentase PMKS yang Memperoleh Jaminan Kesehatan | % | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | |
| 6.6 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 7 | 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | |
| 7.1 | Rasio Gini | Indeks | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 7.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 7.3 | Tingkat Pengangguran | % | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | |
| 7.4 | Rasio penduduk yang bekerja | % | 99 | 97.7 | 97.8 | 97.82 | 97.9 | 98.5 | 98.75 | |
| 7.5 | Rata-rata Tingkat Upah Pekerja di Sektor Formal | % | 0.01 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.1 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 7.6 | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 17.90 | 22.10 | 23.60 | 25.90 | 26.90 | 29.80 | 30.00 | |
| 7.7 | Persentase Kegiatan yang Mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah | % | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 7.8 | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
| 7.9 | Produktivitas Tenaga Kerja | % | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 97 | |
| 7.10 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 97 | |
| 8 | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | |
| 8.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 8.2 | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan | % | 100 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 95 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | | | | | | | | | |
| 8.3 | Indeks Kualitas Keluarga | Indeks | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | |
| 8.4 | Indeks Pemberdayaan Gender | % | 60.86 | 61.38 | 64.04 | 64.04 | 69.78 | 72.96 | 74 | |
| 8.5 | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | |
| 8.6 | Capaian Status Kota Layak Anak | % | 0 | 0 | 55 | 57 | 60 | 65 | 65 | |
| 9 | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | % | 12.09 | 61.63 | 110.7 | 124 | 138 | 152 | 152 | |
| 9.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 9.3 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 17.46 | 14.29 | 11.11 | 7.94 | 4.76 | 3.17 | 1.58 | |
| 9.4 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya | % | 122.5 | 128.6 | 135 | 141.8 | 148.8 | 156.3 | 160 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | | | | | | | | | |
| 9.5 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 4.97 | 4.72 | 4.49 | 4.26 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | |
| 10 | 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | % | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 10.2 | Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan | % | 67.37 | 73.90 | 80.42 | 86.94 | 93.47 | 100 | 100 | |
| 10.3 | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | % | 23.08 | 26.92 | 38.46 | 53.85 | 73.08 | 96.15 | 100 | |
| 10.4 | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah | % | 67.37 | 73.90 | 80.42 | 86.94 | 93.47 | 100.00 | 100.00 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 10.5 | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | Persentase | 32.63 | 5.03 | 21.58 | 25.18 | 25.18 | 23.02 | 23.02 | |
| 10.6 | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi | Persentase | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | |
| 10.7 | Persentase Luas Tanah Kosong yang Dikelola | % | 32.63 | 5.03 | 21.58 | 25.18 | 25.18 | 23.02 | 23.02 | |
| 11 | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| 11.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 93.26 | 93.50 | 93.80 | 94.20 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | |
| 11.2 | Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Ton Co2 e | 28 | 78.080,90 | 88.448,03 | 105.510,84 | 121.556,37 | 118.847,06 | 135.084,22 | |
| 11.3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 11.4 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | poin | 11.46 | 21.22 | 30.97 | 40.73 | 50.49 | 60.24 | 70.00 | |
| 11.5 | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R | % | 6.621 | 12.190 | 17.754 | 23.323 | 28.893 | 34.456 | 40.026 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 11.6 | Persentase volume/timbulan sampah yang ditangani | % | 22.8 | 29.27 | 33.46 | 33.46 | 44.42 | 49.33 | 49.33 | |
| 11.7 | Persentase B3 dan Limbah B3 yang Diolah | % | 60.09 | 64.24 | 68.39 | 72.55 | 76.70 | 80.85 | 85.00 | |
| 11.8 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 67.33 | 70.18 | 71.47 | 71.47 | 75.66 | 77.46 | 78 | |
| 11.9 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 74.95 | 76.87 | 76.81 | 80.06 | 82.86 | 84.41 | 86.35 | |
| 12. | 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| 12.1. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 12.2 | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| 12.3 | Rasio bayi berakte kelahiran | Rasio | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.0 | |
| 12.4 | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk | Rasio | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | |
| 12.5 | Rasio Pasangan yang Memiliki Akta Nikah | Rasio | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 12.6 | Pemanfaatan data kependudukan pencatatan sipil | Lembaga | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 12.7 | Pemanfaatan data kependudukan pendaftaran penduduk | Lembaga | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 12.8 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.3 | 1.32 | 1.35 | |
| 12.9 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | |
| 13 | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | |
| 13.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 50.21 | 60.02 | 64.76 | 70.05 | 70.50 | 80.04 | 80.10 | |
| 13.2 | Persentase Desa yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal | % | 70,02 | 72,4 | 80 | 84,45 | 90,15 | 95 | 95 | |
| 13.3 | Persentase PKK Aktif | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13.4 | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | % | 15,21 | 22,02 | 24,5 | 30 | 47,5 | 55 | 60,05 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 13.5 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | % | 0 | 0 | 54,1 | 60 | 65,15 | 70,08 | 70,08 | |
| 13.6 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | |
| 14.1 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 50.75 | 60.15 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 14.2 | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) | % | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12 | |
| 14.3 | Pertumbuhan Jumlah Penduduk | % | 1.93 | 1.44 | 1.43 | 0.99 | 0.96 | 0.75 | 0.75 | |
| 15 | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 15.1 | Indeks Konektivitas Laut | % | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 15.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 40 | 40 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | |
| 15.3 | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | % | 66.67 | 66.67 | 83.33 | 83.33 | 100 | 100 | 100 | |
| 15.4 | Persentase Ketersediaan Fasiitas Pelabuhan | % | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 43 | 43 | |
| 15.5 | Indeks Konektivitas Darat | % | 52.5 | 52.5 | 61.25 | 61.25 | 70 | 70 | 70 | |
| 16 | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| 16.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |
| 16.2 | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi | % | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah | | | | | | | | | |
| 16.3 | Indeks Literasi Digital | Angka | 41.51 | 45.01 | 50.05 | 55.25 | 58.25 | 62.05 | 65.05 | |
| 16.4 | Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | Indeks | 5.6 | 6.05 | 6.50 | 6.90 | 7.20 | 7.30 | 7.45 | |
| 16.5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 2.52 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 16.6 | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Poin | 46.86 | 52.25 | 65.50 | 68.50 | 70.00 | 72.50 | 75.50 | |
| 16.7 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 16.8 | Indeks Domain Kebijakan SPBE | Indeks | 2.52 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.80 | |
| 16.9 | Persentase Layanan Publik yang Dilaksanakan secara Online | % | 85 | 90 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | |
| 16.10 | Indeks Domain Layanan SPBE | Indeks | 3.69 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | |
| 16.11 | Indeks Domain Manajemen SPBE | Indeks | 1.00 | 1.50 | 2.15 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 3.55 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 16.12 | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Indeks | 1.20 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | |
| 16.13 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 16.14 | Persentase Dokumen Publik yang Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Secara Online | % | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
| 17 | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | |
| 17.1 | Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| 17.2 | Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 17.3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 17.4 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| 17.5 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Ekspor | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 17.6 | Persentase Koperasi Aktif | % | 69.70 | 71.79 | 72.18 | 76.21 | 80.51 | 82.45 | 82.45 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 18 | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | % | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | |
| 18.2 | Nilai realisasi penanaman modal | Milyar Rupiah | 300 | 307.5 | 315 | 323 | 331 | 339 | 347 | |
| 18.3 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Pelaku Usaha | 1800 | 1890 | 1985 | 2084 | 2188 | 2297 | 2411 | |
| 18.4 | Persentase Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi | % | 15.38 | 16.15 | 16.96 | 17.80 | 18.69 | 19.63 | 20.61 | |
| 18.5 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan | % | 73.00 | 76.65 | 80.48 | 84.50 | 88.73 | 93.17 | 97.83 | |
| 18.6 | persentase realisasi total terhadap target investasi | % | 76.72 | 78.64 | 80.60 | 82.62 | 84.64 | 86.80 | 88.97 | |
| 18.7 | Persentase jumlah kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terinplementasikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 18.8 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 19 | 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 19.1 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19.2 | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19.3 | Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | |
| 19.4 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 3.25 | |
| 19.5 | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam | % | 50 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Perencanaan dan Kebijakan | | | | | | | | | |
| 20 | 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| 20.1 | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi | Perangkat Daerah | 25 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 20.2 | Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Persandian dalam Perencanaan dan Kebijakan | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 21 | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 21.1 | jumlah karyawan budaya yang dinventariskan dan di revitalisasi | Objek | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 21.2 | Jumlah Festival Kesenian Tradisional yang Diselengarakan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 21.3 | Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | Unit | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 21.4 | Jumlah Karya Budaya yang Dinventarisasi dan Direvitalisasi | Angka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 21.5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 22 | 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | |
| 22.1 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | Orang | 1084 | 949 | 1191 | 1191 | 1639 | 1859 | 1859 | |
| 22.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 22.3 | Jumlah Koleksi Judul Buku dan Naskah Kuno di Perpustakaan Daerah | Buah | 6242 | 5777 | 5794 | 5794 | 5822 | 5834 | 5834 | |
| 23 | 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | |
| 23.1 | Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan sesuai dengan Ketentuan Retensi Arsip | % | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | |
| 23.2 | Persentase OPD yang Mengelola Arsip secara Baku | % | 72.72 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 24 | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 24.1 | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 16527.359 | 16671.15 | 16871.2 | 17124.27 | 17432.5 | 17763.72 | 18154.52 | |
| 24.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.14 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| 24.3 | Produksi Olahan Hasil Kelautan dan perikanan | Kg | 13318 | 13717 | 14169.7 | 14679.8 | 15252.3 | 15892.9 | 16608.1 | |
| 24.4 | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 8623.4 | 8653.7 | 8705.6 | 8783.95 | 8889.36 | 9002.7 | 9164.75 | |
| 25 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 25.1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | Orang | 120.192 | 121.500 | 122.875 | 125.000 | 128.200 | 129.350 | 129.350 | |
| 25.2 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Pembinaan | % | 70 | 50 | 65 | 75 | 80 | 95 | 95 | |
| 25.3 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing | Orang | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 25.4 | Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan | Hari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 25.5 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Orang | 120.192 | 131.190 | 134.642 | 139.739 | 143.820 | 145.820 | 150.000 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 25.6 | Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif | % | 65 | 95 | 100 | 75 | 80 | 90 | 90 | |
| 26 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 26.1 | persentase Produksi hasil pertanian terhadap PDRB | % | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |
| 26.2 | persentase kelompok tani yang dibina | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
| 26.3 | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian | % | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | |
| 26.4 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 54.15 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | |
| 26.5 | Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |
| 26.6 | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian | % | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | |
| 26.7 | Cakupan kelompok tani yang mendapat penyuluhan pertanian | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 26.8 | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | % | 80 | 82 | 83 | 85 | 90 | 90.50 | 98.79 | |
| 26.9 | Cakupan Petani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 26.10 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 26.11 | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 26.12 | Persentase Petani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 27 | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
| 27.1 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabil) Satuan | % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 27.2 | Nilai Ekspor Bersih (Net Ekspor) | triliun rupiah | 6.28 | 7.45 | 7.53 | 8.76 | 8.87 | 10.06 | 10.06 | |
| 27.3 | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 28 | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| 28.1 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | % | 25.73 | 26.00 | 27.042 | 28.081 | 29.12 | 30.16 | 30.16 | |
| 28.2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 26.42 | 26.57 | 26.72 | 26.87 | 27.02 | 27.17 | 27.32 | |
| 29 | 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | |
| 29.1 | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya | % | 34.49 | 21.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 21.67 | |
| 29.2 | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan | % | 34.49 | 21.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 21.67 | |
| 30 | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 30.1 | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Nilai | 0 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| 30.2 | Persentase Pelaksanaan Kajian Kelayakan Ekonomi, Analisis Pasar dan Pemasaran BUMD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 30.3 | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.4 | Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati/Wakil Bupati | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.5 | Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Yang Dibentuk, Dimonitor dan Dievaluasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.6 | Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran yang disusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.7 | Persentase Badan Usaha Milik Daerah Yang Dibentuk, Dimonitor dan Dievaluasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 30.8 | Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial dan Batas Wilayah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.9 | Persetase pelayanan rumah tangga pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.10 | Persentase Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.11 | Pesentase Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.12 | Persentase Bantuan (Hibah) Uang Kepada Lembaga Keagamaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.13 | Persentase Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.14 | Persentase Penyelesaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | | | | | | | | | |
| 30.15 | Persentase Bantuan (Hibah) Uang Kepada Rumah Ibadah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.16 | Persentase Perangkat Daerah Yang telah Memiliki SOP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.17 | Persentase Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.18 | Persentase Masyarakat Yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Keagamaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.19 | Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman (Zona | Nilai | 0 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| 30.20 | Persentase pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 30.21 | Persentase pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.22 | Persentase Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Keagamaan (MTQ dan STQH) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.23 | Persentase Produk Hukum yang dihasilkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.24 | Persentase Pembinaan kepatuhan terhadap regulasi kwalitas proses pengadaan dan kinerja UKPBJ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.25 | Indeks tata Kelola pengadaan (ITKP) | Nilai | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| 30.26 | Persentase penanganan kasus yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.27 | Indeks pelayanan publik | Nilai | 0 | 3.02 | 3.06 | 3.08 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
| 30.28 | Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati Tentang kelembagaan yang disusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 30.29 | Persentase peserta yang mengikuti Pembinaan Desa Sadar Hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.30 | Persentase Pengendalian dan evaluasi program Pembangunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.31 | Persentase Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pembangunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.32 | Penilaian Kabupaten Peduli HAM | % | 0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 30.33 | Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan kinerja | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.34 | Persentase kinerja pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.35 | Persentase hasil pemantauan ketersediaan BBM dan tabung LPG | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.36 | Penilaian Jaringan Dokumentasi | Nilai | 0 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Informasi Hukum (JDIH) | | | | | | | | | |
| 30.37 | Persentase hasil pemantauan tambang galian C dan mineral | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.38 | Persentase potensi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan rencana pengelolaan daerah aliran Sungai (DAS) serta konserpasi dan reboisasi hutan lindung | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.39 | Persentase Kontrak/MOU Kerja sama Daerah yang dibuat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30.40 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30.41 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30.42 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan | Dokumen | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | | | | | | | | | |
| 30.43 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| 30.44 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 321 | 323 | 323 | 324 | 324 | 326 | |
| 30.45 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| 30.46 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 30.47 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 30.48 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30.49 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30.50 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Perekonomian dan Pembangunan yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| 30.51 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 0 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 30.52 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | |
| 31.1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 31.2 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 31.3 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 31.4 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 31.5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 32 | 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | | | | |
| 32.1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 32.2 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 32.3 | Persentase Perencanaan | % | 80 | 87.5 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 32.4 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 32.5 | Persentase Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (9) | (10) | (12) |
| | dengan RKPD dan RPJMD | | | | | | | | | |
| 32.6 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 32.7 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 32.8 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 | 5.02 - KEUANGAN | | | | | | | | | |
| 33.1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | |
| 33.2 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 33.3 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33.4 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | % | 5.3 | 6.01 | 6.08 | 7.0 | 7.06 | 7.9 | 8.0 | |
| 33.5 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | % | 30 | 31 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 33.6 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 154.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33.7 | Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Selesai Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33.8 | Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33.9 | Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD | % | 6.32 | 6.46 | 6.76 | 6.89 | 7.82 | 8.66 | 8.70 | |
| 33.10 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 34 | 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | |
| 34.1 | Persentase ASN dengan SKP Minimal Bernilai Baik | % | 95.2 | 95.5 | 96 | 96 | 96.6 | 97 | 97 | |
| 34.2 | Nilai SAKIP RB yang mengalami peningkatan | % | 54.15 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | |
| 34.3 | Nilai Indeks System Merit yang meningkat | Indeks | 145.5 | 151 | 166 | 197 | 229 | 250 | 261 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 34.4 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | |
| 34.5 | Indeks System Merit | Indeks | 145.5 | 151 | 166 | 197 | 229 | 250 | 261 | |
| 34.6 | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu | Nilai | 54.15 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | |
| 35 | 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | |
| 35.1 | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | % | 0.92 | 1.13 | 1.36 | 1.36 | 1.8 | 2.02 | 2.02 | |
| 35.2 | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | % | 0.92 | 1.13 | 1.36 | 1.36 | 1.8 | 2.02 | 2.02 | |
| 36 | 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | |
| 36.1 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | % | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 15.60 | 15.65 | 15.70 | |
| 36.2 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | % | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 15.60 | 15.65 | 15.70 | |
| 37 | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 37.1 | Persentase Pengawasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 37.2 | Persentase pendampingan dan asistensi pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 37.3 | Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 37.4 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 37.5 | Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Skor | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | |
| 37.6 | Level kapabilitas APIP berdasarkan penilaian BPKP | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 37.7 | Indeks Survei Penilaian Integritas | Indeks | 69.63 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 37.8 | Skor MCP Kabupaten Pasangkayu | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 37.9 | Persentase TLHP yang ditindaklanjuti OPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 37.10 | Persentase pelaksanaan | Laporan | 191 | 191 | 200 | 209 | 218 | 227 | 236 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | pengawasan sesuai rencana | | | | | | | | | |
| 37.11 | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 37.12 | Persentase OPD yang Telah Mencapai Maturitas SPIP Level 2 ke atas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 37.13 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 37.14 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 55 | 61 | 63 | 68 | 71 | 75 | |
| 38 | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 38.1 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.2 | Pelayanan Prima | % | 60 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.3 | Pelayanan Prima | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.4 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.5 | Pelayanan Prima | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.60 | |
| 38.6 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.7 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 38.8 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60 | 60.05 | 60.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.9 | Pelayanan Prima | % | 60 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.10 | Pelayanan Prima | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.11 | Pelayanan Prima | % | 65.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.12 | Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel | % | 60.00 | 60.05 | 65.75 | 65.75 | 66.00 | 66.25 | 66.25 | |
| 38.13 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.14 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.15 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 66.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.16 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % | 60 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.00 | 66.50 | 66.50 | |
| 38.17 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % | 60.00 | 60.05 | 65.05 | 65.75 | 66.50 | 66.75 | 66.75 | |
| 38.18 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | % | 62 | 62 | 62.25 | 62.65 | 63 | 63.10 | 63.10 | |
| 38.19 | Meningkatnya pendapatan, taraf | % | 75.00 | 75.00 | 75.08 | 75.11 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | hidup dan akses layanan dasar | | | | | | | | | |
| 38.20 | Meningkatnya pendapatan, taraf hidup dan akses layanan dasar | % | 75.00 | 75.00 | 75.05 | 75.08 | 75.11 | 75.15 | 75.15 | |
| 38.21 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya | % | 60.00 | 60.00 | 60.25 | 60.50 | 61.00 | 61.50 | 61.50 | |
| 38.22 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya | % | 60 | 60 | 60.25 | 60.50 | 61 | 61.50 | 61.50 | |
| 38.23 | Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan | % | 75.00 | 75.00 | 75.15 | 75.50 | 76.20 | 76.80 | 76.80 | |
| 38.24 | Meningkatnya pendapatan, taraf hidup dan akses layanan dasar | % | 75 | 75 | 75.05 | 75.08 | 75.11 | 75.15 | 75.15 | |
| 38.25 | Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan | % | 75 | 75 | 75.15 | 75.50 | 76.20 | 76.80 | 76.80 | |
| 38.26 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | % | 62.00 | 62.00 | 62.25 | 62.65 | 63.00 | 63.10 | 63.10 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 38.27 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | % | 62.00 | 62.00 | 62.25 | 62.65 | 63.00 | 6310 | 63.10 | |
| 38.28 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | % | 62 | 62 | 62.25 | 62.65 | 63.00 | 63.10 | 63.10 | |
| 38.29 | Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan | % | 75 | .75 | 75.15 | 75.50 | 76.20 | 76.80 | 76.80 | |
| 38.30 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | % | 62.00 | 62.00 | 62.25 | 62.65 | 63.00 | 63.10 | 63.10 | |
| 38.31 | Meningkatnya pendapatan, taraf hidup dan akses layanan dasar | % | 75.00 | 75.00 | 75.05 | 75.08 | 75.11 | 75.15 | 75.15 | |
| 38.32 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya | % | 60.00 | 60.00 | 60.25 | 60.50 | 61.00 | 61.50 | 61.50 | |
| 38.33 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Rakyat yang Dikoordinasikan | | | | | | | | | |
| 38.34 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83.50 | |
| 38.35 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.36 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 38.37 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 38.38 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.39 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 43 | |
| 38.40 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38.41 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.42 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan | Kali | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | |
| 38.43 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.44 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 38.45 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.46 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 38.47 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 38.48 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Kali | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 38.49 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan | Kali | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Pemerintahan Umum | | | | | | | | | |
| 38.50 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kali | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 38.51 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kali | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 38.52 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kali | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | |
| 38.53 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 38.54 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.55 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 38.56 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan | Kali | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Pemerintahan Umum | | | | | | | | | |
| 38.57 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.58 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 38.59 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 38.60 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.61 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.62 | Jumlah Produk Kebijakan terkait | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | | | | | | | | | |
| 38.63 | Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38.64 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.35 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.75 | 61.75 | |
| 38.65 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.35 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.75 | 61.95 | |
| 38.66 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.35 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.75 | 61.96 | |
| 38.67 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 85 | 86 | 86.3 | 86.6 | 87 | 88 | 89 | |
| 38.68 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.75 | 61.95 | 61.95 | |
| 38.69 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.35 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.96 | 61.96 | |
| 38.70 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 59.03 | 60.35 | 60.75 | 60.95 | 61.45 | 61.75 | 61.95 | |
| 38.71 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum | Kali | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | |
| 38.72 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 38.73 | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum | Kali | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 38.74 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 55 | 55 | |
| 38.75 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 38.76 | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 38.77 | Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 39 | 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | |
| 39.1 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) | (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39.2 | Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Salah Satu Anggota Rumah Tangga Berteman Dengan Orang Lain yang Berbeda Suku | % | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | |

| No | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(9)* | *(10)* | *(12)* |
| 39.3 | Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Ada Sekelompok Orang Dari Agama Lain yang Melakukan Kegiatan yi Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal | % | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
| 39.4 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 39.5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 54.15 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |

### 4.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup enam bidang pelayanan dasar yang wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban, serta pelayanan masyarakat dan sosial. Semua indikator SPM sepenuhnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 4.5
Penetapan Indikator SPM Kabupaten Pasangkayu 2025-2029

| No | SPM | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | Persen | 94,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan | Persen | 92,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 93,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 87,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 85,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 81,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 95,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 97,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 60,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | SPM | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2.8 | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | persen | 85,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 98,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | persen | 75,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 98,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan | Persen | 78,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persen | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 68,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 17,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TRANTIBUMLINMAS** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Jumlah Warga Negara yang | Persen | 96,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | SPM | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | | | | |
| 5.4 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti | Persen | 94,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti | Persen | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti | Persen | 93,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | Persen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Persen | 99,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penetapan indikator TPB sepenuhnya didasarkan pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029.

Fokus indikator TPB pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 terdapat pada Prioritas 1 sebanyak 12 Indikator. Sebagian besar indikator tersebut termasuk pilar sosial sebanyak 9 indikator, dan 3 pilar lingkungan. Sebagian besar indikator belum mencapai target, bahkan trennya menjauhi atau belum mencapai target nasional hingga 2024. Walaupun indikator pada prioritas 1 ini hanya berfokus pada 12 indikator, namun indikator tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat pada beberapa indikator TPB yang lain.

Tabel 4.6
Penetapan Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu 2025-2029

| No | Kode | TPB | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Per 100.000 kelahiran hidup | 161,00 | 248,61 | 246,42 | 244,49 | 242,77 | 241,21 | 239,78 |
| 2 | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Per 1.000 kelahiran hidup | 19,80 | 16,48 | 16,16 | 15,89 | 15,64 | 15,42 | 15,21 |
| 3 | 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Per 1.000 kelahiran hidup | 18,10 | 15,81 | 15,24 | 14,74 | 14,28 | 13,88 | 13,50 |
| 4 | 3.3.1* | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Per 1.000 penduduk | 8,81 | 10,85 | 11,75 | 12,54 | 13,25 | 13,89 | 14,48 |
| 5 | 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Per 100.000 penduduk | 93,00 | 199,59 | 210,15 | 219,47 | 227,80 | 235,34 | 242,22 |
| 6 | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Per 1.000 penduduk | 1.315,00 | 962,48 | 1.017,15 | 1.065,37 | 1.108,51 | 1.147,53 | 1183,15 |
| 7 | 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | % | 105,44 | 104,41 | 103,59 | 102,87 | 102,23 | 101,65 | 101,12 |
| 8 | 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | % | 97,10 | 100,88 | 102,82 | 104,52 | 106,04 | 107,42 | 108,68 |
| 9 | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar | % | 102,06 | 100,62 | 100,67 | 100,71 | 100,74 | 100,78 | 100,81 |

| No | Kode | TPB | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | | | | | | | | |
| 10 | 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | % | 70,23 | 74,32 | 76,06 | 77,59 | 78,97 | 80,21 | 81,35 |
| 11 | 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | % | 70,23 | 74,32 | 76,06 | 77,59 | 78,97 | 80,21 | 81,35 |
| 12 | 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | % | 60,57 | 60,20 | 60,43 | 60,63 | 60,80 | 60,96 | 61,11 |

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan Substansial

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada sejumlah peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan konsep perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029, dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pasangan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu masa bakti 2025-2030. RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke ddepan.

## 5.2. Pedoman Transisi

Masa peralihan jabatan dari satu Kepala Daerah (KDH) ke KDH yang lain disebut masa transisi, yang berimplikasi terhadap praktik perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2030. Mengingat masa jabatan Bupati/Wakil Bupati tidak persis sama dengan masa berlaku RPJMD, maka pada masa transisi, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2030 yang disusun pada tahun 2029 atau setelah RPJMD tahun 2025-2029 berakhir.

Pedoma transisi ini mengatur bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2030 akan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045, tahapan kedua, untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yaitu RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2030-2034.

## 5.3. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Periode 2025-2030 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasangkayu berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu bertugas menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029.
3. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
5. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pasangkayu untuk keseluruhan

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

7. RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
8. Manajemen risiko penting dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## 5.4. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana benar-benar telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan pengendalian dilakukan setiap tahun berjalan selama periode RPJMD, sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan selama dua kali, yaitu di pertengahan periode RPJMD dan di akhir periode RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pasangkayu, atas nama Bupati Kabupaten Pasangkayu. Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, BAPPEDA berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pasangkayu.

Hasil dari pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan rencana. Selain itu, hasil dari pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi dan memberi umpan balik (*feedback*) bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu berikutnya (tahun 2030-2034)




# PEMERINTAH
# KABUPATEN PASANGKAYU